PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN RENCANA





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR PETA ..... **vi**

DAFTAR PETA, GAMBAR DAN DIAGRAM ..... **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1-1

1.2. Prinsip dan Azaz Penataan Ruang 1-2

1.2.1. Prinsip Penataan Ruang 1-2

1.2.2. Azaz Penataan Ruang 1-3

1.3. Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 1-4

1.4. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan RTRW Kabupaten Lamongan 1-5

1.5. Ruang Lingkup 1-5

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah 1-5

1.5.2. Ruang Lingkup Kegiatan 1-6

1.6. Dasar Hukum 1-6

1.7. Ketentuan Umum 1-16

1.8. Dimensi Waktu Perencanaan 1-25

1.9. Gambaran Umum 1-25

1.9.1. Wilayah Administrasi 1-25

1.9.2. Kondisi Fisik Dasar 1-28

1.9.2.1. Topografi 1-28

1.9.2.2. Kelerengan 1-28

1.9.2.3 Geologi 1-29

1.9.2.4 Jenis Tanah 1-31

1.9.2.5 Klimatologi 1-38

1.9.2.6 Hidrologi 1-38

1.9.2.7 Kemampuan Tanah 1-48
1.9.2.8 Hidrogeologi 1-49
1.9.2.9 Kawasan Rawan Bencana 1-52
1.9.3. Kependudukan 1-65
1.9.3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk 1-65
1.9.3.2. Kepadatan Penduduk 1-65
1.9.3.3. Laju Pertumbuhan Penduduk 1-71
1.9.3.4. Jumlah Penduduk Menurut Agama 1-71
1.9.3.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Tingkat Pendidikan 1-71
1.9.3.6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 1-75
1.9.4. Penggunaan Lahan 1-75
1.9.5. Ijin Pemanfaatan Ruang 1-81
1.9.6. Sistem Transportasi 1-89
1.9.6.1. Sistem Transportasi Darat 1-89
1.9.6.2. Sistem Transportasi Moda Penyeberangan 1-117
1.9.6.3. Sistem Transportasi Moda Laut 1-117
1.9.7. Energi/Kelistrikan 1-119
1.9.8. Telekomunikasi 1-101
1.9.9. Jaringan Air Minum 1-124
1.9.9.1. Spam Ibukota Kabupaten Lamongan 1-126
1.9.9.2. Ibukota Kecamatan 1-131
1.9.9.3. Perdesaan 1-132
1.9.10. Persampahan 1-134
1.9.10.1. Timbulan Dan Komposisi Sampah 1-134
1.9.10.2. Profil Operasional 1-135
1.9.11. Air Limbah 1-143
1.9.12. Jaringan Drainase 1-153
1.9.13. Jaringan Irigasi 1-162
1.9.14. Fasilitas Umum 1-164
1.9.15. Perekonomian 1-172
1.9.15.1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan 1-172
1.9.15.2. Sektor Perkebunan 1-173
1.9.15.3. Sektor Perikanan 1-202

1.9.15.4. Sektor Peternakan 1-208
1.9.15.5. Sektor Kehutanan 1-209
1.9.15.6. Sektor Pariwisata 1-215
1.9.15.7. Sektor Pertambangan 1-230
1.9.15.8. Sektor Industri 1-234
1.9.15.9. PDRB Kabupaten Lamongan 1-235
1.9.16. IPM Kabupaten Lamongan 1-241
1.9.17. Keuangan Pembangunan Daerah 1-241
1.9.18. Kelembagaan Pembangunan 1-242
1.9.19. Data Dan Informasi Pertanahan 1-245
1.9.20. Potensi, Permasalahan dan Issue Strategis 1-247

BAB 2 TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

2.1. Visi dan Misi Penataan Ruang Kabupaten Lamongan 2-1
2.2. Tujuan penataan Ruang Kabupaten Lamongan 2-1
2.3. Kebijakan Dan Strategi 2-1
2.3.1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 2-1
2.3.2. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 2-2

BAB 3 RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN LAMONGAN

3.1. Sistem Perdesaan 3-1
3.2. Sistem Perkotaan 3-3
3.3. Penetapan Kawasan Perdesaan Dan Perkotaan 3-4
3.4. Wilayah Pengembangan 3-17
3.5. Sistem Jaringan Prasarana 3-47
3.5.1. Sistem Jaringan Transportasi 3-47
3.5.1.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat 3-47
3.5.1.1.1. Sistem Jaringan Jalan 3-47
3.5.1.1.2. Sistem Jaringan Kereta Api 3-57
3.5.1.1.3. Sistem Jaringan Sungai, Danau Dan Penyeberangan 3-61
3.5.1.2. Sistem Jaringan Transportasi Laut 3-61
3.5.1.3. Sistem JaringanTransportasi Udara 3-66
3.5.2. Sistem Jaringan Energi 3-68
3.5.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi 3-78

3.5.4. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air 3-84
3.5.5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 3-91
3.5.5.1. Sistem Penyediaan Air Minum 3-91
3.5.5.1.1. Rencana Kebutuhan Air Bersih 3-91
3.5.5.1.2. Rencana Sistem Pelayanan 3-101
3.5.5.1.3. Rencana Sistem Penyediaan Air Minum 3-102
3.5.5.1.4. Rencana Pengembangan Peningkatan Pelayanan PDAM 3-108
3.5.5.1.5. Rencana Pengembangan Kapasitas Sumber Air Baku 3-110
3.5.5.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah 3-112
3.5.5.3. Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 3-113
3.5.5.4. Sistem Persampahan 3-115
3.5.5.5. Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana 3-145
3.5.5.6. Sistem Drainase 3-152

BAB 4 RENCANA POLA RUANG

4.1. Rencana Kawasan Peruntukan Lindung 4-1
4.1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 4-1
4.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat 4-2
4.1.2.1. Kawasan Sempadan Pantai 4-2
4.1.2.2. Kawasan Sempadan Sungai 4-3
4.1.2.3. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 4-4
4.1.3. Kawasan Lindung Geologi 4-5
4.1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam 4-6
4.1.4.1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 4-6
4.1.4.2. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang 4-9
4.1.4.3. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan 4-10
4.1.4.4. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor 4-14
4.1.4.5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan 4-16
4.1.4.6. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi 4-17
4.1.5. Kawasan Cagar Budaya 4-22
4.1.6. Kawasan Ekosistem Mangrove 4-22
4.1.7. Kawasan Ruang Terbuka Hijau 4-23

4.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Budidaya 4-23
4.2.1. Kawasan Hutan Produksi 4-23
4.2.2. Kawasan Pertanian 4-26
4.2.2.1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 4-26
4.2.2.2. Kawasan Pertanian Hortikultura 4-29
4.2.2.3. Kawasan Perkebunan 4-30
4.2.2.4. Kawasan Peternakan 4-30
4.2.3. Kawasan Perikanan 4-31
4.2.4. Kawasan Pertambangan 4-32
4.2.5. Kawasan Peruntukan Industri 4-34
4.2.6. Kawasan Pariwisata 4-35
4.2.7. Kawasan Permukiman 4-37
4.2.8. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan 4-38
4.2.9. Kawasan Transportasi 4-38

BAB 5 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

5.1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 5-2
5.2. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya 5-4
5.3. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 5-4

BAB 6 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

6.1. Arahan Pemanfaatan Ruang 6-1
6.2. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten 6-2
6.3. Perwujudan Rencana Struktur Ruang 6-2
6.4. Perwujudan Rencana Pola Ruang 6-4
6.5. Perwujudan Kawasan Strategis 6-5

BAB 7 KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

7.1. Ketentuan Pengendalian 7-1
7.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 7-1
7.2.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Stuktur Ruang 7-1
7.2.1.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan .. 7-1
7.2.1.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Sistem Jaringan Prasarana 7-3
7.2.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang 7-11

7.2.2.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung 7-11
7.2.2.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya 7-15
7.2.3. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis 7-18
7.3. Ketentuan Perizinan 7-19
7.3.1. Izin Pemanfaatan Ruang 7-19
7.3.2. Prosedur Pemberian Izin 7-20
7.4. Ketentuan Insentif dan Disinsentif 7-20
7.5. Arahan Sanksi 7-21

BAB 8 HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

8.1. Hak Masyarakat 8-1
8.2. Kewajiban Masyarakat 8-1
8.3. Peran Masyarakat 8-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kabupaten Lamongan 1-26

Tabel 1.2. Luas Wilayah Menurut Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kabupaten Lamongan 1-29

Tabel 1.3. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Lamongan 1-31

Tabel 1.4. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Lamongan 1-35

Tabel 1.5. Curah Hujan di Kabupaten Lamongan 1-38

Tabel 1.6. Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Lamongan 1-39

Tabel 1.7 Inventarisasi Waduk/Embung di Kabupaten Lamongan 1-40

Tabel 1.8. Rawa di Kabupaten Lamongan 1-41

Tabel 1.9. Daerah Sulit Air di Kabupaten Lamongan 1-42

Tabel 1.10. Luas Wilayah Berdasarkan Kemampuan Tanah 1-48

Tabel 1.11. Luas Wilayah Berdasarkan Hidrogeologi Kabupaten Lamongan 1-50

Tabel 1.12. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan 1-52

Tabel 1.13. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Lamongan 1-53

Tabel 1.14. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamongan 1-55

Tabel 1.15. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Lamongan 1-56

Tabel 1.16. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kabupaten Lamongan 1-57

Tabel 1.17. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lamongan 1-58

Tabel 1.18. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2017 1-66

Tabel 1.19. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1-68
Tabel 1.20. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017 1-71
Tabel 1.21. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1-71
Tabel 1.22. Jumlah Penduduk Menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1-73
Tabel 1.23. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1-76
Tabel 1.24. Luasan Kawasan Hutan Kabupaten Lamongan disesuaikan dengan SK MenLHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2017 1-77
Tabel 1.25. Luasan Kawasan Hutan Kabupaten Lamongan Berdasarkan KPH Perhutani 1-77
Tabel 1.26. Penggunaan Lahan di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1-80
Tabel 1.27. Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Utara 1-82
Tabel 1.28. Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Tengah 1-92
Tabel 1.29. Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Selatan 1-99
Tabel 1.30. Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Barat 1-101
Tabel 1.31. Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Lamongan 1-104
Tabel 1.32. Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Lamongan 1-110
Tabel 1.33. Jumlah Terminal di Kabupaten Lamongan 1-110
Tabel 1.34. Jumlah Kendaraan yang Masuk dan Keluar Terminal Lamongan 1-111
Tabel 1.35. Jumlah Halte di Kabupaten Lamongan 1-114
Tabel 1.36. Jumlah Stasiun di Kabupaten Lamongan 1-115
Tabel 1.37. Jumlah Penumpang Kereta Api Kabupaten Lamongan 1-115
Tabel 1.38. Jumlah Pelanggan, Kapasitas Terpasang, dan Listrik yang Didistribusikan Wilayah Lamongan di Kabupaten Lamongan. 1-119
Tabel 1.39. Jumlah BTS di Kabupaten Lamongan 1-122
Tabel 1.40. Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Lamongan 1-124
Tabel 1.41. Pompa Intake IPA Babat 1-126
Tabel 1.42. Pipa Transmisi IPA Babat 1-127
Tabel 1.43. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1-134
Tabel 1.44. Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan 1-136

Tabel 1.45. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kabupaten Lamongan 1-141
Tabel 1.46. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Lamongan 1-145
Tabel 1.47. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik 1-149
Tabel 1.48. Persebaran IPAL Skala Kecil/ Rumah Tangga di Kecamatan Lamongan 1-150
Tabel 1.49. Lokasi MCK 1-152
Tabel 1.50. Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan 1-153
Tabel 1.51. Luas Irigasi sesuai dengan Seksi Pengairan Kabupaten Lamongan 1-162
Tabel 1.52. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat TK di Kabupaten Lamongan 1-164
Tabel 1.53. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SD di Kabupaten Lamongan 1-166
Tabel 1.54. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SMP di Kabupaten Lamongan 1-166
Tabel 1.55. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SMA di Kabupaten Lamongan 1-167
Tabel 1.56. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat Perguruan Tinggi di Kabupaten Lamongan 1-168
Tabel 1.57. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan 1-169
Tabel 1.58. Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Lamongan 1-170
Tabel 1.59. Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kabupaten Lamongan 1-172
Tabel 1.60. Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-175
Tabel 1.61. Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-176
Tabel 1.62. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-177
Tabel 1.63. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kacang Tanah Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-178
Tabel 1.64. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kacang Hijau Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-179
Tabel 1.65. Produksi dan Produktivitas Tanaman Ubi Kayu Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-180

Tabel 1.66. Produksi dan Produktivitas Tanaman Ubi Jalar Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-181
Tabel 1.67. Produksi dan Produktivitas Tanaman Tebu Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-182
Tabel 1.68. Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau Jawa Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-183
Tabel 1.69. Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau Virginia Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-183
Tabel 1.70. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kenaf Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-184
Tabel 1.71. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kapas Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-184
Tabel 1.72. Produksi dan Produktivitas Tanaman Wijen Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-185
Tabel 1.73. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kelapa Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-185
Tabel 1.74. Produksi dan Produktivitas Tanaman Jambu Mente Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-186
Tabel 1.75. Produksi dan Produktivitas Tanaman Siwalan Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-186
Tabel 1.76. Produksi dan Produktivitas Tanaman kemiri Sunan Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-187
Tabel 1.77. Produksi dan Produktivitas Tanaman Cabe Jamu Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-187
Tabel 1.78. Produksi dan Produktivitas Tanaman Jarak Pagar Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-188
Tabel 1.79. Produksi dan Produktivitas Tanaman Tomat Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-188
Tabel 1.80. Produksi dan Produktivitas Tanaman Terung Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-189
Tabel 1.81. Produksi dan Produktivitas Tanaman Sawi Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-190
Tabel 1.82. Produksi dan Produktivitas Tanaman Labu Siam Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-191
Tabel 1.83. Produksi dan Produktivitas Tanaman Ketimun Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-192
Tabel 1.84. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kangkung Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-193
Tabel 1.85. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kacang Panjang Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-194

Tabel 1.86. Produksi dan Produktivitas Tanaman Cabe Rawit Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-195
Tabel 1.87. Produksi dan Produktivitas Tanaman Cabe Besar Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-196
Tabel 1.88. Produksi dan Produktivitas Tanaman Bayam Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-197
Tabel 1.89. Produksi dan Produktivitas Tanaman Bawang Merah Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-198
Tabel 1.90. Produksi dan Produktivitas Tanaman Blewa Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-199
Tabel 1.91. Produksi dan Produktivitas Tanaman Melon Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-200
Tabel 1.92. Produksi dan Produktivitas Tanaman Semangka Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan 1-201
Tabel 1.93. Potensi Perikanan Darat di Kabupaten Lamongan 1-202
Tabel 1.94. Potensi Perikanan Laut di Kabupaten Lamongan 1-203
Tabel 1.95. Rekapitulasi Produksi Budidaya Ikan Kab. Lamongan Tahun 2017 1-203
Tabel 1.96. Rekapitulasi Produksi Ikan dari Perairan Laut Kab. Lamongan Tahun 2017 1-204
Tabel 1.97. Jumlah Perahu/Kapal di Kab. Lamongan Th. 2017 1-205
Tabel 1.98. Kegiatan Pengolahan Hasil Laut di Kab. Lamongan Th. 2017 1-205
Tabel 1.99. Produksi Garam Rakyat di Kab. Lamongan 1-206
Tabel 1.100. Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kab. Lamongan 1-208
Tabel 1.101. Populasi Ternak Unggas di Kab. Lamongan 1-209
Tabel 1.102. Produksi Sektor Kehutanan di Kab. Lamongan 1-209
Tabel 1.103. Kunjungan Wisata di Kab. Lamongan Tahun 2017 1-226
Tabel 1.104. Situs Situd yang ada di Kabupaten Lamongan 1-226
Tabel 1.105. Potensi Pertambangan Mineral Non Logam 1-230
Tabel 1.106. Kategori Industri di Kabupaten Lamongan 1-234
Tabel 1.107. Produk Unggulan di Kabupaten Lamongan 1-235
Tabel 1.108. PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku (Milyard) 1-236
Tabel 1.109. PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan (Milyard) 1-237
Tabel 1.110. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan 1-239

Tabel 1.111. IPM Kabupaten Lamongan 1-241
Tabel 1.114. Rencana dan Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Lainnya di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1-242
Tabel 3.1. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Lamongan 3-5
Tabel 3.2. Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan di Kabupaten Lamongan 3-25
Tabel 3.3. Sistem Perencanaan Jaringan Jalan 3-49
Tabel 3.4. Arahan Rumaja, Rumija dan Ruwasja di Kabupaten Lamongan 3-54
Tabel 3.5. Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2020 3-68
Tabel 3.6. Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2025 3-69
Tabel 3.7. Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2030 3-69
Tabel 3.8. Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2035 3-70
Tabel 3.9. Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2040 3-71
Tabel 3.10. Jarak Bebas Minimum SUTT DAN SUTET 3-76
Tabel 3.11. Kebutuhan Telepon Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan Tahun 2025 3-80
Tabel 3.12. Kebutuhan Telepon Kabupaten Lamongan Tahun 2030 dan Tahun 2035 3-81
Tabel 3.13. Kebutuhan Telepon Kabupaten Lamongan Tahun 2040 3-82
Tabel 3.14. Ketentuan Pembangunan Tower Telekomunikasi Kabupaten Lamongan 3-82
Tabel 3.15. Waduk dan Rawa di Kabupaten Lamongan 3-87
Tabel 3.16. Imbuhan Air Tanah Kabupaten Lamongan 3-89
Tabel 3.17. Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Lamongan 3-91
Tabel 3.18. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sukorame 3-92
Tabel 3.19. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Bluluk 3-92
Tabel 3.20. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Ngimbang 3-93
Tabel 3.21. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sambeng 3-93
Tabel 3.22. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Mantup 3-93
Tabel 3.23. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Kembangbahu 3-94
Tabel 3.24. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sugio 3-94
Tabel 3.25. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Kedungpring 3-94
Tabel 3.26. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Modo 3-95

Tabel 3.27. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Babat 3-95
Tabel 3.28. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Pucuk..... 3-95
Tabel 3.29. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sukodadi 3-96
Tabel 3.30. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Lamongan 3-96
Tabel 3.31. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Tikung 3-96
Tabel 3.32. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sarirejo 3-97
Tabel 3.33. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Deket 3-97
Tabel 3.34. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Glagah 3-97
Tabel 3.35. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Karangbinangun 3-98
Tabel 3.36. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Turi 3-98
Tabel 3.37. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Kalitengah 3-98
Tabel 3.38. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Karanggeneng..... 3-99
Tabel 3.39. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sekaran 3-99
Tabel 3.40. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Maduran..... 3-99
Tabel 3.41. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Laren 3-100
Tabel 3.42. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Selokuro 3-100
Tabel 3.43. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Paciran 3-100
Tabel 3.44. Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Brondong..... 3-101
Tabel 3.45. Kebutuhan Sistem Air Limbah..... 3-110
Tabel 3.46. Kebutuhan IPLT..... 3-113
Tabel 3.47. Kebutuhan Sistem Persampahan Kabupaten Lamongan 3-117
Tabel 3.48. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sukorame..... 3-118
Tabel 3.49. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Bluluk 3-119
Tabel 3.50. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Ngimbang..... 3-120
Tabel 3.51. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sambeng 3-121
Tabel 3.52. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Mantup 3-122
Tabel 3.53. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Kembangbahu.. 3-123
Tabel 3.54. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sugio..... 3-124
Tabel 3.55. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Kedungpring 3-125
Tabel 3.56. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Modo..... 3-126
Tabel 3.57. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Babat 3-127
Tabel 3.58. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Pucuk..... 3-128
Tabel 3.59. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sukodadi 3-129
Tabel 3.60. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Lamongan 3-130

Tabel 3.61. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Tikung 3-131
Tabel 3.62. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sarirejo..... 3-132
Tabel 3.63. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Deket 3-133
Tabel 3.64. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Glagah 3-134
Tabel 3.65. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Karangbinangun 3-135
Tabel 3.66. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Turi 3-136
Tabel 3.67. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Kalitengah 3-137
Tabel 3.68. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Karanggeneng.. 3-138
Tabel 3.69. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sekaran 3-139
Tabel 3.70. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Maduran..... 3-140
Tabel 3.71. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Laren 3-141
Tabel 3.72. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Solokuro..... 3-142
Tabel 3.73. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Paciran 3-143
Tabel 3.74. Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Brondong..... 3-144
Tabel 3.75. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 3-145
Tabel 3.76. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 3-145
Tabel 4.1. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan 4-6
Tabel 4.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Lamongan 4-9
Tabel 4.3. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Lamongan 4-11
Tabel 4.4. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamongan 4-14
Tabel 4.5. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kabupaten Lamongan 4-16
Tabel 4.6. Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lamongan 4-17
Tabel 4.7. Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).... 4-28
Tabel 4.8. Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamongan 4-39
Tabel 4.9. Rencana Pola Ruang Per Kecamatan Kabupaten Lamongan ... 4-40
Tabel 6.1. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lamongan 6-6



DAFTAR PETA, GAMBAR DAN DIAGRAM

DAFTAR PETA

Peta 1.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Lamongan 1-27

Peta 1.2. Peta Kelerengan Kabupaten Lamongan 1-32

Peta 1.3. Peta Geologi Kabupaten Lamongan 1-33

Peta 1.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Lamongan 1-37

Peta 1.5. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lamongan 1-45

Peta 1.6. Peta Imbuhan Air Tanah Kabupaten Lamongan 1-46

Peta 1.7. Peta Sumberdaya Air Kabupaten Lamongan 1-47

Peta 1.8. Peta Hidroheologi Kabupaten Lamongan 1-51

Peta 1.9. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan ... 1-59

Peta 1.10. Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Lamongan 1-60

Peta 1.11. Peta Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamongan 1-61

Peta 1.12. Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Lamongan 1-62

Peta 1.13. Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kabupaten Lamongan 1-63

Peta 1.14. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lamongan 1-65

Peta 1.15. Peta Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan 1-69

Peta 1.16. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamongan 1-70

Peta 1.17. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan 1-80

Peta 1.18. Peta Status Jalan Kabupaten Lamongan 1-108

Peta 1.19. Peta Trayek Angkutan Umum Kabupaten Lamongan 1-112

Peta 1.20. Peta Lokasi Terminal Kabupaten Lamongan 1-113

Peta 1.21. Peta Jaringan Kereta Api dan Stasiun Kabupaten Lamongan ... 1-116
Peta 1.22. Peta Lokasi Pelabuhan Kabupaten Lamongan 1-100
Peta 1.23. Peta Jaringan Listrik Kabupaten Lamongan 1-120
Peta 1.24. Peta Jaringan Telepon Kabupaten Lamongan 1-121
Peta 1.25. Peta Jaringan Air Bersih Kabupaten Lamongan 1-125
Peta 1.26. Peta Lokasi TPA dan TPS Kabupaten Lamongan 1-140
Peta 1.27. Peta Jaringan Drainase Kabupaten Lamongan 1-161
Peta 1.28. Peta Jaringan Irigasi Kabupaten Lamongan 1-163
Peta 1.29. Peta Lahan Pertanian Kabupaten Lamongan 1-174
Peta 1.30. Peta Lahan Perikanan Budidaya Kabupaten Lamongan 1-207
Peta 1.31. Peta Lokasi Objek Wisata Kabupaten Lamongan 1-229
Peta 1.32. Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Lamongan 1-233
Peta 1.33. Peta Zona Nilai Tanah Kabupaten Lamongan 1-246
Peta 3.1. Peta Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Lamongan 3-19
Peta 3.2. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Lamongan 3-45
Peta 3.3. Peta Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Lamongan 3-46
Peta 3.4. Peta Rencana Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Lamongan 3-56
Peta 3.5 Peta Rencana Sistem Jaringan Kereta Api Kabupaten Lamongan 3-60
Peta 3.6. Peta Rencana Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kabupaten Lamongan 3-63
Peta 3.7. Peta Rencana Alur Pelayaran Kabupaten Lamongan 3-64
Peta 3.8 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut Kabupaten Lamongan 3-65
Peta 3.9. Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara..... 3-66
Peta 3.10. Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Lamongan ... 3-74
Peta 3.11. Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Lamongan..... 3-79
Peta 3.12. Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air kabupaten Lamongan..... 3-90
Peta 3.13. Peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lamongan 3-111
Peta 3.14. Peta Rencana Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Lamongan 3-114
Peta 3.15. Peta Rencana Sistem Persampahan Kabupaten Lamongan 3-116

Peta 3.16. Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Banjir Kabupaten Lamongan 3-148
Peta 3.17. Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamongan 3-149
Peta 3.18. Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan Kabupaten Lamongan 3-150
Peta 3.19. Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Rawan Gelombang Pasang Kabupaten Lamongan 3-151
Peta 3.20. Peta Rencana Sistem Jaringan Drainase Kabupaten Lamongan 3-155
Peta 4.1. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan ... 4-8
Peta 4.2. Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Lamongan 4-12
Peta 4.3. Peta Kawasan Rawan Bencana Bencana Kekeringan Kabupaten Lamongan 4-13
Peta 4.4. Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Lamongan 4-19
Peta 4.5. Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan Kabupaten Lamongan 4-20
Peta 4.6. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lamongan 4-21
Peta 4.7. Peta Lokasi Kawasan Pertambangan Kabupaten Lamongan 4-33
Peta 4.8. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamongan 4-41
Peta 5.1. Peta Rencana Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi Kabupaten Lamongan 5-5
Peta 5.2. Peta Rencana Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Kabupaten Lamongan 5-6
Peta 5.3. Peta Rencana KawasanYang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Kabupaten Lamongan 5-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan RTRW Kabupaten dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1-4
Gambar 1.2. Diagram Sistem Sanitasi (DSS) Air Limbah Domestik 1-144
Gambar 3.1. Diagram Sistem Perdesaan 3-2
Gambar 3.2. Bagian-Bagian Jalan 3-53
Gambar 3.3. Konsep Dimensi Jalan Pada Ruas-ruas Jalan Utama di Kabupaten Lamongan 3-53

Gambar 3.4. Sempadan Rel Kereta Api 3-59
Gambar 3.5. Ruang Bebas SUTT 3-77
Gambar 3.6. Sistem Persampahan di Kabupaten Lamongan 3-115

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Kelerengan Kabupaten Lamongan 1-28
Diagram 1.2. Geologi Kabupaten Lamongan 1-30
Diagram 1.3. Jenis Tanah Kabupaten Lamongan 1-35
Diagram 1.4. Hidrogeologi Kabupaten Lamongan 1-49
Diagram 1.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2017 1-65
Diagram 1.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2017 1-71
Diagram 1.7. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1-72
Diagram 1.8. Jumlah Kendaraan yang Masuk dan Keluar Terminal Lamongan 1-114
Diagram 1.9. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat TK di Kabupaten Lamongan 1-165
Diagram 1.10. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SD Kabupaten Lamongan 1-166
Diagram 1.11. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SMP Kabupaten Lamongan 1-167
Diagram 1.12. Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SMA di Kabupaten Lamongan 1-168
Diagram 1.13. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan 1-170
Diagram 1.14. Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Lamongan 1-171
Diagram 1.15. PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku 1-238
Diagram 1.16. PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan 1-238
Diagram 1.17. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku 1-240
Diagram 1.18. IPM Kabupaten Lamongan 1-241



BAB-1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Wilayah kabupaten pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani willayah kabupaten itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kabupaten perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang willayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan dengan berazaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup azas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kabupaten sendiri maupun dengan kabupaten sekitarnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 16 menyebutkan bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan hasil rekomendasi berupa :

a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau

b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

Berdasarkan amat tersebut, pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan penyusunan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lamongan yang sudah diperdakan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15).

Adapun hasil dari kegiatan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lamongan, merekomendasikan dilakukannya "Revisi" terhadap RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, dengan dasar analisis sebagai berikut :

1. Dinamika perkembangan Kabupaten Lamongan yang cukup pesat dan melampaui rencana yang ada, hal ini terlihat dari perkembangan lahan peruntukan industri pada ruas jalan nasioanl arteri primer Surabaya – Gresik – Lamongan – Babat, Jalan Nasional Kolektor Primer yang berada di pantai utara Kabupaten Lamongan serta jalan provinsi kolektor primer yang menghubungkan Lamongan – Mantup dan Babat – Ngimbang.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menetapkan Pelabuhan Tanjung Pakis (LIS) sebagai pelabuhan utama, serta menetapkan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan strategis nasional yang tergabung dalam Kawasan Gerbangkertosusila. perubahan status Pelabuhan Tanjungpakis (LIS) sebagai pelabuhan utama akan mempengaruhi pola ruang Kabupaten Lamongan.
3. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) juga sangat berpengaruh terhadap pola ruang Kabupaten Lamongan
4. Perubahan Fungsi, Lokasi dan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Timur termasuk juga dengan Kabupaten Lamongan yang akan berpengaruh terhadap pola ruang Kabupaten Lamongan
5. Penyesuaian terhadap batas administrasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
6. Perkembangan Wilayah Usaha Pertambangan
7. dinamika perubahan perundangan undangan yang juga mempengaruhi diperlukannya revisi RTRW Kabupaten Lamongan. Salah satu contoh adalah kewenangan kabupaten terhadap wilayah pesisir.

Menindaklanjuti hasil rekomendasi Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada Tahun 2016, maka pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan

1.2. PRINSIP DAN AZAZ PENATAAN RUANG

1.2.1. PRINSIP PENATAAN RUANG

Dalam Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Lamongan, sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan. Prinsip dasar Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Konsisten : dalam arti tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Operasional : dalam arti memenuhi tuntutan kebutuhan pengembangan dan memperhatikan kemampuan implementasi serta lingkup kewenangan Pemerintah Daerah di dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Mudah : dalam arti materinya mudah dipahami dan tidak rumit, sehingga tidak mengundang intrepretasi yang keliru dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
4. Utuh : dalam arti mencakup semua komponen dari materi penting yang perlu direkomendasikan dalam suatu tata ruang, sehingga dapat mendorong berlangsungnya kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas
5. Flexible : dalam arti tidak rigit, sehingga memberikan peluang untuk mengembangkan visi dan kreatifitas dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mengoptimalkan peluang investasi dan peran serta swasta dan masyarakat
6. Keberpihakan : dalam arti memasukkan secara spesifik muatan-muatan kebijakan, rencana dan program-program pengembangan bagi golongan ekonomi lemah dan juga hak ulayat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi.

1.2.2. AZAZ PENATAAN RUANG

Sesuai pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, maka dalam Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Lamongan, akan didasarkan pada azas-azas sebagai berikut:

1. Azas keterpaduan,

   Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat)

2. Azas keserasian, keseimbangan dan keselarasan,

   Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan per kabupaten dan kawasan pedesaan

3. Azas berkelanjutan,

   Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang

4. Azas Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,

   Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas

5. Azas Keterbukaan,

Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang

6. Azas Kebersamaan dan Kemitraan

   Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

7. Azas Perlindungan dan Kepentingan Umum,

   Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat

8. Azas Kepastian Hukum dan Keadilan,

   Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum

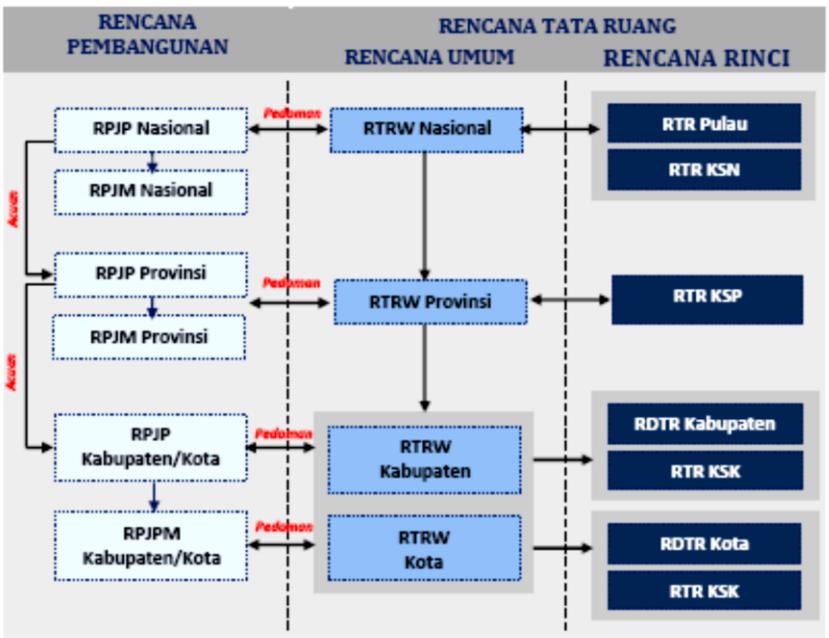
9. Azas Akuntabilitas,

   Adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya

1.3. KEDUDUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

Dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional, kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) Kabupaten, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kedudukan RTRW Kabupaten dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



1.4. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN LAMONGAN

a. Maksud

terwujudnya suatu penataan ruang wilayah yang sinergis antara Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional serta dengan wilayah sekitarnya yang berdasarkan atas azas: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas serta mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan sebagai matra spasial perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

c. Sasaran

- Tersusunnya Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lamongan;
- Teridentifikasinya potensi dan masalah penataan ruang di Kabupaten Lamongan;
- Terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang Kabupaten Lamongan dengan wilayah sekitarnya dan bersinergi dengan RPJPD, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, rencana tata ruang nasional serta dengan kepentingan sektoral;
- Terwujudnya keharmonisan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- Terakomodasikannya aspirasi seluruh pelaku pembangunan Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan wilayahnya;
- Terarahkannya pemanfaatan ruang agar sesuai dengan tahapan pembangunan;
- Terkomodasinya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang.

1.5. RUANG LINGKUP

1.5.1. RUANG LINGKUP WILAYAH

Ruang Lingkup wilayah perencanaan adalah Kabupaten Lamongan secara administratif Wilayah Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 474 desa/kelurahan (462 desa dan 12 kelurahan). Jumlah dusun sebanyak 1.486 dusun dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6.843 RT.

1.5.2. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Secara umum ruang lingkup kegiatan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Lamongan, terangkum dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Penyusunan Laporan Pendahuluan, dan Pembahasan;
3. Tahap Pengumpulan Data;
4. Tahap Penyusunan Laporan Fakta dan Analisa, serta Pembahasan;
5. Tahap penyunan draft rencana dan pembahasan
6. Tahap Konsultasi Publik
7. Tahap Penyusunan Naskah Ranperda dan naskah akademis
8. Penyerahan Produk

1.6. DASAR HUKUM

Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Lamongan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundangan mengenai tata ruang dan produk-produk tata ruang yang ada, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
28. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
29. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
30. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

32. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

33. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

35. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);

60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

65. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

67. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

68. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

69. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

70. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

71. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

72. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

73. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);

74. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

75. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

76. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

77. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

78. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

80. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan;

81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

82. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;

83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

84. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;

85. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;

86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

87. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);

88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

89. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

90. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);

91. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;

92. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

93. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis;

94. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;

95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

97. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

98. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);

99. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);

101. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

102. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);

103. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

104. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

106. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);

107. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);

108. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);

109. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

110. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

111. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);

112. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

113. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

114. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

115. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);

116. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

1.7. KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.

10. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
11. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana Tata Ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
19. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten adalah rencana tata ruang yang disusun sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Sistem Perkotaan adalah sistem yang menggambarkan sebaran, fungsi dan hierarki fungsional perkotaan yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah.

24. Pusat Kegiatan Nasional selanjutnya disebut PKN adalah kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegitan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.

25. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disebut PKL adalah kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

26. Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.

27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

30. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

31. Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.

32. Sistem Jaringan Transportasi Darat adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi darat antar wilayah dan antar kawasan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional yang terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api dan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

33. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu sistem jaringan jalan yang terdiri dari jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, jalan desa, terminal penumpang, terminal barang dan jembatan timbang.

34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

35. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

36. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

38. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

39. Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

40. Sistem Jaringan Jalan Sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Perkotaan.

41. Jalan Arteri Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

42. Jalan Kolektor Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

43. Jalan Lokal Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

44. Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

45. Frontage Road adalah jalan pendamping jalan utama yang menyediakan akses ke jalan masuk pribadi seperti kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan transportasi.

46. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

47. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan,

penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

48. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

49. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

50. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.

51. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

52. Jembatan Timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

53. Sistem Jaringan Kereta Api adalah satu kesatuan sistem jaringan kereta api yang terdiri dari jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.

54. Jaringan Jalur Kereta Api adalah jaringan jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

55. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

56. Stasiun Penumpang adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

57. Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan atau langsir dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.

58. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah adalah suatu sistem jaringan yang terdiri dari alur pelayaran, lintas penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan.

59. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

60. Sistem Jaringan Transportasi Laut adalah adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi laut yang terdiri dari pelabuhan laut dan alur pelayaran.

61. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

62. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

63. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

64. Terminal Khusus adalah terminal yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut;

65. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut.

66. Sistem Jaringan Transportasi Udara adalah sistem jaringan transportasi yang terdiri dari simpul yang berwujud bandar udara dan ruang lalu lintas yang berwujud ruang lalu lintas udara.

67. Bandar Udara Pengumpul Dengan Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang pertahun.

68. Sistem Jaringan Energi adalah suatu sistem jaringan yang terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

69. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan dan/atau jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

70. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah rangkaian perangkat penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai kepada konsumen

pada tingkat tegangan yang diperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, unit transmisi dan unit distribusi.

71. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi yang terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak.

72. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah rangkaian sistem yang meliputi sumber air dan prasarana sumber daya air.

73. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

74. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.

75. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

76. Sistem Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis dan menyeluruh dalam rangka pengurangan sampah melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

77. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahannya.

78. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur dan ruang evakuasi sebagai tempat pengungsian dari ancaman bencana.

79. Jalur Evakuasi Bencana adalah jaringan jalan yang dimanfaatkan menjadi jalur evakuasi bencana.

80. Ruang Evakuasi Bencana adalah tempat evakuasi atau penampungan sementara yang berada di luar kawasan rawan bencana.

81. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

82. Kawasan Peruntukan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan-kawasan lindung lain.

83. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

84. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk.

85. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan sepanjang pantai yang difungsikan untuk ruang terbuka hijau atau tanaman lindung dan tidak difungsikan untuk kegiatan budidaya atau kawasan terbangun. Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat.

86. Sempadan Sungai merupakan daratan sepanjang tepian sungai yang difungsikan sebagai perlindungan sungai dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.

87. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk merupakan daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya Proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk. Kawasan ini difungsikan sebagai perlindungan waduk dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.

88. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

89. Cekungan Air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

90. Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

91. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.

92. Kawasan Rawan Bencana adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gelombang pasang yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.

93. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

94. Kawasan Peruntukan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

95. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

96. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.

97. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

98. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

99. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

100. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

101. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.

102. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

103. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

104. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

105. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

106. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan, dan mudah mendapatkan pakan ikan yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.

107. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan

pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan

108. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

109. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan zona sekitar infrastruktur wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten.

110. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

111. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

112. Insentif penataan ruang adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

113. Disinsentif penataan ruang adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang

114. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana Tata Ruang, serta perangkat atau upaya untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.

115. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.

116. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

117. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporas, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

118. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

119. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad hoc, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mempunyai fungsi

membantu pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan koordinasi Penataan Ruang di Daerah.

1.8. DIMENSI WAKTU PERENCANAAN

Dimensi waktu perencanaan dalam Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Lamongan telah disesuaikan dengan ketetapan Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

1.9. GAMBARAN UMUM

1.9.1. WILAYAH ADMINSITRASI

Wilayah Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 474 desa/kelurahan (462 desa dan 12 kelurahan). Jumlah dusun sebanyak 1.486 dusun dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6.843 RT. Dengan Luas wilayah keseluruhan kurang lebih 175.221 ha. Secara administrasi, Kabupaten Lamongan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

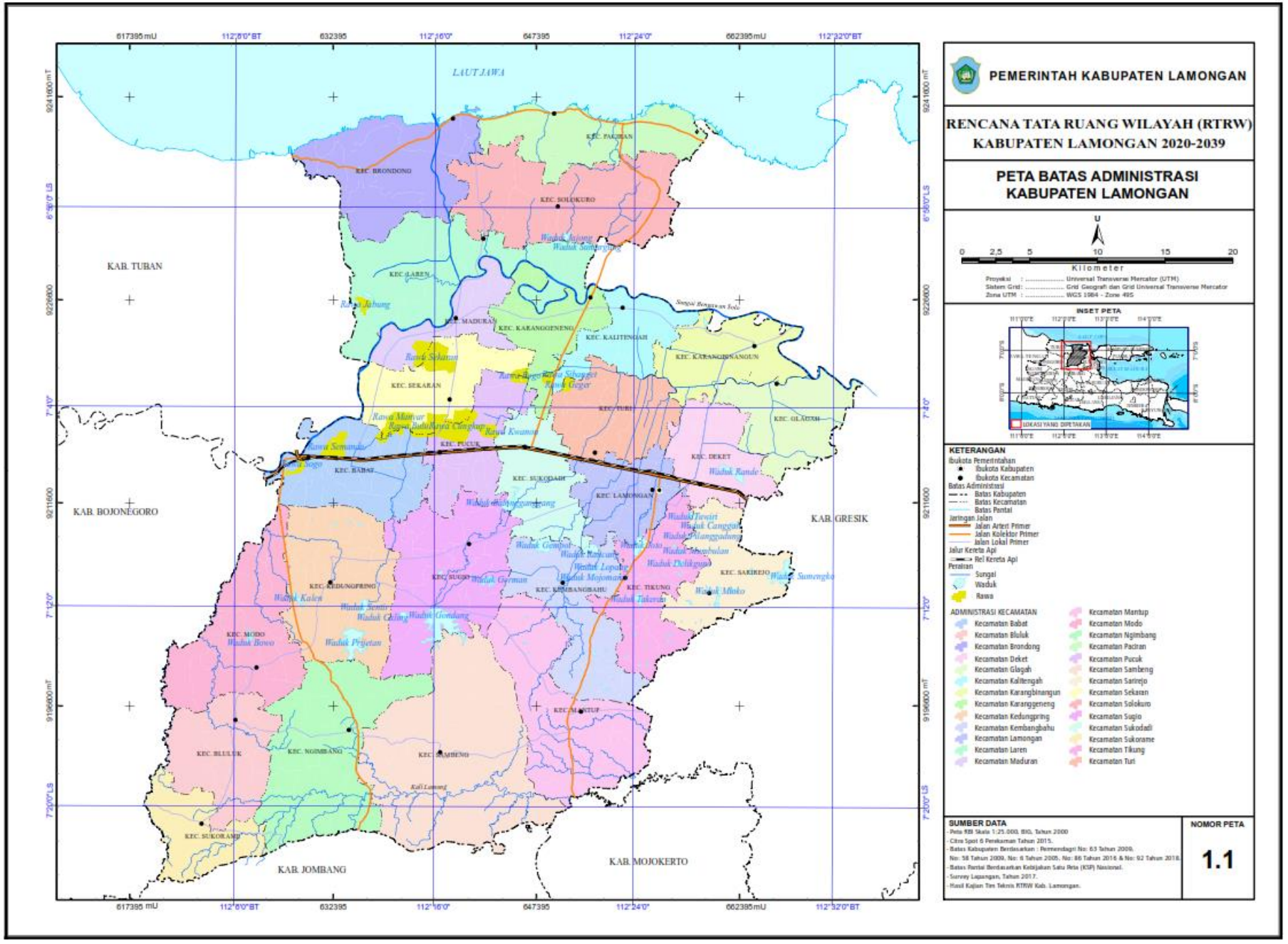
Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah pada masing – masing kecamatan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan batas administrasi pada Peta 1.1.

Tabel 1.1. : Luas Wilayah Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Ha)
1	Sukorame	9	-	3.929
2	Bluluk	9	-	5.800
3	Ngimbang	19	-	10.006
4	Sambeng	22	-	15.078
5	Mantup	15	-	9.123
6	Kembangbahu	18	-	6.825
7	Sugio	21	-	8.974
8	Kedungpring	23	-	8.573
9	Modo	17	-	8.170
10	Babat	21	2	6.459
11	Pucuk	17	-	4.538
12	Sukodadi	20	-	4.748
13	Lamongan	12	8	4.094
14	Tikung	13	-	5.542
15	Sarirejo	9	-	4.887
16	Deket	17	-	4.395
17	Glagah	29	-	5.002
18	Karangbinangun	21	-	4.726

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Ha)
19	Turi	19	-	5.250
20	Kalitengah	20	-	3.695
21	Karanggeneng	18	-	4.074
22	Sekaran	21	-	5.405
23	Maduran	17	-	3.278
24	Laren	20	-	9.411
25	Solokuro	10	-	9.487
26	Paciran	16	1	5.681
27	Brondong	9	1	8.072
JUMLAH		**462**	**12**	**175.221**

Sumber: Digitasi Peta Citra Terkoreksi


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA BATAS ADMINISTRASI
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
ADMINISTRASI KECAMATAN
Kecamatan Babat
Kecamatan Bluluk
Kecamatan Brondong
Kecamatan Deket
Kecamatan Glagah
Kecamatan Kaltengah
Kecamatan Karangbinangun
Kecamatan Karanggeneng
Kecamatan Kedungpring
Kecamatan Kembangbahu
Kecamatan Lamongan
Kecamatan Laren
Kecamatan Maduran
Kecamatan Mantup
Kecamatan Modo
Kecamatan Ngimbang
Kecamatan Pacran
Kecamatan Pucuk
Kecamatan Sambeng
Kecamatan Sarirejo
Kecamatan Sekaran
Kecamatan Solokuro
Kecamatan Sugio
Kecamatan Sukodadi
Kecamatan Sukorame
Kecamatan Tikung
Kecamatan Turi
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Survey Lapangan, Tahun 2017.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
1.1
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SARIREJO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. SUGIO
KEC. TIKUNG
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKORAME
Waduk Jatigong
Waduk Sumengko
Waduk Sekaran
Waduk Gesper
Waduk Gegar
Waduk Kwaron
Waduk Semanding
Waduk Randu
Waduk Tiwarit
Waduk Cangga
Waduk Blanggadang
Waduk Gempol
Waduk Kemlaten
Waduk Lopaka
Waduk Mojomanis
Waduk Tikuwan
Waduk Minko
Waduk Kalen
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Boreo
Kali Lamong

1.9.2. KONDISI FISIK DASAR

1.9.2.1. TOPOGRAFI

Topografi/ketinggian adalah ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut yang dinyatakan dengan mdpl (meter di atas permukaan laut). Kondisi topografi Kabupaten Lamongan berkisar antara 0-186 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Ngimbang yang terletak 186 meter di atas permukaan laut. Kondisi wilayah Kabupaten Lamongan secara rinci dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi menjadi 3 karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo yaitu :

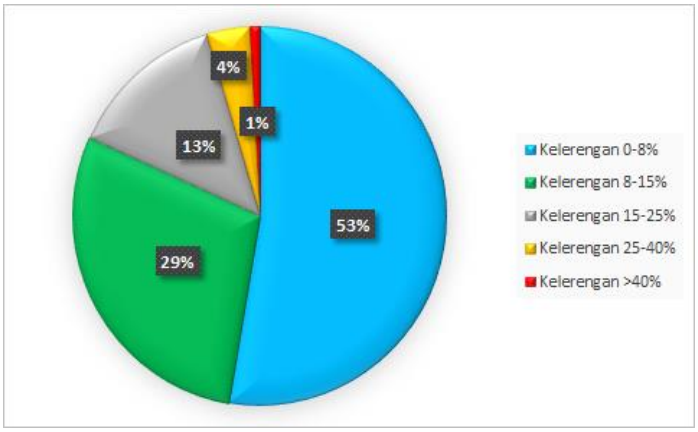
1. Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu
2. Bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro
3. Bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

1.9.2.2. KELERENGAN

Lereng atau kemiringan tanah adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal, yang dinyatakan dalam prosen. Besar kecilnya kemiringan tanah menentukan kemudahan penggarapan tanah dan dapat tidaknya alat mekanis digunakan

Kelerengan Kabupaten Lamongan hasil digitasi peta kelerengan, terbagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut : Kelerengan 0-8% seluas 92.290 ha, Kelerengan 8-15% seluas 50.907 ha, Kelerengan 15-25% seluas 23.919 ha, Kelerengan 25-40% seluas 6.571 ha, Kelerengan >40% seluas 1.534 ha. Dengan mengacu kepada klasifikasi kelerengan, maka dapat ditentukan morfologi Kabupaten Lamongan sesuai dengan kelerengannya. Kelerengan 0-8% merupakan dataran, kelerengan 8-15% merupakan Perbukitan berelif halus, kelerengan 15 – 25% merupakan Perbukitan berelif sedang, kelerengan 25-40%sampai >40% merupakan Perbukitan berlief kasar. sebagaimana terlihat pada diagram, tabel dan peta berikut ini

Diagram 1.1. Kelerengan Kabupaten Lamongan



Tabel 1.2.
Luas Wilayah Menurut Klasifikasi Kemiringan Lahan
Di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kelerengan					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1	Sukorame	0	214	2.492	1.039	185	3.929
2	Bluluk	0	2.394	3.112	291	3	5.800
3	Ngimbang	0	734	6.870	1.712	689	10.006
4	Sambeng	0	6.216	7.044	1.425	393	15.078
5	Mantup	0	7.099	1.182	842	0	9.123
6	Kembangbahu	1.211	5.584	30	0	0	6.825
7	Sugio	949	7.816	203	6	0	8.974
8	Kedungpring	349	7.766	427	31	0	8.573
9	Modo	900	5.907	472	626	264	8.170
10	Babat	4.730	1.699	30	0	0	6.459
11	Pucuk	4.189	349	0	0	0	4.538
12	Sukodadi	4.748	0	0	0	0	4.748
13	Lamongan	4.094	0	0	0	0	4.094
14	Tikung	2.563	2.978	0	0	0	5.542
15	Sarirejo	3.165	1.721	0	0	0	4.887
16	Deket	4.395	0	0	0	0	4.395
17	Glagah	5.002	0	0	0	0	5.002
18	Karangbinangun	4.726	0	0	0	0	4.726
19	Turi	5.250	0	0	0	0	5.250
20	Kalitengah	3.695	0	0	0	0	3.695
21	Karanggeneng	4.074	0	0	0	0	4.074
22	Sekaran	5.405	0	0	0	0	5.405
23	Maduran	3.278	0	0	0	0	3.278
24	Laren	9.411	0	0	0	0	9.411
25	Solokuro	7.796	1	1.327	363	0	9.487
26	Paciran	4.492	277	678	235	0	5.681
27	Brondong	7.868	151	53	0	0	8.072
	Jumlah	**92.290**	**50.907**	**23.919**	**6.571**	**1.534**	**175.221**
	Prosentase (%)	**53**	**29**	**14**	**4**	**1**	**100**

Sumber : Hasil Perhitungan Peta Kelerengan

1.9.2.3 GEOLOGI

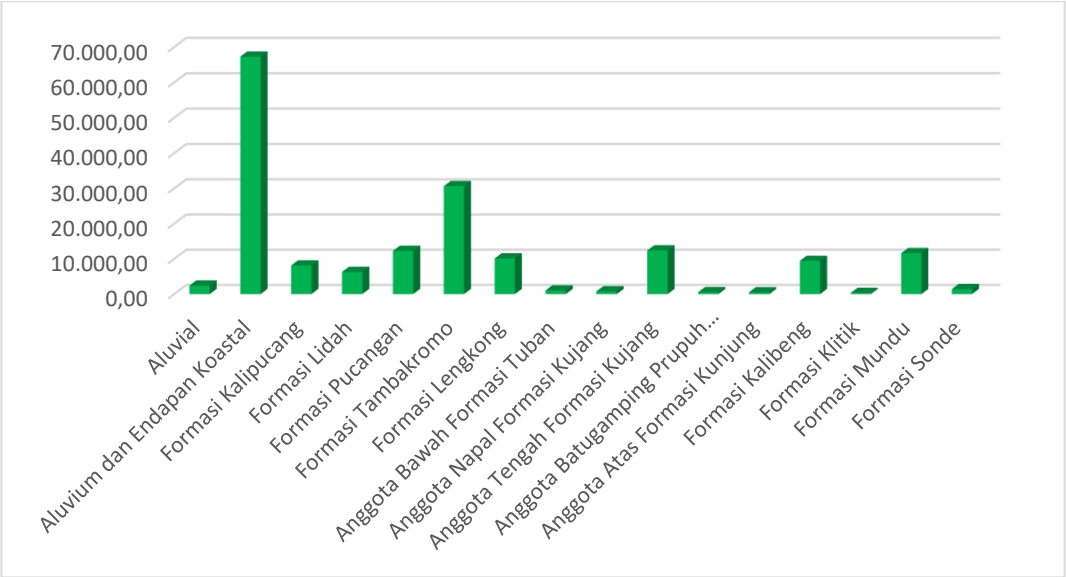
Secara fisiografis wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara dan selatan termasuk dalam Zone Rembang (van Bemmelen, 1949) yang disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan, sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randublatung yang kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, namun sebetulnya merupakan suatu depresi (cekungan) yang tertutup oleh endapan hasil pelapukan dan erosi dari batuan yang lebih tua pada Zone Kendeng dan Rembang.

Sejarah geologi Kabupaten Lamongan diperkirakan dimulai kurang lebih 37 juta Tahun yang lalu (Kala Oligosen). Saat itu wilayah Kabupaten Lamongan masih berupa lautan (bagian dari Cekungan Jawa Timur). Selanjutnya terjadi proses sedimentasi secara

berurutan ke atas berupa penghamparan batuan sedimentasi laut yang kaya unsur karbonatan. Proses ini berlangsung hingga kurang lebih 19 juta Tahun (hingga Kala Polisen). Pada kurang lebih 1,8 juta Tahun yang lalu terjadi aktifitas tektonik (Orogenesa Plio-Pleistosen)yang menyebabkan terangkatnya Kabupaten Lamongan muncul ke permukaan laut.

Jenis batuan yang ada di Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Aluvial seluas 2.422,01 ha, Aluvium dan Endapan Koastal seluas 67.280,03 ha, Formasi Kalipucang seluas 8.121,16 ha, Formasi Lidah seluas 6.294,25 ha, Formasi Pucangan seluas 12.273,89 ha, Formasi Tambakromo seluas 30.660,10 ha, Formasi Lengkong seluas 10.119,28 ha, Anggota Bawah Formasi Tuban seluas 1.022,50 ha, Anggota Napal Formasi Kujang seluas 789,65 ha, Anggota Tengah Formasi Kujang seluas 12.390,10 ha, Anggota Batugamping Prupuh Formasi Kunjung seluas 530,71 ha, Anggota Atas Formasi Kunjung seluas 517,11 ha, Formasi Kalibeng seluas 9.429,20 ha, Formasi Klitik seluas 328,79 ha, Formasi Mundu seluas 11.608,06 ha, Formasi Sonde seluas 1.433,90 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Peta 1.3.

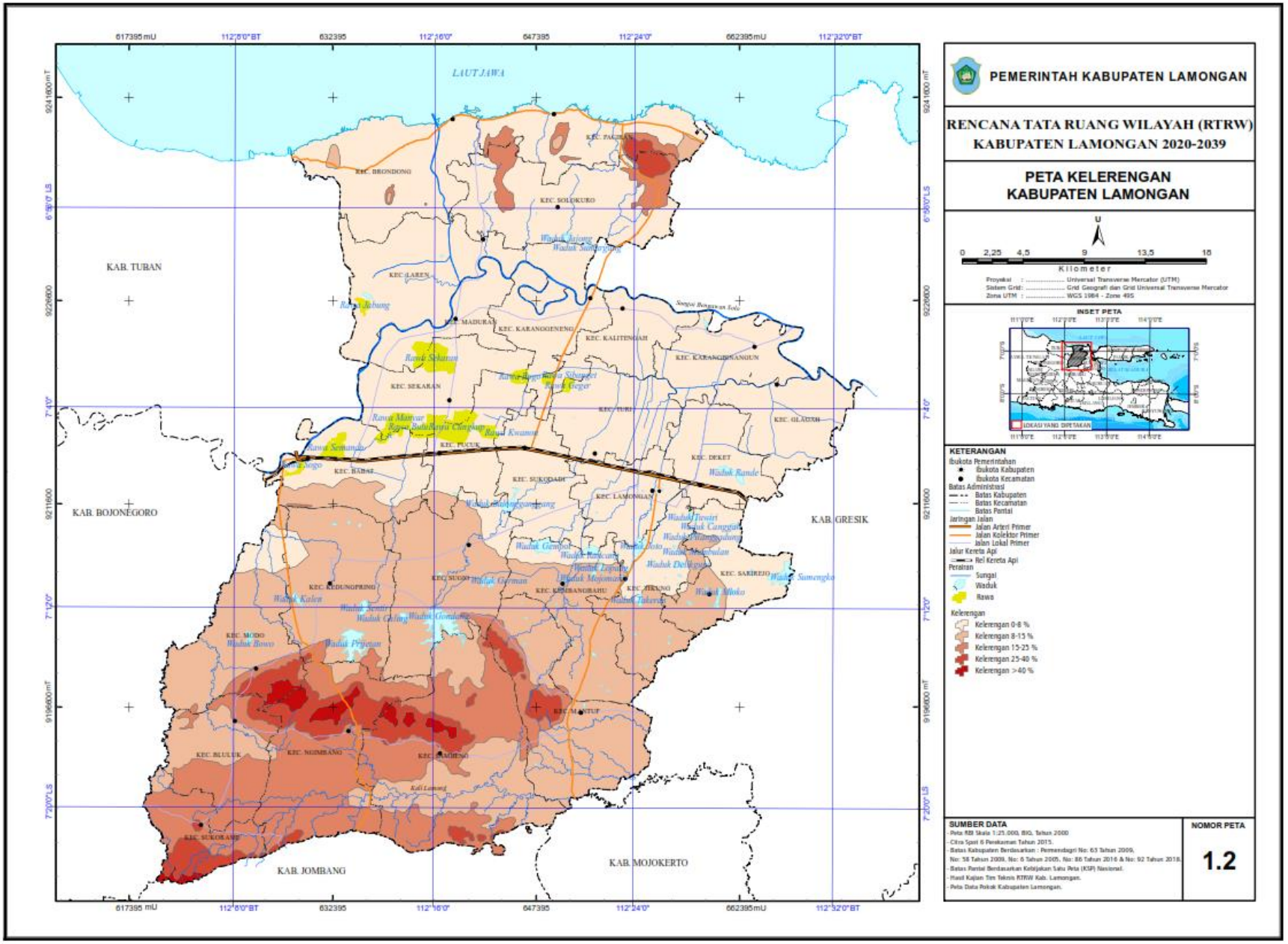
Diagram 1.2. Geologi Kabupaten Lamongan

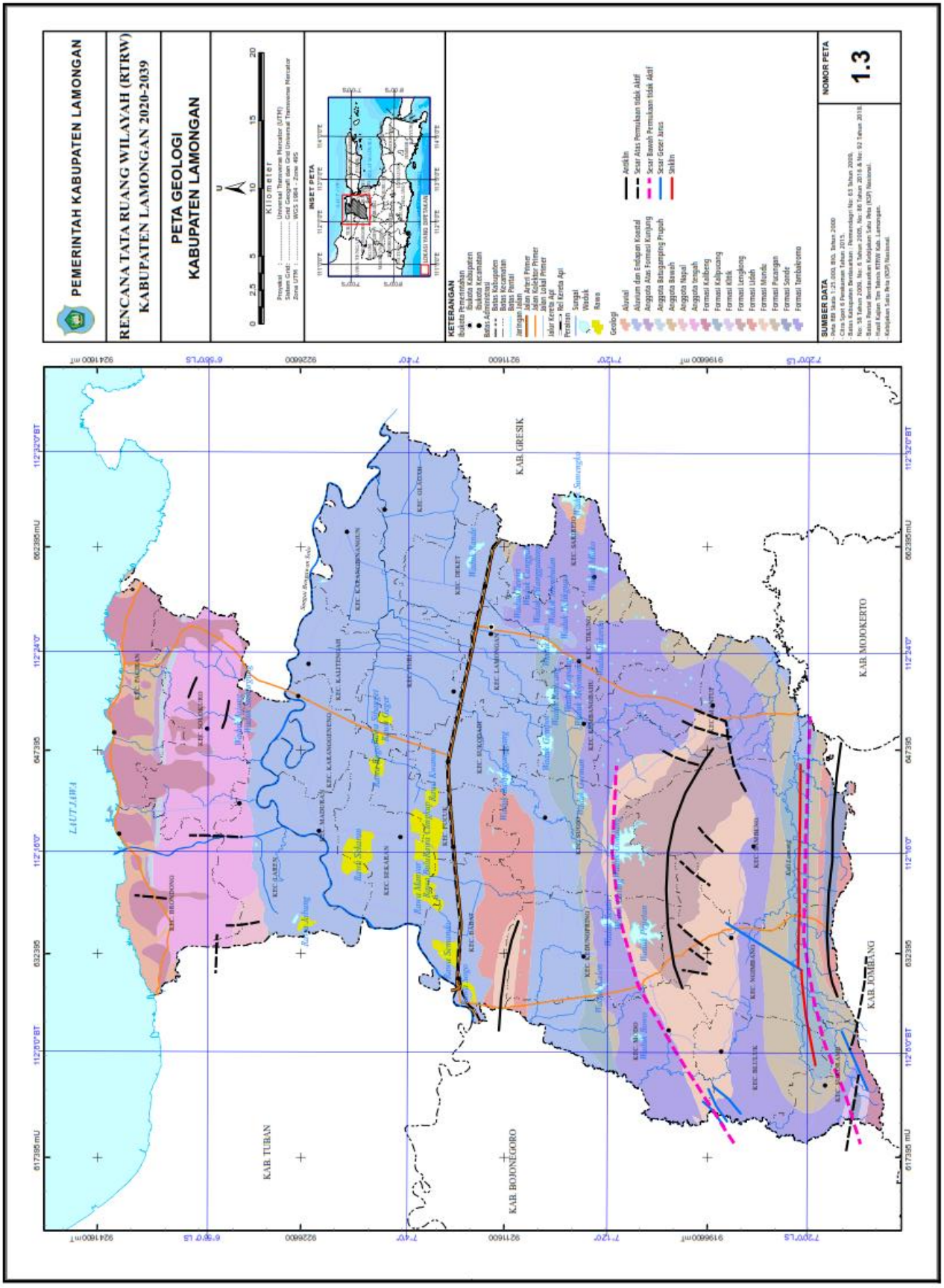


Tabel 1.3
Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Jenis Geologi																Total
		Aluvial	Aluvium dan Endapan Koastal	Formasi Kalipucang	Formasi Lidah	Formasi Pucangan	Formasi Tambakromo	Formasi Lengkong	Anggota Bawah Formasi Tuban	Anggota Napal Formasi Kujang	Anggota Tengah Formasi Kujang	Anggota Batugamping Prupuh Formasi Kunjung	Anggota Atas Formasi Kunjung	Formasi Kalibeng	Formasi Klitik	Formasi Mundu	Formasi Sonde	
1	Sukorame	0,00	0,00	284,60	0,00	1.382,83	1.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,91	328,79	0,00	136,02	3.928,70
2	Bluluk	0,00	0,00	561,24	0,00	1.249,74	2.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,91	0,00	5.799,93
3	Ngimbang	0,00	0,00	1.639,37	473,39	2.171,24	1.220,25	1.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	223,82	10.006,02
4	Sambeng	0,00	200,67	2.298,11	851,95	2.108,35	2.478,64	3.915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,91	1.074,06	15.078,34
5	Mantup	0,00	514,46	17,92	0,00	2.035,49	4.189,24	853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,21	0,00	9.123,19
6	Kembangbahu	0,00	411,06	931,85	0,00	749,03	4.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	6.825,07
7	Sugio	0,00	2.695,86	723,39	1.297,63	654,32	883,03	2.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,45	0,00	8.974,19
8	Kedungpring	0,00	2.933,36	306,77	688,06	332,53	1.947,29	1.283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,69	0,00	8.572,74
9	Modo	0,00	1.360,41	845,96	115,31	255,36	3.601,11	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,73	0,00	8.169,76
10	Babat	0,00	4.050,84	0,00	1.947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43	0,00	6.459,43
11	Pucuk	0,00	3.621,38	0,00	917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,49
12	Sukodadi	0,00	4.719,25	24,67	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,56
13	Lamongan	0,00	3.858,50	167,88	0,00	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,53
14	Tikung	0,00	499,72	304,57	0,00	619,56	4.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,58
15	Sarirejo	402,87	130,27	0,00	0,00	659,74	3.694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,96
16	Deket	0,00	4.339,47	0,00	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,15
17	Glagah	0,00	5.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,53
18	Karangbinangun	0,00	4.726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,21
19	Turi	0,00	5.250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,09
20	Kalitengah	0,00	3.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,60
21	Karanggeneng	0,00	4.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,99
22	Sekaran	0,00	5.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,96
23	Maduran	0,00	3.277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,68
24	Laren	0,00	6.512,02	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,52	1.947,75	0,00	0,00	269,16	0,00	0,00	0,00	9.411,28
25	Solokuro	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	6.194,66	227,03	91,20	2.913,05	0,00	0,00	0,00	9.486,89
26	Paciran	487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,77	0,00	150,61	162,34	301,03	3.727,06	0,00	0,00	0,00	5.681,33
27	Brondong	1.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	122,13	4.097,09	141,34	124,88	1.942,01	0,00	0,00	0,00	8.071,51
JUMLAH		**2.422,01**	**67.280,03**	**8.121,16**	**6.294,25**	**12.273,89**	**30.660,10**	**10.119,28**	**1.022,50**	**789,65**	**12.390,10**	**530,71**	**517,11**	**9.429,20**	**328,79**	**11.608,06**	**1.433,90**	**175.220,72**
PROSENTASE (%)		**1,38**	**38,40**	**4,63**	**3,59**	**7,00**	**17,50**	**5,78**	**0,58**	**0,45**	**7,07**	**0,30**	**0,30**	**5,38**	**0,19**	**6,62**	**0,82**	**100,00**

Sumber : Kebijakan Satu Peta


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KELERENGAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,25 4,5 9 13,5 18
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Kelerengan
Kelerengan 0-8 %
Kelerengan 8-15 %
Kelerengan 15-25 %
Kelerengan 25-40 %
Kelerengan >40 %
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009,
No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Peta Data Pokok Kabupaten Lamongan.
NOMOR PETA
1.2
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA GEOLOGI
KABUPATEN LAMONGAN
KILOMETER
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.3
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN
LAUT JAWA

1.9.2.4 JENIS TANAH

Secara fisiografis wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara dan selatan termasuk dalam Zone Rembang (van Bemmelen, 1949) yang disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan, sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randublatung yang kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, pengaruh iklim dan organisme yang bekerja terhadap batuan induk pada relief tertentu dan jangka waktu tertentu serta mampu menumbuhkan tanaman.

Jenis tanah di Kabupaten Lamongan terdiri dari Alluvial Kelabu Kekuningan seluas 68.760,60 ha, Alluvial Hidromof seluas 2.415,61 ha, Asosiasi Hidromof seluas 1.381,16 ha, Grumosol Kelabu seluas 66.688,90 ha, Komplek Grumosol Kelabu dan Litosol seluas 1.446,90 ha, Komplek Mediteran Merah dan Litosol seluas 23.590,81 ha, Regosol Coklat Kekuningan seluas 9.730,72 ha, Litosol seluas 1.206,02 ha. Untuk lebih jelasnya lihat diagram, Tabel dan peta berikut ini.

1. Jenis Tanah Regosol

   Jenis Tanah Regosol faktor pembentuknya adalah :

   - Iklim : Aneka
   - Bahan Induk : Abu Vulkan, merger, pasir pantai
   - Pemakaian : padi sawah, palawija, tebu, tembakau, sayuran

2. Jenis Tanah Aluvial Kelabu Kekuningan

   Jenis Tanah aluvial Kelabu Kekuningan, faktor pembentuknya adalah :

   - Iklim : Aneka
   - Bahan Induk : aluvial dari aneka macam asal
   - Pemakaian : padi sawah, palawija, perikanan

3. Jenis Tanah Kompleks Mediteran Merah

   Jenis Tanah Kompleks Mediteran faktor pembentuknya adalah :

   - Iklim : Curah Hujan 800-2500 mm/tahun
   - Bahan Induk : batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf vulkan basa
   - Pemakaian : padi sawah, tegalan, rumput ternak

4. Jenis Tanah Litosol

   Jenis Tanah Litosol, faktor pembentuknya adalah :

   - Iklim : Curah hujan 800-2500 mm/tahun
   - Bahan Induk : batuan beku, batuan sedimen keras
   - Pemakaian : tanaman keras, rumput ternak, palawija

5. Jenis Tanah Regosol Coklat Kekuningan

   Jenis Tanah regosol, faktor pembentuknya adalah :

   - Iklim : aneka
   - Bahan Induk : abu vulkan, mergel, pasir pantai

- Pemakaian : tanaman keras, rumput ternak, palawija

6. Jenis Tanah Grumosol Kelabu

   Jenis Tanah Grumosol Kelabu, faktor pembentuknya adalah :

   - Iklim : Curah hujan 1.000 – 2.500 mm/tahun
   - Bahan Induk : merjal, liat, tuf, vulkan
   - Pemakaian : padi sawah, palawija, tebu, tembakau, sayuran

7. Jenis Tanah Aluvial Hidromorf

   Jenis Tanah Aluvial Hidromorf, faktor pembentuknya adalah :

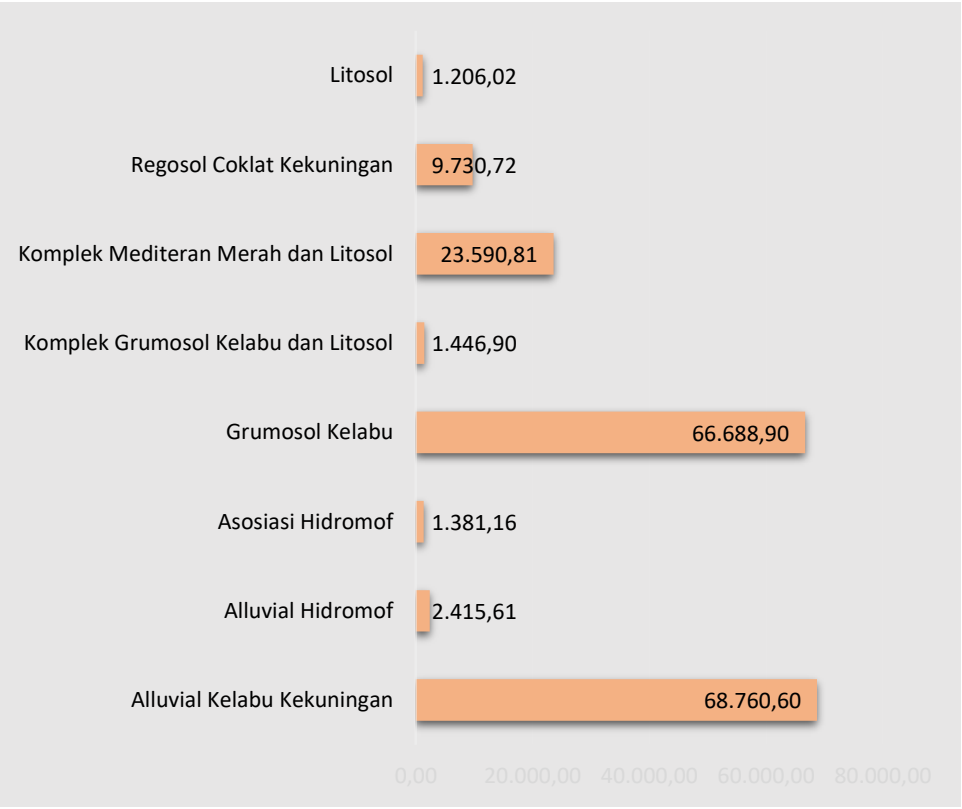
   - Iklim : Curah hujan > 2.000 mm/tahun
   - Bahan Induk : tuf masam, batuan pasir
   - Pemakaian : padi sawah, palawija, pembuatan bata/genteng

8. Jenis Tanah Komplek Grumosol Kelabu

   Jenis Tanah kompleks Grumosol Kelabu, faktor pembentuknya adalah :

   - Iklim : Curah hujan 1.000 – 2.500 mm/tahun
   - Bahan Induk : merjal, liat, tuf, vulkan
   - Pemakaian : padi sawah, palawija, tebu, tembakau, sayuran

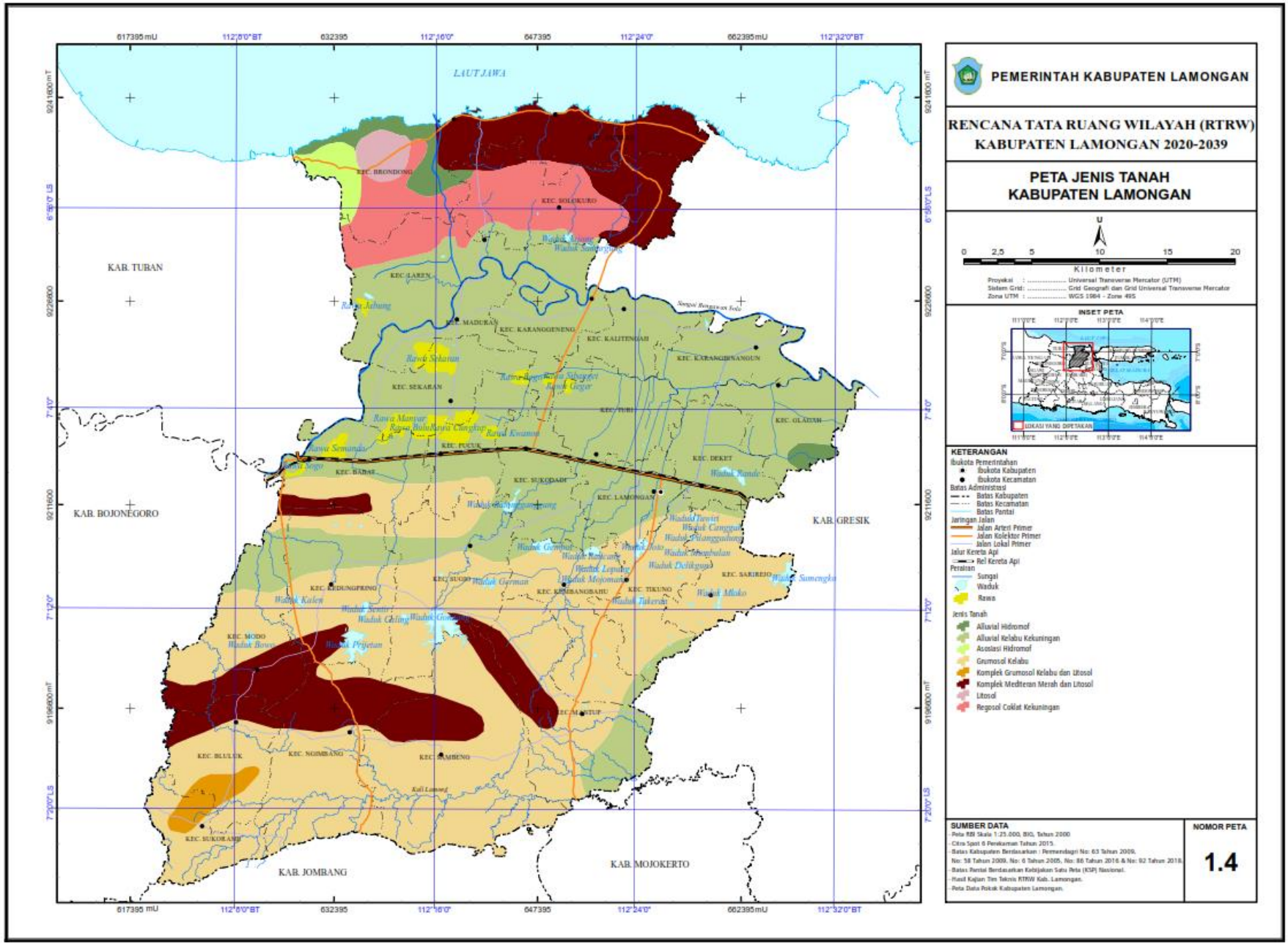
Diagram 1.3. Jenis Tanah Kabupaten Lamongan



Tabel 1.4
Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Jenis Tanah								Luas (Ha)
		Alluvial Kelabu Kekuningan	Alluvial Hidromof	Asosiasi Hidromof	Grumosol Kelabu	Komplek Grumosol Kelabu dan Litosol	Komplek Mediteran Merah dan Litosol	Regosol Coklat Kekuningan	Litosol	
1	Sukorame	0,00	0,00	0,00	3.239,86	688,84	0,00	0,00	0,00	3.928,70
2	Bluluk	0,00	0,00	0,00	3.595,42	758,06	1.446,45	0,00	0,00	5.799,93
3	Ngimbang	0,00	0,00	0,00	6.926,58	0,00	3.079,43	0,00	0,00	10.006,02
4	Sambeng	0,00	0,00	0,00	12.366,59	0,00	2.711,76	0,00	0,00	15.078,34
5	Mantup	2.146,47	0,00	0,00	5604,08	0,00	1.372,65	0,00	0,00	9.123,19
6	Kembangbahu	665,87	0,00	0,00	6159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,07
7	Sugio	2098,92	0,00	0,00	6590,47	0,00	284,79	0,00	0,00	8.974,19
8	Kedungpring	2173,32	0,00	0,00	5406,60	0,00	992,82	0,00	0,00	8.572,74
9	Modo	1.500,64	0,00	0,00	3846,09	0,00	2.823,03	0,00	0,00	8.169,76
10	Babat	3.876,31	0,00	0,00	1.985,36	0,00	597,76	0,00	0,00	6.459,43
11	Pucuk	3.606,33	0,00	0,00	932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,49
12	Sukodadi	4.732,41	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,56
13	Lamongan	3.709,90	0,00	0,00	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,53
14	Tikung	588,10	0,00	0,00	4.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,58
15	Sarirejo	204,27	0,00	0,00	4.682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,96
16	Deket	4.393,62	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,15
17	Glagah	4.486,75	514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,53
18	Karangbinangun	4.726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,21
19	Turi	5.250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,09
20	Kalitengah	3.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,60
21	Karanggeneng	4.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,99
22	Sekaran	5.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,96
23	Maduran	3.277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,68
24	Laren	7.353,98	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	2.018,74	0,00	9.411,28
25	Solokuro	796,17	106,38	0,00	0,00	0,00	3.777,95	4.806,39	0,00	9.486,89
26	Paciran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,49	271,84	0,00	5.681,33
27	Brondong	0,00	1.794,45	1.342,60	0,00	0,00	1.094,69	2.633,75	1.206,02	8.071,51
JUMLAH		**68.760,60**	**2.415,61**	**1.381,16**	**66.688,90**	**1.446,90**	**23.590,81**	**9.730,72**	**1.206,02**	**175.220,72**
PROSENTASE (%)		**39,24**	**1,38**	**0,79**	**38,06**	**0,83**	**13,46**	**5,55**	**0,69**	**100,00**

Sumber : Peta Jenis Tanah Kebijakan Satu Peta


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA JENIS TANAH
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Jenis Tanah
Alluvial Hidromof
Alluvial Kelabu Kekuningan
Asosiasi Hidromof
Grumosol Kelabu
Komplek Grumosol Kelabu dan Litosol
Komplek Mediteran Merah dan Litosol
Litosol
Regosol Coklat Kekuningan
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.4

1.9.2.5 KLIMATOLOGI

Aspek klimatologi ditinjau dari kondisi suhu dan curah hujan. Keadaan iklim di Kabupaten Lamongan merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan-bulan lain curah hujan relatif rendah. Rata-rata curah hujan pada sepuluh tahun terakhir sebesar 1.535 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 80. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Curah Hujan di Kabupaten Lamongan

No	Stasiun Pengamatan	Kecamatan	Curah Hujan	Rata-Rata 10 Tahun Terakhir	Hari Hujan
1	Lamongan	Lamongan	1.503	1.428	88
2	Takeran	Tikung	1.576	1.788	74
3	Mantup	Mantup	1.905	1.637	85
4	Kembangbahu	Kembangbahu	1.900	1.458	90
5	Sukodadi	Sukodadi	1.563	1.494	107
6	Gondang	Sugio	1.480	1.773	88
7	Kedungpring	Kedungpring	1.615	1.715	95
8	Gandang	Ngimbang	1.348	802	67
9	Prijetan	Kedungpring	1.756	1.803	89
10	Kayen	Ngimbang	1.430	706	67
11	Bluluk	Bluluk	2.748	1.778	67
12	Ngimbang	Ngimbang	1.766	1.769	103
13	Baru/Girik	Ngimbang	2.125	1.851	106
14	Modo	Modo	1.625	1.688	53
15	Pucuk	Pucuk	1.425	1.314	57
16	Babat	Babat	1.779	1.718	98
17	Jabung	Laren	1.525	1.579	72
18	Paciran	Paciran	814	827	16
19	Brondong	Brondong	2.716	1.783	82
20	Bluri	Solokuro	1.522	1.383	72
21	Pangkatrejo	Maduran	1.465	1.485	64
22	Karanggeneng	Karanggeneng	2.255	1.807	102
23	Blawi	Karangbinangun	1.521	1.493	78
24	Kuro	Karangbinangun	1.747	1.775	90
25	Karangbinangun	Karangbinangun	1.450	1.523	79
	Rata-Rata		**1.702**	**1.535**	**80**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

1.9.2.6 HIDROLOGI

Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai dalam jumlah yang melimpah hingga

mengakibatkan bencana banjir namun sebaliknya pada saat musim kemarau disebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang.

a. Air Sungai

Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km dengan debit rata – rata 531,61 m3/bulan (debit maksimum 1.758,46 m3 dan debit minimum 19,58 m3) yang bermata air di Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah), Kali Blawi sepanjang ± 27 Km dan Kali Lamong sepanjang ± 65 Km yang bermata air di Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.6. Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Lamongan

No	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Bengawan Solo	68
2	Flood Way	13
3	Kali Lamong	32
4	Kali Corong	12
5	Kali Wangen	15
6	Kali Serning	43
7	Kali Semarmendem	25
8	Kali Lohgung	5
9	Kali Singosari	11
10	Kali Blawi	19
11	Kali Plalangan	16.5
12	Kali Mengkuli	33
13	Kali Dapur	12.5
14	Kali Gondang	29
15	Kali Kruwul I	7
16	Kali Kruwul II	7
17	Kali Magok	8
18	Kali Patih	33
19	Kali Bulu	12
20	Kali Konang	7
21	Kali Keyongan	13
22	Kali Gembong	7
23	Kali Plesan	5
24	Kali Prijetan	25
25	Kali Jabung	10
26	Kali Pengaron	20
27	Kali Sabrangan	5
28	Kali Kenong	6
29	Kali Dadapan	9
30	Kali Ombo	12
31	Kali Bujel	8
32	Kali Malang	10
33	Kali Dinoyo	7
34	Kali Gayaran	4

No	Nama Sungai	Panjang (km)
35	Kali Bodo Urang	5
36	Kali Suwuk	5.5
37	Kali Sidowayah	14
38	Kali Gendong	5
39	Kali Putatsapi	6
40	Kali Asinan	5
41	Kali Kramat	5
42	Kali Simbangan	15

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

b. Air Waduk

Waduk di Kabupaten Lamongan berjumlah 33 Waduk dengan luas keseluruhan 2.326 Ha dan volume 51.093.192 m3. Keberadaan waduk di Kabupaten Lamongan dapat mengairi lahan sawah seluas 20.960 Ha utamanya lahan sawah berpengairan teknis dan ½ teknis, sehingga keberadaan waduk sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Waduk yang paling besar di Kabupaten Lamongan adalah waduk Gondang yang berada di Kecamatan Sugio dengan luas 660 Ha dan kapasitas volume sebesar 23.712.500 m3.

Tabel 1.7.
Inventarisasi Waduk/Embung di Kabupaten Lamongan

No	Nama Danau/Waduk/Situ/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
1	Waduk Joto	113	1.000.000
2	Waduk Lopang	21	241.145
3	Waduk Mojomanis	18	262.766
4	Waduk Rancang	65	817.142
5	Waduk Takeran	72	490.181
6	Waduk Tuwiri	64	416.892
7	Waduk Delikguno	47	419.688
8	Waduk Canggah	49	425.040
9	Waduk Rande	96	444.196
10	Waduk Dermo	4	43.230
11	Waduk Dukuh	9	74.945
12	Waduk Palangan	55	615.250
13	Waduk Sepanji	37	227.777
14	Waduk Legoh	57	350.900
15	Waduk Makamsantri	9	609.000
16	Waduk Jajong	55	951.600
17	Waduk sumurgung	12	465.300
18	Waduk paprit	13	278.400
19	Waduk Kedungdow	10	116.250
20	Waduk lembeyan	6	50.400
21	Waduk german	80	1.237.500
22	Waduk Gempol	128	2.050.000
23	Waduk Balongpangg	142	1.518.750

No	Nama Danau/Waduk/Situ/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
24	Waduk Kuripan	12	80.000
25	Waduk Pading	31	205.900
26	Waduk Maduran	40	155.800
27	Waduk Prijetan	231	9.000.000
28	Waduk Sentir	61	1.250.000
29	Waduk kalen	44	600.000
30	Waduk Bowo	47	1.685.552
31	Waduk caling	32	1.157.088
32	Waduk Karangasem	6	140.000
33	Waduk Gondang	**660**	**23.712.500**

Sumber : Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

c. Air Rawa

Di Kabupaten Lamongan juga terdapat rawa sebagai penampungan air. Jumlah rawa di Kabupaten Lamongan sebanyak 11 rawa dengan luas keseluruhan 6.878 Ha dan kapasitas volumenya sebesar 59.743.500 m3. Rawa juga sangat bemanfaat bagi masyarakat khususnya untuk kegiatan pertanian. Rawa yang ada di Kabupaten Lamongan dapat mengairi lahan sawah berpengairan sederhana seluas 9.934 Ha. Rawa terluas di Kabupaten Lamongan adalah waduk Jabung dengan luas 4.968 Ha dan volume 37.660.000 m3.

Tabel 1.8.
Rawa di Kabupaten Lamongan

No	Nama Rawa	Luas (ha)
1	Rawa Manyar	300
2	Rawa Bulu	225
3	Rawa Cungkup	300
4	Rawa Kwanon	110
5	Rawa Jabung	4.968
6	Rawa Sogo	78
7	Rawa Semando	136
8	Rawa Sekaran	557
9	Rawa Bogo	94
10	Rawa Sibanget	45
11	Rawa Geger	65
Jumlah Rawa		**6.878**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2018 dan RPPLH Lamongan 2017-2037

Namun walaupun Kabupaten Lamongan memiliki sumberdaya air naik air sungai, air waduk maupun air rawa, namun ada beberapa desa di Kabupaten Lamongan merupakan desa sulit air, sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 1.9.
Daerah Sulit Air di Kabupaten Lamongan

No	Dusun	Desa	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Mlati	Mlati	Kedungpring	16.968	65.831
2	Gondang	Gondang	Sugio	19.148	60.765
3	Deketagung	Deketagung	Sugio		
4	Daliwungun	Daliwungun	Sugio		
5	Sidomukti	Sidomukti	Brondong		
6	Tlogoretno	Tlogoretno	Brondong		
7	Lembor	Lembor	Brondong		
8	Sendangharjo	Sendangharjo	Brondong		
9	Sumberagung	Sumberagung	Brondong		
10	Balongwangi	Balongwangi	Tikung	12.182	41.342
11	Jatirejo	jatirejo	Tikung		
12	Bogo	Kalibogo	Kembangbahu	14.128	44.759
13	Mangkujajar	Mangkujajar	Kembangbahu		
14	Glagah	Glagah	Glagah	11.086	27.251
15	Priyoso	Priyoso	Karangbinangun	10.427	45.728
16	Sambopinggir	Sambopinggir	Karangbinangun		
17	Tenggulun	Tenggulun	Solokuro	13.689	39.312
18	Dadapan	Dadapan	Solokuro		
19	Sugihan	Sugihan	Solokuro		
20	Solokuro	Solokuro	Solokuro		
21	Takerharjo	Takerharjo	Solokuro		
22	Kranji	Kranji	Paciran		
23	Sendangagung	Sendangagung	Paciran		

Sumber : Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

d. Cekungan Air Tanah dan Mata Air

Kabupaten Lamongan dibentuk oleh 3 (tiga) cekungan air tanah yaitu CAT Panceng yang berada di Kecamatan Brondong, Paciran dan Solokuro, CAT Tuban yang berada di Kecamatan Brondong dan CAT Surabaya – Lamongan yang berada di Kecamatan Laren, Maduran, Karanggeneng, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah, Deket, Turi, Lamongan, Sukodadi, Babat, Sekaran, Sebagian Kembangbahu, Kodo, dan kedungpring.

Definisi CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.

Selain cekungan ait tanah, Kabupaten Lamongan juga memiliki mata air yang berada di Kecamatan Paciran. Kondisi saat ini mata air yang ada mengalami penurunan debit. Sebagaimana disampaikan dalam KLHS Pegunungan Kendeng Mata air panas Brumbung (Desa Krani, Kecamatan Paciran) yang berada di perbatasan dengan

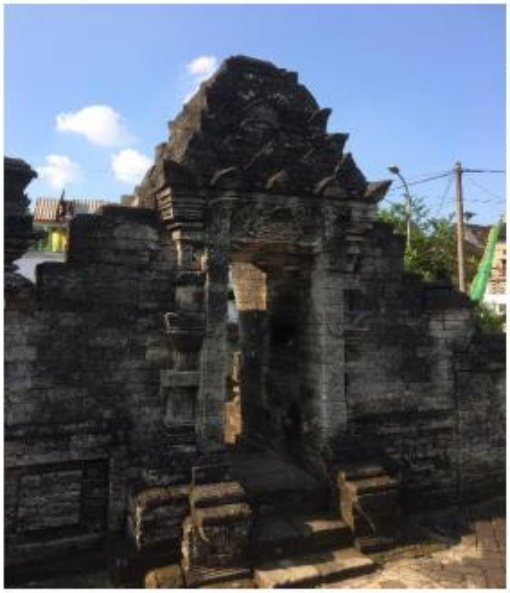
kawasan lindung (hutan jati Perhutani) merupakan mata air yang masih mengalir dengan total debit sekitar 8 liter/detik. Kondisi tutupan di sekitar masih berupa hutan jati dan pertanian lahan kering. Sementara itu, 2 lokasi lainnya adalah Sendang Duwur dan Sendang Agung. Nama mata air/sendang ini juga digunakan sebagai nama administrasi kedua lokasi tersebut, yaitu Desa Sendang Duwur dan Sendang Agung.

Sendang Duwur kondisinya masih terawat namun kering pada musim kemarau Sendang ini masih terawat dengan baik karena merupakan situs makam keramat. Sedangkan Sendang Agung kondisinya sudah tidak terawat dan kolam pemandiannya sudah kering dan diubah menjadi lokasi berjualan kaki lima. Fenomena ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam bentuk menjadikan sumber/mata air sebagai tapak yang dikeramatkan, tampak efektif sebagai upaya menjaga keberadaan dan keberlanjutan fungsinya.

Mata air pada kedua sendang ini menunjukkan kecenderungan menurun debitnya. Hal ini terjadi karena sendang tersebut berada di dalam pemukiman yang cukup padat. Penduduk pada waktu lampau menggunakan sendang sebagai sumber air domestik, namun pada saat ini semua penduduk menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu perubahan lanskap daerah sekitarnya hingga ke arah hulunya juga sudah berubah menjadi pemukiman yang padat sehingga menyebabkan jumlah resapan airnya menurun. Kemudian ditambah lagi dengan pengambilan air tanah yang meningkat juga menyebabkan aliran air bawah tanah yang menuju dan muncul pada kedua sendang sangat berkurang dan bahkan menjadi kering



❖ Mata air panas Brumbung, Desa Krani, Kecamatan Paciran Lamongan




❖ Sendang Duwur Kecamatan Paciran, Lamongan

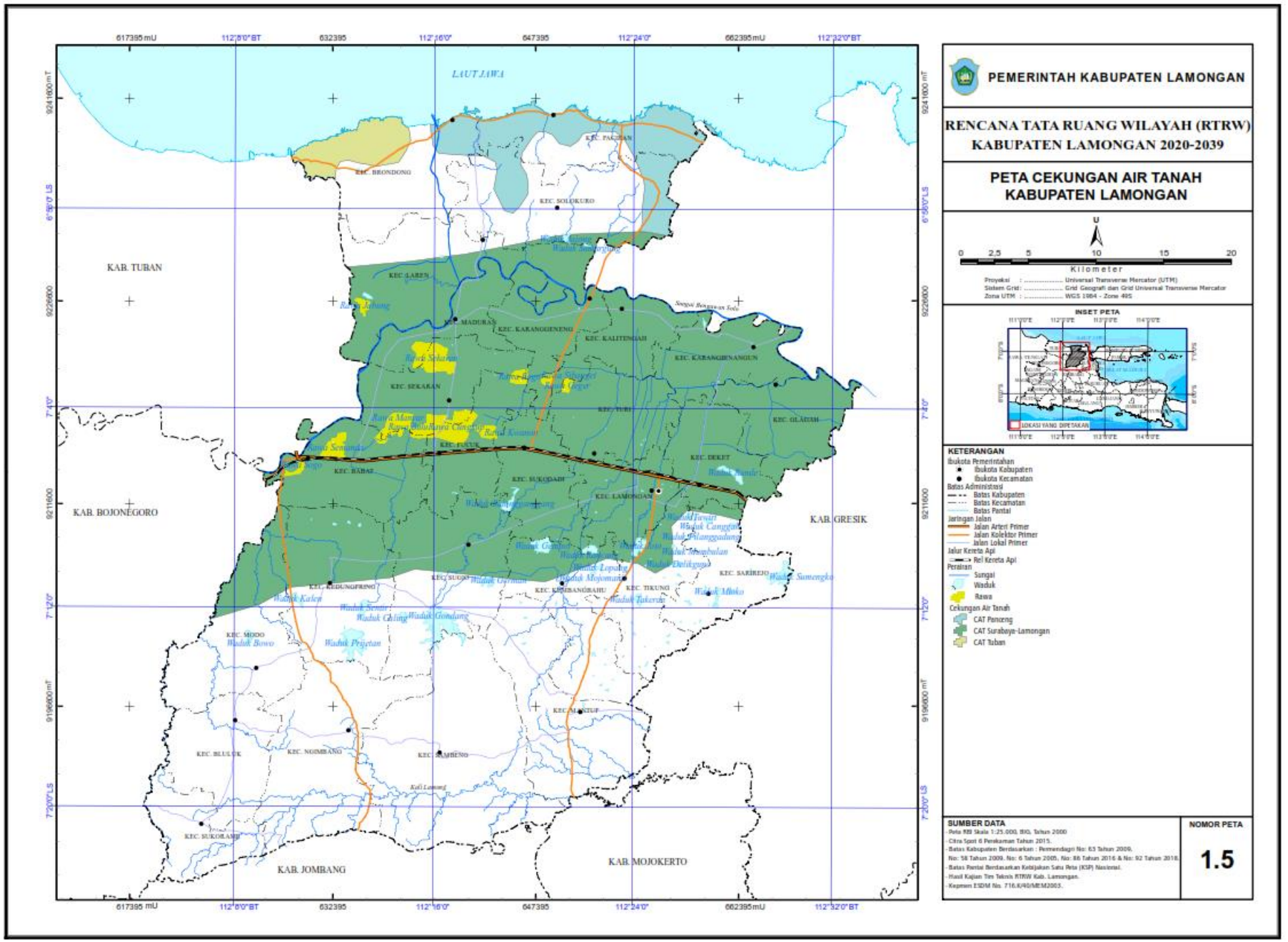


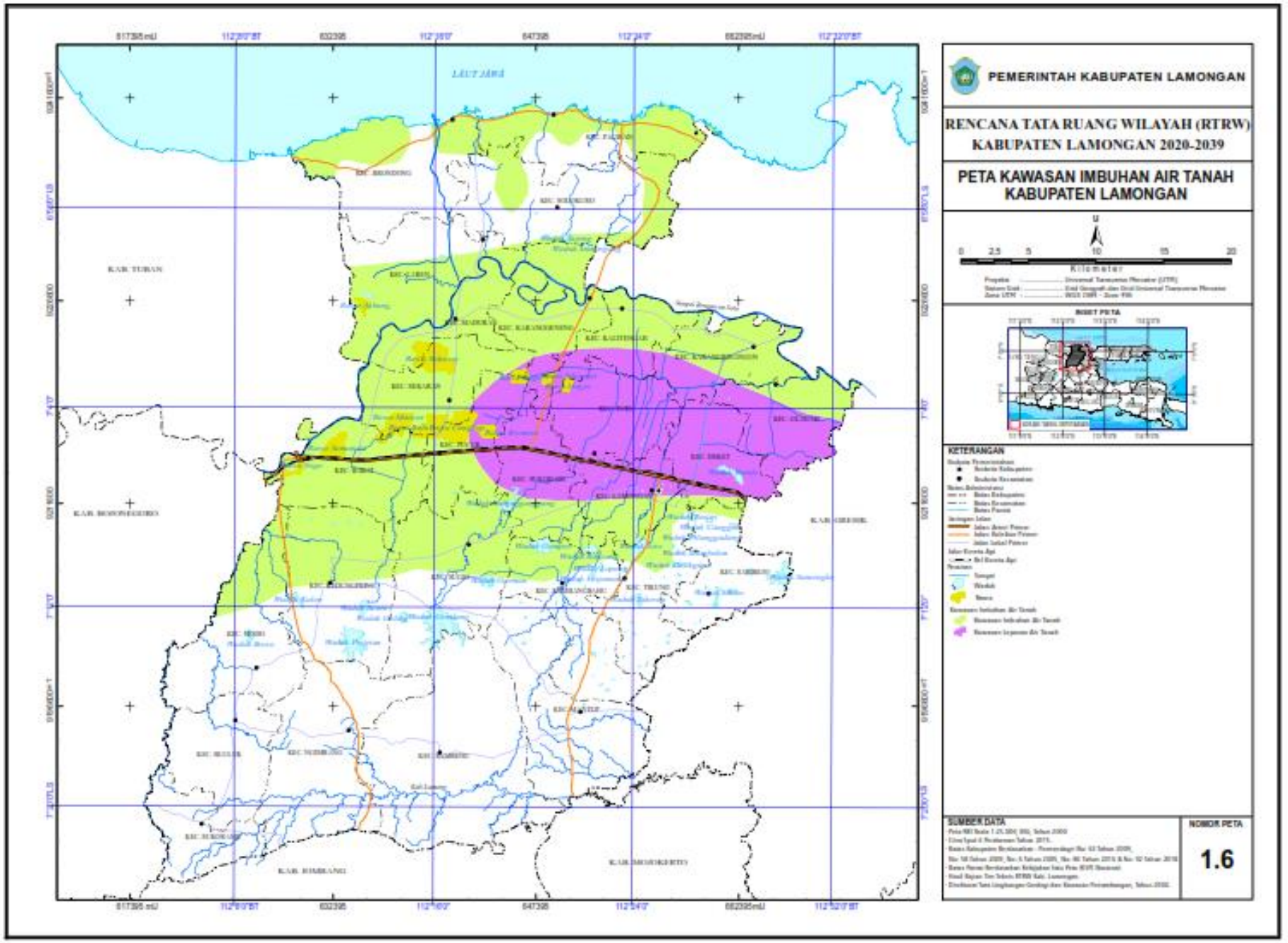

❖ Sendang Agung Kecamatan Paciran, Lamongan

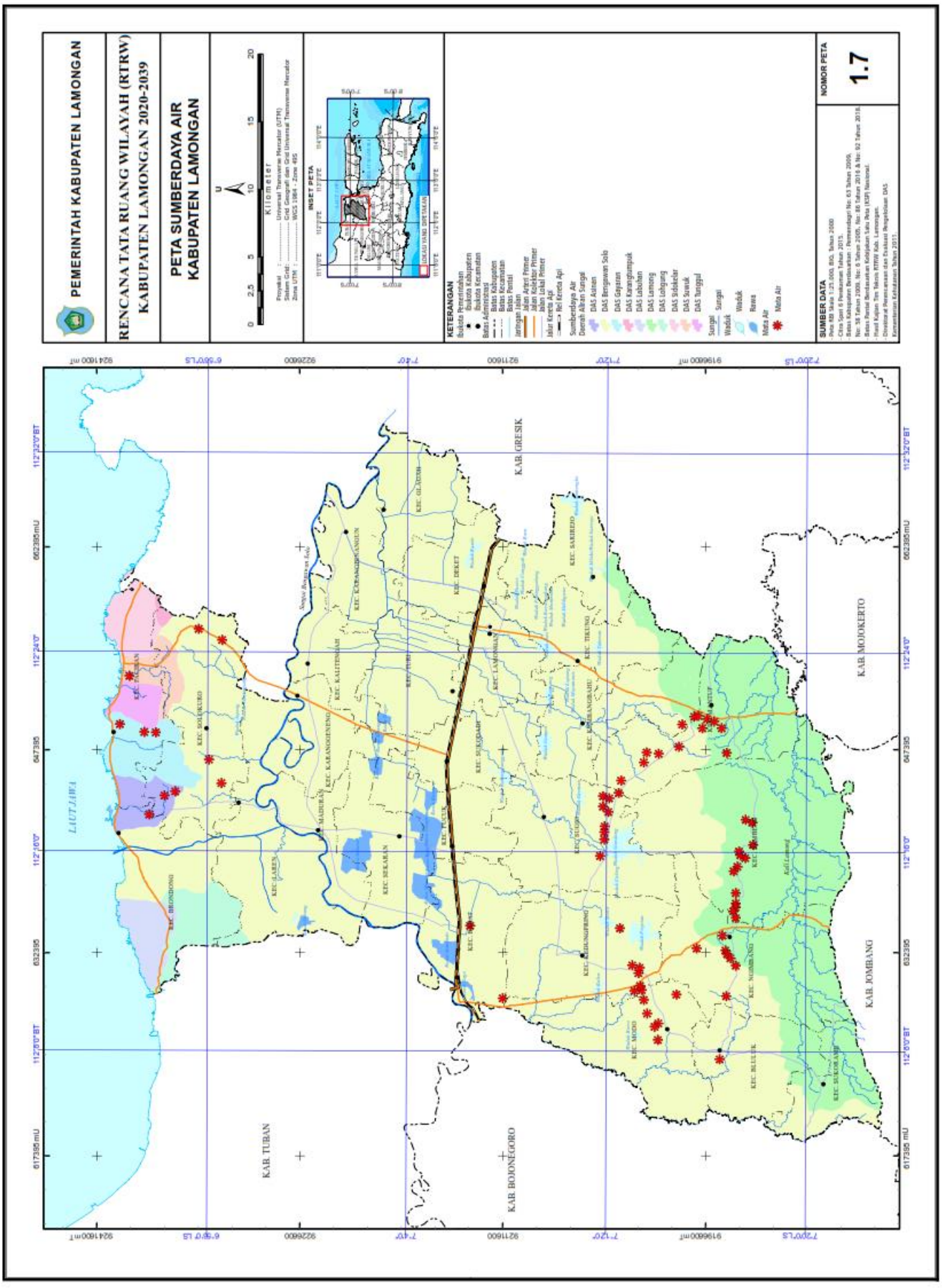



❖ Sendanggede di Desa Sendangharjo dan mata air di Desa Pambon,

kondisi mata air di Kabupaten Lamongan telah mengalami penurunan debit airnya akibat terjadinya degradasi pada lanskap daerah tangkapan airnya, dan pada saat bersamaan, terjadi peningkatan eksploitasi sumber daya airnya


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA CEKUNGAN AIR TANAH
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.5


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN IMBUHAN AIR TANAH
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.6
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. BANGKALAN


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA SUMBERDAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.7
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN
LAUT JAWA

1.9.2.7 KEMAMPUAN TANAH

Kemampuan tanah adalah identifikasi unsur-unsur tanah yang sangat berpengaruh terutama terhadap jenis-jenis penggunaan tanah yang ada di atasnya. Unsur kemampuan tanah yang dimaksud terdiri dari luas kemiringan tanah, tekstur tanah, kedalaman efektif tanah, drainase permukaan tanah, faktor terbatas berbatu dan erosi tanah. Luas tanah berdasarkan kemampuan tanah pada Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10. Luas Wilayah Berdasarkan Kemampuan Tanah

NO	URAIAN	LUAS	
		HEKTAR	%
1	**Luas Kemiringan Tanah**		
	0 - 8 %	92.290	52,7
	8 - 15%	50.907	29,1
	15 - 25%	23.919	13,7
	25-40%	6.571	3,7
	>40%	1.534	0,9
	Total	**175.221**	**100,0**
2	**Tekstur Tanah**		
	Sedang	110.389	63,0
	Halus	61.327	35,0
	Kasar	3.504	2,0
	Total	**175.221**	**100,0**
3	**Kedalaman Efektif Tanah**		
	0 - 30 Cm	5.257	3,0
	31 - 60 Cm	12.265	7,0
	61 - 90 Cm	33.292	19,0
	> 90 Cm	124.407	71,0
	Total	**175.221**	**100,0**
4	**Drainase Permukaan Tanah**		
	Tidak pernah tergenang	146.309	83,5
	Tergenang periodik	28.386	16,2
	Tergenang terus-menerus	526	0,3
	Total	**175.221**	**100,0**
5	**Faktor Terbatas Berbatu**		
	Tidak Berbatu	174.047	99,3
	Berbatu	1.174	0,7
	Total	**175.221**	**100,0**
6	**Erosi Tanah**		
	Tidak ada Erosi	164.304	93,8
	Ada Erosi	10.916	6,2
	Total	**175.221**	**100,0**

Sumber : Hasil Perhitungan

1.9.2.8 HIDROGEOLOGI

Dari peta hidrogeologi akan terlihat kemampuan air tanah di Kabupaten Lamongan, dimana Kabupaten Lamongan terbagi ke dalam air tanah Langka seluas 27.835,62 ha, Produktif Kecil Setempat Berarti (Langka) seluas 43.583,26 ha, Produktif Kecil Setempat Berarti (tinggi >10 lt/dt) seluas 10.992,57 ha, Setempat Produktif (Rendah-Sedang < 5 lt/dt) seluas 9.154,70 ha, Produktif Sedang (Rendah < 5 lt/dt) seluas 83.576,15 ha, Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas (sedang < 5 lt/dt) seluas 61,38 ha, Perairan seluas 17,05 ha. Sedangkan penyebarannya sebagaimana terihat pada Tabel, Diagram dan Peta berikut ini.

Diagram 1.4. Hidrogeologi Kabupaten Lamongan



Tabel 1.11.
Luas Wilayah Berdasarkan Hidrogeologi Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Hirogeologi							Jumlah
		Langka	Produktif Kecil Setempat Berarti (Langka)	Produktif Kecil Setempat Berarti (tinggi >10 lt/dt)	Setempat Produktif (Rendah-Sedang < 5 lt/dt)	Produktif Sedang (Rendah < 5 lt/dt)	Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas (sedang < 5 lt/dt)	Perairan	
1	Sukorame	487,68	2.912,24	0,00	323,11	205,66	0,00	0,00	3.928,70
2	Bluluk	0,00	3.892,21	1.253,95	0,00	653,77	0,00	0,00	5.799,93
3	Ngimbang	1.893,60	4.053,91	2.443,20	0,00	1.615,31	0,00	0,00	10.006,02
4	Sambeng	4.807,69	5.812,88	2.021,48	0,00	2.436,29	0,00	0,00	15.078,34
5	Mantup	913,05	5.939,64	1.471,17	0,00	799,33	0,00	0,00	9.123,19
6	Kembangbahu	0,00	5.144,28	42,38	0,00	1.577,03	61,38	0,00	6.825,07
7	Sugio	2.316,93	885,82	599,09	0,00	5.172,35	0,00	0,00	8.974,19
8	Kedungpring	1.748,40	1.957,29	669,01	0,00	4.198,04	0,00	0,00	8.572,74
9	Modo	77,18	3.475,06	2.175,41	0,00	2.442,10	0,00	0,00	8.169,76
10	Babat	618,58	0,00	0,00	0,00	5.840,86	0,00	0,00	6.459,43
11	Pucuk	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,49	0,00	0,00	4.538,49
12	Sukodadi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,56	0,00	0,00	4.747,56
13	Lamongan	81,34	0,00	0,00	0,00	4.012,20	0,00	0,00	4.093,53
14	Tikung	0,00	4.736,95	0,00	0,00	804,63	0,00	0,00	5.541,58
15	Sarirejo	0,00	4.690,32	0,00	0,00	196,65	0,00	0,00	4.886,96
16	Deket	0,00	82,67	0,00	0,00	4.312,48	0,00	0,00	4.395,15
17	Glagah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,53	0,00	0,00	5.001,53
18	Karangbinangun	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,21	0,00	0,00	4.726,21
19	Turi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,09	0,00	0,00	5.250,09
20	Kalitengah	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,60	0,00	0,00	3.694,60
21	Karanggeneng	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,99	0,00	0,00	4.073,99
22	Sekaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,96	0,00	0,00	5.404,96
23	Maduran	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,68	0,00	0,00	3.277,68
24	Laren	2.474,59	0,00	0,00	247,98	6.671,66	0,00	17,05	9.411,28
25	Solokuro	6.437,60	0,00	149,26	2.891,57	8,47	0,00	0,00	9.486,89
26	Paciran	1.313,80	0,00	167,00	3.756,42	444,11	0,00	0,00	5.681,33
27	Brondong	4.665,18	0,00	0,62	1.935,62	1.470,09	0,00	0,00	8.071,51
JUMLAH		**27.835,62**	**43.583,26**	**10.992,57**	**9.154,70**	**83.576,15**	**61,38**	**17,05**	**175.220,72**
PROSENTASE (%)		**15,89**	**24,87**	**6,27**	**5,22**	**47,70**	**0,04**	**0,01**	**100,00**

Sumber: Peta Hidrogeologi (Direktorat Geologi Tata Lingkungan)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA HIDROGEOLOGI
KABUPATEN LAMONGAN
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.8
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN
LAUT JAWA

1.9.2.9 KAWASAN RAWAN BENCANA

Kawasan rawan bencana berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan meliputi kawasan rawan banjir, gelombang pasang, kebakaran, kekeringan, tanah longsor dan gempa bumi, sebagaimana terlihat pada tabel dan peta berikut ini

a. **Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulangkali). Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lamongan terjadi diseluruh kecamatan akibat luapan Sungai Bengawan Solo, luapan Kali Lamongan, dan anak anak sungai lainnya karena curah hujan yang tinggi, perubahan penggunaan lahan, kurangnya areal resapan serta daya tampung sungai yang semakin berkurang karena adanya sedimentasi dan sampah. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lamongan terjadi di seluruh kecamatan, namun beberapa kecamatan terjadi pada beberapa titik.

Tabel 1.12.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	1.013,96	3.928,70	25,8
2	Bluluk	686,74	5.799,93	11,8
3	Ngimbang	1.613,34	10.006,02	16,1
4	Sambeng	5.716,23	15.078,34	37,9
5	Mantup	636,66	9.123,19	7,0
6	Kembangbahu	2.423,13	6.825,07	35,5
7	Sugio	4.464,43	8.974,19	49,7
8	Kedungpring	3.798,40	8.572,74	44,3
9	Modo	3.328,88	8.169,76	40,7
10	Babat	3.988,16	6.459,43	61,7
11	Pucuk	3.589,94	4.538,49	79,1
12	Sukodadi	4.116,32	4.747,56	86,7
13	Lamongan	4.032,56	4.093,53	98,5
14	Tikung	1.942,79	5.541,58	35,1
15	Sarirejo	1.504,43	4.886,96	30,8
16	Deket	4.320,54	4.395,15	98,3
17	Glagah	5.001,24	5.001,53	100,0
18	Karangbinangun	4.714,88	4.726,21	99,8
19	Turi	5.185,75	5.250,09	98,8
20	Kalitengah	3.676,19	3.694,60	99,5
21	Karanggeneng	4.016,09	4.073,99	98,6
22	Sekaran	4.394,90	5.404,96	81,3
23	Maduran	3.133,10	3.277,68	95,6

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
24	Laren	6.066,41	9.411,28	64,5
25	Solokuro	453,98	9.486,89	4,8
26	Paciran	454,89	5.681,33	8,0
27	Brondong	772,48	8.071,51	9,6
	Jumlah	**85.046,42**	**175.220,72**	**48,5**

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

b. **Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang**

Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah kawasan yang potensial dilanda gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Gelombang pasang di Kabupaten Lamongan terjadi pada desa desa yang berada di kawasan pesisir, meliputi:

1. **Kecamatan Brondong** : Desa Labuhan, Desa Lohgung, Desa Sedayulawas dan Kelurahan Brondong
2. **Kecamatan Paciran** : Desa Banjarwati, Desa Drajat, Desa Kandangsemangkon, Desa Kemantren, Desa Kranji, Desa Paciran, Desa Sidokelar, Desa Tlogosadang, Desa Tunggul, Kelurahan Blimbing, Desa Weru, Desa Sidokumpul, Desa Waru Lor dan Desa Paloh

Tabel 1.13.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	0	3.928,70	0
2	Bluluk	0	5.799,93	0
3	Ngimbang	0	10.006,02	0
4	Sambeng	0	15.078,34	0
5	Mantup	0	9.123,19	0
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0
7	Sugio	0	8.974,19	0
8	Kedungpring	0	8.572,74	0
9	Modo	0	8.169,76	0
10	Babat	0	6.459,43	0
11	Pucuk	0	4.538,49	0
12	Sukodadi	0	4.747,56	0

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
13	Lamongan	0	4.093,53	0
14	Tikung	0	5.541,58	0
15	Sarirejo	0	4.886,96	0
16	Deket	0	4.395,15	0
17	Glagah	0	5.001,53	0
18	Karangbinangun	0	4.726,21	0
19	Turi	0	5.250,09	0
20	Kalitengah	0	3.694,60	0
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0
22	Sekaran	0	5.404,96	0
23	Maduran	0	3.277,68	0
24	Laren	0	9.411,28	0
25	Solokuro	0	9.486,89	0
26	Paciran	4.147,10	5.681,33	73,00
27	Brondong	2.318,76	8.071,51	1,32
	Jumlah	**6.465,86**	**175.220,72**	**1,32**

Sumber : BPBD Kab Lamongan

c. **Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**

Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan yang potensial dilanda jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Lamongan terjadi pada desa desa yang berada disepanjang Sungai Bengawan Solo.

1. **Kecamatan Babat** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Bedahan, Desa Kebalanpelang, Desa Trepan, Desa Truni, Kelurahan Babat dan Kelurahan Banaran
2. **Kecamatan Glagah** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Jatirenggo, Desa Karangturi, Desa Konang dan Desa Meluwur
3. **Kecamatan Kali Tengah** potensi terjadi bahaya longsor pada Desa Butungan, Desa Canditunggal, Desa Kalitengah, Desa Kediren, Desa Kuluran, Desa Pengangsalan, Desa Sugihwaras
4. **Kecamatan Karangbinangun** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Banjarejo, Desa Banyuurip, Desa Bogobabadan, Desa Gawerejo, Desa Karangbinangun, Desa Kuro, Desa Palangan, Desa Watangpanjang, dan Desa Windu
5. **Kecamatan Karanggeneng** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Jagran, Desa Karanggeneng, Desa Karangwungu, Desa Mertani, Desa Prijekngablag, Desa Sumberwudi dan Desa Tracal

6. **Kecamatan Tracal potensi** terjadi bencana longsor pada Desa Bulubrangsi, Desa Bulutigo, Desa Centini, Desa Duri Kulon, Desa Gampangsejati, Desa Godog, Desa Karangtawar, Desa Karangwungu Lor, Desa Keduyung, Desa Laren, Desa Mojoasem, Desa Pasenggrahan, Desa Pelangwot, Desa Siser dan Desa Tamanprijek

3. **Kecamatan Maduran** terjadi bencana longsor pada Desa Blumbang, Desa Brumbun, Desa Duri Wetan, Desa Gedangan, Desa Jangkungsomo, Desa Klagensrampat, Desa Maduran, Desa Pangean, Desa Pangkatrejo, Desa Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Siwuran dan Desa Taji

4. **Kecamatan Sekaran** terjadi bencana longsor pada Desa Besur, Desa Kendal, Desa Keting dan Desa Titik

Tabel 1.14.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	0	3.928,70	0
2	Bluluk	0	5.799,93	0
3	Ngimbang	0	10.006,02	0
4	Sambeng	0	15.078,34	0
5	Mantup	0	9.123,19	0
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0
7	Sugio	0	8.974,19	0
8	Kedungpring	0	8.572,74	0
9	Modo	0	8.169,76	0
10	Babat	1.336,12	6.459,43	20,68
11	Pucuk	0	4.538,49	0
12	Sukodadi	0	4.747,56	0
13	Lamongan	0	4.093,53	0
14	Tikung	0	5.541,58	0
15	Sarirejo	0	4.886,96	0
16	Deket	0	4.395,15	0
17	Glagah	732	5.001,53	14,64
18	Karangbinangun	1.772,36	4.726,21	37,50
19	Turi	0	5.250,09	0
20	Kalitengah	1.149,80	3.694,60	31,12
21	Karanggeneng	1.356,30	4.073,99	33,29
22	Sekaran	596,05	5.404,96	11,03
23	Maduran	2.294,68	3.277,68	70,01
24	Laren	5.313,33	9.411,28	56,46
25	Solokuro	0	9.486,89	0
26	Paciran	0	5.681,33	0
27	Brondong	0	8.071,51	0
	Jumlah	**14.550,64**	**175.220,72**	**8,30**

Sumber : BPBD Kab. Lamongan

d. **Kawasan Rawan Bencana Kekeringan**

Kawasan rawan bencana kekeringan adalah kawasan yang potensial dilanda kekeringan karena ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Lamongan terjadi di semua kecamatan yang terbagi menjadi kawasan rawan bencana kekeringan sedang dan kawasan rawan bencana kekeringan tinggi. Kekeringan sedang seluas 121.260,39 ha dan kekeringan tinggi seluas 53.960,33 ha. Kekeringan tinggi pada umumnya terjadi di Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo dan Kecamatan Babat

Tabel 1.15.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Sedang (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Tinggi (Ha)	Jumlah
1	Sukorame	0	3.928,70	3.928,70
2	Bluluk	0	5.799,93	5.799,93
3	Ngimbang	0	10.006,02	10.006,02
4	Sambeng	2.901,19	12.177,16	15.078,35
5	Mantup	9.123,19	0	9.123,19
6	Kembangbahu	6.825,07	0	6.825,07
7	Sugio	5.183,27	3.790,92	8.974,19
8	Kedungpring	0	8.572,74	8.572,74
9	Modo	0	8.169,76	8.169,76
10	Babat	4.944,33	1.515,11	6.459,43
11	Pucuk	4.538,49	0	4.538,49
12	Sukodadi	4.747,56	0	4.747,56
13	Lamongan	4.093,53	0	4.093,53
14	Tikung	5.541,58	0	5.541,58
15	Sarirejo	4.886,96	0	4.886,96
16	Deket	4.395,15	0	4.395,15
17	Glagah	5.001,53	0	5.001,53
18	Karangbinangun	4.726,21	0	4.726,21
19	Turi	5.250,09	0	5.250,09
20	Kalitengah	3.694,60	0	3.694,60
21	Karanggeneng	4.073,99	0	4.073,99
22	Sekaran	5.404,96	0	5.404,96
23	Maduran	3.277,68	0	3.277,68
24	Laren	9.411,28	0	9.411,28
25	Solokuro	9.486,89	0	9.486,89
26	Paciran	5.681,33	0	5.681,33
27	Brondong	8.071,51	0	8.071,51
	Jumlah	**121.260,39**	**53.960,33**	**175.220,72**

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

e. **Kawasan Rawan Bencana Kebakaran**

Kawasan rawan bencana kebakaran terutama terjadi pada kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung. Kecamatan dimaksud antara lain Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring

Tabel 1.16.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Kebakaran (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	1.340,91	3.928,70	34,13
2	Bluluk	2.340,40	5.799,93	40,35
3	Ngimbang	3.974,02	10.006,02	39,72
4	Sambeng	9.039,25	15.078,34	59,95
5	Mantup	2.425,63	9.123,19	26,59
6	Kembangbahu	10,94	6.825,07	0,16
7	Sugio	1.423,35	8.974,19	15,86
8	Kedungpring	1.481,37	8.572,74	17,28
9	Modo	1.504,39	8.169,76	18,41
10	Babat	0	6.459,43	0,00
11	Pucuk	0	4.538,49	0,00
12	Sukodadi	0	4.747,56	0,00
13	Lamongan	0	4.093,53	0,00
14	Tikung	0	5.541,58	0,00
15	Sarirejo	0	4.886,96	0,00
16	Deket	0	4.395,15	0,00
17	Glagah	0	5.001,53	0,00
18	Karangbinangun	0	4.726,21	0,00
19	Turi	0	5.250,09	0,00
20	Kalitengah	0	3.694,60	0,00
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0,00
22	Sekaran	0	5.404,96	0,00
23	Maduran	0	3.277,68	0,00
24	Laren	2.603,59	9.411,28	27,66
25	Solokuro	2.983,47	9.486,89	31,45
26	Paciran	108,72	5.681,33	1,91
27	Brondong	2.456,00	8.071,51	30,43
	Jumlah	**31.692,04**	**175.220,72**	**18,09**

Sumber : BPBD Kab. Lamongan

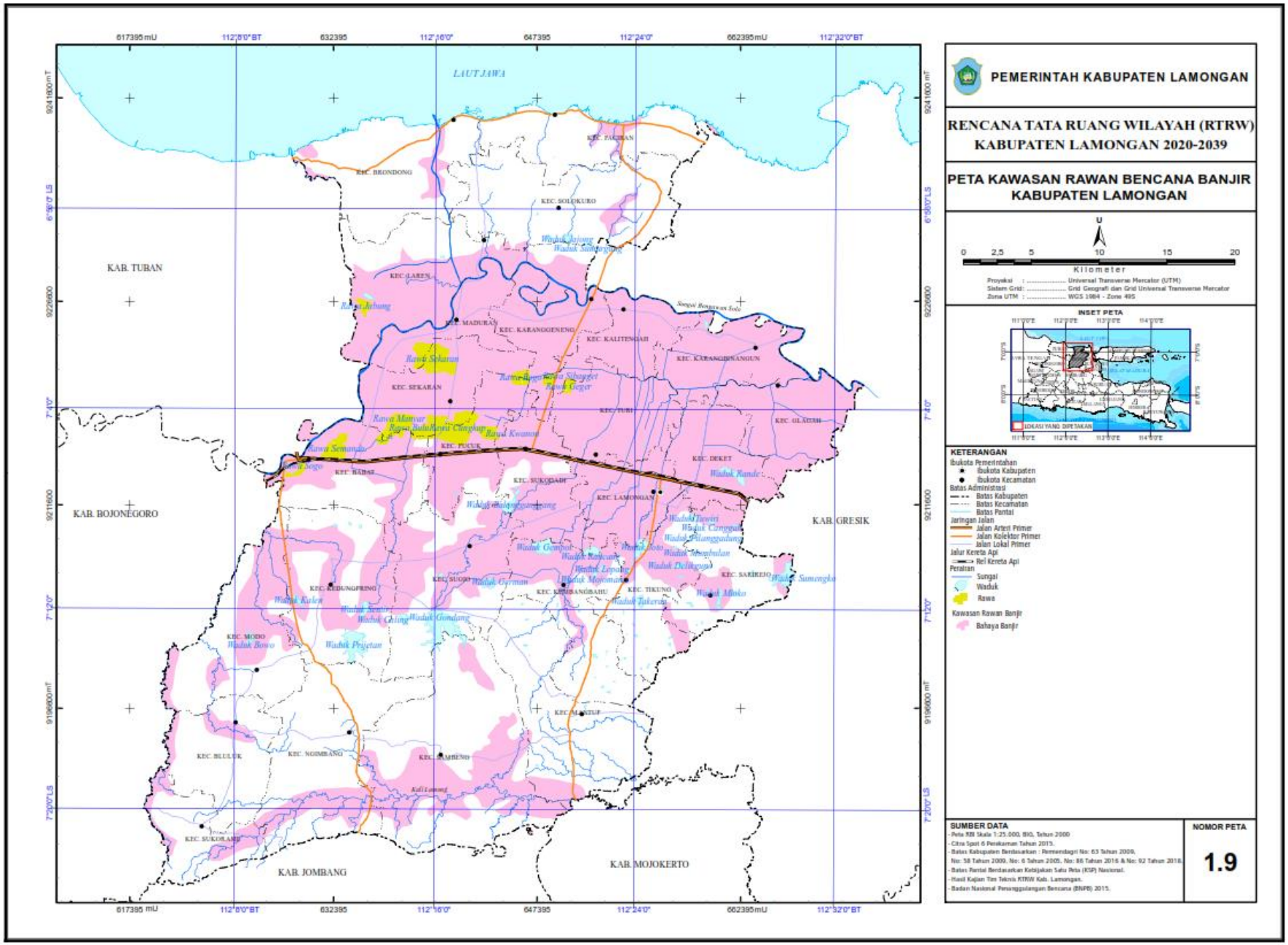
f. **Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**

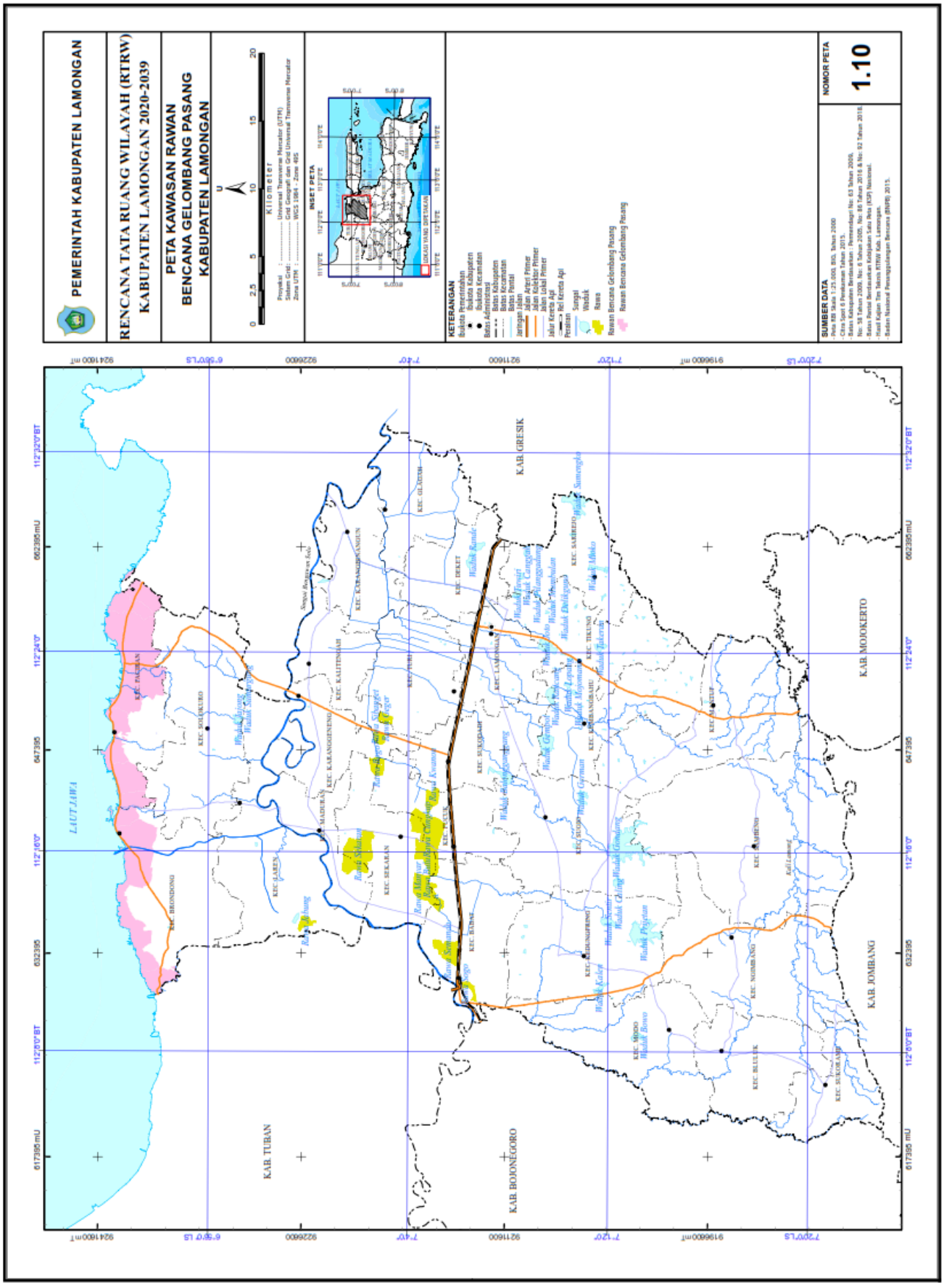
Kawasan rawan bencana gempa bumi terjadi hampir diseluruh wilayah dengan tingkat kerentanan sangat rendah, rendah sampai menengah, sebagaimana terlihat pada tabel dan peta berikut ini.

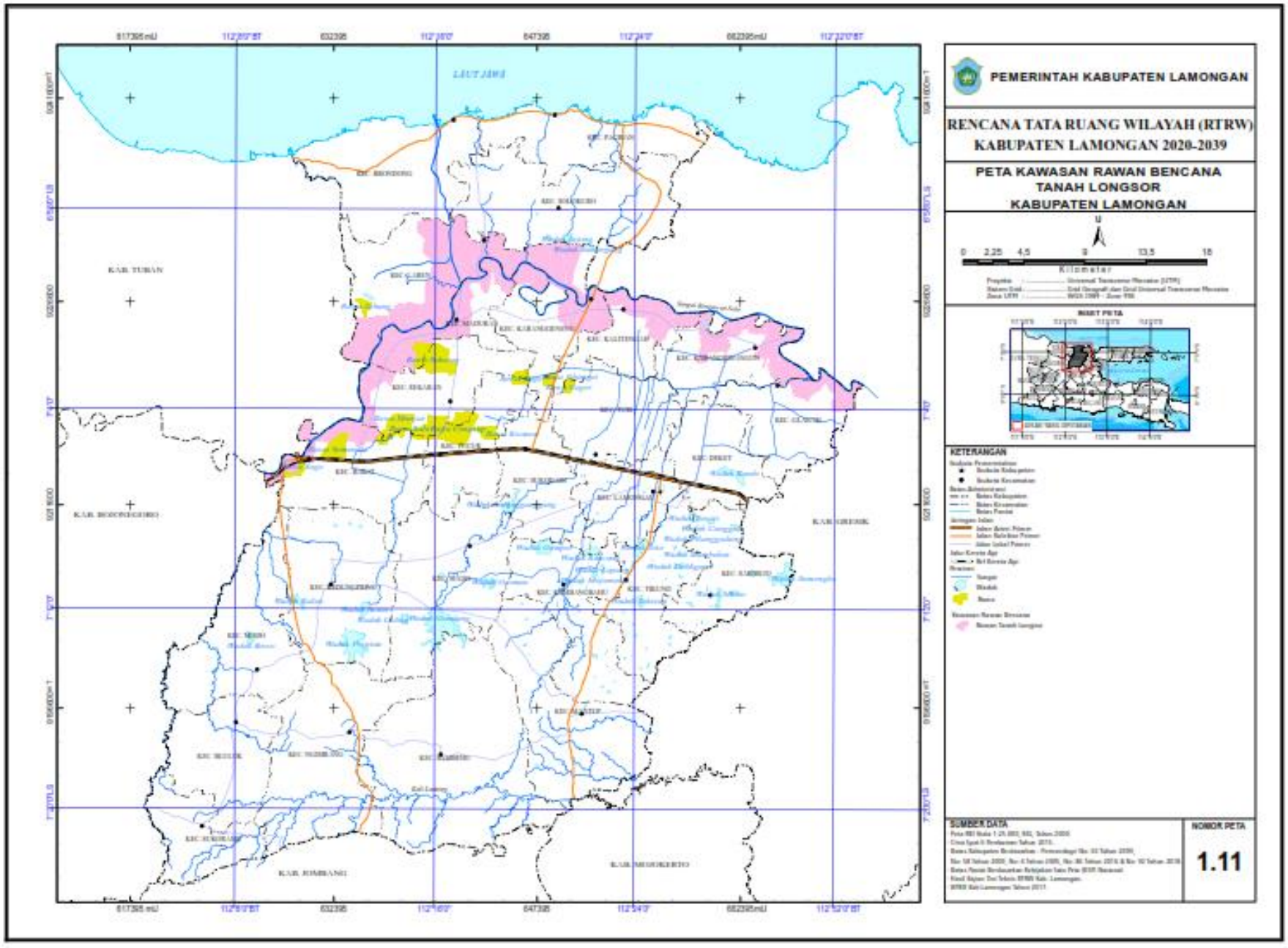
Tabel 1.17.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lamongan

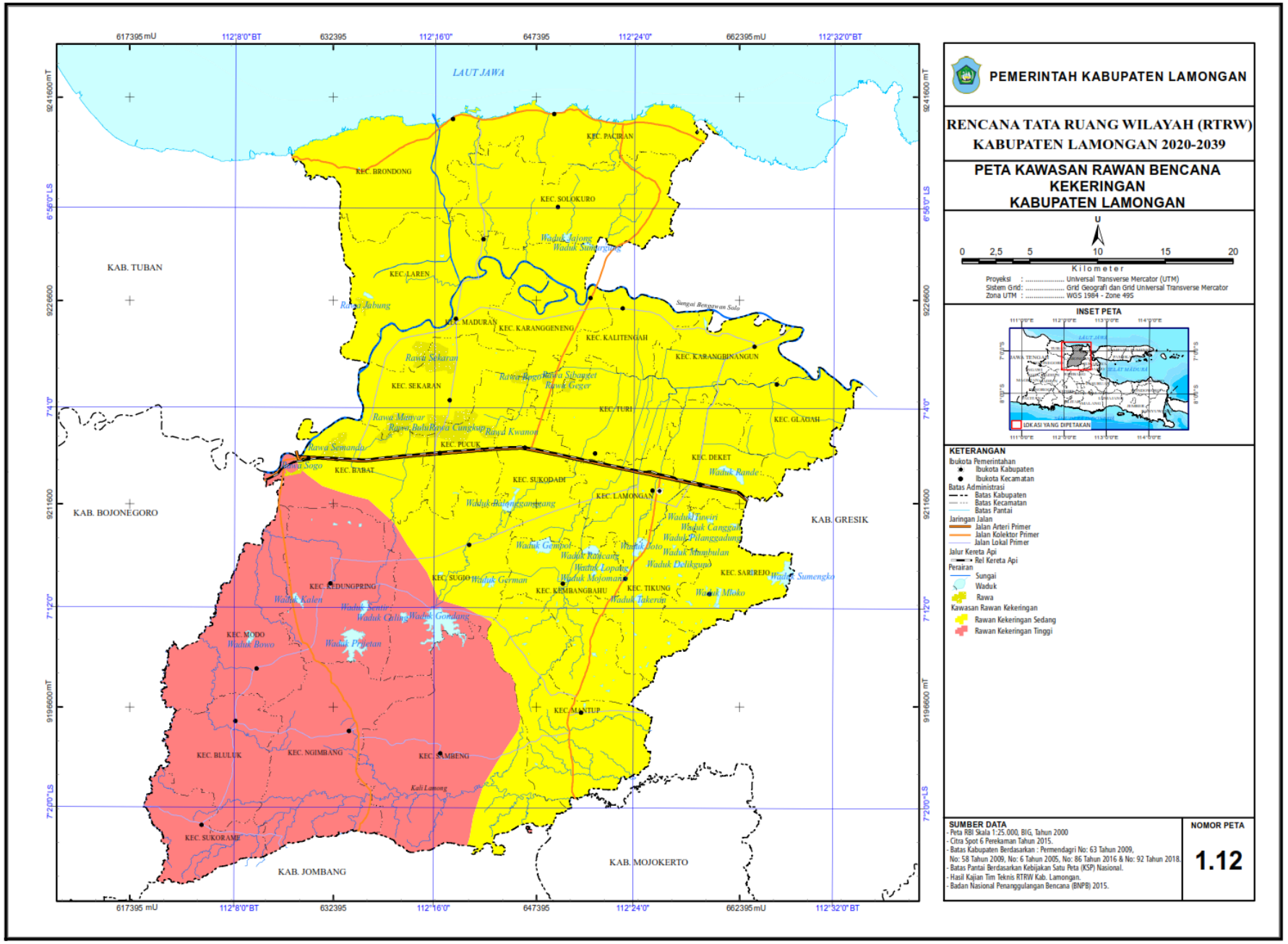
No	Kecamatan	Gempa Bumi				Jumlah
		IV MMI (sangat Rendah)	V-VI MMI (Rendah)	VII-VIII (menengah)	>VIII (tinggi)	
1	Sukorame	0	3.686,39	242,32	0	3.928,71
2	Bluluk	0	4.515,39	1.284,53	0	5.799,92
3	Ngimbang	0	10.006,02	0	0	10.006,02
4	Sambeng	0	14.869,58	208,77	0	15.078,35
5	Mantup	0	8.767,67	355,52	0	9.123,19
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0	0	6.825,07
7	Sugio	0	8.974,19	0	0	8.974,19
8	Kedungpring	0	7.883,53	689,21	0	8.572,74
9	Modo	0	5.687,45	2.482,31	0	8.169,76
10	Babat	0	1.773,39	4.686,04	0	6.459,43
11	Pucuk	0	3.564,43	974,06	0	4.538,49
12	Sukodadi	0	4.747,56	0	0	4.747,56
13	Lamongan	185,43	3.908,10	0	0	4.093,53
14	Tikung	1.897,71	3.643,87	0	0	5.541,58
15	Sarirejo	4.289,46	597,5	0	0	4.886,96
16	Deket	106,41	3.138,55	1.150,19	0	4.395,15
17	Glagah	2.240,60	2.665,16	95,78	0	5.001,54
18	Karangbinangun	33,95	4.544,36	147,9	0	4.726,21
19	Turi	0	4.603,99	646,1	0	5.250,09
20	Kalitengah	0	3.694,60	0	0	3.694,60
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0	0	4.073,99
22	Sekaran	0	3.047,38	2.357,58	0	5.404,96
23	Maduran	0	2.879,34	398,34	0	3.277,68
24	Laren	92,23	6.938,51	2.380,55	0	9.411,29
25	Solokuro	5.303,07	4.183,82	0	0	9.486,89
26	Paciran	5.672,76	8,56	0	0	5.681,32
27	Brondong	1.738,90	6.294,07	38,54	0	8.071,51
	Jumlah	**21.560,52**	**135.522,47**	**18.137,74**	**0,00**	**175.220,73**
	Prosentase (%)	**12,31**	**77,36**	**10,33**	**0**	**100**

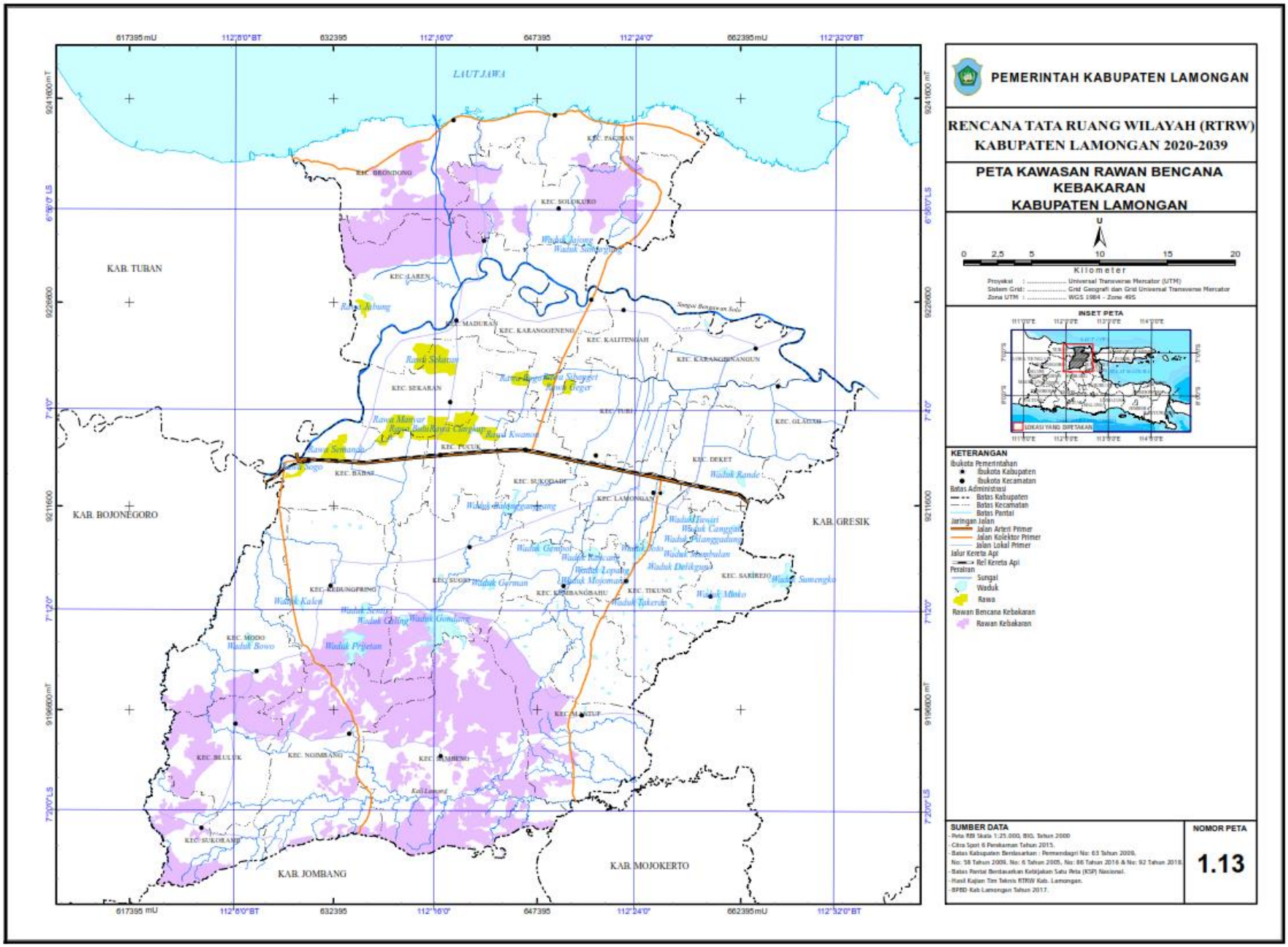
Sumber : Digitasi Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

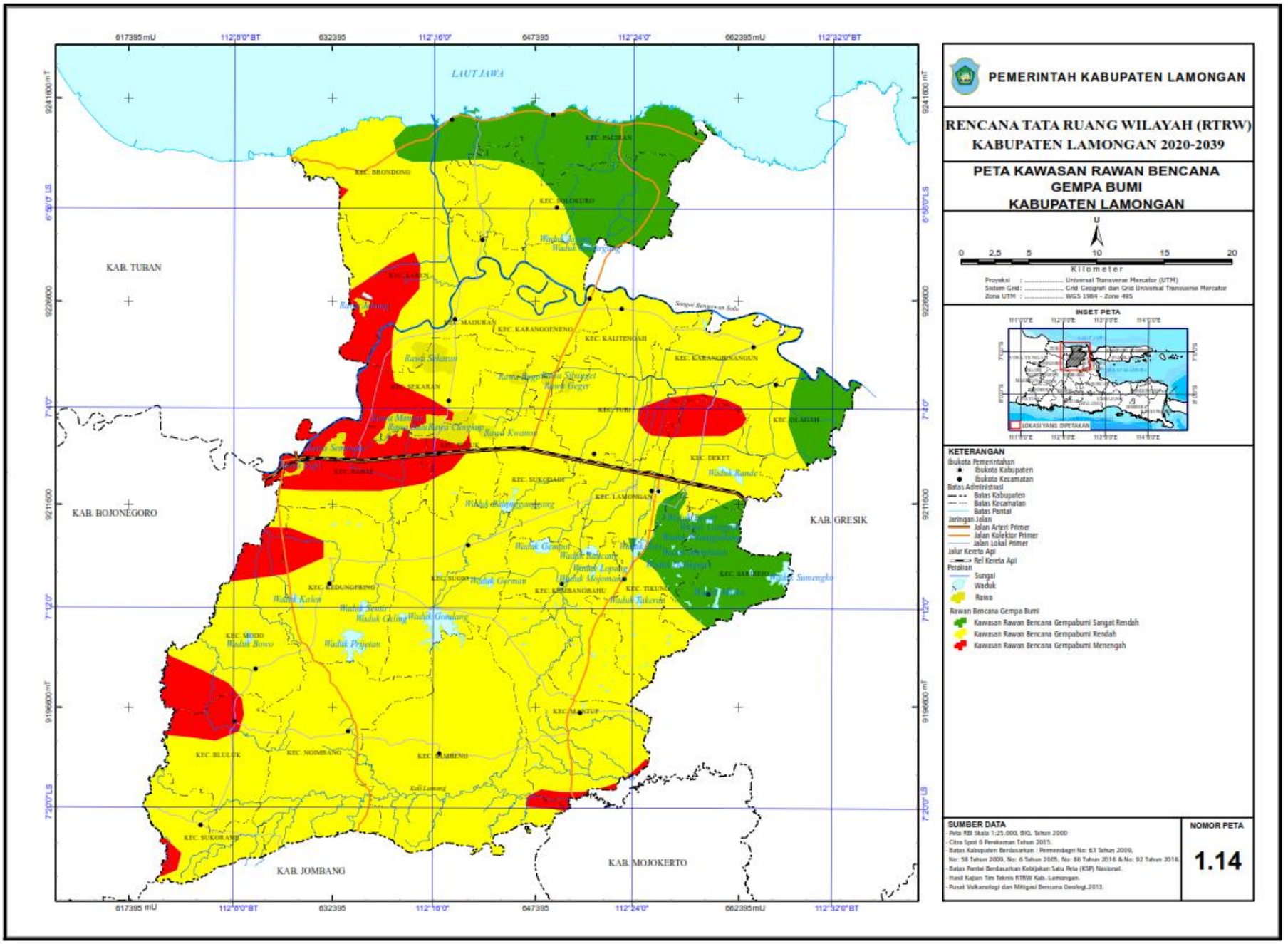

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKOREJO
Waduk Sidorejo
Waduk Sidogiri
Rawa Sekaran
Rawa Mantup
Rawa Semanding
Rawa Kwanon
Waduk Kandet
Waduk Tawiri
Waduk Cungur
Waduk Pilanggadung
Waduk Gembol
Waduk Kalicacik
Waduk Tambulan
Waduk Delikgowah
Waduk Lepalan
Waduk Mojomati
Waduk German
Waduk Takeran
Waduk Mlinko
Waduk Sumengko
Waduk Kulon
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Bowo
Kali Lamong
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Kawasan Rawan Banjir
Bahaya Banjir
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 88 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015.
NOMOR PETA
1.9


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN RAWAN
BENCANA GELOMBANG PASANG
KABUPATEN LAMONGAN
U
Kilometer
0
2,5
5
10
15
20
INSET PETA
KETERANGAN
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Pelabuhan
Sungai
Waduk
Rawa
Rawan Bencana Gelombang Pasang
Rawan Bencana Gelombang Pasang
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.10
LAUT JAWA
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN RAWAN BENCANA
TANAH LONGSOR
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,25 4,5 9 13,5 18
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.11
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN RAWAN BENCANA
KEKERINGAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Kawasan Rawan Kekeringan
Rawan Kekeringan Sedang
Rawan Kekeringan Tinggi
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015.
NOMOR PETA
1.12
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KAB. GRESIK
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. REDUNGPRING
KEC. MODO
KEC. MANTUP
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKORAME
Waduk Jajong
Waduk Sumurgeng
Rawa Jabung
Rawa Sekaran
Rawa Bogo
Rawa Sibanget
Rawa Gegger
Rawa Meneyar
Rawa Buti
Rawa Cangkup
Rawa Kwanon
Rawa Semando
Rawa Sogo
Waduk Randegan
Waduk Balongganggang
Waduk Gempol
Waduk Rancang
Waduk Lopang
Waduk Mojoman
Waduk Takerin
Waduk Toto
Waduk Tiwiri
Waduk Cangga
Waduk Pilanggaduwur
Waduk Mbabulan
Waduk Delikguno
Waduk Mloko
Waduk Sumengko
Waduk German
Waduk Kalen
Waduk Sentir
Waduk Culing
Waduk Gondang
Waduk Bowo
Waduk Prijetan
Kali Lamong
Sungai Bengawan Solo


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN RAWAN BENCANA
KEBAKARAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Rawan Bencana Kebakaran
Rawan Kebakaran
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- BPBD Kab Lamongan Tahun 2017.
NOMOR PETA
1.13
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. REDUNGPRING
KEC. MODO
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKOREJO
KEC. MANTUP
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk German
Waduk Mojomati
Waduk Tikerian
Waduk Mlirip
Waduk Sumengko
Waduk Bowo
Waduk Kalen
Waduk Dalegan
Waduk Delikgunung
Waduk Lepulu
Waduk Gembol
Waduk Tenori
Waduk Cangkir
Waduk Pilanggadung
Waduk Rande
Rawa Sekaran
Rawa Bubu
Rawa Kwanon
Rawa Mlangsen
Rawa Tegal
Rawa Bunder
Rawa Jabung
Rawa Semanan
Rawa Mlangsen
Kali Lamong
Sungai Bengawan Solo


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN RAWAN BENCANA
GEMPA BUMI
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. DEKET
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. PUCUK
KEC. SUGIO
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NOMBANG
KEC. MANTUP
KEC. MENGANTI
KEC. SUKOREJO
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Gembor
Waduk German
Waduk Sumengko
Kali Lamong
617395 mU
632395
647395
662395 mU
112°8'0" BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0" BT
9241600 mT
9226600
9211600
9196600 mT
6°58'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Rawan Bencana Gempa Bumi
Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Sangat Rendah
Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Rendah
Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Menengah
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,2013.
NOMOR PETA
1.14

1.9.3 KEPENDUDUKAN

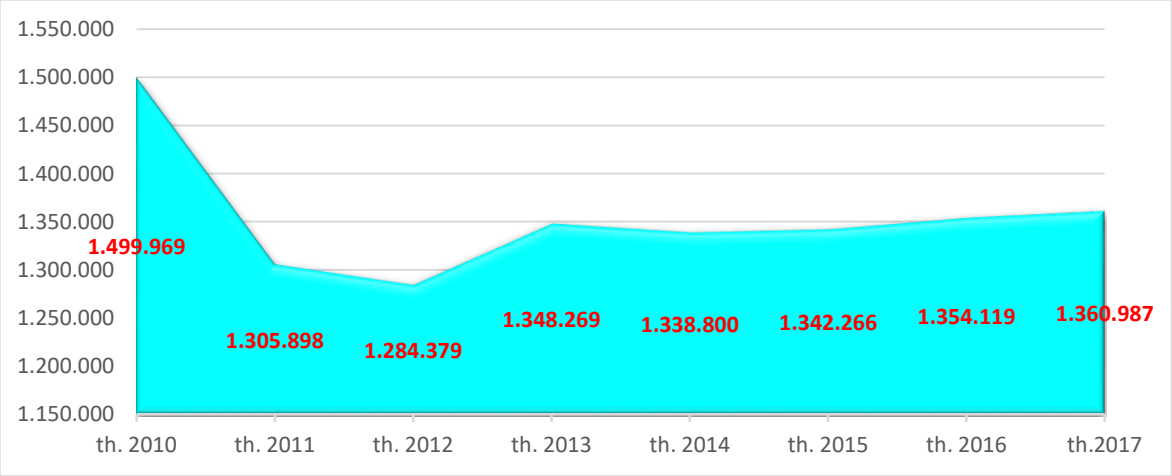
1.9.3.1. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK

Penduduk merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan suatu kawasan atau wilayah. Hal ini dikarenakan penduduk selain sebagai obyek juga berperan sebagai subyek dalam pembangunan serta tujuan akhir dari produk rencana. Oleh karena itu, karakteristik kependudukan diperlukan untuk menentukan penyediaan serta prioritas pelayanan fasilitas yang direncanakan bagi kebutuhan masyarakat yang bermukim pada kawasan perencanaan.

Pada sub bab kependudukan ini akan membahas gambaran umum mengenai kondisi-kondisi faktual kependudukan yang meliputi jumlah penduduk, perkembangan penduduk, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, dan jumlah penduduk menurut pemeluk agama Kabupaten Lamongan. Kondis faktual kependudukan ini merupakan kumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait berupa data statistik dan profil-profil terkait wilayah.

Kabupaten Lamongan terbagi atas 27 Kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2010 sebesar 1.499.969 jiwa sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan mencapai 1.354.119 jiwa.

Diagram 1.5.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2017



1.9.3.2. KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk Kabupaten Lamongan pada Tahun 2017 sebesar 7,51 jiwa/ha, dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Paciran sebesar 20,30 jiwa/ha dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Sambeng sebesar 2,63 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.18 berikut ini

Tabel 1.18.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2017

No	Kecamatan	Penduduk							
		th. 2010	th. 2011	th. 2012	th. 2013	th. 2014	th. 2015	th. 2016	th. 2017
1	Sukorame	23.059	21.854	21.736	21.222	20.944	20.401	20957	20562
2	Bluluk	24.655	22.695	21.337	22.221	22.426	21.393	22665	21831
3	Ngimbang	49.279	42.872	45.942	47.192	46.855	46.386	49844	46313
4	Sambeng	52.861	54.718	50.055	51.348	51.579	50.384	47417	51406
5	Mantup	48.561	43.687	44.187	44.881	45.245	43.898	88406	45204
6	kembangbahu	53.080	44.759	49.465	48.823	48.953	47.101	60186	49091
7	Sugio	69.571	60.765	57.929	61.875	61.392	60.567	71180	61495
8	Kedungpring	69.213	65.831	56.370	60.855	59.900	60.167	49397	59778
9	Modo	55.325	48.107	47.485	49.962	49.676	48.990	47041	49433
10	Babat	96.867	85.185	85.066	88.547	88.332	88.958	35527	88615
11	Pucuk	57.363	51.267	47.085	48.816	48.514	49.529	52170	49979
12	Sukodadi	61.168	58.146	54.312	56.145	56.391	55.538	62052	57148
13	Lamongan	72.034	65.847	67.289	67.167	68.105	66.549	49132	68173
14	Tikung	45.038	41.342	43.852	43.822	44.126	42.840	94230	44479
15	Sarirejo	26.406	25.533	24.659	24.813	24.907	24.314	47342	25058
16	Deket	48.647	44.454	43.932	44.553	45.149	43.608	46128	44193
17	Glagah	48.990	27.251	41.097	42.879	43.064	42.525	57405	43180
18	Karangbinangun	45.247	45.728	39.068	41.248	41.851	40.381	44442	41080
19	Turi	57.681	53.144	52.995	53.755	54.592	53.198	49788	54549
20	Kalitengah	38.994	35.333	33.417	35.756	36.007	35.429	36009	35931
21	Karanggeneng	51.004	47.660	41.603	44.154	43.843	44.735	55034	45554
22	Sekaran	61.547	60.253	40.852	47.448	43.926	49.099	68729	49142
23	Maduran	47.830	41.927	31.196	36.054	34.645	37.329	44968	37283
24	Laren	58.449	37.268	46.588	50.910	47.873	52.054	41310	51801
25	Selokuro	58.637	44.369	38.437	46.029	45.857	47.086	44867	48348

No	Kecamatan	Penduduk							
		th. 2010	th. 2011	th. 2012	th. 2013	th. 2014	th. 2015	th. 2016	th. 2017
26	Paciran	100.710	78.698	90.604	94.499	93.248	96.017	42695	97208
27	Brondong	77.753	57.205	67.821	73.295	71.400	73.790	25198	74153
	Jumlah	**1.499.969**	**1.305.898**	**1.284.379**	**1.348.269**	**1.338.800**	**1.342.266**	**1.354.119**	**1.360.987**

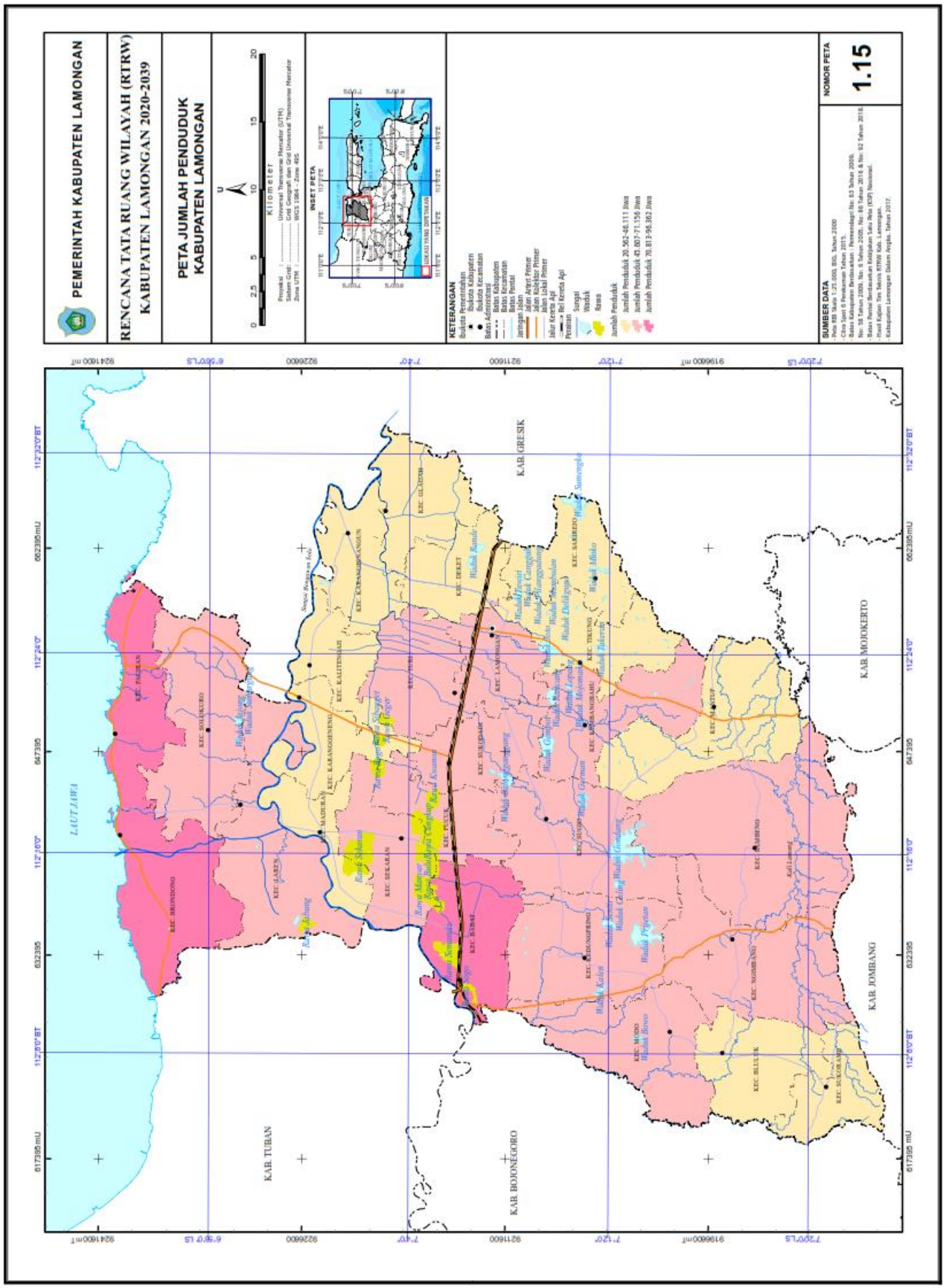
Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2011 s/d
Tahun 2018

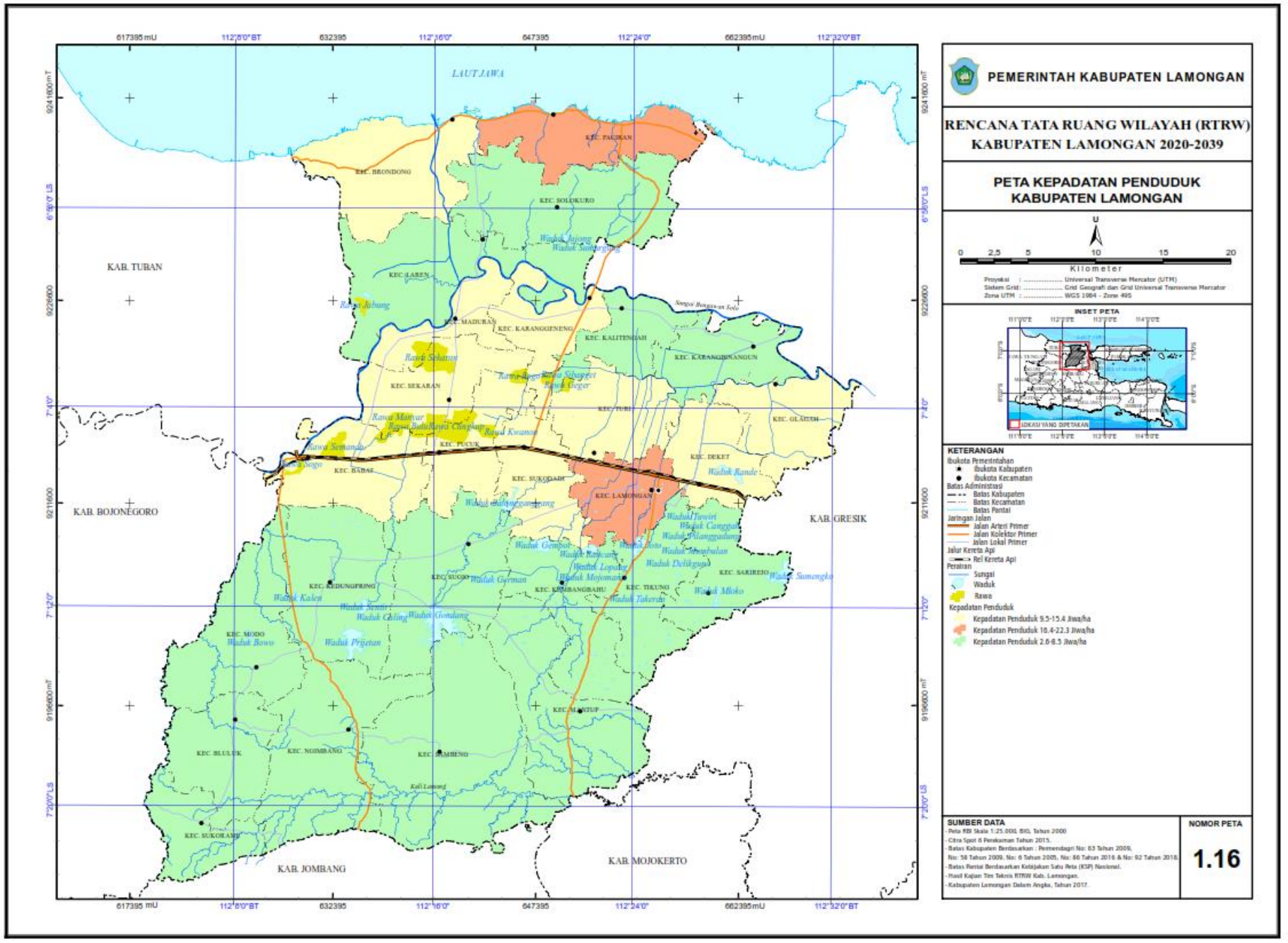
Tabel 1.19. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Sukorame	3.929	20.562	5,23
2	Bluluk	5.800	21.831	3,76
3	Ngimbang	10.006	46.313	4,63
4	Sambeng	15.078	51.406	3,41
5	Mantup	9.123	45.204	4,95
6	kembangbahu	6.825	49.091	7,19
7	Sugio	8.974	61.495	6,85
8	Kedungpring	8.573	59.778	6,97
9	Modo	8.170	49.433	6,05
10	Babat	6.459	88.615	13,72
11	Pucuk	4.538	49.979	11,01
12	Sukodadi	4.748	57.148	12,04
13	Lamongan	4.094	68.173	16,65
14	Tikung	5.542	44.479	8,03
15	Sarirejo	4.887	25.058	5,13
16	Deket	4.395	44.193	10,05
17	Glagah	5.002	43.180	8,63
18	Karangbinangun	4.726	41.080	8,69
19	Turi	5.250	54.549	10,39
20	Kalitengah	3.695	35.931	9,73
21	Karanggeneng	4.074	45.554	11,18
22	Sekaran	5.405	49.142	9,09
23	Maduran	3.278	37.283	11,37
24	Laren	9.411	51.801	5,50
25	Selokuro	9.487	48.348	5,10
26	Paciran	5.681	97.208	17,11
27	Brondong	8.072	74.153	9,19
	Jumlah	**175.221**	**1.360.987**	**7,77**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018 dan Hasil Digitasi Peta

PETA 2.12 PETA JUMLAH PENDUDUK




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KEPADATAN PENDUDUK
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zona 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk 9.5-15.4 Jiwa/ha
Kepadatan Penduduk 16.4-22.3 Jiwa/ha
Kepadatan Penduduk 2.6-8.5 Jiwa/ha
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Kabupaten Lamongan Dalam Angka, Tahun 2017.
NOMOR PETA
1.16
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. DEKET
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. KEDUNGPRING
KEC. SUGIO
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. MANTUP
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKOREJO
Waduk Jajong
Waduk Sumurgeneng
Rawa Sekaran
Rawa Bulumanja Cinyanan
Rawa Kwanon
Rawa Semanda
Waduk Rande
Waduk Gembor
Waduk Kancan
Waduk Lopang
Waduk Mojomanis
Waduk Tukerah
Waduk German
Waduk Kalen
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Bowo
Waduk Miloko
Waduk Sumengko
Kali Lamong

1.9.3.3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

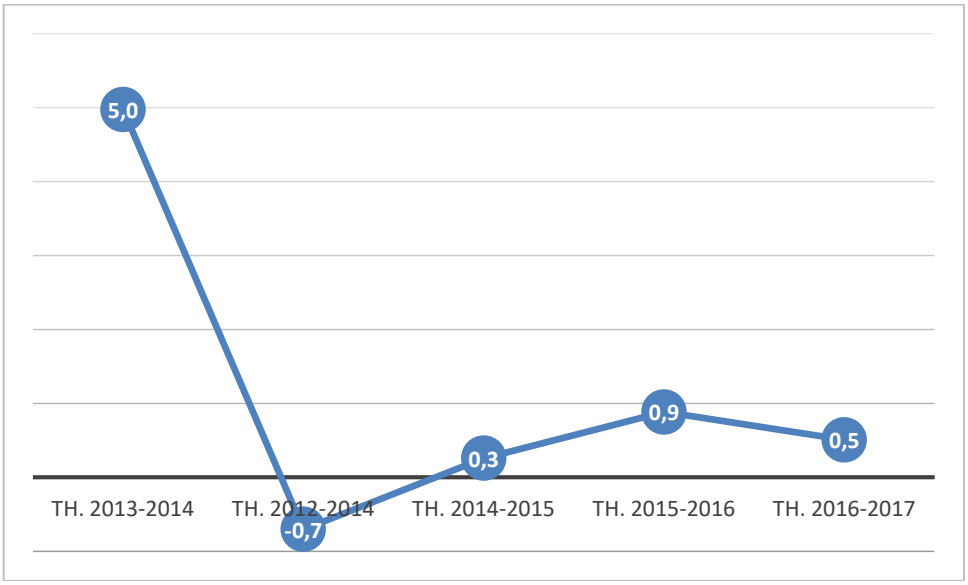
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2014 sebesar 5%,

Tabel 1.20.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)					Rata-Rata
		Th. 2013-2014	Th. 2012-2014	Th. 2014-2015	Th. 2015-2016	Th. 2016-2017	
	Lamongan	**5,0**	**-0,7**	**0,3**	**0,9**	**0,5**	1,2

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2014 s/d Tahun 2018

Diagram 1.6.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017



1.9.3.4. JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

Jumlah penduduk menurut Agama di Kabupaten Lamongan terbagi atas kelompok Agama Islam, Kristen Prostetan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Prosentase untuk masing-masing agama yang dianut sebagai berikut : Pemeluk Agama Islam sebesar 99,72% dari seluruh penduduk Kabupaten Lamongan, sedangkan sisisanya 0,28% merupakan penduduk yang menganut agama kistien, katolik, hindu, budha, konghucu serta kepercayaan.

Tabel 1.21.
Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kabupaten Lamongan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	Sukorame	20.919	37	-	1	-
2	Bluluk	22.394	271	-	-	-
3	Ngimbang	49.573	258	12	-	1
4	Sambeng	47.311	98	5	-	3

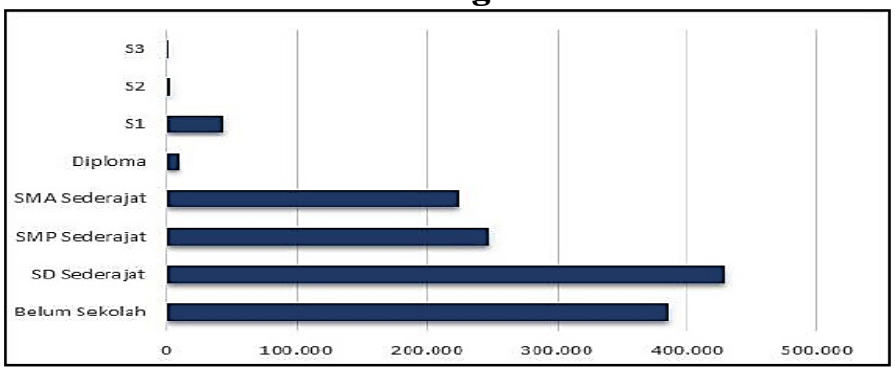
No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
5	Mantup	88.351	40	15	-	-
6	Kembangbahu	60.093	93	-	-	-
7	Sugio	71.143	6	31	-	-
8	Kedungpring	49.364	29	-	4	-
9	Modo	46.974	63	4	-	-
10	Babat	34.903	515	109	-	-
11	Pucuk	52.148	12	10	-	-
12	Sukodadi	62.004	24	20	4	-
13	Lamongan	48.286	397	314	74	61
14	Tikung	94.207	11	12	-	-
15	Sarirejo	47.337	5	-	-	-
16	Deket	46.115	-	13	-	-
17	Glagah	57.401	4	-	-	-
18	Karangbinangun	44.379	63	-	-	-
19	Turi	48.662	847	-	279	-
20	Kalitengah	35.992	17	-	-	-
21	Karanggeneng	55.028	6	-	-	-
22	Sekaran	68.711	12	6	-	-
23	Maduran	44.968	-	-	-	-
24	Laren	41.310	-	-	-	-
25	Solokuro	44.867	-	-	-	-
26	Paciran	42.660	4	28	-	3
27	Brondong	25.167	13	14	4	-
Jumlah		**1.350.267**	**2825**	**593**	**366**	**68**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2018

1.9.3.5. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK TINGKAT PENDIDIKAN

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lamongan terbesar adalah tamat SD sebesar 31,97%, belum sekolah sebesar 28,77%, SMP sederajat sebesar 18,47%, SMA sederajat sebesar 16,66%, Sarjana sebesar 3,26%, Diploma sebesar 0,66%, S2 sebesar 0,20.

Diagram 1.7.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2017



Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2018

Tabel 1.22.
Jumlah Penduduk Menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Belum Sekolah	SD sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	Diploma	S1	S2	S3	Jumlah
1	Sukorame	6.058	7.957	3.949	2.523	106	350	14	-	20.957
2	Bluluk	5.936	9.471	4.056	2.718	92	370	22	-	22.665
3	Ngimbang	11.339	18.556	9.931	6.287	268	964	17	1	47.417
4	Sambeng	10.756	22.916	10.492	6.650	262	1.031	63	-	52.170
5	Mantup	8.294	21.655	8.433	6.373	309	1.003	57	4	46.128
6	Kembangbahu	9.505	21.544	9.946	7.278	274	1.176	65	-	49.788
7	Sugio	14.555	26.420	10.577	8.247	505	1.621	124	3	62.052
8	Kedungpring	13.073	22.354	12.152	10.636	423	1.455	93	-	60.186
9	Modo	11.112	21.382	9.734	6.497	231	836	52	-	49.844
10	Babat	21.562	33.554	15.368	14.232	573	2.947	170	-	88.406
11	Pucuk	11.025	18.776	9.939	7.760	250	1.297	84	1	49.132
12	Sukodadi	12.701	21.103	11.475	10.010	445	1.553	113	5	57.405
13	Lamongan	11.557	20.831	10.138	17.533	1262	6.781	615	12	68.729
14	Tikung	8.685	21.022	7.684	5.959	320	1.220	78	-	44.968
15	Sarirejo	5.448	10.732	4.754	3.458	138	638	30	-	25.198
16	Deket	8.133	15.440	7.769	10.812	427	2.172	113	1	44.867
17	Glagah	6.929	14.710	7.688	11.069	320	1.905	73	1	42.695
18	Karangbinangun	8.560	14.389	8.316	8.433	203	1.355	54	-	41.310
19	Turi	10.698	21.089	10.716	10.635	364	1.460	72	-	55.034
20	Kalitengah	6.995	13.883	7.050	6.803	219	1.008	47	4	36.009
21	Karanggeneng	9.766	15.964	8.728	8.241	269	1.375	98	1	44.442
22	Sekaran	10.943	18.061	8.998	7.399	280	1.286	74	-	47.041
23	Maduran	7.990	13.716	7.058	5.454	244	1.008	56	1	35.527
24	Laren	11.168	17.292	10.134	8.976	281	1.480	64	2	49.397
25	Solokuro	10.450	17.018	9.283	8.692	241	1.582	76	-	47.342

No.	Kecamatan	Belum Sekolah	SD sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	Diploma	S1	S2	S3	Jumlah
26	Paciran	18.740	33.296	16.871	19.490	641	4.934	256	2	94.230
27	Brondong	18.486	27.279	12.059	10.689	362	2.218	86	1	71.180
Jumlah		**290.464**	**520.410**	**253.298**	**232.854**	**9.309**	**45.025**	**2.720**	**39**	**1.354.119**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2018

1.9.3.6. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kabupaten Lamongan didominasi oleh penduduk sebagai petani sebesar 22,06%, belum bekerja sebesar 20,21%, pelajar/mahasiswa sebesar 17,51%.

Tabel 1.23.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
di Kabupaten Lamongan Tahun 2017

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	262.653
2	Megurus rumah tangga	139.577
3	Pelajar/mahasiswa	236.568
4	Pensiunan	3.623
5	PNS	12.254
6	TNI	1.836
7	POLRI	1.159
8	Perdagangan	507
9	Petani/Pekebun	301.410
10	Peternak	42
11	Nelayan/Perikanan	14.036
12	Industri	50
13	Kontruksi	18
14	Transportasi	33
15	Karyawan Swasta	58.795
16	Karyawan BUMN	339
17	Karyawan BUMD	51
18	Karyawan Honorer	159
19	Buruh Harian Lepas	10.757
20	Buruh tani/Perkebunan	605
21	Buruh Nelayan/Perikanan	33
22	Buruh Peternakan	2
23	Pembantu Rumah Tangga	749
Jumlah		**1.045.256**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2018

1.9.4. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 didominasi oleh penggunaan lahan tidak terbangun, berupa sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegalan, tambak, hutan dengan prosentase sebesar 78,41% atau dengan luas mencapai 155.117,16 ha. Sedangkan lahan terbangun berupa permukiman, pelabuhan dan industri sebesar 15.189,48 ha atau 8,67% dari luas wilayah, sedangkan perairan seperti sungai, waduk dan rawa seluas 4.874,74 ha atau 2,78%.

a. Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Berdasarkan SK MenLHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2017 di Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Luas hutan lindung yang ada di Kabupaten Lamongan sebesar 255,28 ha, sedangkan hutan produksi seluas 31.437,57 ha. Sedangkan jika dilihat berdasarkan KPH, hutan yang ada di Kabupaten Lamongan terbagi oleh 3 (tiga) KPH yaitu KPH Mojokerto seluas 22.679,44 ha, KPH Tuban seluas 7.622,76 ha dan KPH Jombang seluas 1.390,64 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.18 dan 1.19

Tabel 1.24
Luasan Kawasan Hutan Kabupaten Lamongan disesuaikan dengan SK MenLHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2017

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	% Luas Wilayah
1	Hutan Lindung (HL)	255,28	0,15
2	Hutan Produksi (HP)	31.437,57	17,94
	Total	31.692,85	18,09

Sumber : SK MenLHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2017

Tabel 1.25. Luasan Kawasan Hutan Kabupaten Lamongan Berdasarkan KPH Perhutani

KPH	Luas (Ha)	% Luas Wilayah
KPH MOJOKERTO	22.679,44	12,9
KPH TUBAN	7.622,76	4,4
KPH JOMBANG	1.390,64	0,8
Jumlah	**31.692,85**	**18,10**

Sumber : SK MenLHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2017

b. Hutan Mangrove

Hutan mangrove di Kabupaten Lamongan mempunyai luas 84,28 ha terdapat di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong

c. Sawah

Penggunaan sawah di Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Sawah irigasi di Kabupaten Lamongan seluas 62.297,58 ha, sawah tadah hujan mencapai luas 42.127,55 ha.

d. Kebun Campur

Penggunaan Kebun Campur di Kabupaten Lamongan mencapai luas 4.884,54 ha tersebar hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan.

e. Tanah Ladang

Penggunaan tanah ladang di Kabupaten Lamongan mencapai luas 13.007,77 ha tersebar hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan

f. Semak Belukar

Penggunaan semak belukar di Kabupaten Lamongan mencapai luas 81,56 ha.

g. Tambak

Penggunaan tambak ikan di Kabupaten Lamongan mencapai luas 883,66 ha sedangkan tambak garam seluas 96,28 ha

h. Rawa

Penggunaan lahan berupa rawa di Kabupaten Lamongan mencapai luas 2.233,81 ha

i. Waduk

Penggunaan lahan berupa waduk di Kabupaten Lamongan mencapai luas 1.729,91 ha

j. TPA

Penggunaan lahan berupa Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Lamongan mencapai luas 9,12 ha

k. sungai

sungai di Kabupaten Lamongan seluas 912,78 ha

l. Permukiman

Permukiman di Kabupaten Lamongan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Luas kawasan permukiman sebesar 14.251,81 ha, baik yang dibangun oleh pengembang maupun oleh swadaya masyarakat.

m. Industri

Industri di Kabupaten Lamongan mulai berkembang terutama industri besar yang berada di kawasan pantai utara Lamongan. Selain itu industri di Kabupaten Lamongan berkembang di jalan yang menghubungkan Babat – Kedungpring – Modo – Ngimbang maupun pada ruas jalan yang menghubungkan Lamongan - Mantup. Selain itu pada ruas jalan yang menghubungkan Sukodadi – Karanggeneng tumbuh kegiatan industri penggilingan padi dan pengepakan beras. Luas peruntukan industri di Kabupaten Lamongan sebesar 636,95 ha.

n. Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Lamongan mencapai luas 66,65 ha dengan dominasi peruntukan berada di Kawasan pesisir utara Kabupaten Lamongan seperti Wisata Bahari Lamongan (WBL), Goa Maharani, makam Sunan Drajat, Tanjung Kodok dll

o. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi terdiri dari terimal, stasiun dan kawasan pelabuhan. Kawasan pelabuhan di Kabupaten Lamongan terdiri dari Pelabuhan Umum Sedayu Lawas, Pelabuhan Umum Lamongan Shorebase (Tanjung Pakis), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan untuk kepentingan sendiri serta pelabuhan penyeberangan ASDP. Luas kawasan pelabuhan sebesar 204,40 ha

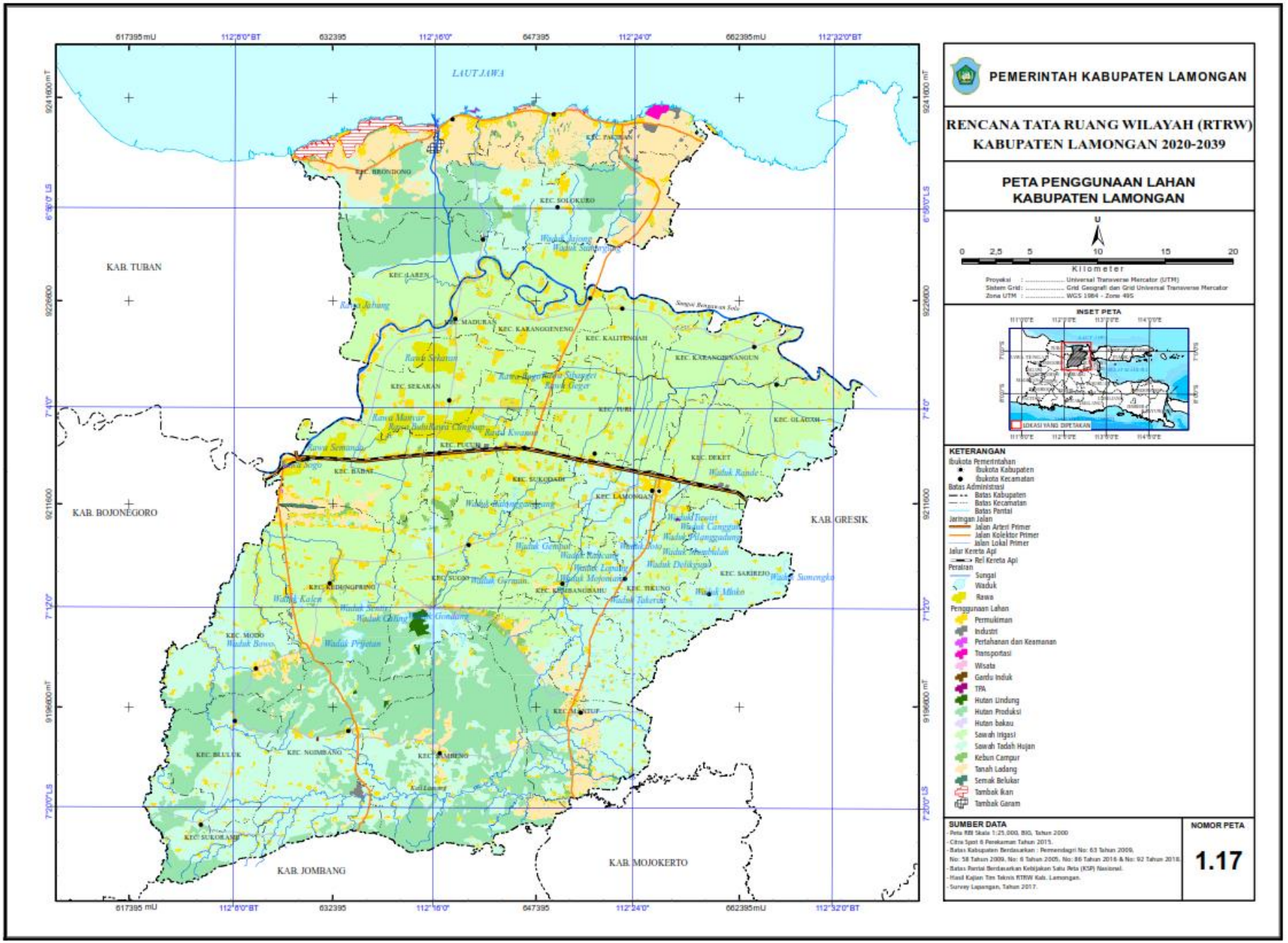
p. Gardu Induk

Garduk Induk Lamongan berada di Kecamatan Lamongan seluas 14,10 ha.

Tabel 1.26.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Lamongan

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan																				
	Hutan Bakau	Hutan Lindung	Hutan produksi	Semak Belukar	Tanah Ladang	Kebun Campur	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Tambak Ikan	Tambak Garam	Permukiman	Industri	Pertahanan dan Keamanan	Wisata	Transportasi	TPA	GI	Waduk	Rawa	Sungai	Jumlah
Sukorame	-	-	1.340,91	-	4,12	17,89	-	2.280,27	-	-	284,31	1,13	-	-	0,07	-	-	-	-	-	3.928,70
Bluluk	-	2,31	2.338,09	-	5,51	11,75	-	3.164,07	-	-	278,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.799,93
Ngimbang	-	26,29	3.947,73	-	58,95	56,27	-	5.206,98	-	-	616,86	84,19	-	-	0,35	-	7,71	0,73	-	-	10.006,05
Sambeng	-	-	9.040,05	-	868,33	205,72	-	4.375,52	-	-	557,36	10,48	-	-	-	-	-	20,88	-	-	15.078,34
Mantup	-	-	2.425,63	-	1.231,60	591,56	953,07	3.355,85	-	-	552,51	0,57	-	-	-	-	-	12,40	-	-	9.123,19
Kembangbahu	-	-	10,94	-	369,72	239,05	2.601,71	2.846,73	-	-	557,29	31,04	-	-	-	-	-	168,58	-	-	6.825,07
Sugio	-	226,69	1.196,67	-	97,05	449,82	5.044,91	719,77	-	-	741,99	3,03	-	30,93	-	-	-	463,33	-	-	8.974,19
Kedungpring	-	-	1.481,37	3,44	502,90	323,16	4.904,58	71,02	2,96	-	932,99	26,53	-	-	-	-	-	323,80	-	-	8.572,74
Modo	-	-	1.504,39	0,37	366,17	254,76	1.957,99	3.398,30	-	-	654,55	4,15	-	-	-	-	-	29,07	-	-	8.169,76
Babat	-	-	-	77,74	471,01	118,75	4.398,08	57,56	-	-	877,75	8,46	5,16	-	7,41	0,61	-	0,44	363,55	72,92	6.459,43
Pucuk	-	-	-	-	46,57	393,63	3.026,16	-	-	-	508,43	49,54	-	-	0,40	-	-	1,92	511,83	-	4.538,49
Sukodadi	-	-	-	-	45,07	247,40	3.645,58	18,63	-	-	711,30	16,15	-	-	1,07	-	-	62,34	0,03	-	4.747,56
Lamongan	-	-	-	-	48,40	99,71	882,27	2.194,46	-	-	790,11	15,54	-	-	1,34	-	4,00	57,71	-	-	4.093,53
Tikung	-	-	-	-	0,89	97,17	1.608,53	3.179,80	-	-	454,86	6,13	-	-	-	7,42	0,00	186,78	-	-	5.541,58
Sarirejo	-	-	-	-	-	27,33	58,14	4.318,28	-	-	236,90	-	-	-	-	-	-	246,33	-	-	4.886,96
Deket	-	-	-	-	3,93	15,22	3.783,29	116,40	-	-	356,33	45,37	-	-	-	-	-	74,61	-	-	4.395,15
Glagah	-	-	-	-	102,47	28,54	3.578,04	936,77	-	-	293,81	-	-	-	-	-	-	0,29	-	61,61	5.001,53
Karangbinangun	-	-	-	-	68,59	95,96	4.120,40	-	-	-	335,34	-	-	-	-	-	-	11,33	-	94,59	4.726,21
Turi	-	-	-	-	1,52	91,61	4.601,33	3,18	-	-	480,68	-	-	-	-	-	-	1,87	62,47	7,42	5.250,09
Kalitengah	-	-	-	-	3,77	62,69	3.229,24	-	-	-	327,62	-	-	-	-	-	-	-	18,41	52,86	3.694,60
Karanggeneng	-	-	-	-	1,38	197,00	3.141,49	-	-	-	558,73	-	-	-	-	-	-	0,54	57,37	117,49	4.073,99
Sekaran	-	-	-	-	71,40	101,49	3.690,34	-	-	-	486,07	-	-	6,06	-	-	-	0,52	1.009,55	39,53	5.404,96
Maduran	-	-	-	-	74,26	145,85	2.400,74	1,35	-	-	380,51	1,96	-	-	-	-	-	-	144,58	128,43	3.277,68
Laren	-	-	2.603,59	-	68,27	170,28	4.661,72	1.083,87	-	-	445,32	-	-	-	-	-	-	30,07	66,03	282,14	9.411,28
Solokuro	-	-	2.983,47	-	2.322,80	238,40	9,96	3.390,92	-	-	499,69	5,92	-	-	-	1,08	-	34,65	-	-	9.486,89
Paciran	14,72	-	108,72	-	3.489,88	429,90	-	468,53	18,28	-	693,33	268,60	-	29,41	157,55	-	2,40	-	-	-	5.681,33
Brondong	69,56	-	2.456,00	-	2.683,19	173,64	-	939,30	862,42	96,28	638,99	58,15	-	0,25	36,20	-	-	1,74	-	55,79	8.071,51
Jumlah	**84,28**	**255,28**	**31.437,57**	**81,56**	**13.007,77**	**4.884,54**	**62.297,58**	**42.127,55**	**883,66**	**96,28**	**14.251,81**	**636,95**	**5,16**	**66,65**	**204,40**	**9,12**	**14,10**	**1.729,91**	**2.233,81**	**912,78**	**175.220,76**

Sumber : Digitasi Peta Citra Terkoreksi dan Hasil Survey Lapangan


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA PENGGUNAAN LAHAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Penggunaan Lahan
Permukiman
Industri
Pertahanan dan Keamanan
Transportasi
Wisata
Gardu Induk
TPA
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan bakau
Sawah Irigasi
Sawah Tadah Hujan
Kebun Campur
Tanah Ladang
Semak Belukar
Tambak Ikan
Tambak Garam
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Survey Lapangan, Tahun 2017.
NOMOR PETA
1.17
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
617395 mU
632395
647395
662395mU
112°8'0"BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0"BT
9241600 mT
9226600
9211600
9196600 mT
6°56'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS

1.9.5. IJIN PEMANFAATAN RUANG

Ijin pemanfaatan ruang di Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 1.27.
Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Utara

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.
1.	ALBERT TANIHAHA Jl. Kaliudik Surabaya	PT. Hasil Aneka	Utara	Cold Storage	Ds. Tlogosadang Kec. Paciran	650/211/413.412/2004 08-04-2004	3,6 Ha	Sudah Operasional
2.	ALI MUCHAMAD Jl. Raya Paciran Ds. Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan	PT. Bumi Lamongan Sejati	Utara	Taman Wisata Bahari Lamongan	Ds. Paciran Kec. Paciran	650/425/413.412/2004 30-08-2004	20 Ha	Sudah Operasional
3.	SETYONO Ds. Kemantren, Kec. Paciran Kab. Lmgn	PT. Enam Delapan Sembilan	Utara	Cold Storage	Ds. Kemantren, Kec. Paciran	650/409/413.412/2004 19-08-2004	-	Sudah Operasional
4.	ABDUL MUID (Dirut PT. LIS) Jl Raya Kebayoran Lama 12 Surabaya	PT. Lamongan Integratet Shorbase	Utara	Fasilitas Sarana Penyimpanan BBM	Paciran	650/318/413.412/2005 12-07-2005	-	Sudah Operasional
5.	OEI SUPANGAT Jl. Meyjend HR. Muhammad No.147 Surabaya	PT. Rimba Ladang Subur	Utara	Industri Es Balok	Ds. Sedayulawas Kec. Brondong	650/1267/413.412/2006 20-12-2006	-	Sudah Operasional
6.	JOE LISTIO ROBERTUS TANDIONO Jl. Raya surabaya Mojokerto KM 20 Ds. Tanjungsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo	PT. Omya Indonesia	Utara	Industri Kalsium Karbonat	Ds. Kandangsemangkon dan Kel. Blimbing Kec. Paciran	650/167/413.412/2007 20-03-2007	50 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
7.	JOE LISTIO ROBERTUS TANDIONO Jl. Raya surabaya Mojokerto KM 20 Ds. Tanjungsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo	PT. Omya Indonesia	Utara	Pabrik Penghasil Kalsium Karbonat beserta Sarana dan Fasilitasnya serta cadangan bahan baku	Ds. Sidokelar kec. Paciran	650/440/Kep/413.412/2007 03-07-2007	74, 5 Ha	Sudah Operasional
8.	JOHANES TITUS Ds. Kmantren Kec. Paciran	PT. Dok Pantai Lamongan	Utara	Dok/Galangan Kapal	Ds. Kemantren dan Sidokelar Kec. Paciran	650/608/413.412/2007 28-08-2007	30 Ha	Sudah Operasional
9.	M. FIRMANSYAH (Direktur) Jl. Tanjungperak Barat No.433-435 Surabaya	PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya	Utara	DOK/Galangan Kapal	Kel. Brondong Kec. Brondong	650/818/413.412/2007 17-12-2007 650/249/Kep/413.212/2010 26-01-2010	20,5 Ha	Tidak ada aktifitas
10.	DJOKO ANDONO (Komisaris) Jl. Raya Daendls KM.03 Ds. Sidokelar Kec. Paciran	PT. Lamongan Marine Industry	Utara	Graving Dok/Galangan Kapal	Ds. Sidokelar Kec. Paciran	650/804/413.412/2007 07-12-2007	35 Ha	Sudah Operasional
11.	HADI WIJAYA DHARMA (Dirut) Taman Baru Indah Blok BB-1/12-A Kebon Jeruk Jakarta Barat	PT. Bahari Biru Nusantara	Utara	Pabrik Pengolahan dan Pembekuan Ikan	Ds. Sedayulawas Kec. Brondong	650/309/413.412/2008 13-05-2008	2 Ha	Pembebasan Lahan
12.	MOH. NOVI SAPUTRO (Dirut)	PT. Star Food International	Utara	Gudang Pengolahan Hasil Perikanan	Ds. Kandangsemangkon Kec. Paciran	650/1092/413.412/2008 06-11-2008	0,85 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	Ds. Karangrejo RT.06 RW.03 Kec. Manyar Kab. Gresik							
13.	LIM TANTO WIJOYO (Komisaris) Jl. Wiguna Tengah XV/05 Ke Gununganyar Kota Surabaya	PT. QL Hasil Laut	Utara	Pabrik Pengolahan dan Pembekuan Ikan Hasil Laut	Ds. Sedayulawas Kec. Brondong	650/687/413.412/2009 13-11-2009	6 Ha	Sudah Operasional
14.	Ir. MUHAMMAD MAHFUD, (Direktur) Rungkut Harapan L-20 RT.12/RW.02 Rungkut Surabaya	Politeknik Perkapalan Negeri ITS Surabaya	Utara	Labolatorium Pemagangan Politeknik Perkapalan Negeri surabaya	Ds. Tunggul dan Ds. Paciran Kec. Paciran	650/723/413.412/2009 01-12-2009	5,5 Ha	Belum Ada Aktifitas
15.	SOEGIONO (Dirut) Jl. Cokroaminoto No. 96 B Kel. Pandean Kec. Taman Kab. Madiun	CV. Genengsari	Utara	Pabrik Es Balok	Kel. Brondong, Kec. Brondong	650/641/413.215/2010 23-02-2010	0,2 Ha	Sudah Operasional
16.	SUWAHYUDI (Direktur) Tegalsari Kel. Brondong Kec., Brondong Kab. Lamongan	PT. Altar Marine Food	Utara	Pengepakan dan Pengolahan Ikan	Ds. Sidomukti Kec. Brondong	650/3524/413.215/2010 15-10-2010	0,78 Ha	Sudah Operasional
17.	IMAM UTOMO (Dirut) Jl. Margorejo Indah C-419 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya	PT. Jaka Mitra Indonesia	Utara	Kawasan Industri	Ds. Banjarwati, Sidokelar, Kemantren dan Tlogosadang Kec. Paciran	650/3029/Kep/413.215/2011 04-08-2011	951,88 Ha	Pembebasan Lahan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
18.	FREDY FEBRIAN SUSANTO Jl. Urip Sumoharjo No. 54 Manguharjo Madiun	PT. Lamongan Industry First Estate	Utara	Kawasan Industri	Ds. Sedayulawas Kec. Brondong	650/3058/413.215/2011 04-08-2011	100 Ha	Pembebasan Lahan
19.	SIM HENG LYE Apartemen Permata Gandaria Jalan Gandaria No. 88 Kebayoran Baru Jaksel	PT. Bahari Sindo Persada	Utara	Komersial Area	Desa Kemantren Kecamatan Paciran	650/381/413.215/2012 01-02-2012	38,33 Ha	Pembebasan Lahan
20.	JUANDA KURNIADI (Dirur) Graha Famili Blok L/26 Kel.Pradah Kalikendal RT.04/RW.02, Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya	PT. Jayabrix Indonesia	Utara	Industri Bata Ringan ACC (Autoclaved Aerated Concrete)	Ds. Kemantren Kec. Paciran	650/461/413.215/2012 07-02-2012 dan 650/3126/413.212/2015 16-09-2015	1,5 Ha	Sudah Operasional
21.	SEKEN RAHADI ANDOYO (Direktur) Jl. KH. Hasyim Ashari Komplek TU 13 RT. 01 / RW. 07 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang	PT. Bumi Wali Sentosa Agung	Utara	Industri Dolomit	Ds. Kemantren Kec. Paciran	650/462/413.215/2012 07-02-2012	15,1 Ha	Persiapan Operasional Menunggu Ijin Pertambangan Dari Propinsi
22.	HENDRA SETIAWAN Ploso Timur 8/114 RT.07/RW.09 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya	PT. Mulia Artha Sejahtera	Utara	Gudang Ethanol	Desa Paciran Kecamatan Paciran	650/1392/413.215/2012 24-04-2012	0,52 Ha	Pembebasan Lahan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
23.	GATOT SETIONO (Direktur CV. PIALA TIRTA) Kauman RT.02/RW.01 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan	CV. Piala Tirta	Utara	Industri Es Balok	Desa Sumberagung Kecamatan Brondong	650/1393/413.215/2012 24-04-2012	0,32 Ha	Sudah Operasional
24.	MUHLISUL FUAD (Direktur) Ds. Karangrejo RT.06/RW.03 Kec. Manyar Kab. Gresik	PT. Muda Prima Insan	Utara	Industri Pengolahan Snack	Ds. Lohgung Kec. Brondong	650/2680/413.215/2012 14-08-2012	1,19 Ha	Sudah Operasional
25.	Ir. HARIANTO. Dipl.HE (Direktur Utama) Jl. Surabaya 2 A Malang	Perum Jasa Tirta I	Tengah	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kecamatan Brondong - Kecamatan Paciran	. 650/315/413.215/2013 04-02-2013	-	Sudah Operasional
26.	SUNARYO, MM. (Kepala Cabang) Margahayu Jaya D/463 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	Perum Perikanan Indonesia	Utara	pembangunan Pabrik Es dan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan)	Kel. Brondong, Kec. Brondong	650/1957/413.215/2013 10-07-2013	0,38 Ha	Sudah Operasional
27.	IMAM UTOMO (Dirut.) Jl. Margorejo Indah C-419 Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya	PT. Jakamitra Indonesia	Utara	pembangunan kawasan industri	Desa Bluri dan Dagan Kecamatan Solokuro	650/3163/413.215/2013 12-12-2013	600 Ha	Pembebasan Lahan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
28.	KARIM KADRI (Penunjukan) Jl. Darmawangsa IV No.8 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	PT. AKR Corporindo, Tbk	Utara	Pembangunan SPBN	Lingkungan PPI Weru Komplek Desa Weru, Kecamatan Paciran	650/3314/413.215/2013 27-12-2013	200 m2 (0,2 Ha)	Sudah Operasional
29.	MUSLIMIN (Direktur) Siman Raya RT.03/RW.07 Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	CV. Dafista Mulia	Utara	Pembangunan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	Desa Sumberagung Kecamatan Brondong	. 650/3326/413.215/2013 30-12-2013	0,24 Ha	Sudah Operasional
30.	Ir. SUYATMOKO, MMA (Kadin) Alamat Jl. Ikan Lele 1/21 Kel. Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan	Utara	Cold Storage	Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	. 650/317/413.215/2014 03 Pebruari 2014	0,24 Ha	Sudah Operasional
31.	SIM HENG LYE (Direktur) Alamat Apartemen Permata Gandaria Jl. Gandaria No. 88 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	PT. Bahari Sindo Persada	Utara	Komersial Area	Desa Kemantren Kecamatan Paciran	650/510/Kep/413.215/2014 25 Pebruari 2014	38,33 Ha	Pembebasan Lahan
32.	LISTIASIH POERNOMO (Direktur) Alamat Villa Sentra Raya D 1/44 Kel. Sambikerep, Kec.	PT. Bariscan Global Usaha	Utara	Pembangunan Pabrik Pupuk Organik	Jl. Raya Deandles Ds. Brengkok, Kec. Brondong	. 650/1410/413.212/2014 06 Mei 2014	0,81 Ha	Pembebasan Lahan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	Sambikerep, Kota Surabaya							
33.	OEI ROBBY WIJAYA (Dirut) Alamat Kantor : Jl. HR. Muhammad No. 373 Kel. Dukuh Pakis RT.02/RW.04 Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya	PT. Dinasty Baja Makmur	Utara	Pabrik Baja dan Logam Besi	Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	650/866/413.212/2015 Tgl. 06-03-2015	20 Ha	Pembebasan Lahan
34.	TAN TJONG TJHUN /JUNAIDI SANTOSO (Dirut.) Alamat Jl. Rangkah 7/1-3 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya	PT. Lestari Anugerah Usaha Tangguh	Utara	Pergudangan	Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	650/1003/413.212/2015 Tgl. 17-03-2015	75 Ha	Pembebasan Lahan
35.	HUDA Alamat Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan	-	Utara	Industri Pakan Ternak	Dusun Sukolilo, Desa Labuhan Kecamatan Brondong	650/1355/413.212/2015 Tgl. 09-04-2015	0,27 Ha	Tahap Pembangunan
36.	FERY TAN SUKIRMAN (Direktur) Alamat Jamur Kuning Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Kota Jakarta Utara	PT. Natpac Graha Arthamas	Utara	Kimia Industri dan Pelabuhan Terminal Khusus	Desa SedayuLawas, Kecamatan BRondong	650/2355/413.212/2015 Tgl. 25-06-2015	18 Ha	Tahap Pembangunan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
37.	FERNANDO (WANGYUNG) (Direktur) Alamat Semalang Indah 4/15 RT.09/RW.05 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	PT. Esa Sarwaguna Adinata	Utara	Industri Pengolahan Jagung, Palawija dan Penggilingan Padi/Penyosohan Beras	Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong	650/2558/413.212/2015 Tgl. 13-07-2015	29,5 Ha	Tahap Pembangunan
38.	OEI HOK TJAN, SE (Direktur) Alamat Taman Surya 3 Blok J-4/5A Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	PT. Trans Pacific Palm	Utara	Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit, Pengepakan dan Biodiesel	Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran	650/2568/413.212/2015 Tgl. 23-07-2015	50 Ha	Tahap Pembangunan
39.	M. DODY KOMENDANGI (Direktur Utama) Alamat Jl. J. Saleh Komp Pandan Arum Blok B/2 Kel. Surgi Mufti Kota Banjarmasin	PT. Saldefens Lamongan Shipyard	Utara	DOK/Galangan Kapal	Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran	650/2673/413.212/2015 Tgl. 03-08-2015	0,5 Ha	Tahap Pembangunan
40.	JUN YAMAMOTO (Direktur) Alamat Somerset Surabaya Tower B705 Jl. Raya Kupang Indah Surabaya	PT. DOWA ECO-SYSTEM INDONESIA	Utara	Sarana Pengolahan dan Penimbunan Limbah Industri	Ds Tlogoretno dan Ds. Brengkok Kec. Brondong	650/2707/413.212/2015 06-08-2015	50 Ha	Pembebasan Lahan
41.	TIMOTIUS PAULUS (Direktur)	PT. Japfa Indoland	Utara	Kawasan Industri	Ds. Kemantren dan Sidokelar Kec. Paciran.	650/3711/413.212/2015 07-08-2015	44 Ha	Pembebasan Lahan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	Alamat Jl. Bisma 2 Blok B.2 No.22 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjungpriok Jakarta Utara							
42.	ANWAR MUBAROK (Direktur) Alamat Dsn. Banjaranyar, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan	PT. Sunan Drajat Lamongan	Utara	Industri Pemanfaatan Limbah B3	Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran	650/3325/413.212/2015 07-10-2015	0,8 Ha	Tahap Pembangunan
43.	Ir. HERY SUDARMONO (Direktur), Pondok Jati CI-02 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo	PT. Garin Citra Mandiri	Utara	Industri Tepung Ikan dan Pakan Ternak	Desa Sumurgayam, Kecamatan Paciran	650/3861/413.212/2015 18-10-2015	0,64 Ha	Sudah Operasional
44.	ASMUJI Dsn. Pambon, Ds. Brengkok, Kec. Brondong, Kab. Lamongan	UD. Counteng Paes	Utara	Industri Cold Storage	Jl. Raya Deandles Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	650/1638/413.212/2016 Tgl. 11-05-2016	1.768 M2	Sudah Operasional
45.	ACH. MANAF (Direktur Teknik & Prasarana PT. NatPac Graha Arthamas) Jl. Duku III/CA-249 Pondok Candra Indah Kel.	PT. NatPac Graha Arthamas	Utara	Penambahan Pembangunan dan Pengoperasian Integrated Jetty dan Terminal	Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong	650/32/413.212/2017 Tgl. 12-01-2017	9,56 Ha	Tahap Pembangunan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	Wadungasri Kec. Waru Kab. Sidoarjo							
46	PUSPITA DEWI PRIJADI (Dirut. PT. Matahari Sakti), Alamat Tanjung Golf G.2 No.10 Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri Kota Surabaya	PT. Matahari Sakti	Utara	Industri Pakan Ikan dan Udang	Jl. Raya Lamongan – Tuban Desa Brengkok Kecamatan Brondong	650/1066/413.212/2017 Tgl. 18-04-2017	7,5 Ha	Pembebasan Lahan
47	DENG CHANGFA (Direktur), Alamat Komp. Mutiara Garuda Blok C. 12/18 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	PT. Samudera Nusantara Abadi	Utara	Industri Pembekuan Ikan (Cold Storage)	Jl. Raya Lamongan – Tuban Desa Lohgung, Kecamatan Brondong	650/1189/413.111/2017 Tgl. 05-05-2017	3.604 M^2 (0,36 Ha)	Sudah Operasional
48.	IRFAD DIAN PUTRA LUBIS (Dirut. PT. Prakitri Hasta Darma) Alamat Jl. Cikoko Barat II No. 13 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan	PT. Prakitri Hasta Darma	Utara	Dok/Galangan Kapal	Jl. Raya Daendels KM 75 Desa Paciran Kecamatan Paciran	650/1770/413.111/2017 Tgl. 11-07-2017	2,06 Ha	Tahap Pembangunan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
49.	ANDREW ISKANDAR BUDIMAN Alamat Graha Famili I/58 Kelurahan Pradahkali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya	PT. Budiman Mercu Samudra	Utara	Dok/Galangan Kapal	Desa Tunggul Kecamatan Paciran	650/1906/413.111/2017 Tgl. 24-07-2017	14.496 M^2	Peraliahan/Balik nama dari PT. Tri Ratna Diesel Indonesia

Tabel 1.28.
Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Tengah

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.
1.	Ir. RUL ICHI SUJATIM.M Jl. Alam Asri I/6 RT.06/RW.015 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan	PT. Global Agrotek Nusantara	Tengah	Gudang dan Pengolahan Serat Rosela	Ds. Karangtinggil, Kec. Pucuk	650/130/413.412/2004 03-03-2004	4 Ha	Sudah Operasional
2.	ANTHONY MAHENDRA (Direktur) Jl. Gembong Asih No. 12 Kel. Kapasari Kec. Ngenteng kota Surabaya	PT. Profil Sukses Abadi	Tengah	SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji)	Ds. Karangtinggil Kec. Pucuk	650/536/413.412/2009 26-08-2009	0,66 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
3.	HUINTO TIN (Dirut) Simpang Darmo Permai Selatan 10/7 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota surabaya	PT. Mustika Dharma Jaya	Tengah	Industri Alas Kaki	Jl. Raya Lamongan - Gresik Ds. Rejosari Kec. Deket	650/1301/413.215/ 2013 06-03-2013	5,42 Ha	Sudah Operasional
4.	REZA GUNAWAN (Kuasa) Permata Regency Blok E/12 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat	PT. AKR Corporindo, Tbk	Tengah	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Jalan Raya Babat - Lamongan Desa Kebalandono Kecamatan Babat	650/2725/413.215/ 2013 21-10-2013	0,60 Ha	Sudah Operasional
5.	GARY IYAWAN (Direktur) Jl. Margorejo Indah A 602-603 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya	PT. Bumi Pangan Asri	Tengah	Industri Penngolahan Hasil laut/Colstorage	Jl. Raya Babat – Lamongan Ds. Karangtinggil Kec. Pucik	650/2777/413.215/ 2013 29-10-2013	10 Ha	Pembebasan Lahan Karena ada penambahan lahan
6.	JERMIA INDRA WIJAYA (Direktur) Alamat Jeruk VII/J-409 PCI Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo	PT. Putra Bintang Timur Lestari	Tengah	Pabrik Meubelair	Jl. Raya Lamongan – Gresik Desa Rejosari Kecamatan Deket	650/2826/413.215/ 2013 07-11-2013	15,2 Ha	Tahap Pembangunan
7.	INDRA WINOTO (Dirut.) Alamat Raya Bima Sakti AS/15 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan	PT. Bumi Menara Internusa	Tengah	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Ruko	di Jl. Raya Lamongan – Gresik Desa Rejosari Kecamatan Deket	650/530/413.215/2 014 19-02-2014	14 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	Sukomanunggal, Kota Surabaya							
8.	Drs. JIMMY SUTJIPTO (Direktur) Alamat Jemur Andayani 8/7 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya	PT. Wira Inti Nurmala	Tengah	Industri Spare Part Kendaraan Bermotor dari Plastik, Pembuatan Cat dan Tiner	Jl. Raya Lamongan – Gresik Desa Rejosari Kecamatan Deket	650/881/413.215/2014 17-03-2014	0,93 Ha	Sudah Operasional
9.	NJOO OWEN NJOTO WIJAYA (Direktur) Alamat Jl. Taman Kencanasari Barat G-19 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya	PT. Citiplumb	Tengah	Industri Kran Air	Jl. Raya Babat - Lamongan Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan	650/1411/413.212/2014 19-06-2014	4 Ha	Tahap Pembangunan
10.	PRANOTO KOSASIH (Direktur) Alamat Manukan Dalam Blok 14-J/2-3 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya	PT. Ever Age Valves	Tengah	Industri Kran Air dan Fasilitas Penunjangnya	Jl. Raya Babat – Lamongan Desa Pucuk Kecamatan Pucuk	650/204/413.212/2015 20-01-2015	6,6 Ha	Tahap Pembangunan
11.	CHU CHE NAN (Direktur) Alamat Jl. Raya Lamongan – Gresik, Desa Rejosari Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan	PT. Buildyet Indonesia	Tengah	Industri Alas Kaki	Jl. Raya Lamongan - Gresik Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan	650/1692/413.212/2015 05-05-2015	1,39 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
12.	RAHMAT TRI WAHYUDI (Direktur PT. Smart Teak Industry), Alamat Jl. Raya Tandes No. 20A Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya	PT. SMART TEAK INDUSTRY	Tengah	Industri Pengolahan Kayu (Flooring)	Jl. Raya Lamongan - Gresik Desa Rejosari Kecamatan Deket	650/604/413.212/2016 15-02-2016	7.976 M2	Tahap Pembangunan
13.	IWI SUMBADA (Presiden Direktur), Alamat Jl. Kapuas 4 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya	PT. Karka Nutri Industri	Tengah	Pembangunan Industri Pakan Ikan dan Udang	Jl. Raya Babat-Lamongan Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan	650/1775/413.212/2016 18-05-2016	2,23 Ha	Pembebasan Lahan
14.	ATIM SUGIANTO (Direktur PT. Kayan Wood Industries) Alamat PSJ. Sidney Garden L-12/16 Kelurahan Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo	PT. Kayan Wood Industries	Tengah	Industri Pengolahan Kayu Lapis (Plywood)	Desa Paji Kecamatan Pucuk	650/3444/413.212/2016 10-10-2016	13,5 Ha	Pembebasan Lahan
15.	HENDRA WIDODO (Direktur PT. Superior Prima Sukses), Alamat Dusun Bogem Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan	PT. SUPERIOR PRIMA SUKSES	Tengah	INDUSTRI BATA RINGAN	Jl. Raya Babat – Lamongan Desa Warukulon Kecamatan Pucuk	650/367/413.111/2017 Tgl. 10-02-2017	51 Ha	Tahap Pembangunan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
16.	JAIPRAKASH YATIRAJ SONI (Direktur Utama PT. Mahan Indo Global) Royale SpringHill Residence Tower Marygold PH-C Jakarta Utara	PT. Mahan Indo Global	Tengah	Industri Kayu dan Pengolahan Rempah rempah	Jl. Raya Lamongan-Babat, Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan	650/1403/413.111/2017 Tgl. 24-05-2017	26.000 M2 (2,6 Ha)	Pembebasan Lahan

Tabel 1.29.
Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Selatan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.
1.	H. DATA WIJAYA, ST (Direktur) Jl. Raya Sugio Ds. Dampit No. 2 Kec. Lamongan, Kab. Lamongan	PT. Cahaya Indah Pratama	Selatan	Aspal Mixing Plant	Ds. Sidomukti Kec. Lamongan	650/404/413.412/2009 18-06-2009	2 Ha	Sudah Operasional
2.	Hj. SUHARTATIK (Direktur) Jl. Kusuma Bangsa No. 45 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan	CV. EDO UTAMA	Selatan	Ready Mix Beton	Ds. Pelang Kec. Kembangbahu	650/599/413.412/2009 01-10-2009	0,6 Ha	Sudah Operasional
3.	RACHMAD MUHAMADIYAH, MBA	PT. Anak Gresik	Selatan	Pembangunan SPBE (Stasiun	Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu	650/15/413.412/2009 09-01-2009	0,66 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	(Direktur) Kupang Indah 6/1 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya	Transpor Kencana		Pengisian Bulk Elpiji)				
4.	PT. KEBUN TEBU MAS/SJ. AGUS SUSANTO (Dir. Operasi PT. Kebun Tebu Mas)Jl. Bandengan Utara No. 80 Blok CNo.18-19 Jakarta Utara	PT. Kebun Tebu Mas	Selatan	Kantor Pusat Penelitian pengembangan tebu dan pergudangan	Ds. Kedungsoko, Kec. Mantup	650/86/Kep/413.215/2013 10-01-2013	50 Ha	Sudah Operasional
5.	WEKO KUNCARA (Direktur Utama) Alamat Jl. Baja 2 No. 12 RT.05/RW.04 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik	PT. Subur Sri Sadono	Selatan	Pabrik Pupuk Organik	Jl. Raya Mantup Ds. Dumpiagung, Kec. Kembangbahu	650/1620/413.215/2013 04-06-2013	0,8 Ha	Sudah Operasional
6.	YOHANNES SURACHMAT (Direktur) Alamat Prapen Indah Blok J/6-7 Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya	PT. Tangguh Optima Perkasa	Selatan	Pabrik Baja	Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu dan Desa Wonokromo Kecamatan Tikung	650/238/413.215/2014 24-01-2014	40 Ha	Tidak ada aktifitas
7.	HUANG CHIU CHIN (Direktur) Alamat Jl. Tanjungsari 23, Kelurahan Sukomanunggal,	PT. Yuan Feng Indonesia	Selatan	Industri Biji Plastik	Jl. Raya Bakalanpule – Sarirejo Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung	650/529/413.215/2014 17-02-2014	0,35 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya							
8.	GERSON LIM (Direktur) Alamat Jl. Raya Satelite Utara CN 6 RT.06/RW.03 Kel. Tanjungsari, Kota Surabaya	PT. Ode Cipta Semesta	Selatan	Industri Alas Kaki	Jl. Raya Lamongan – Mantup Desa Wonokromo Kecamatan Tikung	650/1027/413.215 /2014 27-03-2014	15 Ha	Pembebasan Lahan
9.	Ir. WIDYANTO, MBA (Direktur) Alamat Pradah Permai 6/1 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya	PT. Antaboga Manunggal Karsa	Selatan	Industri Bahan Baku Pakan Ternak	Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu	650/2200/413.212 /2014 02-07-2014	1,64 Ha	Sudah Operasional
10.	HENRY YANG (Direktur) Alamat Taman Internasional I/F1-3 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Kota Surabaya	PT. Karya Shang Naga	Selatan	Industri Packaging Kertas dan Plastik	Jl. Raya Mantup Ds. Moronyamplung, Kec. Kembangbahu.	650/2873/413.212 /2014 01-09-2014	1,3 Ha	Tahap Pembangunan
11.	DIDIK HARTONO (Direktur Utama) Alamat Villa Kalijudan Indah Blok P/2-3 RT.04/RW.07 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya	PT. Mahatex Indonesia Jaya	Selatan	Industri Kain Tenun	Ds. Sumberdadi, Kec. Mantup	650/2955/413.212 /2014 10-09-2014	2 Ha	Tidak ada aktifitas
12.	SUBAGIO WIJANARKO (Direktur Utama) Alamat Jl. Meruya Ilir No. 82 G, RT.04/RW.08 Kel.	PT. Surya Tata Alam Raya	Selatan	Pabrik Bahan Bangunan Terpadu (Mortar, AAC dan GRC)	Jl. Raya Mantup – Lamongan Ds. Dumpiagung, Kec. Kembangbahu	650/3069/413.212 /2014 16-09-2014	5 Ha	Tidak ada aktifitas

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat							
13.	ANTONY MAHENDRA (Dirut) Alamat Gembong Asih Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya	PT. Graha Pilar Sentosa	Selatan	Industri Bahan Bangunan Berbahan Baku Plastik dan Logam	Desa Dumpiagung Kecamatan Kembangbahu	650/3948/413.212 /2014 02-12- 2014	7 Ha	Pembebasan Lahan
14.	I KETUT SUARTA (Direktur) Alamat Dusun Genceng Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan	PT. Benen Otomotif Thaib Dan Fam	Selatan	Industri Ban Kendaraan Bermotor dan Fasilitas Penunjangnya	Desa Takeranklating Kecamatan Tikung	650/51/413.212/2015 08-01-2015	1,27 Ha	Sudah Operasional
15.	HUANG YI HAO (Direktur) Alamat Jl. Tanjungsari Nomo 23, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya	PT. Puncak Harapan Sejahtera	Selatan	Industri Alas Kaki	Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung	650/581/413.212/ 2015 16-02-2015	2,24 Ha	Sudah Operasional
16.	PT. KEBUN TEBU MAS/SJ. AGUS SUSANTO (Direktur Operasional), Alamat Jl. Bandengan Utara No. 80 Blok C No.18-19 Jakarta Utara	PT. Kebun Tebu Mas	Selatan	Kantor Pusat Penelitian Pengembangan Tebu dan Pergudangan	Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup	650/2710/413.212 /2015 07-08-2015	0,53 M2	Pembebasan Lahan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
17.	STEFANUS CHANDRA HARYANTO (Direktur) Jl. Raya Nanas No.91 Pondok Candra Indah Kel. Tambakrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo	PT. Inkatama Contructions	Selatan	Industri Kayu, Meubelair dan Bahan Baku Makanan	Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu	650/2720/413.212/2015 07-08-2015	29,5 Ha	Pembebasan Lahan
18.	ADRIAN HALIM (Direktur) Alamat Taman Gading Pantai I/16 Kel. Dukuh Kec. Mulyorejo Kota Surabaya	PT. Madureso Putra Karunia	Selatan	Industri Batu Bata Merah	Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup,	650/3122/413.212/2015 16-09-2015	4 Ha	Tahap Pembangunan
19.	YACOB HALIM (Direktur) Alamat Ds. Warugunung, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya	PT. Alam Jaya Primanusa	Selatan	Industri Barang dari Plastik (Spunbond dan Botol)	Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu	650/3124/413.212/2015 16-09-2015	20 Ha	Pembebasan Lahan
20.	ANITA PURWANINGSIH (Direktur) Alamat Desa Sekarputih RT.04/RW.02 Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik	PT. Quality Works	Selatan	Industri Pengolahan Kayu dan Logam	Jl. Raya Lamongan–Mantup Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu	650/602/413.212/2016 15-02-2016	2,3 Ha	Tahap Pembangunan
21	Dra. Hj. ZULAIKHAH. AK (Dirut) Alamat Dusun Juwet, Desa Deketagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan	PT. Gema Nusantara Group	Selatan	WISATA ALAM "WEGO"	Desa Deketagung Kecamatan Sugio	650/36/413.212/2017 Tgl. 12-01-2017	12,85 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
22.	Ir. SUKO BASUKI (Direktur Utama PT. Varia Usaha Beton) Alamat Pondok Wage Indah Blok I-3 Kelurahan Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	PT. Varia Usaha Beton	Selatan	Industri Beton (Ready Mix)	Desa Puter Kecamatan Kembangbahu	650/1400/413.111 /2017 Tgl. 24-05-2017	8.359 M^2 (0,83 Ha)	Tahap Pembangunan
23.	RACHMAT BUDIARTO (President Direktur PT. Sarana Packaging Agrapana) Jl. Imam Bonjol 101 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya	PT. Sarana Packaging Agrapana	Tengah	Industri Karton	Desa Moronyamplung, Kecamatan Kembangbahu	650/1480/413.111 /2017 Tgl. 02-06-2017	54.000 M^2 (5,4 Ha)	Tahap Pembangunan

Tabel 1.30.
Daftar Investasi di Kabupaten Lamongan Wilayah Barat

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.
1.	PT. KEBUN TEBU MAS/SJ. AGUS SUSANTO (Dir. Operasi), Alamat Jl. Bandengan Utara No. 80 Blok C No.18-19 Jakarta Utara	PT. Kebun Tebu Mas	Barat	Ppabrik gula dan pusat penelitian pengembangan tanaman tebu	Ds.Lamongrejo,Kec. Ngimbang, Kedungsoko Kec. Mantup, dan Sidokumpul, Kec. Sambeng	650/84/413.215/ 2013 10-01-2013	200 Ha	Sudah Operasional

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
2.	GUNG PUTU JAYA PUTRA (Kuasa PT. Gudang Garam, Tbk) Bukit Cemarah Tujuh Blok B B-16 RT.03/RW.12 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang	PT. Gudang Garam, Tbk	Barat	pabrik rokok SKT	Jl. Raya Babat – Jombang Ds. Dradahblumbang, Kec.Kedungpring	650/254/413.215/ 2013 30-01-2013	3,47 Ha	Sudah Operasional
3.	Drs. H. HARUNA SOEMITRO, M.Si Alamat Puri Taman Asri E-12 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kota Surabaya	CV. Alaf Denida	Barat	Industri Pengepresan Kayu dan Fasilitas Penunjangnya	Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring	650/4007/413.212/2014 05 Desember 2014	0,77 Ha	Sudah Operasional
4.	Drs. WIDJAJA KARLI (Direktur) Alamat Margorejo Indah C-423 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya	PT. Intera Indonesia	Barat	Industri Furnitur	Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring	650/3627/413.212/2014 28 Oktober 2014	4 Ha	Pembebasan Lahan
5.	Dra. SYANY TJANDRA (Direktur) Alamat Margorejo Indah C-423 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya	PT. Interkraft	Barat	Industri Furnitur	Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring	650/3627/413.212/2014 28 Oktober 2014	9,9 Ha	Sudah Operasional
6.	MEITY LINLIN (Direktur) Alamat Prapen Indah Timur AD /26 Kel. Prapen,	PT. Intertren Utama	Barat	Industri Furnitur	Desa Dradahblumbang,	650/3627/413.212/2014	8 Ha	Pembebasan

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH	PERUNTUKAN	LOKASI YANG DI IZINKAN	NOMOR DAN TGL SK	LUAS	KET.
	Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya				Kecamatan Kedungpring			Lahan
7.	FUIDY LUCKMAN, BSC, SH (Komisaris Utama) Alamat Jln. Puri Jimbaran I Blok E-6 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara	PT. Tanahmas Kencana Abadi	Barat	INDUSTRI TRIPLEK	Jl. Raya Babat-Ngimbang Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring.	650/3854/413.212/2014 24 Nopember 2014	6,3 Ha	Tahap Pembangunan
8.	M. ALI FIRDAUS (Direktur) Alamat Dusun Glulu Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan	CV. Bukit Pataan	Barat	Industri Paving	Desa Pataan, Kecamatan Sambeng	650/2309/413.212/2015 Tgl. 24-06-2015	0,98 Ha	Sudah Operasional
9.	ENRICO TJAHJONO (Dirut. PT. Dewata Industrindo Forestry) Alamat Undaan Kulon No. 55 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya	PT. Dewata Industrindo Forestry	Barat	Industri Veneer dan Barang Bangunan dari Kayu	Jl. Raya Babat – Ngimbang Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring	650/600/413.212/2016 Tgl. 15-02-2016	31,8 Ha	Tahap Pembangunan

Sumber : Bappeda Kab.Lamongan

1.9.6. SISTEM TRANSPORTASI

Sitem transportasi di Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sistem transportasi darat dan sistem transportasi laut. Sistem transportasi darat meliputi sistem jaringan jalan, sistem pelayanan angkutan umum, fasilitas transportasi, penyeberangan sungai serta jaringan perkeretaapian. Sedangkan sistem transportasi laut berupa pelabuhan.

1.9.6.1. SISTEM TRANSPORTASI DARAT

a. <u>SISTEM JARINGAN JALAN</u>

Jaringan jalan di Kabupaten Lamongan berdasarkan statusnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu status jalan nasional sepanjang 66,45 km, status jalan provinsi sepanjang 58,28 km dan status jalan kabupaten sepanjang 416,116 km.

1. Status Jalan Nasional :

a. Jalan Arteri Primer (JAP)

- Widang/Bedahan - Bts. Kota Lamongan,
- Jln. Jagung Suprapto (Lamongan),
- Bts. Kota Lamongan - Bts. Kab. Gresik,
- Jln. P.B. Sudirman (Lamongan),
- Bts. Kab. Lamongan - Bts. Kota Gresik)

b. Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

- Lohgung – Sadang (Bts. Kab.Lamongan),
- Sadang (Bts. Kab. Lamongan) - Bts. Kota Gresik)
- Widang/Bedahan – Babat
- Babat - Bts. Kota Bojonegoro

2. Status Jalan Provinsi :

- Ruas Jalan Babat – Ploso – Jombang – Pulorejo - Kandangan
- Ruas Jalan Lamongan – Gedek - Mojokerto

3. Status Jalan Kabupaten :

- Status jalan kabupaten sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 1.31.
Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Lamongan

No	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)
1	Pucuk - Sekaran	8.000
2	Sekaran - Laren	6.200
3	Laren - Blimbing	12.200
4	Sumberwudi - Meduran	10.000
5	Gampang - Petiin	10.000
6	Sumberwudi - Kr. Geneng	2.000
7	Banjarwati - Peti'in	11.500

No	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)
8	Sukodadi – Sumberwudi	10.800
9	Sukodadi – Plembon	5.400
10	Plembon – Sugio	6.200
11	Pagerwojo – Plembon	6.000
12	Menengai – Wates	7.300
13	Tikung – Kembangbahu	6.000
14	Pule – Sarirejo	9.800
15	Kembang Bahu – Sukobendu	6.000
16	Sugio - Tlanak	11.000
17	Kembang Bahu - Kalipang	5.000
18	Dumpi - Sukobendu	7.750
19	Mantup - Ayamalas	5.700
20	Mantup - Sambeng	11.000
21	Ngimbang - Sambeng	7.000
22	Kedungpring - Sukobendu	13.000
23	Tlanak - Kedungpring	1.700
24	Nguwok - Tlanak	4.900
25	Dradah - Kedungpring	5.300
26	Dradah - Bluluk	8.600
27	Ngimbang - Bluluk	9.800
28	Bluluk - Sukorame	8.700
29	Sukorame - Sembung	4.300
30	Sukorame - Slaji	7.400
31	Deket - Soko	7.200
32	Soko - Dagang	9.500
33	Lonjong - Mendolo	6.300
34	Soko - Kr.Binangun	8.700
35	Tanjung - Songowareng	10.000
36	Gembong - Dempel	14.500
37	Sumberwudi - Tunjung Mekar	7.000
38	Made - Plosowahyu	2.400
39	Deket - Tambakboyo	4.300
40	Bakal Rejo - Gondanglor	4.500
41	Paciran - Godog	11.100
42	Kalen - Kedungpring	2.900
43	Karang Kembang - Gendongkulon	3.000
44	Jl. Gotong-Royong - Kota Babat	1.315
45	Jl. Basuki Rahmat	1.430
46	Jl. DR. Wahidin SH	1.130
47	Jl. Kisarmidi m.s	315
48	Jl. Sunan Kalijogo	630
49	Jl. K.Pol M. Duryat	616
50	Jl. Sumargo	740
51	Jl. Veteran	1.915
52	Jl. Suwoko	1.160
53	Jl. Andansari	1.000
54	Jl. Kyai Amin	325
55	Jl. K Bangsa	1.305
56	Jl. Andanwangi	1.050
57	Jl. Sunan Giri	985

No	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)
58	Jl. Makam Pahlawan	1.050
59	Jl. Kinameng	1.150
60	Jl. Rongohadi	250
61	Jl. Merpati	635
62	Jl. Ahmad Yani	525
63	Jl. K.H.A Dahlan	931
64	Jl. KH.Hasyim Asy	265
65	Jl. H.O.S.Cokro A	225
66	Jl. Laras Liris	735
67	Jl. Mendalan	390
	Jl. Tembus JA S Suprapto	
	Jl. Tembus Sumargo	
71	Deket (Ring Road) - Tambakboyo	2.350
72	Sukomulyo - Karangmulyo	1.250
73	Jln. Mastrip	2.000
74	Tikung - Sumberkerep	10.250
75	Ngasemlemahbang -	4.000
76	Sambeng - Garung	5.000
77	Lamongrejo - Garung	5.500
78	Mendolo - Mluwur	4.000
79	Kiringan - Dibee	5.000
80	Tunjungmekar - Sambopinggir	7.500
81	Dadapan - Solokuro	7.300
82	Lamongrejo - Slaji	7.500
83	Sarirejo - Jatirembe	4.000
84	Turi - Kiringan	7.500
	Jumlah	416,116

Sumber : Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/ /Kep/413.013/2016 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Di Kabupaten Lamongan

Sedangkan jalan menurut kelas jalan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Kelas I :

a. Jalan Arteri Primer (JAP)

- Widang/Bedahan - Bts. Kota Lamongan,
- Jln. Jagung Suprapto (Lamongan),
- Bts. Kota Lamongan - Bts. Kab. Gresik,
- Jln. P.B. Sudirman (Lamongan),
- Bts. Kab. Lamongan - Bts. Kota Gresik)

b. Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

- Lohgung – Sadang (Bts. Kab.Lamongan),
- Sadang (Bts. Kab. Lamongan) - Bts. Kota Gresik)
- Widang/Bedahan – Babat
- Babat - Bts. Kota Bojonegoro

2. Kelas II

- Ruas Jalan Babat – Ploso – Jombang – Pulorejo - Kandangan
- Ruas Jalan Lamongan – Gedek - Mojokerto

3. Kelas III

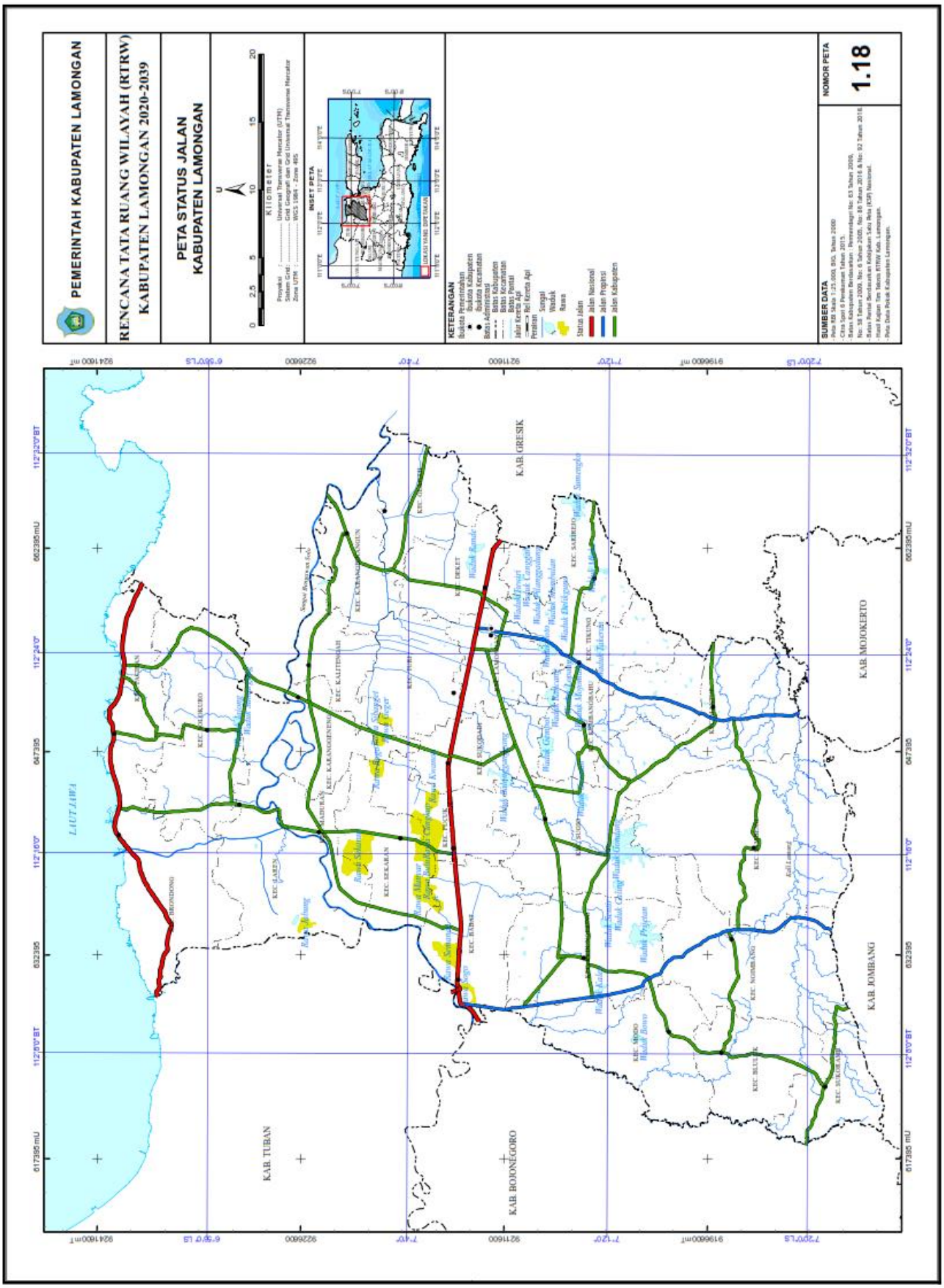


❖ Visualisasi Jalan Propinsi di Kabupaten Lamongan



❖ Visualisasi Jalan Nasional di Kabupaten Lamongan

PETA 3.16.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA STATUS JALAN KABUPATEN LAMONGAN
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.18
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN
LAUT JAWA

b. PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Lamongan dibagi menjadi :

1. Angkota Kota Dalam Propinsi (AKDP)

- Menghubungkan Surabaya-Lamongan-Bojonegoro
- Menghubungkan Surabaya-Lamongan-Tuban.

2. Angkutan Lintas Batas

- Babat – Jombang
- Babat – Bojonegoro
- Babat - Surabaya

3. Angkutan Perdesaan

- Lamongan-Sugio-Gondang
- Lamongan-Deket-Karangbinangun-Glagah
- Lamongan-Tikung-Mantup-Babatan
- Lamongan-Tikung-Kembangbahu-Gondang
- Sukodadi-Karanggeneng-Banjarwati-Tanjung Kodok
- Babat-Modo-Bluluk-Sukorame
- Pucuk-Laren-Blimbing
- Babat-Kalen-Kedungpring-Gondang
- Sukorame-Kabuh-Ploso-Jombang
- Lamongan-Babat
- Angkota
- Laren-Blimbing
- Ngimbang-Sambeng-Mantup-Balongpanggang
- Brondong-Paciran-Sendangduwur-Solokuro-Nggodog

Tabel 1.32.
Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Lamongan

NO	TRAYEK	JUMLAH KENDARAAN DALAM TRAYEK	JUMLAH KENDARAAN YANG BEROPERASI
1	Lamongan-Sugio-Gondang	19	0
2	Lamongan-Deket-Karangbinangun-Glagah	19	7
3	Lamongan-Tikung-Mantup-Babatan	15	0
4	Lamongan-Tikung-Kembangbahu-Gondang	15	0
5	Sukodadi-Karanggeneng-Banjarwati-Tanjung Kodok	68	31
6	Babat-Modo-Bluluk-Sukorame	85	35
7	Pucuk-Laren-Blimbing	54	0
8	Babat-Kalen-Kedungpring-Gondang	35	25
9	Sukorame-Kabuh-Ploso-Jombang	9	0
10	Lamongan-Babat	30	28
11	Angkota	11	0
12	Laren-Blimbing	15	0
13	Ngimbang-Sambeng-Mantup-Balongpanggang	9	0
14	Brondong-Paciran-Sendangduwur-Solokuro-Nggodog	19	17
	TOTAL	**403**	**143**

Layanan Angkutan Penumpang di Kabupaten Lamongan untuk AKAP, AKDP dan Lintas Batas sudah dapat dilayani dengan baik. Layanan angkuta n penumpang antar pusat kecamatan masih banyak yang belum dilayani dengan baik.



c. FASILITAS TRANSPORTASI

Fasilitas transportasi jalan raya yang dimiliki Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Terminal

Untuk mendukung sistem pergerakan orang maupun barang di Kabupaten Lamongan dan sekitarnya didukung oleh prasarana transportasi berupa terminal sebagai tempat pergantian moda. Sistem terminal di Kabupaten Lamongan meliputi terminal penumpang dan terminal barang.

a. Terminal Penumpang

Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang serta perpindahan intra dan atau moda transportasi. Kabupaten Lamongan memiliki terminal tipe B dan terminal tipe C sebagaimana terlihat pada Tabel 1.33.

Tabel 1.33.
Jumlah Terminal di Kabupaten Lamongan

No	Lokasi Terminal
1	Terminal Lamongan
2	Terminal Brondong
3	Terminal Paciran
4	Terminal Sukodadi
5	Terminal Sukorame
6	Terminal Sugio
7	Terminal Babatan Mantup

No	Lokasi Terminal
8	Terminal Babat
9	Terminal Ngimbang
10	Terminal Kusuma Bangsa

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lamongan

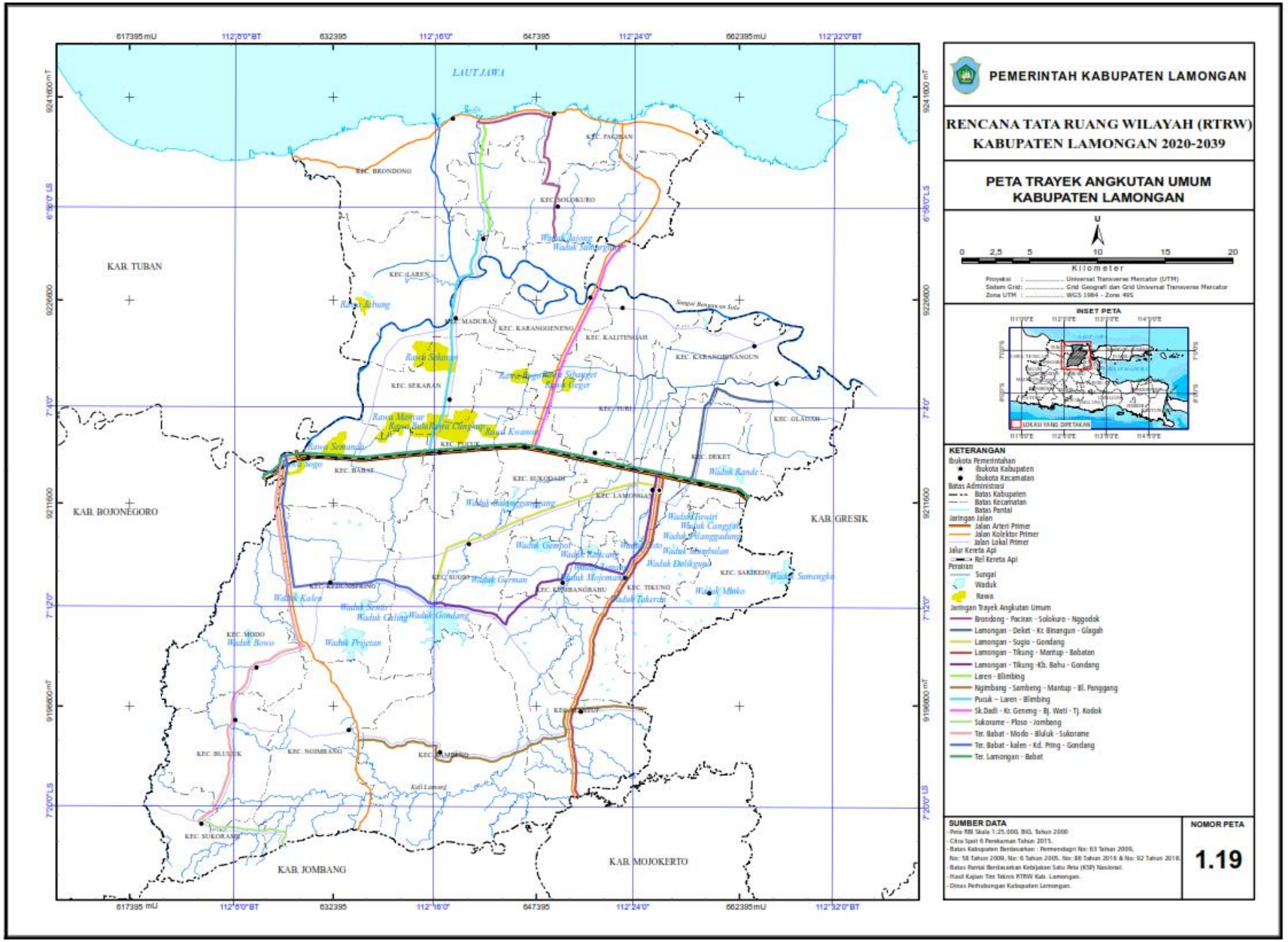


❖ Visualisasi lokasi terminal di Kabupaten Lamongan

Tabel 1.34.
Jumlah Kendaraan yang Masuk dan Keluar Terminal Lamongan

No	Bulan	Datang		Berangkat	
		Bis	Penumpang	Bis	Penumpang
1	Januari	4.191	208.277	4.191	219.783
2	Februari	3.791	190.613	3.791	217.844
3	Maret	4.199	211.419	4.199	217.074
4	April	4.065	202.247	4.065	208.951
5	Mei	4.075	207.175	4.075	210.239
6	Juni	4.061	203.451	4.061	206.323
7	juli	4.206	222.766	4.206	233.163
8	Agustus	4.079	198.827	4.079	210.842
9	September	4.064	200.441	4.064	203.583
10	Oktober	4.201	216.095	4.201	222.749
11	Nopember	3.992	211.503	3.992	213.419
12	Desember	4.061	200.989	4.061	203.859
	Jumlah	**48.985**	**2.473.803**	**48.985**	**2.567.829**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA TRAYEK ANGKUTAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.19

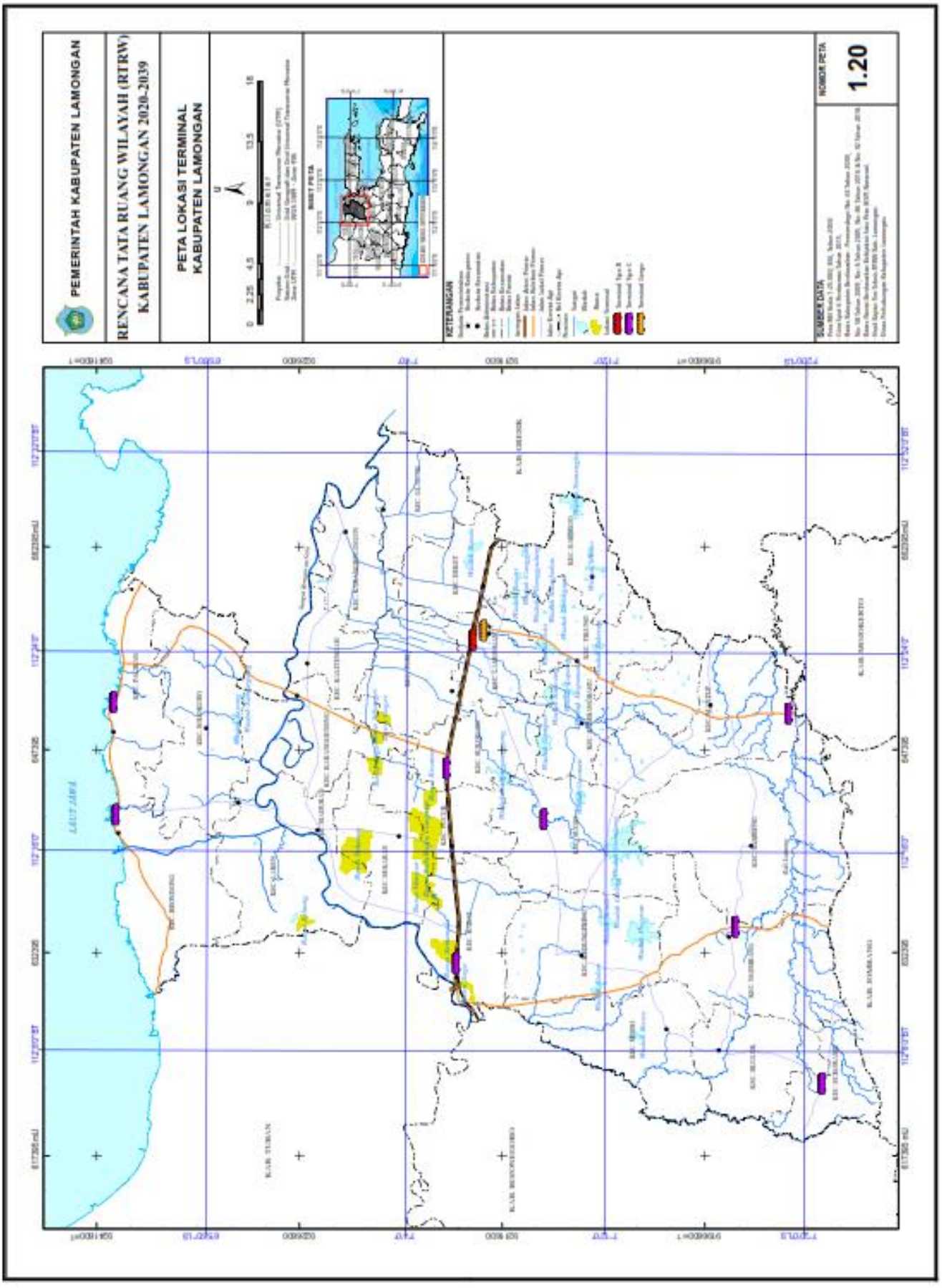
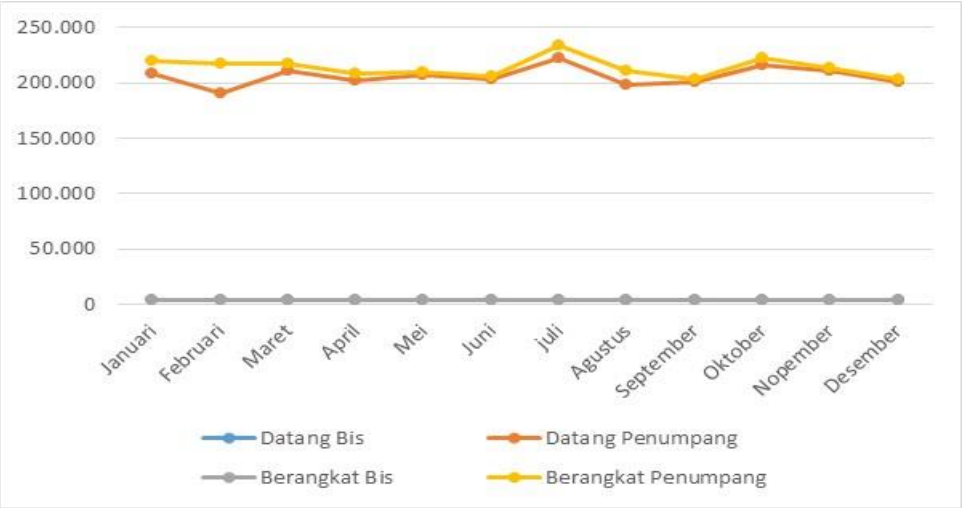

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA LOKASI TERMINAL
KABUPATEN LAMONGAN
KETERANGAN
NOMOR PETA
1.20

Diagram 1.8.
Jumlah Kendaraan yang Masuk dan Keluar Terminal Lamongan



b. Terminal Barang

Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Kabupaten Lamongan memiliki fasilitas terminal barang/cargo di Jalan Kusuma Bangsa Lamongan dengan luas 3.813 M^2.

c. Halte

Fasilitas transportasi lainnya yang dimiliki Kabupaten Lamongan adalah halte yang berada pada lokasi-lokasi yang memberikan bangkitan yang cukup tinggi. Lokasi halte di Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.35.
Jumlah Halte di Kabupaten Lamongan

No	Nama Halte	Lokasi	Ukuran
1	Halte Deket	Pertigaan Deket	7 X 3 M
2	Halte Panglima Sudirman	Depan Smpn 4 Lamongan	9,5 X 2 M
3	Halte Karang Langit	Depan Stikes Lamongan	7 X 3 M
4	Halte Sukodadi	Pertigaan Sukodadi	7 X 3 M
5	Halte Pasar Sukodadi	Depan Pasar Sukodadi	7 X 3 M
6	Halte Karang Langit	Depan Pabrik Sampoerna	7 X 3 M
7	Halte Pucuk	Pertigaan Pucuk	7 X 3 M
8	Halte Plaosan	Depan Smp 1 Babat	7 X 3 M
9	Halte Gembong	Depan Smp Gembong	7 X 3 M
10	Halte Sunan Drajat	Depan Masjid Sunan Drajat Lamongan	7 X 3 M
11	Halte Ngimbang	Depan Rsud Ngimbang	7 X 3 M
12	Halte Brondong	Depan Pangkalan Brondong	7 X 3 M

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lamongan

d. JARINGAN KERETA API

Jalur kereta api di Kabupaten Lamongan termasuk jalur kereta api utama kelas II. Selain itu jalur kereta api Lamongan juga dilewati kereta komuter SULAM (Surabaya - Lamongan). Jalur kereta api mati juga terdapat di Kabupaten Lamongan, yaitu ruas Babat - Jombang dan Babat Tuban. Masing masing sepanjang 71.431 km dan 36 km.

Ada beberapa stasiun kereta api di Kabupaten Lamongan, antara lain stasiun kereta api kelas II, kelas V dan terminal kargo. Stasiun kereta api Kabupaten Lamongan sebagaimana terihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.36. Jumlah Stasiun di Kabupaten Lamongan

No	Jenis Stasiun	Nama Stasiun	Kecamatan
1	Kelas II	Stasiun Lamongan	Kec. Lamongan
2	Kelas V	Stasiun Babat	Kec. Babat
3		Stasiun Gembong	Kec. Babat
4		Stasiun Sumlaran	Kec. Sukodadi
5		Stasiun Pucuk	Kec. Pupuk
6		Stasiun Surabayan	Kec. Sukodadi
7	Kargo	Stasiun Babat	Kec. Babat

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lamongan

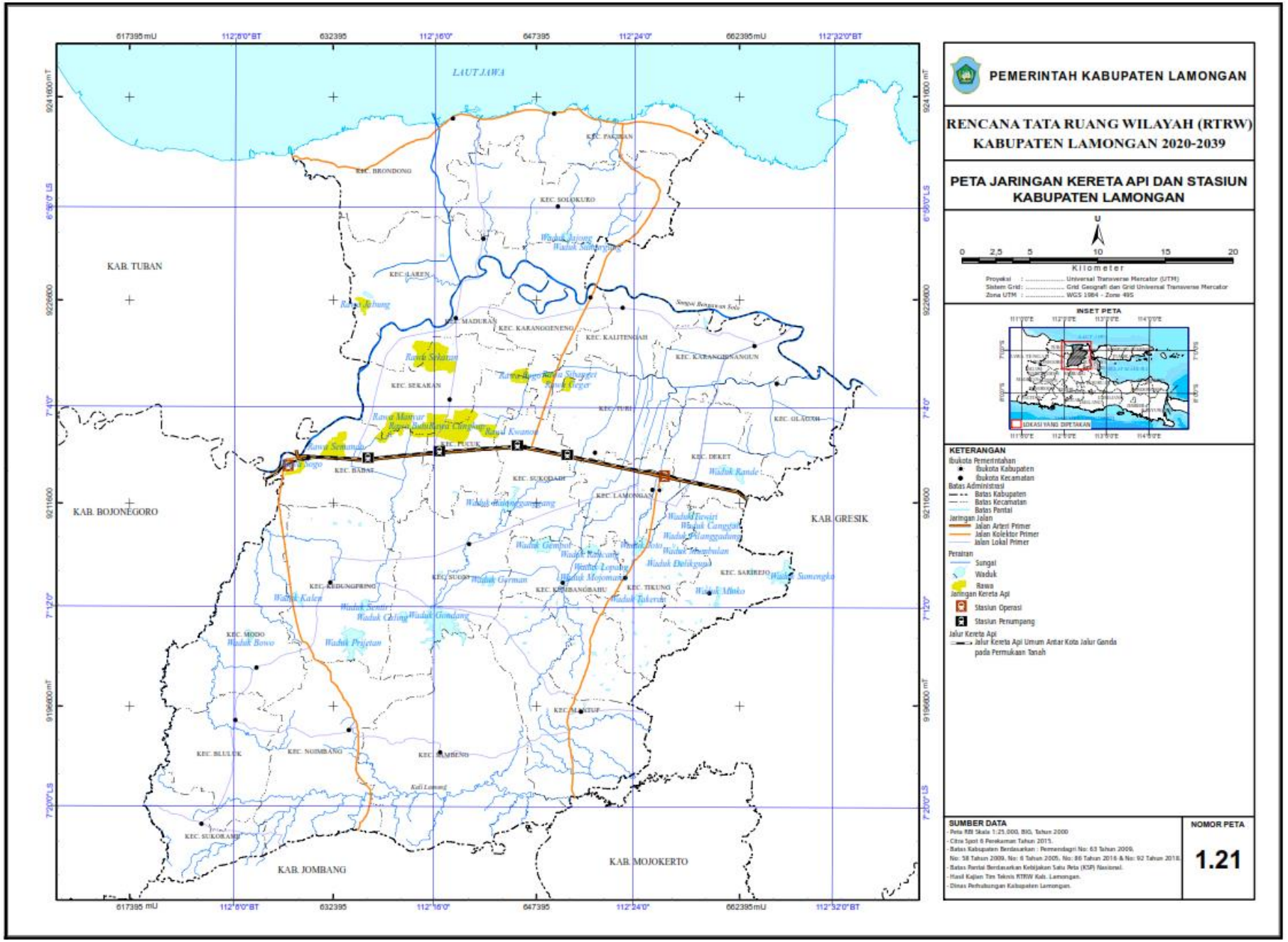


Jalur kereta api yang melintas di Kabupaten Lamongan merupakan jalur kereta api jalur tunggal (doble track). Saat ini masih banyak dijumpai perlintasan kereta api yang tidak berpalang dan tidak dijaga oleh petugas, hal ini sangatlah membahayakan bagi para pengguna jalan. Selain itu perlintasan ini menghubungkan jalan arteri primer dengan jalan lokal di tiap-tiap desa.

Layanan kereta api utama di Kabupaten Lamongan saat ini dapat dilayani melalui stasiun Lamongan dan stasiun Babat. Sedangkan untuk kereta api komuter hanya dapat dilayani sampai stasiun Lamongan, selebihnya dilayani kereta KRD Bojonegoro dan KRD Babat. Selain itu di Kabupaten Lamongan terdapat stasiun kargo kereta api di stasiun Babat. Jadwal layanan kereta api Kabupaten Lamongan

Tabel 1.37. Jumlah Penumpang Kereta Api Kabupaten Lamongan

No	Bulan	Stasiun Lamongan					Stasiun Babat				
		th 2011	th 2012	th 2013	th 2014	th 2015	th 2011	th 2012	th 2013	th 2014	th2015
1	Januari	22.064	14.375	21.416	18.845	18.486	16.059	16.059	15.773	8.965	7.338
2	Februari	17.637	12.252	19.353	17.337	16.696	16.001	12.049	4.352	6.971	6.022
3	Maret	22.428	14.212	22.210	18.775	18.121	13.386	13.744	449	7.252	69.221
4	April	21.236	14.809	16.437	18.816	17.938	17.155	14.653	373	7.595	6.944
5	Mei	21.254	19.560	21.934	18.013	18.528	18.396	18.142	351	6.297	6.770
6	Juni	21.986	21.516	20.245	14.525	16.206	20.989	18.229	327	8.662	6.071
7	juli	21.733	22.053	17.688	13.958	17.102	20.556	17.408	4.433	4.966	8.443
8	Agustus	16.791	21.440	18.298	15.981	17.230	18.124	19.663	5.183	6.192	8.117
9	September	22.759	17.765	17.346	15.543	16.426	19.001	18.788	4.132	4.747	6.246
10	Oktober	20.648	17.657	17.089	16.881	17.456	18.514	19.012	5.977	5.646	7.670
11	Nopember	18.327	18.797	17.341	16.148	16.875	17.667	17.112	5.141	4.879	6.235
12	Desember	19.980	20.505	16.467	15.602	16.789	18.986	18.537	5.798	5.252	8.868
	Jumlah	**246.843**	**214.941**	**225.824**	**200.424**	**207.853**	**214.834**	**203.396**	**52.289**	**77.424**	**147.945**


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA JARINGAN KERETA API DAN STASIUN
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.21

1.9.6.2. SISTEM TRANSPORTASI MODA PENYEBERANGAN



Transportasi moda penyeberangan di Kabupaten Lamongan saat ini sudah dilayani oleh Pelabuhan Penyeberangan ASDP dengan rute Paciran – Bawean serta Paciran – Glonggong Sulawesi

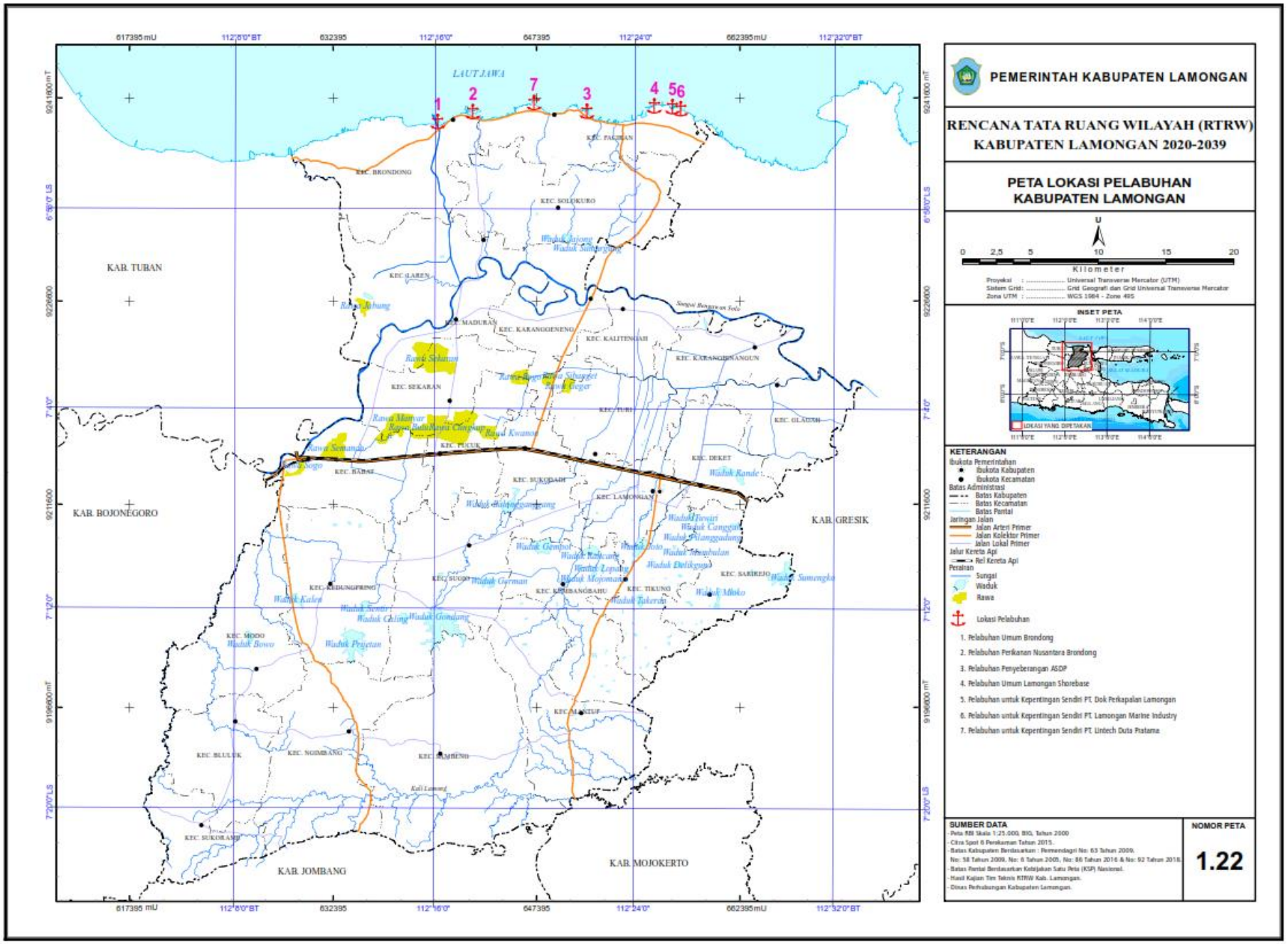
1.9.6.3. SISTEM TRANSPORTASI MODA LAUT

Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhan, pelabuhan di Kabupaten Lamongan dibagi sebagai berikut :

1. **Pelabuhan Umum**
   - Pelabuhan Umum Sedayu Lawas (Brondong) seluas 96.583 M^2 Brondong
   - Pelabuhan Umum Lamongan Shorebase (Pelabuhan Umum Tanjung Pakis Paciran)
   - Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 433.304 M^2



2. **Pelabuhan Untuk Kepentingan Sendiri**
   - PT. Lintech Duta Pratama
   - PT. Dok Perkapalan
   - PT. Lamongan Marine Industry


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA LOKASI PELABUHAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Lokasi Pelabuhan
1. Pelabuhan Umum Brondong
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
3. Pelabuhan Penyeberangan ASDP
4. Pelabuhan Umum Lamongan Shorebase
5. Pelabuhan untuk Kepentingan Sendiri PT. Dok Perkapalan Lamongan
6. Pelabuhan untuk Kepentingan Sendiri PT. Lamongan Marine Industry
7. Pelabuhan untuk Kepentingan Sendiri PT. Lintech Duta Pratama
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
NOMOR PETA
1.22
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. TUCUK
KEC. BABAT
KEC. DEKET
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. BLULUK
KEC. SUKORAME
Waduk Brondong
Waduk Sidorejo
Waduk Kalen
Waduk Bowo
Waduk Gedung
Waduk Gondang
Waduk Pegetan
Waduk Gembol
Waduk Kedung Poto
Waduk Dalegan
Waduk Mojomanis
Waduk Legundi
Waduk German
Waduk Takeran
Waduk Miloko
Waduk Sumengko
Waduk Rande
Waduk Tawiri
Waduk Cangga
Waduk Wanggadung
Waduk Sembalan
Rawa Semanda
Rawa Mantur
Rawa Bulu
Rawa Kwanon
Rawa Sebrangan
Rawa Sidomulyo
Rawa Bleger
Rawa Selatan
Kali Lamong
LOKASI YANG DIPETAKAN

1.9.7. ENERGI/KELISTRIKAN

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Lamongan sudah terlayani oleh listrik yang berasal dari PLN, dengan jumlah daya terpasang sebesar 51.620 Va. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada Tabel 1.31

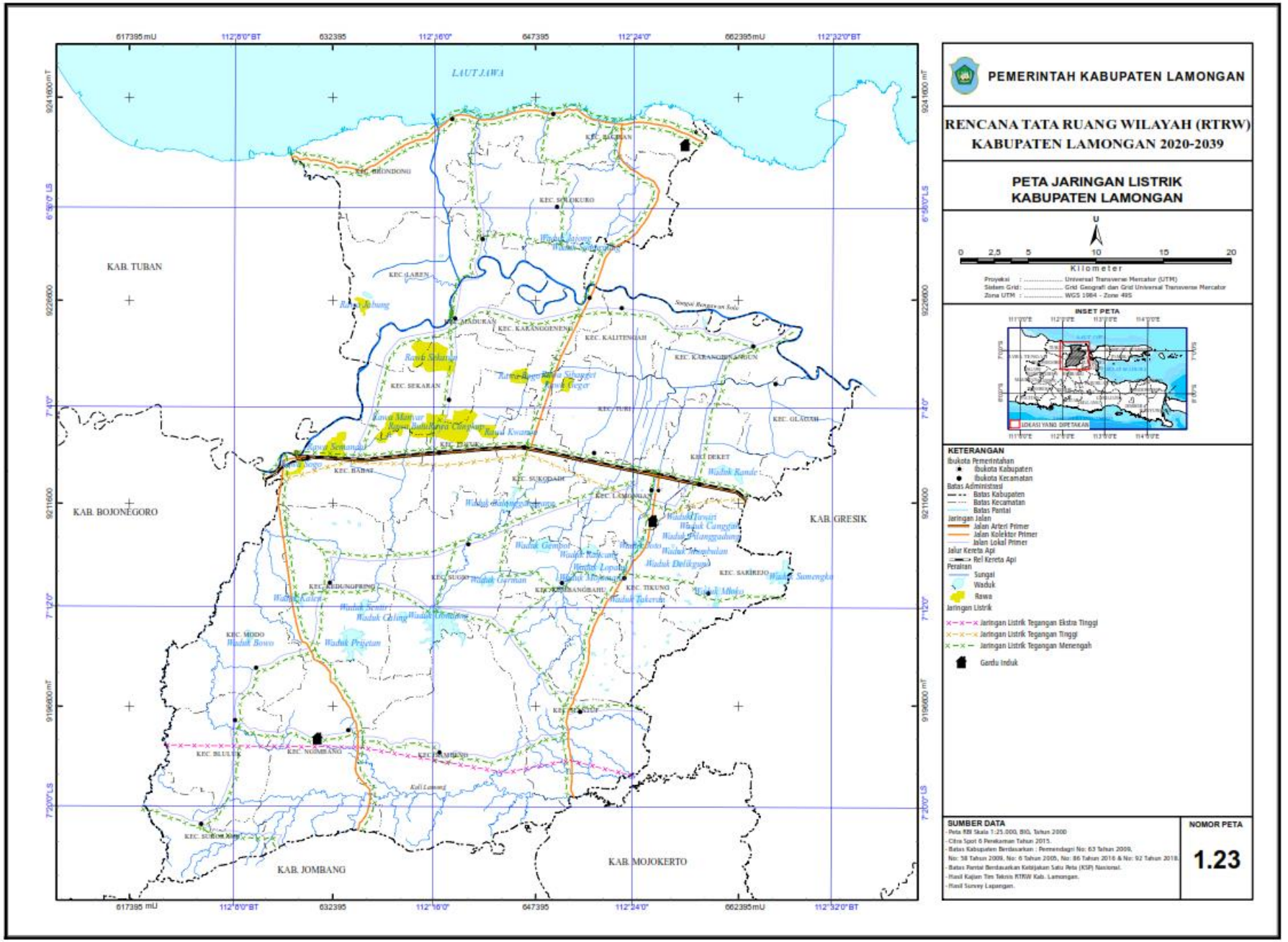
Tabel 1.38
Jumlah Pelanggan, Kapasitas Terpasang, dan Listrik yang Didistribusikan Wilayah Lamongan di Kabupaten Lamongan

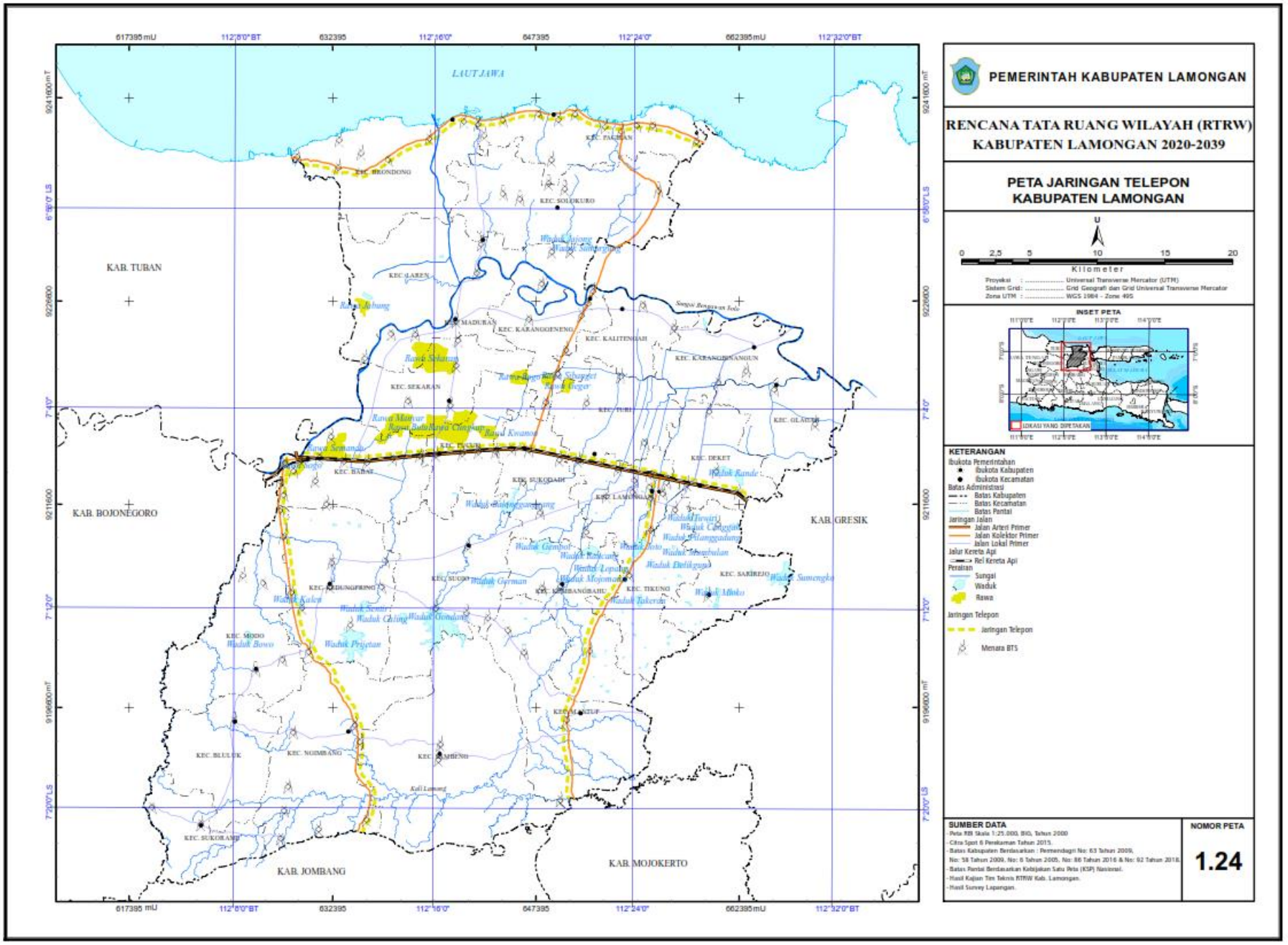
No	Golongan Tarif		Pelanggan	Kapasitas Terpasang	Listrik yang didistribusikan
1	Rumah Tangga	S1	-	-	
		R1	126.440	91.024.450	164.773.542
		R2	338	1.612.100	1.980.657
		R3	27	393.900	739.557
2	Sosial	S2	4.931	10.140.600	13.758.739
		S3	4	2.805.000	4.122.184
3	Usaha, Multiguna dan Hotel	B1	9.089	10.978.350	13.992.966
		B2	573	10.054.500	14.536.628
		B3	1	865.000	351.830
		L	2	11.000	121.365
4	Industri	I1	8	63.900	44.174
		I2	53	6.260.500	7.163.093
		I3	12	25.490.000	45.174.528
		I4	-	-	-
5	Gedung/Kantor	P1	349	3.101.550	4.965.327
		P2	-	-	-
6	Jalan	P3	349	2.600.145	8.017.472
	Jumlah		**142.176**	**165.400.995**	**279.742.062**

Sumber : PT. PLN (Persero) UPJ Lamongan

1.9.8 TELEKOMUNIKASI

Untuk memenuhi kebutuhan telepon, saat ini Kabupaten Lamongan sudah terlayani oleh jaringan telepon kabel. Selain itu masyarakat juga dapat menikmati kebutuhan komunikasi dengan memilih provider yang dikehendaki. dengan berbagai jenis layanan yang ditawarkan. Para provider telah membangun BTS yang berlokasi di setiap kecamatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan telepon, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.39.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA JARINGAN LISTRIK
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Jaringan Listrik
Jaringan Listrik Tegangan Ekstra Tinggi
Jaringan Listrik Tegangan Tinggi
Jaringan Listrik Tegangan Menengah
Gardu Induk
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Hasil Survey Lapangan.
NOMOR PETA
1.23
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. KALITENGAH
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. DEKET
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. SUGIO
KEC. SARIREJO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. TIKUNG
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKODADI
Waduk Bowo
Waduk Prijetan
Waduk Gong
Waduk Rande
Waduk Tarokan
Waduk Sumengko
Waduk Mlako
Kali Lamong


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA JARINGAN TELEPON
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.24

Tabel 1.39. Jumlah BTS di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Jenis Kepemilikan Menara (BTS)							
		Telkomsel	Indosat	Mobile	XL	Radio	Komunikasi	Lainnya	Total
1	Sukorame	3	2	-	-	-	-	1	6
2	Bluluk	1	1	-	-	-	-	1	3
3	Ngimbang	2	1	-	-	-	-	5	8
4	Sambeng	2	1	-	-	-	-	1	4
5	Mantup	1	2	-	-	-	1	3	7
6	kembangbahu	2	2	-	-	-		4	8
7	Sugio	1	2	-	-	-	1	2	6
8	Kedungpring	3	5	-	-	-	-	4	12
9	Modo	4	2	-	-	-	-	2	8
10	Babat	2	2	-	-	-	-	12	16
11	Pucuk	1	1	1	-	-	-	3	6
12	Sukodadi	4	3	-	1	-	-	1	9
13	Lamongan	7	4	-	-	1	1	8	21
14	Tikung	1	2	-	1	-	-	2	6
15	Sarirejo	1	1	-	-	-	-	4	6
16	Deket	1	2	-	-	-	-	1	4
17	Glagah	1	1	-	-	-	-	2	4
18	Karangbinangun	1	-	-	-	-	-	1	2
19	Turi	2	3	-	-	-	-	-	5
20	Kalitengah	-	2	-	-	-	-	1	3
21	Karanggeneng	4	3	-	-	-	-	3	10
22	Sekaran	2	2	-	-	-	-	-	4
23	Maduran	2	2	-	-	-	-	1	5
24	Laren	3	2	-	-	-	-	1	6
25	Selokuro	3	1	-	-	-	-	2	6
26	Paciran	4	3	1	-	1	-	9	18

No	Kecamatan	Jenis Kepemilikan Menara (BTS)							
		Telkomsel	Indosat	Mobile	XL	Radio	Komunikasi	Lainnya	Total
27	Brondong	4	2	1	-	-	1	5	13
	Jumlah	**62**	**54**	**3**	**2**	**2**	**4**	**79**	**206**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

1.9.9. JARINGAN AIR MINUM

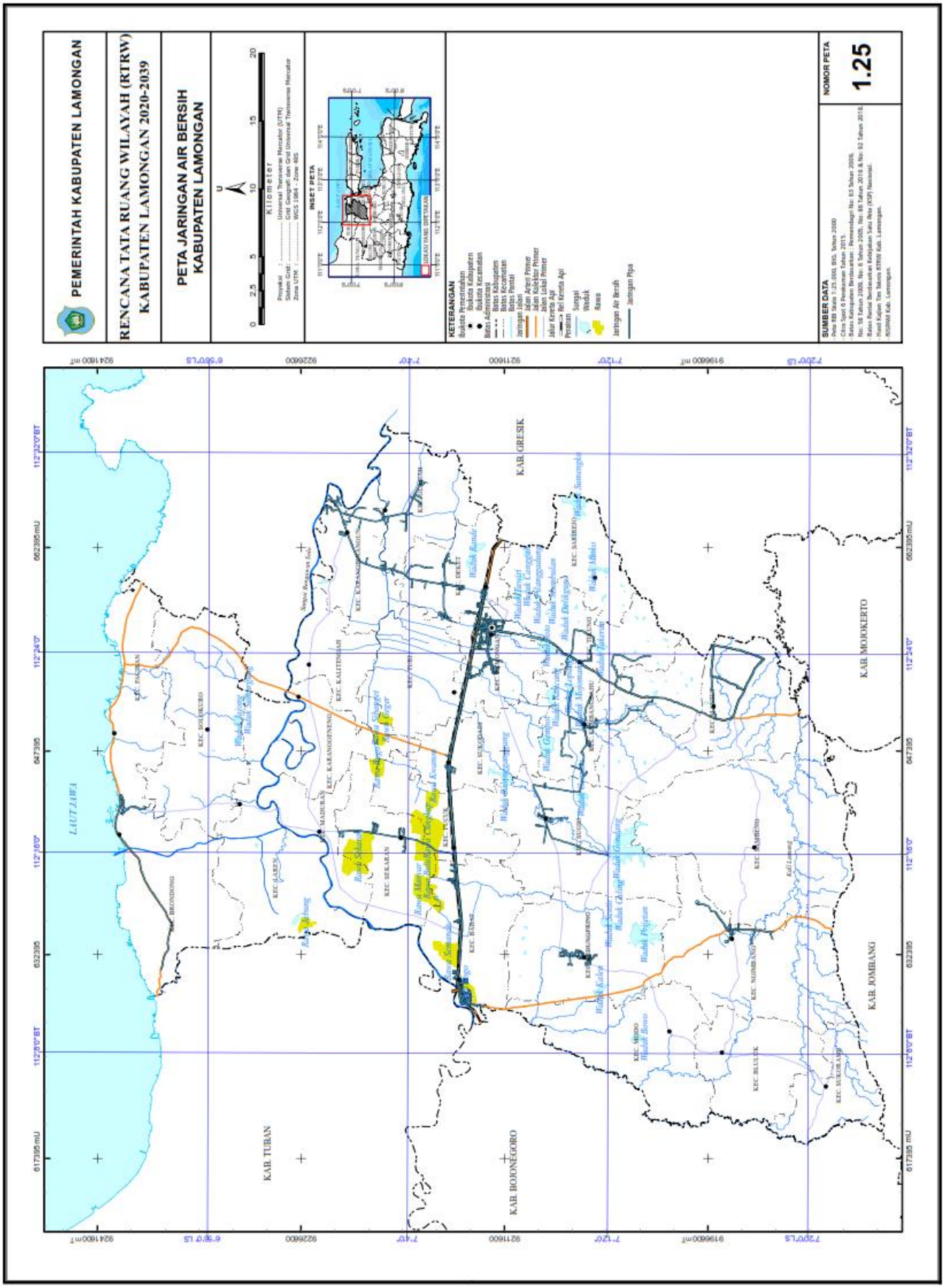
Dalam memenuhi kebutuhan air bersih, penduduk di Kabupaten Lamongan memanfaatkan system perpipaan dan non perpipaan. Sistem air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM. Sistem perpipaan non PDAM di Kabupaten Lamongan ini dikelola oleh HIPPAM serta PJT (Perusahaan Jasa Tirta). Sedangkan pelayanan, air bersih non perpipaan di Kabupaten Lamongan dipenuhi dari sumur, sungai, telaga, mata air, Penampungan Air Hujan (PAH), ataupun lainnya. Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.40. Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Lamongan

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PAM	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Kapasitas Produksi	lt/dt	310	310	420	420	420	420
Jumlah Kapasitas distribusi	lt/dt	185	185	340	340	340	340
Jumlah Kapasitas Kebutuhan	lt/dt	148	148	200	200	200	200
Jumlah Tempat Penjernihan	buah	12	12	13	13	13	13
Jumlah Tandon Air	buah	11	11	11	11	11	11
Jumlah Pipa AM	km	445	448	578	586	597	632
Jumlah Pompa AM sebagai Alat Bantu Penyaluran	Buah	35	35	35	35	35	35
Jumlah Air yang Diproduksi	m3	4.965	5.154	5.280	5.951	7.229	7.706
Jumlah Air yang Didistibusi	m3	4.414	4.618	4.952	5.615	6.636	7.238
Jumlah Air yang Terjual	m3	3.040	3.122	3.363	3.871	4.577	4.992
Jumlah Pelanggan							
- Perumahan / RT	buah	10.916	11.586	13.016	14.580	16.455	17473
- perdagangan/Usaha	buah	847	985	1.043	1.100	1.183	1.265
- Industri	buah	7	7	8	9	11	13
- Pelayanan Masyarakat	buah	362	162	171	443	506	539
Rata - Rata Konsumsi AM	lt/org/h	150	150	107	107	138	140
Hilang Air Selama Proses Produksi	%	11	10	6	6	8	6
Hilang Air selama Proses Distribusi	%	34	32	32	31	31	31
Jumlah Pendapatan yang Diterima	Rp. Juta	8.750	14.008	16.702	19.992	24.592	25.867
Jumlah Investasi	Rp. Juta	969	2.204	23.628	13.494	10.188	3.412

Sumber : Kabupaten Lamongan Tahun 2018

Sedangkan peta pelayanan air bersih dapat dilihat pada Peta 1.24.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA JARINGAN AIR BERSIH
KABUPATEN LAMONGAN
U
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.25
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN
LAUT JAWA

1.9.9.1. SPAM IBUKOTA KABUPATEN LAMONGAN

I. **JARINGAN PERPIPAAN**

A. PDAM

Pelayanan air minum dari PDAM di Kecamatan Lamongan berasal dari Unit Produksi Babat dan Plosowahyu.

1. Unit Air Baku

Air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Lamongan untuk menyuplai kebutuhan air minum di Kecamatan Lamongan berasal dari Sungai Bengawan Solo.

Pada tanggal 20 Februari 2013 PDAM Kabupaten Lamongan memperoleh Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPA) dari Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor P2T/16/05.02/02/II/2013 yang memperbolehkan PDAM mengambil air dari Sungai Bengawan Solo sebanyak 60 L/det. PDAM Kabupaten Lamongan kemudian membangun 3 unit instalasi produksi yang memanfaatkan air baku Sungai Bengawan Solo.

Lokasi pengambilan air baku ini terletak di Desa Banaran Kecamatan Babat, yang terdiri dari 2 intake yang saling berdekatan. Intake pertama adalah intake bebas yang kemudian ditransmisikan menuju IPA Babat. Intake ini dibangun pada tahun 1982. Pada intake untuk IPA Babat ini memiliki 6 unit pompa aktif dan 1 unit pompa cadangan, dimana 7 pompa tersebut merupakan pompa berjenis submersible dengan kapasitas sebesar 50 L/det. Tiap – tiap pompa intake tersebut memiliki daya sebesar 22 KW. Foto tersebut diambil pada awal bulan Nopember, dimana pada bulan tersebut musim kemarau masih belum berakhir. Dari foto tersebut dapat kita ketahui bahwa terjadi penurunan level air yang sangat signifikan, sehingga pompa intake IPA Babat dapat terlihat. Oleh karena itu, tim produksi IPA Babat memindah 2 pompa untuk dipasang ponton agar dapat mengambil air baku walaupun pada level yang lebih rendah. Sehingga, dapat tetap melayani pelanggan walau dalam debit yang kecil.

Tabel 1.41
Pompa Intake IPA Babat

Jenis	Kapasitas (L/det)		Jumlah	Tahun Pemasangan	Kondisi	Ket.
	Terpasang	Terpakai				
Pompa 1	50	40	1	1998	Sedang	-
Pompa 2	50	40	1	1999	Sedang	-
Pompa 3	50	40	1	2000	Sedang	-
Pompa 4	50	40	1	2002	Baik	-
Pompa 5	50	40	1	1999	Sedang	Cadangan
Pompa 6	50	40	1	1999	Baik	-
Pompa 7	50	40	1	1999	Baik	-

Sumber: Profil PDAM Kabupaten Lamongan

Tabel 1.42.
Pipa Transmisi IPA Babat

Jenis Pipa	Diameter (mm)	Panjang (mm)	Tahun Pemasangan	Kondisi
DCI	300	13.000	1980	Sedang
PVC	400	18.203	2000	Baik
PVC	250	925	2000	Baik

Sumber: Profil PDAM Kabupaten Lamongan



❖ **Intake IPA Babat**

Sedangkan intake kedua bertipe sumuran yang kemudian ditransmisikan menuju IPA Plosowahyu. intake untuk IPA Plosowahyu ini memiliki 4 unit pompa, dimana 2 unit pompa tersebut berkapasitas sebesar 50 L/det dengan daya sebesar 18,5 KW, dan 2 unit pompa yang lain berkapasitas 100 L/det dengan daya sebesar 55 KW.



❖ **Intake IPA Plosowahyu**

2. Unit Produksi

Air minum yang didistribusikan di Kecamatan Lamongan tersebut diproduksi pada Unit Produksi Babat dan Unit Produksi Plosowahyu. Dimana pada Unit Produksi Babat ini melayani beberapa IKK, diantaranya adalah IKK Babat, IKK Pucuk, IKK Sekaran, IKK Deket, IKK Sukodadi, IKK Turi serta BNA Lamongan. Sedangkan Unit Produksi Plosowahyu hanya dikhususkan untuk melayani masyarakat dari BNA Lamongan.

A. **Unit Produksi Babat**

Unit Produksi Babat terdiri dari 3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), yaitu IPA 1, IPA 2 dan IPA 3. Alur dan sistem pengolahan pada ketiga IPA adalah sama namun, IPA 1 dan IPA 2 menggunakan bahan dari bangunan sipil sedangkan IPA 3 merupakan IPA paket yang menggunakan material carbon steel. IPA 1 dibangun pada tahun 1980, IPA 2 pada tahun 1994 sedanggakn IPA 3 pada tahun 2010.

a. **Prasedimentasi**

Air baku dari intake dialirkan menuju 2 bak prasedimentasi yang kemudian dibagi ke unit IPA 1, IPA 2 dan IPA 3. Untuk IPA 1 dan IPA 2 unit pengolahannya sama persis.

b. **Bak koagulasi dan flokulasi**

Setelah dari sedimentasi, air mengalir secara graviltasi menuju bak koagulasi dan flokulasi. Sistem yang dipakai adalah menggunakan beberapa bak yang terbuat dari beton. Turbulensi dilakukan melalui baffle tanpa adanya motor. Bahan kimia yang dipakai disesuaikan dengan kualitas air baku dan proses jar tes. Bahan kimia yang dipakai adalah koagulan berupa tawas, dan Ferro Sulfat ($FeSO_4$); Flokulan berupa anionik flokulan; dan untuk mengurangi warna ditambahkan PAC (Powdered Activated Carbon).

c. **Bak Sedimentasi**

Air mengalir secara gravitasi dari bak koagulasi-flokulasi menuju bak sedimentasi. Tipe yang dihunakan adalah menggunakan sekat/lamella bergelombang yang disusun secara miring dengan sudut 50o - 60o. Penggunaan sekat ini agar mengoptimalkan proses pengendapan karena meningkatkan luas daerah pengendapan dan menurunkan penggunaan lahan untuk bak sedimentasi. Air mengalir dari influent menuju bawah sekat dan kemudian naik melalui sekat-sekat, flok yang terbentuk dati penambahan kimia akan tertahan pada sekat dan jatuh ke bawah secara gravitasi, sedangkan air yang lebih jernih tertampung ke gutter pada sisi dinding. Yang kemudian dialirkan menuju bak filter.

d. **Filter**

Filter yang dipakai adalah sistem filter gravitasi. Bagunan filter berada dalam satu ruangan dengan bangunan reservoir dan pompa distribusi.

e. **Reservoir**

Unit produksi Babat memiliki 2 reservoir yang tersambung. Keduanya memiliki volume 750 m3. Sebelum didistribusikan ditambahkan kaporit sebagai desinfektan.

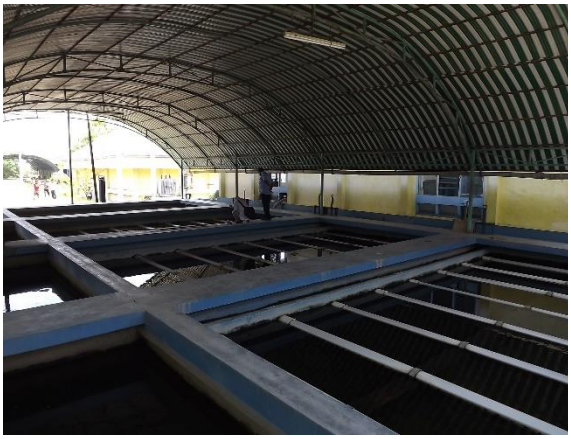
- Reservoir 1 berasal dari proses prosuksi IPA 1, melayani BNA Lamongan, Made, Sukodadi, Turi.
- Reservoir 2 berasal dari proses prosuksi IPA 2 dan IPA 2. Melayani



(a) Bak Prasedimentasi-IPA1



(b) Bak Koagulasi-Flokulasi-IPA1



(c) Bak Sedimentasi-IPA1



(d) Pompa Distribusi-IPA1



(e) IPA 3



(f) Bak Kimia Untuk IPA 3

❖ **Unit Produksi IPA Babat**

B. **Unit Produksi Plosowahyu**

IPA Plosowahyu dibangun dengan kapasitas 100 L/detik. Desain IPA Plosowahyu mirip dengan IPA 3 Babat, yang merupakan unit Clarifier Paket yang terbuat dari Carbon Steel, dimana proses koagulasi-flokulasi, sedimentasi dan filtrasi terdapat pada 1 tangki yang terdiri dari kompartemen-

kompartemen untuk tiap-tiap proses. Air baku yang diambil dari Sungai Bengawan Solo dialirkan menuju bak sedimentasi yang ditempatkan sebelah utara IPA -2 Babat sebelum dialirkan menuju Plosowahyu. Dikarenakan musim kemarau panjang, BNA Lamongan dapat merasakan hasil produksi IPA Plosowahyu selama 2 bulan semenjak dioperasikan. Oleh karena itu, hasil produksi dari IPA Babat masih tetap digunakan untuk melayani BNA Lamongan.

3. Unit Distribusi

Setelah air baku diolah, maka air tersebut menjadi siap untuk didistribusikan ke pelanggan. Sistem distribusi air minum yang dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Lamongan adalah sistem cabang dimana sistem tersebut mengikuti arah pengembangan kota. Dan mengingat Kabupaten Lamongan merupakan daerah dengan kontur yang datar, maka diperlukan pemompaan dalam pendistribusian air minumnya agar air tersebut dapat sampai di pelanggan yang terjauh.

Unit-unit penunjang dalam sistem distribusi air minum ini diantaranya adalah pipa distribusi, reservoir, serta pompa distribusi. Jenis pipa distribusi yang digunakan untuk distribusi air minum pada BNA Lamongan adalah PVC dengan diameter pipa berkisar antara 75 – 200 mm.

Unit penunjang sistem distribusi yang lain adalah reservoir serta menara air. Terdapat beberapa unit reservoir untuk pendistribusian air minum di BNA Lamongan, yaitu reservoir pada IPA Babat, Booster Pump Lamongan, dan yang terletak di Desa Made. Untuk menara air hanya terdapat di 2 lokasi, yaitu di Kantor PDAM Lamongan serta di Alun – alun Lamongan. Selain pipa distribusi dan reservoir, unit penunjang distribusi lainnya adalah pompa distribusi. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan mengenai pompa distribusi yang ada.

4. Unit Pelayanan

Jumlah Kelurahan/Desa terlayani Jaringan Perpipaan oleh PDAM di Kecamatan Lamongan adalah sebanyak 12 Desa/Kelurahan dari 20 Desa/Kelurahan yang ada, yaitu Sukorejo, Sukomulyo, Tlogoanyar, Sidoharjo, Tumenggungan, Banjarmendalan, Jetis, Sidokumpul, Sukomulyo, Karanglangit, Made, Plosowahyu, dan Tanjung. Jumlah pelanggan di Kecamatan Lamongan ini dapat dirincikan sebagai berikut:

- Jumlah Sambungan Rumah (SR) : 8.384 SR (41.920 jiwa)
- Jumlah Hidran Umum (HU) : 86 unit (8.600 jiwa)
- Jumlah Sambungan Sosial : 72 unit (1.800 jiwa)
- Jumlah Sambungan Industri : 3 unit (75 jiwa)

Sehingga total penduduk terlayani pada BNA Lamongan ini berjumlah 52.320 jiwa atau 13.002 KK (77,90%)

5. Tingkat Kehilangan Air

Dari data yang ada diketahui tingkat kehilangan air di IPA Babat berkisar antara 34% - 35%.

Tingkat kehilangan air ini kemungkinan terjadi secara teknis disebabkan oleh kebocoran yang terjadi pada pipa transmisi dan pipa induk, kebocoran pada tangki reservoir, dan kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan. Sedangkan faktor non teknis, disebabkan oleh ketidak-akuratan meter air pada unit produksi, pada pelanggan, dan kesalahan penanganan data.

B. HIPPAM

Selain dari PDAM, pelayanan air minum melalui Jaringan Perpipaan di Kecamatan Lamongan adalah berasal dari HIPPAM. Terdapat 9 kelompok HIPPAM yang ada di Kecamatan Lamongan, yaitu Desa Pangkatrejo, Kebet, Sukomulyo, Rancangkencono, Kramat, Kalikapas, Wajik, Karanglangit dan Sumberejo. Penduduk terlayani oleh HIPPAM di Kecamatan Lamongan ini berjumlah 9.549 jiwa (2.373 KK) atau sebanyak 14% dari total penduduk di Kecamatan Lamongan.

Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh ke-sembilan HIPPAM tersebut berasal dari telaga, waduk dan sumur. Berdasarkan dari sumber air bakunya, terdapat 6 (enam) kelompok HIPPAM yang mengolah air baku sebelum didistribusikan ke pelanggan. Pengolahan air baku oleh HIPPAM ini tidak menggunakan pengolahan air baku yang lengkap, namun hanya menggunakan pengolahan sederhana, seperti koagulasi dan filtrasi. Sedangkan 3 (tiga) kelompok HIPPAM yang lain langsung mendistribusikan airnya ke pelanggan.

Harga air HIPPAM yang ditetapkan per desa bervariasi, dimana harga air berkisar antara Rp 800,00/m3 hingga Rp 2.500,00/m3. Hal tersebut ditentukan dari biaya operasional di tiap – tiap HIPPAM.

BUKAN JARINGAN PERPIPAAN

Bagi penduduk di Kecamatan Lamongan yang tidak mendapatkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari mereka memanfaatkan air dari berbagai macam sumber, yaitu seperti telaga, sungai, sumur, PAH, mata air, atau yang lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Lamongan yang memanfaatkan air bersih Bukan Jaringan Perpipaan adalah sebanyak 5.298 jiwa (1.317 KK) atau sebesar 7,89% dari penduduk di Kecamatan Lamongan.

1.9.9.2. IBUKOTA KECAMATAN

JARINGAN PERPIPAAN

A. PDAM

Pelayanan air minum oleh PDAM Kabupaten Lamongan pada tingkat IKK ini meliputi 10 (sepuluh) IKK, yaitu IKK Babat, IKK Pucuk, IKK Sukodadi, IKK Deket, IKK Turi, IKK Sugio, IKK Kembangbahu, IKK Sekaran, IKK Brondong, dan IKK Paciran. Kesepuluh IKK tersebut dilayani melalui 8 (delapan) Unit Pelayanan. Dari 10 (sepuluh) IKK yang ada, 6 IKK tergabung menjadi 1 sistem dengan BNA Lamongan, yaitu IKK Babat, IKK Pucuk, IKK Sekaran, IKK Sukodadi, IKK Deket, dan IKK Turi. Sistem Lamongan tersebut bersumber dari IPA Babat. Selain itu IKK Sugio dan IKK Kembangbahu juga merupakan 1 sistem, begitu pula dengan IKK Brondong dan IKK Paciran. IKK Sugio

dan IKK Kembangbahu memanfaatkan air dari IPA Waduk Gondang. Sedangkan IKK Brondong dan IKK Paciran memanfaatkan air yang berasal dari IPA Brondong.

B. HIPPAM

Dari 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan, terdapat 10 Kecamatan yang memiliki klasifikasi wilayah sebagai wilayah perkotaan. Dan dari 10 Kecamatan tersebut, terdapat 7 Kecamatan yang sebagian masyarakatnya ada yang memanfaatkan HIPPAM untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih. 7 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sukodadi, Karangbinangun, Turi, Maduran, Paciran, Laren, dan Brondong.

BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (BJP)

Penduduk Kabupaten Lamongan di wilayah perkotaan yang tidak mendapatkan pelayanan air bersih dan air minum melalui jaringan perpipaan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari mereka memanfaatkan air dari berbagai macam sumber, yaitu seperti telaga, sungai, sumur, PAH, mata air, atau yang lainnya.

1.9.9.3. PERDESAAN

JARINGAN PERPIPAAN

A. HIPPAM

Mayoritas penduduk wilayah perdesaan di Kabupaten Lamongan memperoleh air minum serta air bersih jaringan perpipaan melalui HIPPAM. Hampir di wilayah perdesaan di setiap kecamatan yang memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan membentuk lembaga hippam.

B. PJT

Pelayanan air minum yang berasal dari PT. Jasa Tirta (PJT) di Kabupaten Lamongan sebesar 0,80% atau sebanyak 2.703 KK. Dari 2.703 KK tersebut tersebar di 10 Desa di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sekaran dan Kecamatan Babat. Unit ini dikelola oleh UB. JPAM Lamongan.

1. **Unit Air Baku**

   Air baku yang dimanfaatkan oleh PJT untuk menyuplai kebutuhan air minum di Kecamatan Sekaran dan Kecamatan Babat berasal dari Sungai Bengawan Solo. Batas maksimal pengambilan air baku untuk PJT adalah sebesar 62.208 m3. Sedangkan debit maksimal Sungai Bengawan Solo adalah sebesar 10,9 m3/det, dan debit minimalnya adalah sebesar 0,68 m3/det.

   PJT menggunakan intake dengan tipe ponton berpompa atau tipe intake mengapung. Intake tersebut menggunakan 2 unit pompa submersible yang masing-masing berkapasitas 30 L/det. Pompa tersebut dipakai secara bergantian. Untuk pipa transmisi, PJT menggunakan jenis pipa GI dengan diameter 250 mm.

2. Unit Produksi

Unit produksi dari PJT terletak di Kecamatan Sekaran. IPA tersebut berkapasitas 30 L/det. Instalasi pengolahan terdiri dari:

a. Prasedimentasi

Bak prasedimentasi dibangun dengan kosntruksi beton. Air baku dari intake dialirkan menuju 2 bak prasedimentasi yang kemudian dialirkan menuju unit sump pit secara gravitasi.

b. Sump Pit

Sump pit terbuat dari beton yang terdiri dari beberapa sekat sehingga aliran yang terjadi adalah turbulen. Dan diunit ini dipasang juga alat pengukur Thomson.

c. Clarifier

Dari sump pit, air dipompa menuju bangunan clarifier yang terbuat dari carbon stell. Sebelum masuk clarifier dibubuhkan tawas. Air mengalir dari bawah menuju atas. Air yang lebih jernih mengalir lewat gutter menuju unit filter secara grafitasi.

d. Filter

Bangunan filter terbuat dari carbon stell. Merupakan filter pasir gravitasi, air dari clarifier mengalir dari bawah menuju atas. Air yang jernih kemudian dimasukkan ke dalam tangki reservoir.

e. Reservoir

Pada pipa air dari filter menuju reservoir dibubuhkan desinfektan berupa kaporit. Reservoir terbuat dari carbon stell. Tangki reservoir berjumlah 2 buah dengan kapasitas masing-masing 200 m3.

3. Unit Distribusi

Setelah air baku diolah, maka air tersebut menjadi siap untuk didistribusikan ke pelanggan. Pompa distribusi yang digunakan berjumlah 2 unit, masing-masing bertipe sentrifugal dengan kapasitas 30 L/det. Pompa distribusi tersebut digunakan secara bergantian.

Pipa distribusi yang dipakai berjenis GI dan PVC, dimana pipa GI hanya untuk pipa berdiameter 250 mm, sedangkan pipa PVC berdiameter dibawahnya, yaitu 200 mm, 150 mm, 110 mm, dan 63 mm. Panjang keseluruhan dari pipa distribusi tersebut adalah 55.777 m.

4. Unit Pelayanan

Jumlah Desa terlayani Jaringan Perpipaan oleh PJT di Kecamatan Sekaran adalah sebanyak 9 (sembilan) Desa dari 21 Desa yang ada, yaitu Desa Keting, Desa Kendal, Desa Titik, Desa Ngarum, Desa Besur, Desa Kebalan Kulon, Desa Kudikan, Desa Jugo, dan Desa Manyar. Sedangkan untuk Kecamatan Babat, Desa yang terlayani oleh jaringan perpipaan dari PJT hanya 1 (satu) desa, yaitu Desa Kebalan Pelang.

1.9.10. PERSAMPAHAN

1.9.10.1. TIMBULAN DAN KOMPOSISI SAMPAH

Tabel 1.43
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
di Kabupaten Lamongan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (kg/hari)
1	Sukorame	20.567	8.226,80
2	Bluluk	21.557	8.622,80
3	Ngimbang	46.468	18.587,20
4	Sambeng	50.476	20.190,40
5	Mantup	44.920	17.968,00
6	Kembangbahu	48.686	19.474,40
7	Sugio	60.629	24.251,60
8	Kedungpring	60.250	24.100,00
9	Modo	49.092	19.636,80
10	Babat	89.040	35.616,00
11	Pucuk	49.612	19.844,80
12	Sukodadi	57.152	22.860,80
13	Lamongan	68.167	27.266,80
14	Tikung	44.102	17.640,80
15	Sarirejo	24.921	9.968,40
16	Deket	44.289	17.715,60
17	Glagah	43.412	17.364,80
18	Karangbinangun	41.310	16.524,00
19	Kalitengah	54.503	21.801,20
20	Turi	35.942	14.376,80
21	Karanggeneng	45.954	18.381,60
22	Sekaran	49.013	19.605,20
23	Maduran	37.411	14.964,40
24	Laren	52.138	20.855,20
25	Brondong	48.201	19.280,40
26	Paciran	96.087	38.434,80
27	Solokuro	73.872	29.548,80
Total		**1.357.771**	**543.108,40**

Sumber : DLH Kabupaten Lamongan

Timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2017 dengan timbulan sampah tertinggi ada di Kecamatan Paciran yaitu sebesar 38.434,80 kg/hari dan terendah terdapat di Kecamatan Sukorame yaitu sebesar 8.226,80 kg/hari.

Daerah pelayanan sampah di Kabupaten Lamongan hanya pada wilayah ibukota Kecamatan dengan kegiatan hasil sampah berasal dari rumah tangga, pasar, Komersial/jalan dan Industri/rumah sakit. Untuk wilayah pinggiran kota kecamatan atau pedesaan masih dikelola secara tradisional.

Beberapa komponen dari aliran sampah kota ini dikelola secara terpisah oleh pihak pihak yang pada dasarnya informal meliputi, produk yang dapat didaur ulang, barang yang dapat dijual kembali,material konstruksi dan bongkaran.

1.9.10.2. PROFIL OPERASIONAL

PEWADAHAN

Secara umum di beberapa Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamongan, fasilitas wadah sampah di sumber sudah memenuhi syarat sesuai SNI 19-2454-2002, dimana untuk pewadahan sampah sebaiknya wadah dalam kondisi tertutup dan bersifat ringan sehingga memudahkan dalam kegiatan pengumpulan. Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Ada beberapa tujuan dilakukan pewadahan ini yaitu memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari perhatian dari binatang, menghindari air hujan dan menghindari pencampuran sampah.

Untuk saat ini di pemukiman Kabupaten Lamongan cara pewadahan sampah yang dilakukan adalah pola individual dan pada kegiatan komersial. Wadah-wadah individual ini di tempatkan di depan rumah, bangunan dan ruko di sepanjang jalan dan bentuk wadah yang digunakan bemacam-macam seperti tong plastik, tempat sampah dari ban bekas,keranjang anyaman bambu, drum bekas, wadah sisa cat.

PENGUMPULAN

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah yang dimulai dari tempat pewadahan sumber sampah ke TPS. Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan sampah di Kabupaten Lamongan dikelola oleh tiap-tiap RW pada masing-masing desa, sarana tersebut berupa gerobak dan motor sampah. gerobak sampah dioperasikan oleh petugas pada masing-masing desa/kelurahan untuk mengumpulkan sampah dari perumahan atau institusi (kantor desa, kecamatan, sekolah dll). Selain menggunakan gerobak sampah, pengumpulan sampah dari sumber ke TPS juga menggunakan motor sampah. Selain itu motor sampah berfungsi untuk mengangkut sampah hasil pembersihan jalan yang tidak terangkut oleh gerobak (jalan utama kota Lamongan).

Pola pengumpulan sampah yang ada di Kabupaten Lamongan pada daerah yang terlayani TPS adalah pola individual tidak langsung, dilakukan pada daerah-daerah di Kecamatan Kota. Pola ini dilakukan dengan menggunakan gerobak dan motor sampah untuk kemudian sampah tersebut dikumpulkan di TPS terdekat.

Operasi penyapuan didasarkan pada tingkat kerawanan terhadap kebersihan. Untuk jalan yang memiliki aktivitas lalu lintas yang tinggi, penyapuan dilakukan

Tabel 1.44. Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan

Nama Kecamatan	3R						Volume sampah yang terangkut ke TPA		Total	
	Wilayah Perdesaan		Wilayah Perkotaan		Total		Wilayah Perkotaan			
	(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)
Sukorame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bluluk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sambeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kembangbahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sugio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kedungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Babat	-	-	-	-	-	-	80	100.000	80	100.000
Pucuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukodadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamongan	-	-	10	10	10	5	90	800.000	100	800.000
Tikung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarirejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deket	-	-	-	-	-	-	20	2000	20	2000
Glagah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karangbinangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalitengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karanggeneng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama Kecamatan	3R						Volume sampah yang terangkut ke TPA		Total	
	Wilayah Perdesaan		Wilayah Perkotaan		Total		Wilayah Perkotaan			
	(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)
Maduran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solokuro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brondong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Pemutahiran Strategi Sanitasi Kota Tahun 2015

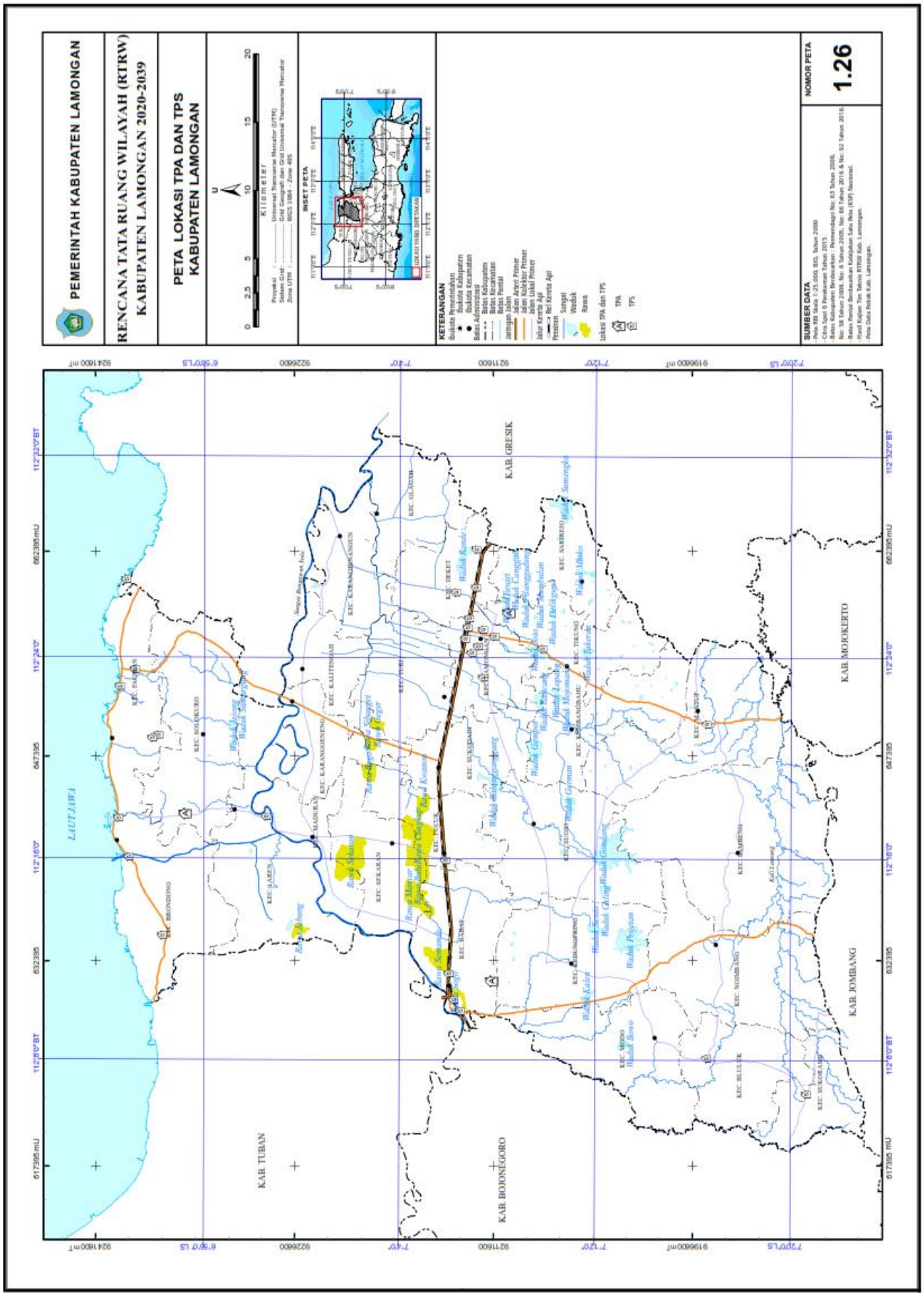
Tabel 1.45. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Jumlah/luas total terpakai	Kapasitas dan daya tampung	Rotasi /hari	Kondisi			Keterangan
				M3		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
1	Pengumpulan setempat								
	- Gerobag	Unit	126	2	1	√	-	-	-
	- Becak/Becak Motor	Unit	11	2	1	√	-	-	-
	- Kendaraan Pick Up	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
	- Bak Sampah (Beton/kayu/fiber)	Unit	10	80	1	√	-	-	-

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Jumlah/luas total terpakai	Kapasitas dan daya tampung	Rotasi /hari	Kondisi			Keterangan
				M3		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
	- Container	Unit	10	80	1	√	-	-	-
	- Transfer Stasiun	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	- SPA (Stasiun Peralihan Antara)	Unit	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengangkutan								
	- Dump Truck	Unit	7	80	3	√	-	-	-
	- Arm Roll Truck	Unit	2	80	3	√	-	-	-
	- Compactor Truck	Unit	2	80	3	√	-	-	-
4	Pengolahan Sampah								
	- Sistem 3R	Unit	2	15	1	√	-	-	-
	- Incinerator	Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	TPA/TPA Regional Kontruksi : lahan urug saniter/ lahan urug terkendali/penimbunan terbuka Operasional : lahan urug saniter/lahan urug terkendali/penimbunan terbuka								
	- Luas total TPA yang terpakai	Ha	3	15.000		√	-	-	- TPA Tambakrigadung = 8 Ha

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Jumlah/luas total terpakai	Kapasitas dan daya tampung	Rotasi /hari	Kondisi			Keterangan
				M3		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
									- TPA Dadapan = 3 Ha - TPA Babat = 3 Ha
	- Luas sel landfill	Ha				√	-	-	
	- Daya tampung TPA	(M3/hari)		15.000		√	-	-	
6	Alat Berat						-	-	
	- Bulldozer	Unit	4	-		√	-	-	
	- Whell/truck loader	Unit	7	-		√	-	-	
	- Excavator/backhoe	Unit	-	-		-	-	-	
	- Truck tanah	Unit	-	-		-	-	-	
7	IPL : Sistem Kolom /aerasi		-	-		-	-	-	
	Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD) : - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet		-	-		-	-	-	

Sumber: Pemutahiran Strategi Sanitasi Kota


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA LOKASI TPA DAN TPS
KABUPATEN LAMONGAN
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.26
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN
LAUT JAWA

Tabel 1.44.
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kabupaten Lamongan

No	Lokasi	Ukuran	Jumlah TPS	Jumlah Desa Terlayani
A	**Kecamatan Tikung**		**5**	
1	TPA Tambakrigadung	61.000 m2		
2	TPS Tambakrigadung	7 x 3,5 x 1,5 m		1
3	TPS Bakalan Pule	6 x 4 x 1,5 m		2
4	TPS Tikung	7 x 3,5 x 1,5 m		1
5	TPS Kacangan	6 x 4 x 1,5 m		1
B	**Kecamatan Lamongan**		**10**	
1	TPS Sukorejo	10 x 10 x 2 m		2
2	TPS Jalan Sumargo	4 x 7,1 x 1 m		2
3	TPS Pahlawan	11,5 x 2,5 x 1,5 m		2
4	TPS Maderejo	10 x 10 x 2 m		1
5	TPS Jl. Ikan Bandeng	10 x 8 x 2 m		1
6	TPS Belakang KPU	12,2 x 3,9 x 2 m		1
7	TPS Depan Kantor Perumnas	1,5 x 2 x 1,5 m		1
8	TPS Jetis	10 x 10 x 2 m		3
9	TPS Stadion Surajaya			3
10	TPS Rest Area			3
C	**Kecamatan Babat**		**5**	
1	TPA Gendongkulom	90 x 70 m		1
2	TPS Pasar Burung Babat	6 x 4 x 1,5 m		1
3	TPS Plaosan	6 x 4 x 1,5 m		1
4	TPS Sawonggaling Babat	9 x 5 m		1
5	TPS Babat	5 x 4 x 1,5 m		1
D	**Kecamatan Paciran**		**7**	
1	TPS Weru Lor	6 x 4 x 1,5 m		1
2	TPS Sendangagung	6 x 4 x 1,5 m		1
3	TPS Sendang Duwur	6 x 4 x 1,5 m		1
4	TPS Kranji	8 x 6 x 1,5 m		1
5	TPS Makam Sunan Drajat			1
6	TPS Ds. Paciran			1
7	TPS Kandangsemangkon			1
E	**Kecamatan Brondong**		**5**	
1	TPS brengkok	6 x 4 x 1,5 m		1
2	TPS Sidoharjo	6 x 4 x 1,5 m		1
3	TPS Brondong (S. Bengawan Solo)	6 x 4 m		0
4	TPS Brondong (stadion)	6 x 4 x 1,5 m		1
5	TPS Pelabuhan Brondong			1
F	**Kecamatan Deket**		**11**	
1	TPS pandanpancur	6 x 4 x 1,5 m		1

No	Lokasi	Ukuran	Jumlah TPS	Jumlah Desa Terlayani
2	TPS Sugihwaras	6 x 4 x 1,5 m		1
3	TPS Sidorejo	6 x 4 x 1,5 m		1
4	TPS Nggajah	6 x 4 x 1,5 m		1
5	TPS Deketkulon	6 x 4 x 1,5 m		1
6	TPS Keputran	6 x 4 x 1,5 m		1
7	TPS Glugu	6 x 4 x 1,5 m		1
8	TPS Dinoyo	6 x 4 x 1,5 m		1
9	TPS Sidorejo	6 x 4 x 1,5 m		1
10	TPS Dsn Pondok Ds. pandanpancur	6 x 4 x 1,5 m		1
11	TPS Pabrik Udang	6 x 4 x 1,5 m		1
G	**Kecamatan Solokuro**			
1	TPA Dadapan	1,165 ha	1	
H	**Kecamatan Pucuk**			
1	TPS Pucuk	6 x 4 x 1,5 m	1	2
I	**Kecamatan Bluluk**			
1	TPS Bluluk (deket Pasar)	6 x 4 x 1,5 m	1	1
J	**Kecamatan Sukorame**			
1	TPS Sukorame Deket Ktr Kec	8 x 6 x 1,5	1	1
K	**Kecamatan Modo**			
1	TPS Sampah Pasar Ds. Modorejo	8 x 6 x 1,5	1	1
	Jumlah		48	57

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman





❖ **Visualisasi TPA Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan**




❖ **Visualisasi TPA Dadapan Kec. Selokuro Kab. Lamongan**




❖ **Visualisasi TPA Gendong Kulon Kec. Babat Kab. Lamongan**

1.9.11. AIR LIMBAH

a. Air Limbah Domestik

Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipial wastewater*) yang terdiri dari atas yang pertama black water yaitu air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, air pembersih, air pengelontor dan kertas pembersih dan yang kedua grey water yaitu air limbah domestik yang berasal dari air cucian dapur dan cucian pakaian. Pengolahan air limbah domestik dengan On-site System banyak dijumpai di Perkotaan Kabupaten Lamongan. Adapun teknologi atau pengolahan yang dipakai pada On-site system ini adalah jamban yang biasanya dibangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu dan dipakai secara bersama atau kolektif untuk beberapa rumah tangga. Penyediaan jamban ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan ketersediaan lahan.

Tingkat ekonomi penduduk sedang dan tinggi mampu untuk membuat toilet yang memenuhi syarat di rumah masing-masing, sedangkan untuk masyarakat dengan penghasilan sedikit/rendah biasanya tidak bisa membuat jamban sendiri tetapi mereka mendapatkan fasilitas berupa jamban secara kolektif. Pada kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai masyarakat ekonomi lemah yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan buang air besar atau pekarangan belakang rumah. Hal ini yang masih dijumpai pada masyarakat di pedesaan Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui dinas terkait telah membangun sarana sanitasi umum MCK komunal sejak tahun 2011 dan melaksanakan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sejak tahun 2011. Pembangunan sanitasi MCK +++ dari program SLBM pada tahun 2011 terdapat di Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan, Desa Pule Kecamatan Modo, Desa Dibee Kecamatan Kalitengah dan Desa Pomahan Janggan Kecamatan Turi. Cakupan pelayanan 92 KK sampai dengan 143 KK.

b. Sistem dan Infrastruktur

Sistem sanitasi pada sektor Air Limbah Domestik dijabarkan dalam bentuk diagram sistem sanitasi (DSS) yang memuat informasi mengenai infrastruktur pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lamongan. Diagram Sistem Sanitasi (DSS) Air Limbah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Diagram Sistem Sanitasi (DSS) Air Limbah Domestik

Produk Input	User Interface	Pengumpulan & Penampungan / Pengolaan Awal	Pengangkutan / Pengaliran	(semi) Pengolahan Akhir Terpusat	Daur Ulang dan atau Pembuangan Akhir
BLACK WATER					
Tinja	Jumbleng				Tanah
Urine					Tanah, Kebun, danau, laut, bawah jembatan, dst
Air Pembersih	WC, Jamban dan Kakus	Septiktank	Truk Tinja		Sungai, laut
					Sungai, laut
GREY WATER					
Air cucian dari dapur	Tempat cuci piring	Drainase	Sungai		Laut
	Wastafell			Sawah, tambak	Laut
	Kamar Mandi				Laut, Tanah

Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Lamongan

Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Lamongan telah memiliki sarana prasarana pembuangan air limbah domestik. Bahkan pada Kecamatan Pucuk, Turi, dan Lamongan, masyarakat pada ketiga daerah tersebut telah ODF (*Open Defecation Free*). Sedangkan, jumlah Rumah tangga (KK) yang belum memiliki jamban dan masih BABS adalah sekitar 9,5 % atau sebanyak 30.201 KK.

Sarana pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Lamongan meliputi cubluk/ jamban tidak aman, cubluk dengan septiktank, jamban bersama, MCK komunal, dan IPAL. MCK Komunal dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Cipta Karya yang tersebar di beberapa desa. Untuk IPAL, masih terpusat hanya pada lokasi tertentu dengan cakupan pelayanan kurang dari 200 KK, misalnya pada IPAL di Perumahan Graha Kecamatan Tikung dengan pelayanan mencakup 162 KK dan beberapa IPAL skala kecil perumahan yang tersebar di beberapa kelurahan Kecamatan Lamongan dengan pelayanan tiap IPAL kurang dari 50 KK. Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Lamongan sebagian belum standar. Secara jelas mengenai, cakupan layanan air limbah di Kabupaten Lamongan, dapat dilihat pada tabel 3.38. berikut ini.

Tabel 1.46.
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Lamongan

No	Nama Kecamatan	Sanitasi Tidak Layak	Sanitasi Layak						
		BABS	Sistem Onsite				Sistem Offsite		
						Sistem Berbasis Komunal			Skala Kawasan/ Terpusat
		(KK)	Cubluk Jamban Tidak Aman (KK)	Cubluk aman/ jamban keluarga dengan tangki septik aman (KK)	MCK/ Jamban bersama (KK)	MCK Komunal (KK)	Tangki Septik Komunal I > 10 KK (KK)	IPAL Komunal (KK)	Sambungan Rumah yang Berfungsi (KK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Wilayah Perdesaan**								
	Sukorame	366	698	843	81	92			
	Bluluk	873	1.294	2.044	239				
	Ngimbang	4.239	1.826	2.706	632	120			
	Sambeng	2.063	3.398	5.389	1.599				
	Mantup	871	2.244	3.423	639				
	Kembangbahu	747	2.886	5.157	682				
	Sugio	869	3.857	8.643	1.834				
	Kedungpring	860	4.351	6.805	316				
	Modo	3.621	1.362	5.170	383	86			
	Babat	724	1.971	3.619	1.028	155			
	Pucuk	0	3.236	5.786	310				
	Sukodadi	1.090	2.084	5.849	655				
	Lamongan	0	645	2.917	239				

No	Nama Kecamatan	Sanitasi Tidak Layak	Sanitasi Layak						
		BABS	Sistem Onsite				Sistem Offsite		
						Sistem Berbasis Komunal			Skala Kawasan/ Terpusat
		(KK)	Cubluk Jamban Tidak Aman (KK)	Cubluk aman/ jamban keluarga dengan tangki septik aman (KK)	MCK/ Jamban bersama (KK)	MCK Komunal (KK)	Tangki Septik Komunal I > 10 KK (KK)	IPAL Komunal (KK)	Sambungan Rumah yang Berfungsi (KK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tikung	1.465	2.054	3.726	646		162		
	Sarirejo	154	1.508	1.652	547				
	Deket	825	607	5.679	191				
	Glagah	859	424	5.804	416	102			
	Karangbinangun	1.247	770	5.560	43	160			
	Turi	0	1.517	8.580	702	97			
	Kalitengah	318	2.853	4.127	1.662				
	Karanggeneng	644	1.415	6.524	291				
	Sekaran	111	876	9.363	116				
	Maduran	391	1.401	5.464	354				
	Laren	978	1.034	7.105	1.784	171			
	Solokuro	559	708	3.664	10				
	Paciran	148	3.336	8.336	942	415			
	Brondong	488	3.360	3.978	2.039	72			
2	**Wilayah Perkotaan**								
	Sukorame	1.001	498	1.041	551				

No	Nama Kecamatan	Sanitasi Tidak Layak	Sanitasi Layak						
		BABS	Sistem Onsite			Sistem Berbasis Komunal			Sistem Offsite: Skala Kawasan/ Terpusat
		(KK)	Cubluk Jamban Tidak Aman (KK)	Cubluk aman/ jamban keluarga dengan tangki septik aman (KK)	MCK/ Jamban bersama (KK)	MCK Komunal (KK)	Tangki Septik Komunal I > 10 KK (KK)	IPAL Komunal (KK)	Sambungan Rumah yang Berfungsi (KK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bluluk	0	381	665	506				
	Ngimbang	862	367	2418	0				
	Sambeng	504	756	1364	261				
	Mantup	190	361	434	73				
	Kembangbahu	38	355	629	107				
	Sugio	0	647	1.820	402				
	Kedungpring	54	1.006	2.053	73				
	Modo	733	187	1509	89	133			
	Babat	464	896	2055	380	257			
	Pucuk	0	1.205	2500	151				
	Sukodadi	62	326	552	97	71			
	Lamongan	0	1.213	10.453	444	253		357	
	Tikung	366	453	916	111				
	Sarirejo	0	436	788	570				
	Deket	174	150	1870	44			41	
	Glagah	79	151	809	41				

No	Nama Kecamatan	Sanitasi Tidak Layak	Sanitasi Layak						
		BABS	Sistem Onsite				Sistem Offsite		
						Sistem Berbasis Komunal			Skala Kawasan/ Terpusat
		(KK)	Cubluk Jamban Tidak Aman (KK)	Cubluk aman/ jamban keluarga dengan tangki septik aman (KK)	MCK/ Jamban bersama (KK)	MCK Komunal (KK)	Tangki Septik Komunal I > 10 KK (KK)	IPAL Komunal (KK)	Sambungan Rumah yang Berfungsi (KK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Karangbinangun	217	211	1587	4				
	Turi	0	187	910	22				
	Kalitengah	0	503	742	265	92			
	Karanggeneng	129	71	1593	32				
	Sekaran	18	153	1565	47				
	Maduran	0	0	915	110				
	Laren	138	83	1073	238				
	Solokuro	345	562	2221	0				
	Paciran	125	2.268	6.722	2742	132			
	Brondong	192	2.168	2353	905	151			

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi

Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lamongan sebagian besar telah berfungsi dengan baik dan digunakan secara maksimal oleh warga. Untuk pemeliharaan sarana prasarana air limbah domestic seperti MCK Komunal, biasanya dilakukan sendiri oleh warga dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Di Kabupaten Lamongan juga terdapat IPAL Komunal tetapui hanya pada beberapa kawasan kecil. IPAL Komunal terbesar melayanai 162 KK berada di Perumahan Graha Kecamatan Tikung sedangkan IPAL dengan skala 5 – 10 KK tersebar di bebarapa kelurahan di Kecamatan Lamongan. Lebih jelasnya mengenai kondisi prasarana dan sarana air limbah domestic di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 1.40.

Tabel 1.47.
Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan
				Berfungsi	Tidak berfungsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SPAL Setempat (Sistem Onsite)						
1	Berbasis Komunal					
	- MCK Komunal	Unit	23	√	-	-
2	Truk Tinja	Unit	-	-	-	-
3	IPLT : Kapasitas	M3/hari	-	-	-	-
SPAL Terpusat (Sistem Offsite)						
1	Berbasis Komunal					
	- Tangki Septik Komunal > 10 KK	Unit	-	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit	43	√	-	-
2	IPAL Kawasan/ Terpusat					
	- Kapasitas	M3/hari	-	-	-	-
	- Sistem		-	-	-	-

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi

Persebaran lokasi IPAL skala kecil di beberapa kelurahan di Kecamatan Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.48.
Persebaran IPAL Skala Kecil/ Rumah Tangga di Kecamatan Lamongan

No	IPAL Rumah Tangga	Kapasitas (m^3/hari)	Jum/lah Penduduk Terlayani	Jenis pengolahan	Prosentase Penduduk Terlayani	Keterangan
1	Perum Beringin Indah RT 02 RW 05	2	30	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
2	Perum Gang Arjuno	2,5	32	Filter (sand filter)	85%	untuk grey water
3	Perumahan Banjaranyar	3	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
5	Perum Gang Wilis	2,5	32	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
6	Perumahan Sukorejo	2,5	30	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
7	Perumahan sukomulyo	3	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
8	Perum Made Karyo	2,5	32	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
9	RT 03 RW 08 Ds. Deket	2,5	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
10	RT 02 RW 03 Kel. Tlogoanyar	2,5	30	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
11	RT 03 RW 02 Kel. Sukorejo	2,5	30	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
12	RT 05 RW 03 Sawahan Kel. Sukomulyo	2,5	40	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
13	RT 02 RW 02 Ds. Deket Kulon	2,5	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
14	RT 06 RW 03 Kel. Tlogoanyar	2,5	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
15	RT 01 RW 02 Kel. Sukorejo	2,5	40	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
16	RT 03 RW 01 Kel. Tlogoanyar	2,5	30	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
17	RT 01 RW 02 Kel. Tlogoanyar	2,5	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
18	RT 02 RW 01 Kel. Tlogoanyar	2,5	33	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
19	RT 01 RW 06 Ds. Deket	2,5	32	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
20	RT 02 RW 06 Ds. Deket Kulon	2,5	30	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
21	RT 01 RW 07 Ds. Made	2,5	40	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water

No	IPAL Rumah Tangga	Kapasitas (m^3/hari)	Jum/lah Penduduk Terlayani	Jenis pengolahan	Prosentase Penduduk Terlayani	Keterangan
22	RT 02 RW05 Banjaranyar	2,5	40	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
23	RT 01 RW 03 Kel. Tlogoanyar	2,5	40	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
24	RT 06 RW 01 Rangge Kel. Sukomulyo	2,5	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
25	RT 04 RW 01 Kel. Tlogoanyar	2,5	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
26	RT 02 RW 03 Kel. Sukorejo	2,5	35	Filter (sand filter)	100%	untuk grey water
27	Beringin Jaya	2,5	41	Filter (sand filter)	80%	untuk grey water
28	Beringin Permai	2,5	25	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
29	Rangge RT, RW 3/1	2,5	40	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
30	Jl. Ikan Dorang Sukomulyo	2,5	30	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
31	Made Mulyo 2/5	2,5	25	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
32	Made Kidul 3/9	2,5	20	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
33	Made Kidul 3/3	2,5	26	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
34	Mlaten 2/3	2,5	31	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
35	Banjaranyar 2/4	2,5	24	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
36	Perumda Deket 1/8	2,5	30	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
37	Perum Gang Merpati 5/2	2,5	30	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
38	Sukorejo 5/2	2,5	52	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
39	SDN made 3	2,5	100	Filter (sand filter)	50%	untuk grey water
40	SDN Made 4	2,5	100	Filter (sand filter)	50%	untuk grey water
41	SDN Kepatihan	2,5	100	Filter (sand filter)	50%	untuk grey water
42	Demangan Timur	2,5	30	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water

No	IPAL Rumah Tangga	Kapasitas (m^3/hari)	Jum/lah Penduduk Terlayani	Jenis pengolahan	Prosentase Penduduk Terlayani	Keterangan
43	Demangan tengah	2,5	30	Filter (sand filter)	90%	untuk grey water
44	Perumahan Graha Indah	50	600	ABR	99	untuk grey water

Sumber: Formulir Isian Adipuri Kecana

Tabel 1.49. Lokasi MCK

No	Tahun	Lokasi MCK++		Keterangan
		Desa	Kecamatan	
1	2011	Desa Pomahanjanggan	Kec. Turi	
		Kelurahan Sukomulyo	Kec. Lamongan	
		Desa Pule	Kec. Modo	
		Desa Dibee	Kec. Kalitengah	
2	2012	Desa Lohgung	Kec. Brondong	
		Desa Weru	Kec. Paciran	
		Desa Datinawong	Kec. Babat	
		Desa Waruk	Kec. Karangbinangun	
		Desa Tanggungprigel	Kec. Glagah	
3	2013	Kelurahan Blimbing	Kec. Paciran	
		Kelurahan Brondong	Kec. Brondong	
		Kelurahan Babat	Kec. Babat	
		Desa Siser	Kec. Laren	
		Desa Sukodadi	Kec. Sukodadi	
		Desa Yungyang	Kec. Modo	
4	2014	Desa Weru	Kec. Paciran	
		Desa Gendongkulon	Kec. Babat	
		Desa Cangkring	Kec. Bluluk	
		Desa Durikulon	Kec. Laren	
5	2016	Desa Moronyamplung	Kec. Kembangbahu	MCK Kombinasi + IPAL Komunal
		Desa Tambakrigadung	Kec. Tikung	IPAL Komunal
		Kelurahan Jetis	Kec. Lamongan	IPAL Komunal
		Desa Kranji	Kec. Paciran	IPAL Komunal
		Pasar Ikan	Kec. Lamongan	MCK Kombinasi + IPAL Komunal
		Desa Paciran	Kec. paciran	MCK Kombinasi + IPAL Komunal

No	Tahun	Lokasi MCK++		Keterangan
		Desa	Kecamatan	
		Desa Sendangagung	Kec. Paciran	MCK Kombinasi + IPAL Komunal

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.9.12. JARINGAN DRAINASE

Sistem darinase di Kabupaten Lamongan masih bertumpu pada sungai yang ada sebagai drainase primer. Sedangkan sistem drainase sekunder berada di sisi jalan yang bermuara ke sungai.

Secara umum, Kabupaten Lamongan mempunyai ketinggian yang relatif datar bahkan pada beberapa wilayah banyak dijumpai cekungan – cekungan yang saat ini berupa rawa. Di beberapa daerah masih terdapat area dengan keadaan genangan yang berlangsung periodik selama setengah bulan sampai dengan tiga bulan pada musim kemarau.

Berdasarkan data dari Dinas PU Cipta Karya, wilayah yang sering mengalami genangan di Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.50.
Lokasi Genangan Dan Perkiraan Luas Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah genangan					Infrastruktur
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab	Jenis
1	Banaran	44,82	0.20	± 5 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
2	Plaosan	13,52	0.20	± 5 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
3	Sogo	6,55	0.20	± 5 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
4	Babat	52,76	0.20	± 5 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
5	Bedahan	13,80	0.20	± 5 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
6	Truni	2,04	0.20	± 5 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
7	Trepan	2,70	0.20	± 5 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
8	Gembong	4,11	0.20	± 5 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata

No	Lokasi Genangan	Wilayah genangan					Infrastruktur
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab	Jenis
9	Kebalandono	3,85	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
10	Gempolpading	2,80	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
11	Wanar	4,90	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
12	Waruwetan	1,60	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
13	Cungkup	3,70	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
14	Padenganploso	7,50	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
15	Bugoharjo	3,00	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
16	Sumberjo	2,62	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
17	Sendangrejo	3,13	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
18	Tanjung	2,20	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
19	Pangkatrejo	2,60	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
20	Karanglangit	2,50	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
21	Plosowahyu	2,60	0.10	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
22	Made	28,17	0.60	± 1 hari	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
23	Sukomulyo	18,97	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
24	Sidokumpul	10,85	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
25	Dlanggu	3,20	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
26	Dinoyo	5,86	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
27	Babatagung	1,47	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata

No	Lokasi Genangan	Wilayah genangan					Infrastruktur
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab	Jenis
28	Tukkerto	1,34	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Pasangan Batu Bata
29	Weduni	1,10	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
30	Sidomulyo	1,94	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
31	Laladan	2,99	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
32	Rayunggumuk	1,66	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
33	Gempolpendowo	2,10	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
34	Soko	4,35	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
35	Morocalan	3,18	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
36	Pasi	3,83	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
37	Margoanyar	3,94	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
38	Glagah	7,49	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
39	Bapuh Baru	0,56	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
40	Jatinrenggo	1,43	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
41	Konang	1,91	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
42	Wonorejo	0,90	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
43	Karangturi	2,99	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
44	Meluwur	7,02	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
45	Somowinangun	5,06	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
46	Karanganom	9,97	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah

No	Lokasi Genangan	Wilayah genangan					Infrastruktur
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab	Jenis
47	Ketapangtelu	12,04	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
48	Blawi	16,90	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
49	Baranggayam	0,70	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
50	Pendowolimo	3,88	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
51	Priyoso	0,71	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
52	Kuro	1,60	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
53	Gawerejo	2,65	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
54	Windu	2,72	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
55	Karangbinangun	2,93	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
56	Bogobabadan	4,88	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
57	Watangpanjang	1,14	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
58	Samboping gir	1,05	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
59	Putatbungah	1,10	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
60	Banyuurip	1,01	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
61	Banjarejo	1,87	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
62	Palangan	1,50	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
63	Mayong	2,80	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
64	Sukorejo	6,23	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
65	Waruk	2,28	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah

No	Lokasi Genangan	Wilayah genangan					Infrastruktur
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab	Jenis
66	Pucangro	1,90	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
67	Pucangtelu	9,80	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
68	Somosari	0,77	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
69	Jelakcatur	2,12	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
70	Tiwet	0,78	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
71	Blajo	1,00	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
72	Gambuhan	0,70	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
73	Bojoasri	18,93	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
74	Cluring	1,30	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
75	Lukrejo	2,65	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
76	Mungli	1,10	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
77	Dibe	1,50	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
78	Pengangsalan	1,80	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
79	Butungan	1,40	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
80	Kalitengah	1,08	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
81	Kediren	1,20	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
82	Kuluran	2,63	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
83	Canditunggal	2,02	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
84	Sugihwaras	3,12	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah

No	Lokasi Genangan	Wilayah genangan					Infrastruktur
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab	Jenis
85	Tunjungmekar	1,10	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
86	Sungelebak	4,12	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
87	Kendalkemlagi	4,90	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
88	Karanggeneng	1,96	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
89	Sumberwudi	2,69	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
90	Karangwungu	1,00	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
91	Kawistolegi	3,50	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
92	Latukan	5,36	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
93	Kaligerman	1,00	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
94	Karangrejo	1,92	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
95	Tracal	3,11	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
96	Prijekngablag	2,93	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
97	Duriwetan	3,43	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
98	Siwuran	1,64	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
99	Maduran	1,95	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
100	Jangkungsomo	0,65	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
101	Parengan	2,15	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
102	Pangkatrejo	1,23	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
103	Pringgoboyo	2,47	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah

No	Lokasi Genangan	Wilayah genangan					Infrastruktur
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab	Jenis
104	Turi	3,03	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
105	Gedangan	1,87	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
106	Blumbang	1,69	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
107	Duri Kulon	1,50	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
108	Centini	5,30	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
109	Keduyung	1,59	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
110	Pesanggrahan	1,33	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
111	Mojo Asem	1,82	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
112	Siser	2,00	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
113	Bulutigo	3,08	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
114	Pelangwot	2,57	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
115	Laren	3,60	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
116	Taman Prijek	2,41	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
117	Karangtawar	1,05	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
118	Tejoasri	5,44	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
119	Godog	1,94	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
120	Bulubrangsi	2,64	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
121	Karangwungu Lor	1,30	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
122	Paloh	0,50	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah

No	Lokasi Genangan	Wilayah genangan					Infrastruktur
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab	Jenis
123	Weru	1,47	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
124	Sidokumpul	0,53	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah
125	Warulor	0,51	0.20	±3 jam	1	Sal kurang memadai	Galian Tanah

Sumber: Dinas PU Cipta Karya Kab. Lamongan

dapat diketahui bahwa luas genangan terbesar ada di desa/kelurahan babat yaitu 52,76 ha, selanjutnya banaran yaitu 44,82 ha, berikutnya made 28,17 ha. Penyebab genangan terutama karena hujan deras dan tanggul bengawan solo jebol sehingga saluran drainase tidak mampu lagi menampung besarnya air, pendangkalan saluran dan dimensi saluran terlalu kecil,. Untuk mengatasi banjir sudah dibangun rumah pompa di beberapa lokasi banjir.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA JARINGAN DRAINASE
KABUPATEN LAMONGAN
U
Kilometer
0
2,5
5
10
15
20
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Jaringan Drainase
Drainase Primer
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.27
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG

1.9.13. JARINGAN IRIGASI

Sistem irigasi di Kabupaten Lamongan dikelompokkan ke dalam 7 seksi pengairan, yaitu :

1. Seksi Pengairan Lamongan
2. Seksi Pengairan Kedungpring
3. Seksi Pengairan Pucuk
4. Seksi Pengairan Karanggeneng
5. Seksi Pengairan Sumlaran
6. Seksi Pengairan Laren
7. Seksi Pengairan Kuro

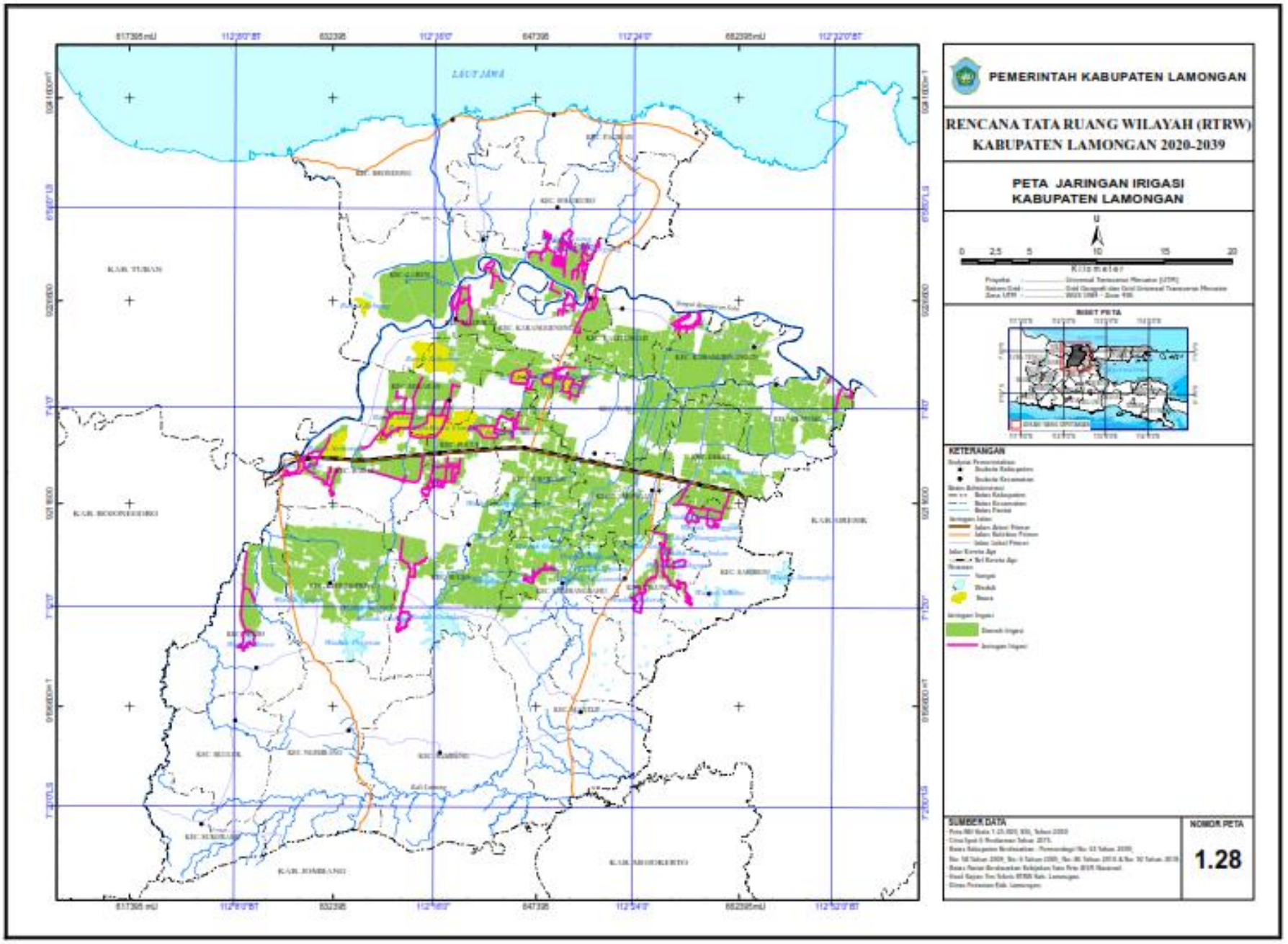
Masing-masing seksi ini mengairi lahan sawah baik sawah irigasi teknis, setengah teknis dan sawah sederhana, sebagaimana terlihat pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 1.51.
Luas Irigasi sesuai dengan Seksi Pengairan Kabupaten Lamongan

No	Seksi Pengairan	Teknis	1/2 teknis	sederhana	Total
1	Seksi Pengairan Lamongan	754	5.344	0	6.098
2	Seksi Pengairan Kedungpring	4.513	1.818	0	6.331
3	Seksi Pengairan Pucuk	0	1.610	5.512	7.122
4	Seksi Pengairan Karanggeneng	3.102	677	2.576	6.355
5	Seksi Pengairan Sumlaran	6.555	36	334	6.925
6	Seksi Pengairan Laren	0	1.066	2.143	3.209
7	Seksi Pengairan Kuro	0	0	9.986	9.986
	Jumlah	**14.924**	**10.551**	**20.551**	**46.026**

Sumber : Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel tersebut, sawah irigasi teknis seluas 14.924 ha, sawah irigasi ½ teknis seluas 10.551 ha dan sawah irigasi sederhana seluas 20.551 ha.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA JARINGAN IRIGASI
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2.5 5 10 15 20
Kilometer
INDEX PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.28
LAUT JAWA

1.9.14. FASILITAS UMUM

Fasilitas umum yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah raga serta perdagangan dan jasa. Fasilitas fasilitas tersebut tersebar secara merata di seluruh Kabupaten Lamongan.

A. FASILITAS PENDIDIKAN

Fasiltas pendidikan di Kabupaten lamongan terdiri dari fasilitas pendidikan umum dan keagamaan. Fasilitas pendidikan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Berikut jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Lamongan.



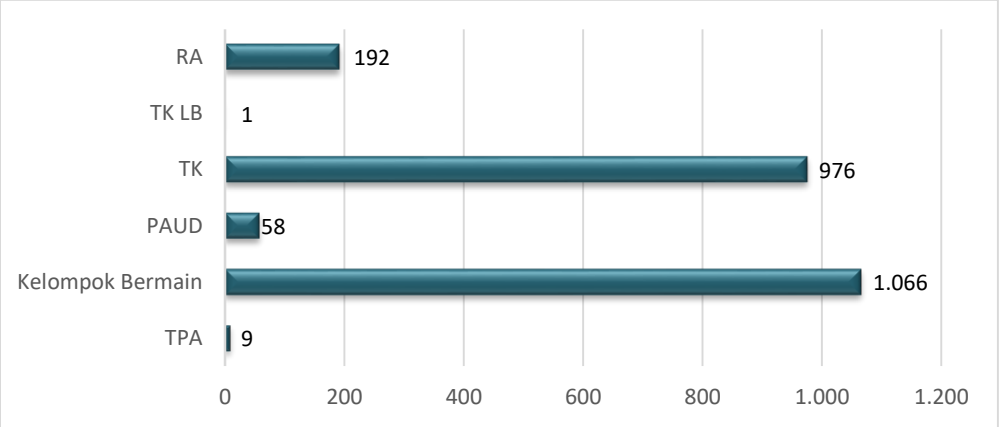
Fasilitas pendidikan di Kabupaten Lamongan antara lain Kelompok Bermain dan TK sederajat sebanyak 1.169 ha, SD sederajat sebanyak 1.169 unit, SMP Sederajat sebanyak 336 unit, SMA sederajat sebanyak 221 unit, Perguruan Tinggi dan sederajat sebanyak 13 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Tabel 1.52.

Tabel 1.52.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat TK di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	TPA	Kelompok Bermain	PAUD	TK		TK LB	RA
					Negeri	Swasta	Swasta	Swasta
1	Sukorame	-	17	-	-	16	-	6
2	Bluluk	-	11	-	-	16	-	8
3	Ngimbang	-	28	3	1	34	-	1
4	Sambeng	-	41	1	-	36	-	14
5	Mantup	-	34	3	-	21	-	14
6	kembangbahu	-	41	1	-	31	-	14
7	Sugio	-	63	7	-	43	-	18
8	Kedungpring	-	35	6	-	41	-	12
9	Modo	-	42	2	-	39	-	10
10	Babat	2	63	4	-	70	-	3
11	Pucuk	-	42	-	-	41	-	4
12	Sukodadi	-	44	-	-	39	-	8
13	Lamongan	4	50	1	1	48	1	3
14	Tikung	1	32	12	-	35	-	7
15	Sarirejo	-	26	-	-	18	-	1
16	Deket	1	34	2	-	34	-	2
17	Glagah	-	51	-	-	47	-	6
18	Karangbinangun	-	45	-	-	32	-	19
19	Turi	-	51	5	-	31	-	13
20	Kalitengah	-	34	2	-	21	-	4
21	Karanggeneng	-	36	-	-	32	-	3
22	Sekaran	-	31	2	-	35	-	6
23	Maduran	1	26	-	-	26	-	3
24	Laren	-	52	4	-	53	-	-
25	Selokuro	-	31	-	-	30	-	-
26	Paciran	-	53	3	-	54	-	2
27	Brondong	-	53	0	-	51	-	11
	Jumlah	**9**	**1.066**	**58**	**2**	**974**	**1**	**192**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Diagram 1.9.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat TK di Kabupaten Lamongan

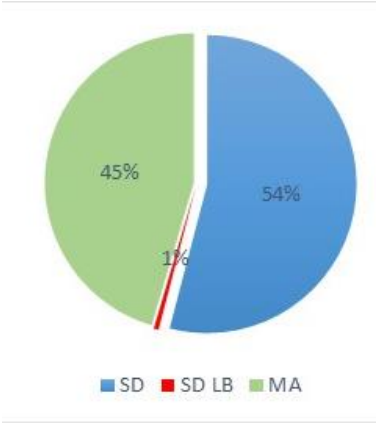


Tabel 1.53.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SD di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	SD		SD LB		MA		Jumlah
		Negeri	Sawasta	Negeri	Sawasta	Negeri	Swasta	
1	Sukorame	13	-	-	-	-	3	16
2	Bluluk	15	-	-	-	1	4	20
3	Ngimbang	33	1	-	-	-	4	38
4	Sambeng	37	2	-	-	-	14	53
5	Mantup	20	-	-	-	-	15	35
6	kembangbahu	29	-	-	-	-	17	46
7	Sugio	37	3	-	-	-	25	65
8	Kedungpring	28	3	-	1	1	14	47
9	Modo	31	1	-	-	-	14	46
10	Babat	31	2	-	1	-	32	66
11	Pucuk	16	1	-	1	-	29	47
12	Sukodadi	24	-	-	-	-	18	42
13	Lamongan	31	5	1	1	-	6	44
14	Tikung	27	-	-	-	-	10	37
15	Sarirejo	11	1	-	-	-	18	30
16	Deket	23	-	-	-	-	10	33
17	Glagah	20	-	-	-	-	36	56
18	Karangbinangun	21	-	-	-	-	18	39
19	Turi	23	-	-	-	-	29	52
20	Kalitengah	18	-	-	-	-	17	35
21	Karanggeneng	18	-	-	-	1	17	36
22	Sekaran	20	-	-	-	-	22	42
23	Maduran	15	1	-	-	-	21	37
24	Laren	15	1	-	-	-	40	56
25	Selokuro	11	-	-	-	-	25	36
26	Paciran	18	1	-	1	-	37	57
27	Brondong	19	6	-	-	-	33	58
	Jumlah	**604**	**28**	**1**	**5**	**3**	**528**	**1.169**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Diagram 1.10.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SD
Kabupaten Lamongan

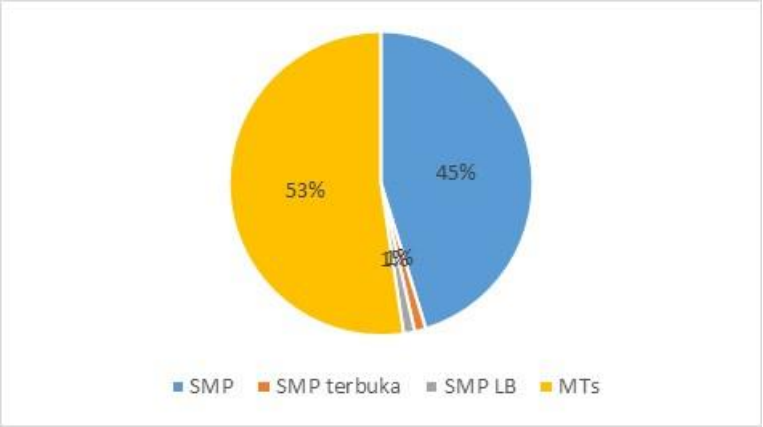


Tabel 1.54.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SMP di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	SMP		SMP	SMP LB		MTs		Jumlah
		Negeri	Sawasta	terbuka	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Sukorame	1	2	1	-	-	-	2	6
2	Bluluk	1	-	-	-	-	-	2	3
3	Ngimbang	3	2	-	-	-	-	3	8
4	Sambeng	1	3	-	-	-	-	6	10
5	Mantup	2	2	-	-	-	-	4	8
6	kembangbahu	1	3	-	-	-	-	3	7
7	Sugio	3	3	-	-	-	-	7	13
8	Kedungpring	2	9	-	-	-	-	3	14
9	Modo	2	3	1	-	-	-	5	11
10	Babat	4	8	-	-	1	1	11	25
11	Pucuk	2	5	-	-	1	-	7	15
12	Sukodadi	2	2	-	-	-	-	6	10
13	Lamongan	5	5	-	-	2	1	5	18
14	Tikung	1	5	1	-	-	-	3	10
15	Sarirejo	1	1	-	-	-	-	4	6
16	Deket	2	1	-	-	-	-	3	6
17	Glagah	1	2	-	-	-	-	6	9
18	Karangbinangun	2	3	-	-	-	-	5	10
19	Turi	1	3	-	-	-	-	5	9
20	Kalitengah	1	-	-	-	-	-	5	6
21	Karanggeneng	1	4	1	-	-	-	7	13
22	Sekaran	2	4	-	-	-	-	6	12
23	Maduran	1	2	-	-	-	-	6	9
24	Laren	2	5	-	-	-	-	10	17
25	Selokuro	1	4	-	-	-	-	17	22
26	Paciran	2	12	-	-	-	-	21	35
27	Brondong	1	11	-	-	-	-	12	24
	Jumlah	**48**	**104**	**4**	**0**	**4**	**2**	**174**	**336**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Diagram 1.11.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SMP
Kabupaten Lamongan

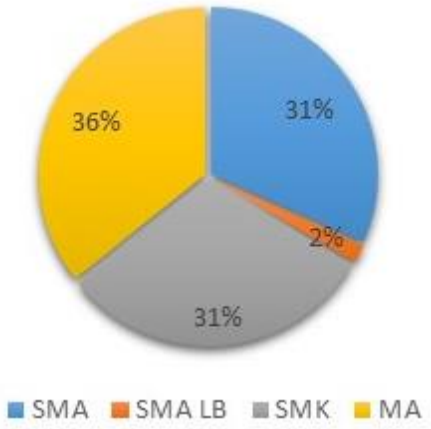


Tabel 1.55.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SMA di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	SMA		SMA LB		SMK		MA		Jumlah
		Negeri	Sawasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Sukorame	-	1	-	-	-	1	-	1	3
2	Bluluk	1	1	-	-	-	1	-	-	3
3	Ngimbang	1	2	-	-	-	3	-	1	7
4	Sambeng	-	1	-	-	1	1	-	2	5
5	Mantup	1	1	-	-	-	3	-	2	7
6	kembangbahu	1	-	-	-	-	1	-	3	5
7	Sugio	-	3	-	-	-	2	-	2	7
8	Kedungpring	1	3	-	-	-	3	-	-	7
9	Modo	-	3	-	-	-	3	-	2	8
10	Babat	1	3	-	1	-	7	1	5	18
11	Pucuk	-	3	-	1	-	2	-	-	6
12	Sukodadi	1	1	-	-	-	4	-	2	8
13	Lamongan	3	3	-	2	2	6	1	4	21
14	Tikung	-	-	-	-	-	3	-	1	4
15	Sarirejo	-	2	-	-	1	-	-	2	5
16	Deket	-	1	-	-	-	-	-	3	4
17	Glagah	-	2	-	-	-	3	-	2	7
18	Karangbinangun	1	-	-	-	-	-	-	4	5
19	Turi	-	-	-	-	-	1	-	4	5
20	Kalitengah	-	2	-	-	1	1	-	1	5
21	Karanggeneng	-	3	-	-	-	2	-	2	7
22	Sekaran	1	3	-	-	-	3	-	2	9
23	Maduran	-	2	-	-	-	1	-	2	5
24	Laren	-	4	-	-	-	-	-	3	7
25	Selokuro	-	3	-	-	-	1	-	7	11
26	Paciran	1	5	-	-	-	8	-	17	31
27	Brondong	-	5	-	-	1	2	-	3	11
	Jumlah	**13**	**57**	**0**	**4**	**6**	**62**	**2**	**77**	**221**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Diagram 1.12.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat SMA
di Kabupaten Lamongan



Tabel 1.56.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Setingkat Perguruan Tinggi
di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	PT/Akademi
1	Sukorame	-
2	Bluluk	-
3	Ngimbang	-
4	Sambeng	-
5	Mantup	-
6	kembangbahu	-
7	Sugio	-
8	Kedungpring	-
9	Modo	-
10	Babat	-
11	Pucuk	-
12	Sukodadi	1
13	Lamongan	5
14	Tikung	-
15	Sarirejo	-
16	Deket	-
17	Glagah	-
18	Karangbinangun	-
19	Turi	-
20	Kalitengah	-
21	Karanggeneng	-
22	Sekaran	2
23	Maduran	-
24	Laren	-
25	Selokuro	-
26	Paciran	5
27	Brondong	-
	Jumlah	**13**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

B. FASILITAS KESEHATAN



Fasilitas kesehatan di Kabupaten Lamongan berupa Rumah Sakit Umum sebanyak 11 unit, Klinik sebanyak 23 unit, Klinik Rawat Inap sebanyak 40 unit, Puskesmas sebanyak 33 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 109 unit. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3.49.

C. FASILITAS PERIBADATAN



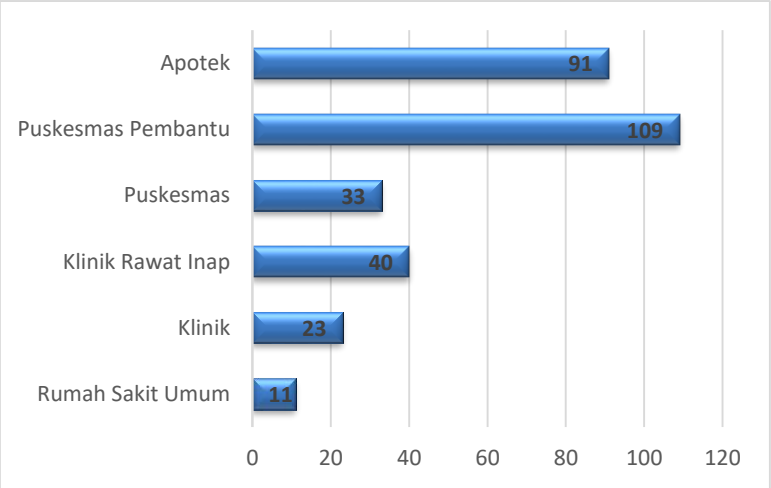
Fasilitas peribadatan yang ada di Kabupaten Lamongan antara lain Masjid sebanyak 1.842 unit, Mushola sebanyak 1.580 unit, Langgar/Surau sebanyak 3.059 unit, Gereja Protestan sebanyak 20 unit, Gereja Katolik sebanyak 1 unit, Pura sebanyak 1 unit. Lihat Tabel 1.57.

Tabel 1.57. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Klinik	Klinik Rawat Inap	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Sukorame	-	1	1	1	2	1
2	Bluluk	-	1	-	1	3	-
3	Ngimbang	1	1	-	1	3	2
4	Sambeng	-	-	-	1	5	1
5	Mantup	-	-	-	1	3	4
6	kembangbahu	-	-	2	1	4	2
7	Sugio	-	1	1	1	5	2
8	Kedungpring	-		4	2	6	5
9	Modo	-	1	1	2	4	2
10	Babat	1	2	4	3	6	6
11	Pucuk	-	1	4	1	5	1
12	Sukodadi	-		1	2	4	8
13	Lamongan	6	8	4	1	4	26
14	Tikung	-		2	1	3	3
15	Sarirejo	-		1	1	3	-
16	Deket	-	-	-	1	5	1
17	Glagah	-	-	-	1	6	2
18	Karangbinangun	1	-	-	1	4	2
19	Turi	-	-	-	1	4	1
20	Kalitengah	-	-	-	1	4	1
21	Karanggeneng	-	-	4	1	4	3
22	Sekaran	-	1	2	1	5	2
23	Maduran	-		2	1	2	2
24	Laren	-	1	2	1	5	-
25	Selokuro	-	1	2	1	3	2
26	Paciran	1	3	3	2	4	9
27	Brondong	1	1		1	3	3
	Jumlah	**11**	**23**	**40**	**33**	**109**	**91**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Diagram 1.13.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan

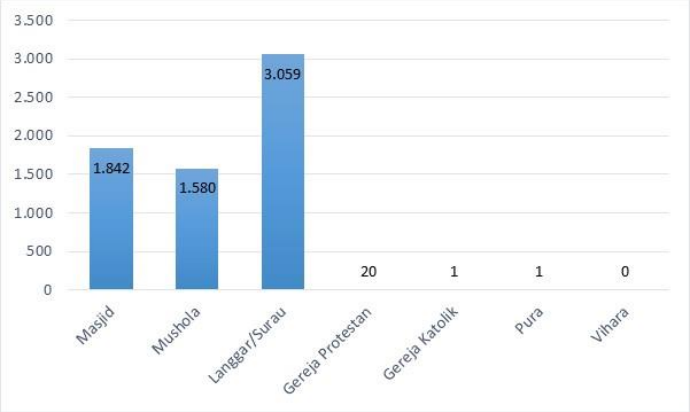


Tabel 1.58. Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Fasilitas Peribadatan (Unit)						
		Masjid	Mushola	Langgar/ Surau	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Sukorame	39	4	59	-	-	-	-
2	Bluluk	38	-	61	2	-	-	-
3	Ngimbang	86	6	167	11	-	-	-
4	Sambeng	99	4	144	-	-	-	-
5	Mantup	77	7	155	-	-	-	-
6	kembangbahu	85	10	218	1	-	-	-
7	Sugio	119	214	-	-	-	-	-
8	Kedungpring	92	16	229	1	-	-	-
9	Modo	88	11	234	-	-	-	-
10	Babat	86	279	-	1	-	-	-
11	Pucuk	51	10	120	-	-	-	-
12	Sukodadi	110	10	143	-	-	-	-
13	Lamongan	81	183	-	2	1	-	-
14	Tikung	80	22	147	-	-	-	-
15	Sarirejo	35	5	159	-	-	-	-
16	Deket	65	67	32	-	-	-	-
17	Glagah	89	13	102	-	-	-	-
18	Karangbinangun	69	7	81	1	-	-	-
19	Turi	66	4	197	1	-	1	-
20	Kalitengah	49	6	133	-	-	-	-
21	Karanggeneng	44	284	-	-	-	-	-
22	Sekaran	45	6	129	-	-	-	-
23	Maduran	44	159	-	-	-	-	-
24	Laren	52	160	5	-	-	-	-
25	Selokuro	28	10	159	-	-	-	-
26	Paciran	66	70	224	-	-	-	-
27	Brondong	59	13	161	-	-	-	-
	Jumlah	**1.842**	**1.580**	**3.059**	**20**	**1**	**1**	**0**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Diagram 1.14.
Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Lamongan



D. FASILITAS OLAH RAGA

Fasilitas olah raga yang dimiliki Kabupaten Lamongan berupa : stadion sebanyak 1 unit, lapangan sepak bola sebanyak 320 unit, kolam renang 21 unit, lapangan bola basket sebanyak 31 unit, lapangan bola volly sebanyak 421 unit, lapangan bulu tangkis sebanyak 188 unit, panjat tebit sebanyak 7 unit, lapangan sepak takraw sebanyak 11 unit, lapangan futsal sebanyak 40 unit.

E. FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASA

Fasilitas perdagangan dan jasa yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan berupa : pasar tradisional, toko, pertokoan, mall, restaurant, hotel, bank, SPBU, showroom mobil/motor dll. Jumlah fasilitas perdagangan dan jasa berupa pasar dan toko dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.59.
Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Pasar	Toko	Pedagang
1	Sukorame	1	269	589
2	Bluluk	2	235	334
3	Ngimbang	2	845	1.091
4	Sambeng	2	767	975
5	Mantup	4	828	1.346
6	kembangbahu	2	696	1.291
7	Sugio	2	960	1.494
8	Kedungpring	4	854	1.590
9	Modo	3	634	1.141
10	Babat	7	1.490	4.552
11	Pucuk	3	604	951
12	Sukodadi	2	1.373	2.363
13	Lamongan	6	1.355	3.619
14	Tikung	2	302	575
15	Sarirejo	1	421	572
16	Deket	1	674	856
17	Glagah	3	1.521	1.762
18	Karangbinangun	2	854	1.028
19	Turi	3	663	845
20	Kalitengah	2	446	1.165
21	Karanggeneng	8	283	1.384
22	Sekaran	9	794	1.768
23	Maduran	3	651	898
24	Laren	7	314	1.326
25	Selokuro	9	570	1.458
26	Paciran	11	420	2.618
27	Brondong	9	409	909
	Jumlah	**110**	**19.232**	**38.500**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

1.9.15. PEREKONOMIAN

Perekonomian di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari produk yang dihasilkan masing-masing sektor maupun produk domestik regional bruto (PDRB).

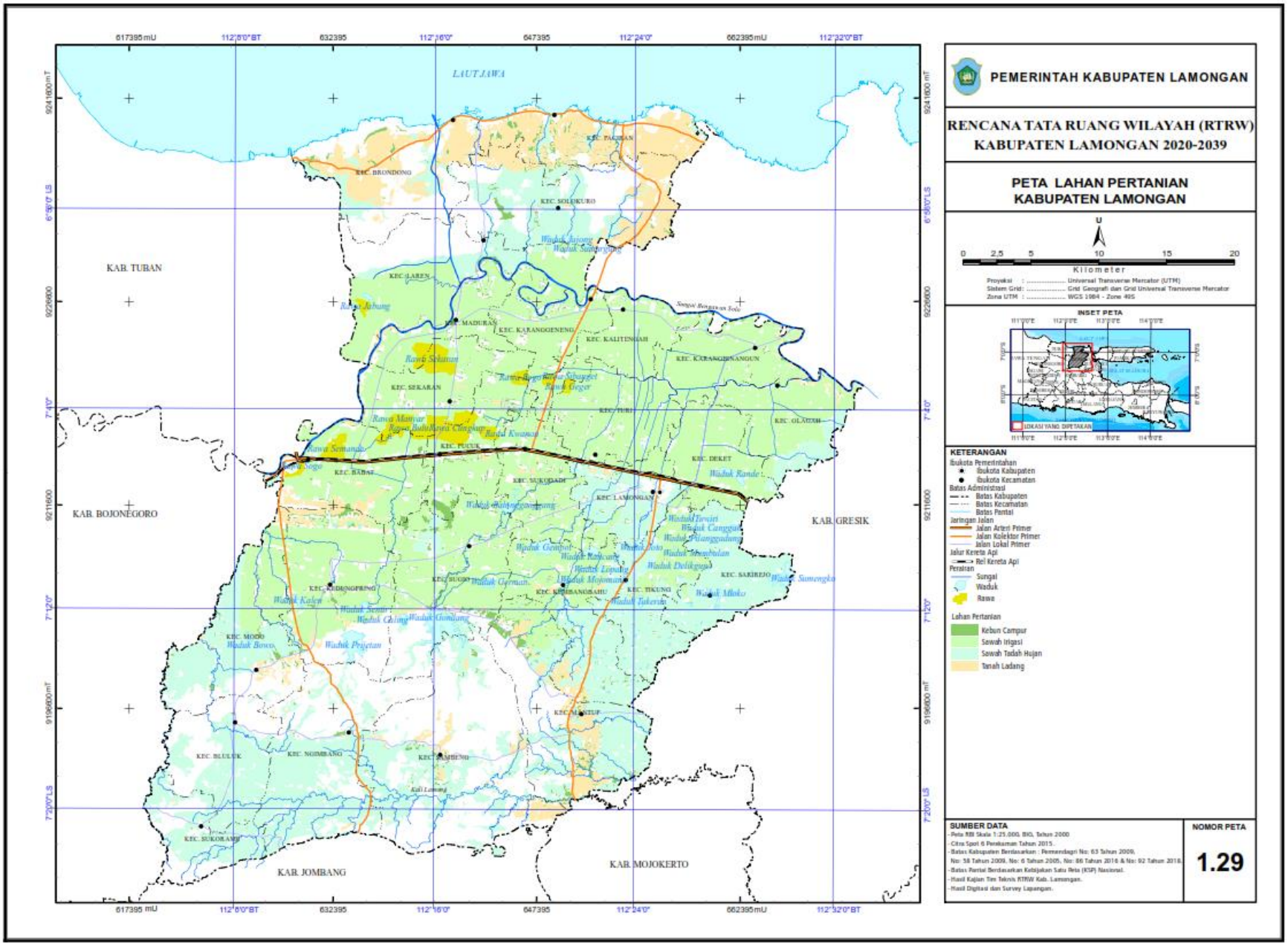
1.9.15.1. SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Tanaman pangan yang dihasilkan oleh Kabupaten Lamongan berupa padi dengan produksi pada Tahun 2018 sebesar 1.094.124 ton, Jagung sebesar 564.265 ton, Kedelai sebesar 22.349 ton, Kacang Tanah sebesar 6.484 ton, Kacang Hijau sebesar 6.497 ton, Ubi Kayu sebesar 33.164 ton, Ubi Jalar sebesar 340 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.53. s/d Tabel 1.59

1.9.15.2. SEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman perkebunan yang dihasilkan oleh Kabupaten Lamongan berupa : tebu sebanyak 30,81 ton, tembakau jawa sebesar 1.277,78 ton, tembakau virginia sebesar 2.027,06 ton, kenaf sebesar 1.147,14 ton, kelapa sebesar 75,04 ton, jambu mente sebesar 22,24 ton, siwalan sebesar 3,51 ton, cabe jamu sebesar 45,04 to. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3.60 s/d 3.70

Selain tanaman perkebunan, tanaman lainnya yang dihasilkan oleh Kabupaten Lamongan adalah tanaman sayuran dan buah, dengan total produksi sebagai berikut : tomat sebesar 1.211 kwintal, Terong sebesar 2.576 kwintal, labu siam sebesar 727 kwintal, ketimun sebesar 1.825 kwintal, kangkung sebesar 50 keintal, kacang panjang sebesar 1.169 kwintal, cabe rawit sebesar 37.554 kwintal, cabe besar sebesar 1.374 kwintal, bayam sebesar 1.350 kwintal, bawang merah sebesar 4.855 kwintal. Sedangkan untuk tanaman buah yang dihasilkan Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Blewa sebesar 32.310 kwintal, melon sebesar 12.323 kwintal, semangka sebesar 268.253 kwintal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.71 s/d 1.83.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA LAHAN PERTANIAN
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.29

Tabel 1.60. Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Januari - April			Mei - Agustus			September - Desember			1 Januari -Desember		
		Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)
1	Sukorame	2.070	70,97	14.691	1.667	72,75	12.127	-	-	-	3.737	71,86	26.818
2	Bluluk	2.715	70,12	19.038	1.914	70,44	13.482	5	70,64	35	4.634	70,40	32.555
3	Ngimbang	3.918	70,11	27.469	2.445	70,91	17.337	153	71,49	1.094	6.516	70,84	45.900
4	Sambeng	3.330	70,33	23.420	1.751	70,99	12.430	169	71,05	1.201	5.250	70,79	37.051
5	Mantup	4.645	71,34	33.137	1.865	72,11	13.449	103	71,66	738	6.613	71,70	47.324
6	Kembangbahu	4.403	72,74	32.027	3.573	72,98	26.076	-	-	-	7.976	72,86	58.103
7	Sugio	5.808	75,64	43.932	4.777	75,97	36.291	1.078	76,47	8.243	11.663	76,03	88.466
8	Kedungpring	4.705	74,87	35.226	4.007	75,18	30.125	-	-	-	8.712	75,03	65.351
9	Modo	4.731	73,97	34.995	4.671	74,65	34.866	9	75,41	68	9.411	74,31	69.929
10	Babat	2.976	69,98	20.826	4.636	70,82	32.832	829	72,95	6.048	8.441	71,25	59.706
11	Pucuk	3.152	70,11	22.099	2.707	70,89	19.190	230	-	-	6.089	70,50	41.289
12	Sukodadi	3.547	70,04	24.843	2.853	70,92	20.233	415	71,58	2.971	6.815	70,85	48.047
13	Lamongan	1.999	71,77	14.347	2.624	72,19	18.943	194	72,79	1.412	4.817	72,25	34.702
14	Tikung	4.243	71,51	30.342	2.515	72,11	18.136	-	-	-	6.758	71,81	48.477
15	Sarirejo	3.690	70,02	25.837	1.893	70,67	13.378	1.395	71,61	9.990	6.978	70,77	49.205
16	Deket	446	69,15	3.084	1.790	70,12	12.551	1.629	71,19	11.597	3.865	70,15	27.232
17	Glagah	92	69,45	639	1.515	70,12	10.623	2.172	71,24	15.473	3.779	70,27	26.735
18	Karangbinangun	240	69,33	1.664	1.284	70,11	9.002	2.431	70,94	17.246	3.955	70,13	27.912
19	Turi	734	70,90	5.201	2.716	71,88	19.523	1.531	72,84	11.152	4.981	71,87	35.875
20	Kalitengah	235	69,97	1.644	785	70,73	5.552	1.932	73,53	14.206	2.952	71,41	21.403
21	Karanggeneng	1.367	70,11	9.584	1.832	72,23	13.233	1.462	73,96	10.813	4.661	72,10	33.630
22	Sekaran	3.350	70,23	23.527	3.119	72,11	22.491	700	73,34	5.134	7.169	71,17	51.152
23	Maduran	1.488	70,33	10.464	1.947	71,94	14.008	1.109	73,34	8.133	4.544	71,87	32.605
24	Laren	2.700	74,99	20.247	3.820	75,98	29.025	2.132	76,54	16.318	8.652	75,84	65.590
25	Solokuro	1.609	66,45	10.694	949	67,11	6.369	10	67,96	68	2.568	67,17	17.131
26	Paciran	302	65,95	1.992	271	66,23	1.796	64	67,42	431	637	66,53	4.220
27	Brondong	911	65,98	6.011	305	66,33	2.023	-	-	-	1.216	66,16	8.034
	Jumlah	69.406	**70,61**	496.980	**64.231**	**71,42**	465.091	19.752	**72,28**	142.371	**153.389**	**71,33**	**1.094.124**

Sumber data : Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Tan. Pangan,Hortikultura dan Perkebunan

Tabel 1.61. Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Januari - April			Mei - Agustus			September - Desember			Januari - Desember		
		Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)
1	Sukorame	977	94,98	9.280	456	97,45	4.444	309	98,92	3.057	1.742	97,12	16.780
2	Bluluk	2.068	93,98	19.435	337	97,75	3.294	350	98,75	3.456	2.755	96,83	26.185
3	Ngimbang	1.927	101,99	19.653	1.545	109,71	16.950	1.080	113,91	12.302	4.552	108,54	48.906
4	Sambeng	3.464	97,95	33.930	895	103,11	9.228	1.318	107,91	14.223	5.677	102,99	57.381
5	Mantup	1.526	105,78	16.142	4.414	113,32	50.019	422	116,32	4.909	6.362	111,81	71.070
6	Kembangbahu	202	77,89	1.573	199	82,32	1.638	355	83,32	2.958	756	81,18	6.169
7	Sugio	1.147	95,89	10.999	1.473	99,98	14.727	440	101,98	4.487	3.060	99,28	30.213
8	Kedungpring	202	96,88	1.957	984	99,94	9.834	1.321	102,45	13.534	2.507	99,76	25.325
9	Modo	2.063	93,89	19.370	1.544	104,88	16.193	185	107,88	1.996	3.792	102,22	37.559
10	Babat	23	77,88	179	59	81,82	483	686	83,82	5.750	768	81,17	6.412
11	Pucuk	-	-	-	-	-	-	307	94,98	2.916	307	94,98	2.916
12	Sukodadi	-	-	-	3	90,12	27	1.500	94,82	14.223	1.503	92,47	14.250
13	Lamongan	49	74,89	367	34	80,98	275	121	82,98	1.004	204	79,62	1.646
14	Tikung	185	89,98	1.665	254	96,80	2.459	-	-	-	439	93,39	4.123
15	Sarirejo	163	76,98	1.255	-	-	-	155	80,34	1.245	318	78,66	2.500
16	Deket	-	-	-	-	-	-	12	74,91	90	12	74,91	90
17	Glagah	3	68,86	21	1	72,88	7	-	-	-	4	70,87	28
18	Karangbinangun	156	69,85	1.090	2	72,92	15	26	75,34	196	184	71,39	1.300
19	Turi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalitengah	11	70,97	78	84	74,95	630	166	76,95	1.277	261	74,29	1.985
21	Karanggeneng	123	74,92	922	118	76,73	905	155	79,73	1.236	396	77,13	3.063
22	Sekaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Maduran	14	74,75	105	27	76,93	208	331	80,93	2.679	372	77,54	2.991
24	Laren	540	93,88	5.070	487	97,75	4.760	171	100,87	1.725	1.198	97,50	11.555
25	Solokuro	3.905	110,96	43.330	3.413	117,89	40.236	-	-	-	7.318	114,43	83.566
26	Paciran	4.333	96,97	42.017	2.320	101,77	23.611	-	-	-	6.653	99,37	65.628
27	Brondong	3.038	110,89	33.688	798	111,98	8.936	-	-	-	3.836	111,44	42.624
	Jumlah	26.119	88,68	262.123	19.447	93,73	208.880	9.410	92,86	93.262	54.976	91,55	564.265

Sumber data : Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Tan. Pangan,Hortikultura dan Perkebunan

Tabel 1.62. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Januari - April			Mei - Agustus			September - Desember			**Januari - Desember**		
		Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)
1	Sukorame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bluluk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ngimbang	3	19,98	6	-		-	-	-	-	3	19,98	6
4	Sambeng	235	18,77	441	633	18,97	1.201	150	19,11	287	1.018	18,95	1.929
5	Mantup	1.975	19,79	3.909	396	20,11	796	60	19,97	120	2.431	19,96	4.825
6	Kembangbahu	583	19,46	1.135	195	19,61	382	504	19,21	968	1.282	19,43	2.485
7	Sugio	5	19,98	10	17	20,45	35	73	20,15	147	95	20,19	192
8	Kedungpring	-	-	-	413	20,30	838	928	20,39	1.892	1.341	20,35	2.731
9	Modo	-	-	-	286	18,77	537	159	18,96	301	445	18,87	838
10	Babat	-	-	-	3	17,87	5	-	-	-	3	17,87	5
11	Pucuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sukodadi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
13	Lamongan	67	18,67	125	8	18,85	15	26	19,01	49	101	18,84	190
14	Tikung	1.003	20,45	2.051	613	20,59	1.262	-	-	-	1.616	20,52	3.313
15	Sarirejo	127	18,88	240	2.254	19,75	4.452	60	19,23	115	2.441	19,29	4.807
16	Deket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Glagah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Karangbinangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Turi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalitengah	-	-	-	-	-	-	25	16,55	41	25	16,55	41
21	Karanggeneng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Sekaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Maduran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Laren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Solokuro	175	15,65	274	200	16,77	335	-	-	-	375	16,21	609
26	Paciran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Brondong	-	-	-	250	15,11	378	-	-	-	250	15,11	378
	Jumlah	**4.173**	**19,07**	**8.190**	5.268	**18,93**	10.237	1.985	**19,18**	3.922	**11.426**	**18,72**	**22.349**

Sumber data : Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Tan. Pangan,Hortikultura dan Perkebunan

Tabel 1.63. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kacang Tanah Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Januari - April			Mei - Agustus			September - Desember			Januari - Desember		
		Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)
1	Sukorame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bluluk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ngimbang	10	13,00	13	7	13,52	9	-	-	-	17	13,21	22
4	Sambeng	12	12,60	15	5	13,45	7	13	-	-	30	7,28	22
5	Mantup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kembangbahu	6	13,51	8	-	13,51	-	7	13,51	9	13	13,51	18
7	Sugio	-	-	-	-	-	-	17	-	-	17	4,12	7
8	Kedungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Modo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Babat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pucuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sukodadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lamongan	16	12,15	19	3	12,15	4	-	-	-	19	12,15	23
14	Tikung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sarirejo	42	14,30	60	35	14,28	50	-	-	-	77	14,29	110
16	Deket	5	12,31	6	-	-	-	-	-		5	12,31	6
17	Glagah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Karangbinangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Turi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalitengah	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
21	Karanggeneng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Sekaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Maduran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Laren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Solokuro	175	14,73	258	825	14,09	1.162	35	14,38	50	1.035	14,21	1.471
26	Paciran	550	11,20	616	1.770	12,26	2.170	-	-	-	2.320	12,01	2.786
27	Brondong	138	12,11	167	1.544	12,00	1.853	-	12,00	-	1.682	12,01	2.020
	Jumlah	955	12,18	1.163	4.190	12,54	5.255	72	8,30	60	5.217	12,43	6.484

Sumber data : Sub Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Tabel 1.64. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kacang Hijau Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Januari - April			Mei - Agustus			September - Desember			Januari - Desember		
		Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)
1	Sukorame	10	11,61	12	-	11,64	-	30	-	-	40	2,90	12
2	Bluluk	25	12,00	30	25	-	-	12	-	-	62	4,84	30
3	Ngimbang	65	14,12	92	-	14,12	-	-	-	-	65	14,12	92
4	Sambeng	5	13,53	7	2	-	-	-	-	-	7	9,66	7
5	Mantup	-	13,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kembangbahu	-	13,51	-	-	13,51	-	598	13,51	808	598	13,51	808
7	Sugio	-	-	-	-	13,65	-	2.261	-	-	2.261	-	-
8	Kedungpring	-	12,44	-	-	-	-	336	-	-	336	-	-
9	Modo	-	11,00	-	12	11,00	13	26	-	-	38	3,47	13
10	Babat	-	12,09	-	50	-	-	475	12,09	574	525	10,94	574
11	Pucuk	-	-	-	-	-	-	517	12,41	642	517	12,41	642
12	Sukodadi	-	12,24	-	-	-	-	40	12,24	49	40	12,24	49
13	Lamongan	14	13,01	18	4	12,54	5	-	-	-	18	12,91	23
14	Tikung	81	13,12	106	289	13,98	404	-	13,12	-	370	13,79	510
15	Sarirejo	42	14,30	60	435	14,30	622	-	14,40	-	477	14,30	682
16	Deket	-	-	-	-	-	-	540	-	-	540	-	-
17	Glagah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Karangbinangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Turi	39	13,12	51	-	-	-	-	-	-	39	13,12	51
20	Kalitengah	2	10,52	2	-	11,45	-	22	10,52	23	24	10,52	25
21	Karanggeneng	-	12,31	-	-	-	-	-	12,31	-	-	-	-
22	Sekaran	-	-	-	-	-	-	1.180	14,57	1.719	1.180	14,57	1.719
23	Maduran	-	-	-	-	-	-	760	14,82	1.126	760	14,82	1.126
24	Laren	-	-	-	31	12,79	40	76	12,27	93	107	12,42	133
25	Solokuro	-	14,15	-	-	13,59	-	-	-	-	-	-	-
26	Paciran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Brondong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	283	13,36	378	848	12,78	1.084	6.873	7,33	5.035	8.004	8,12	6.497

Sumber data : Sub Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Tabel 1.65. Produksi dan Produktivitas Tanaman Ubi Kayu Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Januari - April			Mei - Agustus			September - Desember			Januari - Desember		
		Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)
1	Sukorame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bluluk	-	-	-	-	-	-	50	125,25	626	50	125,25	626
3	Ngimbang	-	-	-	36	130,12	468	-	-	-	36	130,12	468
4	Sambeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mantup	-	-	-	5	130,34	65	-	-	-	5	130,34	65
6	Kembangbahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sugio	-	-	-	200	152,60	3.052	-	-	-	200	152,60	3.052
8	Kedungpring	-	-	-	-	-	-	13	128,31	167	13	128,31	167
9	Modo	-	-	-	16	131,91	211	-	-	-	16	131,91	211
10	Babat	-	-	-	-	-	-	2	120,00	24	2	120,00	24
11	Pucuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sukodadi	-	-	-	11	131,56	145	-	-	-	11	131,56	145
13	Lamongan	-	-	-	19	130,61	248	-	-	-	19	130,61	248
14	Tikung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sarirejo	-	-	-	5	131,20	66	-	-	-	5	131,20	66
16	Deket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Glagah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Karangbinangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Turi	-	-	-	-	-	-	6	130,45	78	6	130,45	78
20	Kalitengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,34	-
21	Karanggeneng	-	-	-	-	-	-	1	126,00	13	1	126,00	13
22	Sekaran	-	-	-	3	125,00	38	-	-	-	3	125,00	38
23	Maduran	-	-	-	-	-	-	35	131,48	460	35	131,48	460
24	Laren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Solokuro	-	-	-	180	120,10	2.162	75	121,00	908	255	120,36	3.069
26	Paciran	-	-	-	941	160,61	15.113	-	-	-	941	160,61	15.113
27	Brondong	-	-	-	800	150,00	12.000	238	150,00	3.570	1.038	150,00	15.570
	Jumlah	-	-	-	2.216	151,48	33.568	420	139,18	5.846	2.636	149,52	39.413

Sumber data : Sub Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Tabel 1.66. Produksi dan Produktivitas Tanaman Ubi Jalar Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Januari - April			Mei - Agustus			September - Desember			Januari - Desember		
		Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)	Panen (ha)	Rerata (ku/ha)	Produksi (ton)
1	Sukorame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bluluk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ngimbang	5	116,12	58	3	116,12	35	-	-	-	8	116,12	93
4	Sambeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mantup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kembangbahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sugio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kedungpring	-	-	-	25	114,22	286	-	-	-	25	114,22	286
9	Modo	-	-	-	20	117,00	234	-	-	-	20	-	234
10	Babat	-	-	-	1	113,35	11	-	-	-	1	113,35	11
11	Pucuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sukodadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lamongan	3	110,00	33	-	-	-	-	-	-	3	110,00	33
14	Tikung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sarirejo	4	115,45	46	2	115,50	23	-	-	-	6	115,47	69
16	Deket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Glagah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Karangbinangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Turi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalitengah	16	117,30	188	-	-	-	-	-	-	16	117,30	188
21	Karanggeneng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Sekaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Maduran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Laren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Solokuro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Paciran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Brondong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	116,04	325	51	115,46	589	-	-	-	79	115,66	914

Sumber data : Sub Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Tabel 1.67. Produksi dan Produktivitas Tanaman Tebu Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)			Total Produksi (Kg)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	Tanam	Panen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sukorame	-	13,340	13,340	827,48	62.030	tebu batangan	-	20	
2	Bluluk	-	141,080	141,080	8.748,66	62.012		-	212	
3	Ngimbang	-	466,350	466,350	29.713,74	63.716		-	700	
4	Sambeng	-	**1.435,420**	1.435,420	88.995,64	62.000		-	2.153	
5	Mantup	-	**1.581,160**	1.581,160	98.131,72	62.063		-	2.372	
6	Kembangbahu	-	**828,530**	828,530	51.468,66	62.120		-	1.243	
7	Sugio	-	63,200	63,200	3.918,40	62.000		-	95	
8	Kedungpring	-	95,410	95,410	6.015,52	63.049		-	143	
9	Modo	-	30,120	30,120	1.867,84	62.013		-	45	
10	Babat	-	13,540	13,540	840,38	62.066		-	20	
11	Tikung	-	239,150	239,150	14.829,40	62.009		-	359	
12	Solokuro	-	16,390	16,390	1.016,28	62.006		-	25	
13	Paciran	-	28,600	28,600	1.772,20	61.965		-	43	
JUMLAH		-	4.952,29	4.952,290	308.145,920	62.223			7.428	

Tabel 1.68. Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau Jawa Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)			Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	Tanam	Panen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sukorame	-	410,00	410,00	383,35	935,00	rajangan	1.500,- s/d 1.600,-	1.640	
2	Bluluk	-	245,00	245,00	232,75	950,00	rajangan	Daun Basah	980	
3	Ngimbang	-	228,00	228,00	216,60	950,00	rajangan	17.000,- s/d 22.000,-	912	
4	Sambeng	-	297,50	297,50	282,63	950,00	rajangan	Krosok	1.190	
5	Mantup	-	136,00	136,00	129,20	950,00	rajangan	-	544	
6	Kedungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Modo	-	35,00	35,00	33,25	950,00	rajangan	-	140	
8	Babat	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		-	1.351,50	1.351,50	1.277,78	945,45			5.406	

Tabel 1.69. Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau Virginia Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)			Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	Tanam	Panen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sukorame	-	290,00	290,00	268,25	925,00	krosok	15,000,- S/D	1.160	
2	Bluluk	-	118,00	118,00	111,51	945,00	krosok	19,000,-	472	
3	Ngimbang	-	24,00	24,00	22,80	950,00	krosok	-	96	
4	Sambeng	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sugio	-	137,00	137,00	130,15	950,00	krosok	-	548	
6	Kedungpring	-	125,00	125,00	118,75	950,00	krosok	-	500	
7	Modo	-	1.448,00	1.448,00	1.375,60	950,00	krosok	-	5.792	
8	Babat	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		-	2.142,00	2.142,00	2.027,06	946,34			8.568	

Tabel 1.70. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kenaf Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)			Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	Tanam	Panen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laren	-	803,00	803,00	1.147,14	700,00	serat kering	6.000,00	1.606	
JUMLAH		-	803,00	803,00	1.147,14	700,00			1.606	

Tabel 1.71. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kapas Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)			Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	Tanam	Panen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sambeng	-	26,94	-	-	#DIV/0!	serat kapas	-	58	
2	Mantup	-	8,56	-	-	#DIV/0!	serat kapas	-	40	
3	Kembangbahu	-	-	-	-	#DIV/0!	serat kapas	-	-	
4	Sugio	-	-	-	-	#DIV/0!	serat kapas	-	-	
5	Kedungpring	-	-	-	-	#DIV/0!	serat kapas	-	-	
6	Solokuro	-	-	-	-	#DIV/0!	serat kapas	-	-	
JUMLAH		-	35,50	-	-	#DIV/0!			98	

Tabel 1.72. Produksi dan Produktivitas Tanaman Wijen Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)			Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	Tanam	Panen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pucuk	-	-	-	-	#DIV/0!	biji	-	-	
2	Sekaran	-	-	-	-	#DIV/0!	biji	-	-	
JUMLAH		-	-	-	-	#DIV/0!			-	

Tabel 1.73. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kelapa Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)					Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	TBM	TM	TT/TR	Total luas Areal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sukorame	-	1,50	17,00	0,61	19,11	4,25	250	kopra	0	96	
2	Bluluk	-	55,53	31,26	0,61	87,40	7,82	250	kopra	0	437	
3	Ngimbang	-	27,68	25,66	3,56	56,90	6,42	250	kopra	0	285	
4	Sambeng	-	38,79	39,67	13,88	92,34	9,92	250	kopra	0	462	
5	Mantup	-	8,08	25,10	0,82	34,00	6,28	250	kopra	0	170	
6	Kembangbahu	-	0,33	6,68	0,59	7,60	1,67	250	kopra	0	38	
7	Sugio	-	25,38	40,00	0,66	66,04	10,00	250	kopra	0	330	
8	Kedungpring	-	52,70	7,37	0,73	60,80	1,84	250	kopra	0	304	
9	Modo	-	50,16	-	-	50,16	-	#DIV/0!	kopra	0	251	
10	Babat	-	10,40	0,24	0,52	11,16	0,06	250	kopra	0	56	
11	Laren	-	2,00	9,71	0,69	12,40	2,43	250	kopra	0	62	
12	Solokuro	-	90,26	8,70	1,04	100,00	2,18	250	kopra	0	500	
13	Paciran	-	136,73	36,15	1,12	174,00	9,04	250	kopra	0	870	
14	Brondong	-	97,27	52,61	1,12	151,00	13,15	250	kopra	0	755	
JUMLAH		-	596,81	300,15	25,95	922,91	75,04	250			4.615	

Tabel 1.74. Produksi dan Produktivitas Tanaman Jambu Mente Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)					Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	TBM	TM	TT/TR	Total luas Areal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Solokuro	-	0,10	0,10	-	0,20	0,04	400	biji	0	1	
2	Paciran	-	-	35,00	-	35,00	14,50	414	biji	0	175	
3	Brondong	-	-	20,00	-	20,00	7,70	385	biji	0	100	
JUMLAH		-	0,10	55,10	-	55,20	22,24	404			276	

Tabel 1.75. Produksi dan Produktivitas Tanaman Siwalan Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)					Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	TBM	TM	TT/TR	Total luas Areal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mantup	-	-	2,00	-	2,00	0,03	15	gula	0	10	
2	Sugio	-	-	4,00	-	4,00	0,06	15	gula	0	20	
3	Solokuro	-	-	20,00	4,00	24,00	0,40	20	gula	0	120	
4	Paciran	-	-	90,00	6,00	96,00	2,80	31	gula	0	480	
5	Brondong	-	2,50	9,80	6,00	18,30	0,22	22	gula	0	92	
JUMLAH		-	2,50	125,80	16,00	144,30	3,51	28			722	

Tabel 1.76. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kemiri Sunan Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)					Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	TBM	TM	TT/TR	Total luas Areal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Solokuro	-	25,00	-	-	25,00	-	#DIV/0!	biji	0	125	
2	Paciran	-	52,50	-	-	52,50	-	#DIV/0!	biji	0	263	
JUMLAH		-	77,50	-	-	77,50	-	#DIV/0!			388	

Tabel 1.77. Produksi dan Produktivitas Tanaman Cabe Jamu Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)					Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	TBM	TM	TT/TR	Total luas Areal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ngimbang	-	-	0,07	0,61	0,68	0,06	857	buah kering	0	3	
2	Mantup	-	20,00	30,00	0,61	50,61	19,70	657	buah kering	0	253	
3	Sugio	-	-	35,00	3,56	38,56	25,28	722	buah kering	0	193	
JUMLAH		-	20,00	65,07	4,78	89,85	45,04	692			449	

Tabel 1.78. Produksi dan Produktivitas Tanaman Jarak Pagar Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)					Total Produksi (Ton)	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha/Th)	Wujud Produksi	Harga rata-rata setempat (Rp/Kg/ltr)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
		Potensi Areal	TBM	TM	TT/TR	Total luas Areal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Paciran	-	-	25,00	-	25,00	9,50	380	biji	0	125	
JUMLAH		-	-	25,00	-	25,00	9,50	380			125	

Tabel 1.79. Produksi dan Produktivitas Tanaman Tomat Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME													0
020	BLULUK													0
030	NGIMBANG													0
040	SAMBENG													0
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU													0
070	SUGIO													0
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO													0
100	BABAT							50						50
110	PUCUK													0
120	SUKODADI		7											7
130	LAMONGAN													0
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO				12									12
150	DEKET													0
160	GLAGAH			11	10									21
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI													0
190	KALITENGAH			50	1	35	15	20	10					131
200	KARANG GENENG													0
210	SEKARAN													0
220	MADURAN							80						80
230	LAREN													0
240	SOLOKURO		30	120	160	155	75	80	80	80	40	0	60	880
250	PACIRAN									30				30
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	0	37	181	183	190	90	230	90	110	40	0	60	1.211

Tabel 1.80. Produksi dan Produktivitas Tanaman Terung Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME													0
020	BLULUK													0
030	NGIMBANG													0
040	SAMBENG									12	100	135	200	447
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU													0
070	SUGIO													0
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO													0
100	BABAT							300			300			600
110	PUCUK													0
120	SUKODADI			35	25					50	34			144
130	LAMONGAN													0
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO				15									15
150	DEKET													0
160	GLAGAH													0
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI													0
190	KALITENGAH					30	30	25	15	10	10			120
200	KARANG GENENG													0
210	SEKARAN													0
220	MADURAN							250						250
230	LAREN													0
240	SOLOKURO	40	120	120	80	80	80	80	80	80	40	80	60	940
250	PACIRAN									60				60
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	40	120	155	120	110	110	655	95	212	484	215	260	2.576

Tabel 1.81. Produksi dan Produktivitas Tanaman Sawi Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME											0		0
020	BLULUK											0		0
030	NGIMBANG											0		0
040	SAMBENG					50		15		70		0		135
050	MANTUP											0		0
060	KAMBANGBAHU											0		0
070	SUGIO											0		0
080	KEDUNGPRING											0		0
090	MODO											0		0
100	BABAT										210	0		210
110	PUCUK											0		0
120	SUKODADI											0		0
130	LAMONGAN		290	150	145	140						0		725
140	TIKUNG											0		0
141	SARIREJO											0		0
150	DEKET		300									0		300
160	GLAGAH											0		0
170	KARANGBINANGUN											0		0
180	TURI											0		0
190	KALITENGAH		12		75	50	50	50		50		0		287
200	KARANG GENENG											0		0
210	SEKARAN											0		0
220	MADURAN											0		0
230	LAREN											0		0
240	SOLOKURO											0		0
250	PACIRAN											0		0
260	BRONDONG											0		0
	J U M L A H	0	602	150	220	240	50	65	0	120	210	0	0	1.657

Tabel 1.82. Produksi dan Produktivitas Tanaman Labu Siam Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME													0
020	BLULUK													0
030	NGIMBANG													0
040	SAMBENG													0
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU													0
070	SUGIO													0
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO													0
100	BABAT													0
110	PUCUK													0
120	SUKODADI			15						400	120			535
130	LAMONGAN													0
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO				45	37		50		60				192
150	DEKET													0
160	GLAGAH													0
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI													0
190	KALITENGAH													0
200	KARANG GENENG													0
210	SEKARAN													0
220	MADURAN													0
230	LAREN													0
240	SOLOKURO													0
250	PACIRAN													0
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	0	0	15	45	37	0	50	0	460	120	0	0	727

Tabel 1.83. Produksi dan Produktivitas Tanaman Ketimun Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME													0
020	BLULUK													0
030	NGIMBANG													0
040	SAMBENG							25						25
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU		150											150
070	SUGIO													0
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO													0
100	BABAT													0
110	PUCUK													0
120	SUKODADI		65							100	80			245
130	LAMONGAN			60	120	70	65							315
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO													0
150	DEKET													0
160	GLAGAH													0
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI													0
190	KALITENGAH											75		75
200	KARANG GENENG													0
210	SEKARAN													0
220	MADURAN													0
230	LAREN													0
240	SOLOKURO	50	90	100	100	135	120	100	80	80	40	60	60	1.015
250	PACIRAN													0
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	50	305	160	220	205	185	125	80	180	120	135	60	1.825

Tabel 1.84. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kangkung Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME													0
020	BLULUK													0
030	NGIMBANG													0
040	SAMBENG									25				25
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU													0
070	SUGIO													0
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO													0
100	BABAT													0
110	PUCUK													0
120	SUKODADI													0
130	LAMONGAN													0
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO													0
150	DEKET													0
160	GLAGAH													0
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI													0
190	KALITENGAH											25		25
200	KARANG GENENG													0
210	SEKARAN													0
220	MADURAN													0
230	LAREN													0
240	SOLOKURO													0
250	PACIRAN													0
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	50

Tabel 1.85. Produksi dan Produktivitas Tanaman Kacang Panjang Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME											0		0
020	BLULUK											0		0
030	NGIMBANG											0		0
040	SAMBENG									25		0		25
050	MANTUP											0		0
060	KAMBANGBAHU		140									0		140
070	SUGIO											0		0
080	KEDUNGPRING											0		0
090	MODO											0		0
100	BABAT							120			120	0		240
110	PUCUK											0		0
120	SUKODADI		6									0		6
130	LAMONGAN											0		0
140	TIKUNG		180									0		180
141	SARIREJO			12					50			0		62
150	DEKET		6	25								0		31
160	GLAGAH											0		0
170	KARANGBINANGUN											0		0
180	TURI											0		0
190	KALITENGAH					20						0		20
200	KARANG GENENG											0		0
210	SEKARAN											0		0
220	MADURAN											0		0
230	LAREN											0		0
240	SOLOKURO		40	60	40	10	40	40	40	40	40	0	75	425
250	PACIRAN				40							0		40
260	BRONDONG											0		0
	J U M L A H	0	372	97	80	30	40	160	90	65	160	0	75	1.169

Tabel 1.86. Produksi dan Produktivitas Tanaman Cabe Rawit Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME										189			189
020	BLULUK	1.221							420	840	1.750	711		4.942
030	NGIMBANG		11	20										31
040	SAMBENG					25			75		400	200	200	900
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU													0
070	SUGIO													0
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO													0
100	BABAT													0
110	PUCUK													0
120	SUKODADI			6	5	7								18
130	LAMONGAN				90	198	322	176	160	60				1.006
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO	3			24	16								43
150	DEKET		21	20					9		30			80
160	GLAGAH			10	9									19
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI		16	23	36	47	20	29	36	7			8	222
190	KALITENGAH	45	50	100	50	50	50	100	80	70	70	20	20	705
200	KARANG GENENG													0
210	SEKARAN			16	32	34	18	16	17	16	29	16		194
220	MADURAN							75						75
230	LAREN			263	306	261	306	241	187				27	1.591
240	SOLOKURO	195	300	340	540	826	800	800	780	550	550	360	59	6.100
250	PACIRAN								5.251	695	2.080			8.026
260	BRONDONG	114			460	1.188			6.129	3.142	2.380			13.413
	J U M L A H	1.578	398	798	1.552	2.652	1.516	1.437	13.144	5.380	7.478	1.307	314	37.554

Tabel 1.87. Produksi dan Produktivitas Tanaman Cabe Besar Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME									40		0		40
020	BLULUK		70	70	65	65	60					0		330
030	NGIMBANG		30	20								0		50
040	SAMBENG					50	30		37			0		117
050	MANTUP											0		0
060	KAMBANGBAHU											0		0
070	SUGIO											0		0
080	KEDUNGPRING											0		0
090	MODO											0		0
100	BABAT			600				140				0		740
110	PUCUK											0		0
120	SUKODADI			2	2							0		4
130	LAMONGAN											0		0
140	TIKUNG											0		0
141	SARIREJO											0		0
150	DEKET											0		0
160	GLAGAH			3	4							0		7
170	KARANGBINANGUN											0		0
180	TURI											0		0
190	KALITENGAH											0		0
200	KARANG GENENG											0		0
210	SEKARAN											0		0
220	MADURAN							75				0		75
230	LAREN											0	11	11
240	SOLOKURO											0		0
250	PACIRAN											0		0
260	BRONDONG											0		0
	J U M L A H	0	100	695	71	115	90	215	37	40	0	0	11	1.374

Tabel 1.88. Produksi dan Produktivitas Tanaman Bayam Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Luas panen dibongkar habis (Hektar)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME									50	100			150
020	BLULUK													0
030	NGIMBANG													0
040	SAMBENG													0
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU													0
070	SUGIO													0
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO													0
100	BABAT													0
110	PUCUK													0
120	SUKODADI													0
130	LAMONGAN													0
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO													0
150	DEKET													0
160	GLAGAH													0
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI													0
190	KALITENGAH													0
200	KARANG GENENG													0
210	SEKARAN													0
220	MADURAN													0
230	LAREN													0
240	SOLOKURO													0
250	PACIRAN													0
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	150

Tabel 1.89. Produksi dan Produktivitas Tanaman Bawang Merah Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME						2.160					0	0	2.160
020	BLULUK		600									0	0	600
030	NGIMBANG	420			50	108						0	200	778
040	SAMBENG					50				20	300	0		370
050	MANTUP											0		0
060	KAMBANGBAHU			90								0		90
070	SUGIO						112	125	310	160	150	0		857
080	KEDUNGPRING											0		0
090	MODO											0		0
100	BABAT											0		0
110	PUCUK											0		0
120	SUKODADI											0		0
130	LAMONGAN											0		0
140	TIKUNG											0		0
141	SARIREJO											0		0
150	DEKET											0		0
160	GLAGAH											0		0
170	KARANGBINANGUN											0		0
180	TURI											0		0
190	KALITENGAH											0		0
200	KARANG GENENG											0		0
210	SEKARAN											0		0
220	MADURAN											0		0
230	LAREN											0		0
240	SOLOKURO											0		0
250	PACIRAN											0		0
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	420	600	90	50	158	2.272	125	310	180	450	0	200	4.855

Tabel 1.90. Produksi dan Produktivitas Tanaman Blewa Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME						8.400						0	8.400
020	BLULUK						793			12.100			0	12.893
030	NGIMBANG												0	0
040	SAMBENG							40		75			0	115
050	MANTUP												0	0
060	KAMBANGBAHU												0	0
070	SUGIO												0	0
080	KEDUNGPRING												0	0
090	MODO												0	0
100	BABAT											8.700	0	8.700
110	PUCUK												0	0
120	SUKODADI												0	0
130	LAMONGAN												0	0
140	TIKUNG												0	0
141	SARIREJO												0	0
150	DEKET												0	0
160	GLAGAH												0	0
170	KARANGBINANGUN												0	0
180	TURI												0	0
190	KALITENGAH												0	0
200	KARANG GENENG										1.500		0	1.500
210	SEKARAN										462		0	462
220	MADURAN												0	0
230	LAREN												0	0
240	SOLOKURO						200		40				0	240
250	PACIRAN												0	0
260	BRONDONG												0	0
	J U M L A H	0	0	0	0	0	9.393	40	40	12.175	1.962	8.700	0	32.310

Tabel 1.91. Produksi dan Produktivitas Tanaman Melon Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME						11.000			165				11.165
020	BLULUK													0
030	NGIMBANG													0
040	SAMBENG													0
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU													0
070	SUGIO			30	20	10	25	45	55	65	40			290
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO							18						18
100	BABAT			200				80						280
110	PUCUK													0
120	SUKODADI													0
130	LAMONGAN													0
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO													0
150	DEKET													0
160	GLAGAH													0
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI													0
190	KALITENGAH													0
200	KARANG GENENG													0
210	SEKARAN										110			110
220	MADURAN													0
230	LAREN											360		360
240	SOLOKURO							65	35					100
250	PACIRAN													0
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	0	0	230	20	10	11.025	208	90	230	150	360	0	12.323

Tabel 1.92. Produksi dan Produktivitas Tanaman Semangka Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan

Kecamatan		Produksi [Habis + Belum Habis] (Kuintal)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
010	SUKORAME						180.000			1.000				181.000
020	BLULUK													0
030	NGIMBANG													0
040	SAMBENG							35		80	100			215
050	MANTUP													0
060	KAMBANGBAHU					60	60							120
070	SUGIO													0
080	KEDUNGPRING													0
090	MODO							198		5.040				5.238
100	BABAT			420				14.200				280		14.900
110	PUCUK													0
120	SUKODADI													0
130	LAMONGAN													0
140	TIKUNG													0
141	SARIREJO													0
150	DEKET													0
160	GLAGAH													0
170	KARANGBINANGUN													0
180	TURI													0
190	KALITENGAH													0
200	KARANG GENENG										5.000			5.000
210	SEKARAN										61.275			61.275
220	MADURAN													0
230	LAREN													0
240	SOLOKURO						300		80	80	45			505
250	PACIRAN													0
260	BRONDONG													0
	J U M L A H	0	0	420	0	60	180.360	14.433	80	6.200	66.420	280	0	268.253

1.9.15.3. SEKTOR PERIKANAN

Sektor perikanan merupakan sektor potensial di Kabupaten Lamongan. Sektor perikanan yang dihasilkan Kabupaten Lamongan dikelompokkan sebagai berikut : perikanan budidaya (Budidaya Tambak, Budidaya Sawah Tambak, Kolam, KJA) dan perikanan tangkap (laut dan perairan umum)

Sentra perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan berada di Kecamatan Kec. Glagah, Kec. Deket, Kec. Karangbinangun, Kec. Lamongan, Kec. Turi, Kec. Kalitengah, Kec. Karanggeneng, sedangkangkan sentra perikanan tangkap berada di Kecamatan Paciran dan Brondong.

Perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan berupa budidaya tambak, Budidaya Sawah Tambak, Kolam, Keramba Jaring Apung (KJA). Budidaya tambak di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2017 dengan produksi 3.906.156 kg, budidaya budidaya sawah tambak dengan produksi 46.559.263 kg, budidaya kolam dengan produksi sebesar 1.902.944 kg dan budidaya keramba jaring apung (KJA) dengan produksi 3.370 kg.

Peraian umum dengan potensi perikanan meliputi rawa sebanyak 1.098.108,30 kg, waduk sebanyak 1.114.128 kg, sungai sebanyak 1.023.164 kg sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 1.93. Potensi Perikanan Darat di Kabupaten Lamongan

Potensi Perikanan Darat	Luas (Ha)	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Juta)
A. Budidaya			
• Tambak	938,79	3.906.156,00	2.220.844.366,00
• Sawah tambak	19.519,57	46.559.263,00	3.155.217.325,00
• Kolam	54,13	1.902.944,00	2.751.825.101,00
• KJA	0,05	3.370,00	1.379.498.106,00
Sub Jumlah	**20.512,53**	**52.371.733,00**	**9.397.384.898,00**
B. Perairan Umum			
• Rawa	109,00	1.098.108,30	12.455.190.666,80
• Waduk	2.668,00	1.114.128,00	12.473.364.937,90
• Sungai	899,50	1.023.164,00	11.648.493.285,70
Sub Jumlah	**3.676,50**	**3.235.400,30**	**36.577.048.890,40**
Jumlah	**24.189,03**	**55.607.133,30**	**45.974.433.788,40**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan dihasilkan dari perairan umum dan laut. Produksi perikanan tangkap dari perairan umum Tahun 2017 sebesar 73.356,10 ton.

Perikanan tangkap yang dihasilkan Kabupaten Lamongan berasal dari beberapa PPI yang ada di kabupaten Lamongan. Dari PPI yang ada, produksi terbesar berasal dari PPI brondong sebesar 67.889,60 ton, PPI Weru sebesar 220,30 ton, PPI Kranji sebesar 2.833,90 ton, PPI Labuhan sebesar 1.775,40 ton, PPI Lohgung sebesar 636,90 ton.

Tabel 1.94.
Potensi Perikanan Laut di Kabupaten Lamongan

Potensi Budidaya	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (juta rp)
Lohgung	636,90	10.482.220,96
Labuhan	1.775,40	29.050.934,97
Brondong/Blimbing	67.889,60	1.119.280.006,80
Kranji	2.833,90	46.347.754,05
Weru	220,30	3.602.567,04
Jumlah	**73.356,10**	**1.208.763.483,82**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan



Jenis ikan yang dihasilkan dari perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan meliputi Manyung, Ikan sebelah, Selar, Kuwe, Layang, Tetengkek, Bawal Hitam, Golok Golok, Japuh, Tembang, Lemuru, Lemadang, Beloso/Buntut Kerbo, Biji Nagka, Teri, Gerot Gerot, Kapas-Kapas, Peperek, Lencam, Kakap Merah/Bambangan, Kuniran, Kurisi, Swanggi/Mata Besar, Gulamah/Tigawaja, Tongkol Krai, Kembung, Banyar, Tenggiri, Kerapu Lumpur, Beronang Lingkis, Alu-Alu/Manggilala/Pucul, Kerong-Kerong, layur, Cucut Lanyam, Pari Kembang, Udang Putih/Jerbung, Rajungan, Cumi-Cumi, Ikan Lainnya.

Sedangkan jenis ikan yang dihasilkan perikanan budidaya meliputi Bandeng, Nila, Mas, Tawes, lele, Patin, Gabus, Gurami, Mujaer, Kerapu, Ikan Lain, Udang Vaname, Udang Windu, Udang Lain. Kepiting, Rumput Laut.

Tabel 1.95
Rekapitulasi Produksi Budidaya Ikan Kab. Lamongan Tahun 2017

Jenis	Total Produksi (Ton)
Bandeng	18.287,14
Nila	10.152,03
Mas	1.466,33
Tawes	2.578,27
lele	2.272,54
Patin	33,02
Gabus	82,20
Gurami	2,08
Mujaer	590,93
Kerapu	646,06
Ikan Lain	222,01

Jenis	Total Produksi (Ton)
Udang Vaname	14.880,66
Udang Windu	1,06
Udang Lain	88,28
Kepeting	-
Rumput Laut	-
Jumlah	**51.302,61**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lamongan

Tabel 1.96.
Rekapitulasi Produksi Ikan dari Perairan Laut
Kab. Lamongan Tahun 2017

Jenis Ikan	Produksi (Ton)
Manyung	1.130,50
Ikan sebelah	736,80
Selar	240,10
Kuwe	1.222,30
Layang	2.282,90
Tetenngkek	23,60
bawal Hitam	48,60
Golok Golok	22,80
Japuh	-
Tembang	2.695,80
Lemuru	206,10
Lemadang	272,60
Beloso/Buntur Kerbo	1.251,20
Biji Nangka	4.073,40
Teri	425,70
Gerot-Gerot	879,30
Kapas-Kapas	4.845,40
Peperek	2.201,50
Lencam	657,60
Kakap Merah/Bambangan	655,30
Juniran	7.965,50
Kurisi	10.597,40
Swanggi/Mata Besar	13.392,10
Gulamah/Tigawaja	595,70
Tongkol Krai	1.253,50
Kembung	213,00
Banyar	52,50
Tenggiri	269,20
Kerapu Lumpur	1.212,40
beronang Lingkis	558,60
Alu-Alu/Manggilala/Pucul	870,40
Kerong-Kerong	653,90
Layur	442,00

Jenis Ikan	Produksi (Ton)
cucut Lanyam	680,70
pari Kembang	1.021,50
Udang Putih/Jerbung	1.648,70
Rajungan	975,20
Cumi-Cumi	3.151,00
Ikan Lainnya	3.717,30
Jumlah	73.142,10

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Jenis perahu yang dipergunakan untuk menangkap ikan di perairan laut berupa perahu motor sebanyak 519 perahu, kapal motor besar sebayak 231 kapal, kapal motor sedang sebanyak 716 kapal, kapal motor kecil sebanyak 1.797 kapal

Selain kegiatan penangkapan dan budidaya di Kabupaten Lamongan juga dilakukan kegiatan pengolahan hasil diantaranya pemindangan, pengeringan, pendinginan, pembuatan petis, kerupuk, pengasapan, tepung ikan, cold storage, bakso, otak otak, presto. Selain perikanan tangkap dan budidaya, di Kabupten Lamongan juga menghasilkan garam rakyat dengan total produksi pada Tahun 2015 sebesar 38.804 ton.

Tabel 1.97. Jumlah Perahu/Kapal di Kab. Lamongan Th. 2017

No	PPI	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor			Jumlah
			Besar	Sedang	Kecil	
1	Lohgung	-	20	-	224	244
2	Labuhan	-	26	-	354	380
3	Brondong	-	372	394	143	909
4	Kranji	519	54	22	406	1001
5	Weru	-	22	-	788	810
	Jumlah	**519**	**494**	**416**	**1.915**	**3.344**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Tabel 1.98.
Kegiatan Pengolahan Hasil Laut di Kab. Lamongan Th. 2017

No	Jenis Industri	Banyaknya Industri	
		Tenaga Kerja <20	Tenaga Kerja >20
1	Pemindangan	126,00	-
2	Pengeringan	182,00	-
3	Terasi	82,00	-
4	Pendinginan	261,00	-
5	Petis	44,00	-
6	Kerupuk	114,00	-
7	Pengasapan	278,00	-
8	Tepung Ikan	22,00	-
9	Cold Storage	-	7,00
10	Bakso Ikan/nugget/abon	12,00	-

No	Jenis Industri	Banyaknya Industri	
		Tenaga Kerja <20	Tenaga Kerja >20
11	Otak-Otak	12,00	-
12	Presto	7,00	-
13	Lain-lain	15,00	-
	Jumlah	**1.155,00**	**7,00**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

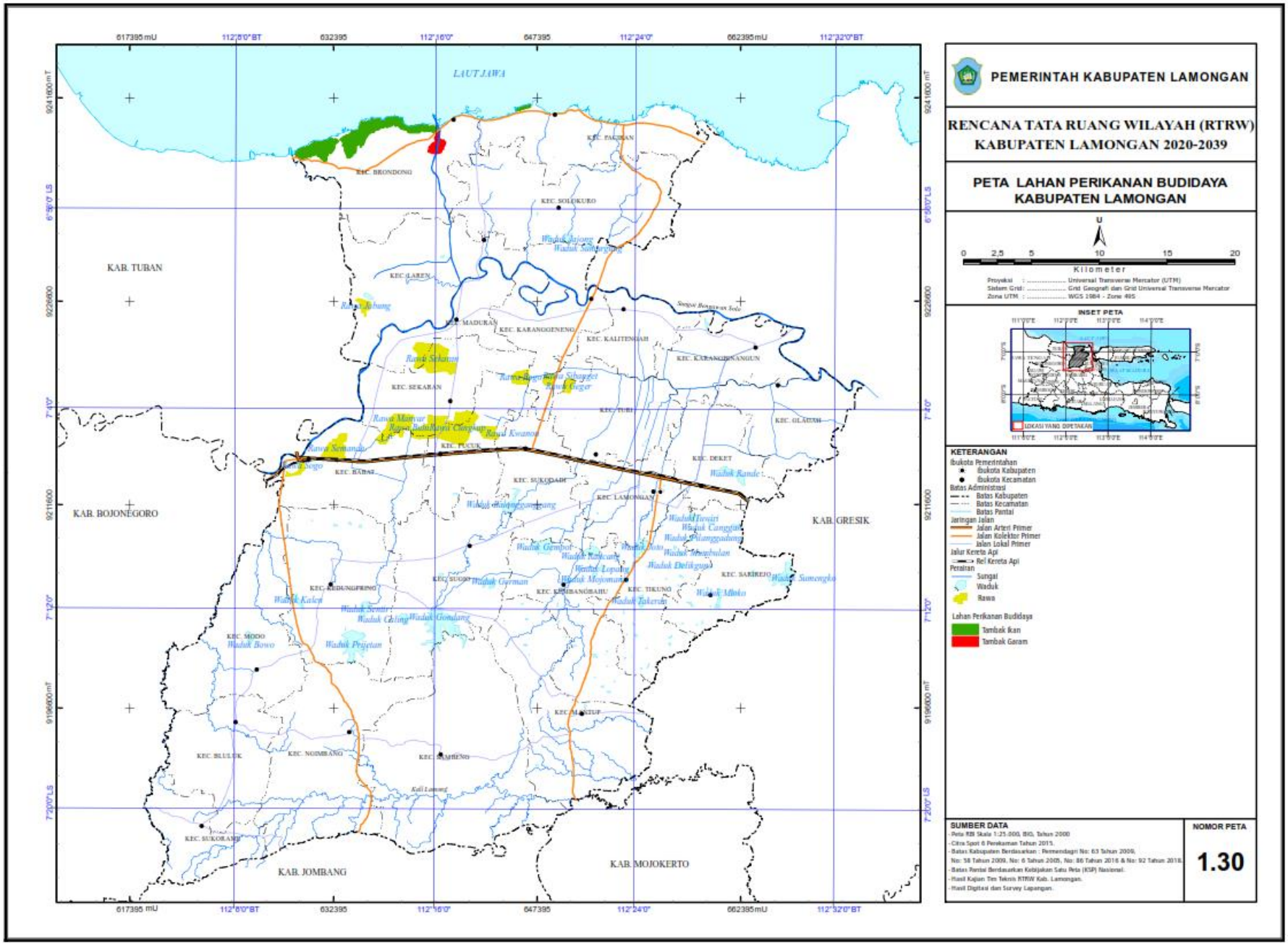
Tabel 1.99. Produksi Garam Rakyat di Kab. Lamongan

No	Rincian	2011		2012		2013	
		Terget	realisasi	Terget	realisasi	Terget	realisasi
1	Jumlah Kecamatan	1	1	1	2	2	2
2	Jumlah Kelompok	17	19	20	27	30	54
3	Jumlah Petambak	-	180	-	363	390	390
4	Jumlah BLM (Rp.000)	-	900.000,00	-	1.100.000,00	962.500,00	962.500,00
5	Luas Lahan Produksi	150	180	300	348,1	350	350,2
6	Produksi Gram (Ton)	12.600	14.800	20.300	29.949	6.349	10.930

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

No	Rincian	2014		2015		2016	
		Terget	realisasi	Terget	realisasi	Terget	realisasi
1	Jumlah Kecamatan	2	2	2	2	1	1
2	Jumlah Kelompok	13	39	24	24	22	22
3	Jumlah Petambak	390	350	226	226	280	280
4	Jumlah BLM (Rp.000)	677.500,00	677.500,00	677,50	677,50	1.709,80	1.709,80
5	Luas Lahan Produksi	350,2	310,9	213,4	213,4	215	215
6	Produksi Gram (Ton)	30.000	32.553	32.000	38.804	20.000	6.321

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA LAHAN PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Lahan Perikanan Budidaya
Tambak Ikan
Tambak Garam
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Hasil Digitasi dan Survey Lapangan.
NOMOR PETA
1.30
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. SUGIO
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. SLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKORAME
KEC. MANTUP
KEC. SEKARAN
KEC. TUBI
KEC. GLAGAH
KEC. DEKET
KEC. TUCUK
KEC. KEDUNGPRING
KEC. LAMONGAN
KEC. SUKODADI
KEC. KABAT
Waduk Ajong
Waduk Sidorejo
Waduk Bowo
Waduk Prijetan
Waduk Gondang
Waduk Kalen
Waduk German
Waduk Mojomanis
Waduk Takeran
Waduk Ploso
Waduk Ulo-Ulo
Waduk Sumengko
Waduk Delikgugu
Waduk Cangkir
Waduk Gembol
Waduk Lopuko
Waduk Kedungbulan
Waduk Randegan
Waduk Kedungsumber
Waduk Kedungsono
Waduk Kedungsoko
Waduk Kedungsoro
Waduk Kedungsoro
Waduk Kedungsoro

1.9.15.4. SEKTOR PETERNAKAN

Peternakan di Kabupaten Lamongan juga cukup potensial dikembangkan. Beradasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, populasi ternak di Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Sapi Potong dengan jumlah populasi 101.891 ekor, Sapi Perah dengan jumlah populasi 23 ekor, Kerbau dengan jumlah populasi 374 ekor, Kuda dengan jumlah populasi 68 ekor, Kambing dengan jumlah populasi 100.184 ekor, Domba dengan populasi 80.100 ekor, Ayam Buras dengan populasi 1.989.343 ekor, Ayam ras dengan populasi 46.200.629,0 Itik dengan populasi 206.183 ekor, itik manila 51.045 ekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.100. Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kab. Lamongan

No	Kecamatan	Populasi Ternak Besar dan kecil					
		Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1	Sukorame	-	5.290,0	78,0	-	4.221,0	2.034,0
2	Bluluk	-	5.891,0	36,0	-	1.783,0	2.029,0
3	Ngimbang	-	7.655,0	29,0	-	6.310,0	2.694,0
4	Sambeng	-	8.603,0	-	-	3.590,0	2.670,0
5	Mantup	-	7.635,0	-	-	5.758,0	1.845,0
6	kembangbahu	1,0	8.172,0	-	-	6.202,0	2.571,0
7	Sugio	-	4.915,0	-	-	1.707,0	2.823,0
8	Kedungpring	-	5.205,0	-	-	1.677,0	2.320,0
9	Modo	-	9.063,0	29,0	-	4.120,0	2.436,0
10	Babat	3,0	3.457,0	-	47,0	7.894,0	3.306,0
11	Pucuk	-	913,0	-	-	7.778,0	8.674,0
12	Sukodadi	2,0	1.933,0	-	-	3.696,0	3.139,0
13	Lamongan	6,0	497,0	-	-	1.663,0	2.248,0
14	Tikung	-	5.827,0	-	-	3.134,0	1.356,0
15	Sarirejo	-	1.424,0	-	-	3.705,0	2.549,0
16	Deket	-	192,0	50,0	-	2.516,0	1.978,0
17	Glagah	-	24,0	18,0	-	561,0	880,0
18	Karangbinangun	-	459,0	52,0	-	1.312,0	965,0
19	Turi	-	532,0	25,0	-	3.924,0	1.812,0
20	Kalitengah	-	1.176,0	27,0	-	2.204,0	1.836,0
21	Karanggeneng	-	1.287,0	-	-	2.504,0	1.623,0
22	Sekaran	-	879,0	-	-	3.185,0	5.073,0
23	Maduran	-	760,0	-	-	3.985,0	5.554,0
24	Laren	-	2.347,0	25,0	-	4.329,0	4.779,0
25	Selokuro	-	6.867,0	5,0	3,0	3.823,0	3.908,0
26	Paciran	11,0	5.531,0	-	18,0	4.219,0	4.235,0
27	Brondong	-	5.357,0	-	-	4.384,0	4.763,0
	Jumlah	**23,0**	**101.891,0**	**374,0**	**68,0**	**100.184,0**	**80.100,0**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 1.101. Populasi Ternak Unggas di Kab. Lamongan

No	Kecamatan	Populasi Ternak Unggas			
		Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	Itik Manila
1	Sukorame	27.266,0	1.336.916,0	4.120,0	686,0
2	Bluluk	29.775,0	1.782.555,0	877,0	481,0
3	Ngimbang	88.714,0	4.389.542,0	12.598,0	2.524,0
4	Sambeng	34.254,0	1.960.811,0	3.893,0	1.223,0
5	Mantup	34.063,0	3.203.029,0	3.511,0	671,0
6	kembangbahu	65.911,0	4.456.387,0	2.240,0	903,0
7	Sugio	165.334,0	6.294.648,0	7.061,0	2.541,0
8	Kedungpring	175.847,0	4.349.435,0	13.609,0	2.165,0
9	Modo	77.487,0	4.111.018,0	5.936,0	5.925,0
10	Babat	94.320,0	412.357,0	3.755,0	2.961,0
11	Pucuk	160.439,0	423.357,0	28.006,0	1.030,0
12	Sukodadi	65.824,0	913.560,0	2.510,0	597,0
13	Lamongan	70.229,0	-	1.997,0	1.381,0
14	Tikung	58.746,0	-	1.799,0	432,0
15	Sarirejo	10.938,0	557.048,0	1.080,0	1.311,0
16	Deket	84.973,0	-	1.502,0	516,0
17	Glagah	12.261,0	-	1.030,0	792,0
18	Karangbinangun	35.311,0	490.203,0	570,0	391,0
19	Turi	77.370,0	-	34.075,0	4.544,0
20	Kalitengah	43.492,0	-	10.016,0	3.919,0
21	Karanggeneng	80.340,0	-	3.296,0	454,0
22	Sekaran	184.063,0	-	7.718,0	924,0
23	Maduran	153.157,0	-	11.336,0	844,0
24	Laren	28.720,0	490.203,0	9.784,0	2.588,0
25	Selokuro	33.445,0	3.721.084,0	13.920,0	3.304,0
26	Paciran	61.510,0	5.147.128,0	2.801,0	2.872,0
27	Brondong	35.554,0	2.161.348,0	17.143,0	5.066,0
	Jumlah	**1.989.343,0**	**46.200.629,0**	**206.183,0**	**51.045,0**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

1.9.15.5. SEKTOR KEHUTANAN

Produksi sektor kehutanan yang dihasilkan Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.102. Produksi Sektor Kehutanan di Kab. Lamongan

No	Kecamatan	Desa	Klas Hutan	Luas (Ha)
1	**LAMONGAN**	-	-	-
2	**D E K E T**	-	-	-
3	**SARIREJO**	-	-	-

No	Kecamatan	Desa	Klas Hutan	Luas (Ha)
4	**TIKUNG**	-	-	-
5	**T U R I**	-	-	-
6	**P U C U K**	-	-	-
7	**SUKORAME**	5 DESA	Produksi	1.199,5
			HL	-
			LDTI	7,3
			TK	346,8
			TPR	-
			TBKTBJ	-
			TBP	0,8
				1.554,4
8	**MADURAN**	-	-	-
9	**SOLOKURO**	7 DESA	Produksi	2.825,5
			HL	-
			LDTI	29,2
			TK	393,9
			TPR	-
			TKTBJ	10,8
			TBP	-
				3.259,4
10	**KEMBANGBAHU**	-	-	-
11	**SEKARAN**	-	-	-
12	**KARANGGENENG**	-	-	-
13	**SUGIO**	5 DESA	Produksi	1.164,6
			HL	225,3

No	Kecamatan	Desa	Klas Hutan	Luas (Ha)
			LDTI	0,7
			TK	255,8
			TPR	-
			TBKTBJ	-
			TBP	27,9
				1.674,3
14	**SAMBENG**	21 DESA	Produksi	9.892,7
			HL	1,6
			LDTI	76,4
			TK	495,2
			TPR	31,9
			ALUR	46,6
			TBKTBJ	-
			TBP	46,2
				10.590,6
15	**BLULUK**	5 DESA	Produksi	1.762,3
			HL	-
			LDTI	41,8
			TK	559,2
			TPR	-
			ALUR	41,6
			TKTBJ	21,3

No	Kecamatan	Desa	Klas Hutan	Luas (Ha)
			TBP	15,9
				2.442,1
16	**BRONDONG**	5 DESA	Produksi	2.116,1
			HL	-
			LDTI	99,4
			TK	514,3
			TPR	-
			TKTBJ	-
			TBP	-
				2.729,8
17	**KARANGBINANGUN**	-	-	-
18	**GLAGAH**	-	-	-
19	**KALITENGAH**	-	-	-
20	**SUKODADI**	-	-	-
21	**KEDUNG PRING**	2 DESA	Produksi	13.303,3
			HL	-
			LDTI	21,9
			TK	261,9
			TPR	-
			TKTBJ	-
			TBP	2,5
				13.589,6

No	Kecamatan	Desa	Klas Hutan	Luas (Ha)
22	**LAREN**	5 DESA	Produksi	1.528,9
			HL	-
			LDTI	101,0
			TK	245,1
			TPR	-
			TKTBJ	-
			TBP	-
				1.875,0
23	**MANTUP**	8 DESA	Produksi	2.435,9
			HL	-
			LDTI	14,5
			TK	87,0
			TPR	-
			ALUR	40,1
			TKTBJ	-
			TBP	5,9
				2.583,4
24	**PACIRAN**	2 DESA	Produksi	207,0
			HL	-
			LDTI	0,9
			TK	35,2
			TPR	-

No	Kecamatan	Desa	Klas Hutan	Luas (Ha)
			TKTBJ	4,3
			TBP	-
				247,4
25	**NGIMBANG**	13 DESA	Produksi	2.954,2
			HL	22,6
			LDTI	44,6
			TK	867,0
			TPR	-
			ALUR	47,6
			TBKTBJ	10,3
			TKTBJ	-
			TBP	8,0
				3.954,3
26	**BABAT**	-	-	-
27	**MODO**	4 DESA	Produksi	1.011,2
			HL	3,4
			LDTI	8,9
			TK	190,5
			TPR	-
			TKTBJ	-
			TBP	3,0
				1.217,0

Sumber : Database SDH 5 KPH Mojokerto, Tuban, Jombang Hsl Update dari RPKH Klas Perusahaan (KP) Jati dan Kelas Perusahaan (KP) Kayu KPH Mojokerto

1.9.15.6. SEKTOR PARIWISATA

Kabupaten Lamongan memiliki obyek-obyek wisata yang cukup potensial seperti wisata alam maupun budaya. Masalah kepariwisataan yang dihadapi saat ini adalah belum memadainya sarana dan prasarana penunjang obyek wisata karena terbatasnya anggaran. Hal ini merupakan hambatan dalam hal pengembangan obyek wisata yang ada. Selain itu perlu adanya pembinaan terhadap masyarakat sekitar obyek wisata untuk sadar wisata disamping penyebarluasan informasi pasar produk-produk wisata ke daerah lain.

Di dalam pengembangan sektor kepariwisataan, obyek wisata merupakan komponen penting sebagai sarana daya tarik pengunjung. Ditinjau dari karakteristik dan potensi obyek-obyek wisatanya, pola pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lamongan dapat dikelompokkan ke dalam

a. daya tarik wisata alam;

b. daya tarik wisata budaya; dan

c. daya tarik wisata buatan.

Daya tarik wisata alam meliputi:

a. Sumber Air Panas Brumbun di Kecamatan Paciran;

b. Pantai Klayar di Kecamatan Paciran;

c. Pantai Kutang di Kecamatan Brondong;

d. Wisata Akar Langit Trinil di Kecamatan Brondong;

e. Wisata Gunung Suru di Kecamatan Brondong;

f. Wisata Gunung Pegat di Kecamatan Babat;

g. Wisata Puncak Wangi di Kecamatan Babat;

h. Istana Gunung Mas 27 di Kecamatan Mantup;

Daya tarik wisata budaya meliputi:

a. Makam Sunan Drajad di Kecamatan Paciran;

b. Makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran;

c. Makam Joko Tingkir di Kecamatan Maduran;

d. Makam Nyai Ratu Andongsari di Kecamatan Sambeng;

e. Makam Dewi Sekardadu di Kecamatan Sugio; dan

f. Desa Wisata Budaya Balun di Kecamatan Turi;

g. Candi Pataan di Kecamatan Sambeng;

h. Makan Mbah Lamong;

i. Makam Ronggo Mbah Amin dan

j. Masjid Namira di Kecamatan Tikung.

Daya tarik wisata buatan, meliputi:

a. Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran;

b. Wisata Gua Maharani dan Zoo di Kecamatan Paciran;

c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

d. Monumen Van Der Wijk di Kecamatan Brondong;

e. Bendungan Babat di Kecamatan Sekaran;

f. Taman Wisata Besur Agro Edukasi di Kecamatan Sekaran;

g. Stadion Surajaya di Kecamatan Deket;

h. Alun Alun Lamongan di Kecamatan Lamongan;

i. Waduk Gondang di Kecamatan Sugio;

j. Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring;

k. Wisata Wego di Kecamatan Sugio.

l. Sentra Industri Sendang Agung.

Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Sumber Air Panas Brumbun di Kecamatan Paciran;



Sumber air panas ini terletak di Dusun Tepanas, Desa Kranji, Kecamatan Paciran. Sumber air panas ini menjadi salah satu objek wisata yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Air ini menurut cerita pernah berubah warna dan rasa padahal biasanya dimanfaatkan penduduk untuk minum, mandi dan mencuci. Berawal dari kondisi tersebut, Sunan Drajat menolong warga dengan menancapkan tongkatnya di tanah kapur di sekitar sendang tersebut. Dari ujung tongkat tersebut keluar air tawar yang bersih dan berlimpah dan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit.

2. Pantai Klayar di Kecamatan Paciran;



Pantai Klayar merupakan pantai yang berada di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pantai ini masih perawan belum banyak diketahui pesona keindahannya. Pantai ini memiliki pasir putih dengan laut lepas dan batu karang. Pantai Klayar ini dapat menjadi salah satu objek wisata alam yang dapat dikembangkan di Kabupaten Lamongan

3. Pantai Kutang di Kecamatan Brondong;



Pantai kutang merupakan pantai yang berlokasi di pesisir utara Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Labuhan Kecamatan Brondong. Pantai ini lebih dikenal dibandingkan Pantai Klayar karena sudah dikelola dan terdapat beberapa fasilitas. Hutan mangrove yang berada di sekitar Pantai

Kutang dengan jembatan kayu yang cukup memberikan kesan tersendiri terhadap pantai ini.

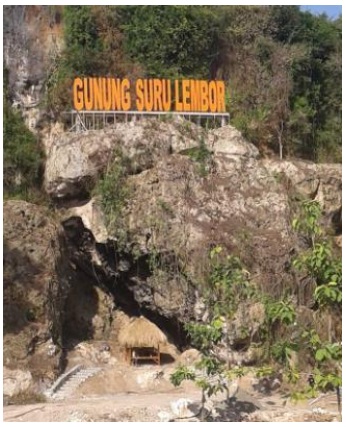
4. Akar Langit Trinil di Kecamatan Brondong;





Wisata akar langit ini terletak Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong. Wisata Akar Langit ini adalah objek wisata yang berada di kawasan hutan di Kabupaten Lamongan yang berada di KPH Tuban. Pohon dengan akar yang melintir memberikan kesan angker dan magis. Jika anda penggemar film Hari potter tentu tak asing lagi dengan pohon magis Whomping Willow. Nach di Kecamatan Brondong terdapat pohon yang cukup unik dan magic dan terkenal dengan nama akar langit

5. Wisata Gunung Suru di Kecamatan Brondong;



Wisata Gunung Suru Desa Lembor Kecamatan Brondong merupakan wisata kekinian yang digagas oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa dan dikelola oleh desa. Wisata kekinian ini diberi nama Wisata Gunung Suru. Diberi nama Suru Lembor sebab pegunungan kapur tersebut sering ditumbuhi tanaman suru (semacam kaktus yang berbentuk seperti centong nasi). Masyarakat sekitar menyebutnya tanaman entong-entongan. Sementara nama Lembor diambil dari nama desa tersebut. Objek wisata kekinian ini menawarkan spot-spot foto antara lain pintu langit, dream star, dan studio alam. Selain itu Gunung Suru Lembor bisa dijadikan sebagai tempat perkemahan, out bound, pra wedding dan bahkan panjat tebing. Wisata kekinian ini diresmikan oleh Bupati Lamongan H. Fadeli, SH. MM pada Tanggal 25 Juli Tahun 2018

6. Gunung Pegat di Kecamatan Babat



Gunung Pegat merupakan pegunungan kapur yang ada di Kecamatan Babat. Objek wisata Gunung Pegat memiliki mitos yang diyakini sebagian orang sampai saat ini. Namun Gunung Pegat memberikan warna terhadap objek wsiata yang ada di Kabupaten Lamongan

7. Wisata Puncak Wangi di Kecamatan Babat



Objek Wisata Puncak Wangi Kecamatan Babat merupakan objek wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Lamongan. Objek wisata ini terkenal dengan pesona batuan kapur yang unik dan indah. Namun objek wisata ini belum mendapatkan sentuhan dan dikelola oleh Pemerintah.

8. Istana Gunung Mas 27 di Kecamatan Mantup;



Objek wisata Istana Gunung Mas 27 terletak di Desa Tugu Kecamatan Mantup. Tempat wisata ini dulunya adalah tambang batu kapur kemudian disulap menjadi lokasi objek wisata kekinian dengan menghadirkan desain-desain futuristik rumah kayu ala kejawen dibalut nuansa cina tersaji di tempat wisata Gunung Mas Lamongan, dengan penyajian tulisan yang cukup sensasional. Lokasi objek wisata ini menjadi lokasi yang unik untuk spot spot foto.

Daya tarik wisata budaya di Kabupaten Lamongan, meliputi:

1. Makam Sunan Drajad di Kecamatan Paciran;



Objek wisata Makam Sunan Drajad termasuk salah satu wisata budaya di Kabupaten Lamongan. Wisata budaya adalah objek atau momen yang diyakini oleh masyarakat memberi kan makna tersendiri bagi masyarakat. Acara ritual ziarah ke Makam Sunan Drajad sangat berhubungan erat dengan keberadaan ziarah Wali Songo sehingga keberadan Makam Sunan Drajad tidak bisa lepas dari rantai ziarah Wali Songo ini. Makam Sunan Drajad terletak di Desa Drajad Kecamatan Paciran mencakup lahan seluas ± 5 Ha. Saat ini keberadaan Makam Sunan Drajad dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan LPM setempat.

2. Makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran;



Objek wisata Makam Sendang Duwur terletak di Desa Sendang Duwur Kecamatan Paciran. Area makam berada di lingkungan perumahan penduduk dengan jalan desa yang hanya bisa dilalui oleh satu jalur untuk mobil dan dua jalur untuk sepeda motor. Lokasi objek letaknya berada di

ujung jalan turunan dan jalan tikungan ke arah timur. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rata-rata adalah pekerja tambang kapur, buruh kasar serta pengrajin, karena daerah tersebut merupakan daerah pegunungan kapur, digunakan untuk lahan penambangan kapur.

Pada saat tertentu banyak sekali pengunjung dan peziarah yang datang, terutama pada hari-hari besar keagamaan. Pada setiap bulannya tidak kurang dari 1.000 peziarah mengunjungi obyek wisata ini. Untuk mengunjungi objek wisata Makam Sendang Duwur pengunjung dan peziarah tidak dipungut biaya sepeserpun, hanya terdapat kotak sumbangan sukarela yang terdapat di depan pintu menuju makam utama.

Mengutip laman web lamongankab.go.id, Sunan Sendang Duwur memiliki nama asli Raden Nur Rahmad. Ia hidup semasa dengan Sunan Drajat. Sunan Sendang Duwur wafat pada 1535 masehi, sedangkan Sunan Drajat wafat pada 1522 masehi. Makam Sunan Sendang Duwur ini berada di Desa Sendang Duwur, Paciran, Lamongan, Jawa Timur

3. Makam Syeh Maulana Ishak



Syekh Maulana Ishaq menggeser lokasi dakwahnya ke Pac iran, tepatnya di Desa Kemantren. Ia mendiami sebuah goa yang terletak di Tanjung Pakis, sebuah perbukitan kapur yang menghadap langsung ke laut Jawa. Di sekitar goa tersebut, terdapat beberapa situs peninggalan Syekh Maulana Ishaq, seperti Sumur Sepaku, Sumur Sekencong, dan Watu Tumpang

4. Makam Joko Tingkir di Kecamatan Maduran;



Terletak di Kecamatan Maduran. Potensi wisata yang ada saat ini adalah makam kuno yang diyakini sebagai makam Joko Tingkir.

5. Makam Nyai Ratu Andongsari di Kecamatan Ngimbang;



Terletak di Kecamatan Ngimbang. Potensi wisata yang ada saat ini adalah makam kuno yang diyakini sebagai makam Nyai Putri Andongsari yang merupakan ibunda Patih Gajahmada.

6. Makam Dewi Sekardadu di Kecamatan Sugio

Lokasi makam Dewi Sekardadu masih belum pasti, banyak cerita tentang lokasi terakhir dari makam Dewi Sekardadu. Ada cerita di Kabupaten Lamongan, ada cerita makam Dewi Sekardadu di Kabupaten Sidoarjo.

7. Desa Wisata Budaya Balun di Kecamatan Turi;



Desa Balun adalah salah satu desa tua yang ada di kabupaten Lamongan yang masih memelihara budaya-budaya terdahulunya. Di samping itu keanekaragaman agama semakin memperkaya budaya Desa Balun dan yang menjadi ciri khas adalah interaksi sosial di antara warganya yang plural tentu, agama (Islam, Kristen, Hindu). Sejak masuknya Hindu dan Kristen tahun 1967 dan Islam sebagai agama asli

Balun merupakan sebuah desa yang masih memegang erat nilai-nilai sejarahnya, kata Balun besar terhadap terbentuknya desa Balun sejak tahun 1600-an. Mbah Alun yang dikenal sebagai Sunan Tawang Alun I atau Mbah Sin Arih konon adalah Raja Blambangan bernama Bedande Sakte Bhreau Arih yang bergelar Raja Tawang Alun I yang lahir di Lumajang tahun 1574. Dia merupakan anak dari Minak Lumpat yang menurut buku Babat Sembar adalah keturunan Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya). Mbah Alun belajar mengaji di bawah asuhan Sunan Giri IV (Sunan Prapen). Selesai mengaji beliau kembali ke tempat asalnya untuk menyiarkan agama Islam sebelum diangkat menjadi Raja Blambangan. Selama pemerintahannya (tahun 1633-1639) Blambangan mendapatkan serangan dari Mataram dan Belanda hingga kedaton Blambangan hancur. Saat itu Sunan tawang Alun melarikan diri ke arah barat menuju Brondong untuk mencari perlindungan dari anaknya yaitu Ki Lanang Dhangiran (Sunan Brondong), lalu diberi tempat di desa kuno bernama Candipari (kini menjadi desa Balun) untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Disinilah Sunan Tawang Alun I mulai mengajar mengaji dan menyiarkan ajaran Islam sampai wafat Tahun 1654 berusia 80 tahun sebagai seorang Waliyullah. Sebab menyembunyikan identitasnya sebagai Raja, maka beliau dikenal sebagai seorang ulama dengan sebutan Raden Alun atau Sin Arih. Sunan Tawang Alun I sebagai ulama hasil gemblengan Pesantren Giri. Kedaton ini menguasai ilmu Laduni, Fiqh, Tafsir, Syariat dan Tasawuf. Sehingga dalam dirinya dikenal tegas, kesatria, cerdas, Alim, Arif, persuatif, dan yang terkenal adalah sifat toleransinya terhadap orang lain, terhadap budaya lokal dan toleransinya terhadap agama lain. Desa tempat makam Mbah Alun ini kemudian disebut Desa Mbah Alun dan kini Menjadi Desa Balun, Kecamatan Turi.

8. Candi Pataan di Kecamatan Sambeng;



Bangunan Situs Pataan di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan baru ditemukan. Penggalian dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur pada Tahun 2018. bangunan Situs Pataan memiliki panjang 24 meter, lebar 16 meter. Serta bangunan menunjukkan Wihara tidak simetris dan lebih panjang dan menghadap ke barat, juga ditemukan runtuhan batu berbentuk bulat. Indikasi membentuk stupa Wihara arti lainnya juga candi (bangunan suci).

9. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan

Tahun 1543M, dimulailah Pemerintahan Islam yang direstui Sunan Giri III, oleh Sultan Trenggono ditunjuklah R.Abu Amin untuk memimpin Karanggan Kali Segunting, yang wilayahnya diapit kali Lamong dan kali Solo. Wilayah utara kali Solo menjadi wilayah Tuban, perdikan Drajat, Sidayu, sedang wilayah selatan kali Lamong masih menjadi wilayah Japanan dan Jombang. Tahun 1556 M R.Abu Amin wafat digantikan oleh R.Hadi

10. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan



Terbentuknya Lamongan sebagai kabupaten tidak lepas dari santri kesayangan Sunan Giri II bernama Hadi, pemuda asal Desa Cancing, Ngimbang, Lamongan. Karena kecakapan ilmu agama yang dimiliki, Hadi ini lantas dipercaya untuk menyebarkan ajaran Islam ke barat Kasunanan Giri. Keberhasilan dan cara dakwah Rangga Hadi dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Lamongan, membuatnya dicintai masyarakat. Kemudian warga menye matkan julukan Mbah Lamong lantaran sifat mengasuh dan melayani masyarakat yang benar-benar membekas.

Dalam perkembangannya, wilayah Lamongan menjadi incaran penjajah Portugis yang ingin menguasai pantai utara dan menjajah pulau Jawa. Kemudian Sunan Giri memandang wilayah Lamongan sebagai lokasi strategis namun rawan karena dilalui oleh Bengawan Solo yang mampu dilayari kapal pedagang maupun kapal perang penjajah.

Dengan pertimbangan matang, akhirnya Sunan Giri IV (Sunan Prapen) mengumumkan wilayah kerangga Lamongan ditingkatkan menjadi kadipaten pada tanggal 26 Mei 1569, Rangga Hadi lantas diwisuda menjadi adipati Lamongan pertama yang diberi gelar Tumenggung Surajaya. Rangga Hadi sendiri wafat tahun 1607.

Pusara Rangga Hadi berada di sebelah utara Musala Mbah Lamong yang berada di tengah permukiman penduduk. Terdapat jalan penghubung antara musala dengan makam Rangga Hadi yang berada di bangunan terkunci. Sementara itu di kompleks luarnya juga terdapat sejumlah makam tanpa tulisan di nisan.

Lokasi musala berada di pojok persimpangan antara Gang Kali Lamong dan Gang Kali Wungu, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Lamongan, Jawa Timur. Menurut penuturan salah satu warga sekitar, Kayah, makam Mbah Lamong hanya akan dibuka di waktu-waktu tertentu, termasuk saat hari jadi Kota Lamongan yang tanggal penetapannya mengacu pada wisuda Rangga Hadi.

11. Masjid Namira di Kecamatan Tikung.



Masjid Namira adalah sebuah masjid yang terletak di desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Masjid ini mengusung gaya arsitektur yang mewah dari bangunan masjid di Timur Tengah. Masjid Namira memiliki daya tarik tersendiri daripada masjid-masjid yang ada di Indonesia karena keberadaan interior masjid yang terkesan mewah dan terang, serta keberadaan kiswah Ka'bah yang berada di mihrab imam. Nama masjid Namira terinspirasi dari sebuah masjid di Arab Saudi yang terletak di antara Al-Haram dengan Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Namanya Masjid Namirah. Nama tersebut diambil karena banyak tetangga dari pendiri masjid Namira yang ingin berangkat menunaikan ibadah Haji namun belum pernah tertunaikan. Masjid ini didirikan oleh sepasang pengusaha emas asal Lamongan. Pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2013. Pada awalnya, masjid ini tidak terlalu besar. Hanya menempati lahan sekitar 0,9 hektar dengan luas bangunan yang mencapai 1.100 meter dan hanya dapat menampung 500 jamaah saja. Akan tetapi, lama kelamaan pengunjung masjid ini semakin banyak dan akhirnya banyak jamaah masjid yang tidak mendapat tampungan tempat parkir. Oleh sebab itu, masjid ini lantas di renovasi hingga akhirnya selesai pada tanggal 2 Oktober 2016. Luas masjid setelah renovasi mencapai 2.750 meter dengan menempati lahan sekitar 2,7 hektar dan dapat menampung 2.500 jamaah.

Selain daya tarik wisata alam dan budaya yang tak kalah menariknya adalah Daya tarik wisata buatan, meliputi:

1. Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran;



Wisata Bahari Lamongan atau disingkat WBL adalah tempat wisata bahari yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat wisata ini dibuka sejak 14 November 2004. Wisata Bahari Lamongan dikelola oleh PT Bumi Lamongan Sejati, sebuah perusahaan patung an Pemkab Lamongan dengan PT Bunga Wangsa Sejati. Beberapa wahana unggulan tempat wisata ini antara lain Istana Bawah Laut, Gua Insectarium, Space Shuttle, Anjungan Wali Songo, Texas City, Paus Dangdut, Tembak Ikan, Rumah Kaca, serta Istana Bajak Laut.

2. Wisata Gua Maharani dan Zoo di Kecamatan Paciran;



Saat ini Wisata Bahari Lamongan diperluas hingga mencakup Gua Maharani. Di mana Gua Maharani sekarang tidak hanya menjadi tempat wisata Goa saja tetapi telah dikembangkan sebagai tempat rekreasi kebun binatang yang telah memiliki banyak koleksi binatang. Sehingga Goa Maharani sekarang telah berubah nama menjadi Maharani Zoo & Goa. Di dalam Gua Maharani terdapat keindahan stalaktit dan stalakmit. Juga terdapat beberapa jenis batu-batuan

3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong



Kabupaten Lamongan memiliki 5 (lima) Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu PPI Brondong, PPI Weru Komplek, PPI Kranji, PPI Lohgung dan PPI Labuhan. Selain PPI juga terdapat PPN. Jenis kegiatan PPN yaitu mela kukan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan ukuran kapal sekurang-kurangnya 30 GT (Direktorat Jendral Perikanan 1995). PPI dan PPN ini sekaligus dapat berfungsi sebagai onjek wisata buatan

4. Monumen Van Der Wijk di Kecamatan Brondong;



Monumen Van Der Wijck ini erupakan salah satu objek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Lamongan. Sejarah berdirinya monumen tersebut berawal pada tanggal 28 oktober 1936 di Pantura Laut Jawa, tepatnya pada perairan utara Brondong terjadi musibah tenggelamnya kapal Va n Der Vijck. Kapal mewah yang dibuat di galangan kapal Feijenoord Roterdam Belanda pada tahun 1921 merupakan kapal milik perusahaan Koninklijke Paketvoart Maatschappij Amsterdam. Keberadaan monumen ini dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai salah satu simbol rasa terima kasih pemerintah atas jasa nelayan Brondong yang dapat menyelematkan para penumpang dan awak kapal. Kondisi monumen tersebut terus dipugar dan dipertahankan hingga saat ini.

5. **Bendungan Babat di Kecamatan Sekaran;**



Bendungan Babat terletak di Kendal, Sekaran, Kabupaten Lamongan. Bendungan ini bisa menjadi salah satu alternatif objek wisata di Kabupaten Lamongan. Disekitar bendung ini juga dibangun taman

6. **Taman Wisata Besur Agro Edukasi di Kecamatan Sekaran;**



Wisata ini mengusung konsep agrowisata yang menyuguhkan keindahan lahan pertanian yang dikombinasikan dengan keindahan perkebunan bunga yang terletak di Desa Besur, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Berbeda dengan lahan pertanian biasanya, wisata ini menggabungkan lahan pertanian dengan berbagai tanaman bunga dengan pengaturan tata letak yang unik dan menarik membuat beta wisatawan yang berkunjung

7. **Stadion Surajaya di Kecamatan Deket;**



Stadion Surajaya berada di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Fungsi staion adalah sebagai tempat kegiatan olah raga, namun fungsi lainnya yang dapat dikembangkan adalah fungsi wisata

8. **Alun Alun Lamongan di Kecamatan Lamongan;**



Alun Alun Lamongan saat ini sudah dironavasi dan menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Lamongan. Alun Alun Lamongan s emakin dipercantik dengan adanya lampu lampu, taman bacaan, air mancur maupun bianglala

9. **Waduk Gondang di Kecamatan Sugio;**



Waduk Gondang dibangun dengan membendung Sungai Gondang yang mempunyai daerah aliran sungai seluas 68,10 Km2. Secara administrasi Waduk Gondang mencakup dua kecamatan. Sebagian besar masuk wilayah Kecamatan Sugio meliputi Desa Gondang Lor, Desa Deketag ung, Desa Kalitengah, Desa Daliwangun dan sebagian kecil Desa Sidorejo. Hanya sebagian kecil berada di Kecamatan Sambeng meliputi Desa Sekidang dan Wonorejo. Waduk Gondang dibangun pada Tahun 1976 dan beroperasi pada Tahun 1986. Waduk ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah terutama pada saat musim kemarau, selain itu waduk gondang juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan untuk pariwisata.

10. Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring;



Bendungan Prijetan dibangun sejak tahun 1910 – 1916, pada saat itu yang menjadi pelaksana pembangunannya adalah : Tuan Dligur, Tuan Birman, Tuan Deles dan Tuan Ireng. Waduk Prijetan terletak di Desa Giri k Kecamatan Ngimbang, Desa Tenggerejo dan Desa Mlati Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Waduk Prijetan dengan luas tampungan 231 Ha, dulunya mampu menampung air dengan volume + 12.000.000 m3. Namun sekarang hanya mampu menampung + 9.750.000 m3. Areal baku sawah yang dilayani seluas 4.513 Ha meliputi 33 desa. Adapun daerah yang diairi terdiri dari 3 Kecamatan yaitu : Kec Kedungpring, Kec. Sugio dan Kec. Modo. Waduk ini juga bisa dijadikan salah satu objek wisata di Kabupaten Lamongan

11. Wisata Wego di Kecamatan Sugio.



Dengan luas 23 hektar, Wego Lamongan menawarkan berbagai pengalaman seru bagi para wisatawan. Mulai dari foto denga n pesawat, berjalan di taman, bermain di waterpark, outbond hingga berkemah. Pengunjung juga bisa menaiki dan merasakan pesawat terbang, Boeing 737 dan Boeing 300 untuk bersaf foto bersama keluarga. Permainan yang ada seperti tempat bermain untuk anak, flying fox, kereta gantung, panjat tebing, kolam renang waterpark, sirkuit mini untuk motor trail mini dan ATV yang memiliki track 200 meter. Bagi pengunjung yang ingin berkeliling lewat jalur air, telah disiapkan perahu kano dan perahu bebek yang nantinya akan sampai di jembatan cinta.

12. Sentra Industri Sendang Agung.

Di kawasan sentra industri Desa Sendang Agung yang menjadi satu dengan Desa Sendang Duwur terdapat beberapa jenis industri unggulan, yaitu industri perhiasan emas Desa Sendang Agung dengan jumlah unit usaha pada saat ini mencapai 155 unit usaha yang mampu menyerap 412 orang tenaga kerja, batik dengan jumlah unit usaha sebanyak 40 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 50 orang, industri bordir dengan jumlah unit usaha sebanyak 55 unit usaha dengan tenaga kerja sebesar 110 orang tenaga kerja. Sedangkan sentra industri Desa Sendang Duwur terdapat industri perhiasan emas dengan 70 unit usaha menyerap 153 orang tenaga kerja, batik dengan 14 unit usaha menyerap 20 orang tenaga kerja dan industri bordir dengan 36 unit usaha yang menyerap 70 orang tenaga kerja.

Tabel 1.103. Kunjungan Wisata di Kab. Lamongan Tahun 2017

	OBYEK DAYA TARIK WISATA (ODTW)	JANUARI		PEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JUMLAH	
		WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS
KABUPATEN LAMONGAN															
1	WADUK GONDANG		16.214		4.965		3.983		6.044		5.063		5.159		*41.428*
2	MAKAM SUNAN DRAJAD & MUSEUM		77.040		77.150		76.794		79.473		107.629		31.962		*450.048*
3	GUA MAHARANI (MAZOOLA)		32.456		17.856	8	32.744	11	38.254	6	38.720		6.524	*25*	*166.554*
4	WISATA BAHARI LAMONGAN	3	62.537	5	33.656	16	56.236	16	60.504	20	93.154		15.341	*60*	*321.428*
5	MAKAM SENDANG DUWUR		7.860		7.412		7.112		7.691		7.816		7.956		*45.847*
6	BRUMBUN		2.146		1.824		2.032		2.922		2.752		2.464		*14.140*
7	TPI BRONDONG & MONUMEN VAN DER WIJCK		30.758		28.342		30.125		30.559		30.864		30.468		*181.116*
	JUMLAH	*3*	*229.011*	*5*	*171.205*	*24*	*209.026*	*27*	*225.447*	*26*	*285.998*	*0*	*99.874*	**85**	**1.220.561**

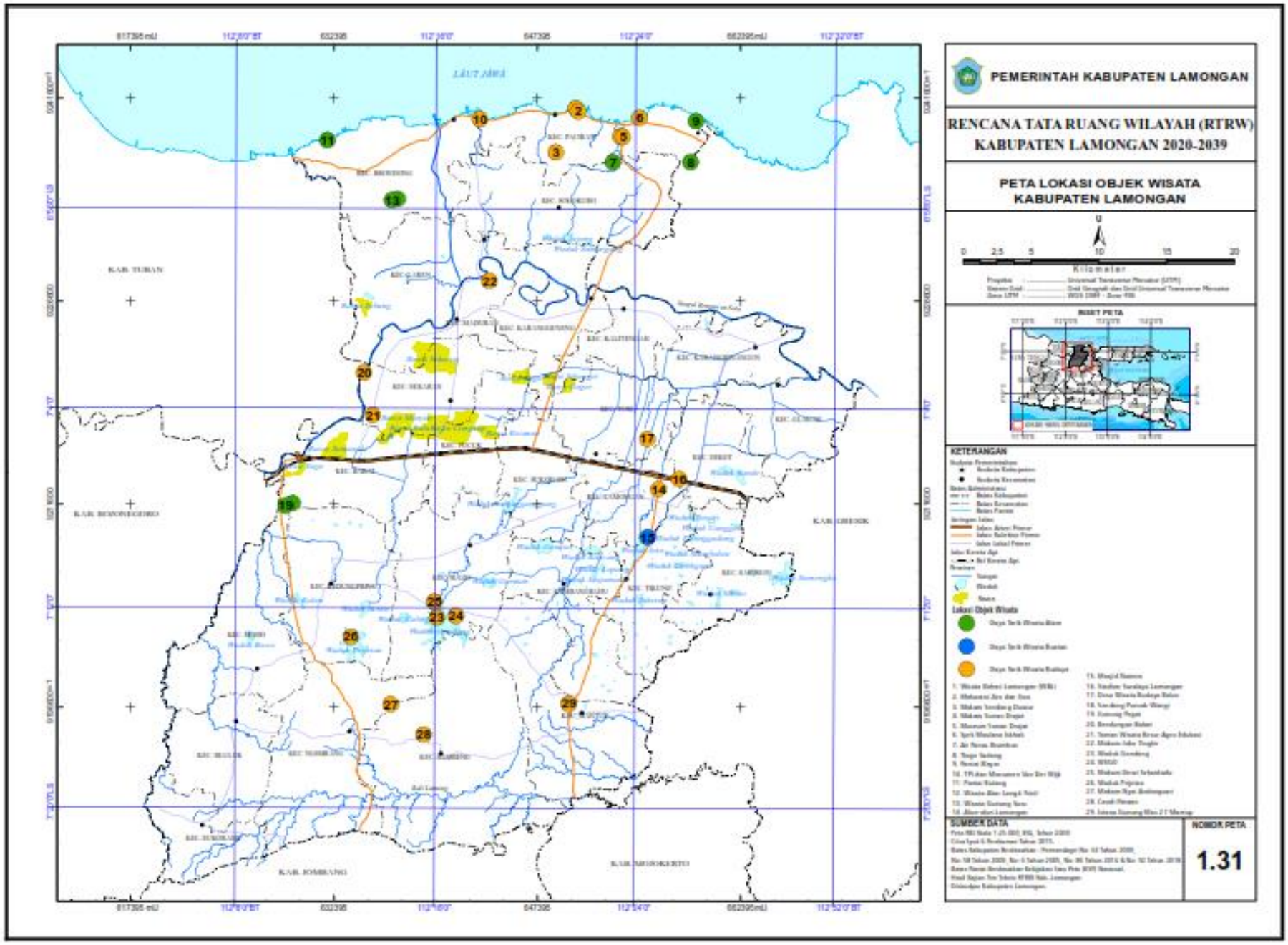
	OBYEK DAYA TARIK WISATA (ODTW)	JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		JUMLAH	
		WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS
KABUPATEN LAMONGAN															
1	WADUK GONDANG		16.751		4.278		5.804		4.710		4.443		3.476	*0*	*39.462*
2	MAKAM SUNAN DRAJAD & MUSEUM		77.720		78.962		57.501		95.476		78.541		85.316	*0*	*473.516*
3	GUA MAHARANI (MAZOOLA)		29.194	7	10.478	4	16.380	16	16.758	17	17.648	7	31.550	*51*	*122.008*
4	WISATA BAHARI LAMONGAN	1	66.900	18	21.650	12	28.784	13	29.288		29.303	3	85.223	*47*	*261.148*
5	MAKAM SENDANG DUWUR		7.990		7.954		7.710		7.425		7.177		7.814	*0*	*46.070*
6	BRUMBUN		2.165		2.491		2.180		2.432		2.185		2.788	*0*	*14.241*
7	TPI BRONDONG & MONUMEN VAN DER WIJCK		30.825		30.714		30.186		31.398		31.656		31.864	*0*	*186.643*
	JUMLAH	*1*	*231.545*	*25*	*156.527*	*16*	*148.545*	*29*	*187.487*	*17*	*170.953*	*10*	*248.031*	**98**	**1.143.088**

Tabel 1.104. Situs Situs yang ada di Kabupaten Lamongan

No	Nama Situs	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	prasasti Puncak Wangi	Puncakwangi	Babat
2	Situs Trepan	Trepan	Babat
3	Gedung Polsek Babat	Kel. Babat	Babat
4	Prasasti Bluluk	Bluluk	Bluluk
5	Prasasti Cangkring	Cangkring	Bluluk
6	Situs Prabu Mas	Bluluk	Bluluk
7	Situs Bluluk	Bluluk	Bluluk
8	Prasasti Sendangrejo	Sendangrejo	Brondong
9	Prasasti Wide	Sendangrejo	Brondong
10	Tuku Monumen Vanderwich	Kel. Brondong	Brondong
11	Makam Jamaludin	Deket Kulon	Deket
12	Prasasti Babatagung I	Babatagung	Deket
13	Prasasti Babatagung II	Babatagung	Deket
14	Situs Babatagung	Babatagung	Deket
15	Makam Mbah Boyo Pati	Medang	Glagah
16	Situs Prambon	Pucangro	Kalitengah
17	Situs Lukrejo		Kalitengah

No	Nama Situs	Desa/Kelurahan	Kecamatan
18	Makam Mbah Andong Sari	Pendowo Limo	Karangbinangun
19	Makam Mbah Rondo Barang	Pendowo Limo	Karangbinangun
20	Situs Barang	Pendowolimo	Karangbinangun
21	Situs Kuro	Kuro	Karangbinangun
22	Waduk Air	Prijetan	Kedungpring
23	Prsasti Yoni 1 Dumpiagung	Dumpiagung	Kembangbahu
24	Prsasti Yoni 2 Dumpiagung	Dumpiagung	Kembangbahu
25	Yoni Kumisik	Lawangan Agung	Kembangbahu
26	Makam Mbah Lamong	Kel. Tumenggungan	Lamongan
27	Makam Mbah Sabilan	Kel. Tumenggungan	Lamongan
28	Makam Laras-Liris	Kel. Tumenggungan	Lamongan
29	Makam Kinameng	Kel. Sidokumpul	Lamongan
30	Makam Andansari	Kel. Sukomulyo	Lamongan
31	Makam Damarjati	Kramat	Lamongan
32	Makam Pangeran Abu Amin	Kel. Sukomulyo	Lamongan
33	Prasasti Tumenggungan 1	Kel. Tumenggungan	Lamongan
34	Prasasti Tumenggungan 2	Kel. Tumenggungan	Lamongan
35	Prasasti Gentong Batu 1	Kel. Tumenggungan	Lamongan
36	Prasasti Gentong Batu 2	Kel. Tumenggungan	Lamongan
37	Prasasti Archa Ganesha 1	Sumberejo	Lamongan
38	Prasasti Archa Ganesha 1	Sumberejo	Lamongan
39	Prasasti Yoni 1	Kel. Sunan Giri	Lamongan
40	Prasasti Yoni 2	Kel. Sunan Giri	Lamongan
41	Prasasti Genta	Kel. Sunan Giri	Lamongan
42	Gedung Sabha Nirbawa	Kel. Tumenggungan	Lamongan
43	Gedung CTM Babat	Kel. Babat	Lamongan
44	Situs Slumpang	Sisir	Laren
45	Situs Kemanikan	Gelap	Laren
46	Situs Pringgoboyo	Pringoboyo	Maduran
47	Makam Pangeran Sido Margi	Mantup	Mantup
48	Prasasti Tugu	Tugu	Mantup
49	Prasasti Sukosari	Sukosari	Mantup
50	Prasasti Sumbergurit	Sumbergurit	Mantup
51	Prasasti Sukowati		Mantup
52	Prasasti Sumberdadi	Sumberdadi	Mantup
53	Situs Dumpi	Dumpiagung	Mantup
54	Situs Sumbergurit	Sumbergurit	Mantup
55	Makam Sentono Sedah	Pule	Modo
56	Prasasti Yoni Ngranjung	Kedungwaras	Modo
57	Prasasti Yoni Landyan	Jatipayak	Modo
58	Prasasti Bajul	Bedugul	Modo
59	Prasasti Sambangan I & II	Sambangrejo	Modo
60	Prasasti Sedah	Pule	Modo
61	Prasasti Mojorejo	Lebak	Modo
62	Prasasti Lerep	Kedunglerep	Modo
63	Situs Sentono Sedah	Pule	Modo
64	Situs Modo	Pule	Modo

No	Nama Situs	Desa/Kelurahan	Kecamatan
65	Makam Pangeran Agung Boyo	Ardirejo	Ngimbang
66	Makam Ki Terik	Tlemang	Ngimbang
67	Prasasti Sumber Gede	Sumbergede	Ngimbang
68	Prasasti Purwokerto	Purwokerto	Ngimbang
69	Prasasti Brumbun	Lemahbang	Ngimbang
70	Prasasti Curing Wotan	Slaharwotan	Ngimbang
71	Prasasti Lemahbang	Lemahbang	Ngimbang
72	Prasasti Drujugurit	Drujugurit	Ngimbang
73	Prasasti Sendangrejo	Sendangrejo	Ngimbang
74	Prasasti Gurit	Drujugurit	Ngimbang
75	Prasasti Jejel	Mendogo	Ngimbang
76	Prasasti Karangdinoyo	Girik	Ngimbang
77	Situs Ngimbang	Lamongrejo	Ngimbang
78	Makam Sendang Duwur	Sendang Duwur	Paciran
79	Makam Sunan Drajat (R. Qosim)	Drajat	Paciran
80	Prasasti Tembluruh	Banyuanget	Paciran
81	Situs Kemantren	Kemantren	Paciran
82	Situs Drajat	Drajat	Paciran
83	Situs Tepanas	Kranji	Paciran
84	Masjid Sendangduwur	Sendangduwur	Paciran
85	Prasasti Sumbersari	Sumbergurit	Sambeng
86	Prasasti Nogojatisari	Nogojatisari	Sambeng
87	Prasasti Pamotan	Pamotan	Sambeng
88	Prasasti Lawan	Kedungwangi	Sambeng
89	Prasasti Sumbersari	Sumbersari	Sambeng
90	Prasasti Pasarlegi	Pasarlegi	Sambeng
91	Prasasti Kelor	Kelor	Sambeng
92	Prasasti Garung	Banyuapit	Sambeng
93	Prasasti Wonokoyo	Wonokoyo	Sambeng
94	Prasasti Candisari	Candisari	Sambeng
95	Prasasti Gampeng	Gampeng	Sambeng
96	Prasasti Banuapit	Banyuapit	Sambeng
97	Prasasti Cane	Candisari	Sambeng
98	Situa Batu Putih	Selorejo	Sambeng
99	Situa Batu Putih	Garung	Sambeng
100	Situs Candisari	Candisari	Sambeng
101	Situs Sumbersari	Sumbersari	Sambeng
102	Situs Banyuapit	Garung	Sambeng
103	Situs Pata'an	Pata'an	Sambeng
104	Makam Mbah Alun	Pringgoboyo	Sekaran
105	Prasasti Dadapan		Solokuro
106	Makam Mbah Rondo Gondang	Gondang Lor	Sugio
107	Prasasti Gondang	Gondanglor	Sugio
108	Prasasti Galeng	Caling	Sugio
109	Makam Mbah Sinuwun (Syaifudin)	Balun	Turi
110	Prasasti Keben	Kebeb	Turi


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA LOKASI OBJEK WISATA
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
Lokasi Objek Wisata
SUMBER DATA
NOMOR PETA
1.31

1.9.15.7. SEKTOR PERTAMBANGAN

Industri pertambangan khususnya bahan galian mineral non logam dan batuan di kabupaten Lamongan cukup potensial untuk dikembangkan, terutama batugamping, lempung, dolomit.

Sebagian besar penambangan skala kecil yang telah beroperasi saat ini tidak mempunyai ijin resmi, sehingga sangat menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan juga tidak ada pemasukan bagi kas daerah.

Potensi bahan galian yang dapat diusahakan dalam bentuk penambangan skala kecil sebenarnya tersebar di seluruh Kabupaten Lamongan. Untuk penambangan batuan karbonat terutama terdapat di bagian utara Kabupaten Lamongan, untuk penambangan pasir sungai, meliputi wilayah yang berada disekitar aliran sungai Bengawan Solo, untuk penambangan pasir-lempung terutama di wilayah selatan.

Tabel 1.105. Potensi Pertambangan Mineral Non Logam

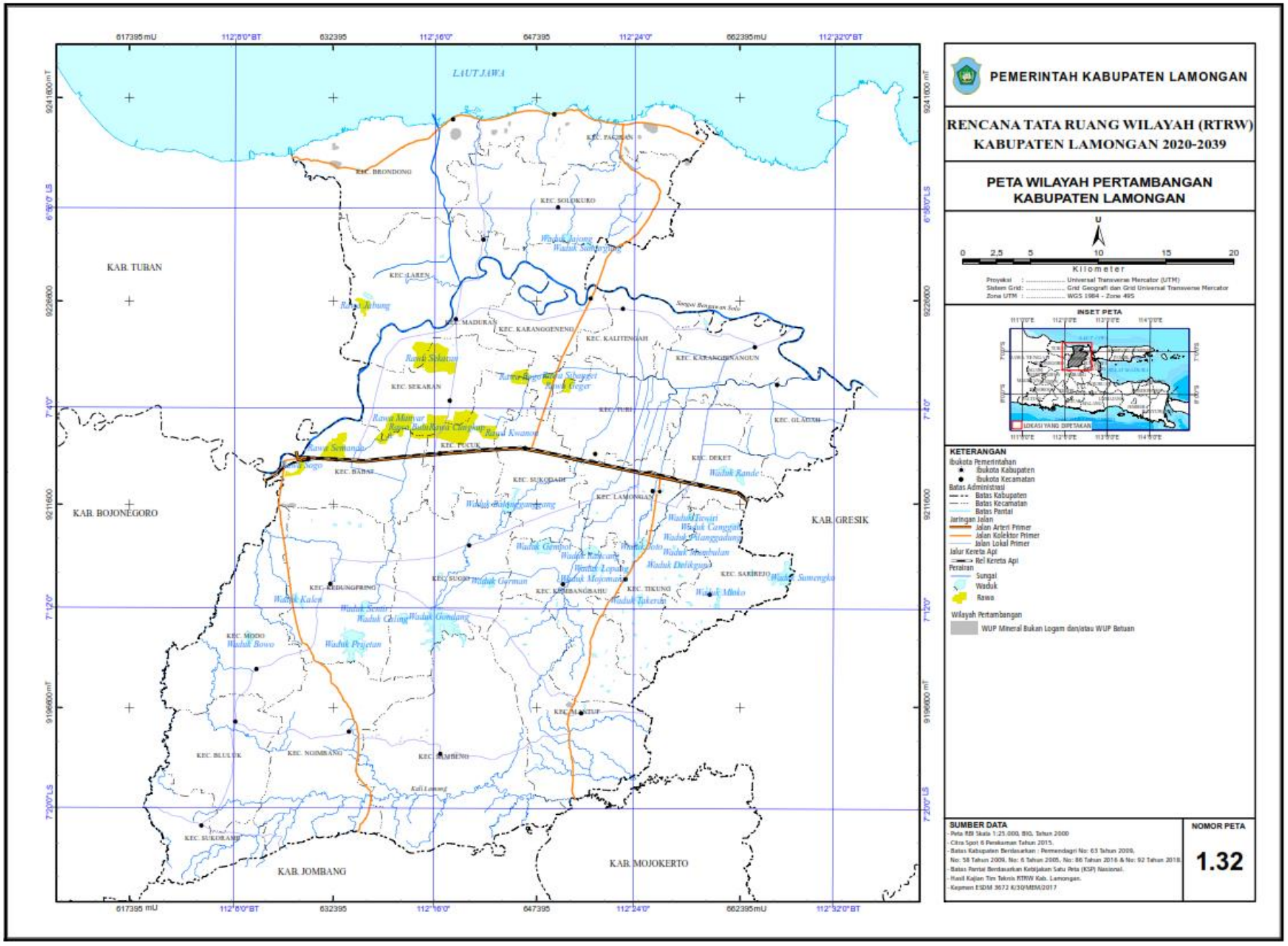
No	Mineral	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Volume (Ton)	Luas (Ha)
1	Gamping	Sidomukti	Brondong	Lamongan	3.612.000	26
2	Fosfat	Sidomukti	Brondong	Lamongan	3.612.000	26
3	Gamping	Sidomukti	Brondong	Lamongan	34.042.800	77
4	Dolomit	Sidomukti	Brondong	Lamongan	34.042.800	77
5	Fosfat	Sidomukti	Brondong	Lamongan	9.511.200	40
6	Gamping	Brengkok	Brondong	Lamongan	458.885.000	937
7	Gamping	Sedayu Lawas	Brondong	Lamongan		
8	Gamping	Sendang Harjo	Brondong	Lamongan		
9	Gamping	Lembor	Brondong	Lamongan		
10	Dolomit	Brengkok	Brondong	Lamongan	458.885.000	937
11	Dolomit	Sedayu Lawas	Brondong	Lamongan		
12	Dolomit	Sendang Harjo	Brondong	Lamongan		
13	Dolomit	Lembor	Brondong	Lamongan		
14	Gamping	Sendang Harjo	Brondong	Lamongan	13.533.000	35
15	Dolomit	Sendang Harjo	Brondong	Lamongan	13.533.000	35
16	Gamping	Dadapan	Solokuro	Lamongan	10.094.900	35
17	Dolomit	Dadapan	Solokuro	Lamongan	10.094.900	35
18	Fosfat	Sedayu Lawas	Brondong	Lamongan	12.218.800	28
19	Fosfat	Brondong	Brondong	Lamongan	12.218.800	28
20	Gamping	Sedayu Lawas	Brondong	Lamongan	87.264.000	364
21	Gamping	Brondong	Brondong	Lamongan		
22	Dolomit	Sedayu Lawas	Brondong	Lamongan	87.264.000	364
23	Dolomit	Brondong	Brondong	Lamongan		
24	Gamping	Blimbing	Paciran	Lamongan	1.353.780.000	1.962
25	Gamping	Kandang Semankon	Paciran	Lamongan		
26	Gamping	Dadapan	Solokuro	Lamongan		
27	Gamping	Sugihan	Solokuro	Lamongan		
28	Dolomit	Blimbing	Paciran	Lamongan	1.353.780.000	1.962

No	Mineral	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Volume (Ton)	Luas (Ha)
29	Dolomit	Kandang Semankon	Paciran	Lamongan		
30	Dolomit	Dadapan	Solokuro	Lamongan		
31	Dolomit	Sugihan	Solokuro	Lamongan		
32	Gamping	Sugihan	Solokuro	Lamongan	41.624.000	194
33	Gamping	Tenggulun	Solokuro	Lamongan		
34	Dolomit	Sugihan	Solokuro	Lamongan	41.624.000	194
35	Dolomit	Tenggulun	Solokuro	Lamongan		
36	Gamping	Solokuro	Solokuro	Lamongan	142.800.000	420
37	Gamping	Sendang Agung	Paciran	Lamongan		
38	Dolomit	Solokuro	Solokuro	Lamongan	142.800.000	420
39	Dolomit	Sendangagung	Paciran	Lamongan		
40	Gamping	Paciran	Paciran	Lamongan	596.745.000	671
41	Gamping	Penanjan	Paciran	Lamongan		
42	Gamping	Sendangagung	Paciran	Lamongan		
43	Dolomit	Paciran	Paciran	Lamongan	596.745.000	671
44	Dolomit	Penanjan	Paciran	Lamongan		
45	Dolomit	Sendangagung	Paciran	Lamongan		
46	Gamping	Kranji	Paciran	Lamongan	71.246.000	145
47	Dolomit	Kranji	Paciran	Lamongan	71.246.000	145
48	Gamping	Kemantren	Paciran	Lamongan	2.375.010.000	2.399
49	Gamping	Banjarwati	Paciran	Lamongan		
50	Gamping	Sidokelar	Paciran	Lamongan		
51	Gamping	Tlogosadang	Paciran	Lamongan		
52	Gamping	Degan	Solokuro	Lamongan		
53	Gamping	Bluri	Solokuro	Lamongan		
54	Gamping	Banyubang	Solokuro	Lamongan		
55	Dolomit	Kemantren	Paciran	Lamongan	2.375.010.000	2.399
56	Dolomit	Banjarwati	Paciran	Lamongan		
57	Dolomit	Sidokelar	Paciran	Lamongan		
58	Dolomit	Tlogosadang	Paciran	Lamongan		
59	Dolomit	Degan	Solokuro	Lamongan		
60	Dolomit	Bluri	Solokuro	Lamongan		
61	Dolomit	Banyubang	Solokuro	Lamongan		
62	Fosfat	Karangkembang	Babat	Lamongan	4.930.000	15
63	Fosfat	Pucukwangi	Babat	Lamongan		
64	Gamping	Karangkembang	Babat	Lamongan	180.258.000	462
65	Dolomit	Karangkembang	Babat	Lamongan	180.258.000	462
66	Gamping	Tugu	Mantup	Lamongan	10.612.800.000	10.720
67	Gamping	Mantup	Mantup	Lamongan		
68	Gamping	Sukobendu	Mantup	Lamongan		
69	Gamping	Sumberbendu	Mantup	Lamongan		
70	Gamping	Lawangnagung	Sugio	Lamongan		
71	Gamping	Pata'an	Ngimbang	Lamongan		

No	Mineral	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Volume (Ton)	Luas (Ha)
72	Gamping	Sumbersari	Ngimbang	Lamongan		
73	Gamping	Pasarlegi	Ngimbang	Lamongan		
74	Gamping	Kedukwangi	Ngimbang	Lamongan		
75	Gamping	Ardirejo	Ngimbang	Lamongan		
76	Gamping	Pule	Modo	Lamongan		
77	Gamping	Bluluk	Bluluk	Lamongan		
78	Dolomit	Tugu	Mantup	Lamongan	10.612.800.000	10.720
79	Dolomit	Mantup	Mantup	Lamongan		
80	Dolomit	Sukobendu	Mantup	Lamongan		
81	Dolomit	Sumberbendu	Mantup	Lamongan		
82	Dolomit	Lawangnagung	Sugio	Lamongan		
83	Dolomit	Pata'an	Ngimbang	Lamongan		
84	Dolomit	Sumbersari	Ngimbang	Lamongan		
85	Dolomit	Pasarlegi	Ngimbang	Lamongan		
86	Dolomit	Kedukwangi	Ngimbang	Lamongan		
87	Dolomit	Ardirejo	Ngimbang	Lamongan		
88	Dolomit	Pule	Modo	Lamongan		
89	Dolomit	Bluluk	Bluluk	Lamongan		
90	Gamping	Kedungkumpul	Sukorame	Lamongan	60.515.000	319
91	Pasir	Gardu	Babat	Lamongan		487
92	Pasir	Bedahan	Babat	Lamongan		
93	Tanah Liat	Sugio	Sugio	Lamongan		1.704
94	Tanah Liat	Jotosanur	Tikung	Lamongan		2.228
95	Tanah Liat	Kembangbahu	Kembangbahu	Lamongan		1.239
96	Tanah Liat	Kembangbahu	Kembangbahu	Lamongan		371
97	Tanah Liat	Mantup	Mantup	Lamongan		318
98	Tanah Liat	Bluluk	Bluluk	Lamongan		238
99	Tanah Liat	Modo	Modo	Lamongan		616

Sumber : Bagian Perekonomian Kab. Lamongan

Kawasan minyak dan gas bumi merupakan kawasan pertambangan terdapat di Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung yaitu Sumur Minyak Gondang I yang dieksplorasi pada Desember 1991.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA WILAYAH PERTAMBANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Rel Kereta Api
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Wilayah Pertambangan
WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Kepmen ESDM 3672 K/30/MEM/2017
NOMOR PETA
1.32
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. SOLOKUKO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. SEKARAN
KEC. TUBI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKODANI
Waduk Sidorejo
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Bowo
Waduk Kalen
Waduk German
Waduk Mojomati
Waduk Tikerus
Waduk Sumengko
Waduk Mlirip
Rawa Selatan
Rawa Kwanon
Rawa Semanding
Kali Lamong

1.9.15.8. SEKTOR INDUSTRI

Industri di Kabupaten Lamongan mulai berkembang terutama industri besar yang berada di kawasan pantai utara Lamongan. Selain itu industri di Kabupaten Lamongan berkembang di jalan yang menghubungkan Babat – Kedungpring – Modo – Ngimbang. pada ruas jalan yang menghubungkan Sukodadi – Karanggeneng tumbuh kegiatan industri penggilingan padi dan pengepakan beras

Berdasarkan data Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018, industri di Kabupaten Lamongan dibedakan antara industri sedang dan besar. sebagaimana tabel 1.106.

Tabel 1.106. Kategori Industri di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Industri Formal			Industri Non Formal/Kerajinan	Jumlah
		Besar	Sedang	Kecil		
1	Sukorame	-	-	8	769	777
2	Bluluk	-	-	13	322	335
3	Ngimbang	2	-	22	399	423
4	Sambeng	-	3	35	1.689	1.727
5	Mantup	2	3	16	335	356
6	kembangbahu	5	5	17	1.103	1.130
7	Sugio	-	1	19	234	254
8	Kedungpring	4	1	27	1.533	1.565
9	Modo	-	-	20	484	504
10	Babat	1	3	35	390	429
11	Pucuk	-	-	17	393	410
12	Sukodadi	1	9	33	1.120	1.163
13	Lamongan	3	4	37	395	439
14	Tikung	2	3	22	431	458
15	Sarirejo	-	-	10	253	263
16	Deket	3	-	18	263	284
17	Glagah	-	-	15	365	380
18	Karangbinangun	-	-	21	459	480
19	Turi	-	-	16	393	409
20	Kalitengah	-	2	10	296	308
21	Karanggeneng	-	-	13	405	418
22	Sekaran	-	-	12	252	264
23	Maduran	1	2	26	690	719
24	Laren	-	-	11	401	412
25	Selokuro	-	2	12	415	429
26	Paciran	10	8	37	789	844
27	Brondong	6	4	33	372	415
	Jumlah	**40**	**50**	**555**	**14.950**	**15.595**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan produk unggulan di Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.99

Tabel 1.107. Produk Unggulan di Kabupaten Lamongan

No	Produk Unggulan	Alamat
1	Batik Tulis	Ds. Sendangduwur, Kec. Paciran
2	Tenun Ikat/Sarung	Ds. Parengan, Kec. Maduran
3	Tas Enceng Gondok	Ds. Pangumbulanadi, Kec. Tikung
4	Bordir dan Batik	Ds. Sendangduwur, Kec. Paciran
5	Tas Tempurung Kelapa	Jl. Sumargo Gg.Bougenvil 04 Lamongan
6	Kerajinan Anyaman Bambu	Ds. Tugu, Kec. Mantup
7	Kerupuk Bandeng	Ds. Wangunrejo, Kec. Turi
8	Sepatu Bordir	Jl. Sunan Kalijogo 120, Lamongan
9	Bordir	Ds. Sudangan, Kec. Glagah
10	Konveksi	Ds. Gambuhan, Kec. Kalitengah
11	Genting/Batu Bata	Ds. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng
12	Gerabah	Jl. Pembangunan 07, Lamongan
13	Tikar Lipat	Jl. Sunan Giri Gg. Jambu 07, Lamongan
14	Peralatan Rumah Tangga	Jl. Cokroaminoto, Kec. Babat
15	Tikar Pandan	Ds. Dumpiagung, Kec. Kembangbahu
16	Ukiran Kayu	Jl. Basuki Rahmat, Lamongan
17	Dompet Imitasi	Ds. Suhihwaras, Kec. Deket
18	Songkok	Ds. Pengangsalan, Kec. Kalitengah
19	Kompor Briket	Ds. Sidorejo, Kec. Deket
20	Pengrajin Emas	Ds. Sendangduwur, Kec. Paciran

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2017

1.9.15.9. PDRB KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan atas dasar harga berlaku dan konstan, menunjukkan bahwa tiap tahun mengalami peningkatan. Namun dilihat dari laju pertumbuhannya dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 mengalami penurunan dan pada Tahun 2015 mengalami kenaikan kembali.

Dilihat dari kontribusi sektor, untuk Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 40% dari nilai PDRB Kabupaten Lamongan, disusul kemudian oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi sebesar 19%, konstruksi 11%. Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Atas dasar harga berlaku dan konstan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 3.104 sampai dengan 3.106.

Percepatan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam menilai makro ekonomi suatu daerah. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi alat yang biasa digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan dapat menunjukkan pertumbuhan riil aktifitas perekonomian tanpa mempertimbangkan perubahan harga-harga. Berdasarkan data yang ada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai Tahun 2015. Sedangkan dilihat dari sektor, pertumbuhan yang cukup tinggi adalah penyediaan akomodasi. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan sektor basis di Kabupaten Lamongan pertumbuhannya mengalami penurunan.

Tabel 1.108. PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku (Milyard)

No	Lapangan Usaha	Th.2013	Th.2014	Th.2015	Th.2016	Th.2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.104,71	10.214,85	11.303,10	12.233,61	12.813,86
2	Pertambangan dan Bahan Galian	274,84	322,16	384,06	416,81	453,70
3	Industri Pengolahan	1.615,81	1.881,94	2.155,96	2.453,33	2.811,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,26	14,87	16,63	19,10	22,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	24,93	26,54	29,57	33,10	36,84
6	Konstruksi	2.458,10	2.791,92	3.097,19	3.522,86	3.925,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	4.362,99	4.820,59	5.405,86	5.982,51	6.559,35
8	Transportasi dan Pergudangan	163,87	191,16	219,22	250,34	281,34
9	Penyediaan Akomodasi	288,64	336,88	405,14	478,87	559,77
10	Informasi dan Komunikasi	1.524,30	1.621,39	1.797,33	1.996,75	2.213,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	469,01	530,66	596,17	662,38	716,42
12	Real Estate	458,80	501,33	588,95	647,17	720,08
13	Jasa Perusahaan	61,88	67,35	75,41	83,60	91,80
14	Administrasi Pemerintah	1.021,40	1.049,71	1.158,18	1.283,88	1.376,08
15	jasa Pendidikan	586,60	664,42	744,19	810,34	880,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,63	205,99	234,36	264,25	294,27
17	Jasa Lainnya	405,58	462,75	534,92	568,37	613,01
	Jumlah	**23.012,35**	**25.704,51**	**28.746,24**	**31.707,27**	**34.370,51**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 1.109. PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan (Milyard)

No	Lapangan Usaha	Th.2013	Th.2014	Th.2015	Th.2016	Th.2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.478,65	7.851,06	8.212,43	8.567,51	8.717,13
2	Pertambangan dan Bahan Galian	244,45	259,32	284,32	293,04	312,87
3	Industri Pengolahan	1.408,47	1.571,80	1.693,00	1.840,38	2.047,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,99	15,93	16,18	17,63	18,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	22,27	23,05	24,30	25,63	27,60
6	Konstruksi	2.162,73	2.271,86	2.309,48	2.455,90	2.670,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3.807,25	4.105,55	4.401,92	4.709,81	5.027,11
8	Transportasi dan Pergudangan	146,40	159,38	171,50	186,36	201,57
9	Penyediaan Akomodasi	254,62	279,21	314,95	345,93	390,03
10	Informasi dan Komunikasi	1.510,79	1.613,57	1.726,91	1.848,54	2.010,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	400,44	426,03	456,47	487,59	508,40
12	Real Estate	411,27	444,48	480,17	508,72	547,99
13	Jasa Perusahaan	54,89	58,38	62,38	65,97	69,35
14	Administrasi Pemerintah	866,28	869,61	922,21	960,68	989,31
15	jasa Pendidikan	515,18	556,36	600,66	639,10	679,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162,28	178,00	194,27	210,32	227,04
17	Jasa Lainnya	387,89	416,36	445,74	460,68	483,52
	Jumlah	**19.848,85**	**21.099,95**	**22.316,89**	**23.623,79**	**24.927,96**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Diagram 1.15. PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku

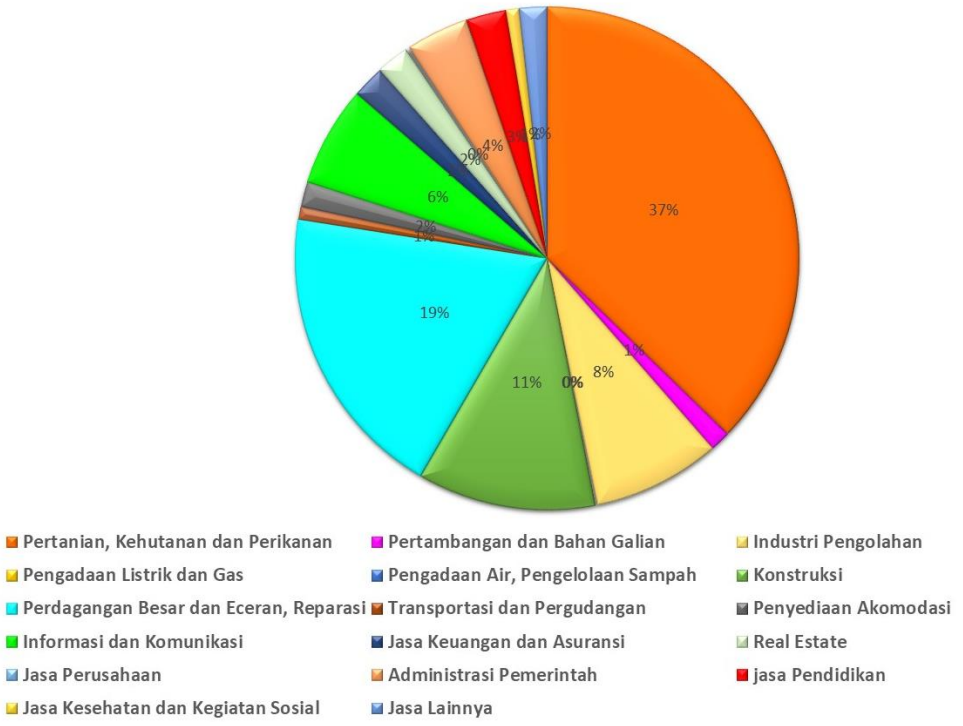
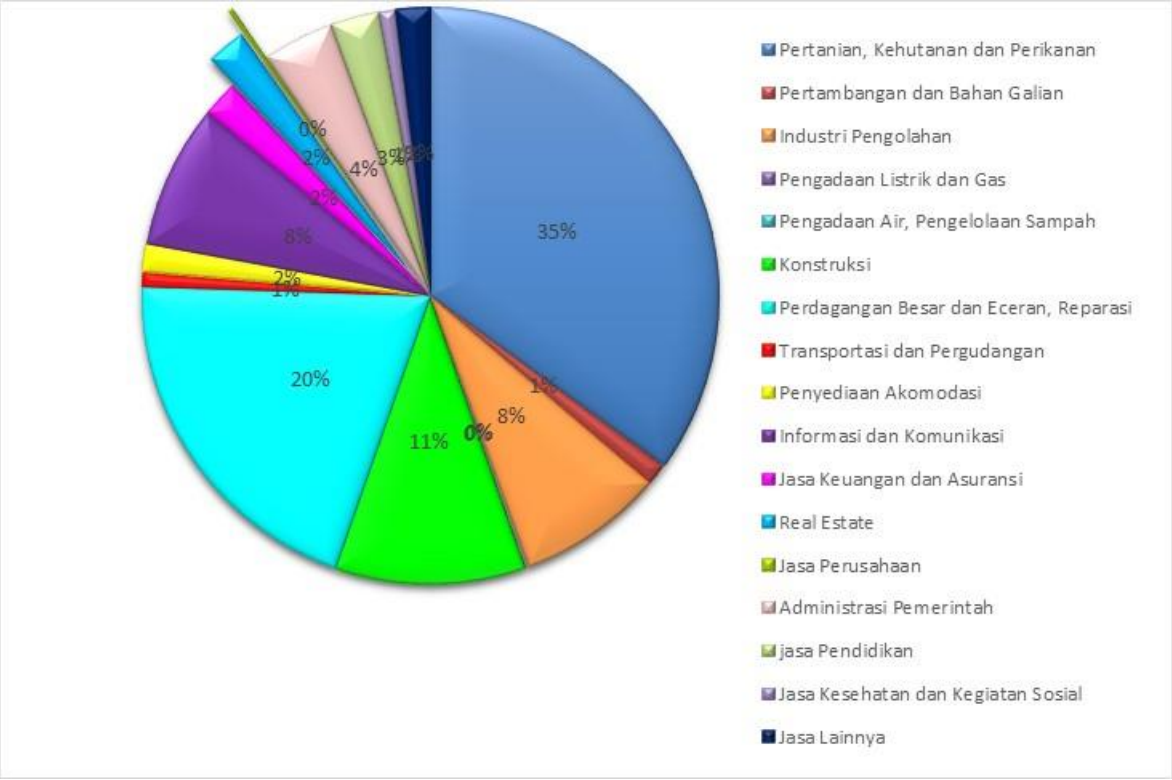


Diagram 1.16. PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan

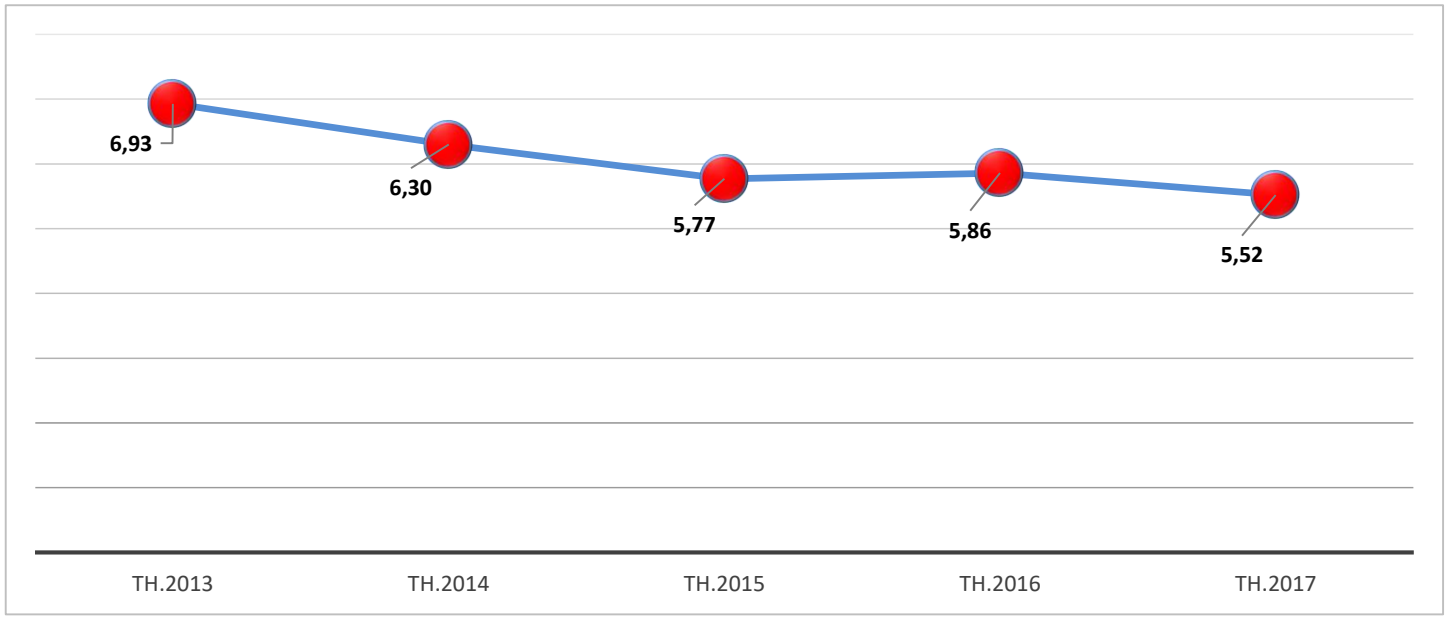


Tabel 1.110.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan

No	Lapangan Usaha	Th.2013	Th.2014	Th.2015	Th.2016	Th.2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,94	4,98	4,60	4,32	1,75
2	Pertambangan dan Bahan Galian	1,65	6,08	9,64	3,07	6,77
3	Industri Pengolahan	6,94	11,60	7,71	8,70	11,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,78	6,29	1,57	8,95	5,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	7,91	3,46	5,43	5,49	7,68
6	Konstruksi	5,89	5,05	1,66	6,34	8,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	9,85	7,84	7,22	6,99	6,74
8	Transportasi dan Pergudangan	8,09	8,87	7,61	8,66	8,16
9	Penyediaan Akomodasi	6,04	9,66	12,80	9,84	12,75
10	Informasi dan Komunikasi	7,81	6,80	7,02	7,04	8,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,75	6,39	7,14	6,82	4,27
12	Real Estate	9,09	8,07	8,03	5,95	7,72
13	Jasa Perusahaan	5,85	6,36	6,84	5,77	5,12
14	Administrasi Pemerintah	1,69	0,38	6,05	4,17	2,98
15	jasa Pendidikan	8,74	7,99	7,96	6,40	6,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,10	9,69	9,14	8,26	7,95
17	Jasa Lainnya	4,72	7,34	7,06	3,35	4,96
	Jumlah	**6,93**	**6,30**	**5,77**	**5,86**	**5,52**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

Diagram 1.17. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan



1.9.16. IPM KABUPATEN LAMONGAN

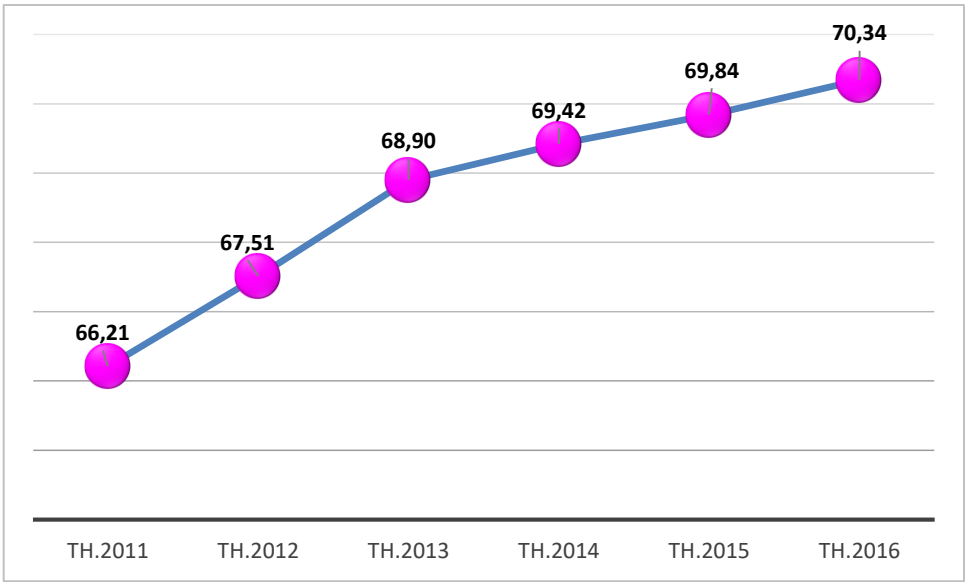
Indikator kesejahteraan sosial diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di mana hal ini merupakan cermin dari kualitas kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM mendiskripsikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap penanganan sosial budaya, semakin mengarah pada efektivitas. IPM Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.111. IPM Kabupaten Lamongan

No	Kabupaten	IPM Kabupaten Lamongan					
		Th.2011	Th.2012	Th.2013	Th.2014	Th.2015	Th.2016
1	Lamongan	66,21	67,51	68,90	69,42	69,84	70,34

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

Diagram 1.18. IPM Kabupaten Lamongan



1.9.17. KEUANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan lainnya di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 sebesar 2.716.042.669 ribu rupiah dari total target 2.779.768.465 ribu rupiah. Realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 mengalami kenaikan di banding tahun 2016 yaitu sebesar 81.173.737 ribu rupiah.

Nilai Investasi di Kabupaten Lamongan untuk PMA pada tahun 2017sebesar 153.830.185.365. Sedangkan nilai investasi di Kabupaten Lamongan untuk PMDN pada

Tabel 1.112.
Rencana dan Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Lainnya di Kabupaten Lamongan Tahun 2017

No	Sektor	Rencana (Rp.000,-)	Realisasi (Rp.000,-)	Prosentase (%)
1	**PAD**			
	- Pajak Daerah	137.746.655	142.025.801	103,11
	- Retribusi Daerah	32.367.703	30.574.992	94,46
	- Laba Usaha Daerah	23.069.399	23.093.187	100,10
	- Lain - Lain Pendapatan	243.335.278	233.506.082	95,96
	Sub Jumlah	**436.519.035**	**429.200.062**	**98,32**
2	**Dana Perimbangan**			
	- Bagi Hasil Pajak	85.629.392	75.480.934	88,15
	- Bagi Hasil Bukan Pajak			
	- Dana Alokasi Umum	1.146.161.266	1.146.161.266	100,00
	- Dana Alokasi Khusus	448.153.476	373.133.021	83,26
	Sub Jumlah	**1.679.944.134**	**1.594.775.221**	**94,93**
3	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**			
	- Hibah	85.107.080	85.107.080	100,00
	- Dana Darurat			
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	135.687.000	164.449.090	121,20
	- Dana Penyesuaian dan Otonomi	392.498.316	392.498.316	100,00
	- Bantuan Keuangan dari Prop/Pemda Lainnya	50.012.900	50.012.900	100,00
	Sub Jumlah	**663.305.296**	**692.067.386**	**104,34**
	Jumlah Total	**2.779.768.465**	**2.716.042.669**	**97,71**

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018

1.9.18. KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana Pasal 3 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
   a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
   b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

f. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

j. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;

k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;

l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;

m. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;

o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

p. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;

q. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;

r. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;

s. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;

t. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan bidang statistik;

u. Dinas Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;

v. Dinas Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;

w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

x. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

y. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;

z. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

5. Badan Daerah terdiri dari :

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

b. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;

d. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

6. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :

a. Kecamatan Sukorame;

b. Kecamatan Bluluk;

c. Kecamatan Modo;

d. Kecamatan Ngimbang;

e. Kecamatan Babat;

f. Kecamatan Kedungpring;

g. Kecamatan Brondong;

h. Kecamatan Laren;

i. Kecamatan Sekaran;

j. Kecamatan Maduran;

k. Kecamatan Sambeng;

l. Kecamatan Sugio;

m. Kecamatan Pucuk;

n. Kecamatan Paciran;

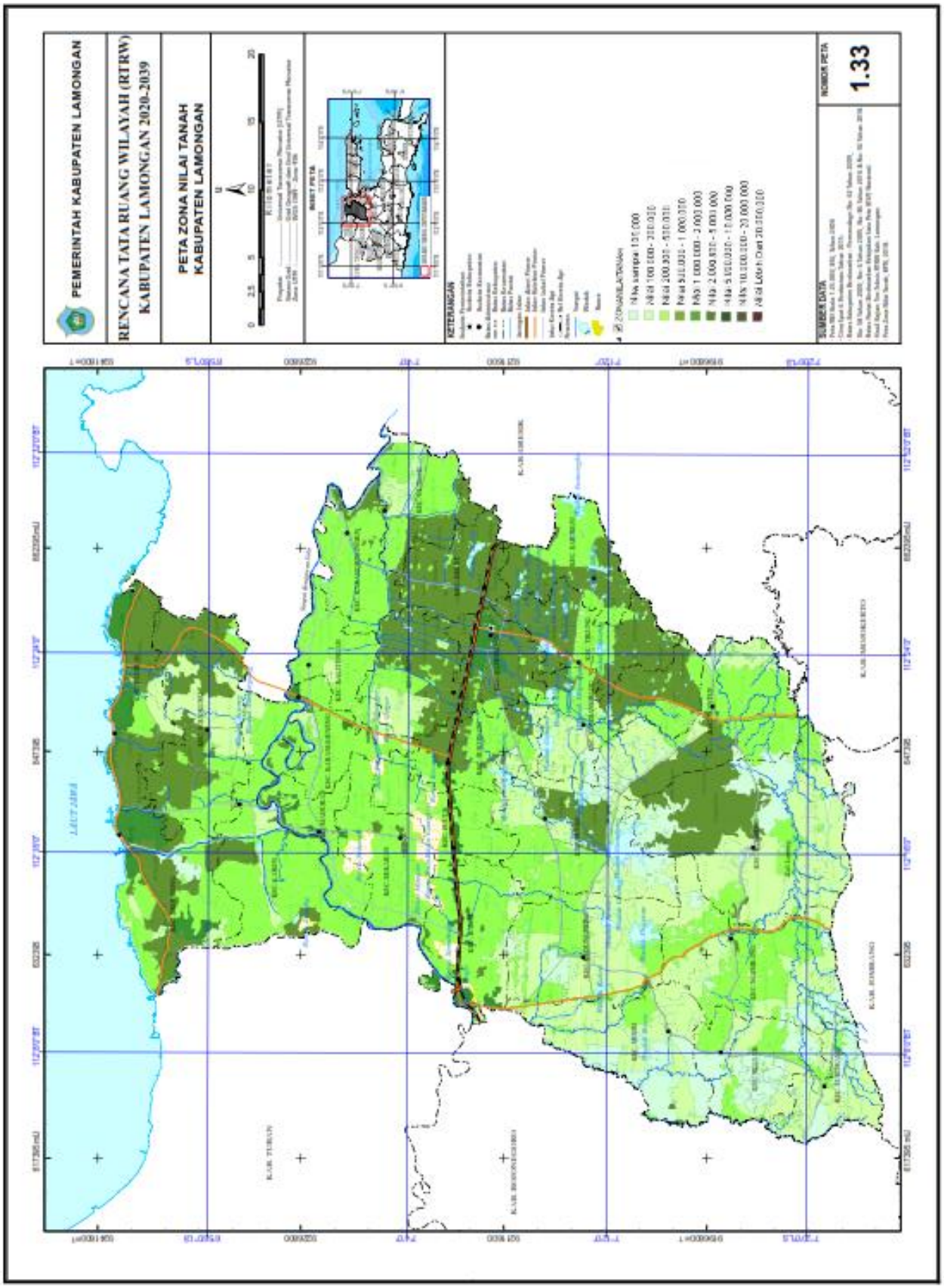
o. Kecamatan Solokuro;

p. Kecamatan Mantup;

q. Kecamatan Sukodadi;
r. Kecamatan Karanggeneng;
s. Kecamatan Kembangbahu;
t. Kecamatan Kalitengah;
u. Kecamatan Turi;
v. Kecamatan Lamongan;
w. Kecamatan Tikung;
x. Kecamatan Karangbinangun;
y. Kecamatan Deket;
z. Kecamatan Glagah;
aa. Kecamatan Sarirejo.

1.9.19. DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN

Data dan informasi pertanahan yang didapat berupa zona nilai tanah di Kabupaten Lamongan, dimana zona nilai tanah di Kabupaten Lamongan berkisar antara 1.00.000 sampai dengan 2.000.0000,- sebagaimana terlihat pada Peta 1.31.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA ZONA NILAI TANAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR PETA
1.33

1.9.20. POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISSUE STRATEGIS

Berdasarkan kondisi wilayah perencanaan yang dijelaskan di atas, maka potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

A. POTENSI

1. Memiliki lahan yang cukup luas dan masih didominasi oleh lahan tidak terbangun sebesar 157.284 ha atau 97% dari luas wilayah Kabupaten Lamongan
2. Memiliki potensi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan , pertambangan dan industri yang cukup besar
3. Memiliki potensi wisata dengan skala regional dan nasional yaitu Wahana Bahari Lamongan (WBL), Goa Maharani serta Makam Sunan Drajat yang merupakan onbjek wisata unggulan di Kabupaten Lamongan
4. Jangkauan jaringan listrik PLN dan telepon telah merata seluruh wilayah, demikian juga dengan jaringan jalan sebagian besar sudah diaspal.
5. Di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi;
6. Tumbuhnya kawasan permukiman perkotaan baru yang mempunyai indikasi perkembangan pesat karena adanya potensi alami maupun potensi ekternal akses yaitu Kecamatan Pucuk dan Kecamatan Sukodadi yang terletak antara Kota Lamongan dan Kecamatan Babat
7. Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari WP Gerbangkertosusila Plus dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;
8. Kabupaten Lamongan merupakan kawasan inti pengembangan Cluster Segitiga Emas dimana arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Agro Industri sebagai kawasan yang mengintegrasikan kawasan penghasil bahan dan pengolahan bahan baku pertanian, perikanan, dan bahan baku kebutuhan dasar lainnya dengan pusat koleksi dan distribusi regional, yang ditetapkan pada : Kab. Gresik (Bagian Utara) dan Kab Lamongan (Bagian Utara)
9. Memiliki akses yang cukup baik yang menghubungkan antar kota dan antar kabupaten di Jawa Timur karena didukung oleh adanya moda transportasi darat baik jalan, kereta api, moda transportasi laut terdapat pelabuhan umum dan pelabuhan penyeberangan
10. Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang cukup potensial untuk pengembangan permukiman, hal ini didukung oleh posisi yang cukup strategis maupun lahan yang tersedia.
11. Kawasan selatan Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang cukup potensial untuk pengembangan agroindustri
12. Kawasan pesisir Kabupaten Lamongan memiliki potensi pengembangan kegiatan ekonomi seperti : potensi obyek wisata, potensi perikanan tangkap

dan perikanan tambak, potensi pelayaran. Potensi-potensi tersebut sebagian besar masih belum dikelola (kondisi alami); serta Kawasan pesisir Brondong-Paciran juga mempunyai potensi untuk pengembangan pelabuhan skala nasional - internasional serta kawasan industri.

B. PERMASALAHAN

1. Pelayanan kebutuhan air bersih PDAM sistem perpipaan belum merata keseluruh wilayah dI Kabupaten Lamongan
2. Lokasi TPA yang berada di Kecamatan Tikung belum mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan di Kota Lamongan;
3. Pengembangan Industri di Ngimbang dan Tikung serta industri-industri di Paciran dan Brondong akan meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan oleh Kabupaten Lamongan
4. Irigasi untuk kepentingan pertanian terutama bagian selatan masih sangat sulit, hanya bersumber dari Kali Lamong sedangkan dari waduk – waduk yang ada di wilayah selatan belum dirasakan masyarakat Lamongan bagian selatan secara maksimal.
5. Masih terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar berada di kawasan pesisir
6. Keberadaan industri yang ada perlu diantisipasi oleh bangunan pengelola limbah sehingga tidak membuang limbah pada saluran atau sungai. Karena pembuangan air limbah inilah yang memberikan kontribusi pencemaran lingkungan.
7. Sebagian wilayah Kabupaten Lamongan merupakan daerah rawan banjir terutama di Kecamatan Babat dan Karangbinangun
8. Sebagian wilayah Kabupaten Lamongan merupakan kawasan rawan kekeringan dengan klasifikasi sedang seperti Kecamatan Bluluk, Sukorame, Sambeng, Kembangbahu, Babat, Pucuk, Tikung dan Solokuro
9. Sebagian wilayah Kabupaten Lamongan merupakan rawan kebakaran dengan klasifikasi tinggi yaitu Kecamatan Sukorame
10. Indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli masyarakat Kabupaten Lamongan yang masih berada di bawah rata rata kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur
11. Keberadaan pelabuhan umum serta pelabuhan penyeberangan yang belum berfungsi secara optimal
12. Kemacetan yang terjadi di beberapa titik simpul transportasi karena merupakan jalan utama dan kepadatan pemusatan fasilitas, pada umumnya terjadi di sekitar pasar Perkotaan Brondong dan Pasar Agrobis Babat
13. Beberapa kawasan perdesaan memiliki perkembangan yang lambat karena akses yang tidak memadai, potensi yang kurang berkembangan terutama dalam bidang pertanian serta jauh dari jangkauan pusat kota;

14. Perkembangan yang tinggi di wilayah pantura Lamongan sebagai bagian dari sistem perkotaan nasional serta Kawasan Strategis Nasional mengindikasikan kesenjangan perkembangan perkotaan di Kabupaten Lamongan terutama dengan wilayah selatan Lamongan.
15. Konsentrasi kegiatan akan lebih terfokus pada beberapa perkotaan yang dominan seperti pada Perkotaan Lamongan, Babat, Brondong-Paciran sehingga pelayanan perkotaan ke seluruh wilayah berjalan kurang optimum terutama pelayanan dibagian Selatan Kabupaten Lamongan;
16. Infrastruktur permukiman belum sepenuhnya menjangkau kawasan permukiman seperti air bersih, jaringan jalan, persampahan;
17. Pengelompokan fasilitas pada pusat-pusat perkotaan terutama perkotaan sebagai pusat WP seperti pengelompokan fasilitas sosial di Perkotaan Lamongan dan perdagangan di Perkotaan Babat karena akses yang cukup jauh mengakibatkan orientasi masyarakat Lamongan bagian selatan lebih memilih orientasi ke Jombang, Bojonegoro dan Mojokerto karena akses yang lebih dekat.
18. Terdapatnya fasilitas regional berupa Pasar Agrobis Babat yang belum maksimal dalam memberi manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Lamongan

C. ISSUE SRATEGIS

1. Pengembangan Kawasaan Perkotaan Lamongan pada beberapa wilayah yang berada di sekitarnya
2. Pengembangan Jalan Tol (lewat Pantura)
3. Pengembangan jalan lingkar utara Lamongan
4. Pengembangan kereta api cepat Jakarta – Surabaya melewati Kabupaten Lamongan;
5. Pengembangan frontage road
6. Pengembangan LIS menjadi pelabuhan utama
7. Pengembangan Kawasan Agroindustri Gelang Utara (Gresik – Lamongan);
8. Pengembangan Kawasan Kerjasama Regional Segitiga Emas Pertumbuhan Tuban –Lamongan – Bojonegoro;
9. Pengembangan jalur KA ganda Surabaya – Lamongan – Bojonegoro;
10. Peningkatan pengoperasian KA Komuter SULAM (Surabaya – Lamongan) menjadi SULAMBA (Surabaya – Lamongan – Babat);
11. konservasi jalur perkeretaapian meliputi: Babat–Jombang; Babat–Tuban;
12. Pengembangan kawasan pelabuhan ASDP;
13. Pengembangan Agropolitan di wilayah selatan;
14. Penanganan Banjir perlu dilakukan perbaikan dan pengelolaan sungai Bengawan Solo, sepanjang 273 Km (guna peningkatan kapasitas aliran, perbaikan alur sungai serta perbaikan sistem drainase;

15. Pengembangan SPAM di Sedayulawas Kec. Brondong
16. Pengembangan SPAM Regional di Wilayah Mojokerto dan Lamongan (Kec. Mantup dan Kembangbahu)
17. Pengembangan SPAM di Wilayah Babat – Lamongan
18. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
19. Deleniasi dan luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung
20. Pengelolaan Persampahan
21. Pengembangan lahan peruntukan industri ke wilayah selatan



BAB-2 TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

2.1. VISI DAN MISI PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMONGAN

Visi penataan ruang wilayah kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Daerah sebagai kawasan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan

Misi penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
2. mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
3. mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor – sektor andalan daerah;
4. mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai; dan
5. mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata.

2.2. TUJUAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam..

2.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

2.3.1. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, meliputi :

a. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;

b. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah tengah sebagai penunjang kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta industri;

c. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;

d. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;

e. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan industri dan pariwisata;

f. Pemantapan perlindungan terhadap kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan;

g. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;

h. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Wilayah Pengembangan

2.3.2. STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata, meliputi:
   a. mengembangkan wilayah utara sebagai kawasan pelabuhan, industri dan pariwisata; dan
   b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan permukiman, pelabuhan, industri dan pariwisata.
2. Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah tengah sebagai penunjang kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta industri, meliputi:
   a. mengembangkan wilayah tengah sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan serta industry; dan
   b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan permukiman, pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan dan industri.
3. Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan, meliputi :
   a. mengembangkan wilayah selatan sebagai kawasan agropolitan; dan
   b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agropolitan.
4. Strategi untuk kebijakan pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan, meliputi :
   a. mengembangkan jalan Tol sebagai bagian dari Trans Utara Pulau Jawa sekaligus pendukung pengembangan pusat ekonomi di wilayah utara,

b. Mengembangkan jalan arteri primer dan kolektor primer sebagai penghubung dengan wilayah perkotaan di bagian selatan dan utara serta jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat pelayanan kawasan;

c. Mengembangkan jaringan transportasi untuk wilayah utara, tengah dan selatan;

d. Mengembangkan prasarana transportasi melalui peningkatan fungsi terminal tipe B di Lamongan dan terminal Tipe C di Kecamatan Paciran, Brondong, Sukodadi, Sukorame, Sugio, Mantup, Babat, Ngimbang serta area parkir angkutan barang umum di Kecamatan Lamongan.

e. Mengembangkan prasarana kereta api untuk menunjang penyelenggaraan kereta api komuter dan sistem jalur ganda *(double track)* dan kereta api cepat

f. mengembangkan jaringan sungai danau dan penyeberangan yang terintegrasi dengan terminal tipe C

g. Mengembangkan pelabuhan laut yang berorientasi terhadap kegiatan industri, pertanian dan perikanan

h. Mengembangkan transportasi udara yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

5. Strategi untuk kebijakan pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata, meliputi:

a. meningkatkan penyediaan sumber daya energi untuk menunjang kebutuhan kegiatan industri dan kegiatan lain yang berkembang di Kabupaten Lamongan;

b. melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air untuk menunjang kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata dan industri;

c. mengoptimalkan bendungan sebagai bangunan pengendali dan pencegahan banjir;

d. mengembangkan menara pemancar bersama berupa BTS *(Base Transceiver Station)* secara terpadu yang didukung oleh kerjasama antar daerah;

e. meningkatkan teknologi pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pengolahan sampah secara thermal serta teknologi sanitary landfill dengan prinsip-prinsip "3R" *(reduce, reuse, recycle)* serta prinsip pemulihan biaya dalam pengelolaan sampah;

f. menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan

g. meningkatkan kapasitas penampungan air pada waduk-waduk serta mengoptimalkan jaringan irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian.

6. Strategi untuk kebijakan pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan, meliputi:

a. mengamankan dan menjaga fungsi hutan lindung yang ada di Kabupaten Lamongan;

b. mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai meliputi mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria;

c. mengamankan kawasan perlindungan setempat disepanjang aliran sungai serta disekitar waduk;

d. melakukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, DAS Suwuk, DAS Karangtumpuk, DAS Gayaran, DAS Asinan, DAS Lohgung, DAS Tunggul, DAS Lamong, DAS Sidokelar, DAS Labuhan untuk kegiatan irigasi dan air baku bagi masyarakat Daerah;

e. melakukan pencarian dan melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;

f. melakukan reboisasi/penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, DAS Suwuk, DAS Karangtumpuk, DAS Gayaran, DAS Asinan, DAS Lohgung, DAS Tunggul, DAS Lamong, DAS Sidokelar, DAS Labuhan sebagai pencegahan bencana banjir;

g. melakukan revitaslisasi kawasan sekitar pantai melalui pengembangan hutan mangrove dan vegetasi untuk mencegah gelombang pasang; dan

h. mengembangkan RTH pada wilayah perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

7. Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang, meliputi :

a. mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan KP2B;

b. meningkatkan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;

c. meningkatkan budidaya perikanan darat melalui pengembangan secara intensifikasi;

d. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;

e. mengendalikan secara ketat penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan;

f. menyediakan kawasan untuk kegiatan industri di wilayah utara, pada koridor jalan arteri primer Surabaya – Lamongan – Babat, pada koridor jalan kolektor primer yang menghubungkan Lamongan – Mantup, dan pada koridor Babat – Ngimbang disertai dengan pengolahan limbah dan penataan kawasan sekitar;

g. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga berbasis pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan di seluruh kecamatan;

h. mengembangkan wisata alam dan wisata buatan sebagai wisata andalan dengan disertai pengembangan paket wisata; dan

i. menyediakan permukiman yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana permukiman serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dan perkotaan.



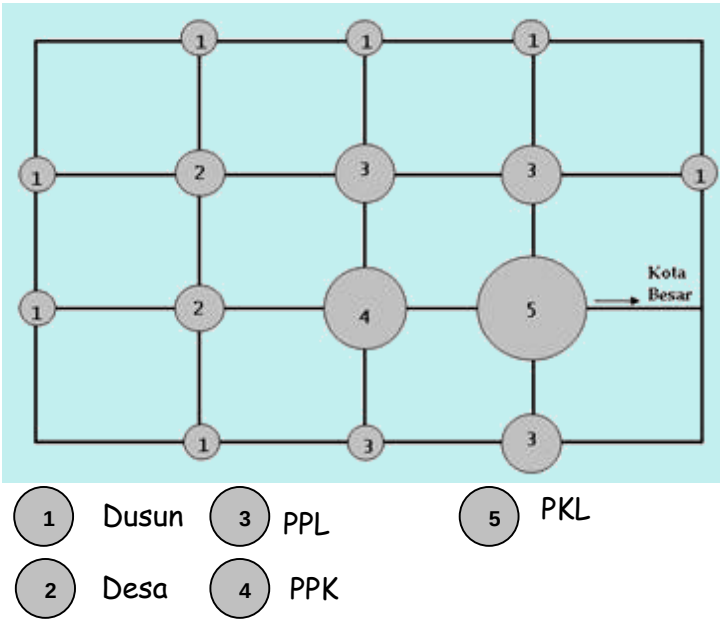
BAB-3 RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten menggambarkan susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional, sehingga terjadi pemerataan pelayanan dan mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Diwujudkan Melalui :

3.1. SISTEM PERDESAAN

Distribusi permukiman perdesaan di Kabupaten Lamongan menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan Kota Lamongan. Pola ruang seperti ini menjadikan pusat kegiatan perdesaan juga memiliki skala bermacam-macam, dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Setiap dusun memiliki pusat dusun;
2. Setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa;
3. Beberapa desa dalam satu kecamatan memiliki pusat kegiatan yang hirarkinya dibawah perkotaan kecamatan yakni sebagai desa pusat pertumbuhan;
4. Perdesaan yang lokasinya strategis langsung berhubungan dengan masing-masing ibukota kecamatan; serta
5. Perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan atau berorientasi pada pusat WP ataupun Kota Lamongan, secara diagramatis dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**



Gambar 3.1. Diagram Sistem Perdesaaan

Arahan pengembangan sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarki, meliputi:

a. pusat pelayanan antar desa;

b. pusat pelayanan setiap desa; serta

c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

Pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah.

Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman termasuk jaringan jalan, trasportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sarana pendukung yang lainnya.

Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta memperhatikan karaktersitik sosial budaya masyarakat, dengan pengembangan kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan.

Rencana pengembangan untuk kawasan perdesaan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan serta sentra bahan baku pangan.

a. Kawasan Agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Wilayah Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Ngimbang dengan kawasan pendukung meliputi :

   1. Kecamatan Mantup,
   2. Kecamatan Kembangbahu,
   3. Kecamatan Sukorame,
   4. Kecamatan Blubuk,
   5. Kecamatan Sambeng,

6. Kecamatan Modo,
7. Kecamatan Sugio; dan
8. Kecamatan Kedungpring.

arahan pengembangan adalah :

- Pengoptimalan area pertanian yang ada melalui usaha intensifikasi lahan;
- Perluasan area pertanian dengan merubah penggunaan lahan non produktif dan memperhatikan pola penggunaan lahan optimal;
- Areal lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak bisa dialihfungsikan menjadi penggunaan kegiatan lain yaitu: sawah irigasi teknis dan daerah konservasi sungai;
- Meningkatkan kualitas produksi melalui modernisasi teknologi pertanian;
- Memperbaiki saluran irigasi.

b. Kawasan Minapolitan, meliputi:

1. Minapolitan Tangkap dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Brondong dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Paciran
2. Minapolitan Budidaya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Glagah dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Sekitarnya

arahan pengembangan :

- Pengoptimalan area tambak sebagai lahan usaha perikanan;
- Pengembangan diversifikasi usaha perikanan baik off farm maupun on farm.

Pengelolaan kawasan perdesaan didukung dengan network sistem yang secara mikro bersinergi dengan keterhubungan sentra produksi dan perbaikan aksesbilitas, sehingga membentuk pusat pengembangan pengolahan suatu produk. Untuk mendukung keterkaitan antar wilayah dan sentra produksi dikembangkan sistem jaringan melalui penataan kawasan perdesaan yang diarahkan untuk:

1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
3. Konservasi sumber daya alam;
4. Pelestarian warisan budaya lokal;
5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

3.2. SISTEM PERKOTAAN

Pengembangan sistem perkotaan di wilayah kabupaten lamongan merupakan rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten lamongan yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten Lamongan. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten lamongan merupakan

simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

   Pusat Kegiatan Nasional selanjutnya disebut PKN adalah kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegitan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi. Perkotaan di Kabupaten Lamongan yang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional adalah Perkotaan Lamongan.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

   Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan. Perkotaan di Kabupaten Lamongan yang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan lokal adalah Perkotaan Paciran-Brondong, Perkotaan Babat, Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang. Perkotaan ini sekaligus menjadi Pusat dari wilayah pengembangan.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

   Pusat Pelayanan kawasan adalah (PPK) merupakan kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Kawasan untuk Kabupaten Lamongan, meliputi: Perkotaan Sukorame; Perkotaan Bluluk; Perkotaan Sambeng; Perkotaan Mantup; Perkotaan Kembangbahu; Perkotaan Sugio; Perkotaan Kedungpring; Perkotaan Modo; Perkotaan Pucuk; Perkotaan Tikung; Perkotaan Sarirejo; Perkotaan Deket; Perkotaan Glagah; Perkotaan Karangbinangun; Perkotaan Turi; Perkotaan Kelitengah; Perkotaan Karanggeneng; Perkotaan Sekaran; Perkotaan Maduran; Perkotaan Laren; dan Perkotaan Solokuro.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

   Pusat pelayanan lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi: Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup; Desa Deketagung Kecamatan Sugio; Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng; Desa Centini Kecamatan Laren; dan Desa Weru Kecamatan Paciran.

   Untuk lebih jelasnya lihat Peta 3.1.

3.3. PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Wilayah Kabupaten Lamongan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing–masing kecamatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukan tanah dan ruangnya. Penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Peta 3.1. Peta Penetapan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan

Tabel 3.1. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
1	**LAMONGAN**	**Perkotaan**	Banjarmendalan	Banjarmendalan
			Jetis	Jetis
			Tlogoanyar	Tlogoanyar
			Sidoharjo	Sidoharjo
			Sukomulyo	Sukomulyo
			Tumenggungan	Tumenggungan
			Sidokumpul	Sidokumpul
			Sukorejo	Sukorejo
			Made	Made
			Sidomukti	Sidomukti
			Plosowahyu	Plosowahyu
				Tanjung
				Sumberejo
				Pangkatrejo
				Karanglangit
				Rancangkencono
				Wajik
				Kramat
				Sendangrejo
				Kebet
		Perdesaan	Rancangkencono	
			Wajik	
			Kramat	
			Sendangrejo	
			Kebet	
			Tanjung	
			Sumberejo	
			Pangkatrejo	
			Karanglangit	
2	**SUKORAME**	**Perkotaan**	Sukorame	Sukorame
			Sewor	Sewor
			Kedungkumpul	Kedungkumpul
		Perdesaan	Sembung	Sembung
			Banggle	Banggle
			Mragel	Mragel
			Kedungrejo	Kedungrejo
			Wedoro	Wedoro
			Pendowokumpul	Pendowokumpul
3	**BLULUK**	**Perkotaan**	Bluluk	Bluluk

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Bronjong	Cangkring
				Songowareng
		Perdesaan	Banjargondang	Banjargondang
			Talunrejo	Talunrejo
			Cangkring	Brojong
			Kuwurejo	Kuwurejo
			Songowareng	Sumberbanjar
			Sumberbanjar	Primpen
			Primpen	Primpen
4	**NGIMBANG**	**Perkotaan**	Sendangrejo	Sendangrejo
			Ngimbang	Ngimbang
			Lamongrejo	Lamongrejo
				Munungrejo
				Slaharwotan
				Kakatpenjalin
				Drujugurit
		Perdesaan	Kedungmentawar	Kedungmentawar
			Ganggantingan	Ganggantingan
			Gebangangkrik	Gebangangkrik
			Lawak	Lawak
			Slaharwotan	Girik
			Kakatpenjalin	Jejel
			Drujugurit	Mendogo
			Munungrejo	Durikedungrejo
			Girik	Purwokerto
			Jejel	Ngasemlemahbang
			Mendogo	Cerme
			Durikedungrejo	Tlemang
			Purwokerto	
			Ngasemlemahbang	
			Cerme	
			Tlemang	
5	**SAMBENG**	**Perkotaan**	Ardirejo	Ardirejo
			Pataan	Pataan
			Kedungwangi	Kedungwangi
				Pasarlegi
				Sumbersari
		Perdesaan	Tenggiring	Tenggiring
			Sidokumpul	Sidokumpul
			Wateswinangun	Wateswinangun
			Candisari	Candisari

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Nogojatisari	Nogojatisari
			Pasarlegi	Semampirejo
			Sumbersari	Garung
			Semampirejo	Jatipandak
			Garung	Pamotan
			Jatipandak	Selorejo
			Pamotan	Kretenggan
			Selorejo	Barurejo
			Kretenggan	Gempolmanis
			Barurejo	Kedungbanjar
			Gempolmanis	Wonorejo
			Kedungbanjar	Wudi
			Wonorejo	Sekidang
			Wudi	
			Sekidang	
6	**MANTUP**	**Perkotaan**	Mantup	Mantup
			Tugu	Tugu
		Perdesaan	Tunggunjager	Tunggunjager
			Sukobendu	Sukobendu
			Kedungsoko	Kedungsoko
			Sumberdadi	Sumberdadi
			Keduk Bembem	Keduk Bembem
			Sidomulyo	Sidomulyo
			Sukosari	Sukosari
			Mojosari	Mojosari
			Rumpuk	Rumpuk
			Pelabuhanrejo	Pelabuhanrejo
			Sumberkerep	Sumberkerep
			Sumberagung	Sumberagung
			Sumberbendo	Sumberbendo
7	**KEMBANGBAHU**	**Perkotaan**	Kembangbahu	Kembangbahu
			Kaliwetas	Kaliwetas
		Perdesaan	Lopang	Lopang
			Mangkujajar	Mangkujajar
			Kedungsari	Kedungsari
			Doyomulyo	Doyomulyo
			Sidomukti	Sidomukti
			Sukosongko	Sukosongko
			Kedungmegarih	Kedungmegarih
			Puter	Puter
			Pelang	Pelang

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Gintungan	Gintungan
			Katemas	Katemas
			Dumplagung	Dumplagung
			Moronyamplung	Moronyamplung
			Topoagung	Topoagung
			Maor	Maor
			Randubener	Randubener
8	**SUGIO**	**Perkotaan**	Sugio	Sugio
			Lebakadi	Lebakadi
			Sepenuh	Sepenuh
		Perdesaan	Kalitangeh	Kalitangeh
			Pangkatrejo	Pangkatrejo
			Bedingin	Bedingin
			Jubelkidul	Jubelkidul
			Jubellor	Jubellor
			Bakalrejo	Bakalrejo
			Kedungbanjar	Kedungbanjar
			Kedungdadi	Kedungdadi
			Gondanglor	Gondanglor
			Deketagung	Deketagung
			Sidorejo	Sidorejo
			Daliwilangun	Daliwilangun
			Lawanganagung	Lawanganagung
			German	German
			Sidobogem	Sidobogem
			Lebakadi	Lebakadi
			Karangsambigalih	Karangsambigalih
			Kalipang	Kalipang
			Sekarbagus	Sekarbagus
9	**KEDUNGPRING**	**Perkotaan**	Kedungpring	Kedungpring
			Tlanak	Tlanak
			Mekanderejo	Mekanderejo
			Kandangrejo	Kandangrejo
				Warungering
				Kalen
		Perdesaan	Jatidjorok	Jatidjorok
			Gunungrejo	Gunungrejo
			Dradahblumbang	Dradahblumbang
			Majenang	Majenang
			Warungering	Mlati
			Kalen	Tenggerejo

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Mlati	Nglebur
			Tenggerejo	Mojodadi
			Nglebur	Sidobangun
			Mojodadi	Blawirejo
			Sidobangun	Karangcangkring
			Blawirejo	Sukomalo
			Karangcangkring	Sidomlangean
			Sukomalo	Maindu
			Sidomlangean	Banjarrejo
			Maindu	Sumengko
			Banjarrejo	Kradenanrejo
			Sumengko	
			Kradenanrejo	
10	**MODO**	**Perkotaan**	Mojorejo	Mojorejo
			Pule	Pule
		Perdesaan	Jegreg	Jegreg
			Sumberagung	Sumberagung
			Yungyang	Yungyang
			Sidodowo	Sidodowo
			Jatipayak	Jatipayak
			Kacangan	Kacangan
			Kedungrejo	Kedungrejo
			Kedunglerep	Kedunglerep
			Sambangrejo	Sambangrejo
			Medalem	Medalem
			Kedungpengaron	Kedungpengaron
			Kedungwaras	Kedungwaras
			Sidomulyo	Sidomulyo
			Sambungrejo	Sambungrejo
			Nguwuk	Nguwuk
11	**BABAT**	**Perkotaan**	Babat	Babat
			Banaran	Banaran
			Bedahan	Bedahan
			Plaosan	Plaosan
			Sogo	Sogo
			Karangkembang	Karangkembang
			Puncakwangi	Puncakwangi
			Gedongkulon	Gedongkulon
		Perdesaan	Kebalanpelang	Kebalanpelang
			Gembong	Gembong
			Kuripan	Kuripan

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Bulumargi	Bulumargi
			Sambangan	Sambangan
			Keyongan	Keyongan
			Patihan	Patihan
			Datinawong	Datinawong
			Sumurgenuk	Sumurgenuk
			Truni	Truni
			Trepan	Trepan
			Kebalanbondo	Kebalanbondo
			Moropelang	Moropelang
			Tritunggal	Tritunggal
			Kebonagung	Kebonagung
12	**PUCUK**	**Perkotaan**	Pucuk	Pucuk
			Kesambi	Kesambi
			Warukulon	Warukulon
			Waruwetan	Waruwetan
			Paji	Paji
			Karangtinggil	Karangtinggil
		Perdesaan	Kedali	Kedali
			Tanggungan	Tanggungan
			Sumberejo	Sumberejo
			Plososetro	Plososetro
			Wanar	Wanar
			Gempolpading	Gempolpading
			Bogoharjo	Bogoharjo
			Padengangloso	Padengangloso
			Ngambeng	Ngambeng
			Cungkup	Cungkup
			Babatkumpul	Babatkumpul
13	**SUKODADI**	**Perkotaan**	Sukodadi	Sukodadi
			Kebonsari	Kebonsari
				Sidogembul
				Surabayan
				Sukolilo
		Perdesaan	Gedangan	Gedangan
			Banjarrejo	Banjarrejo
			Menongo	Menongo
			Plumpang	Plumpung
			Sukolilo	Madulegi
			Madulegi	Siwalanrejo
			Siwalanrejo	Sumberagung

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Sumberagung	Baturono
			Baturono	Sumberaji
			Sumberaji	Kedung Rembug
			Kedung Rembug	Balungtawun
			Balungtawun	Sugihrejo
			Sugihrejo	Bandungsari
			Bandungsari	Tlogorejo
			Tlogorejo	Pajangan
			Surabayan	
			Sidogembul	
			Pajangan	
14	**TIKUNG**	**Perkotaan**	Bakalanpule	Bakalanpule
			Jotosanur	Jotosanur
				Tambakrigadung
				Jatirejo
				Guminingrejo
				Takaranklating
				Wonokromo
				Pengumbulanadi
				Dukuhagung
		Perdesaan	Dukuhagung	Kelorarum
			Jatirejo	Soko
			Tambakrigadung	Balongwangi
			Kelorarum	Botoputih
			Soko	
			Balongwangi	
			Wonokromo	
			Takeranklating	
			Botoputih	
			Pengumbulanadi	
			Guminingrejo	
15	**SARIREJO**	**Perkotaan**	Dermolemahbang	Dermolemahbang
			Gempoltukmloko	Gempoltukmloko
		Perdesaan	Tambakmenjangan	Tambakmenjangan
			Sarirejo	Sarirejo
			Kedungkumpul	Kedungkumpul
			Sumberjo	Sumberjo
			Simbatan	Simbatan
			Beru	Beru

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Canggah	Canggah
16	DEKET	Perkotaan	Deketkulon	Deketkulon
			Deketwetan	Deketwetan
			Rejosari	Rejosari
				Sidorejo
				Sugihwaras
		Perdesaan	Srirade	Srirade
			Sidobinangun	Sidobinangun
			Sidorejo	Dlanggu
			Dlanggu	Pandanpancur
			Pandanpancur	Plosobuden
			Plosobuden	Rejotengah
			Rejotengah	Dinoyo
			Sugihwaras	Babatagung
			Dinoyo	Tukkerto
			Babatagung	Weduni
			Tukkerto	Sidomulyo
			Weduni	Laladan
			Sidomulyo	
			Laladan	
17	GLAGAH	Perkotaan	Glagah	Glagah
			Margoanyar	Margoanyar
		Perdesaan	Kentong	Kentong
			Wangen	Wangen
			Dukuhtunggal	Dukuhtunggal
			Bapuhbandung	Bapuhbandung
			Mendogo	Mendogo
			Menganti	Menganti
			Rayunggumuk	Rayunggumuk
			Bapuhbaru	Bapuhbaru
			Jatirenggo	Jatirenggo
			Bangkok	Bangkok
			Meluntur	Meluntur
			Tanggungprigel	Tanggungprigel
			Sudangan	Sudangan
			Karanggung	Karanggung
			Duduklor	Duduklor
			Medang	Medang
			Began	Began
			Gempulpendowo	Gempulpendowo
			Soko	Soko

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Morocalan	Morocalan
			Pasi	Pasi
			Konang	Konang
			Panggang	Panggang
			Wedoro	Wedoro
			Meluwur	Meluwur
			Karangturi	Karangturi
			Wonorejo	Wonorejo
18	**KARANGBINANGUN**	**Perkotaan**	Sambopinggir	Sambopinggir
			Windu	Windu
			Bogobabadan	Bogobabadan
			Karangbinangun	Karangbinangun
		Perdesaan	Blawi	Blawi
			Pendowolimo	Pendowolimo
			Watangpanjang	Watangpanjang
			Banjarejo	Banjarejo
			Mayong	Mayong
			Sukorejo	Sukorejo
			Sowowinangun	Sowowinangun
			Karanganom	Karanganom
			Ketapangtelu	Ketapangtelu
			Baranggayam	Baranggayam
			Priyoso	Priyoso
			Kuro	Kuro
			Gawerejo	Gawerejo
			Putatbangah	Putatbangah
			Banyurip	Banyurip
			Waruk	Waruk
			Palangan	Palangan
19	**TURI**	**Perkotaan**	Sukoanyar	Sukoanyar
			Sukorejo	Sukorejo
		Perdesaan	Tawangrejo	Tawangrejo
			Tambakploso	Tambakploso
			Balun	Balun
			Gedongboyontung	Gedongboyontung
			Geger	Geger
			Ngujungrejo	Ngujungrejo
			Bambang	Bambang
			Kemlagigede	Kemlagigede
			Turi	Turi
			Keben	Keben

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Wangunrejo	Wangunrejo
			Badurame	Badurame
			Karangwedoro	Karangwedoro
			Putatkumpul	Putatkumpul
			Kemlangilor	Kemlangilor
			Pomahanjanggan	Pomahanjanggan
			Kepudibener	Kepudibener
20	**KALITENGAH**	**Perkotaan**	Kalitengah	Kalitengah
			Butungan	Butungan
			Dibee	Dibee
		Perdesaan	Pengangsalan	Pengangsalan
			Pucangro	Pucangro
			Pucangtelu	Pucangtelu
			Bojoasri	Bojoasri
			Keluran	Keluran
			Canditunggal	Canditunggal
			Somosari	Somosari
			Jelakcatur	Jelakcatur
			Tiwet	Tiwet
			Blajo	Blajo
			Gambuhan	Gambuhan
			Cluring	Cluring
			Lukrejo	Lukrejo
			Mungli	Mungli
			Kediren	Kediren
			Sugihwaras	Sugihwaras
			Tanjungmekar	Tanjungmekar
21	**KARANGGENENG**	**Perkotaan**	Karanggeneng	Karanggeneng
			Mertani	Mertani
			Sumberwudi	Sumberwudi
		Perdesaan	Banjarmadu	Banjarmadu
			Karanganyar	Karanganyar
			Sungelebak	Sungelebak
			Kendalkemlangi	Kendalkemlangi
			Latukan	Latukan
			Karangwungu	Karangwungu
			Jagran	Jagran
			Kawistolegi	Kawistolegi
			Sonoadi	Sonoadi
			Batengputih	Batengputih
			Guci	Guci

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Kaligerman	Kaligerman
			Karangrejo	Karangrejo
			Tracal	Tracal
			Prijekngablag	Prijekngablag
22	**SEKARAN**	**Perkotaan**	Bulutengger	Bulutengger
			Siman	Siman
			Miru	Miru
		Perdesaan	Kebalankulon	Kebalankulon
			Kudikan	Kudikan
			Kembangan	Kembangan
			Manyar	Manyar
			Sungegeneng	Sungegeneng
			Sekaran	Sekaran
			Jugo	Jugo
			Besur	Besur
			Tresono	Tresono
			Latek	Latek
			Bugel	Bugel
			Karang	Karang
			Porodeso	Porodeso
			Moro	Moro
			Ngarum	Ngarum
			Titik	Titik
			Kendal	Kendal
			Kenting	Kenting
23	**MADURAN**	**Perkotaan**	Maduran	Maduran
			Pangean	Pangean
		Perdesaan	Gumantuk	Gumantuk
			Klagensrampat	Klagensrampat
			Parengan	Parengan
			Pangkarejo	Pangkarejo
			Duriwetan	Duriwetan
			Taji	Taji
			Brumbun	Brumbun
			Siwuran	Siwuran
			Jangkungsomo	Jangkungsomo
			Kanugrahan	Kanugrahan
			Ngayung	Ngayung
			Turi	Turi
			Primgoboyo	Primgoboyo
			Gedangan	Gedangan

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
			Blumbang	Blumbang
24	LAREN	Perkotaan	Gampangsejati	Gampangsejati
			Laren	Laren
		Perdesaan	Bulutigo	Bulutigo
			Pelangwot	Pelangwot
			Taman Prijek	Taman Prijek
			Tejoasri	Tejoasri
			Bulubrangsi	Bulubrangsi
			Brangsi	Brangsi
			Durikulon	Durikulon
			Centini	Centini
			Keduyung	Keduyung
			Pesanggrahan	Pesanggrahan
			Jabung	Jabung
			Dating	Dating
			Gelap	Gelap
			Mojoasem	Mojoasem
			Siser	Siser
			Karangtawar	Karangtawar
			Godok	Godok
			Karangwungulor	Karangwungulor
25	SOLOKURO	Perkotaan	Solokuro	Payaman
			Payaman	Takeharjo
			Tenggulun	Dagan
				Banyubang
		Perdesaan	Tebluru	Solokuro
			Sugihan	Tenggulun
			Dadapan	Tebluru
			Takeharjo	Sugihan
			Banyubang	Dadapan
			Dagan	Bluri
			Bluri	
26	PACIRAN	Perkotaan	Paciran	Paciran
			Kandangsemangkon	Kandangsemangkon
			Blimbing	Blimbing
				Tunggul
				Kranji
				Banjarwati
				Kemantren
				Sidokelar
				Drajat

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan Berdasarkan RTRW	Desa/ Kelurahan Berdasarkan Hasil Analisa
		Perdesaan	Kranji	Weru
			Weru	Sendangagung
			Sendangagung	Sendangduwur
			Tunggul	Tlogosadang
			Sendangduwur	Paloh
			Drajat	Warulor
			Banjarwati	Sumurgayam
			Kemantren	Sidokumpul
			Sidokelar	
			Tlogosadang	
			Paloh	
			Warulor	
			Sumurgayam	
			Sidokumpul	
27	**BRONDONG**	**Perkotaan**	Brondong	Brondong
			Sedayulawas	Sedayulawas
				Brengkok
		Perdesaan	Labuhan	Labuhan
			Brengkok	Sumberagung
			Sendangharjo	Sendangharjo
			Lembor	Lembor
			Tlogoretno	Tlogoretno
			Sidomukti	Sidomukti
			Lohgung	Lohgung
			Sumberagung	

Sumber : Hasil Analisa 2017

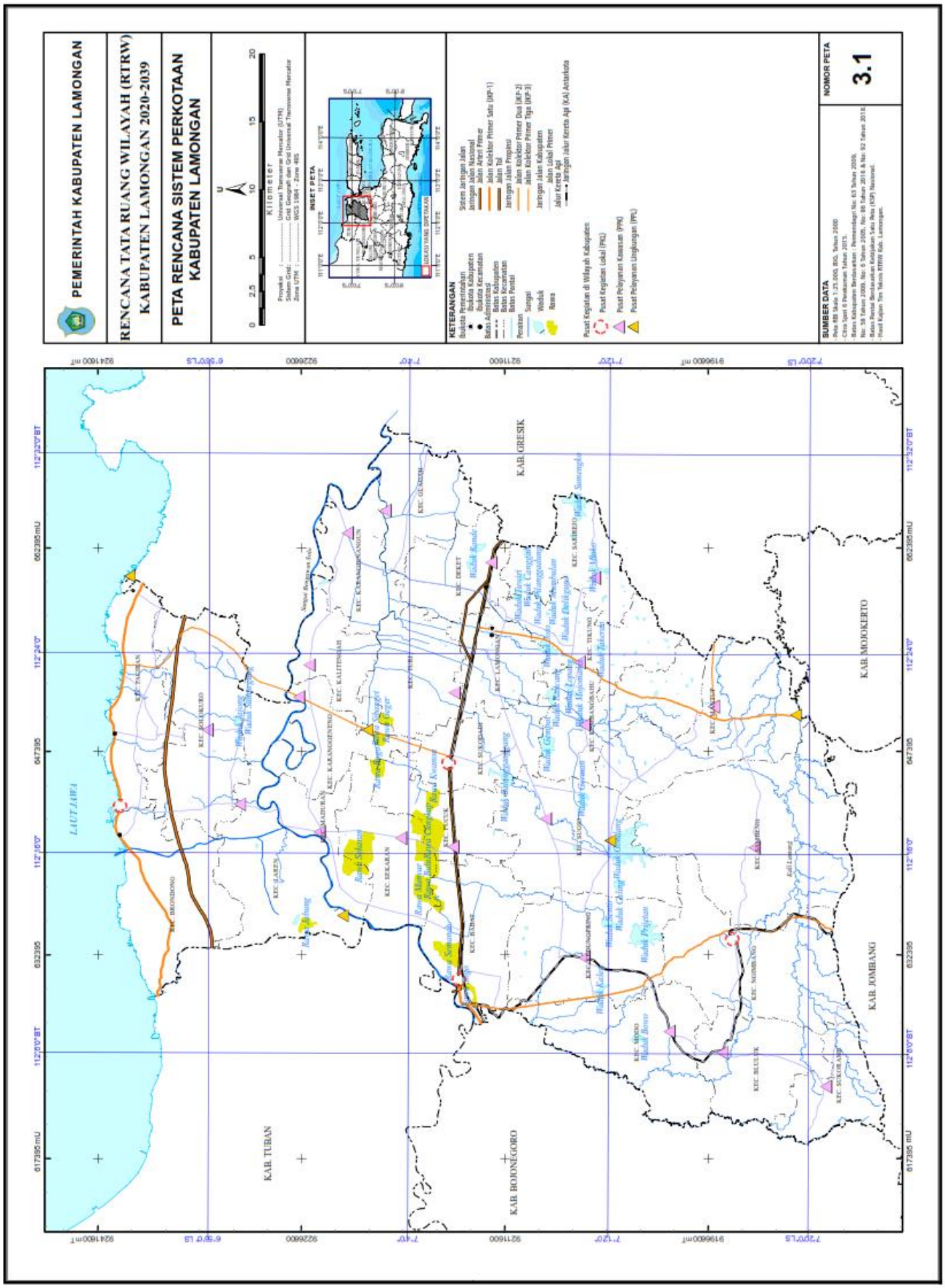
3.4. WILAYAH PENGEMBANGAN

Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan pusat kegiatan perkotaan masing-masing. Dalam lingkup Kabupaten Lamongan, Kota Lamongan menjadi pusat bagi wilayah pengembangan (WP) Lamongan

Setiap perkotaan yang termasuk dalam PKN dan PKL akan menjadi pusat wilayah pengembangan (WP). Berdasarkan sistem perwilayahan tersebut maka Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27 kecamatan dibagi menjadi lima wilayah pengembangan (WP), atas dasar orientasi pergerakan terhadap pusat wilayah pengembangan (WP), tersedianya akses penunjang ke pusat wilayah pengembangan (WP), kesamaan terhadap potensi wilayah, mengurangi kesenjangan wilayah dan karakter penduduk.

Masing-masing pusat wilayah pengembangan (WP) akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-

masing. Kemudian Berdasarkan pusat kegiatan tersebut kemudian kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah pengembangan (WP) tersebut ditentukan berdasarkan orientasi pergerakan pada tiap-tiap pusat kegiatan tersebut.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA SISTEM PERKOTAAN KABUPATEN LAMONGAN
KILOMETER
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
3.1
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN
LAUT JAWA

Adapun sistem perwilayahan di Kabupaten Lamongan beserta fungsi, peran dan arahan kegiatannya :

A. Wilayah Pengembangan I (WP I) Lamongan

WP Lamongan meliputi Kecamatan Lamongan, Kecamatan Dekat, Kecamatan Glagah, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Karangbinangun dan Kecamatan Kembangbahu, dengan pusat di Perkotaan Lamongan. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah:

1. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten;
2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;
3. Sebagai pusat kesehatan skala kabupaten;
4. Sebagai pusat pendidikan;
5. Sebagai pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten;
6. Sebagai pusat peribadatan kabupaten;
7. Sebagai pusat perlindungan sumber daya air (Sungai Bengawan Solo).

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan kegiatan pelayanan umum;
2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
3. Pengembangan kegiatan kesehatan (Rumah Sakit, praktek dokter, apotek, puskesmas);
4. Pengembangan pendidikan;
5. Pengembangan transportasi darat;
6. Pengembangan kegiatan olahraga dan kesenian skala kabupaten;
7. Pengembangan kegiatan peribadatan.

Serta Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan Pertambangan;
2. Pengembangan Pertanian;
3. Pengembangan Peternakan;
4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat),
5. Pengembangan Kegiatan Perikanan; serta
6. Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya.

Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan adalah :

Pada WP I dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat pendidikan, pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten, serta sebagai pengembangan pertambangan, pertanian, peternakan, kegiatan industri (kerajinan

rakyat), kegiatan perikanan dan kegiatan pariwisata beserta sarana/prasarana penunjangnya dan permukiman.

B. Wilayah Pengembangan II (WP II) Paciran-Brondong

WP Paciran-Brondong ini meliputi Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Paciran dan Brondong. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah:

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;
2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
3. Sebagai pusat industri besar dan strategis nasional;
4. Sebagai pusat transportasi nasional;
5. Sebagai pengembangan kawasan minapolitan;
6. Sebagai pusat pelabuhan dan industri perikanan skala regional dan nasional;
7. Sebagai pusat kegiatan pariwisata skala regional;
8. Sebagai pusat Pelayanan pelabuhan barang skala regional;
9. Sebagai pusat pengembangan pendidikan.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan;
2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
3. Pengembangan Industri besar;
4. Pengembangan transportasi darat;
5. Pengembangan kegiatan pelabuhan dan perikanan laut;
6. Pengembangan kegiatan wisata skala Regional; serta
7. Pengembangan kegiatan pendidikan.

Serta Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan kegiatan industri (Kerajinan Rakyat);
2. Pengembangan Pertanian;
3. Pengembangan Peternakan;
4. Pengembangan Pertambangan;
5. Pengembangan Kehutanan;
6. Perlindungan kawasan lindung (mangrove).

Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan adalah :

Pada WP II dengan fungsi pengembangan sebagai pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri besar dan strategis nasional, pusat transportasi nasional, pusat pelabuhan dan industri perikanan skala regional dan nasional, pusat kegiatan pariwisata skala regional,

pusat pelayanan pelabuhan barang skala regional, pusat pengembangan pendidikan, serta sebagai pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat), pertanian, peternakan, pertambangan dan permukiman.

C. Wilayah Pengembangan III (WP III) Babat

WP Babat meliputi Kecamatan Babat, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Pucuk dan Kecamatan Kedungpring, dengan pusat di Perkotaan Babat. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah :

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;
2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Regional;
3. Sebagai pusat pengembangan Industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian);
4. Sebagai pusat Perlindungan Sumberdaya Air (Aliran Sungai Bengawan Solo);
5. Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Regional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah ::

1. Pengembangan pelayanan umum tingkat Kecamatan;
2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala Kabupaten dan Regional;
3. Pengembangan transportasi darat;
4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian);
5. Perlindungan Kawasan Konservasi Sumberdaya Air (Aliran Sungai Bengawan Solo); serta
6. Pengembangan Transportasi Darat (Jalan dan Kereta Api).

Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan Pertanian;
2. Pengembangan Peternakan; serta
3. Pengembangan pariwisata.

Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan adalah :

Pada WP III dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pengembangan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian), pusat perlindungan sumberdaya air (aliran sungai bengawan solo), pengembangan jaringan transportasi darat regional, serta sebagai pengembangan kegiatan pertanian, kehutanan dan pariwisata serta permukiman.

D. Wilayah Pengembangan IV (WP IV) Sukodadi

WP Sukodadi ini meliputi Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah dan Kecamatan Sugio, dengan pusat

pelayanan di Perkotaan Sukodadi. Fungsi dan peranan Perkotaan sebagai pusat WP ini adalah :

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;
2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
3. Sebagai pusat pelayanan umum;
4. Sebagai Pusat Pengembangan kegiatan industri;
5. Sebagai Pusat kegiatan Pariwisata;
6. Sebagai Pusat kegiatan pertanian; serta
7. Pengembangan jaringan Transportasi skala regional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan;
2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. Pengembangan transportasi darat;
4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat; industri pengolahan hasil ternak dan pertanian);
5. Pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya;
6. Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan); serta
7. Pengembangan transportasi darat.

Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan Pertanian;
2. Pengembangan Peternakan;
3. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat),
4. Pengembangan transportasi;
5. Pengembangan kegiatan pariwisata.

Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan adalah :

Pada WP IV dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat perdagangan (regional) dan jasa-jasa, pusat pelayanan umum, pusat pengembangan kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan pertanian, serta sebagai pengembangan pertanian, peternakan, kegiatan industri (kerajinan rakyat), transportasi, kegiatan pariwisata ,pengembangan jaringan transportasi skala regional dan permukiman.

E. Wilayah Pengembangan V (WP V) Ngimbang

WP Ngimbang ini terdiri dari Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Mantup dan Kecamatan

Modo, dengan pusat pelayanan berada di Kacamatan Ngimbang. Fungsi dan peranan Perkotaan sebagai pusat WP ini adalah:

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;
2. Sebagai pusat kegiatan pertanian;
3. Sebagai pusat pengembangan Agropolitan; serta
4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian).

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan dan kabupaten;
2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. Pengembangan transportasi darat;
4. Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
5. Pengembangan kegiatan agribisnis; serta
6. Pengembangan kehutanan.

Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan);
2. Pengembangan Peternakan;
3. Pengembangan kegiatan industri(kerajinan rakyat);
4. Pengembangan pariwisata;
5. Pengembangan kehutanan; serta
6. Pengembangan transportasi.

Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan adalah :

Pada WP V dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat kegiatan pertanian, pusat pengembangan agropolitan, pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian), serta sebagai pengembangan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, kegiatan industri(kerajinan rakyat), pariwisata, kehutanan, transportasi dan permukiman.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana Wilayah Pengembangan di Kabupaten Lamongan beserta fasilitas yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 3.2, Peta 3.2 Peta Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Lamongan. Sedangkan rencana struktur ruang dapat dilihat pada Peta 3.3.

Tabel 3.2. Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan di Kabupaten Lamongan

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
1	- WP Lamongan	- Pusat pelayanan di (Perkotaan Lamongan)	- Perdagangan Skala Regional, Meliputi Pasar Regional, Pasar Induk dan umum, Mall/Department Strore, Pusat Perbelanjaan, Ruko.	- Jasa Skala Kabupaten, antara lain Bank, Hotel, Show Room, Pusat Informasi, Jasa Notariat, Money Changer.	- SMU - Sekolah Kejuruan - Akademi/ Pendidikan Tinggi.	- Pusat Kesehatan Skala Kabupaten, : RSU kelas B, dgn kemampuan perawatan khusus/ spesialis.	- Pusat Peribadatan, meliputi Masjid, Gereja.	- Pusat Perkantoran, meliputi Perkantoran Pemerintah dan Swasta.	- Pusat Olahraga berupa Stadion, Taman Kota, GOR, dll skala kabupaten	- Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Peternakan dan industri

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
		- Deket	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan,seperti Masjid, Musholla, Pondok Pesantren.	- Perkantoran Skala Kecamatan.	- Lapangan Olahraga skala Nasional.	
		- Glagah	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan, seperti Masjid, Musholla.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Lapangan Olahraga skala Kecamatan	

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
				(Hotel, Losmen), Uji Kendaraan Bermotor.						
		- Tikung	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan, meliputi masjid.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Lapangan Olahraga skala Naional	- Industri pengolahan hasil peternakan, pengelolaan limbah peternakan, Industri Pertambangan.

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
		- Sarirejo	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan, seperti Masjid, Musholla.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Lapangan Olahraga skala Kecamatan	- Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, pengolahan limbah peternakan .
		- Karangbinangun	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan/Lokal, seperti Masjid, Musholla.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Lapangan Olahraga skala kecamatan	

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
				(Motel, Losmen).						
		- Kembangbahu	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen), Balai latihan kerja.	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan/Lokal, seperti Masjid, Musholla.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Lapangan Olahraga skala kecamatan	- pertanian tanaman pangan, Industri Tempe, Krupuk, Kerajinan rakyat), Perkebunan Rakyat, Peternakan ayam potong, sapi dan kambing.
2	- WP Paciran-Brondong	- Brondong	- Perdagangan Skala Kabupaten,	- Perbankan, penginapan (Losmen,	- SMU, SMK, Diploma	- Puskesmas Rawat Inap,	- peribadatan skala kecamata	- Perkantoran pemerintah	- Fasilitas olahraga Skala	- Perikanan Tangkap Lamongan ;

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
			meliputi Pasar Regional, Pasar Induk/Pasar Khusus hasil perikanan tangkap, Tepmat Pelelangan Ikan, Pusat Perbelanjaan, Ruko.	hotel), money changer, pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.		Rumah Sakit.	n, seperti Masjid.	skala kecamatan dan swasta (kantor pos dan giro)	Kecamatan, TPI Brondong, Upacara Petik Laut dan Monumen van Der Wijck	- Indusri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; - Sistem kelautan dan pengembangan kawasan perdesaan.
		- Paciran	- Perdagangan Skala Kebupaten, meliputi Pertokoan, Pasar, Ruko;	- Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan/Lokal, seperti Masjid,	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan, Wisata Maharani	- Indusri/Pemasaran Hasil Perikanan (Industri Hasil Perikanan), Pusat

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
			- Industri Besar Dan Strategis Nasional (Kawasan Industri); - Industri Perikanan (Industri Pengolah Ikan, Pasar Ikan).	Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).			Musholla, Gereja, Pure.		Zoo dan Goa, Wisata Bahari Lamongan (WBL), Makam Sendang Duwur, Makam Sunan Drajad, Sumber Mata Air Panas Tepanas, TPI Kranji, Lamongan Integtaed	Pemasaran Perikanan - Industri besar kawasan perkotaan. - Pusat pariwisata Lamongan bagian Utara;

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
									Shorebase (LIS)	
		- Solokuro	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa, ekonomi skala kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas rawat inap	- Peribadatan skala kecamatan/lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.	- Perkantoran skala kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
		- Laren	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa, ekonomi skala kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam,	- SMU, SMK	- Puskesmas rawat inap	- Peribadatan skala kecamatan/lokal, seperti Masjid, Musholla,	- Perkantoran skala kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Pertanian tanaman pangan (padi, jagung), holtikultura (pisang), peternakan

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
				Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).			Gereja, Pure.			(sapi, kambing, unggas).
3	- WP Babat	- Babat	- Pusat Perdagangan Skala Kabupaten, meliputi Pasar Regional, Pasar Induk/Pasar Khusus, Pusat Perbelanjaan, Ruko.	- Jasa, meliputi Bank, Hotel, Show Room, Pusat Informasi, Jasa Notariat, Money Changer.	- Akademi (Sekolah Kejuruan) dan Pendidikan Tinggi.	- Kesehatan Skala Kabupaten, meliputi Rumah Sakit Umum kelas B, Rumah Sakit Swasta dengan Kemampuan Perawatan Khusus.	- Peribadatan Kabupaten, meliputi Masjid, Islamic Centre.	- Perkantoran Kabupaten, meliputi Perkantoran Pemerintah dan Swasta.	- Lapangan Olahraga, Sumber Air Panas Puncakwangi, Babat Barrage.	- Pertanian tanaman pangan.

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
		- Sekaran	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Pertanian tanaman pangan, perikanan darat..

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
		- Maduran	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Obyek Wisata Makam Joko Tingkir	- Pertanian tanaman pangan, perikanan darat..
		- Pucuk	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla,	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian - Industri Pengolah Hasil Perkebunan Utama.

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
				(Motel, Losmen).						
		- Kedungpring	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan dan koperasi skala besar yang menyediakan bibit untuk pertanian dan perkebunan skala regional.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen) dan Balai Latihan Kerja.	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Waduk prijaten, rest area dan sentra pembibitan dan penelitian tanaman hortikultura	- Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian dan tanaman hortikultura (Industri Hasil Pertanian)
4	- WP Sukodadi	- Sukodadi	- Perdagangan skala kecamatan, meliputi	- Perbankan, penginapan (Losmen, hotel), money	- SMU, SMK, Diploma dan	- Puskesmas Rawat Inap Rumah Sakit tipe	- Peribadatan skala kecamatan, seperti	- Perkantoran pemerintah skala	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- .

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
			Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	changer, pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.	Pendidikan Tinggi.	C, RS Bersalin	Masjid, Gereja, Pure.	kecamatan dan swasta (kantor pos dan giro)		
		- Turi	- Pasar, toko, Pasar agro.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan dan Wisata Edukasi Religi (Desa Talun)	- Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian) - Pusat sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan. - Pusat Indusri/Pemasaran Hasil

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
										perikanan (industri pengolahan tepung yang bahan baku berasal dari ikan)
		- Karanggeng eng	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian).

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
		- Sugio	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas rawat inap	- Peribadatan Skala Kecamatan/Lokal, seperti masjid, musholla, gereja. Pure	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Waduk Gondang	- Industri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri/hasil Pertanian)
		- Kalitengah	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	

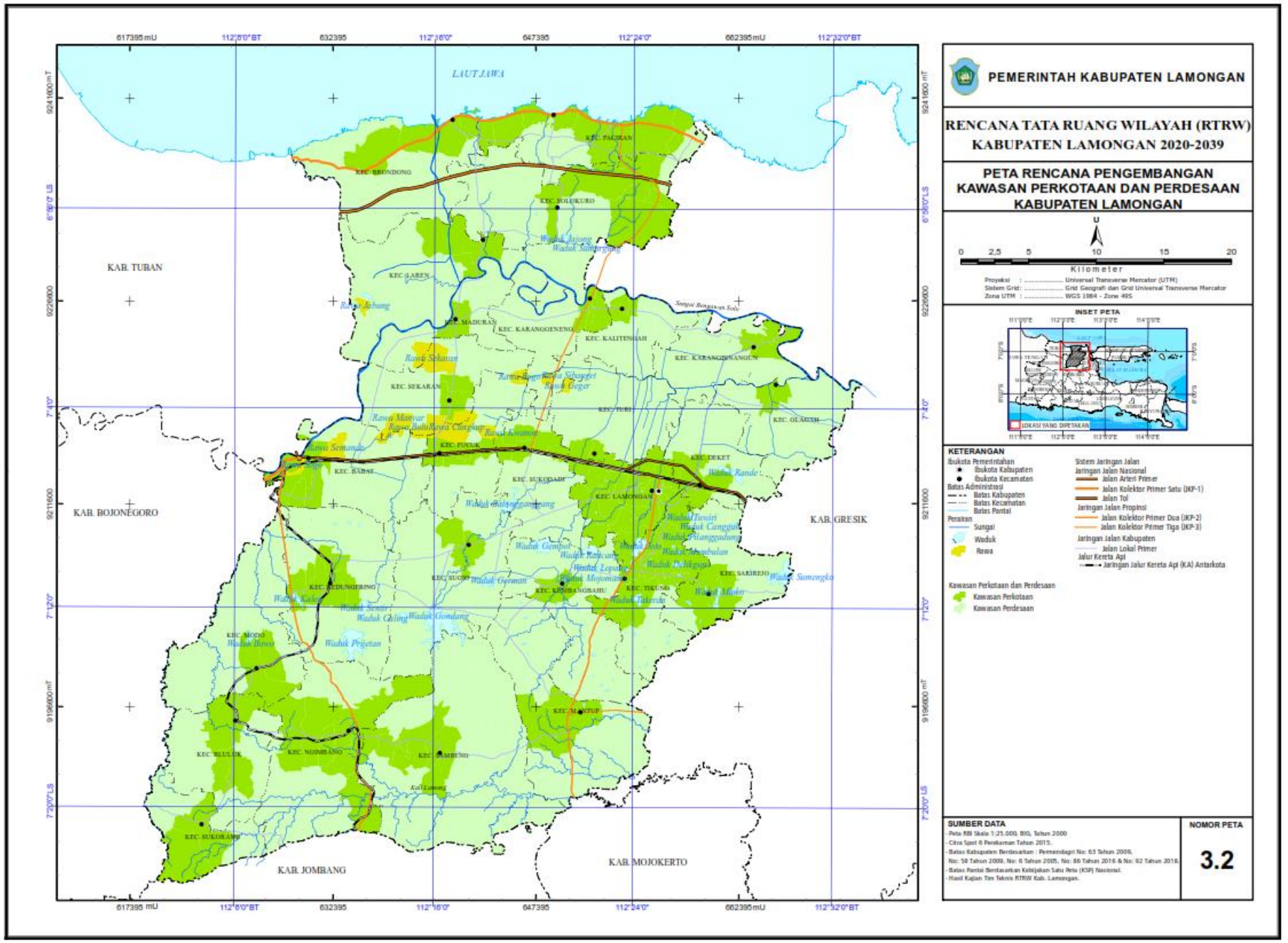
No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
				(Hotel, Losmen)						
5	- WP Ngimbang	- Ngimbang	- Perdagangan skala regional, seperti Pasar lokas, pasar agro, Pertokoan, Ruko, dan lain-lain.	- Penginapan (motel, hotel), jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.	- SMU, SMK, Perguruan Tinggi	- Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit C	- Peribadatan skala kecamatan, seperti Masjid, Gereja, Pure.	- Perkantoran Pemerintah dan swasta skala Kecamatan (kantor pos dan giro)	- Hiburan, Sentra pembibitan tanaman hortikultur adan rekreasi skala Kabupaten seperti kawasan perkemahan, Makam Nyai Putri Andongsari dan Upacara Sanggring,	- Industri pengolahan hasil tanaman holtikultura - Pengembangan pusat peternakan unggulan pada kawasan pusat produksi hasil ternak.

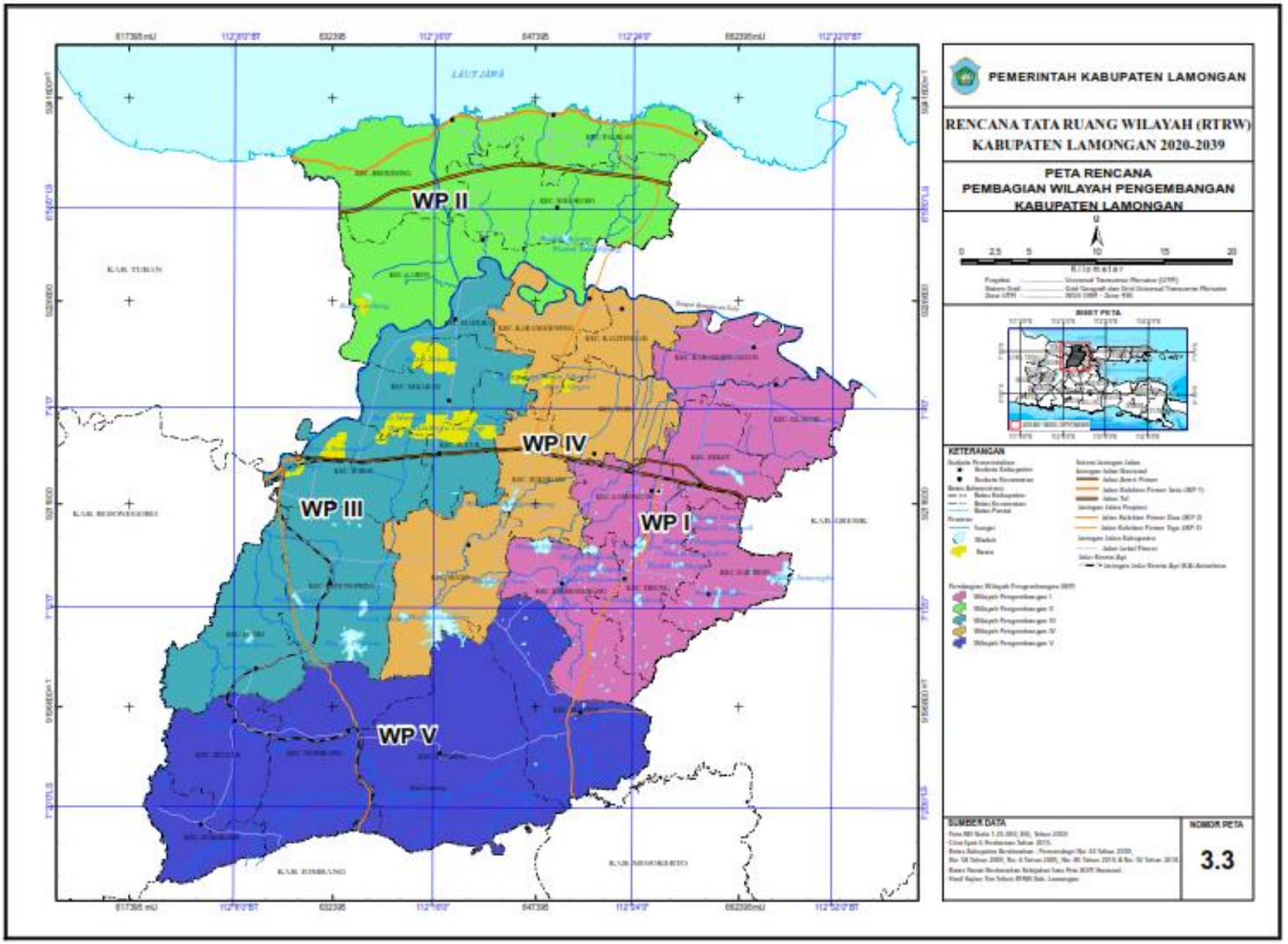
No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
		- Bluluk	- Perdagangan dan jasa skala regional, seperti Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan, dan lain-lain.	- Perbankan, money changer, pegadaian, dan jasa umum lainnya.	- SMU, SMK, Diploma	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan skala kecamatan, seperti Masjid, Gereja, Pure.	- Perkantoran Pemerintah dan swasta skala Kecamatan - lokal	- Hiburan, kawasan outbond dan rekreasi skala lokal, Upacara Sedekah Bumi Kaulan - Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Industri pengolahan/pemasaran hasil pertanian dan industri Perkebunan (tembakau) - Pengembangan pusat peternakan unggulan pada kawasan pusat produksi hasil ternak. - Pengembangan tanaman hortikultura
		- Sukorame	- Pasar, Pertokoan,	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan,	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamata	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga	- Indusri/ Pemasaran Hasil

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
			Ruko, Pasar Hewan	seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).			n / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.		Skala Kecamatan	Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian - Industri pengolah hasil perkebunan utama. - Sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan.

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
		- Mantup	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan	- Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
		- Modo	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan	- Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla,	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian

No	wilayah pengembangan (WP)	Kecamatan Pendukung wilayah pengembangan (WP)	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan							
			Perdagangan	Jasa	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Rekreasi - Olahraga & Wisata	Industri dan Potensi Lain
				(Motel, Losmen).			Gereja, Pure.			
		- Sambeng	- Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.	- Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).	- SMU, SMK	- Puskesmas Rawat Inap	- Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.	- Perkantoran Skala Kecamatan	- Fasilitas olahraga Skala Kecamatan	- Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
Kawasan Perkotaan
Kawasan Perdesaan
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009,
No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.2
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. KEMLAGI
KEC. SUGIO
KEC. SAKIREJO
KEC. TIKUNG
KEC. MANTUP
KEC. SUKODADI
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
617395 mU
632395
647395
662395 mU
112°8'0" BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0" BT
6°55'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS
9241600 mT
9226600
9211600
9196600 mT


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
WP II
WP IV
WP III
WP I
WP V
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. SIDOARJO
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
3.3

3.5. SISTEM JARINGAN PRASARANA

Sistem jaringan prasarana wilayah yang akan dibahas sangat erat kaitannya dengan pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang utuh antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan. Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem Nasional dan Provinsi. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Lamongan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan prasarana lingkungan. Secara keseluruhan pengembangan prasarana ini akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang.

3.5.1. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Rencana sistem jaringan transportasi pada hakekatnya mengatur dan menentukan kebutuhan jaringan pergerakan dan fasilitas penunjangnya berdasarkan pertimbangan distribusi penduduk, tenaga kerja, daya dukung lahan, serta daya dukung prasarana yang ada. Sistem jaringan transportasi, meliputi:

a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

3.5.1.1. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

Rencana sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
1. Sistem jaringan jalan;
2. Sistem jaringan kereta api; dan
3. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

3.5.1.1.1. SISTEM JARINGAN JALAN

A. POLA PERGERAKAN

Tata guna lahan khususnya pusat-pusat aktivitas masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya pola pergerakan perjalan di Kabupaten Lamongan. Volume pergerakan terjadi peningkatan signifikan pada jam-jam tertentu yaitu pagi pukul 07.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB. Peningkatan volume ini terkait dengan dinamika aktivitas masyarakat. Kecenderungan pola perjalan pada pagi hari terjadi dari pinggiran kota menuju pusat kota dan terjadi sebaliknya pada sore hari. Kecenderungan pola perjalan ini terjadi karena pusat kota merupakan tempat berkumpulnya berbagai aktivitas kegiatan kota.

Pemusatan aktivitas kota pada pusat kota menyebabkan terjadinya tarikan yang cukup besar dari daerah-daerah bangkitan, yaitu permukiman. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang terjadi adalah terjadinya volume pergerakan yang melebihi kemampuan jaringan jalan yang ada karena sebagian besar pergerakan menuju pada satu tujuan yang sama dengan menggunakan jalan yang sama dan pada waktu yang bersamaan pula.

Salah satu dampak pergerakan arus lalu lintas khususnya jam sibuk (pagi, siang dan sore) adalah terjadinya kepadatan pada ruas jalan arteri primer khususnya di Perkotaan Lamongan, dan Perkotaan Babat. Selain aktivitas masyarakat perkotaan ini juga dipengaruhi oleh aktivitas pergerakan orang dan barang yang melewati jalur arteri primer menuju dan keluar Kabupaten Lamongan. Selain itu aktivitas perdagangan, perkantoran sekolah juga menjadi faktor timbulnya tundaan. Untuk itu perlu dikontrol hambatan samping yang terjadi disekitar koridor jalan tersebut.

Makin tingginya pergerakan masyarakat menuju pusat kota terutama pada poros utama jalan arteri primer perlu diimbangi dengan penciptaan bangkitan-bangkitan yang berada di bagian tengah selatan. Pusat-pusat aktivitas perdagangan, perkatoran maupun jasa serta industri masih dimungkinkan dikembangkan pada kawasan tersebut. Untuk itu diperlukan dukungan sistem jaringan jalan yang saling terhubung.

B. STATUS DAN FUNGSI JARINGAN JALAN

Sistem jaringan jalan didefinisikan sebagai prasarana untuk membantu pembangunan semua daerah dengan menghubungkan pusat-pusat pelayanan masyarakat. Agar sistem jaringan jalan dapat berfungsi secara optimal maka dilakukan pembagian peran ataupun fungsi jalan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan membagi sistem jaringan jalan dalam dua sistem yaitu Sistem Primer dan Sistem Sekunder. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.[1] Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan[2].

Jalan umum menurut fungsinya (UU. No. 38 tahun 2004, tetantang Jalan pasal 8) dikelompokkan ke dalam :

- Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
- Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

[1] Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Bab III, Pasal 7, Ayat 2.
[2] Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Bab III, Pasal 7, Ayat 3.

- Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
- Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, struktur jaringan jalan primer di Kabupaten Lamongan akan merujuk pada rencana jalan yang diamanatkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 248/Kpts/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (Jap) Dan Jalan Kolektor-1 (Jkp-1), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/128/KPTS/013/2016 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi

Tabel 3.3
Sistem Perencanaan Jaringan Jalan

HIRARKI JALAN	PERSYARATAN TEKNIS
ARTERI PRIMER Kecepatan: ≥ 60 (enam puluh) (Km/Jam) Lebar Badan jalan : ≥ 8 (delapan) m GSJ terhadap bangunan : ≥ 22 (dua puluh dua) m	• Mempunyai kapasitas lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. • Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal, untuk itu persimpangan pada jalan ini perlu diatur. • Jumlah jalan masuk ke jalan ini harus dibatasi. • Jalan ini tidak boleh terputus walaupun memasuki kota.
ARTERI SEKUNDER Kecepatan: ≥ 30 (tiga puluh) (Km/Jam) Lebar Badan jalan : ≥ 8 (delapan) m GSJ terhadap bangunan : ≥ 20 (dua puluh) m	• Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. • Pada jalan ini lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat, untuk itu persimpangan pada jalan ini harus sudah diatur

HIRARKI JALAN	PERSYARATAN TEKNIS
KOLEKTOR PRIMER Kecepatan (Km/Jam) : ≥ 40 (empat puluh) (Km/Jam) Lebar Badan jalan : ≥ 7 (tujuh) m GSJ terhadap bangunan : ≥ 17 (tujuh belas) m	• Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. • Jalan ini tidak boleh terputus walaupun memasuki desa.
KOLEKTOR SEKUNDER Kecepatan : ≥ 20 (dua puluh) (Km/Jam) Lebar Badan jalan : ≥ 7 (tujuh) m GSJ terhadap bangunan : ≥ 7 (tujuh) m	• Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. • Jalan ini tidak boleh terputus walaupun memasuki desa.
LOKAL PRIMER Kecepatan : ≥ 20 (dua puluh) (Km/Jam) Lebar Badan jalan : ≥ 6 (enam) m GSJ terhadap bangunan : ≥ 12 (dua belas) m	• Jalan ini tidak boleh terputus walaupun memasuki desa.
LOKAL SEKUNDER Kecepatan : ≥ 10 (sepuluh) (Km/Jam) Lebar Badan jalan : ≥ 5 (lima) m GSJ terhadap bangunan : ≥ 4 (empat) m	• Jalan ini untuk kendaraan beroda tiga atau lebih. • Untuk kendaraan beroda dua, gerobak atau pejalan kaki, badan jalan ≥ 3,5 (tiga setengah) m

Sumber : Diringkas dariKep.Dirjen Cipta karya Dep.PU No. 44/KPTS/CK/1999 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Prasarana Jalan Perumahan, Sistem Jaringan dan Geometri Jalan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka sistem jaringan jalan di Kabupaten Lamongan, meliputi :

(1) Jaringan jalan nasional yang ada di dalam wilayah kabupaten, meliputi:

a. Jalan Nasional sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) meliputi :
   1. batas Kabupaten Tuban - Widang;
   2. Widang/Bedahan – batas Kabupaten Lamongan;
   3. Jln. Jagung Suprapto;
   4. batas Kota Lamongan – batas Kabupaten Gresik; dan
   5. Jln. P.B. Sudirman (Lamongan).

b. Jalan Nasional sebagai Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) meliputi :
   1. Lohgung (km.93.175 – Sadang) – batas Kabupaten Lamongan; dan
   2. Widang/Bedahan – Babat.

c. Jalan Nasional sebagai Jalan Tol adalah Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro- Tuban – Lamongan –Gresik (Manyar – Bunder);

d. Jalan Lingkar Utara Lamongan yang menghubungkan Deket – Lamongan – Turi.

(2) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, meliputi :

a. Jalan Propinsi sebagai Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) meliputi:
   1. Babat – batas Kabupaten Jombang; dan
   2. Jalan Lamongrejo;
   3. Jalan Achmad Dahlan;
   4. Jalan Sunan Drajad;
   5. Jalan Raya Mantup; dan
   6. Lamongan – batas Kabupaten Mojokerto.

b. Jalan Propinsi sebagai Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) menghubungkan:
   1. Sukodadi – Karanggeneng;
   2. Karanggeneng - Peti'in;
   3. Peti'in – Banjarwati; dan
   4. Mantup – Balongpanggang (Gresik)

(3) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi :

a. Jalan Lingkar, meliputi :
   1. Jalan Lingkar Selatan Lamongan yang menghubungkan Jalan Pahlawan – Jalan Sumargo;
   2. Jalan Lingkar Selatan Babat yang menghubungkan Kecamatan Babat – Kabupaten Bojonegoro;
   3. Jalan Lingkar Selatan Pantura yang menghubungkan Kecamatan Paciran – Kecamatan Solokuro – Kecamatan Brondong; dan
   4. Jalan Lingkar Timur Lamongan yang menghubungkan Desa Bakalanpule – Desa Tambakrigadung.

b. Frontage Road yang menghubungkan Deket – Lamongan – Sukodadi – Pucuk – Babat;
c. Jalan yang menghubungkan Babat – Sekaran – Maduran – Karanggeneng – Kalitengah – Karangbinangun;
d. Jalan yang menghubungkan Pucuk – Sekaran – Maduran – Laren – Solokuro – Brondong – Paciran;
e. Jalan yang menghubungkan Deket-Karangbinangun - Dukun (Gresik)
f. Jalan yang menghubungkan Glagah – Manyar (Gresik)
g. Jalan yang menghubungkan Solokuro – Laren – Dukun (Gresik);
h. Jalan yang menghubungkan Solokuro – Paciran;
i. Jalan yang menghubungkan Tikung – Sarirejo – Benjeng (Gresik);
j. Jalan yang menghungkan Lamongan – Sukodadi;
k. Jalan yang menghubungkan Lamongan – Sukodadi – Sugio – Kedungpring;
l. Jalan yang menghubungkan Tikung -Kembangbahu – Mantup;
m. Jalan yang menghubungkan Tikung – Kembangbahu – Sugio;
n. Jalan yang menghubungkan Tikung – Mantup – Sugio – Kedungpring;

o. Jalan yang menghubungkan Modo – Kedungpring – Modo – Bluluk
p. Jalan yang menghubungkan Bluluk – Sukorame - Bojonegoro ;
q. Jalan yang menghubungkan Sukorame – Jombang;
r. Jalan yang menghubungkan Ngimbang – Bluluk;
s. Jalan yang menghubungkan Mantup - Sambeng – Ngimbang;

(4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berupa jalan desa tersebar di seluruh kecamatan.

Dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa Bagian-Bagian Jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang Milik Jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

1) Ruang Manfaat Jalan

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa Ruang Manfaat Jalan :

a. Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya;
b. Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; serta
c. Hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar (hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki), lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

2) Ruang Milik Jalan

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa:

a. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
b. Ruang Milik Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu;
c. Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
d. Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan; serta
e. Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

3) Ruang Pengawasan Jalan

Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 34/2006 tentang Jalan, dijelaskan :

a. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;

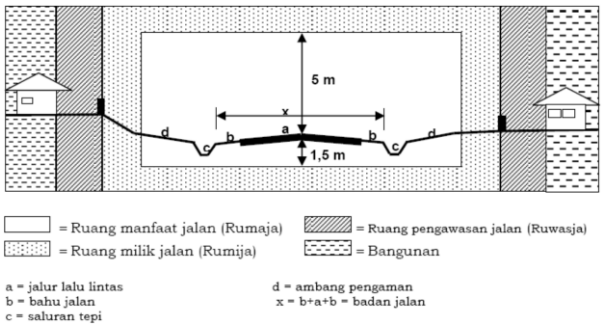
b. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;

c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu; serta

d. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan.

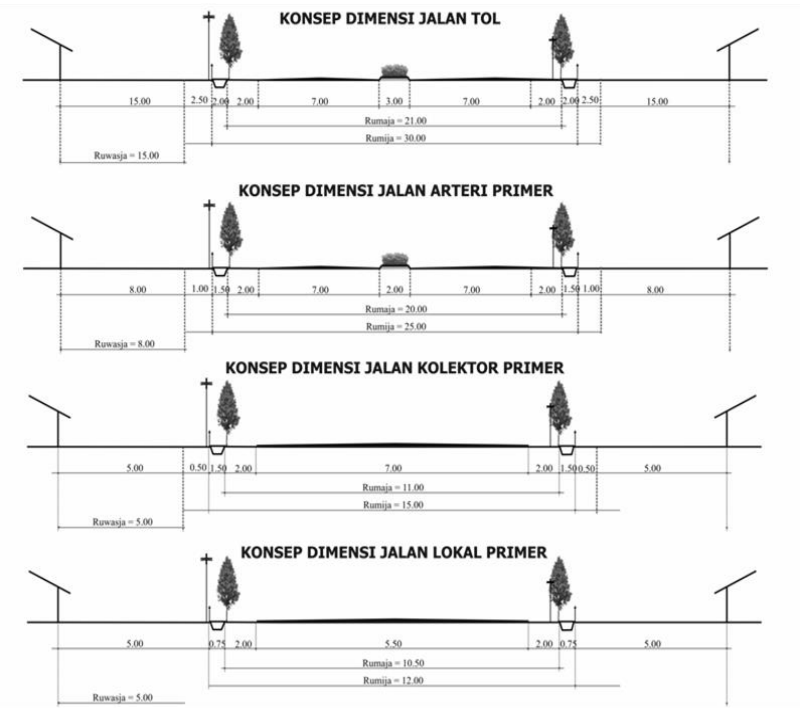
Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2. Bagian-bagian Jalan



Ditinjau dari kondisi dan kebutuhan pengembangan di Kabupaten Lamongan, maka arahan lebar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dapat dilihat pada Tabel 3.4. dan Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.3. Konsep Dimensi Jalan
Pada Ruas-ruas Jalan Utama di Kabupaten Lamongan



Tabel 3.4
Arahan Rumaja, Rumija dan Ruwasja di Kabupaten Lamongan

No	Kelas Jalan	Rumaja	Rumija	Ruwasja
1	Jalan Bebas Hambatan	30	30	15
2	Jalan Arteri Primer			
	a. Pusat Perbelanjaan	15 - 20	20 - 25	8 - 15
	b. Perumahan	15 - 20	20 - 25	5 - 10
	c. Perdagangan	15 - 20	20 - 25	0 - 10
	d. Fasilitas Umum	15 - 20	20 - 25	5 - 10
3	Jalan Kolektor Primer			
	a. Pusat Perbelanjaan	8 - 11	10 - 15	5 - 10
	b. Perumahan	8 - 11	10 – 15	5 - 10
	c. Perdagangan	8 - 11	10 - 15	0 - 10
	d. Fasilitas Umum	8 - 11	10 - 15	5 - 10
4	Jalan Lokal Primer			
	a. Pusat Perbelanjaan	8 - 10	10 - 12	5 - 8
	b. Perumahan	8 - 10	10 - 12	4 - 7
	c. Perdagangan	8 - 10	10 - 12	5 - 10
	d. Fasilitas Umum	8 - 10	10 - 12	5 - 10

Sumber : Hasil Analisa 2017

C. RENCANA TERMINAL

1. Rencana Terminal Penumpang

Jaringan prasarana transportasi jalan terdiri dari simpul yang berwujud terminal penumpang dan terminal barang, dan ruang lalu lintas. Terminal penumpang menurut wilayah pelayanannya yang direncanakan di Kab. Lamongan adalah Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C.

a. Terminal Penumpang Tipe B

   Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan;

b. Terminal Penumpang Tipe C

   Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan. Selanjutnya masing-masing tipe tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelas sesuai dengan kapasitas terminal dan volume kendaraan umum yang dilayani.

Kabupaten Lamongan saat ini memiliki terminal tipe B dan terminal tipe C, Kedepannya akan fungsi terminal tersebut tetap dipertahankan, dengan arahan sebagai berikut:

a. Terminal Penumpang Tipe B, yaitu terminal lamongan berada di Kecamatan Lamongan

b. Terminal Penumpang Tipe C, berada di :

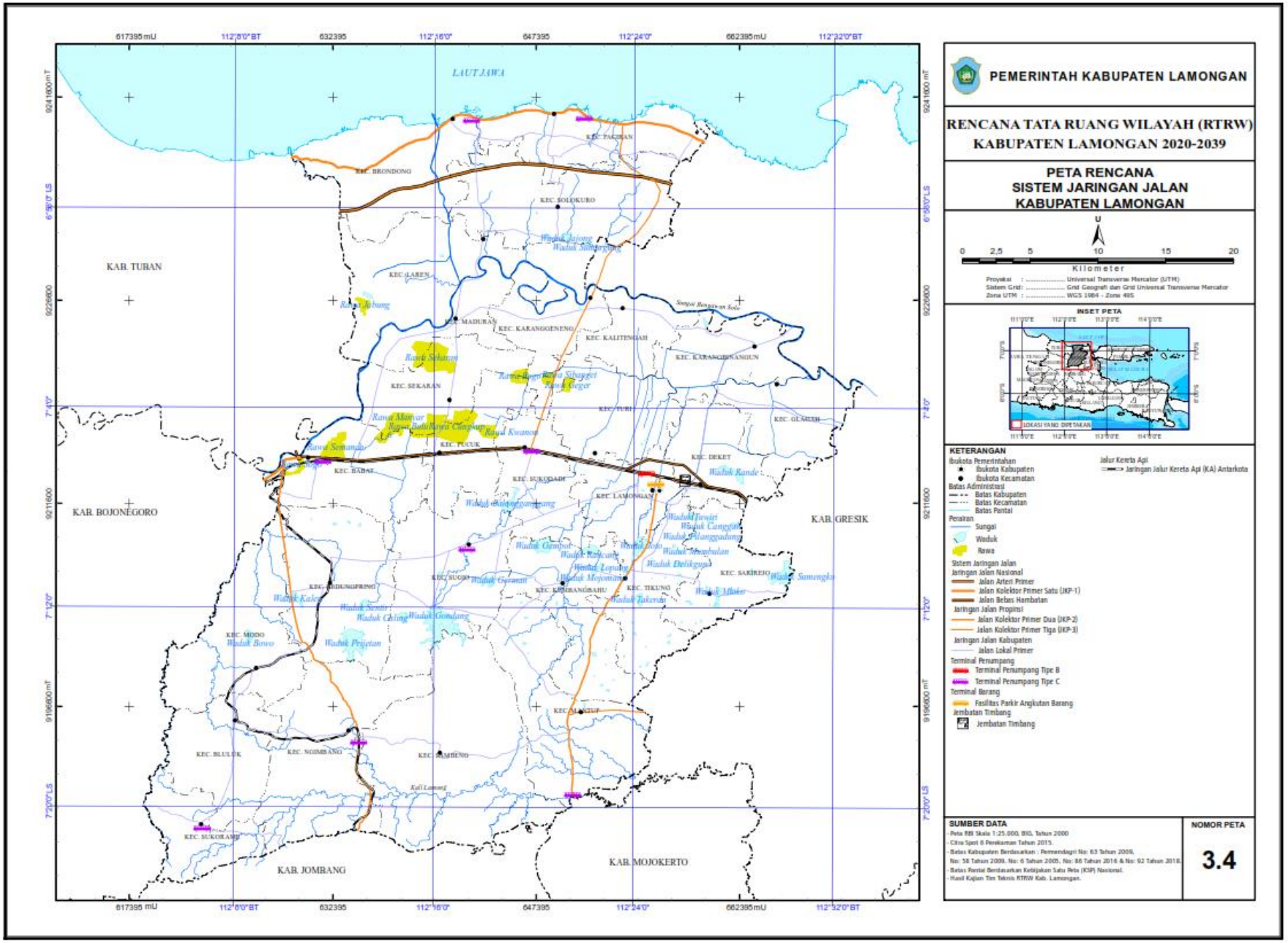
   1. Kecamatan Babat;

2. Kecamatan Sukodadi;
3. Kecamatan Paciran;
4. Kecamatan Brondong;
5. Kecamatan Ngimbang;
6. Kecamatan Sugio;
7. Kecamatan Mantup; dan
8. Kecamatan Sukorame.

2. **Rencana Terminal barang,**

   Area parkir angkutan Barang umum untuk Kabupaten Lamongan direncanakan di Kecamatan Lamongan

3. **Rencana Jembatan Timbang,** berada di Kecamatan Deket


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN JALAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zona 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Bebas Hambatan
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Terminal Penumpang
Terminal Penumpang Tipe B
Terminal Penumpang Tipe C
Terminal Barang
Fasilitas Parkir Angkutan Barang
Jembatan Timbang
Jembatan Timbang
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.4
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. DEKET
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNO
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. MANTUP
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKOREJO
617395 mU
632395
647395
662395 mU
112°8'0"BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0"BT
9241800 mT
9226600
9211600
9196600 mT
6°52'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS

3.5.1.1.2. SISTEM JARINGAN KERETA API

Rencana sistem jaringan kereta api, di Kab. Lamongan mengacu Kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Kp 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional meliputi :

a. jaringan jalur KA; dan
b. stasiun KA.

Jaringan jalur KA adalah jaringan jalur KA antarkota, meliputi:

a. jalur ganda pada permukaan tanah untuk jaringan jalur utara Surabaya (Pasar Turi)–Lamongan–Babat–Bojonegoro–Cepu;
b. jalur KA cepat Jakarta – Surabaya;
c. jalur KA komuter surabaya – Lamongan – Babat;
d. jaringan jalur Kereta Api (KA) Regional Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan)
e. reaktivasi jaringan jalur perkeretaapian, meliputi:
    1. Babat – Jombang; dan
    2. Babat – Tuban.

Stasiun KA, yang direncanakan di Kabupaten Lamongan meliputi : stasiun penumpang dan stasiun operasi. Stasiun penumpang meliputi :

a. stasiun Gembong di Kecamatan Babat;
b. stasiun Sumlaran di Kecamatan Sukodadi;
c. stasiun Pucuk di Kecamatan Pucuk; dan
d. stasiun Surabayan di Kecamatan Sukodadi.

Stasiun operasi, meliputi:

a. stasiun Lamongan di Kecamatan Lamongan; dan
b. stasiun Babat di Kecamatan Babat.

Selengkapnya rencana sistem jaringan kereta api dapat dilhat pada Peta 3.5

1. Daerah Manfaat Jalan Kereta Api

Dalam UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api, pemerintah menetapkan pengaturan mengenai jalur kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas diatasnya.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan kereta api adalah jalan rel beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel. Daerah milik jalan kereta api yaitu daerah manfaat jalan kereta api beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk pengamanan konstruksi. Adapun untuk ketentuan-ketentuan tentang sepanjang

jalan kereta api sebagai usaha perlindungan terhadap jaringan jalan tersebut dimana lahan yang termasuk jalan kereta api menurut UU RI No. UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian adalah :

1. Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) Kereta Api. Ruang manfaat jalan memanfaatkan jalan rel kereta api yang panjangnya dari sumbu rel kereta api, digunakan untuk melindungi jalan atau lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dari gangguan berupa pembongkaran atau gangguan langsung terhadap badan rel kereta api, seperti melindungi dari bahaya banjir. Lahan selebar ini merupakan ruang bebas dari bangunan dan merupakan ruang bebas pandang kereta api, untuk mengakomodasikan badan kereta api dan perlengkapan lalu lintas kereta api. Ruang ini hanya diisi perlengkapan kegiatan lalu-lintas kereta api yaitu kabel-kabel sinyal, telegram dan telepon. Perlengkapan ini sangat penting bagi kelancaran terselenggaranya perlengkapan tersebut terganggu, maka akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
2. Ruang Milik Jalan (Rumija) Kereta Api. Ruang milik jalan kereta api sepanjang 11 meter dari poros rel kereta api, termasuk dalam daerah bebas pandang. Kecelakaan kereta api bisa disebabkan kesulitan masinis untuk mendukung kegiatan manusia, kapan akan lewat dan sebagainya. Lahan Rumija ini digunakan untuk memperlancar perjalanan kereta api dari gangguan seperti longsor, kendaraan lain yang melintas dan gangguan lainnya.
3. Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) Kereta Api. Ruang pengawasan jalan rel kereta api panjangnya 23 meter dari poros rel kereta api. Sekitar lahan ini bisa dibangun tetapi masih dalam pengawasan jawatan kereta api, disamping itu dalam jangka panjang sebagai lahan cadangan untuk keperluan dan kemanfaatan kelancaran kereta api.

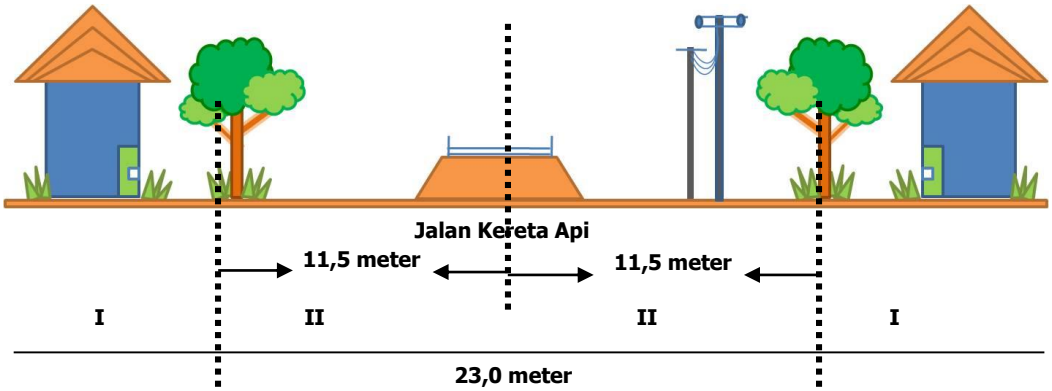
Untuk perlindungan sempadan kereta api antara lain meliputi upaya: Penataan kawasan dengan cara merelokasi pada penduduk yang berada di sempadan rel.

1. Pengadaan taman, jalan yang menguhubungkan antar kelurahan/desa, serta penataan/perbaikan lahan sempadan.
    a. Pendukung sistem transportasi berupa alat-alat dan perlengkapan untuk kelancaran transportasi misalnya perlindungan badan rel, kabel sinyal, telegrap, kabel telepon dan kabel listrik yang membutuhkan lahan 6 meter dari poros rel.
    b. Jalan yang berfungsi menghubungkan antar wilayah kecamatan yang terdiri atas pembatas/utama, drainase, sistem penerangan jalan dan badan jalan yang membutuhkan lahan seluas 10 meter yaitu :
        - Tiga meter untuk taman/ pembatas antara pendukung perlengkapan transportasi kereta api, drainase dan kebutuhan sistem penerangan jalan;
        - 5 meter untuk badan jalan;
        - 2 meter untuk sistem penerangan jalan dan drainase; serta

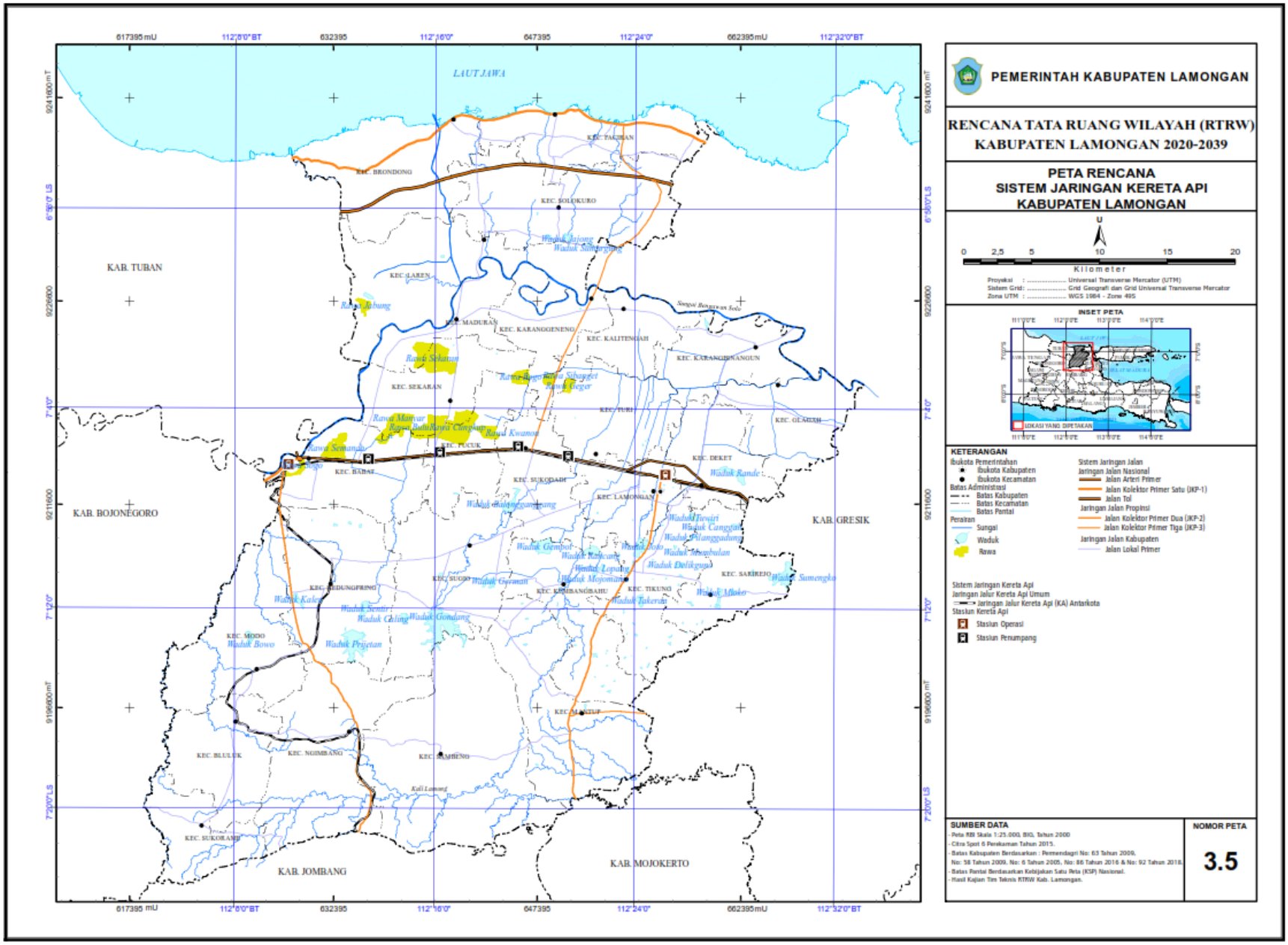
- Taman kota yang didalamnya berisi tempat bermain dan taman yang membutuhkan lahan 7 meter, sehingga total lahan 23 meter.

2. Konservasi sempadan rel kereta api pada dearah permukiman adalah 11,5 meter pada kiri dan kanan sepanjang rel kereta. Untuk konservasi sempadan rel kereta api sebaiknya diarahkan dapat memenuhi standart kelayakan konservasi.
3. Untuk sempadan kereta api dapat difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau yaitu antara sempadan garis tepi rel kereta api hingga batas pinggir kereta api. Dengan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, maka manfaat yang diperoleh sangat banyak, yaitu :
   - Sebagai alat peredam suara yang ditimbulkan oleh mesin kereta api;
   - Untuk mengurangi polusi, akibat polusi asap kereta api maupun kendaraan lain; dan
   - Untuk membatasi agar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan baik kegiatan berdagang maupun mendirikan bangunan lainnya.

Untuk lebih jelasnya sempadan kereta api dapat dilihat pada Gambar 3.3



Gambar 3.4
SEMPADAN REL KERETA API


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN KERETA API
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Sistem Jaringan Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api Umum
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
Stasiun Kereta Api
Stasiun Operasi
Stasiun Penumpang
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009,
No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.5
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PALANG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GEMBUL
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEMBANGSAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. SUKORAME
KEC. MANTUP
KEC. MODO
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. BLULUK
Waduk Ajung
Waduk Sumberejo
Rawa Jebung
Rawa Selatan
Rawa Mantur
Rawa Kwanon
Rawa Semanda
Waduk Kande
Waduk Tawiri
Waduk Cangkar
Waduk Pilanggadung
Waduk Gembor
Waduk Kancang
Waduk Lopang
Waduk Mojomanis
Waduk Delikguno
Waduk Sumengko
Waduk Gedungpring
Waduk Kaken
Waduk Gondang
Waduk Bowo
Waduk Prijetan
Waduk Takeran
Kali Lamong

3.5.1.1.3. SISTEM JARINGAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Jaringan sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Lamongan yaitu Pelabuhan ASDP di Paciran. Pelabuhan ini nantinya direncanakan untuk pelabuhan penyeberangan Kelas I yang melayani Indonesia Bagian Timur.. Untuk lebih jelasnya lihat Peta 3.6. Sedangkan Alur pelayarannya dapat dilihat pada Peta 3.7.

3.5.1.2. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

1. Posisi Kabupaten Lamongan terhadap Wilayah yang Lebih Luas

Angkutan barang (bongkar dan muat) yang melalui Pelabuhan di Lamongan diproyeksikan tidak lepas dari aktifitas angkutan barang yang ada di wilayah hinterland Kabupaten Lamongan.

a. Kabupaten Lamongan mempunyai lahan yang strategis berada di pantai utara Pulau Jawa dan dekat dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Kabupaten Lamongan berada di daerah Pantura Propinsi Jawa Timur dan lokasinya berada di tengah wilayah nusantara sehingga cukup dekat ke Selat Malaka dan Singapura serta dekat dengan Selat Makassar yang merupakan jalur ALKI memuju ke Laut Pasifik.

b. Kabupaten Lamongan dekat dengan ALKI, di sisi lain endapan di selat Madura dimana pelabuhan Tanjung Perak, Gresik berlokasi, mengalami pendangkalan yang tinggi karena beberapa sungai di pulau Jawa yang sebagian besar mengalir ke Selat Madura. Saat ini selat ini mengalami pendangkalan sehingga kapal besar yang menuju ke Tanjung Perak harus antri antara 2 -3 hari.

c. Wilayah hinterland Kabupaten Lamongan akan lebih memilih Pelabuhan di Lamongan sebagai sarana pengangkutan barang jika memperhitungkan jarak, waktu dan biaya transportasi yang dikeluarkan untuk ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjungwangi. Wilayah hinterland Kabupaten Lamongan antara lain meliputi:

- Kabupaten Jombang : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan dan memiliki sumber daya alam yang potensial.
- Kabupaten Mojokerto: Memiliki potensi pertanian, perkebunan besar dan industri (kecil dan menengah) serta untuk kebutuhan yang dipasok dari luar daerah.
- Kabupaten Bojonegoro: terdapat industri mengembangan minyak dan industri industri pendukungnya
- Kabupaten Tuban : terdapat industri mengembangan minyak dan industri industri pendukungnya

2. Rencana Pelabuhan di Kabupaten Lamongan

Untuk mendukung fungsi fungsi strategis yang diemban oleh Kabupaten Lamongan yaitu sebagai kawasan strategis nasional, maupun kawasan strategis propinsi dalam pengembangan ekonomi, ketersediaan fasilitas transportasi laut sebagai pendukung utama sangat diperlukan. Mengacu kepada Keputusan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor Kp 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Untuk Itu Dibutuhkan Pengembangan Sebagai Berikut :

(1) Pelabuhan Laut, meliputi :

a. Pelabuhan Utama Tanjung Pakis (LIS) di Kecamatan Paciran;

b. Pelabuhan Pengumpan Regional Beondong di Kecamatan Brondong;

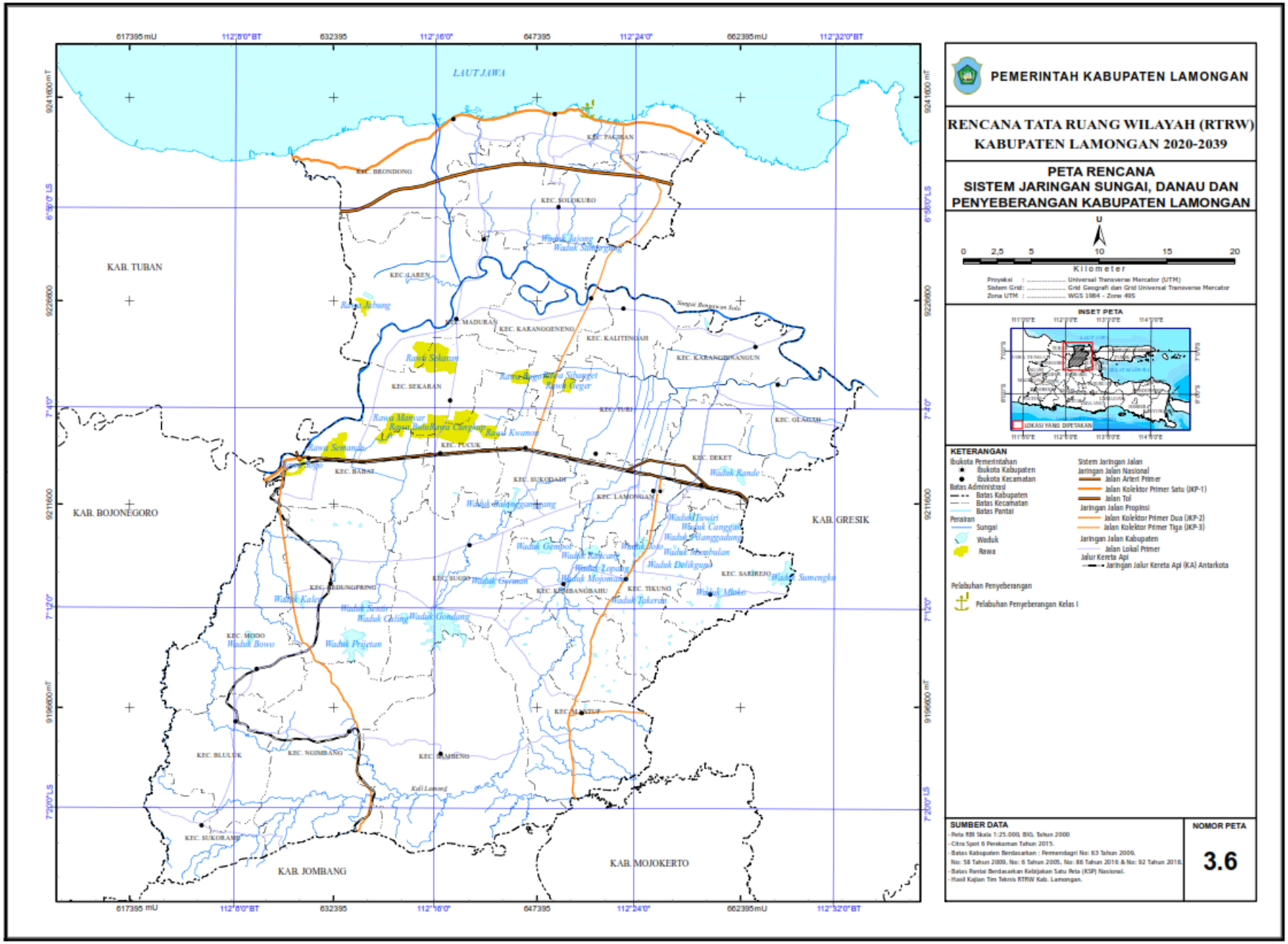
c. Terminal khusus berada di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

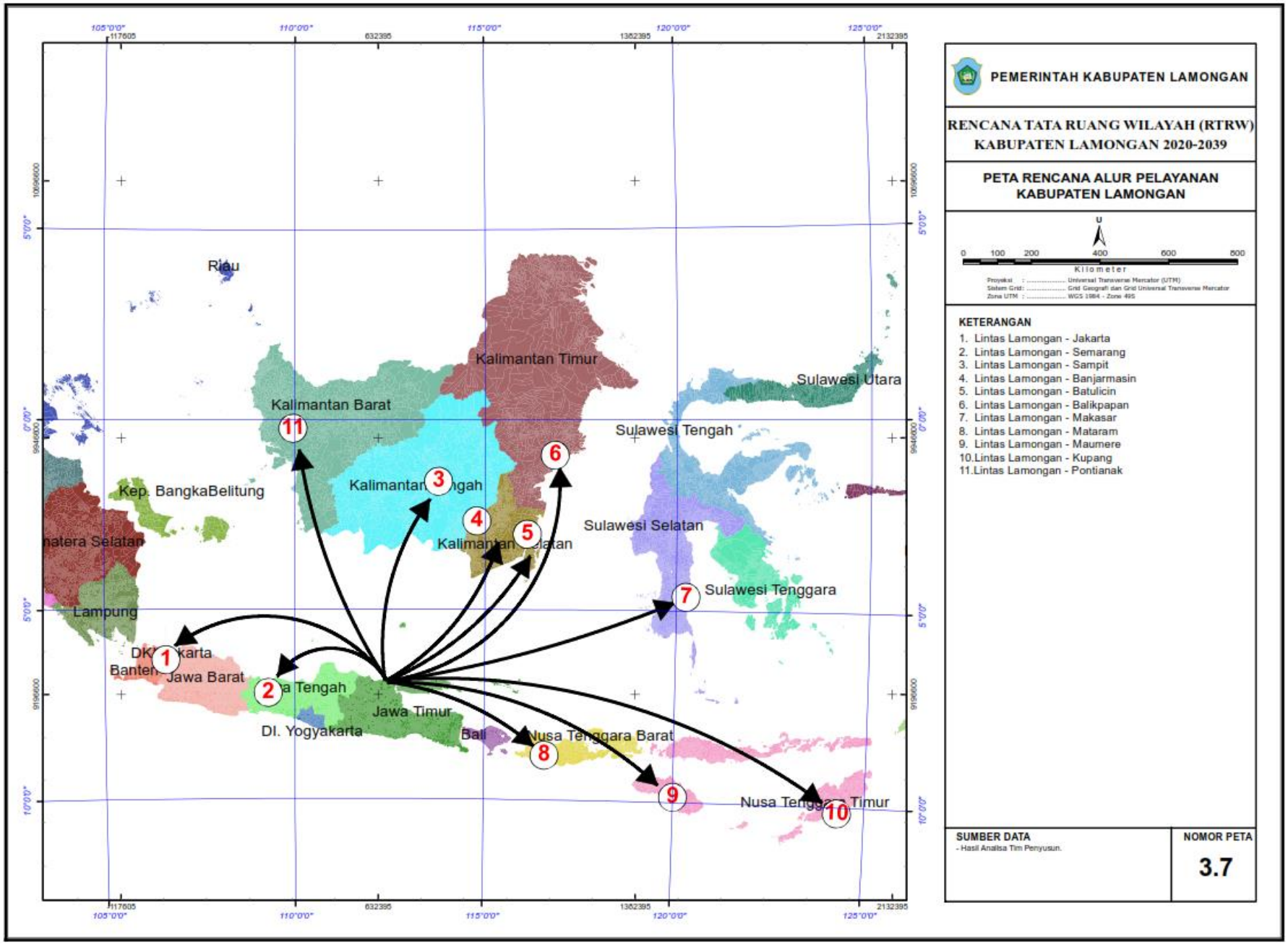
(2) Alur pelayaran berupa alur pelayaran umum dan perlintasan.

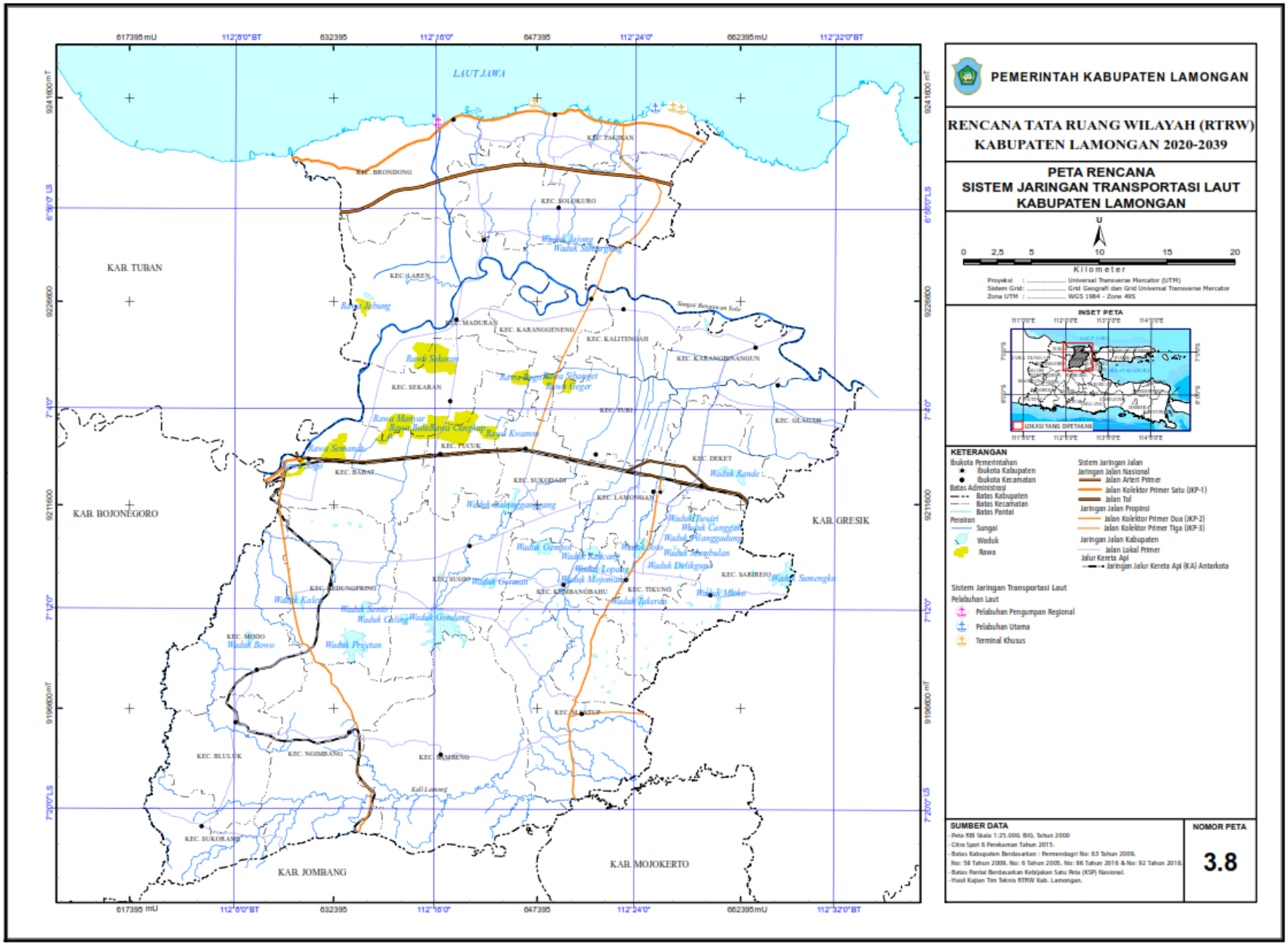
(3) Alur pelayaran umum dan perlintasan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Dengan ditetapkannya Pelabuhan Tanjung Pakis (LIS) sebagai pelabuhan utama, maka perlu dikoordinasikan lebih lanjut terkait masterplan pengembangan Pelabuhan Tanjung Pakis dan perlu disinkronkan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dalam pengembangan Pelabuhan Tanjung Pakis (LIS) perlu didukung dengan adanya bangkitan ekonomi yang dapat memicu kawasan sekitarnya menjadi berkembang. Pengembangan perekonomian ini pada suatu titik,sesuai dengan teori Grwoth Pole yang mengindikasikan adanya pertumbuhan suatu sektor yang di picu oleh sektor tertentu. Pengembangan sektor perekonomian dapat dilakukan dengan pengembangan pelayaran ekspor impor hasil industri,perikanan dan perdagangan baik skala nasional maupun internasional dan pengembangan pergudangan, industri, peti kemas, perdagangan dan jasa.

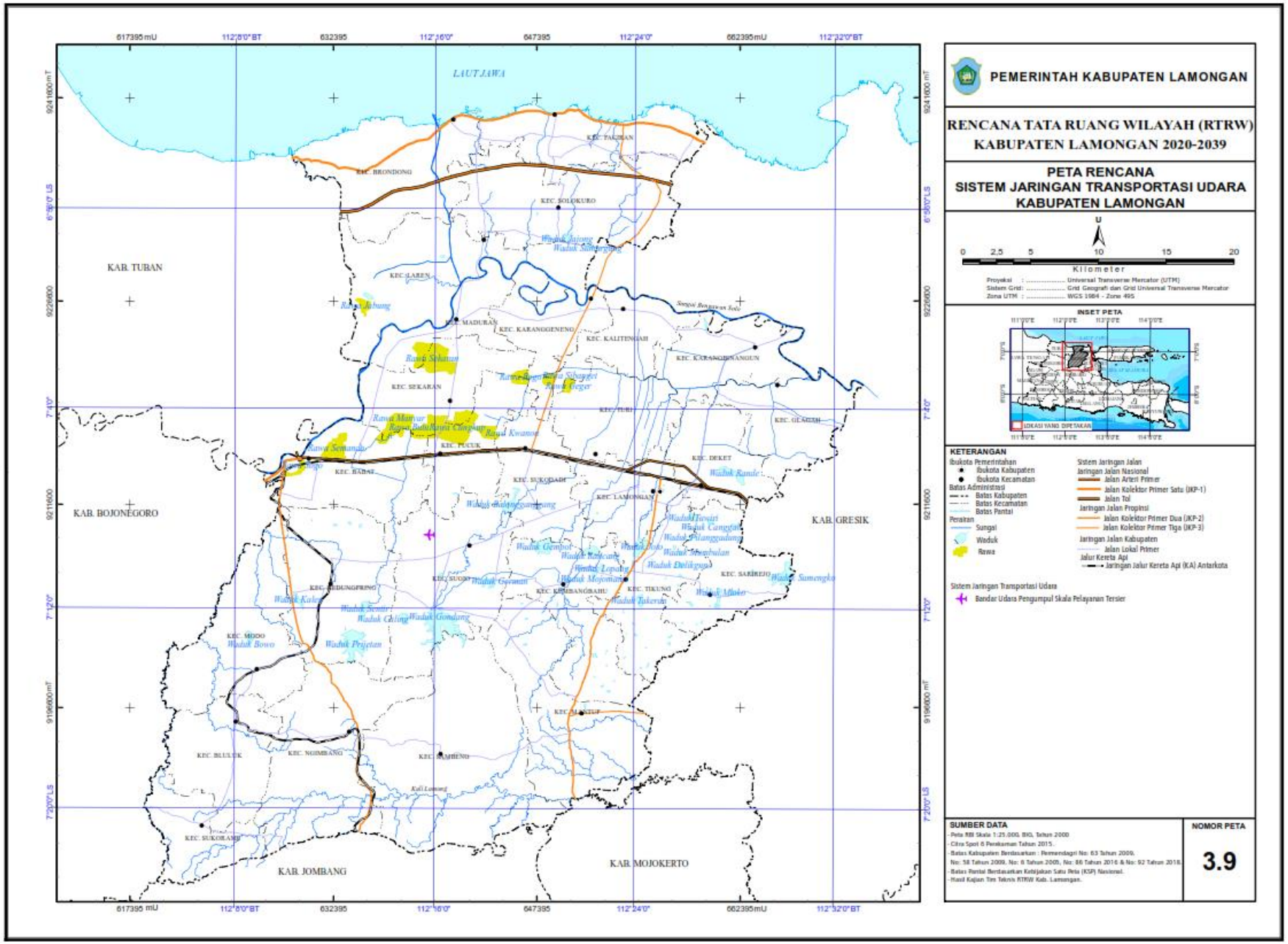

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Pelabuhan Penyeberangan
Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.6
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. POCUK
KEC. BABAT
KEC. DEKET
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. MANTUP
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKORAME
Waduk Jajang
Waduk Sumengko
Rawa Jebung
Rawa Selatan
Rawa Mantup
Rawa Kwanon
Rawa Semanding
Waduk Gembor
Waduk Kalen
Waduk Gedung
Waduk Gondang
Waduk Bowo
Waduk Prigetan
Waduk Tikerian
Waduk Cangkir
Waduk Plangaadan
Waduk Ploso
Waduk Kembulan
Waduk Dhelikgupit
Waduk Sumengko
Waduk Mlako
Kali Lamong
617395 mU
632395
647395
662395mU
112°8'0"BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0"BT
9241600 mT
9226400
9211600
9196800 mT
6°56'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA ALUR PELAYANAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 100 200 400 600 800
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
KETERANGAN
1. Lintas Lamongan - Jakarta
2. Lintas Lamongan - Semarang
3. Lintas Lamongan - Sampit
4. Lintas Lamongan - Banjarmasin
5. Lintas Lamongan - Batulicin
6. Lintas Lamongan - Balikpapan
7. Lintas Lamongan - Makasar
8. Lintas Lamongan - Mataram
9. Lintas Lamongan - Maumere
10. Lintas Lamongan - Kupang
11. Lintas Lamongan - Pontianak
SUMBER DATA
- Hasil Analisa Tim Penyusun.
NOMOR PETA
3.7
Riau
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Kep. BangkaBelitung
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Lampung
Banten
Jawa Barat
Jawa Timur
DI. Yogyakarta
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
105°0'0"
110°0'0"
115°0'0"
120°0'0"
125°0'0"
5°0'0"
0°0'0"
10°0'0"


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pelabuhan Laut
Pelabuhan Pengumpan Regional
Pelabuhan Utama
Terminal Khusus
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009,
No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.8
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKORAME
KEC. SARIREJO
KEC. TIKUNG
KEC. MANTUP
Waduk Sekaran
Waduk Gemit
Waduk Prijetan
Waduk Bowo
Waduk Gondang
Waduk Tikung
Waduk Sumengko
Kali Lamong

3.5.1.3. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA

Jika dilihat dari posisi Kabupaten Lamongan yang merupakan kawasan strategis sekaligus merupakan bagian dari pengembangan perkotaan nasional yang tergabung dalam Gerbangkertosusila, Kabupaten Lamongan memiliki potensi keterkaitan antar moda yang cukup baik yaitu terminal, pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut yang didukung oleh keberadaan industri di pesisir utara Jawa Timur. Rencana pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Lamongan adalah Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No. 63 Tahun 2009.
No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.9
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PALANG
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KREMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKOREJO
Waduk Sidorejo
Waduk Sidengkap
Rawa Sekaran
Rawa Kwanon
Rawa Semanding
Waduk Ranule
Waduk Tawiri
Waduk Cangkan
Waduk Gempol
Waduk Mojomanis
Waduk Takeran
Waduk Sumengko
Waduk Bowo
Waduk Prijetan
Waduk Gondang
Kali Lamong
617395 mU
632395
647395
662395 mU
112°8'0"BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0"BT
9241600 mT
9226800
9211600
9196800 mU
6°56'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS

3.5.2. SISTEM JARINGAN ENERGI

A. Kebutuhan Jaringan energi

Jaringan listrik di wilayah perencanaan berasal dari PLN dan sebagian besar rumah telah memanfaatkan penerangan listrik, demikian juga untuk pemanfaatan lainnya. Rencana kebutuhan listrik di Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 s/d Tabel 3.9.

Tabel 3.5
Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2020

No	Kecamatan	Tahun 2020			
		Daya Listrik (kVa)	Energi Listrik (MWH)	Energi Listrik yang Dibangkitkan (MWH)	Beban Puncak (kVa)
001	Sukorame	55	1.949	2.339	52
002	Bluluk	58	2.069	2.483	56
003	Ngimbang	123	4.390	5.268	118
004	Sambeng	136	4.873	5.847	131
005	Mantup	120	4.285	5.142	115
006	kembangbahu	130	4.653	5.584	125
007	Sugio	163	5.829	6.995	157
008	Kedungpring	159	5.666	6.800	152
009	Modo	131	4.686	5.623	126
010	Babat	235	8.400	10.080	226
011	Pucuk	133	4.737	5.685	127
012	Sukodadi	152	5.417	6.500	146
013	Lamongan	181	6.462	7.754	174
014	Tikung	118	4.216	5.059	113
015	Sarirejo	66	2.375	2.850	64
016	Deket	117	4.189	5.027	113
017	Glagah	115	4.093	4.912	110
018	Karangbinangun	109	3.894	4.673	105
019	Turi	145	5.171	6.205	139
020	Kalitengah	95	3.406	4.087	91
021	Karanggeneng	121	4.318	5.182	116
022	Sekaran	130	4.658	5.590	125
023	Maduran	99	3.534	4.241	95
024	Laren	137	4.910	5.892	132
025	Selokuro	128	4.583	5.499	123
026	Paciran	258	9.214	11.057	247
027	Brondong	197	7.029	8.435	189
	Jumlah	**3.609**	**129.006**	**154.807**	**3.465**

Sumber : Hasil Rencana

Tabel 3.6.
Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun 2024			
		Daya Listrik (kVa)	Energi Listrik (MWH)	Energi Listrik yang Dibangkitkan (MWH)	Beban Puncak (kVa)
001	Sukorame	56	2.011	2.414	54
002	Bluluk	59	2.109	2.531	57
003	Ngimbang	128	4.573	5.488	123
004	Sambeng	139	4.967	5.961	133
005	Mantup	121	4.328	5.194	116
006	kembangbahu	130	4.644	5.572	125
007	Sugio	167	5.971	7.166	160
008	Kedungpring	166	5.932	7.118	159
009	Modo	135	4.830	5.796	130
010	Babat	245	8.770	10.525	236
011	Pucuk	137	4.883	5.860	131
012	Sukodadi	153	5.476	6.571	147
013	Lamongan	184	6.561	7.873	176
014	Tikung	118	4.224	5.068	113
015	Sarirejo	67	2.397	2.877	64
016	Deket	120	4.299	5.159	115
017	Glagah	117	4.193	5.031	113
018	Karangbinangun	111	3.981	4.777	107
019	Turi	147	5.245	6.294	141
020	Kalitengah	98	3.493	4.192	94
021	Karanggeneng	123	4.410	5.293	118
022	Sekaran	135	4.841	5.809	130
023	Maduran	103	3.680	4.416	99
024	Laren	144	5.132	6.158	138
025	Selokuro	130	4.642	5.571	125
026	Paciran	265	9.466	11.360	254
027	Brondong	204	7.275	8.730	195
	Jumlah	**3.703**	**132.335**	**158.803**	**3.555**

Sumber : Hasil Rencana

Tabel 3.7
Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2029

No	Kecamatan	Tahun 2029			
		Daya Listrik (kVa)	Energi Listrik (MWH)	Energi Listrik yang Dibangkitkan (MWH)	Beban Puncak (kVa)
001	Sukorame	58	2.076	2.491	56
002	Bluluk	61	2.176	2.612	58

No	Kecamatan	Tahun 2029			
		Daya Listrik (kVa)	Energi Listrik (MWH)	Energi Listrik yang Dibangkitkan (MWH)	Beban Puncak (kVa)
003	Ngimbang	132	4.719	5.663	127
004	Sambeng	143	5.126	6.151	138
005	Mantup	125	4.466	5.359	120
006	kembangbahu	134	4.792	5.750	129
007	Sugio	172	6.162	7.394	166
008	Kedungpring	171	6.121	7.346	164
009	Modo	139	4.984	5.981	134
010	Babat	253	9.050	10.861	243
011	Pucuk	141	5.039	6.047	135
012	Sukodadi	158	5.650	6.780	152
013	Lamongan	189	6.771	8.125	182
014	Tikung	122	4.358	5.230	117
015	Sarirejo	69	2.474	2.968	66
016	Deket	124	4.437	5.324	119
017	Glagah	121	4.326	5.192	116
018	Karangbinangun	115	4.108	4.930	110
019	Turi	151	5.412	6.495	145
020	Kalitengah	101	3.604	4.325	97
021	Karanggeneng	127	4.551	5.462	122
022	Sekaran	140	4.995	5.994	134
023	Maduran	106	3.798	4.557	102
024	Laren	148	5.296	6.355	142
025	Selokuro	134	4.790	5.749	129
026	Paciran	273	9.769	11.722	262
027	Brondong	210	7.507	9.009	202
	Jumlah	**3.821**	**136.560**	**163.872**	**3.668**

Sumber : Hasil Rencana

Tabel 3.8
Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2034

No	Kecamatan	Tahun 2034			
		Daya Listrik (kVa)	Energi Listrik (MWH)	Energi Listrik yang Dibangkitkan (MWH)	Beban Puncak (kVa)
001	Sukorame	60	2.140	2.568	57
002	Bluluk	63	2.244	2.693	60
003	Ngimbang	136	4.865	5.838	131
004	Sambeng	148	5.285	6.341	142
005	Mantup	129	4.604	5.525	124
006	kembangbahu	138	4.940	5.928	133
007	Sugio	178	6.353	7.623	171
008	Kedungpring	177	6.311	7.573	170

No	Kecamatan	Tahun 2034			
		Daya Listrik (kVa)	Energi Listrik (MWH)	Energi Listrik yang Dibangkitkan (MWH)	Beban Puncak (kVa)
009	Modo	144	5.138	6.166	138
010	Babat	261	9.330	11.196	251
011	Pucuk	145	5.195	6.234	140
012	Sukodadi	163	5.825	6.990	156
013	Lamongan	195	6.980	8.376	187
014	Tikung	126	4.493	5.392	121
015	Sarirejo	71	2.550	3.060	68
016	Deket	128	4.574	5.489	123
017	Glagah	125	4.460	5.352	120
018	Karangbinangun	119	4.235	5.082	114
019	Turi	156	5.580	6.696	150
020	Kalitengah	104	3.716	4.459	100
021	Karanggeneng	131	4.692	5.630	126
022	Sekaran	144	5.150	6.180	138
023	Maduran	110	3.915	4.698	105
024	Laren	153	5.460	6.552	147
025	Selokuro	138	4.939	5.926	133
026	Paciran	282	10.071	12.085	271
027	Brondong	217	7.740	9.287	208
	Jumlah	**3.939**	**140.784**	**168.941**	**3.781**

Sumber : Hasil Rencana

Tabel 3.9.
Kebutuhan Listrik Kabupaten Lamongan Tahun 2039

No	Kecamatan	Tahun 2039			
		Daya Listrik (kVa)	Energi Listrik (MWH)	Energi Listrik yang Dibangkitkan (MWH)	Beban Puncak (kVa)
001	Sukorame	62	2.204	2.645	59
002	Bluluk	65	2.311	2.773	62
003	Ngimbang	140	5.011	6.013	135
004	Sambeng	152	5.443	6.532	146
005	Mantup	133	4.742	5.691	127
006	kembangbahu	142	5.088	6.106	137
007	Sugio	183	6.543	7.852	176
008	Kedungpring	182	6.500	7.800	175
009	Modo	148	5.293	6.351	142
010	Babat	269	9.610	11.532	258
011	Pucuk	150	5.351	6.421	144
012	Sukodadi	168	6.000	7.200	161

No	Kecamatan	Tahun 2039			
		Daya Listrik (kVa)	Energi Listrik (MWH)	Energi Listrik yang Dibangkitkan (MWH)	Beban Puncak (kVa)
013	Lamongan	201	7.189	8.627	193
014	Tikung	129	4.628	5.554	124
015	Sarirejo	73	2.627	3.152	71
016	Deket	132	4.711	5.653	127
017	Glagah	129	4.594	5.513	123
018	Karangbinangun	122	4.362	5.235	117
019	Turi	161	5.747	6.897	154
020	Kalitengah	107	3.827	4.593	103
021	Karanggeneng	135	4.833	5.799	130
022	Sekaran	148	5.304	6.365	142
023	Maduran	113	4.033	4.839	108
024	Laren	157	5.624	6.748	151
025	Selokuro	142	5.087	6.104	137
026	Paciran	290	10.373	12.448	279
027	Brondong	223	7.972	9.566	214
	Jumlah	**4.057**	**145.009**	**174.010**	**3.895**

Dengan fungsi yang diemban Kabupaten Lamongan, maka untuk sistem jaringan energi direncanakan sebagai berikut :

a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

b. Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan; dan

c. Rencana Energi Lainnya

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kabupaten Lamongan, berupa jaringan gas bumi kilang ke konsumen, meliputi:

- Lamongan – Babat;
- Paciran - Brondong;
- Lamongan – mantup; dan
- Babat – ngimbang.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :

1) Transmisi tenaga listrik, berupa Saluran Udara Tengangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara tegangan tinggi (SUTT), meliputi:

   a. SUTET dari Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Ngimbang meliputi :

      1. Ngimbang – Babat – Tanjung Awar-Awar;

      2. Gresik – Ngimbang.

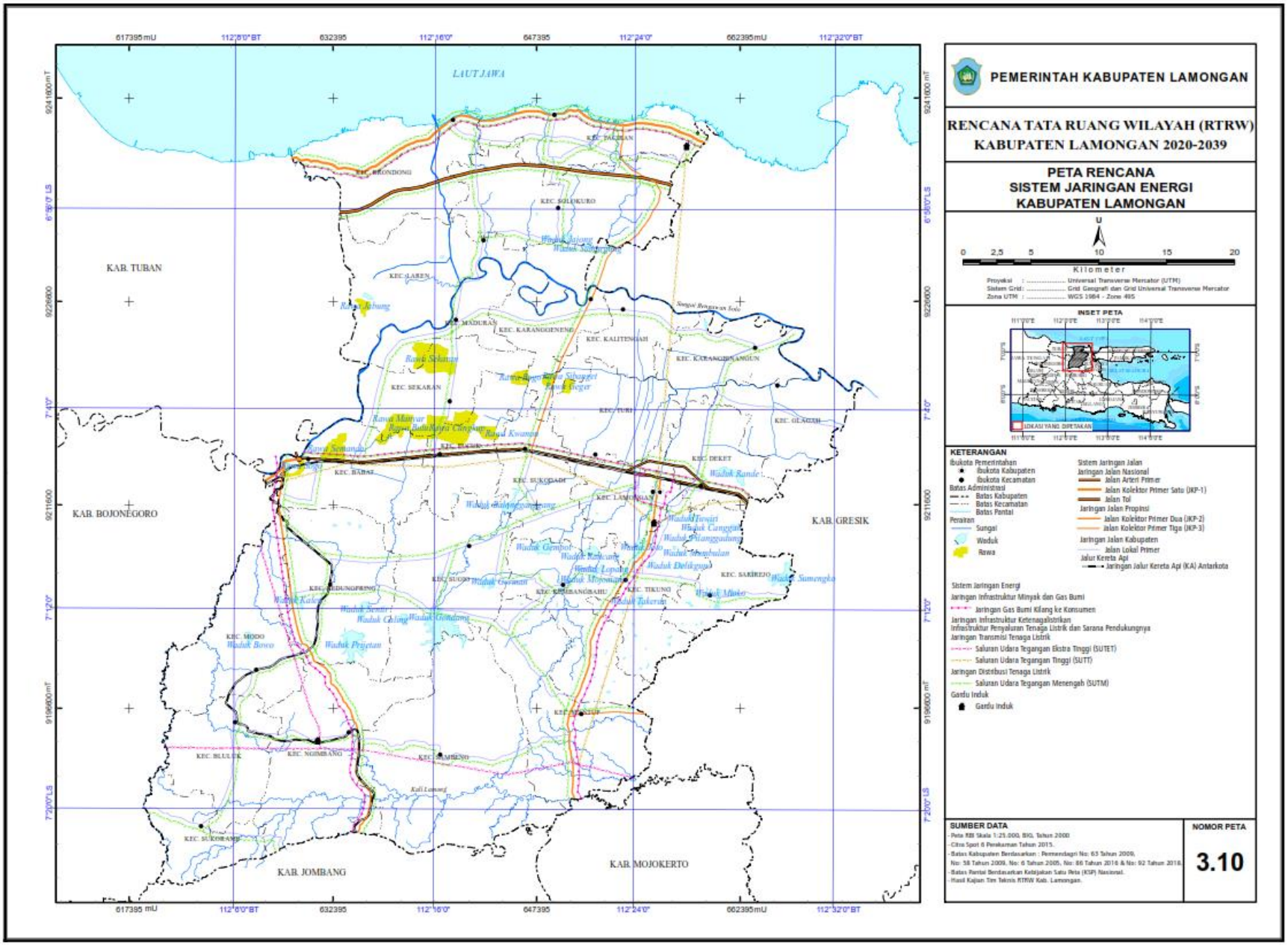
   b. SUTT, meliputi:

1. Lamongan – Babat;
2. Lamongan – Paciran; dan
3. Lamongan – Mantup.

2) Distribusi Tenaga Listrik berada di sepanjang jaringan jalan meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM). Gardu Induk meliputi:
   a. GITET di Kecamatan Ngimbang;
   b. GI di Kecamatan Lamongan; dan
   c. GI di Kecamatan Paciran.
3) Energi lainnya meliputi:
   a. energi biogas; dan
   b. energi biomassa.

      Biogas adalah gas yang dihasilkan dengan cara mengolah limbah sisa dari peternakan (kotoran ternak, pupuk kandang dan makanan yang tidak dimakan), produksi pangan (limbah buah dan sayur, sisa dari daging, ikan dan pengolahan susu, limbah pembuatan bir, sisa makanan dan banyak lagi) dan limbah dari industri serta pengolahan limbah air kota.

      Dengan membangun pembangkit listrik biogas, pertanian memberi kontribusi penting untuk memasok energi dari sumber daya terbarukan serta pembuangan limbah organik. Residu diproduksi sebagai produk manufaktur biogas, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai residu berkualitas tinggi. Biogas merupakan sumber energi terbarukan yang termasuk kategori biofuel. Biogas biasanya mengacu pada gas yang dihasilkan oleh pemecahan biologis bahan organik tanpa adanya oksigen. Proses Anaerobik atau fermentasi dari bahan biodegradable seperti biomassa, kotoran, limbah, sampah kota, limbah hijau, bahan tanaman dan tanaman menghasilkan biogas. Untuk lebih jelasnya lihat Peta 3.9


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN ENERGI
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
Sistem Jaringan Energi
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Jaringan Gas Bumi Hilang ke Konsumen
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Gardu Induk
Gardu Induk
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009,
No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.10
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PALANG
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. KALITENGAH
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. DEKET
KEC. BLEGA
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. MANTUP
KEC. SUKOREJO
Waduk Sekaran
Waduk Gempol
Waduk Bengkelo
Waduk Delikgowa
Waduk Sumengko
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Kali Lamong

B. Standar Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Ekstra Tinggi

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 245kV. Ketentuan pemanfaatan lahan yang dilalui jalur dan di sekitar menara SUTT dan SUTET diatur berdasarkan prinsip berikut:

1. Perlu disediakan ruang aman, yaitu ruang sekeliling penghantar atau kawat listrik SUTT atau SUTTET yang harts dibebaskan dari kegiatan manusia.
2. Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur SUTT atau SUTET sebagai ruang aman tetap digunakan oleh pemiliknya sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Ruang aman meliputi jarak bebas horisontal dan jarak bebas vertikal. Jarak bebas horisontal adalah jarak antara titik tengah menara dengan benda terdekat. Jarak bebas vertikal adalah ketinggian minimal antara penghantar dengan tanah.
4. Jarak bebas horisontal minimal untuk SUTT ditetapkan 20 m ke kanan kiri dari titik tengah menara untuk menara tunggal dan 15 m untuk menara ganda, sementara jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya.
5. Jarak bebas horisontal minimal untuk SUTET ditetapkan 32m ke kanan kiri dari titik tengah menara, sementara jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya.
6. Faktor-faktor yang menentukan ruang aman adalah tegangan, kekuatan angin dan suhu di sekitar kawat penghantar :
    a. Tegangan; makin besar tegangan yang bekerja pada penghantar makin besar jarak minimum (clearance) yaitu jarak yang terpendek yang diizinkan antara kawat penghantar dengan benda atau kegiatan lain sesuai dengan angka-angka yang tertera pada Tabel 3.10

b. Angin; makin besar tekanan angin, makin besar ayunan kawat penghantar ke kin atau ke kanan dan pada satu gawang (jarak antara sua menara) ayunan yang terbesar karena pengaruh angin adalah pada kawat penghantar yang lengkungannya paling rendah sedangkan ayunan semakin kecil ke arah menara.

    c. Suhu kawat penghantar; makin besar suhu yang mempengaruhi kawat penghantar makin mengendor kawat penghantar tersebut, sehingga andongannya menjadi lebih besar dan kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh suhu di sekeliling dan suhu yang diakibatkan oleh besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar tersebut.

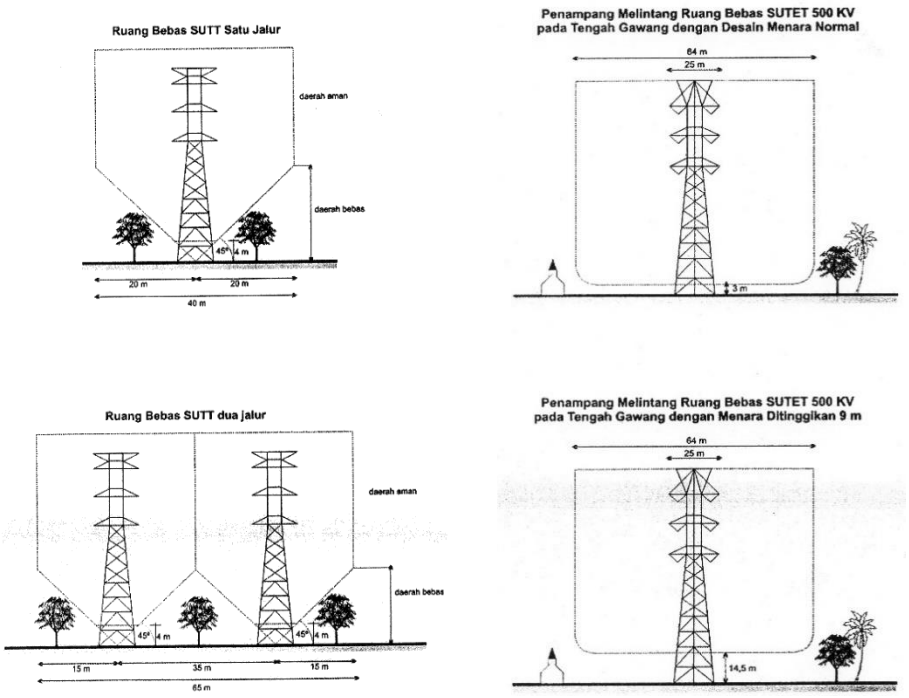
Ruang aman dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga lahan/ruang yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai kepentingan, sehingga di satu pihak sistem listrik yang ada tidak terganggu oleh lingkungan dan di lain pihak lingkungan itu sendiri tidak terganggu oleh sistem listrik tersebut.

Jarak bebas vertikal dapat dibentuk dengan menetapkan ketinggian menara direncanakan sedemikian rupa sehingga kuat medan listrik dan medan magnet yang dibangkitkan SLUT atau SUTET berada di bawah ambang batas yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO/World Health Organization) dengan ketentuan tertentu.

Tabel 3.10.
Jarak Bebas Minimum SUTT DAN SUTET

No	Lokasi	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	Saluran Kabel	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
1	Bangunan Beton	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
2	Pompa Bensin	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
3	Penimbuhan Bahan Bakar	50 m	20 m	50 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
4	Pagar	3 m	20 m	3 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
5	Lapangan Terbuka	6,5 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
6	Jalan Raya	8 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
7	Pepohonan	3,5 m	20 m	8,5 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
8	Bangunan Tahan Api	3,5 m	20 m	8,5 m	20 m	1,5 m	20 m	20 m
9	Rel Kereta Api	8 m	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
10	Jembatan Besi/Tangga besi/kereta api	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
11	Lapangan Olah Raga	2,5 m	20 m	14 m	20 m	20 m	20 m	20 m
12	SUTT Lainnya penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi	2,5 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m

Sumber : Kumpulan Pedoman Pelaksanaan Tata Ruang



Gambar 3.5. Ruang Bebas SUTT

3.5.3. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Prasarana telekomunikasi adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat. Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan meliputi : 1) Sistem kabel, 2) Sistem seluler dan 3) Sistem satelit. Pengembangan prasarana telekomunikasi, terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana. Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telekomunikasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia, dimana penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi menjadi monopoli PT. Telkom Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi akan semakin terlayani dengan semakin banyaknya penyelenggara telekomunikasi. Dengan semakin banyaknya penyelenggara telekomunikasi, maka kebutuhan masyarakat akan kecepatan dan kemudahan informasi semakin banyak tersedia. Untuk pengembangan sambungan kabel, telah dikembangkan teknologi Fiber Optik yang mampu meningkatkan kualitas suara dan jumlah sambungan, sedangkan pengembangan teknologi seluler untuk mempercepat jumlah satuan sambungan merupakan alternatif pengembangan telekomunikasi.

Seiring dengan pengembangan wilayah, penyelenggara telekomunikasi telah siap mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Lamongan dari aspek pelayanan kebutuhan sambungan telepon. Kebutuhan telepon diperkirakan berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- Perumahan : 17 SS/100 jiwa

- Perdagangan dan jasa : 30% dari sambungan rumah
- Fasilitas umum : 20% dari sambungan rumah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka prediksi kebutuhan telepon di wilayah perencanaan dapat dilihat pada Tabel 3.11. Sambungan telepon di wilayah perencanaan selain diperuntukkan untuk wilayah perumahan juga untuk fasilitas-fasilitas lainnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telekomunikasi pada tiap wilayah:

1. Menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern;
2. Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan;
3. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Kabupaten Lamongan ; serta
4. Mengarahkan dan memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama pula.

Pengembangan teknologi seluler mampu menumbuhkan peningkatan jumlah satuan sambungan, mengingat teknologi ini lebih murah dibandingkan dengan teknologi kabel. Namun demikian, perlunya pengendalian ketat akan pendirian tower-tower oleh penyelenggara telekomunikasi di Kabupaten Lamongan terkait dengan pemenuhan syarat ijin pendirian tower telekomunikasi.

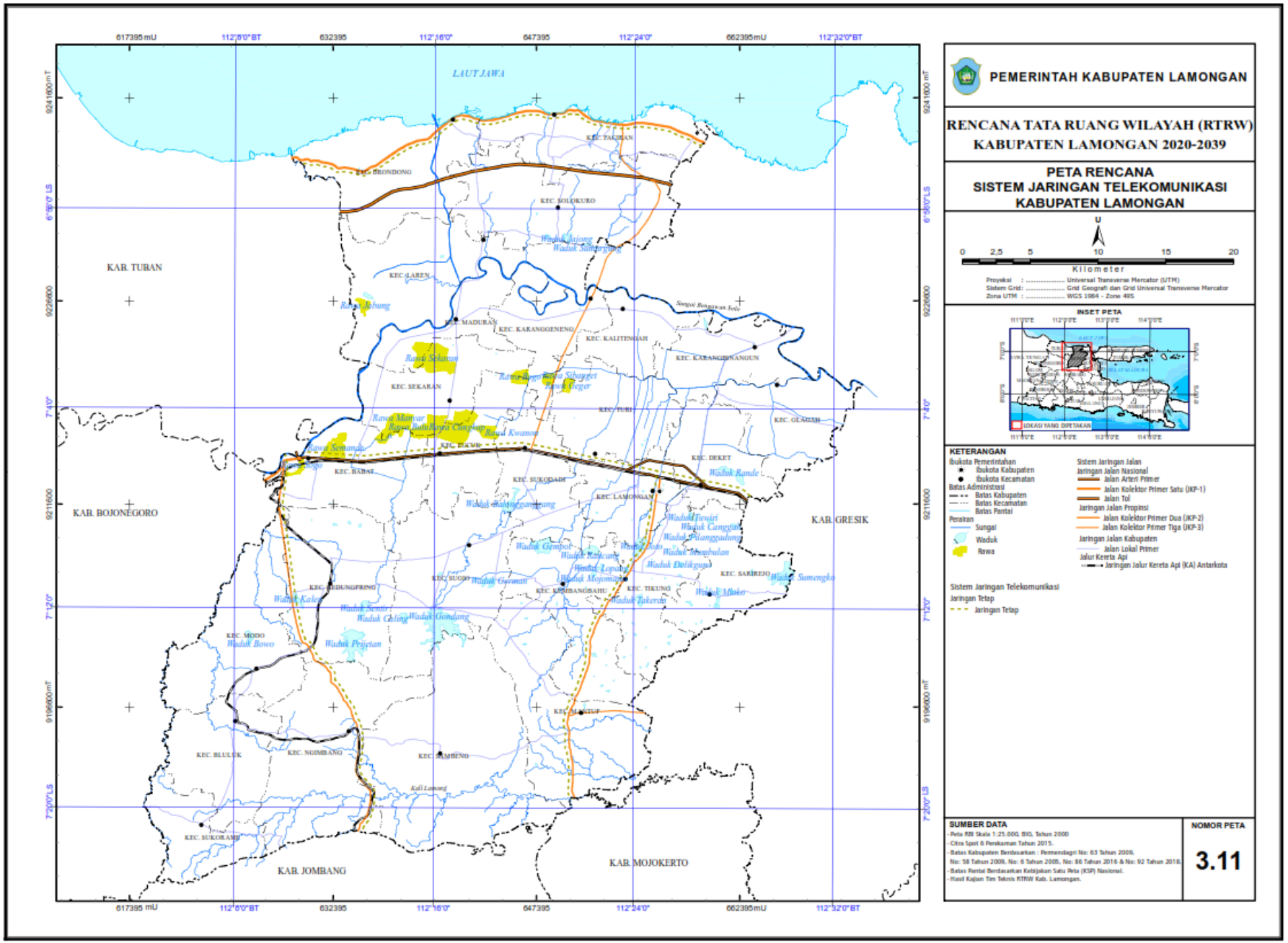
Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi

1. Jaringan tetap berupa jaringan tetap yang menggunakan sistem kabel diarahkan mengikuti jaringan jalan di seluruh wilayah kabupaten.
2. Jaringan bergerak, meliputi:
   a. jaringan bergerak terestrial;
   b. jaringan bergerak seluler; dan
   c. jaringan bergerak satelit.

Jaringan Bergerak Terestrial diarahkan untuk melayani seluruh Daerah. Jaringan Bergerak Selular diarahkan untuk melayani seluruh Daerah. Jaringan Bergerak Satelit, meliputi:

a. menara telekomunikasi (BTS) diarahkan untuk melayani seluruh Daerah; dan
b. ketentuan lebih lanjut tentang menara telekomunikasi (BTS) diatur dalam Peraturan Bupati

Untuk mengatasi peningkatan kebutuhan telekomunikasi telah dikembangkan jaringan telepon dengan teknologi wireless phone. Teknologi wireless nampaknya sama dengan pengembangan telekomunikasi berbasis seluler, hanya gelombang frekuensinya saja yang berbeda. Dari segi biaya nampaknya lebih murah bila dibandingkan dengan sarana kabel, sehingga pengembangan telekomunikasi dengan berbasis pada teknologi wireless phone ini cepat berkembang.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Tetap
Jaringan Tetap
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.11
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PALANG
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKUKO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. BLAWI
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGSAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. MANTUP
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKOREJO
Waduk Sidorejo
Waduk Sidengkrang
Waduk Gempol
Waduk Kalicacing
Waduk Lopadan
Waduk Mojomingir
Waduk Gesrawil
Waduk Kalen
Waduk Sentul
Waduk Celing
Waduk Gondang
Waduk Bowo
Waduk Prijetan
Waduk Tawiri
Waduk Canggah
Waduk Blanggadang
Waduk Sembalan
Waduk Deliksugih
Waduk Sumengko
Waduk Mloko
Waduk Takeran
Waduk Rande
Rawa Sekaran
Rawa Mantup
Rawa Kwanon
Rawa Sidomulyo
Rawa Semanding
Kali Lamong

Tabel 3.11.

Kebutuhan Telepon Kabupaten Lamongan tahun 2020 dan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Telepon (SS) Tahun 2020					Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Telepon (SS) Tahun 2024				
			Perumahan	Perdagangan dan Jasa	Fasilitas Umum	Lain-Lain	Total		Perumahan	Perdagangan dan Jasa	Fasilitas Umum	Lain-Lain	Total
1	Sukorame	21.092	211	84	63	63	422	21.645	216	87	65	65	433
2	Bluluk	22.118	221	88	66	66	442	22.697	227	91	68	68	454
3	Ngimbang	47.957	480	192	144	144	959	49.214	492	197	148	148	984
4	Sambeng	52.090	521	208	156	156	1.042	53.456	535	214	160	160	1.069
5	Mantup	45.385	454	182	136	136	908	46.574	466	186	140	140	931
6	kembangbahu	48.696	487	195	146	146	974	49.972	500	200	150	150	999
7	Sugio	62.618	626	250	188	188	1.252	64.259	643	257	193	193	1.285
8	Kedungpring	62.205	622	249	187	187	1.244	63.835	638	255	192	192	1.277
9	Modo	50.649	506	203	152	152	1.013	51.977	520	208	156	156	1.040
10	Babat	91.971	920	368	276	276	1.839	94.381	944	378	283	283	1.888
11	Pucuk	51.206	512	205	154	154	1.024	52.548	525	210	158	158	1.051
12	Sukodadi	57.419	574	230	172	172	1.148	58.924	589	236	177	177	1.178
13	Lamongan	68.803	688	275	206	206	1.376	70.606	706	282	212	212	1.412
14	Tikung	44.291	443	177	133	133	886	45.452	455	182	136	136	909
15	Sarirejo	25.137	251	101	75	75	503	25.796	258	103	77	77	516
16	Deket	45.085	451	180	135	135	902	46.266	463	185	139	139	925
17	Glagah	43.965	440	176	132	132	879	45.117	451	180	135	135	902
18	Karangbinangun	41.749	417	167	125	125	835	42.843	428	171	129	129	857
19	Turi	55.000	550	220	165	165	1.100	56.441	564	226	169	169	1.129
20	Kalitengah	36.629	366	147	110	110	733	37.589	376	150	113	113	752
21	Karanggeneng	46.250	463	185	139	139	925	47.462	475	190	142	142	949
22	Sekaran	50.762	508	203	152	152	1.015	52.092	521	208	156	156	1.042
23	Maduran	38.593	386	154	116	116	772	39.605	396	158	119	119	792
24	Laren	53.817	538	215	161	161	1.076	55.227	552	221	166	166	1.105
25	Selokuro	48.681	487	195	146	146	974	49.956	500	200	150	150	999
26	Paciran	99.269	993	397	298	298	1.985	101.870	1.019	407	306	306	2.037
27	Brondong	76.289	763	305	229	229	1.526	78.288	783	313	235	235	1.566
	Total	**1.387.726**	**13.877**	**5.551**	**4.163**	**4.163**	**27.755**	**1.424.094**	**14.241**	**5.696**	**4.272**	**4.272**	**28.482**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.12.

Kebutuhan Telepon Kabupaten Lamongan Tahun 2029 dan Tahun 2034

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Telepon (SS) Tahun 2029					Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Telepon (SS) Tahun 2034				
			Perumahan	Perdagangan dan Jasa	Fasilitas Umum	Lain-Lain	Total		Perumahan	Perdagangan dan Jasa	Fasilitas Umum	Lain-Lain	Total
1	Sukorame	22.336	223	89	67	67	447	23.027	230	92	69	69	461
2	Bluluk	23.422	234	94	70	70	468	24.146	241	97	72	72	483
3	Ngimbang	50.785	508	203	152	152	1.016	52.356	524	209	157	157	1.047
4	Sambeng	55.162	552	221	165	165	1.103	56.868	569	227	171	171	1.137
5	Mantup	48.061	481	192	144	144	961	49.548	495	198	149	149	991
6	kembangbahu	51.568	516	206	155	155	1.031	53.163	532	213	159	159	1.063
7	Sugio	66.311	663	265	199	199	1.326	68.362	684	273	205	205	1.367
8	Kedungpring	65.873	659	263	198	198	1.317	67.910	679	272	204	204	1.358
9	Modo	53.636	536	215	161	161	1.073	55.295	553	221	166	166	1.106
10	Babat	97.394	974	390	292	292	1.948	100.407	1.004	402	301	301	2.008
11	Pucuk	54.226	542	217	163	163	1.085	55.903	559	224	168	168	1.118
12	Sukodadi	60.805	608	243	182	182	1.216	62.686	627	251	188	188	1.254
13	Lamongan	72.860	729	291	219	219	1.457	75.114	751	300	225	225	1.502
14	Tikung	46.903	469	188	141	141	938	48.353	484	193	145	145	967
15	Sarirejo	26.620	266	106	80	80	532	27.443	274	110	82	82	549
16	Deket	47.743	477	191	143	143	955	49.220	492	197	148	148	984
17	Glagah	46.558	466	186	140	140	931	47.998	480	192	144	144	960
18	Karangbinangun	44.210	442	177	133	133	884	45.578	456	182	137	137	912
19	Turi	58.243	582	233	175	175	1.165	60.045	600	240	180	180	1.201
20	Kalitengah	38.789	388	155	116	116	776	39.989	400	160	120	120	800
21	Karanggeneng	48.977	490	196	147	147	980	50.492	505	202	151	151	1.010
22	Sekaran	53.755	538	215	161	161	1.075	55.418	554	222	166	166	1.108
23	Maduran	40.869	409	163	123	123	817	42.133	421	169	126	126	843
24	Laren	56.990	570	228	171	171	1.140	58.753	588	235	176	176	1.175
25	Selokuro	51.551	516	206	155	155	1.031	53.146	531	213	159	159	1.063
26	Paciran	105.122	1.051	420	315	315	2.102	108.374	1.084	433	325	325	2.167
27	Brondong	80.788	808	323	242	242	1.616	83.287	833	333	250	250	1.666
	Total	**1.469.554**	**14.696**	**5.878**	**4.409**	**4.409**	**29.391**	**1.515.014**	**15.150**	**6.060**	**4.545**	**4.545**	**30.300**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.13

Kebutuhan Telepon Kabupaten Lamongan Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Telepon (SS) Tahun 2039				
			Perumahan	Perdagangan dan Jasa	Fasilitas Umum	Lain-Lain	Total
1	Sukorame	23.718	237	95	71	71	474
2	Bluluk	24.871	249	99	75	75	497
3	Ngimbang	53.927	539	216	162	162	1.079
4	Sambeng	58.575	586	234	176	176	1.171
5	Mantup	51.034	510	204	153	153	1.021
6	kembangbahu	54.758	548	219	164	164	1.095
7	Sugio	70.413	704	282	211	211	1.408
8	Kedungpring	69.948	699	280	210	210	1.399
9	Modo	56.954	570	228	171	171	1.139
10	Babat	103.420	1.034	414	310	310	2.068
11	Pucuk	57.581	576	230	173	173	1.152
12	Sukodadi	64.567	646	258	194	194	1.291
13	Lamongan	77.368	774	309	232	232	1.547
14	Tikung	49.804	498	199	149	149	996
15	Sarirejo	28.267	283	113	85	85	565
16	Deket	50.697	507	203	152	152	1.014
17	Glagah	49.438	494	198	148	148	989
18	Karangbinangun	46.946	469	188	141	141	939
19	Turi	61.846	618	247	186	186	1.237
20	Kalitengah	41.189	412	165	124	124	824
21	Karanggeneng	52.007	520	208	156	156	1.040
22	Sekaran	57.081	571	228	171	171	1.142
23	Maduran	43.397	434	174	130	130	868
24	Laren	60.516	605	242	182	182	1.210
25	Selokuro	54.741	547	219	164	164	1.095
26	Paciran	111.626	1.116	447	335	335	2.233
27	Brondong	85.786	858	343	257	257	1.716
	Total	**1.560.474**	**15.605**	**6.242**	**4.681**	**4.681**	**31.209**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.14.

Ketentuan Pembangunan Tower Telekomunikasi Kabupaten Lamongan

Jenis Bangunan	Jarak Tower dari Bangunan (meter)	
	Ketinggian Tower sampai dengan 45 m	Ketinggian Tower di atas 45 m
Perumahan	20	30
Komersial	10	15
Industri	5	10

Sumber : Hasil Analisa

Ketentuan pembangunan menara telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan arahan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping kehandalan cakupan (*coverage*) frekuensi telekomunikasi dengan tujuan meminimalkan jumlah menara telekomunikasi yang ada dengan prioritas mengarahkan pada penggunaan / dalam pengguanaan /

pengelolaannya maupun penggunaan ruang kota, namun tetap menjamin kehandalan cakupan pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan telekomunikasi.

Pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam kawasan berdasarkan pola sifat lingkungan, kepadatan bangunan dan bangun-bangunan serta kepadatan jasa telekomunikasi yang lokasi persebarannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Kawasan tersebut dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. **Kriteria Kawasan I**
    a. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat tinggi dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan / pemakaian jasa telekomunikasi
    b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama beberapa operator dapat dibangun menara rangka sebagai menara bersama.
    c. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas tanah dan di atas bangunan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.
2. **Kriteria Kawasan II**
    a. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat
    b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal
    c. Menara telekokmunikasi dapat didirikan di atas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.
3. **Kriteria Kawasan III**
    a. Lokasi dimana kepadatan banguanan bertingkat dan bangun-bangunan tidak padat
    b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal
    c. Menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum 52 meter dari permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.

Menara telekomunikasi dibangun sesuai dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Seperti disebutkan diatas, menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu menara tunggal dan menara rangka. Menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara yang dibangun di permukaan tanah maksimum dengan tinggi 72 meter, ditentukan hanya dapat dibangun dalam peruntukkan tanah II dan peruntukkan tanah III.

Dilarang membangun menara telekomunikasi pada :

- Lokasi pada peruntukkan tanah spesifik perumahan kecuali pada peruntukkan tanah perumahan renggang dengan ketentuan harus dilengkapi dengan persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga di sekitar menara dan diketahui oleh lurah setempat.
- Bangunan bertingkat yang menyediakan Sarana helipad.
- Bangunan bersejarah dan cagar budaya.

3.5.4. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Lamongan, meliputi :

1. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi yang berada di wilayah kabupaten

   Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi yang berada di wilayah kabupaten meliputi Sungai Bengawan Solo.

2. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan, meliputi :
   a. Kali Lamong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;
   b. Kali Corong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;
   c. Kali Wangen di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;
   d. Kali Cawak di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro;
   e. Kali Semarmendem di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro; dan
   f. Kali Lohgung di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Tuban.
3. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten meliputi :
   a. Sumber air, meliputi :
      1) air permukaan pada sungai di seluruh Daerah
         Air permukaan pada sungai di seluruh daerah meliputi : Kali Lanang, Kali Wunggu, Kali Waton, Kali Pulekidul, Kali Ampel, Kali Puter, Kali Dukun, Kali Jero, Kali Dunguni, Kali Peresan, Kali Jabung, Kali Keber, Kali Tunggul, Kali Asemcino, Kali Gladakkapal, Kali Sendang, Kali Wangun, Kali Gondang, Kali Sumput, Kali Kebet, Kali Palangan, Kali Balun, Kali Ngujung, Kali Lom, Kali Suwuk, Kali Ganjaran, Kali Gundeng, Kali Etan, Kali Tanjung, Kali Blawi, Kali Gayaran, Kali Gesing, Kali Kesongo, Kali Besur, Kali Tlebung, Kali Kare, Kali Pateguhan, Kali Garung, Kali Pelang, Kali Mengkuli, Kali Pengaron, Kali Otik, Kali Merukung, Kali Balong, Kali Rapah, Kali Sambong, Kali Matup, Kali Bogo, Kali Maor, Kali Cendri, Kali Randubener, Kali Wolu, Kali Wiyu, Kali Bucu, Kali Gauman, Kali Asinan, Kali Gempol, Kali Ngrayong, Kali Blungkan, Kali Dadapan, Kali Kaputren, Kali Polaman, Saluran Irigasi Jabung, Kali Kemong/Kali Sudetan, Kali Cendoro, Kali Bajul, Kali Mati Bengawan Solo, Kali Malang
      2) air permukaan pada waduk dan rawa di seluruh Daerah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.15.
      3) air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi :

a) CAT Surabaya – Lamongan (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Surabaya);

b) CAT Tuban (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan); dan

c) CAT Panceng (Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik).

4) Imbuhan Air Tanah di Daerah berada di Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

b. Prasarana sumber daya air, meliputi :

(1) Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder mengairi daerah irigasi, meliputi:

a) Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat seluas kurang lebih 23.331 (dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar yang terdiri dari : DI Bengawan Jero, DI Waduk Prijetan, dan DI Waduk Gondang.

b) Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan provinsi dengan luas total kurang lebih 12.001 (dua belas ribu satu) hektar, terdiri dari :

1) DI dalam wilayah kabupaten terdiri dari : DI Waduk Rande; DI PA Kaligerman; DI PA Butungan; DI Rawa Cungkup; DI Rawa Semando; dan DI Rawa Sekaran.

2) DI lintas kabupaten terdiri dari : DI Kali Corong; DI Rawa Jabung; dan DI Waduk Sumengko.

c) Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri dari 30 (tiga puluh) DI meliputi : DI Bengawan Solo; DI PA Karanggeneng; DI Rawa Bogo; DI Rawa Bulu; DI Rawa Geger; DI Rawa Kwanon; DI Rawa Manyar; DI Rawa Sibanget; DI Rawa Sogo; DI Sluis Keyongan; DI Waduk Bowo; DI Waduk Caling; DI Waduk Dermo; DI Waduk Dukuh; DI Waduk Jajong; DI Waduk Kuripan; DI Waduk Lego; DI Waduk Makamsantri; DI Waduk Maduran; DI Waduk Pading; DI Waduk Palangan; DI Waduk Paprit; DI Waduk Sepanji; DI Waduk Sumurgung; DI Waduk Takeran; DI Waduk Canggah; DI Waduk Delikguno; DI Waduk Kedungdowo; DI Waduk Lembeyan; dan DI Waduk Tuwiri.

(2) Sistem Pengendali Banjir meliputi: Babat Barrage; Kuro Barrage; Pintu Darurat Banjir Floodway Pelangwot – Sedayulawas; Perkuatan Tanggul dan Jabung Retarding Basin; dan Revitalisasi sungai lintas propinsi, lintas kabupaten dan sungai di dalam wilayah kabupaten.

Untuk lebih jelasnya lihat Peta 3.12

Tabel 3.15
Waduk dan Rawa di Kabupaten Lamongan

No	Nama Waduk	Lokasi	Catchment Area (Ha)	Luas (Ha		Volume Efektif (m3)	Baku Sawah (Ha)	Jumlah		Kecamatan	Kewenangan
				Waduk	Genangan			Desa	Kec.		
1	Waduk Gondang	Sugio		660		23.712.500	10.651	62	7	Sugio, Kembangbahu, Sukodadi, Tikung	Pusat
2	Waduk German (suplisi Waduk Gondang)	Sugio	4,55	80	87	1.237.500	740	7	3	Sugio, Kembangbahu, Sukodadi	Pusat
3	Waduk Bl.Ganggang (Suplisi Waduk Gondang	Sukodadi	5	142	156	1.518.750	2.111	22	3	Sukodadi, Turi, Lamongan	Pusat
4	Waduk Gempol (Suplisi Waduk Gondang)	Sukodadi	3	125	140	2.050	2.030	25	4	Kembangbahu, Sukodadi, Lamongan	Pusat
5	Waduk Mojomanis (Suplisi Waduk Gondang)	Kembangbahu	-	18	20	263	386	6	4	Kembangbahu, Sukodadi, Lamongan	Pusat
6	Waduk Lopang (Suplisi Waduk Gondang)	Kembangbahu	-	21	23	241.145	325	4	3	Kembangbahu, Lamongan, Tikung	Pusat
7	Waduk Ranvang (Suplisi Waduk Gondang)	Lamongan	3,24	65	70	817.142	1.352	16	4	Tikung, Lamongan, Deket, Turi	Pusat
8	Waduk Joto (Suplisi Waduk Gondang)	Tikung	-	113	125	1.000.000	1.551	5	1	Tikung	Pusat
9	Waduk Karangasem (Suplisi Waduk Gondang)	Sugio	2	6	7	140	639	7	1	Sugio	Pusat
10	Waduk Prijetan	Kedungpring	23	231	225	9.000.000	2.140	33	3	Kedungpring, Modo, Sugio	Pusat
11	Waduk Sentir (suplisi Waduk Prijetan)	Kedungpring	2,8	61	65	1.250.000	1.480	15	2	Kedungpring, Sugio	Pusat
12	Waduk Kalen (Suplisi Waduk Prijetan)	Kedungpring	5,5	44	50	600	893	8	2	Kedungpring, Sugio	Pusat
13	Waduk Rande	Deket	3	96	105	444.196	1.044	9	1	Deket	Propinsi
14	Waduk Sumengko	Sarirejo	-	-	-	-	53	1	1	Sarirejo	Propinsi
15	Rawa Sekaran	Sekaran	5	557	-	7.367.000	1.779	15	3	Sekaran, Karanggeneng, Maduran	Propinsi
16	Rawa Semando	Babat	-	136	-	954.000	1.661	15	3	Babat, Sekaran, Sukodadi	Propinsi
17	Rawa Cungkup	Sukodadi	-	300	-	4.620.000	1.274	13	3	Pucuk, Sekaran, Sukodadi	Propinsi
18	Rawa Jabung	Laren	12	-	-	37.660.000	2.143	12	1	Laren	Propinsi

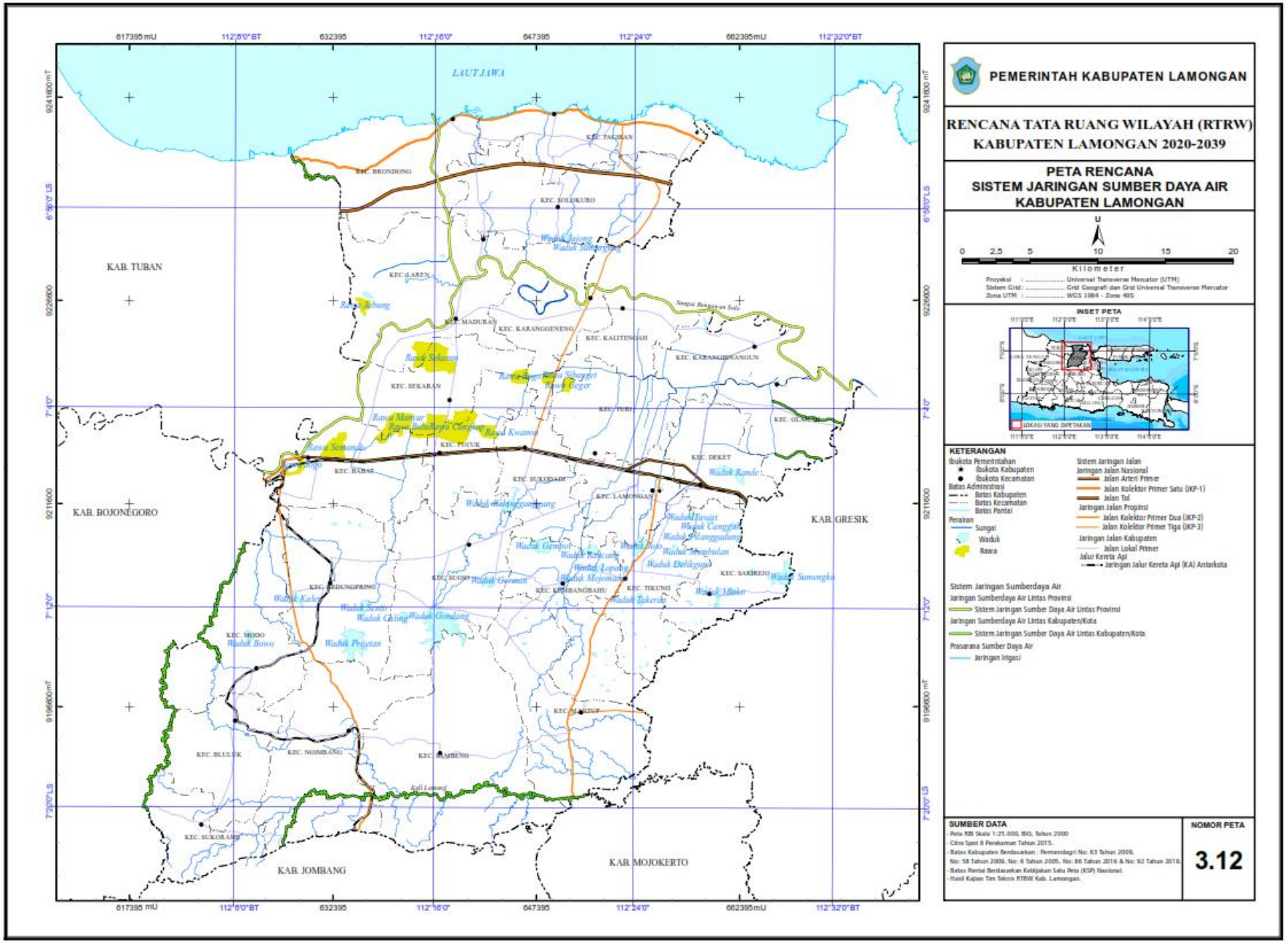
Tabel 3.15. Lanjutan

No	Nama Waduk	Lokasi	Catchment Area (Ha)	Luas (Ha		Volume Efektif (m3)	Baku Sawah (Ha)	Jumlah		Kecamatan	Kewenangan
				Waduk	Genangan			Desa	Kec.		
19	Waduk Kedungboto	Kembangbahu	5	10	11	116.250	16	3	1	Kembangbahu	Kabupaten
20	Waduk Lembeyan	Kembangbahu	16,71	6	7	50.400	20	5	1	Kembangbahu	Kabupaten
21	Waduk Canggah	Sarirejo	3,6	49	55	425.040	358	4	2	Deket, Sarirejo	Kabupaten
22	Waduk Takeran	Tikung	5,02	72	80	490.181	285	5	1	Tikung	Kabupaten
23	Waduk Delikguno	Tikung	2	47	51	419.688	257	4	1	Tikung	Kabupaten
24	Waduk Tuwiri	Tikung	3	64	70	416.892	449	6	3	Tikung, Deket, Sarirejo	Kabupaten
25	Waduk Dermo	Sarirejo	1	4	5	43	50	2	1	Sarirejo	Kabupaten
26	Waduk Dukuh	Tikung	1,5	9	10	74.945	145	4	1	Tikung	Kabupaten
27	Waduk Pelangan	Karangbinangun	-	55	60	615.250	334	5	2	Kalitengah, Karangbinangun	Kabupaten
28	Waduk Sepanji	Karanggeneng	-	37	40	137.500	286	6	2	Maduran, Karanggeneng	Kabupaten
29	Waduk Legoh	Karanggeneng	-	57	62	350.900	57	3	1	Karanggeneng	Kabupaten
30	Waduk Bowo	Modo	23	47,5	52	1.685.552	670	8	1	Modo	Kabupaten
31	Waduk Caling	Sugio	3	32	35	1.157.000	509	7	2	Sudio, Kedungpring	Kabupaten
32	Waduk Kuripan	Babat	-	12	12,5	-	202	3	1	Babat	Kabupaten
33	Waduk Pading	Pucuk	2,2	31	34	205.900	487	5	1	Pusuk	Kabupaten
34	Waduk Maduran	Maduran	-	40	43	155.800	225	4	1	Maduran	Kabupaten
35	Waduk Makamsantri	Laren	3,8	9	10	609	302	5	2	Laren, Paciran	Kabupaten
36	Waduk Jajong	Laren	-	55	60	951.600	497	4	1	Laren	Kabupaten
37	Waduk Sumurgung	Laren	2,5	12	13,5	465.300	123	1	1	Laren	Kabupaten
38	Waduk Paprit	Laren	3	13	14	278.400	144	1	1	Laren	Kabupaten
39	Rawa Bogo	Karanggeneng	3	94	-	755.250	297	2	1	Karanggeneng	Kabupaten
40	Rawa Sibanget	Karanggeneng	5,7	45	-	373.750	365	3	2	Karnggeneng, Kalitengah	Kabupaten
41	Rawa Geger	Turi	4	65	-	490.900	135	4	1	Turi	Kabupaten
42	Rawa Sogo	Babat	-	78	-	577.600	222	4	1	babat	Kabupaten
43	Rawa manyar	Sekaran	-	300	-	2.842.000	860	6	1	Sekaran	Kabupaten
44	Rawa Bulu	Sekaran	-	225	-	2.583.000	790	8	2	Sekaran, Pucuk	Kabupaten
45	Rawa Kwanon	Sidodadi	-	110	-	1.520.000	705	7	4	Pucuk, Sukodadi, Karanggeneng, Turi	Kabupaten

Sumber :keputusan Menteri Pekerjaan Umum 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemrintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten

Tabel 3.16. Imbuhan Air Tanah Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	CAT Surabaya-Lamongan		CAT Panceng		CAT Tuban		Total	
		Imbuhan Air Tanah	Lepasan Air Tanah	Imbuhan Air Tanah	Lepasan Air Tanah	Imbuhan Air Tanah	Lepasan Air Tanah	Imbuhan Air Tanah	Lepasan Air Tanah
1	Sukorame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bluluk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ngimbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sambeng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mantup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	kembangbahu	1.781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00
7	Sugio	4.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,30	0,00
8	Kedungpring	4.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,58	0,00
9	Modo	2.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,63	0,00
10	Babat	6.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,63	0,00
11	Pucuk	2.595,34	1.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,34	1.943,16
12	Sukodadi	1.741,04	3.006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,04	3.006,51
13	Lamongan	1.797,55	2.295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,55	2.295,99
14	Tikung	1.274,45	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,45	9,93
15	Sarirejo	264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,98	0,00
16	Deket	287,03	4.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	287,03	4.107,68
17	Glagah	1.602,02	3.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,02	3.399,51
18	Karangbinangun	3.536,83	1.189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,83	1.189,38
19	Turi		5.250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,09
20	Kalitengah	2.388,61	1.305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,61	1.305,99
21	Karanggeneng	3.261,13	812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,13	812,87
22	Sekaran	5.261,77	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77	143,19
23	Maduran	3.277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,68	0,00
24	Laren	6.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,01	0,00
25	Selokuro	724,18	0,00	2.371,80	0,00	0,00	0,00	3.095,98	0,00
26	Paciran	0,00	0,00	3.857,55	0,00	0,00	0,00	3.857,55	0,00
27	Brondong	0,00	0,00	935,50	0,00	2.300,54	0,00	3.236,04	0,00
	Jumlah	**53.679,50**	**23.464,30**	**7.164,85**	**0,00**	**2.300,54**	**0,00**	**63.144,89**	**23.464,30**


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
3.12

3.5.5. SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

3.5.5.1. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.5.5.1.1. RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH

Perhitungan kebutuhan air bersih di Kabupaten Lamongan didasarkan pada penduduk yang akan dilayani dan rata-rata kebutuhan air bersih setiap orang. Standart dan asumsi yang dipergunakan dalam menghitung kebutuhan air bersih di Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

- Konsumsi air : 150 lt/Org/Hari
- Non-domestik : 30%
- Kebocoran : Th 2020 : 20%, Th, 2024 : 18%, Th. 2029 : 16%, Th. 2034 : 14%, Th. 2039 : 12%
- Kebutuhan hari maksimum : 1,5
- Faktor Jam Puncak : 1,75

Sesuai dengan stadart dan asumsi tersebut di atas, maka kebutuhan air bersih di Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.17

Tabel 3.17
Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Lamongan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	1.387.726	1.424.094	1.469.554	1.515.014	1.560.474
2	Tingkat Pelayanan	(%)	92,85	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari Lt/Detik	193.275.539 2.237	213.614.100 2.472	220.433.100 2.551	227.252.100 2.630	234.071.100 2.709
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	671	742	765	789	813
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	2.908	3.214	3.317	3.419	3.522
6	Kebocoran	Lt/detik	582	579	531	479	423
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**3.490**	**3.793**	**3.847**	**3.898**	**3.945**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**5.235**	**5.689**	**5.771**	**5.847**	**5.917**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**6.107**	**6.637**	**6.733**	**6.822**	**6.903**

Keterangan :

1	Konsumsi air	: 150 lt/Org/Hari
2	Non-domestik	: 30%
4	Kebocoran	: Th 2020 : 20%, Th, 2024 : 18%, Th. 2029 : 16%, Th. 2034 : 14%, Th. 2039 : 12%
5	Kebutuhan hari maksimum	: 1,5
6	Faktor Jam Puncak	: 1,75

Tabel 3.18.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sukorame

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	21.092	21.645	22.336	23.027	23.718
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari Lt/Detik	2.587.032 30	3.246.705 38	3.350.346 39	3.453.988 40	3.557.629 41
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	9	11	12	12	12
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	39	49	50	52	54
6	Kebocoran	Lt/detik	8	9	8	7	6
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**47**	**58**	**58**	**59**	**60**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**70**	**86**	**88**	**89**	**90**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**82**	**101**	**102**	**104**	**105**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.19.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Bluluk

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	22.118	22.697	23.422	24.146	24.871
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari Lt/Detik	2.712.827 31	3.404.576 39	3.513.257 41	3.621.938 42	3.730.619 43
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	9	12	12	13	13
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	41	51	53	54	56
6	Kebocoran	Lt/detik	8	9	8	8	7
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**49**	**60**	**61**	**62**	**63**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**73**	**91**	**92**	**93**	**94**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**86**	**106**	**107**	**109**	**110**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.20
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Ngimbang

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	47.957	49.214	50.785	52.356	53.927
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari Lt/Detik	5.882.167 68	7.382.072 85	7.617.722 88	7.853.373 91	8.089.024 94
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	20	26	26	27	28
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	89	111	115	118	122
6	Kebocoran	Lt/detik	18	20	18	17	15
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**106**	**131**	**133**	**135**	**136**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**159**	**197**	**199**	**202**	**204**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**186**	**229**	**233**	**236**	**239**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.21.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sambeng

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	52.090	53.456	55.162	56.868	58.575
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	6.389.149	8.018.331	8.274.292	8.530.254	8.786.215
		Lt/Detik	74	93	96	99	102
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	22	28	29	30	31
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	96	121	124	128	132
6	Kebocoran	Lt/detik	19	22	20	18	16
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**115**	**142**	**144**	**146**	**148**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**173**	**214**	**217**	**219**	**222**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**202**	**249**	**253**	**256**	**259**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.22.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Mantup

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	45.385	46.574	48.061	49.548	51.034
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	5.566.666	6.986.120	7.209.132	7.432.143	7.655.154
		Lt/Detik	64	81	83	86	89
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	19	24	25	26	27
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	84	105	108	112	115
6	Kebocoran	Lt/detik	17	19	17	16	14
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**101**	**124**	**126**	**127**	**129**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**151**	**186**	**189**	**191**	**194**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**176**	**217**	**220**	**223**	**226**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.23.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Kembangbahu

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	48.696	49.972	51.568	53.163	54.758
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	5.972.835	7.495.860	7.735.143	7.974.426	8.213.709
		Lt/Detik	69	87	90	92	95
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	21	26	27	28	29
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	90	113	116	120	124
6	Kebocoran	Lt/detik	18	20	19	17	15
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**108**	**133**	**135**	**137**	**138**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**162**	**200**	**203**	**205**	**208**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**189**	**233**	**236**	**239**	**242**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.24.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sugio

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	62.618	64.259	66.311	68.362	70.413
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	7.680.446	9.638.898	9.946.591	10.254.285	10.561.978
		Lt/Detik	89	112	115	119	122
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	27	33	35	36	37
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	116	145	150	154	159
6	Kebocoran	Lt/detik	23	26	24	22	19
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**139**	**171**	**174**	**176**	**178**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**208**	**257**	**260**	**264**	**267**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**243**	**299**	**304**	**308**	**311**

Tabel 3.25.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Kedungpring

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	62.205	63.835	65.873	67.910	69.948
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	7.629.723	9.575.240	9.880.902	10.186.563	10.492.224
		Lt/Detik	88	111	114	118	121
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	26	33	34	35	36
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	115	144	149	153	158
6	Kebocoran	Lt/detik	23	26	24	21	19
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**138**	**170**	**172**	**175**	**177**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**207**	**255**	**259**	**262**	**265**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**241**	**298**	**302**	**306**	**309**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.26.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Modo

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	50.649	51.977	53.636	55.295	56.954
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	6.212.377	7.796.484	8.045.363	8.294.243	8.543.123
		Lt/Detik	72	90	93	96	99
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	22	27	28	29	30
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	93	117	121	125	129
6	Kebocoran	Lt/detik	19	21	19	17	15
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**112**	**138**	**140**	**142**	**144**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**168**	**208**	**211**	**213**	**216**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**196**	**242**	**246**	**249**	**252**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.27.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Babat

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	91.971	94.381	97.394	100.407	103.420
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	11.280.683	14.157.166	14.609.092	15.061.018	15.512.944
		Lt/Detik	131	164	169	174	180
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	39	49	51	52	54
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	170	213	220	227	233
6	Kebocoran	Lt/detik	34	38	35	32	28
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**204**	**251**	**255**	**258**	**261**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**306**	**377**	**382**	**388**	**392**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**356**	**440**	**446**	**452**	**457**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.28.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Pucuk

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	51.206	52.548	54.226	55.903	57.581
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	6.280.728	7.882.262	8.133.880	8.385.498	8.637.116
		Lt/Detik	73	91	94	97	100
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	22	27	28	29	30
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	95	119	122	126	130
6	Kebocoran	Lt/detik	19	21	20	18	16
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**113**	**140**	**142**	**144**	**146**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**170**	**210**	**213**	**216**	**218**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**198**	**245**	**248**	**252**	**255**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.29.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sukodadi

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	57.419	58.924	60.805	62.686	64.567
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	7.042.723	8.838.561	9.120.706	9.402.851	9.684.996
		Lt/Detik	82	102	106	109	112
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	24	31	32	33	34
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	106	133	137	141	146
6	Kebocoran	Lt/detik	21	24	22	20	17
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**127**	**157**	**159**	**161**	**163**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**191**	**235**	**239**	**242**	**245**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**223**	**275**	**279**	**282**	**286**

Tabel 3.30.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Lamongan

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	68.803	70.606	72.860	75.114	77.368
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	8.439.018	10.590.900	10.928.983	11.267.066	11.605.150
		Lt/Detik	98	123	126	130	134
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	29	37	38	39	40
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	127	159	164	170	175
6	Kebocoran	Lt/detik	25	29	26	24	21
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**152**	**188**	**191**	**193**	**196**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**229**	**282**	**286**	**290**	**293**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**267**	**329**	**334**	**338**	**342**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.31.
Air Bersih Kecamatan Tikung

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	44.291	45.452	46.903	48.353	49.804
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	5.432.501	6.817.746	7.035.382	7.253.018	7.470.655
		Lt/Detik	63	79	81	84	86
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	19	24	24	25	26
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	82	103	106	109	112
6	Kebocoran	Lt/detik	16	18	17	15	13
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**98**	**121**	**123**	**124**	**126**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**147**	**182**	**184**	**187**	**189**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**172**	**212**	**215**	**218**	**220**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.32.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sarirejo

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	25.137	25.796	26.620	27.443	28.267
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	3.083.236	3.869.437	3.992.957	4.116.477	4.239.998
		Lt/Detik	36	45	46	48	49
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	11	13	14	14	15
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	46	58	60	62	64
6	Kebocoran	Lt/detik	9	10	10	9	8
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**56**	**69**	**70**	**71**	**71**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**84**	**103**	**105**	**106**	**107**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**97**	**120**	**122**	**124**	**125**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.33.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Deket

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	45.085	46.266	47.743	49.220	50.697
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	5.529.891	6.939.968	7.161.506	7.383.044	7.604.582
		Lt/Detik	64	80	83	85	88
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	19	24	25	26	26
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	83	104	108	111	114
6	Kebocoran	Lt/detik	17	19	17	16	14
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**100**	**123**	**125**	**127**	**128**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**150**	**185**	**187**	**190**	**192**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**175**	**216**	**219**	**222**	**224**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.34.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Glagah

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	43.965	45.117	46.558	47.998	49.438
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	5.392.557	6.767.615	6.983.651	7.199.687	7.415.724
		Lt/Detik	62	78	81	83	86
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	19	23	24	25	26
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	81	102	105	108	112
6	Kebocoran	Lt/detik	16	18	17	15	13
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**97**	**120**	**122**	**123**	**125**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**146**	**180**	**183**	**185**	**187**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**170**	**210**	**213**	**216**	**219**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.35.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Karangbinangun

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	41.749	42.843	44.210	45.578	46.946
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	5.120.678	6.426.409	6.631.554	6.836.698	7.041.842
		Lt/Detik	59	74	77	79	82
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	18	22	23	24	24
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	77	97	100	103	106
6	Kebocoran	Lt/detik	15	17	16	14	13
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**92**	**114**	**116**	**117**	**119**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**139**	**171**	**174**	**176**	**178**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**162**	**200**	**203**	**205**	**208**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.36.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Turi

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	55.000	56.441	58.243	60.045	61.846
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	6.745.990	8.466.163	8.736.420	9.006.678	9.276.935
		Lt/Detik	78	98	101	104	107
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	23	29	30	31	32
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	102	127	131	136	140
6	Kebocoran	Lt/detik	20	23	21	19	17
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**122**	**150**	**152**	**154**	**156**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**183**	**225**	**229**	**232**	**235**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**213**	**263**	**267**	**270**	**274**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.37.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Kalitengah

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	36.629	37.589	38.789	39.989	41.189
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	4.492.719	5.638.326	5.818.313	5.998.300	6.178.287
		Lt/Detik	52	65	67	69	72
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	16	20	20	21	21
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	68	85	88	90	93
6	Kebocoran	Lt/detik	14	15	14	13	11
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**81**	**100**	**102**	**103**	**104**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**122**	**150**	**152**	**154**	**156**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**142**	**175**	**178**	**180**	**182**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.38.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Karanggeneng

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	46.250	47.462	48.977	50.492	52.007
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	5.672.805	7.119.324	7.346.588	7.573.851	7.801.114
		Lt/Detik	66	82	85	88	90
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	20	25	26	26	27
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	85	107	111	114	117
6	Kebocoran	Lt/detik	17	19	18	16	14
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**102**	**126**	**128**	**130**	**131**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**154**	**190**	**192**	**195**	**197**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**179**	**221**	**224**	**227**	**230**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.39.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sekaran

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	50.762	52.092	53.755	55.418	57.081
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	6.226.200	7.813.830	8.063.264	8.312.697	8.562.131
		Lt/Detik	72	90	93	96	99
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	22	27	28	29	30
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	94	118	121	125	129
6	Kebocoran	Lt/detik	19	21	19	18	15
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**112**	**139**	**141**	**143**	**144**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**169**	**208**	**211**	**214**	**216**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**197**	**243**	**246**	**250**	**253**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.40.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Maduran

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	38.593	39.605	40.869	42.133	43.397
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	4.733.657	5.940.701	6.130.340	6.319.980	6.509.619
		Lt/Detik	55	69	71	73	75
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	16	21	21	22	23
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	71	89	92	95	98
6	Kebocoran	Lt/detik	14	16	15	13	12
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**85**	**105**	**107**	**108**	**110**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**128**	**158**	**160**	**163**	**165**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**150**	**185**	**187**	**190**	**192**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.41
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Laren

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	53.817	55.227	56.990	58.753	60.516
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	6.600.920	8.284.102	8.548.547	8.812.993	9.077.438
		Lt/Detik	76	96	99	102	105
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	23	29	30	31	32
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	99	125	129	133	137
6	Kebocoran	Lt/detik	20	22	21	19	16
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**119**	**147**	**149**	**151**	**153**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**179**	**221**	**224**	**227**	**229**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**209**	**257**	**261**	**265**	**268**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.42.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Selokuro

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	48.681	49.956	51.551	53.146	54.741
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	5.970.933	7.493.473	7.732.680	7.971.887	8.211.094
		Lt/Detik	69	87	89	92	95
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	21	26	27	28	29
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	90	113	116	120	124
6	Kebocoran	Lt/detik	18	20	19	17	15
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**108**	**133**	**135**	**137**	**138**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**162**	**200**	**202**	**205**	**208**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**189**	**233**	**236**	**239**	**242**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.43.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Paciran

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	99.269	101.870	105.122	108.374	111.626
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	12.175.829	15.280.567	15.768.354	16.256.141	16.743.928
		Lt/Detik	141	177	183	188	194
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	42	53	55	56	58
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	183	230	237	245	252
6	Kebocoran	Lt/detik	37	41	38	34	30
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**220**	**271**	**275**	**279**	**282**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**330**	**407**	**413**	**418**	**423**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**385**	**475**	**482**	**488**	**494**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.44.
Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Brondong

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
1	Jumlah Penduduk	orang	76.289	78.288	80.788	83.287	85.786
2	Tingkat Pelayanan	(%)	81,77	100	100	100	100
3	Domestik	Lt/hari	9.357.243	11.743.264	12.118.133	12.493.002	12.867.872
		Lt/Detik	108	136	140	145	149
4	Non Domestik (Komersial, Fasum, Perkantoran, Rekreasi,dll)	Lt/Detik	32	41	42	43	45
5	Pemakaian Rata- Rata (Domestik + Non Domestik)	Lt/detik	141	177	182	188	194
6	Kebocoran	Lt/detik	28	32	29	26	23
	Total Kebutuhan Air Rata-Rata	Lt/detik	**169**	**208**	**212**	**214**	**217**
	Kebututuhan Hari Maksimum	Lt/detik	**253**	**313**	**317**	**321**	**325**
	Kebutuhan Jam Puncak	Lt/detik	**296**	**365**	**370**	**375**	**379**

Sumber : Hasil Analisa

3.5.5.1.2. RENCANA SISTEM PELAYANAN

Sistem pelayanan air minum di Kabupaten Lamongan ini dibagi dalam 3 zona, yaitu Zona Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan yang masing-masing meliputi kecamatan sebagai berikut:

Zona Utara :

1. Kecamatan Brondong
2. Kecamatan Paciran
3. Kecamatan Solokuro
4. Kecamatan Laren

Zona Tengah

1. Kecamatan Babat
2. Kecamatan Sekaran
3. Kecamatan Maduran
4. Kecamatan Pucuk
5. Kecamatan Sukodadi
6. Kecamatan Turi
7. Kecamatn Lamongan
8. Kecamatan Deket
9. Kecamatan Karanggeneng
10. Kecamatan Kalitengah
11. Kecamatan Karangbinangun
12. Kecamatan Glagah

Zona Selatan :

1. Kecamatan Sugio
2. Kecamatan Kembangbahu
3. Kecamatan Modo
4. Kecamatan Bluluk
5. Kecamatan Sukorame
6. Kecamatan Kedugpring
7. Kecamatan Ngimbang
8. Kecamatan Sambeng
9. Kecamatan Mantup
10. Kecamatan Tikung
11. Kecamatan Sarirejo

3.5.5.1.3. RENCANA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lamongan, meliputi:

a. Jaringan Perpipaan; dan

b. Bukan Jaringan Perpipaan.

Jaringan Perpipaan, meliputi :

a. Jaringan Perpipaan yang dikelola PDAM;

b. Jaringan Perpipaan yang dikelola Perum Jasa Tirta;

c. Jaringan Perpipaan yang dikelola HIPPAM; dan

d. Jaringan Perpipaan yang dikelola secara bersama oleh kabupaten.

Jaringan Perpipaan yang dikelola PDAM merupakan unit distribusi yang melayani:

a. Kecamatan Lamongan;

b. Kecamatan Kembangbahu;

c. Kecamatan Deket;

d. Kecamatan Sukodadi;

e. Kecamatan Brondong;

f. Kecamatan Paciran;

g. Kecamatan Sekaran;

h. Kecamatan Babat;

i. Kecamatan Kedungpring;

j. Kecamatan Ngimbang;

k. Kecamatan Pucuk;

l. Kecamatan Turi;

m. Kecamatan Sarirejo;

n. Kecamatan Tikung;

o. Kecamatan Sambeng;

p. Kecamatan Mantup dan

q. Kecamatan Sugio.

Jaringan Perpipaan yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta merupakan unit distribusi yang melayani:

a. Kecamatan Babat;

b. Kecamatan Sekaran;

c. Kecamatan Brondong;

d. Kecamatan Paciran;

e. Kecamatan Solokuro;

f. Kecamatan Laren;

g. Kecamatan Maduran;

h. Kecamatan Karanggeneng;

i. Kecamatan Kalitengah;

j. Kecamatan Karangbinangun;

k. Kecamatan Glagah; dan

l. Kecamatan Deket.

m. Kecamatan Turi.

Jaringan Perpipaan yang dikelola HIPPAM merupakan unit distribusi yang melayani masing-masing kecamatan di Daerah.

Jaringan Perpipaan yang dikelola secara bersama oleh kabupaten adalah rencana SPAM Regional, meliputi :

a. SPAM Regional klaster kecil, meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik dengan memanfaatkan Sungai Brantas; dan

b. SPAM Regional klaster besar, yaitu SPAM Regional Pantura meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dengan memanfaatkan Sungai Bengawan Solo.

(7) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh kecamatan di Daerah.

Adapun perincian sistem penyediaan air minum di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. ZONA UTARA

Zona Utara ini terdiri dari wilayah Kabupaten Lamongan yang berada di sisi utara Sungai Bengawan Solo, yaitu Kecamatan Brondong, Kecamatan Laren, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Solokuro. Zona Utara ini direncanakan akan dilayani PDAM, KPS, PJT, HIPPAM, dan BJP Terlindungi. Peningkatan pelayanan direncanakan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

A. Jaringan Perpipaan Yang Dikelola PDAM

Pelayanan PDAM direncanakan akan dikembangkan di dua kecamatan di wilayah utara yang belum terlayani, yaitu Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro. Kapasitas eksisting PDAM untuk zona utara yang hanya sebesar 25 L/det dianggap sangat jauh dari memenuhi. Dengan kapasitas sebesar itu, maka PDAM hanya akan mampu melayani air minum hingga tahun 2018, dan pada tahun 2019 air baku PDAM untuk zona tersebut mengalami defisit. Selain itu juga wilayah pelayanan PDAM hanya akan sebatas 2 Kecamatan, dimana salah satu kecamatan hanya terdiri dari 1 Desa. Sehingga, diharapkan PDAM akan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan atau membangun IPA baru dengan kapasitas sebesar 100 L/det.

Pelayanan dari KPS akan digabungkan menjadi 1 dengan pelayanan PDAM, karena telah ditetapkan pemanfaatan kapasitas supply dari KPS yang sebesar 200 L/det tersebut akan dimanfaatkan oleh PDAM sebesar 80 L/det, HIPPAM 40 L/det, dan Industri sebesar 80 L/det.

B. Jaringan Perpipaan Yang Dikelola Perum Jasa Tirta (PJT)

Jasa Tirta mengembangkan pelayanan baru di wilayah pantura pada tahun 2015 dengan membangun IPA di Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong. Pihak PJT membagi perencanaan menjadi 3 tahap, dimana Tahap 1 dan Tahap 2 terdiri dari 5 (lima) tahun perencanaan, dan Tahap 3 terdiri dari 8 (delapan) tahun perencanaan.

Pada awal pembangunan IPA tersebut memiliki kapasitas 50 L/det, dan pada tahun 2018 akan ditingkatkan menjadi 100 L/det. Selain itu juga direncanakan untuk penambahan kapasitas pada tahun 2024 hingga menjadi 200 L/det. Pembangunan IPA Sedayu Lawas oleh PJT ini juga menyediakan keperluan air bersih industri di sepanjang pantura, khususnya Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran.

C. Jaringan Perpipaan Yang Dikelola HIPPAM

Tingkat pelayanan HIPPAM pada zona Utara terbesar ada di Kecamatan Solokuro sebesar 49,08 %, sedangkan terendah adalah Kecamatan Brondong sebesar 19,7 %. Oleh karena, tingkat pelayanan masih rendah maka pada Zona Utara, pengembangan pelayanan dilakukan disemua kecamatan dengan cara penambahan sumur baru, tambahan debit dari rencana KPS total sebanyak 40 L/det dan khusus Kecamatan Solokuro dilakukan juga revitalisasi waduk Banyubang.

Alternatif peningkatan air baku dilakukan dengan 4 cara:

1. Revitalisasi Waduk/Telaga

   Alternatif pertama adalah dengan merevitalisasi waduk/telaga desa yang difungsikan warga sebagai sumber baku. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan dinding waduk dan pengerukan waduk dengan rencana kedalaman waduk menjadi 15 m.

2. Sumur Baru

   Untuk daerah yang tidak memiliki waduk/telaga, tetapi memiliki potensi air tanah yang masih layak digunakan sebagai air minum maka dilakukan pembuatan sumur baru secara bertahap.

3. KPS

   Khusus zona utara, terdapat tambahan pasokan air sebanyak 40 L/detik dari program KPS. Direncanakan mulai dapat melayani tahun 2024. Pembagian debit tiap kecamatan, yaitu:

   a. Kecamatan Brondong sebesar 13 L/det

   b. Kecamatan Paciran sebesar 13 L/det

c. Kecamatan Solokuro sebesar 7 L/det

d. Kecamatan Laren sebesar 7 L/det

4. Optimalisasi Air Baku yang tersedia

Alternatif ini digunakan untuk daerah yang tidak memiliki sumber air baku alternatif sehingga yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan air baku yang ada. Penambahan SR tetap bisa dilakukan jika kapasitas eksisting masih dapat memenuhi penambahan SR dan pemeliharaan peralatan khususnya pompa perlu dilakukan agar suplai ke pengguna tetap optimal. Alternatif ini dipakai khususnya pada zona tengah.

D. BJP Terlindungi (Bukan Jaringan Perpipaan)

Peningkatan BJP Terlindungi ini dapat berupa penutupan sumur gali agar terlindungi, ataupun pemberian bantuan berupa pompa air.

E. SPAM Regional Pantura (SPAM Regional Klaster Besar)

Selain SPAM Klaster kecil juga akan dikembangkan SPAM Regional Pantura dengan menggunakan Sungai Bengawasan Solo yang dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Bangkalan

2. ZONA TENGAH

Zona Tengah ini terdiri dari daerah-daerah yang berada tepat di sebelah selatan Sungai Bengawan Solo, yaitu Kecamatan Babat, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Turi, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Deket, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, dan Kecamatan Glagah. Pada Zona Tengah ini direncanakan akan dilayani PDAM, PJT, HIPPAM, dan BJP Terlindungi

A. Jaringan Perpipaan Yang Dikelola PDAM

Pelayanan PDAM direncanakan akan dikembangkan ke kecamatan-kecamatan lain di Zona Tengah yang belum terlayani oleh PDAM, seperti Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Maduran, Kecamatan Karangbinangun, dan Glagah. Sesuai rencana dari PDAM, Kecamatan Karanggeneng, Kalitengah dan Maduran dilayani oleh sistem Babat. Sedangkan Kecamatan Karangbinangun dan Glagah dilayani oleh sistem Plosowahyu.

Sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam Corporate Plan PDAM, bahwa produksi IPA I akan ditingkatkan hingga 515L/det. Sedangkan IPA II akan direvitalisasi pada tahun 2017 dengan kapasitas 120 L/det. Sehingga total produksi dari ketiga IPA Babat tersebut diharapkan dapat mencapai 735 L/det hingga akhir tahun perencanaan.

Sedangkan untuk IPA Plosowahyu, sesuai rencana PDAM Kabupaten Lamongan produksinya akan ditingkatkan menjadi 200 L/det. Namun pada tahun 2025 air baku untuk IPA Plosowahyu akan mengalami deficit apabila kapasitas produksinya tidak ditambah. Maka untuk IPA Plosowahyu disarankan untuk meningkatkan kapasitas produksi kembali pada tahun 2025 sebesar 100 L/det.

Sehingga diharapkan kapasitas produksi total dari IPA Plosowahyu ini adalah sebesar 300 L/det hingga akhir tahun perencanaan.

B. Jaringan Perpipaan Yang Dikelola Perum Jasa Tirta (PJT)

Pada tahun 2013 IPA Sekaran yang dikelola oleh PJT telah melayani 21,42% penduduk di Kecamatan Sekaran dan 1,26% penduduk di Kecamatan Babat. IPA Sekaran tersebut juga melayani Kecamatan Widang di Kabupaten Tuban. Dari hasil koordinasi dengan PJT, dapat diketahui bahwa PJT ingin meningkatkan kapasitas produksi IPA Sekaran pada akhir Tahap II dengan kapasitas hingga 100 L/det. Untuk peningkatan pelayanan, PJT IPA Sekaran akan tetap fokus pada kebutuhan domestik 3 kecamatan yang telah dilayani. Dan apabila hingga akhir tahun perencanaan terdapat idle capacity, maka idle tersebut akan digunakan untuk menambah supply pada sistem Sedayu Lawas yang juga dikelola oleh PJT, dan idle tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri.

C. Jaringan Perpipaan Yang Dikelola (HIPPAM)

Tingkat pelayanan HIPPAM pada zona Tengah terbesar ada di Kecamatan Turi sebesar 62,03 %, sedangkan terendah adalah Kecamatan Brondong sebesar 3,27 %. Peningkatan pelayanan pada Zona Tengah hanya bisa meningkatkan jumlah SR saja dikarenakan kurangnya sumber air baku pada zona tengah. Sedangkan, khusus Kecamatan Lamongan, direncanakan pengalihan sambungan dari semula dilayani HIPPAM, pada akhir perencanaan akan dilayani PDAM.

D. BJP Terlindungi (Bukan Jaringan Perpipaan)

Peningkatan BJP Terlindungi ini dapat berupa penutupan sumur gali agar terlindungi, ataupun pemberian bantuan berupa pompa air.

3. ZONA SELATAN

Zona selatan ini terdiri dari kecamatan-kecamatan yang terletak di selatan Kabupaten Lamongan, yaitu Kecamatan Sugio, Kembangbahu, Modo, Bluluk, Sukorame, Kedungpring, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Tikung, dan Sarirejo.Pada Zona Selatan ini direncanakan akan dilayani oleh PDAM, HIPPAM, SPAM Regional, serta BJP Terlindungi.Peningkatan pelayanan direncanakan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

A. Jaringan Perpipaan Yang Dikelola PDAM

Sistem pelayanan air minum oleh PDAM di Zona Selatan terletak di Kecamatan Gondang yang memanfaatkan air baku dari Waduk Gondang. Air baku dari waduk ini sangat terbatas, dimana maksimal pengambilan PDAM adalah sebesar 20 L/det dan tidak dapat dikembangkan lagi. Karena Waduk Gondang tersebut juga dimanfaatkan untuk irigasi sawah. Sehingga Sistem Gondang ini tidak dapat dikembangkan lebih lanjut, daerah pelayanan hanya sebatas wilayah yang telah dilayani sebelumnya, selain itu pelayanan untuk Kecamatan Sugio tidak dapat dikembangkan lagi pada tahun 2020, sedangkan untuk

Kecamatan Kembangbahu pelayanan tidak dapat dikembangkan lagi mulai tahun 2018. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan air baku yang ada.

Untuk Zona Selatan juga mendapatkan supply air minum dari SPAM Regional Mojokerto mulai tahun 2018 yang dikelola oleh PDAM. Namun karena SPAM Regional tersebut merupakan sistem yang terpisah, maka akan dibahas terpisah.

B. SPAM Regional Klaster Kecil

PDAM Kabupaten Lamongan mendapat supply air dari SPAM Regional. SPAM Regional ini memanfaatkan air baku dari Sungai Brantas yang kemudian diolah pada 2 IPA yang terdapat di Kecamatan Jetis dan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Yang mendapatkan pelayanan air minum untuk Kabupaten Lamongan telah ditetapkan beserta alokasi debitnya, yaitu:

- Kecamatan Mantup : 35 L/det
- Kecamatan Kembangbahu : 37,5 L/det
- Kecamatan Tikung : 27,5 L/det

Distribusi air minum dari SPAM Regional untuk Kabupaten Lamongan ini akan dimulai pada tahun 2018 dan dilakukan melalui kerjasama 3 kabupaten yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.

C. Jaringan Perpipaan Yang Dikelola HIPPAM

Tingkat pelayanan HIPPAM pada zona Selatan terbesar ada di Kecamatan Bluluk sebesar 37,82% , sedangkan terendah adalah Kecamatan Sugio sebesar 11,74 %. Peningkatan pelayanan pada Zona Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi beberapa waduk, sedangkan kecamatan yang tidak memiliki waduk akan menambah kapasitas air baku dengan menggali sumur bor baru. Pada akhir perencanaan Kecamatan Sukorame dan Sarirejo 100% dapat dilayani oleh HIPPAM.

D. BJP Terlindungi (Bukan Jaringan Perpipaan)

Peningkatan BJP Terlindungi ini dapat berupa penutupan sumur gali agar terlindungi, serta pemberian bantuan berupa pompa air.

3.5.5.1.4. RENCANA PENGEMBANGAN PENINGKATAN PELAYANAN PDAM

Pengembangan Peningkatan Pelayanan PDAM Kabupaten Lamongan dilakukan dengan cara:

1. Unit Air Baku

a) Pemeliharaan Intake IPA Babat

- Penguatan bangunan intake
- Pemeliharaan pompa
- Penambahan pompa cadangan

- Water meter

b) Pemeliharaan Intake IPA Plosowahyu
   - Penguatan bangunan intake
   - Pemeliharaan pompa
   - Penambahan pompa cadangan
   - Water meter

c) Pembangunan Intake IPA Baru
   - DED Intake
   - Pembangunan Intake

d) Pemeliharaan Intake Waduk Gondang
   - Penguatan bangunan intake
   - Pemeliharaan pompa
   - Penambahan pompa cadangan
   - Water meter

e) Pemeliharaan Sumur Brondong
   - Penambahan Pompa cadangan untukdengan kapasitas 15 L/det
   - Pemeliharaan unit Sumur Brondong
   - Penggantian bagian yang telah rusak atau aus

f) PemeliharaanSumur Lohgung
   - Penambahan Pompa cadangan untukdengan kapasitas 10 L/det
   - Pemeliharaan unit Sumur Lohgung
   - Penggantian bagian yang telah rusak atau aus

2. Unit Produksi

a) Upgrade IPA I Babat, dengan kapasitas akhir 515 L/det, berupa:
   - Pengoptimalan IPA I Babat eksisting
   - Pemeliharaan IPA I Babat eksisting
   - DED Penambahan kapasitas
   - Proses pembangunan upgrade IPA I Babat

b) Revitalisasi IPA II Babat dengan kapasitas 120 L/det
   - Renovasi IPA II Babat dengan mengganti bagian yang telah rusak atau aus
   - Pengoptimalan IPA II Babat eksisting
   - Pemeliharaan IPA II Babat eksisting

c) Pemeliharaan IPA III Babat

- Pemeliharaan IPA II Babat eksisting
- Penggantian bagian yang telah rusak atau aus
- Pengoptimalan IPA III Babat eksisting
- Pengecetan ulang tangki

d) Pemeliharaan IPA Waduk Gondang
- Pemeliharaan IPA Waduk Gondang
- Penggantian bagian yang telah rusak atau aus
- Pengoptimalan IPA Waduk Gondang
- Pengecetan ulang tangki

e) Up Grade IPA Plosowahyu, dengan kapasitas akhir 300 L/det
- Pengoptimalan IPA Plosowahyu eksisting
- Pemeliharaan IPA Plosowahyu eksisting
- DED Penambahan kapasitas
- Proses pembangunan upgrade IPA Plosowahyu

f) Peningkatan kapasitas atau pembuatan IPA Baru kapasitas 100 L/detik untuk Zona Utara
- DED Penambahan kapasitas
- Proses pembangunan upgrade IPA Plosowahyu

a) Penambahan/penggantian Water Meter Induk tiap IPA

3. Unit Transmisi
- Penggantian Pipa Transmisi yang rusak
- Penambahan Pipa Transmisi didaerah pengembangan

4. Unit Pelayanan

a) Penggantian Pipa Distribusi yang rusak

b) Penambahan Jaringan Pipa Distribusi didaerah pengembangan

c) Penambahan SR

d) Penyediaan water meter tiap IKK

e) Penggantian water meter pelanggan yang rusak

3.5.5.1.5. RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER AIR BAKU

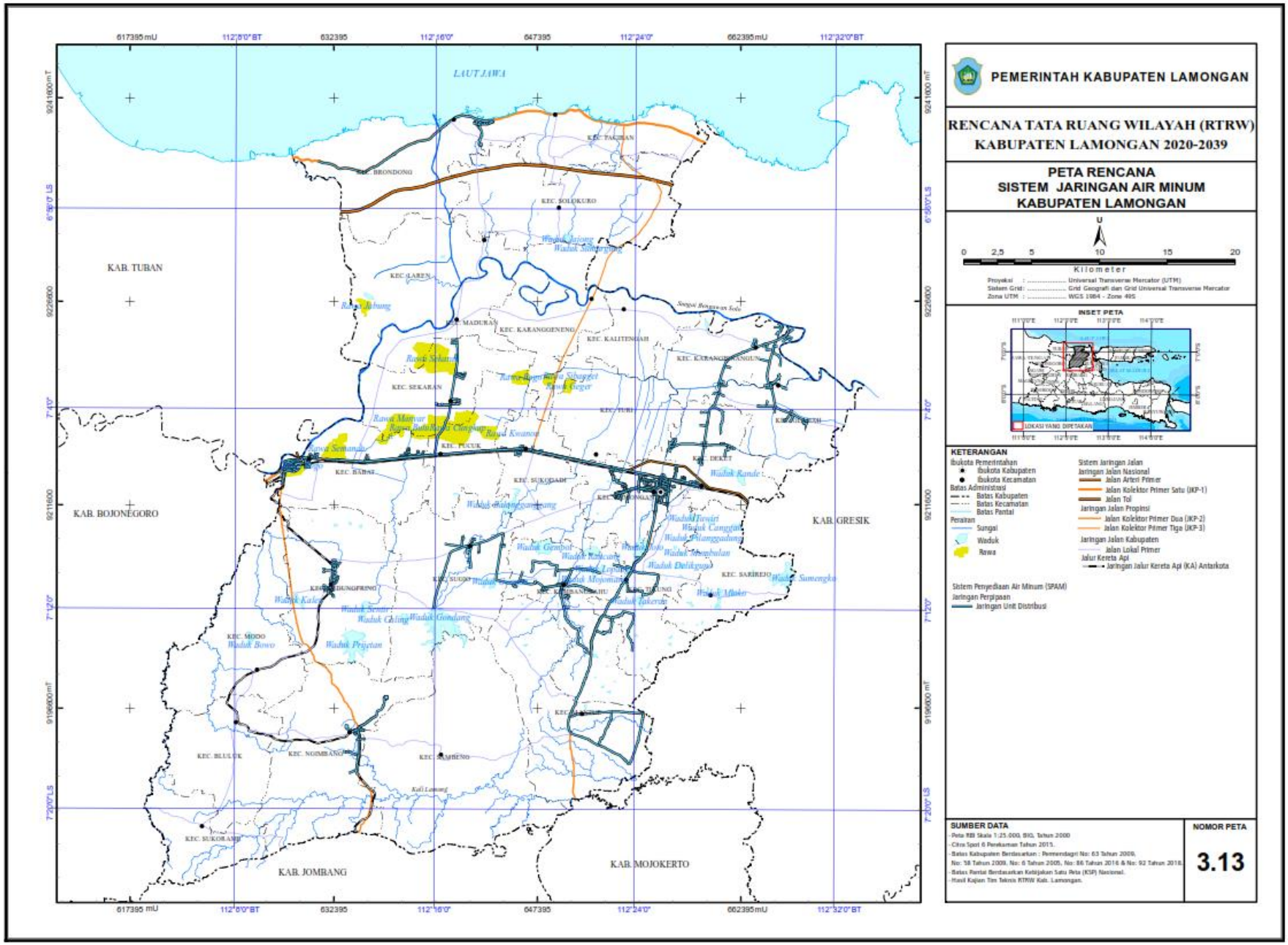
Peningkatan pelayanan oleh HIPPAM tidak terlepas dari peningkatan jumlah dan kapasitas sumber air baku. Oleh karena itu, dilakukan 2 alternatif yaitu:

1) Revitalisasi waduk

   Untuk daerah yang memiliki waduk yang dikhususkan untuk air minum, dilakukan dengan penguatan dinding waduk dan pengerukan waduk.

2) Pembuatan sumur baru

   Pembuatan sumur baru untuk daerah yang masih memiliki potensi air tanah. Kapasitas air baku yang diambil tiap titik sumur bor sebesar 2 L/det.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Jaringan Unit Distribusi
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009,
No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.13
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PALANG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. SUGIO
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKOREJO
Waduk Jajong
Waduk Sidorejo
Waduk Sekaran
Waduk Gembol
Waduk Mojomanis
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Bowo
Waduk Ceking
Waduk Kande
Waduk Dalikguno
Waduk Sumengko
Kali Lamong

3.5.5.2. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi :

a. IPAL; dan

b. Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga.

IPAL diarahkan pada kawasan yang menghasilkan limbah, meliputi:

a. Kawasan Perikanan;

b. Kawasan Peternakan;

c. Kawasan Peruntukan Industri;

d. Kawasan Pariwisata;

e. Kawasan Transportasi; dan

f. Kawasan Lainnya Yang Menghasilkan Limbah.

Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga meliputi :

a. Sistem Sanitasi Setempat di seluruh kabupaten; dan

b. Sistem Sanitasi Komunal diarahkan pada kawasan permukiman; dan

c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Kecamatan Lamongan.

Tabel 3.45
Kebutuhan Sistem Air Limbah

No.	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
	Jumlah penduduk	1.342.266	1.387.726	1.424.094	1.469.554	1.515.014	1.560.474
I.	**Cakupan Pelayanan:**						
1	Sasaran BABS (%)	10,45%	7%	0%	0%	0%	0%
2	Penduduk terlayani (Bebas BABS)-(jiwa)	1.201.999	1.286.422	1.424.094	1.469.554	1.515.014	1.560.474
3	Sasaran Penduduk BABS (jiwa)	140.267	101.304	0	0	0	0
4	Penduduk BABS yang harus ditangani (jiwa)		38.963	101.304	0	0	0
II.	**Sebaran Pelayanan Sarpras bagi Penduduk BABS yg harus Ditangani**						
1	**On-site System / Sistem Setempat**		**963.273**	**1.338.648**	**1.381.381**	**1.424.113**	**1.466.846**
	1. Rumah Tangga						
	- Septic Tank Individual/Jamban Keluarga (orang)	803.897	924.680	1.253.203	1.293.208	1.333.212	1.373.217
	- Septic Tank Individual/Jamban Keluarga (unit)	160.779	184.936	250.641	258.642	266.642	274.643
	2. Sistem Komunal						
	- Penduduk yang dilayani dengan sarana komunal		25.728	56.964	58.782	60.601	62.419
	Pelayanan MCK (jiwa)	7.573	12.864	28.482	29.391	30.300	31.209
	Jumlah MCK (unit)	76	129	285	294	303	312
	Pelayanan MCK++(jiwa)	7.573	12.864	28.482	29.391	30.300	31.209
	Jumlah MCK ++ (unit)	30	51	114	118	121	125
2	**Off-Site System / Sistem Terpusat (jiwa)**		**25.728**	**71.205**	**146.955**	**151.501**	**156.047**
	1. Pelayanan IPAL Komunal (jiwa)	841	25.728	71.205	102.869	106.051	109.233
	Jumlah IPAL Komunal (unit)	2	51	142	206	212	218
	2. Pelayanan Tangki Septik Komunal (orang)	0	0	0	44.087	45.450	46.814
	Jumlah Tangki Septik Komunal (unit)		0	0	441	455	468

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.46. Kebutuhan IPLT

No.	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.342.266	1.387.726	1.424.094	1.469.554	1.515.014	1.560.474
	Jumlah Penduduk (KK)	268.453	277.545	284.819	293.911	303.003	312.095
	Sasaran	0%	5%	10%	20%	30%	40%
	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	671	69.386	142.409	293.911	454.504	624.190
	Jumlah Penduduk terlayani (KK)	134	13.877	28.482	58.782	90.901	124.838
	Produksi Lumpur Tinja (65 gr/org/hr) - ton	0,04	4,51	9,26	19,10	29,54	40,57
	Jumlah truk	0,00	0,38	0,77	1,59	2,46	3,38
	Total Kebutuhan Truk Tinja (Dibulatkan) - unit	0	-	1	1	2	3

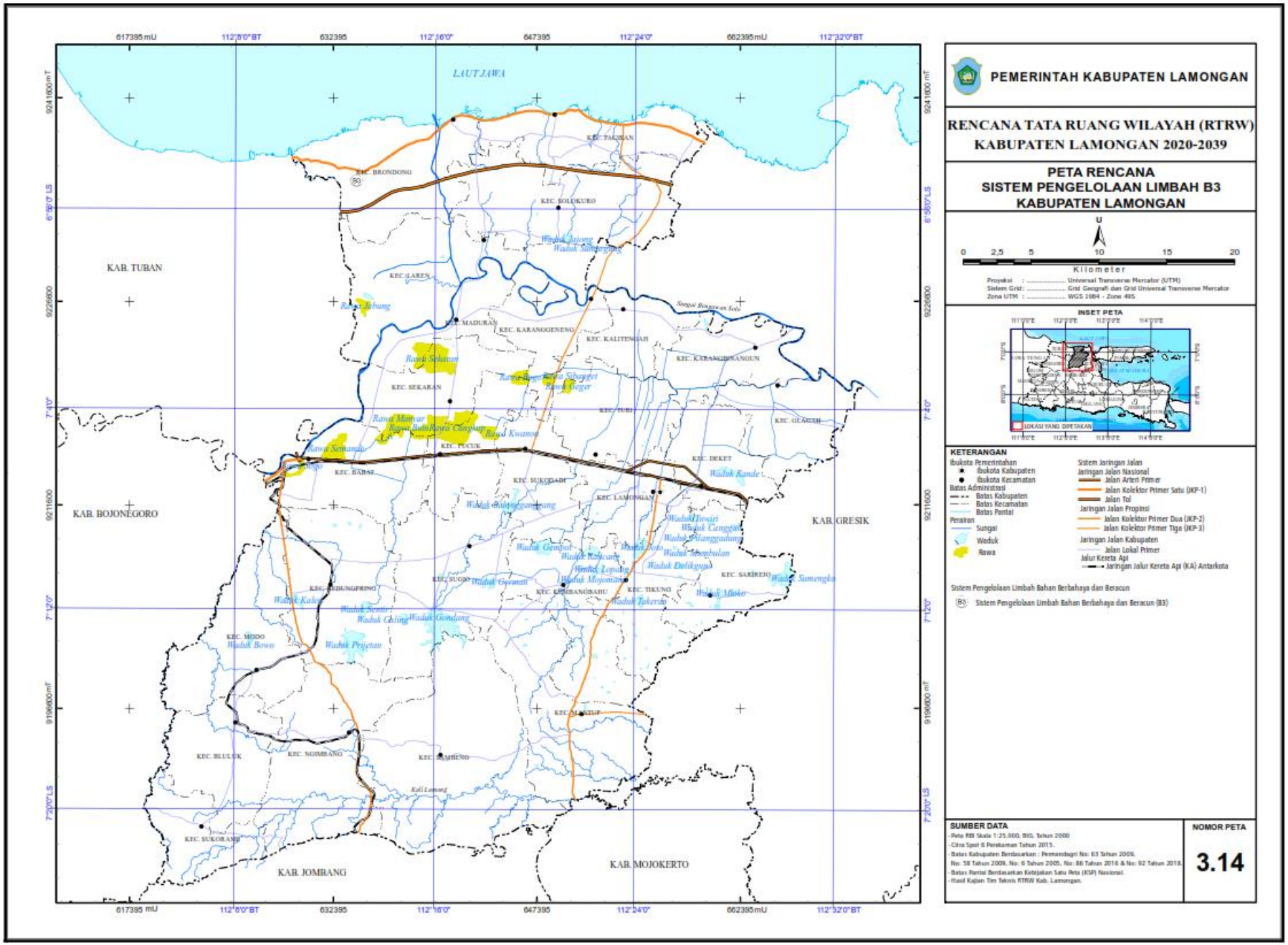
Sumber : Hasil Analisa

3.5.5.3. SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi dan peran yang cukup stratgeis bagi Propinsi Jawa Timur, dimana Kabupaten Lamongan menjadi salah satu kawasan investasi yang menjanjikan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Kedepan perlu adanya antisipasi terhadap limbah B3 yang dihasilkan oleh industri maupun kegiatan lainnya, sehingga diperlukan tempat pengelolaan limbah B3.

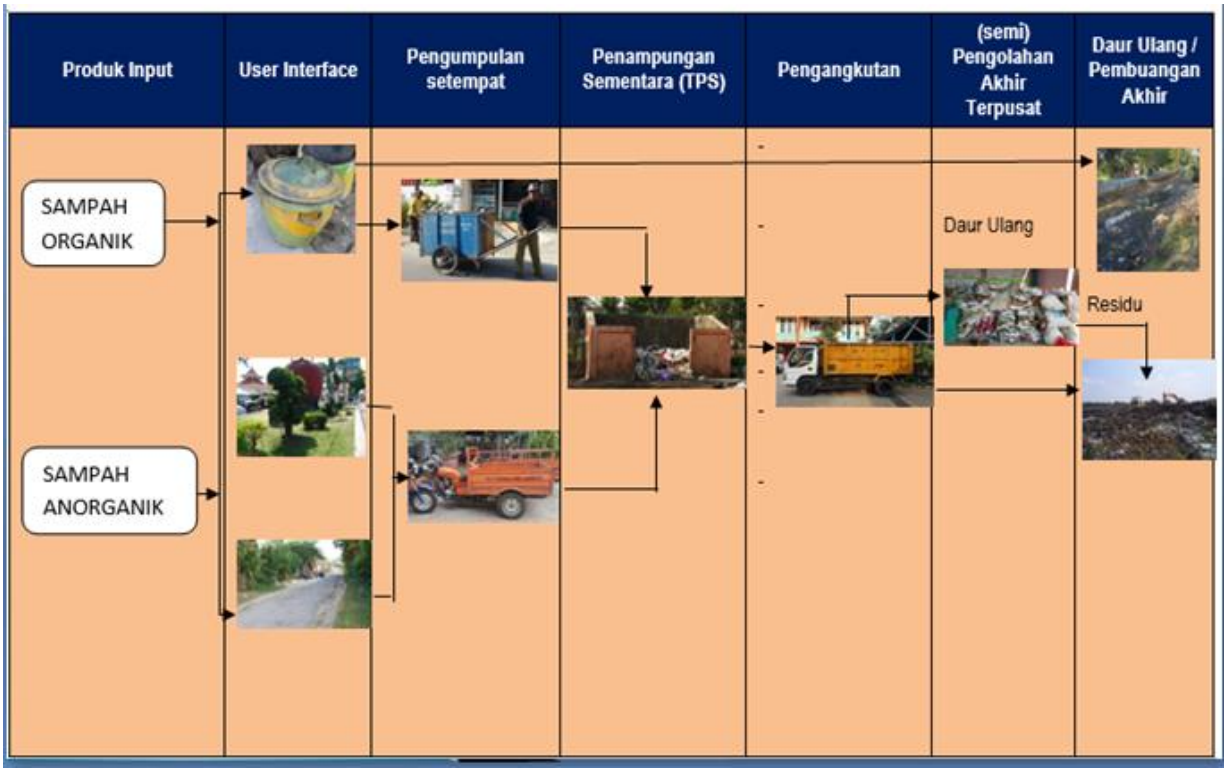
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Kabupaten Lamongan, meliputi:

a. tempat penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 kegiatan penghasil di lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan
b. tempat pengelolaan dan penimbusan akhir limbah B3 berada di Kecamatan Brondong.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH B3
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
B3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.14
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PALANG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKOREJO
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Bowo
Waduk Gemfot
Waduk Lopang
Waduk Mojomati
Waduk Dalikgung
Waduk Tawiri
Waduk Cangga
Waduk Sumengko
Waduk Takeran
Waduk Mulyo
Rawa Sekaran
Rawa Semanding
Rawa Kuwanon
Rawa Gegar
Kali Lamong

3.5.5.4. SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN

Komposisi sampah di Kabupaten Lamongan berdasarkan sumbernya terdiri dari sampah domestik dan sampah non domestik. Sampah domestik berasal dari perumahan sedangkan sampah non domestik yaitu berasal dari pasar, pertokoan/ perdagangan/jasa, industri, dan fasilitas kesehatan. Sistem pengumpulan sampah baik domestik maupun non domestik dilakukan dengan pola individual yaitu sistem pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak yang kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

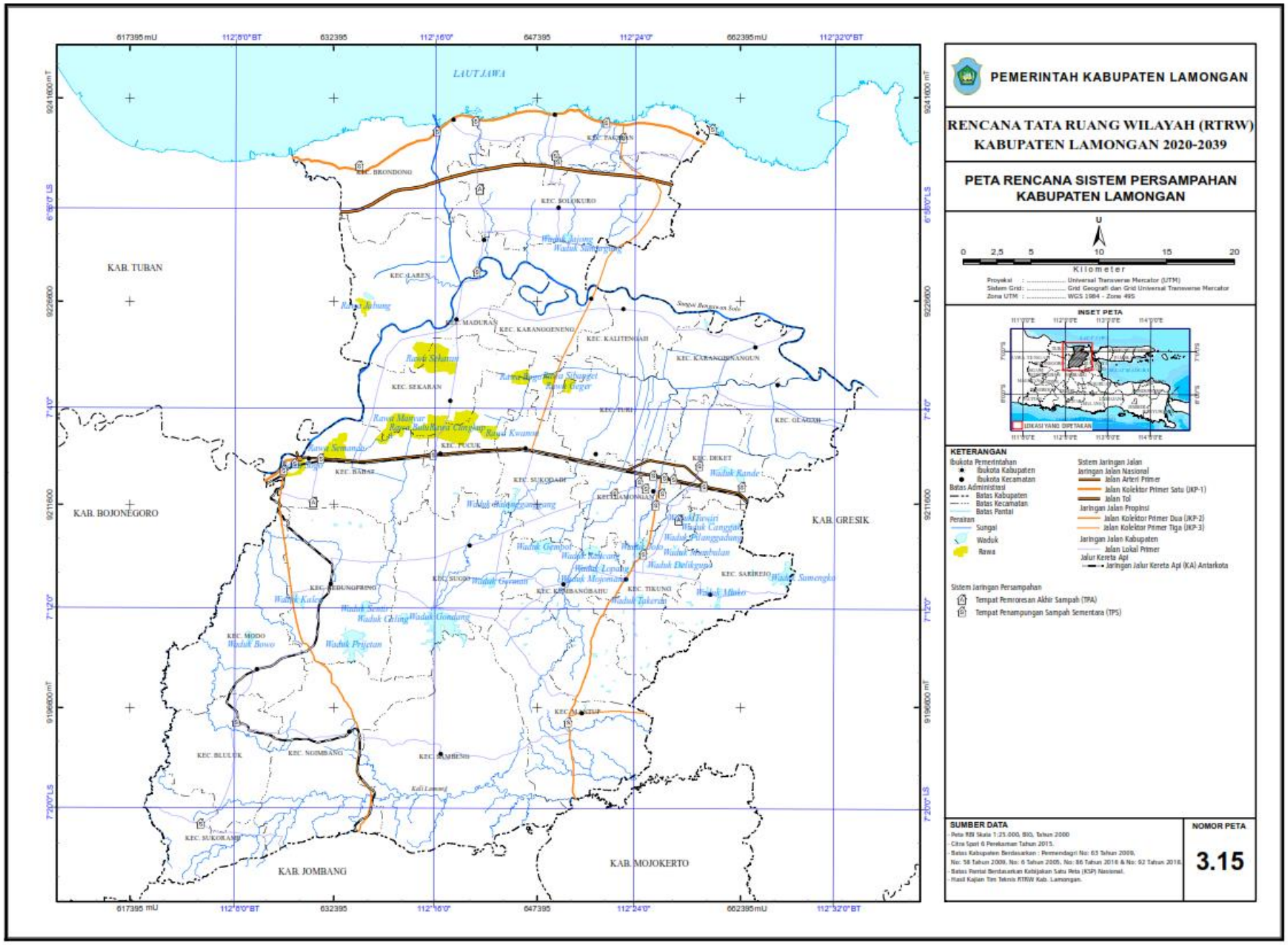


Gambar 3.6. Sistem Persampahan di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan kondisi eksisting yang sudah disampaikan dalam Bab 1, maka prediksi timbulan sampah yang dihasilkan termasuk kebutuhan sarana dan prasarananya sebagaimana terlihat pada tabel (3.49-3.76)

Berdasarkan hasil prediksi tersebut, serta dengan melihat kondisi eksisting yang ada, maka kedepannya untuk pengelolaan sistem persampahan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Tempat Penampungan Sampah Sementara di seluruh kecamatan.
2. Tempat Pengelolaan Sampah 3R di seluruh kecamatan;
3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh kecamatan; dan
4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah berada di:
    a. Wilayah Utara Daerah;
    b. Wilayah Tengah Daerah; dan
    c. Wilayah Selatan Daerah.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA SISTEM PERSAMPAHAN
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
3.15

Tabel 3.47.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kabupaten Lamongan

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KABUPATEN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.342.266	1.387.726	1.424.094	1.469.554	1.515.014	1.560.474
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	3.356	3.469	3.560	3.674	3.788	3.901
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	1.443	2.082	2.314	2.572	2.841	3.121
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	825	1.189	1.322	1.470	1.623	1.783
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	231	333	370	411	455	499
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	90	130	145	161	178	195
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	33,56	173,47	356,02	551,08	757,51	975,30
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	3	17	36	55	76	98
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	13.423	69.386	142.409	220.433	303.003	390.119
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**3.322**	**3.296**	**3.204**	**3.123**	**3.030**	**2.926**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.48.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sukorame

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KABUPATEN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	20.401	21.092	21.645	22.336	23.027	23.718
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	51	53	54	56	58	59
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	22	32	35	39	43	47
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	13	18	20	22	25	27
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	4	5	6	6	7	8
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	1	2	2	2	3	3
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	0,51	2,64	5,41	8,38	11,51	14,82
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	0	1	1	1	1
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	204	1.055	2.164	3.350	4.605	5.929
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**50**	**50**	**49**	**47**	**46**	**44**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.49.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Bluluk

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	21.393	22.118	22.697	23.422	24.146	24.871
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	53	55	57	59	60	62
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	23	33	37	41	45	50
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	13	19	21	23	26	28
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	4	5	6	7	7	8
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	1	2	2	3	3	3
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	0,53	2,76	5,67	8,78	12,07	15,54
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	0	1	1	1	2
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	214	1.106	2.270	3.513	4.829	6.218
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**53**	**53**	**51**	**50**	**48**	**47**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.50.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Ngimbang

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	46.386	47.957	49.214	50.785	52.356	53.927
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	116	120	123	127	131	135
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	50	72	80	89	98	108
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	28	41	46	51	56	62
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	8	12	13	14	16	17
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	4	5	6	6	7
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,16	5,99	12,30	19,04	26,18	33,70
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	464	2.398	4.921	7.618	10.471	13.482
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**115**	**114**	**111**	**108**	**105**	**101**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.51.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sambeng

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	50.384	52.090	53.456	55.162	56.868	58.575
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	126	130	134	138	142	146
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	54	78	87	97	107	117
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	31	45	50	55	61	67
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	9	13	14	15	17	19
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	5	5	6	7	7
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,26	6,51	13,36	20,69	28,43	36,61
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	504	2.605	5.346	8.274	11.374	14.644
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**125**	**124**	**120**	**117**	**114**	**110**

Tabel 3.52.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Mantup

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	43.898	45.385	46.574	48.061	49.548	51.034
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	110	113	116	120	124	128
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	47	68	76	84	93	102
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	27	39	43	48	53	58
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	8	11	12	13	15	16
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	4	5	5	6	6
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,10	5,67	11,64	18,02	24,77	31,90
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	2	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	439	2.269	4.657	7.209	9.910	12.759
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**109**	**108**	**105**	**102**	**99**	**96**

Tabel 3.53.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Kembangbahu

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	47.101	48.696	49.972	51.568	53.163	54.758
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	118	122	125	129	133	137
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	51	73	81	90	100	110
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	29	42	46	52	57	63
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	8	12	13	14	16	18
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	5	5	6	6	7
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,18	6,09	12,49	19,34	26,58	34,22
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	471	2.435	4.997	7.735	10.633	13.690
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**117**	**116**	**112**	**110**	**106**	**103**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.54.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sugio

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	60.567	62.618	64.259	66.311	68.362	70.413
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	151	157	161	166	171	176
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	65	94	104	116	128	141
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	37	54	60	66	73	80
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	10	15	17	19	21	23
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	4	6	7	7	8	9
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,51	7,83	16,06	24,87	34,18	44,01
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	2	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	606	3.131	6.426	9.947	13.672	17.603
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**150**	**149**	**145**	**141**	**137**	**132**

Tabel 3.55
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Kedungpring

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	60.167	62.205	63.835	65.873	67.910	69.948
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	150	156	160	165	170	175
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	65	93	104	115	127	140
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	37	53	59	66	73	80
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	10	15	17	18	20	22
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	4	6	6	7	8	9
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,50	7,78	15,96	24,70	33,96	43,72
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	2	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	602	3.110	6.383	9.881	13.582	17.487
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**149**	**148**	**144**	**140**	**136**	**131**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.56.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Modo

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	48.990	50.649	51.977	53.636	55.295	56.954
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	122	127	130	134	138	142
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	53	76	84	94	104	114
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	30	43	48	54	59	65
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	8	12	14	15	17	18
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	5	5	6	6	7
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,22	6,33	12,99	20,11	27,65	35,60
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	490	2.532	5.198	8.045	11.059	14.239
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**121**	**120**	**117**	**114**	**111**	**107**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.57.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Babat

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	88.958	91.971	94.381	97.394	100.407	103.420
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	222	230	236	243	251	259
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	96	138	153	170	188	207
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	55	79	88	97	108	118
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	15	22	25	27	30	33
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	6	9	10	11	12	13
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	2,22	11,50	23,60	36,52	50,20	64,64
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	2	4	5	6
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	890	4.599	9.438	14.609	20.081	25.855
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**220**	**218**	**212**	**207**	**201**	**194**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.58.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Pucuk

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	49.529	51.206	52.548	54.226	55.903	57.581
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	124	128	131	136	140	144
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	53	77	85	95	105	115
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	30	44	49	54	60	66
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	9	12	14	15	17	18
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	5	5	6	7	7
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,24	6,40	13,14	20,33	27,95	35,99
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	495	2.560	5.255	8.134	11.181	14.395
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**123**	**122**	**118**	**115**	**112**	**108**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.59.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sukodadi

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	55.538	57.419	58.924	60.805	62.686	64.567
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	139	144	147	152	157	161
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	60	86	96	106	118	129
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	34	49	55	61	67	74
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	10	14	15	17	19	21
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	4	5	6	7	7	8
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,39	7,18	14,73	22,80	31,34	40,35
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	555	2.871	5.892	9.121	12.537	16.142
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**137**	**136**	**133**	**129**	**125**	**121**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.60.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Lamongan

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	66.549	68.803	70.606	72.860	75.114	77.368
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	166	172	177	182	188	193
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	72	103	115	128	141	155
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	41	59	66	73	80	88
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	11	17	18	20	23	25
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	4	6	7	8	9	10
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,66	8,60	17,65	27,32	37,56	48,35
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	2	3	4	5
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	665	3.440	7.061	10.929	15.023	19.342
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**165**	**163**	**159**	**155**	**150**	**145**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.61.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Tikung

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	42.840	44.291	45.452	46.903	48.353	49.804
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	107	111	114	117	121	125
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	46	66	74	82	91	100
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	26	38	42	47	52	57
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	7	11	12	13	15	16
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	4	5	5	6	6
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,07	5,54	11,36	17,59	24,18	31,13
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	2	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	428	2.215	4.545	7.035	9.671	12.451
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**106**	**105**	**102**	**100**	**97**	**93**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.62.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sarirejo

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	24.314	25.137	25.796	26.620	27.443	28.267
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	61	63	64	67	69	71
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	26	38	42	47	51	57
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	15	22	24	27	29	32
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	4	6	7	7	8	9
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	2	2	3	3	3	4
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	0,61	3,14	6,45	9,98	13,72	17,67
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	0	1	1	1	2
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	243	1.257	2.580	3.993	5.489	7.067
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**60**	**60**	**58**	**57**	**55**	**53**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.63.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Deket

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	43.608	45.085	46.266	47.743	49.220	50.697
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	109	113	116	119	123	127
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	47	68	75	84	92	101
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	27	39	43	48	53	58
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	8	11	12	13	15	16
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	4	5	5	6	6
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,09	5,64	11,57	17,90	24,61	31,69
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	2	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	436	2.254	4.627	7.162	9.844	12.674
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**108**	**107**	**104**	**101**	**98**	**95**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.64.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Glagah

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	42.525	43.965	45.117	46.558	47.998	49.438
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	106	110	113	116	120	124
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	46	66	73	81	90	99
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	26	38	42	47	51	57
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	7	11	12	13	14	16
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	4	5	5	6	6
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,06	5,50	11,28	17,46	24,00	30,90
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	2	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	425	2.198	4.512	6.984	9.600	12.360
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**105**	**104**	**102**	**99**	**96**	**93**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.65.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Karangbinangun

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	40.381	41.749	42.843	44.210	45.578	46.946
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	101	104	107	111	114	117
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	43	63	70	77	85	94
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	25	36	40	44	49	54
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	7	10	11	12	14	15
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	4	4	5	5	6
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,01	5,22	10,71	16,58	22,79	29,34
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	2	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	404	2.087	4.284	6.632	9.116	11.736
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**100**	**99**	**96**	**94**	**91**	**88**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.66.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Turi

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	53.198	55.000	56.441	58.243	60.045	61.846
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	133	137	141	146	150	155
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	57	82	92	102	113	124
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	33	47	52	58	64	71
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	9	13	15	16	18	20
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	4	5	6	6	7	8
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,33	6,87	14,11	21,84	30,02	38,65
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	532	2.750	5.644	8.736	12.009	15.462
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**132**	**131**	**127**	**124**	**120**	**116**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.67.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Kalitengah

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	35.429	36.629	37.589	38.789	39.989	41.189
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	89	92	94	97	100	103
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	38	55	61	68	75	82
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	22	31	35	39	43	47
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	6	9	10	11	12	13
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	2	3	4	4	5	5
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	0,89	4,58	9,40	14,55	19,99	25,74
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	0	1	1	2	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	354	1.831	3.759	5.818	7.998	10.297
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**88**	**87**	**85**	**82**	**80**	**77**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.68.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Karanggeneng

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	44.735	46.250	47.462	48.977	50.492	52.007
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	112	116	119	122	126	130
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	48	69	77	86	95	104
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	27	40	44	49	54	59
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	8	11	12	14	15	17
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	4	5	5	6	7
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,12	5,78	11,87	18,37	25,25	32,50
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	447	2.313	4.746	7.347	10.098	13.002
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**111**	**110**	**107**	**104**	**101**	**98**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.69.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Sekaran

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	49.099	50.762	52.092	53.755	55.418	57.081
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	123	127	130	134	139	143
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	53	76	85	94	104	114
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	30	44	48	54	59	65
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	8	12	14	15	17	18
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	5	5	6	6	7
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,23	6,35	13,02	20,16	27,71	35,68
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	491	2.538	5.209	8.063	11.084	14.270
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**122**	**121**	**117**	**114**	**111**	**107**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.70.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Maduran

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	37.329	38.593	39.605	40.869	42.133	43.397
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	93	96	99	102	105	108
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	40	58	64	72	79	87
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	23	33	37	41	45	50
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	6	9	10	11	13	14
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	4	4	4	5	5
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	0,93	4,82	9,90	15,33	21,07	27,12
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	0	1	2	2	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	373	1.930	3.960	6.130	8.427	10.849
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**92**	**92**	**89**	**87**	**84**	**81**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.71.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Laren

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	52.054	53.817	55.227	56.990	58.753	60.516
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	130	135	138	142	147	151
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	56	81	90	100	110	121
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	32	46	51	57	63	69
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	9	13	14	16	18	19
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	5	6	6	7	8
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,30	6,73	13,81	21,37	29,38	37,82
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	4
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	521	2.691	5.523	8.549	11.751	15.129
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**129**	**128**	**124**	**121**	**118**	**113**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.72.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Solokuro

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	47.086	48.681	49.956	51.551	53.146	54.741
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	118	122	125	129	133	137
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	51	73	81	90	100	109
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	29	42	46	52	57	63
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	8	12	13	14	16	18
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	3	5	5	6	6	7
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,18	6,09	12,49	19,33	26,57	34,21
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	1	2	3	3
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	471	2.434	4.996	7.733	10.629	13.685
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**117**	**116**	**112**	**110**	**106**	**103**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.73.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Paciran

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	96.017	99.269	101.870	105.122	108.374	111.626
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	240	248	255	263	271	279
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	103	149	166	184	203	223
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	59	85	95	105	116	128
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	17	24	26	29	33	36
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	6	9	10	11	13	14
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	2,40	12,41	25,47	39,42	54,19	69,77
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	3	4	5	7
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	960	4.963	10.187	15.768	21.675	27.907
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**238**	**236**	**229**	**223**	**217**	**209**

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 3.74.
Kebutuhan Sistem Persampahan Kecamatan Brondong

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2015	Tahun				
			Th.2020	Th. 2024	Th. 2029	Th. 2034	Th. 2039
I.	**PELAYANAN SAMPAH KECAMATAN**						
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	73.790	76.289	78.288	80.788	83.287	85.786
2	Produksi Sampah - 2,5 kg/jiwa	184	191	196	202	208	214
3	Sasaran pelayanan persampahan	43%	60%	65%	70%	75%	80%
4	Produksi Sampah yang akan ditangani (ton)	79	114	127	141	156	172
5	Total Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 0,35 ton/hari/rit	45	65	73	81	89	98
6	Total Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. xxx ton/hari	13	18	20	23	25	27
7	Total Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. Xx ton/hr - per unit	5	7	8	9	10	11
II.	**PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA**						
1	Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	1,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
2	Volume sampah yang diolah (ton/hari)	1,84	9,54	19,57	30,30	41,64	53,62
3	**Total** Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	0	1	2	3	4	5
4	Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	738	3.814	7.829	12.118	16.657	21.446
III	**JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (ton/hari)**	**183**	**181**	**176**	**172**	**167**	**161**

Sumber : Hasil Analisa

3.5.5.5. RENCANA SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA

Wilayah Kabupaten Lamongan sering mengalami bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi adalah bencana banjir karena sebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan adalah dataran rendah yang mempunyai ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut terdapat daerah yang rawan terhadap resiko banjir/tergenang Banjir di Kabupaten Lamongan merupakan banjir tahunan. Pada tahun 2016 wilayah Kabupaten Lamongan yang tergenangi banjir adalah Babat, Glagah, Laren, Maduran, Karangbinangun, Karanggeneng dan Modo.

Total wilayah yang tergenang mencapai 421 Ha. Banjir yang terjadi pada tahun 2016 menggenangi permukiman dan areal pertanian. Pada kejadian banjir tersebut tidak terdapat korban meninggal ataupun mengungsi. Kerugian yang terjadi akibat bencana banjir tersebut diperkirakan mencapai Rp. 2.111.400.000,-. Kerugian terbesar akibat bencana banjir terjadi di Kecamatan Babat yakni sebesar Rp. 804.000.000,- dengan luasan area yang terendam banjir adalah 134 Ha. Area tersebut merupakan area pertanian dengan komoditi padi seluas 124 Ha dan jagung seluas 10 Ha.

Komoditi pertanian dan perikanan yang paling banyak terendam akibat banjir di Kabupaten Lamongan adalah komoditi padi yaitu seluas 315 Ha, jagung seluas 99 Ha dan komoditi ikan seluas 7 Ha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, banjir yang terjadi di Kabupaten Lamongan tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 areal pertanian dan perikanan yang terendam air seluas 5.875,9 Ha, sedangkan pada tahun 2016 seluas 421 Ha, sehingga terjadi penurunan areal yang terendam air seluas 5.454,9 Ha.

Selain menyebabkan kerugian pada komoditi pertanian dan perikanan, banjir di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 juga mengakibatkan kerugian pada infrastruktur berupa jalan desa, pekarangan, dan pasar. Jalan desa yang rusak akibat banjir sepanjang 1.350 m, pekarangan seluas 4 Ha, dan pasar sebanyak 1 unit.

Pada tahun 2016 di Kabupaten Lamongan tidak terjadi bencana kekeringan, hal ini didukung dengan adanya curah hujan yang terjadi hampir sepanjang tahun. Sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan area kekeringan yang sangat besar. Pada tahun 2015 total wilayah yang mengalami kekeringan mencapai 5.025 Ha, meliputi 14 wilayah Kecamatan. Kecamatan yang mengalami kekeringan terluas adalah Kecamatan Turi seluas 986 Ha. Kerugian yang terjadi akibat bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp. 11.257.415.000,-.

Kerugian terbesar akibat bencana kekeringan tahun 2015 terjadi di kecamatan Turi yakni sebesar Rp. 2.206.759.000 dengan luasan area yang mengalami kekeringan adalah 986 Ha. Sedangkan diantara kecamatan yang mengalami kekeringan yang paling ringan adalah kecamatan Lamongan dengan luas area yang mengalami kekeringan seluas 10,5 Ha dengan kerugian sebesar Rp. 23.500.000.

Pada tahun 2016, selain banjir bencana yang terjadi di Kabupaten Lamongan adalah bencana kebakaran hutan yang terjadi di 7 kecamatan dengan luas hutan yang terbakar 188 Ha, dan perkiraan kerugian sebesar Rp.465.263.000,-

Sedangkan kerugian terbesar akibat bencana kebakaran hutan terjadi di kecamatan Mantup yakni sebesar Rp. 169.955.000 dengan luasan area yang terbakar adalah 68 Ha. Berdasarkan jenis tanaman yang rusak akibat bencana kebakaran hutan, maka tanaman yang mengalami kerusakan adalah jati, kayu putih, jabon, johar, mahoni dan tanaman rimba lain, dan yang terbesar mengalami kerusakan adalah tanaman jati sebanyak 72.073 pohon.

Tabel 3.75.
Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Lamongan Tahun 2016

No	Kecamatan	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban Mengungsi	Jumlah Korban Meninggal	PerkiraanKerugian (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Babat	134,0	0	0	804.000.00
2	Glagah	47,0	0	0	235.730.00
3	Laren	12,0	0	0	60.170.000
4	Maduran	91,0	0	0	324.500.00
5	Karangbinangun	23,0	0	0	115.300.00
6	Karanggeneng	30,0	0	0	150.400.00
7	Modo	84,0	0	0	421.300.00
Tot		421,0	**0**	**0**	2.111.400.

Sumber : DLH Kabupaten Lamongan

Tabel 3.76.
Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian di Kabupaten Lamongan Tahun 2016

No	Kecamatan	Perkiraan	Perkiraan Kerugian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sukorame	7,6	18.719.00
2	Bluluk	15,4	37.932.000
3	Ngimbang	20,0	49.219.000
4	Sambeng	26,0	63.986.000
5	Mantup	68,0	169.955.000
6	Sugio	21,0	51.656.000
7	Modo	30,0	73.796.000
Tota		188,0	465.263.000

Selain rawan terhadap bencana banjir Kabupaten Lamongan juga merupakan daerah rawan terhadap bencana gelombang pasang yang terjadi di wilayah pantai utara. Selain itu Kabupaten Lamongan juga sebagian wilayahnya merupakan bencana gempa, rawan longsor dan kebakaran hutan

Jalur evakuasi yang dipergunakan adalah jaringan jalan yang berdekatan dengan kawasan rawan bencana. Masing – masing kawasan rawan bencana akan memanfaatkan jalur evakuasi yang berbeda tergantung kepada jaringan jalan yang ada pada lokasi tersebut. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lamongan hampir terjadi di seluruh kecamatan karena luapan Sungai Bengawan Solo, luapan Kali Lamongan, maupun adanya sedimentasi pada beberapa sungai. Jalur evakuasi bencana yang dipergunakan untuk kawasan rawan banjir adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor primer dua (JKP-2), jalan kolektor primer tiga (JKP-3), jalan lokal primer dan jalan desa yang berada disekitar kawasan rawan bencana banjir di seluruh kecamatan. Adapun ruang evakuasi bencana yang dapat dimanfaatkan adalah kantor desa, kantor kecamatan terdekat, lapangan sepak bola maupun ruang ruang publik lainnya.

2. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor terjadi pada umumnya pada kawasan disepanjang Sungai Bengawan Solo. Jalur evakuasi bencana yang dimanfaatkan adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer tiga (JKP-3), jalan lokal primer dan jalan desa yang berada di sekitar lokasi bencana khususnya di :

a. **Kecamatan Babat** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Bedahan, Desa Kebalanpelang, Desa Trepan, Desa Truni, Kelurahan Babat dan Kelurahan Banaran

b. **Kecamatan Glagah** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Jatirenggo, Desa Karangturi, Desa Konang dan Desa Meluwur

c. **Kecamatan Kalitengah** potensi terjadi bahaya longsor pada Desa Butungan, Desa Canditunggal, Desa Kalitengah, Desa Kediren, Desa Kuluran, Desa Pengangsalan, Desa Sugihwaras

d. **Kecamatan Karangbinangun** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Banjarejo, Desa Banyuurip, Desa Bogobabadan, Desa Gawerejo, Desa Karangbinangun, Desa Kuro, Desa Palangan, Desa Watangpanjang, dan Desa Windu

e. **Kecamatan Karanggeneng** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Jagran, Desa Karanggeneng, Desa Karangwungu, Desa Mertani, Desa Prijekngablag, Desa Sumberwudi dan Desa Tracal

f. **Kecamatan Laren** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Bulubrangsi, Desa Bulutigo, Desa Centini, Desa Duri Kulon, Desa Gampangsejati, Desa Godog, Desa Karangtawar, Desa Karangwungu Lor, Desa Keduyung, Desa Laren, Desa Mojoasem, Desa Pasenggrahan, Desa Pelangwot, Desa Siser dan Desa Tamanprijek

g. **Kecamatan Maduran** terjadi bencana longsor pada Desa Blumbang, Desa Brumbun, Desa Duri Wetan, Desa Gedangan, Desa Jangkungsomo, Desa Klagensrampat, Desa Maduran, Desa Pangean, Desa Pangkatrejo, Desa Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Siwuran dan Desa Taji

h. **Kecamatan Sekaran** terjadi bencana longsor pada Desa Besur, Desa Kendal, Desa Keting dan Desa Titik

Adapun ruang evakuasi bencana yang dapat dimanfaatkan adalah kantor desa, kantor kecamatan terdekat, lapangan sepak bola maupun ruang ruang publik lainnya.

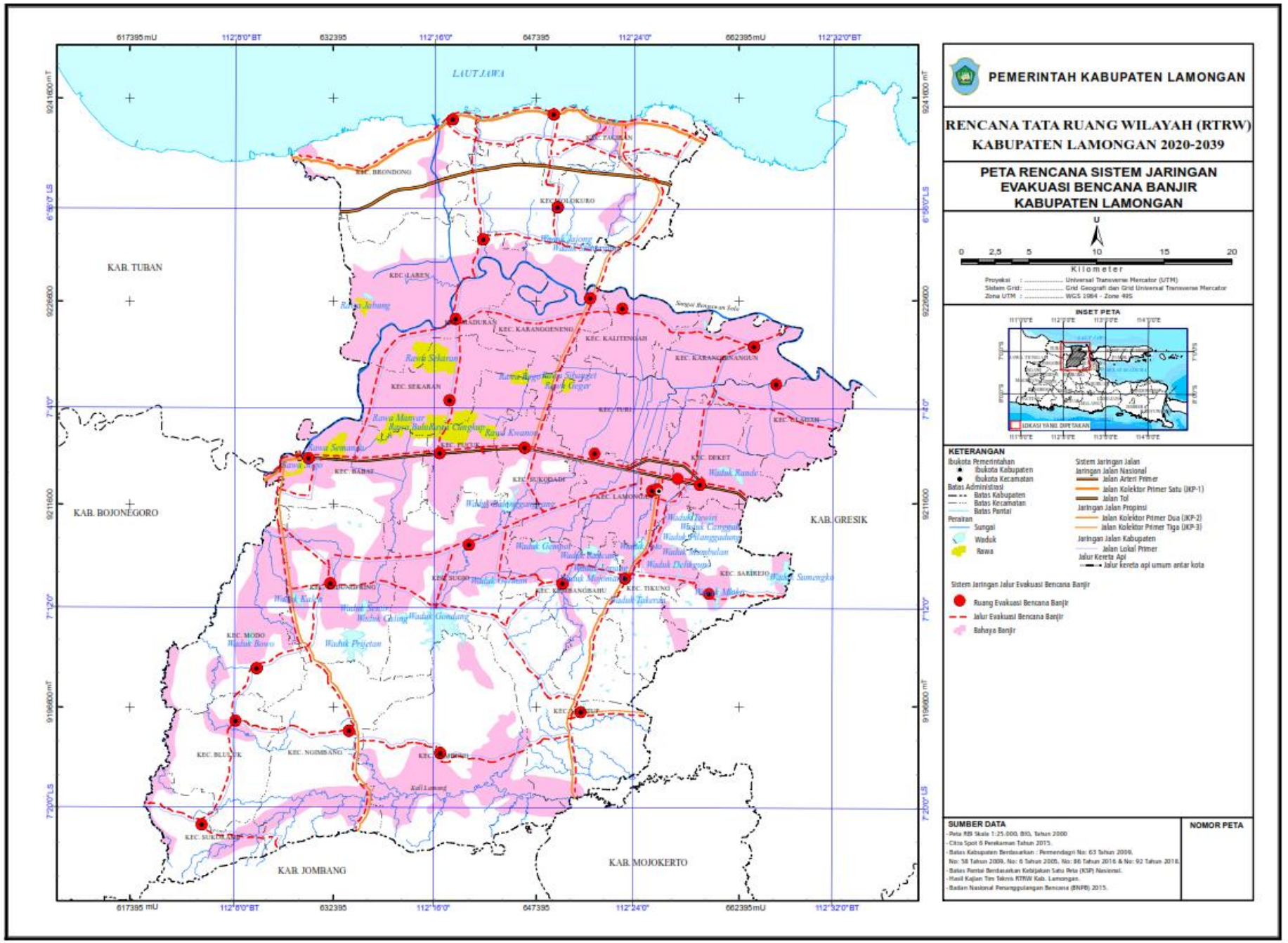
3. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan

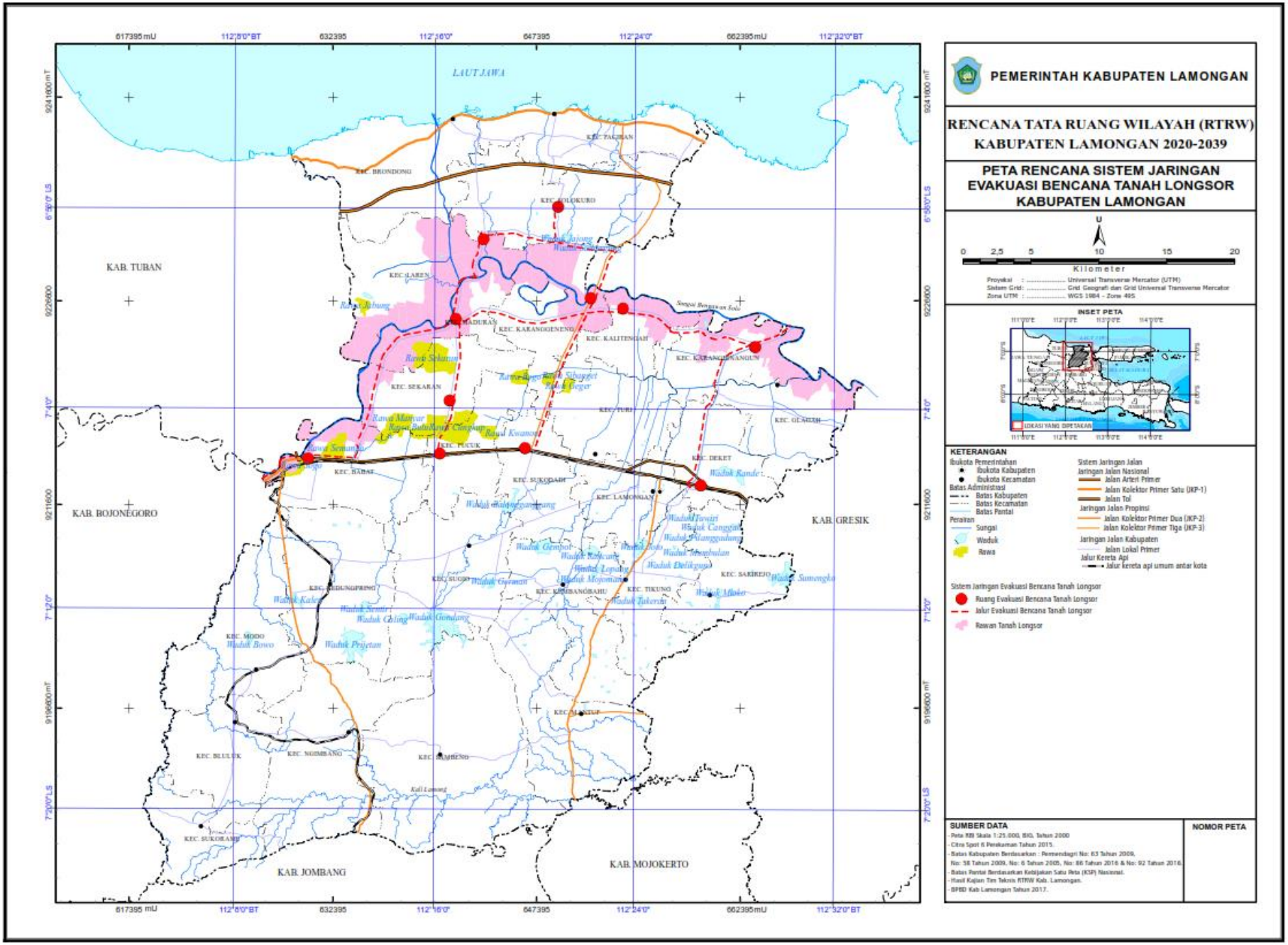
Kawasan rawan kebakaran hutan pada umumnya terjadi di kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung. Jalur veakuasi bencana yang dapat dipergunakan adalah jaringan jalan yang berada disekitar kawasan rawan bencana kebakaran dengan memanfaatkan jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor primer dua (JKP-2), jalan lokal primer dan jalan desa. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan terjadi pada: Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong

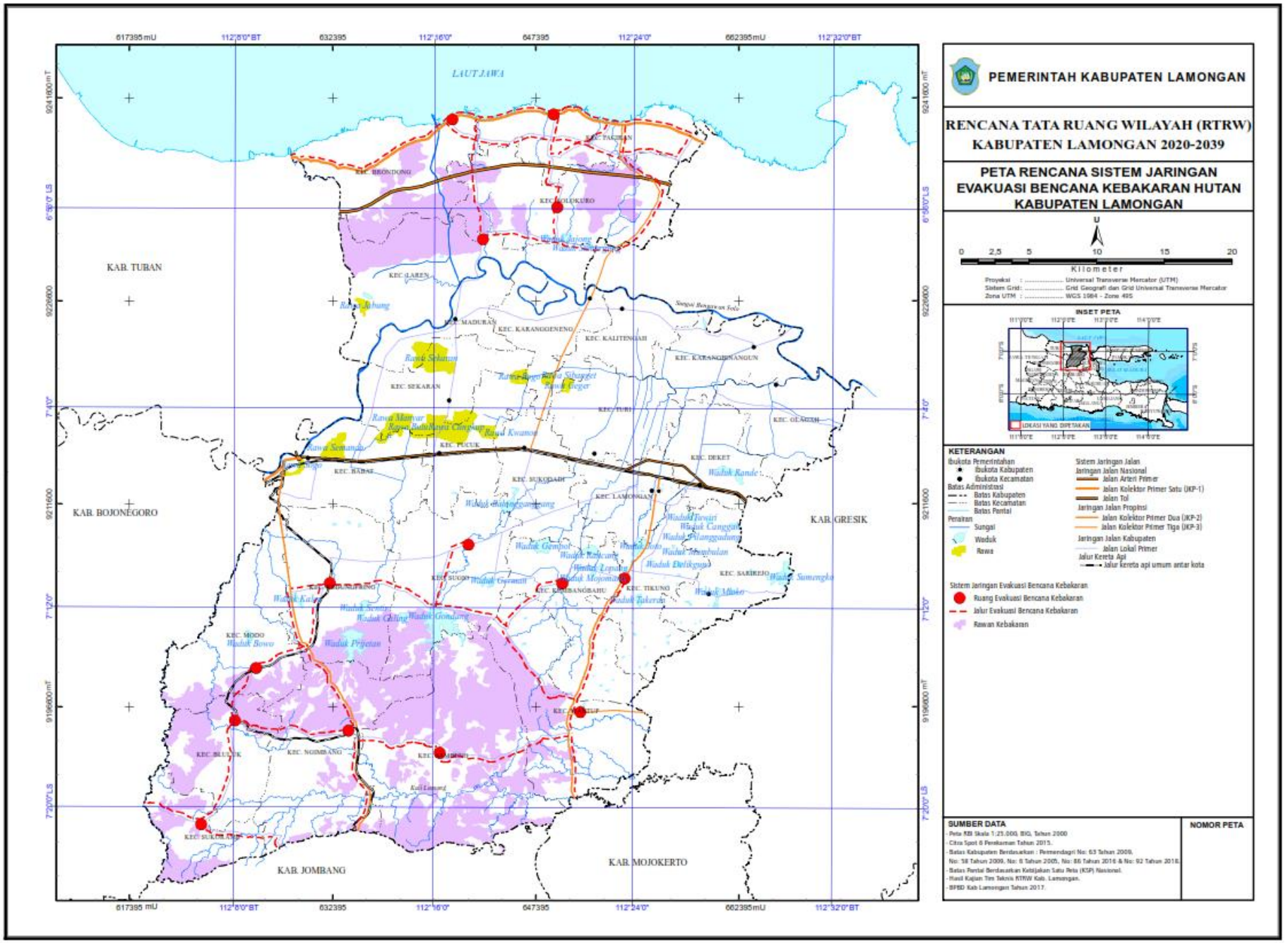
Adapun ruang evakuasi bencana yang dapat dimanfaatkan adalah kantor desa, kantor kecamatan terdekat, lapangan sepak bola maupun ruang ruang publik lainnya.

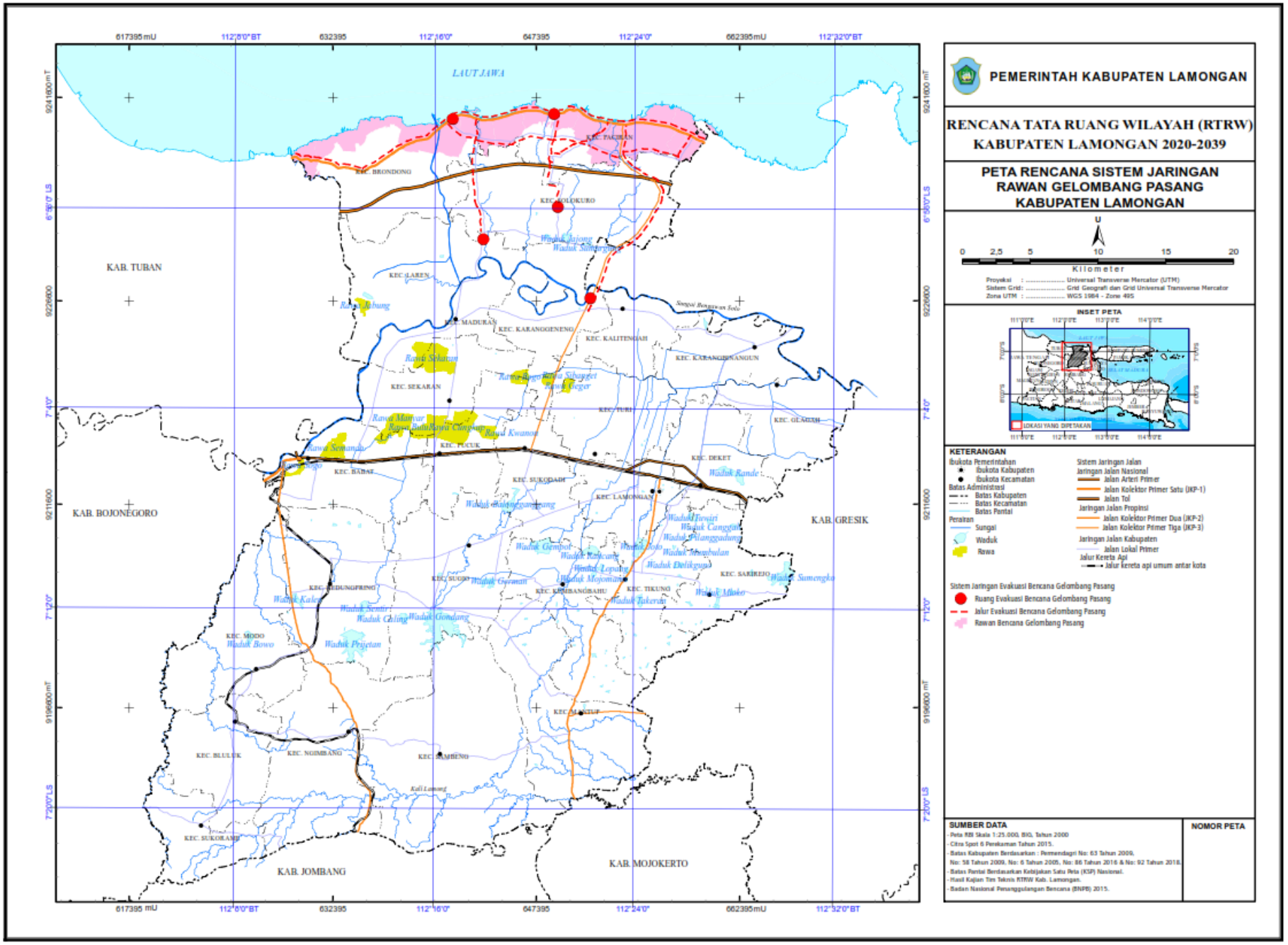
4. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang terjadi pada umumnya di kawasan pesisir pantai yaitu di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong. Jalur evakuasi bencana yang dapat dimanfaatkan adalah jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor primer tiga (JKP-3), jalan lokal primer dan jalan desa. Adapun ruang evakuasi bencana yang dapat dimanfaatkan adalah kantor desa, kantor kecamatan terdekat, lapangan sepak bola maupun ruang ruang publik lainnya.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN
EVAKUASI BENCANA BANJIR
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN
EVAKUASI BENCANA TANAH LONGSOR
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. GLAGAH
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. MANTUP
KEC. SUKOREJO
KEC. SARIREJO
KEC. TIKUNG
Waduk Jatigong
Waduk Sekaran
Waduk Tawiri
Waduk Canggah
Waduk Bondang
Waduk Bendo
Waduk Gemfor
Waduk Kalen
Waduk Lopang
Waduk Mojomanis
Waduk Gayaman
Waduk Tukerto
Waduk Maker
Waduk Sumengko
Waduk Kalen
Waduk Sentul
Waduk Cling
Waduk Gondang
Waduk Bonco
Waduk Prijetan
Kali Lamong
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jalur kereta api umum antar kota
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Tanah Longsor
Ruang Evakuasi Bencana Tanah Longsor
Jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009,
No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- BPBD Kab Lamongan Tahun 2017.
NOMOR PETA


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN
EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jalur kereta api umum antar kota
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Kebakaran
Ruang Evakuasi Bencana Kebakaran
Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran
Rawan Kebakaran
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- BPBD Kab Lamongan Tahun 2017.
NOMOR PETA
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KEMBANGBAHANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GEGUNG
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. KEMBANGSAWAH
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKODADI
Waduk Jajong
Waduk Gembol
Waduk Kalangan
Waduk Lemah Ireng
Waduk Gunung
Waduk Prijetan
Waduk Sowo
Waduk Kajar
Waduk Gedung
Waduk Tawar
Waduk Cangan
Waduk Planggaan
Waduk Dalegan
Waduk Sumengko
Waduk Ploso
Waduk Kandi
Waduk Takeran
Waduk Mojoranu
Waduk Legundi
Waduk Bengkalan
Waduk Delikgowah
Waduk Gerantt
Waduk Kalicang
Waduk Mlorio
Rawa Semanding
Rawa Mantrip
Rawa Kwanon
Rawa Jabung
Rawa Selatan
Rawa Bogo
Rawa Sibangkel
Rawa Bogo
Rawa Bogo
Rawa Bogo
Rawa Bogo
Kali Lamong
Sungai Bengawan Solo
617395 mU
632395
647395
662395 mU
112°8'0"BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0"BT
9241600 mT
9226600
9211600
9196600 mT
6°36'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN
RAWAN GELOMBANG PASANG
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jalur kereta api umum antar kota
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Gelombang Pasang
Ruang Evakuasi Bencana Gelombang Pasang
Jalur Evakuasi Bencana Gelombang Pasang
Rawan Bencana Gelombang Pasang
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015.
NOMOR PETA
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. BABAT
KEC. PUCUK
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. GLAGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGGENENG
KEC. MADURAN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. SUGIO
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKOMULYO
Waduk Sumengko
Waduk Meker
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Bowo
Waduk Delikgunung
Waduk Tawiri
Waduk Cangga
Waduk Blanggadung
Waduk Tenggulun
Waduk Gemfor
Waduk Kalicanti
Waduk Mojomanis
Waduk Kalen
Waduk Sentul
Waduk Celing
Waduk Takeran
Waduk Rande
Rawa Semanding
Rawa Mamar
Rawa Bulu
Rawa Kwanon
Rawa Sekaran
Rawa Tebung
Rawa Sibanget
Rawa Greger
Kali Lamong
Sungai Bengawan Solo
617395 mU
632395
647395
662395 mU
112°8'0" BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0" BT
9241600 mT
9226600
9211600
9196600 mT
7°0'0" LS
7°4'0"
7°8'0"
7°12'0"
7°16'0"
7°20'0" LS

3.5.5.6. RENCANA SISTEM DRAINASE

Sistim drainase makro Kabupaten Lamongan pada umumnya memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuang akhir. Sistem drainase di Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada Peta 3.19, meliputi:

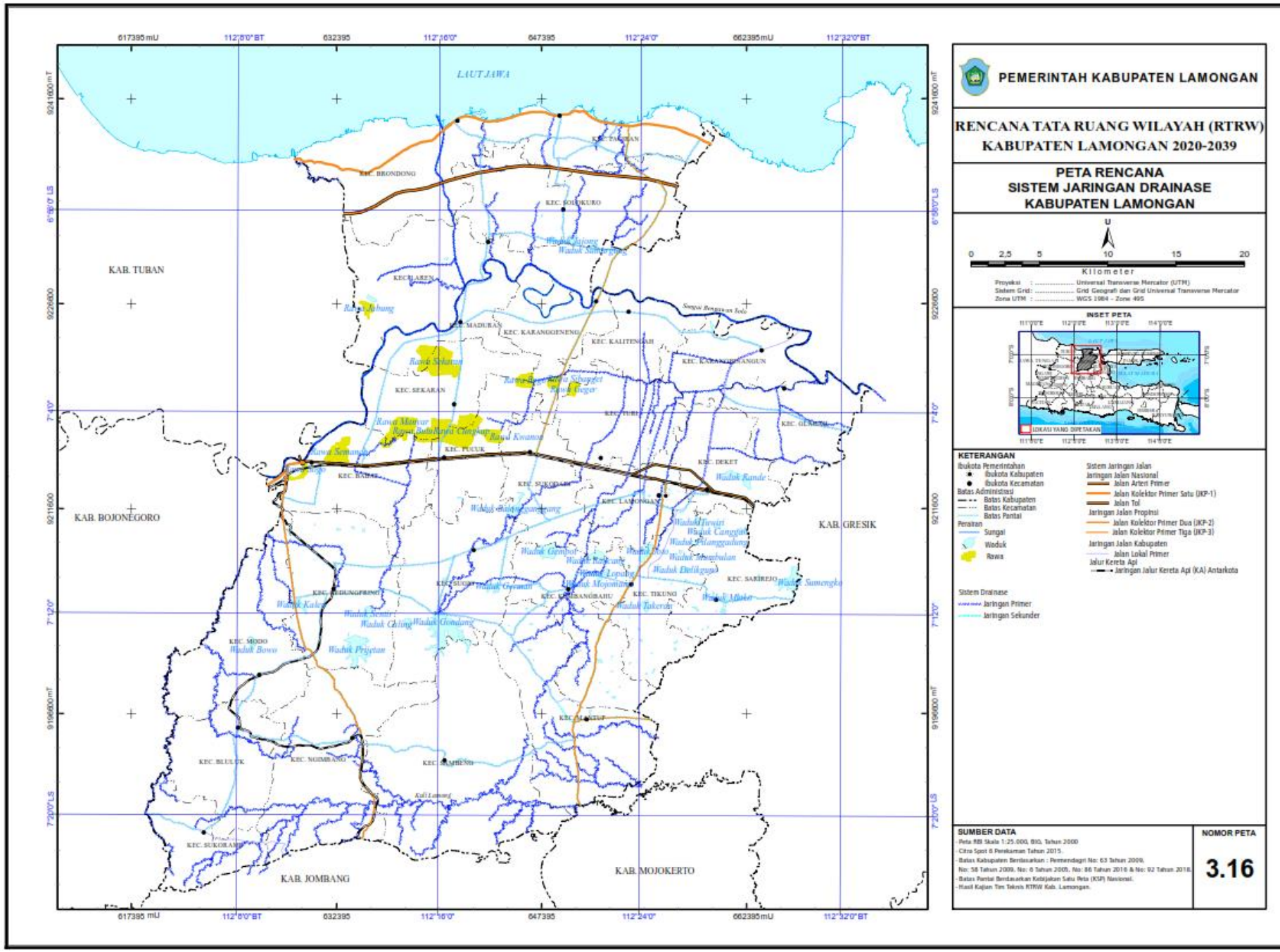
a. Jaringan Primer, terdiri dari:

1. Kali Merukung;
2. Kali Cawak;
3. Kali Dadapan;
4. Kali Kaputren;
5. Kali Malang;
6. Kali Polaman;
7. Sungai Bengawan Solo;
8. Kali Garung;
9. Saluran Irigasi Jabung;
10. Kali Lamong;
11. Floodway;
12. Kali Cendoro;
13. Kali Semarmendem;
14. Kali Corong;
15. Kali Wangen;
16. Kali Blawi;
17. Kali Bajul;
18. Kali Keyongan;
19. Kali Patih;
20. Kali Lanang;
21. Kali Wotan;
22. Kali Pulekidul;
23. Kali Ampel;
24. Kali Puter;
25. Kali Dukun;
26. Kali Jero;
27. Kali Corong;
28. Kali Dunguni;
29. Kali Peresan;

30. Kali Jabung;
31. Kali Keber;
32. Kali Tunggul;
33. Kali Asemcino;
34. Kali Gladakkapal;
35. Kali Sendang;
36. Kali Wungu;
37. Kali Wangun;
38. Kali Lohgung;
39. Kali Gondang;
40. Kali Sumput;
41. Kali Kebet;
42. Kali Palangan;
43. Kali Balun;
44. Kali Ngujung;
45. Kali Lom;
46. Kali Suwuk;
47. Kali Ganjaran;
48. Kali Gundeng;
49. Kali Etan;
50. Kali Tanjung;
51. Kali Gondang;
52. Kali Gayaran;
53. Kali Gesing;
54. Kali Kesongo;
55. Kali Besur;
56. Kali Tlebung;
57. Kali Kare;
58. Kali Pateguhan
59. Kali Garung
60. Kali Pelang
61. Kali Mengkuli
62. Kali Pengaron

63. Kali Dapur
64. Kali Cawak
65. Kali Balong
66. Kali Rapah
67. Kali Sambong
68. Kali Mantup
69. Kali Bogo
70. Kali Maor
71. Kali Cendri
72. Kali Randubener
73. Kali Wolu
74. Kali Wiyu
75. Kali Bucu
76. Kali Gauman
77. Kali Asinan
78. Kali Gempol
79. Kali Ngrayong
80. Kali Blungkan
81. Kali Gesing; dan
82. Kali Pengaron.

b. Jaringan Sekunder berada di seluruh kecamatan.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN DRAINASE
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota
Sistem Drainase
Jaringan Primer
Jaringan Sekunder
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
3.16
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SARIREJO
KEC. DUKUN
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKOLAMBE
617395 mU
632395
647395
662395 mU
112°8'0" BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0" BT
9241600 mT
9226400
9211600
9196800 mT
7°8'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS



BAB-4 RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang Kabupaten Lamongan secara garis besar diwujudkan dalam rencana kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Pola ruang kawasan ini ditekankan pada kesesuaian fungsi wilayah sehingga diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung dan pengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

4.1. RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG

Rencana kawasan peruntukan lindung meliputi:

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
b. Kawasan Perlindungan Setempat;
c. Kawasan Lindung Geologi;
d. Kawasan Rawan Bencana;
e. Kawasan Cagar Budaya;
f. Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
g. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

4.1.1. KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Lamongan berupa kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung adalah

kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kriteria penetapan kawasan lindung adalah :

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175; atau
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih; dan atau
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000-2000 meter/dpl.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa kawasan hutan lindung. Luasan Kawasan Hutan Kabupaten Lamongan disesuaikan dengan SK MenLHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2017. Luas hutan lindung di Kabupaten Lamongan seluas kurang lebih 255,28 (dua ratus lima puluh lima koma dua puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Sugio, Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Bluluk..

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya bencana erosi, banjir, sedimentasi, dan menurunnya fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan, unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Temasuk didalamnya adalah upaya pelestarian DAS.

Adapun pengelolaan kawasan ini diarahkan pada :

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami penurunan fungsi melalui pengembangan vegetasi tanaman tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan resapan air;
2. Pengoptimalan fungsi hutan lindung di wilayah DAS dan daerah sekitar waduk;
3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.

4.1.2. KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

Kawasan Perlindungan Setempat seluas kurang lebih 696 (enam ratus sembilan puluh enam) hektar, meliputi :

a. Sempadan Pantai;
b. Sempadan Sungai; dan
c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan rawa

4.1.2.1. KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, menyebutkan bahwa :

1. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
2. Berdasarkan Pasal 19, Penghitungan batas sempadan pantai ditentukan berdasarkan batas akhir keberadaan ekosistem pesisir ke arah darat.

Kawasan sempadan pantai di Kabupaten Lamongan, seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) ha, berada di wilayah Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai meliputi:

a. Perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dan dilarang melakukan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
b. Perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria dari kerusakan;
c. Pengaturan reorientasi pembangunan di kawasan permukiman, baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan dengan menjadikan pantai dan laut sebagai bagian dari latar depan;
d. Penanaman bakau di kawasan yang potensial untuk menambah luasan area bakau;
e. Pemanfaatan kawasan sepanjang pantai di dalam kawasan lindung disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan pesisir;
f. Penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
g. Pemantapan fungsi lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;
h. Mengarahkan lokasi bangunan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai; dan
i. Penetapan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian

4.1.2.2. KAWASAN SEMPADAN SUNGAI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, menyebutkan bahwa : "***Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai***".

Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 570 (lima ratus tujuh puluh) ha, berada disepanjang aliran sungai yang ada di Kabupaten Lamongan yang meliputi Kecamatan Babat, Deket, Glagah, Kalitengah, Karanggeneng, Karangbinangun, Kembangbahu, Lamongan, Laren, Maduran, Mantup, Pucuk, Sambeng, Sekaran, Sukodadi, Sukorame, Sugio, Tikung, Kedungpring, Modo, Ngimbang, Bluluk, Brondong, Paciran dan Turi.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan dengan pembatasan kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain dilakukan dengan :

Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai meliputi:

1. Sempadan sungai ditetapkan sesuai dengan peratuan yang berlaku, meliputi:
    a. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
    b. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
    c. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
    d. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
2. pembatasan dan pelarangan pengadaan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai;
3. pembatasan dan pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai;
4. reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
5. penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai dengan karakter masing-masing sungai

4.1.2.3. KAWASAN SEKITAR DANAU ATAU WADUK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, menyebutkan bahwa :

1. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
2. Berdasarkan Pasal 12, Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Kabupaten Lamongan memiliki 35 waduk dan 11 rawa yang tersebar di seluruh kecamatan. Luas kawasan sekitar waduk di Kabupaten Lamongan seluas kurang lebih 83 ha. Arahan pengelolaan kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:

1. Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi
2. Perlindungan sekitar danau atau waduk dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
3. Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
4. Pengembangan kegiatan pariwisata dan/atau kegiatan budi daya lainnya di sekitar lokasi danau atau waduk diizinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air; dan
5. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.

4.1.3. KAWASAN LINDUNG GEOLOGI

Kawasan lindung geologi yang terdapat di Kabupaten Lamongan, meliputi:

a. Kawasan cagar alam geologi serta
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan bentang alam.adalah Goa Maharani dan Zoo di Kecamatan Paciran yang merupakan bentukan batuan sedimen yang membentuk stalakmit dan stalaktit. Goa Maharani saat ini sudah dikonservasi dan menjadi tempat wisata kurang lebih 6 (enam) ha berada di Kecamatan Paciran.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah berupa kawasan imbuhan air tanah seluas kurang lebih 63.131 (enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu) hektar berada di:

a. Kecamatan Kembangbahu;
b. Kecamatan Sugio;
c. Kecamatan Kedungpring;
d. Kecamatan Modo;
e. Kecamatan Babat;
f. Kecamatan Pucuk;
g. Kecamatan Sukodadi;
h. Kecamatan Lamongan:
i. Kecamatan Tikung;
j. Kecamatan Sarirejo;
k. Kecamatan Deket;
l. Kecamatan Glagah;
m. Kecamatan Karangbinangun;
n. Kecamatan Kalitengah;
o. Kecamatan Karanggeneng:

p. Kecamatan Sekaran;

q. Kecamatan Maduran;

r. Kecamatan Laren;

s. Kecamatan Selokuro;

t. Kecamatan Paciran: dan

u. Kecamatan Brondong.

Kawasan ini berupa kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Adapun upaya penanganan/pengelolaan kawasan cagar alam geologi, meliputi :

1. Pengembangan dan pengelolaan kawasan sebagai kawasan pariwisata dan ilmu pengetahuan alam; dan
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga agar fungsi kawasan tidak berubah

4.1.4. KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Lamongan, meliputi :

4.1.4.1. KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR

Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulangkali). Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lamongan terjadi diseluruh kecamatan akibat luapan Sungai Bengawan Solo, luapan Kali Lamongan, dan anak anak sungai lainnya karena curah hujan yang tinggi, perubahan penggunaan lahan, kurangnya areal resapan serta daya tampung sungai yang semakin berkurang karena adanya sedimentasi dan sampah. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lamongan terjadi di seluruh kecamatan, namun beberapa kecamatan terjadi pada beberapa titik.

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan

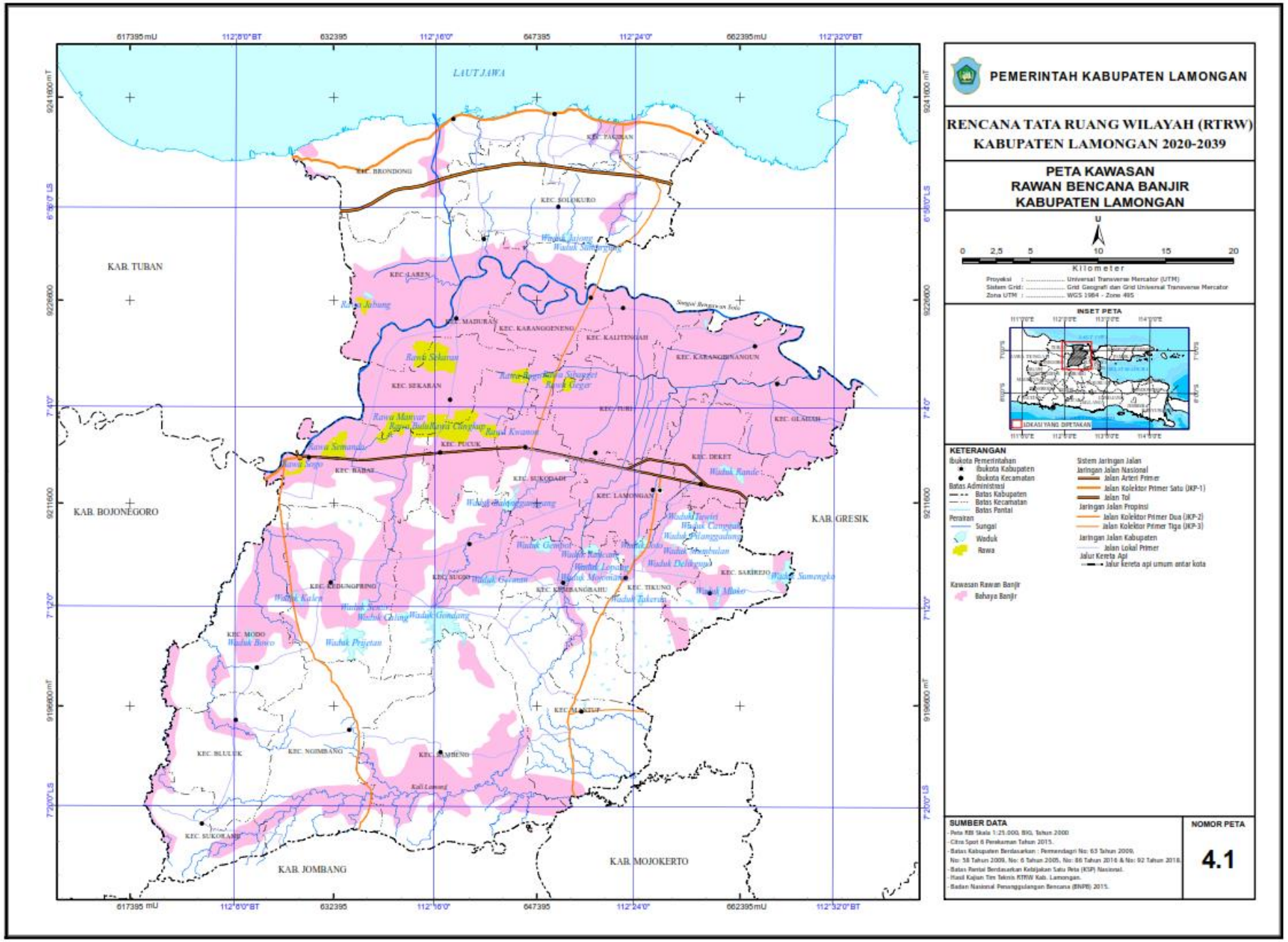
No	Kecamatan	Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	1.013,96	3.928,70	25,8
2	Bluluk	686,74	5.799,93	11,8
3	Ngimbang	1.613,34	10.006,02	16,1
4	Sambeng	5.716,23	15.078,34	37,9
5	Mantup	636,66	9.123,19	7,0
6	Kembangbahu	2.423,13	6.825,07	35,5
7	Sugio	4.464,43	8.974,19	49,7
8	Kedungpring	3.798,40	8.572,74	44,3
9	Modo	3.328,88	8.169,76	40,7
10	Babat	3.988,16	6.459,43	61,7
11	Pucuk	3.589,94	4.538,49	79,1

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
12	Sukodadi	4.116,32	4.747,56	86,7
13	Lamongan	4.032,56	4.093,53	98,5
14	Tikung	1.942,79	5.541,58	35,1
15	Sarirejo	1.504,43	4.886,96	30,8
16	Deket	4.320,54	4.395,15	98,3
17	Glagah	5.001,24	5.001,53	100,0
18	Karangbinangun	4.714,88	4.726,21	99,8
19	Turi	5.185,75	5.250,09	98,8
20	Kalitengah	3.676,19	3.694,60	99,5
21	Karanggeneng	4.016,09	4.073,99	98,6
22	Sekaran	4.394,90	5.404,96	81,3
23	Maduran	3.133,10	3.277,68	95,6
24	Laren	6.066,41	9.411,28	64,5
25	Solokuro	453,98	9.486,89	4,8
26	Paciran	454,89	5.681,33	8,0
27	Brondong	772,48	8.071,51	9,6
	Jumlah	**85.046,42**	**175.220,72**	**48,5**

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Adapun pengelolaan kawasan rawan banjir, meliputi:

1. Pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai secara lintas wilayah melalui Pengelolaan DAS Bengawan Solo.
2. Pengelolaan Irigasi dengan memanfaatkan DAS Bengawan Solo.
3. Penghijauan pada sepanjang aliran sungai serta perlindungan hutan pada Kawasan sekitar sungai.
4. Normalisasi Sungai Bengawan Solo dan anak sungainya;
5. Melakukan penataan sistem jaringan drainase di wilayah Bengawan Jero;
6. Normalisasi Kali Wangen dan Tebaloan melalui Kali Manyar di wilayah Kabupaten Gresik hingga bermuara di laut;
7. Rencana pengembangan bendung gerak sembayat dan waduk cawak dan rehabilitasi dan/atau normalisasi Kali Corong melalui sinergitas dengan wilayah Kabupaten Gresik;
8. Rehabilitasi dan/atau normalisasi sungai-sungai eksisting beserta dengan bangunan pengairannya.
9. revitalisasi fungsi resapan tanah;
10. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
11. penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respon terhadap kejadian bencana banjir; dan
12. peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN
RAWAN BENCANA BANJIR
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
4.1

4.1.4.2. KAWASAN RAWAN BENCANA GELOMBANG PASANG

Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah kawasan yang potensial dilanda gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Gelombang pasang di Kabupaten Lamongan terjadi pada desa desa yang berada di kawasan pesisir, meliputi:

1. **Kecamatan Brondong** : Desa Labuhan, Desa Lohgung, Desa Sedayulawas dan Kelurahan Brondong
2. **Kecamatan Paciran** : Desa Banjarwati, Desa Drajat, Desa Kandangsemangkon, Desa Kemantren, Desa Kranji, Desa Paciran, Desa Sidokelar, Desa Tlogosadang, Desa Tunggul, Kelurahan Blimbing, Desa Weru, Desa Sidokumpul, Desa Waru Lor dan Desa Paloh

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana gelombang pasang, meliputi:

1. Penataan bangunan sekitar pantai;
2. Pembangunan pemecah ombak dan tembok penahan ombak; dan
3. Pengembangan hutan bakau

Tabel 4.2
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	0	3.928,70	0
2	Bluluk	0	5.799,93	0
3	Ngimbang	0	10.006,02	0
4	Sambeng	0	15.078,34	0
5	Mantup	0	9.123,19	0
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0
7	Sugio	0	8.974,19	0
8	Kedungpring	0	8.572,74	0
9	Modo	0	8.169,76	0
10	Babat	0	6.459,43	0
11	Pucuk	0	4.538,49	0
12	Sukodadi	0	4.747,56	0
13	Lamongan	0	4.093,53	0
14	Tikung	0	5.541,58	0
15	Sarirejo	0	4.886,96	0
16	Deket	0	4.395,15	0
17	Glagah	0	5.001,53	0

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
18	Karangbinangun	0	4.726,21	0
19	Turi	0	5.250,09	0
20	Kalitengah	0	3.694,60	0
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0
22	Sekaran	0	5.404,96	0
23	Maduran	0	3.277,68	0
24	Laren	0	9.411,28	0
25	Solokuro	0	9.486,89	0
26	Paciran	4.147,10	5.681,33	73,00
27	Brondong	2.318,76	8.071,51	1,32
	Jumlah	**6.465,86**	**175.220,72**	**1,32**

Sumber : BPBD Kab Lamongan

4.1.4.3. KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN

Kawasan rawan bencana kekeringan adalah kawasan yang potensial dilanda kekeringan karena ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Lamongan terjadi di semua kecamatan yang terbagi menjadi kawasan rawan bencana kekeringan sedang dan kawasan rawan bencana kekeringan tinggi. Kekeringan sedang seluas 121.260,39 ha dan kekeringan tinggi seluas 53.960,33 ha. Kekeringan tinggi pada umumnya terjadi di Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo dan Kecamatan Babat

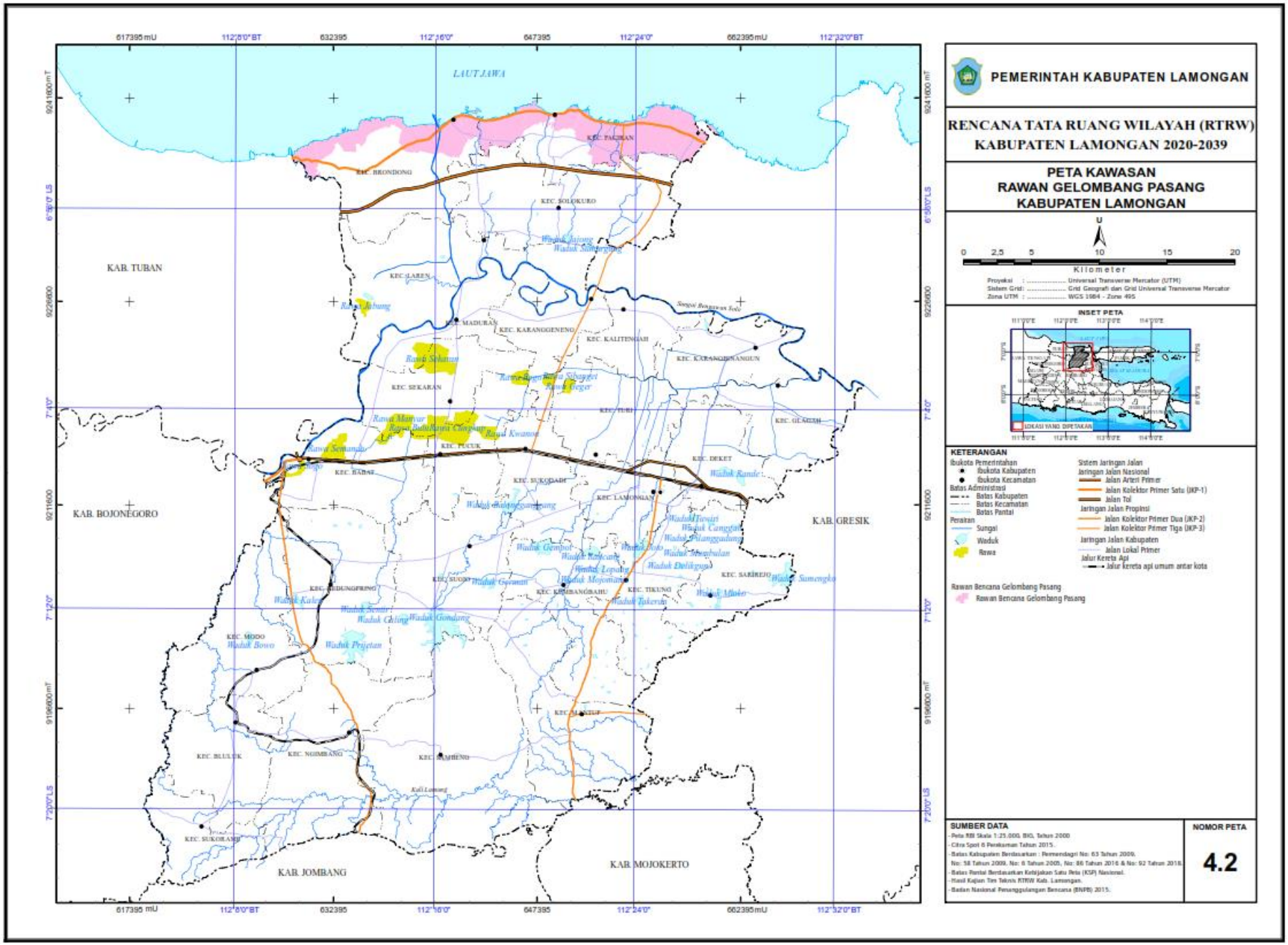
Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana kekeringan, meliputi:

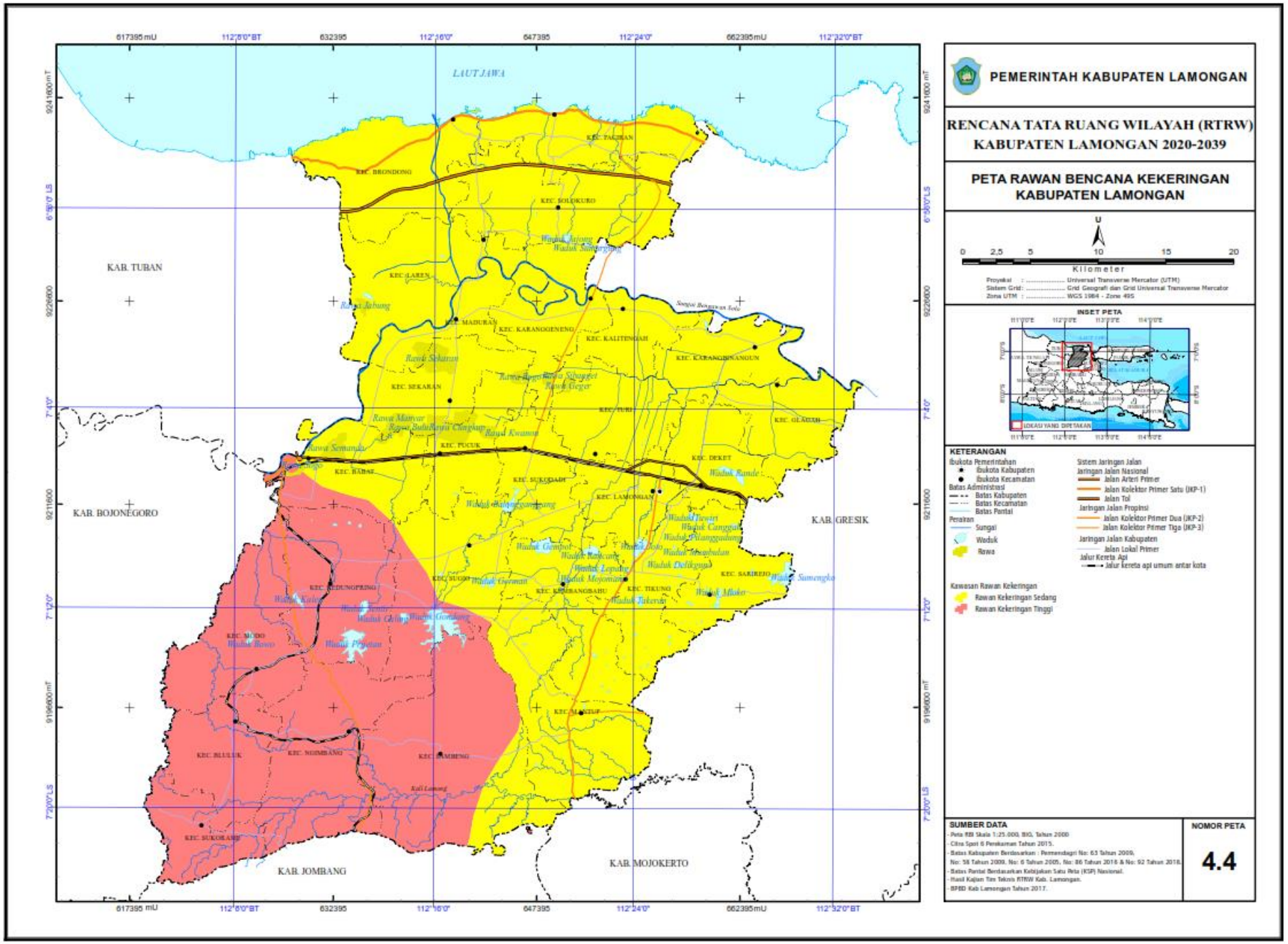
1. Reboisasi di wilayah sekitar waduk;
2. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
3. Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM);
4. Pembangunan demplot sumur resapan di wilayah rawan kekeringan;
5. Pembangunan/pengembangan sistem IPA mini; dan
6. Pembangunan embung, akuifer buatan dan simpanan air hujan

Tabel 4.3
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Kekeringan
Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Sedang (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Tinggi (Ha)	Jumlah
1	Sukorame	0	3.928,70	3.928,70
2	Bluluk	0	5.799,93	5.799,93
3	Ngimbang	0	10.006,02	10.006,02
4	Sambeng	2.901,19	12.177,16	15.078,35
5	Mantup	9.123,19	0	9.123,19
6	Kembangbahu	6.825,07	0	6.825,07
7	Sugio	5.183,27	3.790,92	8.974,19
8	Kedungpring	0	8.572,74	8.572,74
9	Modo	0	8.169,76	8.169,76
10	Babat	4.944,33	1.515,11	6.459,43
11	Pucuk	4.538,49	0	4.538,49
12	Sukodadi	4.747,56	0	4.747,56
13	Lamongan	4.093,53	0	4.093,53
14	Tikung	5.541,58	0	5.541,58
15	Sarirejo	4.886,96	0	4.886,96
16	Deket	4.395,15	0	4.395,15
17	Glagah	5.001,53	0	5.001,53
18	Karangbinangun	4.726,21	0	4.726,21
19	Turi	5.250,09	0	5.250,09
20	Kalitengah	3.694,60	0	3.694,60
21	Karanggeneng	4.073,99	0	4.073,99
22	Sekaran	5.404,96	0	5.404,96
23	Maduran	3.277,68	0	3.277,68
24	Laren	9.411,28	0	9.411,28
25	Solokuro	9.486,89	0	9.486,89
26	Paciran	5.681,33	0	5.681,33
27	Brondong	8.071,51	0	8.071,51
	Jumlah	**121.260,39**	**53.960,33**	**175.220,72**

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN
RAWAN GELOMBANG PASANG
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jalur kereta api umum antar kota
Rawan Bencana Gelombang Pasang
Rawan Bencana Gelombang Pasang
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015.
NOMOR PETA
4.2
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GEDESIH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. SARIREJO
KEC. TIKUNG
KEC. SUGIO
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKOREJO
KEC. MANTUP
KEC. MADUREN
Rawa Sekaran
Rawa Mantup
Rawa Kwanon
Rawa Semanding
Waduk Sidorejo
Waduk Gesikan
Waduk Gemit
Waduk Kalen
Waduk Tawiri
Waduk Cangkir
Waduk Dalegan
Waduk Tikung
Waduk Sumengko
Waduk Bowo
Waduk Penjetan
Waduk Gondang
Waduk Ceting
Waduk Takeran
Waduk Mlaker
Kali Lamong


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RAWAN BENCANA KEKERINGAN
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. BRONDONG
KEC. PACIRAN
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SAKIREJO
KEC. SUGIO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. SUKOREJO
KEC. MANTUP
KEC. DEKET
KEC. LAMONGAN
KEC. SUKODADI
KEC. KEDUNGPRING
KEC. MODO
KEC. BABAT
Waduk Gondang
Waduk Tawar
Waduk Cangkol
Waduk Penanggandeng
Waduk Kembangbelah
Waduk Delikgunung
Waduk Gemploh
Waduk Kalicacing
Waduk Legundi
Waduk Mojomanis
Waduk Gerantil
Waduk Tekerasi
Waduk Mlaker
Waduk Sumengko
Waduk Kalitengah
Waduk Gedangan
Waduk Bendo
Waduk Pijetan
Waduk Bunder
Waduk Sekaran
Waduk Sidogeger
Waduk Geger
Rawa Sekaran
Rawa Mantrip
Rawa Bulubanyu Cangkrang
Rawa Kwanon
Rawa Semanda
Rawa Jabung
Rawa Bunder
Sungai Bengawan Solo
Kali Lamong
617395 mU
632395
647395
662395 mU
112°8'0" BT
112°16'0"
112°24'0"
112°32'0" BT
9241600 mT
9226600
9211600
9196600 mT
6°56'0" LS
7°4'0"
7°12'0"
7°20'0" LS
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Kawasan Rawan Kekeringan
Rawan Kekeringan Sedang
Rawan Kekeringan Tinggi
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jalur kereta api umum antar kota
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- BPBD Kab Lamongan Tahun 2017.
NOMOR PETA
4.4

4.1.4.4. KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR

Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan yang potensial dilanda jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Lamongan terjadi pada desa desa yang berada disepanjang Sungai Bengawan Solo.

1. **Kecamatan Babat** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Bedahan, Desa Kebalanpelang, Desa Trepan, Desa Truni, Kelurahan Babat dan Kelurahan Banaran
2. **Kecamatan Glagah** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Jatirenggo, Desa Karangturi, Desa Konang dan Desa Meluwur
3. **Kecamatan Kali Tengah** potensi terjadi bahaya longsor pada Desa Butungan, Desa Canditunggal, Desa Kalitengah, Desa Kediren, Desa Kuluran, Desa Pengangsalan, Desa Sugihwaras
4. **Kecamatan Karangbinangun** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Banjarejo, Desa Banyuurip, Desa Bogobabadan, Desa Gawerejo, Desa Karangbinangun, Desa Kuro, Desa Palangan, Desa Watangpanjang, dan Desa Windu
5. **Kecamatan Karanggeneng** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Jagran, Desa Karanggeneng, Desa Karangwungu, Desa Mertani, Desa Prijekngablag, Desa Sumberwudi dan Desa Tracal
6. **Kecamatan Laren** potensi terjadi bencana longsor pada Desa Bulubrangsi, Desa Bulutigo, Desa Centini, Desa Duri Kulon, Desa Gampangsejati, Desa Godog, Desa Karangtawar, Desa Karangwungu Lor, Desa Keduyung, Desa Laren, Desa Mojoasem, Desa Pasenggrahan, Desa Pelangwot, Desa Siser dan Desa Tamanprijek
7. **Kecamatan Maduran** terjadi bencana longsor pada Desa Blumbang, Desa Brumbun, Desa Duri Wetan, Desa Gedangan, Desa Jangkungsomo, Desa Klagensrampat, Desa Maduran, Desa Pangean, Desa Pangkatrejo, Desa Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Siwuran dan Desa Taji
8. **Kecamatan Sekaran** terjadi bencana longsor pada Desa Besur, Desa Kendal, Desa Keting dan Desa Titik

Tabel 4.4.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	0	3.928,70	0
2	Bluluk	0	5.799,93	0
3	Ngimbang	0	10.006,02	0
4	Sambeng	0	15.078,34	0
5	Mantup	0	9.123,19	0
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0
7	Sugio	0	8.974,19	0

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
8	Kedungpring	0	8.572,74	0
9	Modo	0	8.169,76	0
10	Babat	1.336,12	6.459,43	20,68
11	Pucuk	0	4.538,49	0
12	Sukodadi	0	4.747,56	0
13	Lamongan	0	4.093,53	0
14	Tikung	0	5.541,58	0
15	Sarirejo	0	4.886,96	0
16	Deket	0	4.395,15	0
17	Glagah	732	5.001,53	14,64
18	Karangbinangun	1.772,36	4.726,21	37,50
19	Turi	0	5.250,09	0
20	Kalitengah	1.149,80	3.694,60	31,12
21	Karanggeneng	1.356,30	4.073,99	33,29
22	Sekaran	596,05	5.404,96	11,03
23	Maduran	2.294,68	3.277,68	70,01
24	Laren	5.313,33	9.411,28	56,46
25	Solokuro	0	9.486,89	0
26	Paciran	0	5.681,33	0
27	Brondong	0	8.071,51	0
	Jumlah	**14.550,64**	**175.220,72**	**8,30**

Sumber : BPBD Kab. Lamongan

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi:

1. penataan ruang; dan
2. rekayasa teknologi.

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor melalui penataan ruang meliputi:

1. Pengidentifikasian lokasi rawan longsor;
2. Pengarahan pembangunan pada tanah yang stabil;
3. Pemanfaatan wilayah rentan longsor tinggi sebagai ruang terbuka hijau;
4. Pengendalian daerah rawan bencana untuk pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya; dan
5. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanamnya tepat.

Arahan pengelolaan kawasan rawan tanah longsor melalui rekayasa teknologi meliputi:

1. Perbaikan drainase tanah;
2. Pembangunan berbagai pekerjaan struktur;

3. Pembangunan terasering dengan sistem drainase yang tepat;
4. Pembuatan tanggul penahan, khusus untuk runtuhan batu; dan
5. Peningkatan dan pemeliharaan drainase, baik air permukaan maupun air tanah.

4.1.4.5. KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN

Kawasan rawan bencana kebakaran terutama terjadi pada kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung. Kecamatan dimaksud antara lain Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran hutan, meliputi:

1. pelaksanaan kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan;
2. Peningkatan penegakan hukum;
3. pembukaan, penyiapan dan pembersihan lahan dilakukan dengan teknik tanpa bakar; dan
4. pengembangan media informasi, penyiapan sumber air, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.5.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Kebakaran (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	1.340,91	3.928,70	34,13
2	Bluluk	2.340,40	5.799,93	40,35
3	Ngimbang	3.974,02	10.006,02	39,72
4	Sambeng	9.039,25	15.078,34	59,95
5	Mantup	2.425,63	9.123,19	26,59
6	Kembangbahu	10,94	6.825,07	0,16
7	Sugio	1.423,35	8.974,19	15,86
8	Kedungpring	1.481,37	8.572,74	17,28
9	Modo	1.504,39	8.169,76	18,41
10	Babat	0	6.459,43	0,00
11	Pucuk	0	4.538,49	0,00
12	Sukodadi	0	4.747,56	0,00
13	Lamongan	0	4.093,53	0,00
14	Tikung	0	5.541,58	0,00
15	Sarirejo	0	4.886,96	0,00
16	Deket	0	4.395,15	0,00
17	Glagah	0	5.001,53	0,00
18	Karangbinangun	0	4.726,21	0,00
19	Turi	0	5.250,09	0,00
20	Kalitengah	0	3.694,60	0,00

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Kebakaran (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase dari Luas Wilayah (%)
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0,00
22	Sekaran	0	5.404,96	0,00
23	Maduran	0	3.277,68	0,00
24	Laren	2.603,59	9.411,28	27,66
25	Solokuro	2.983,47	9.486,89	31,45
26	Paciran	108,72	5.681,33	1,91
27	Brondong	2.456,00	8.071,51	30,43
	Jumlah	**31.692,04**	**175.220,72**	**18,09**

Sumber : BPBD Kab. Lamongan

4.1.4.6. KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI

Kawasan rawan bencana gempa bumi terjadi hampir diseluruh wilayah dengan tingkat kerentanan sangat rendah, rendah sampai menengah, sebagaimana terlihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 4.6.
Luas Wilayah Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lamongan

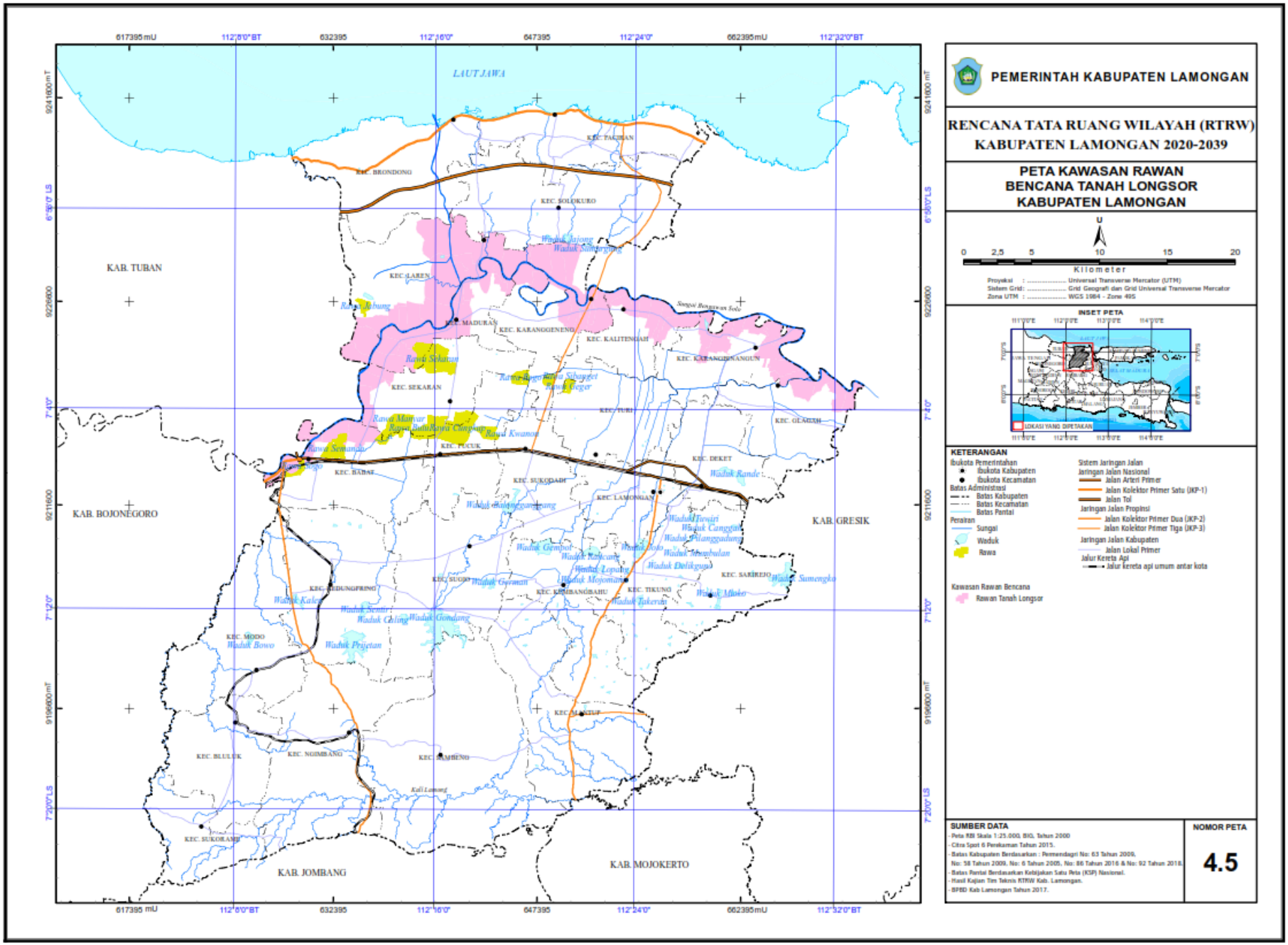
No	Kecamatan	Gempa Bumi				Jumlah
		IV MMI (sangat Rendah)	V-VI MMI (Rendah)	VII-VIII (menengah)	>VIII (tinggi)	
1	Sukorame	0	3.686,39	242,32	0	3.928,71
2	Bluluk	0	4.515,39	1.284,53	0	5.799,92
3	Ngimbang	0	10.006,02	0	0	10.006,02
4	Sambeng	0	14.869,58	208,77	0	15.078,35
5	Mantup	0	8.767,67	355,52	0	9.123,19
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0	0	6.825,07
7	Sugio	0	8.974,19	0	0	8.974,19
8	Kedungpring	0	7.883,53	689,21	0	8.572,74
9	Modo	0	5.687,45	2.482,31	0	8.169,76
10	Babat	0	1.773,39	4.686,04	0	6.459,43
11	Pucuk	0	3.564,43	974,06	0	4.538,49
12	Sukodadi	0	4.747,56	0	0	4.747,56
13	Lamongan	185,43	3.908,10	0	0	4.093,53
14	Tikung	1.897,71	3.643,87	0	0	5.541,58
15	Sarirejo	4.289,46	597,5	0	0	4.886,96
16	Deket	106,41	3.138,55	1.150,19	0	4.395,15
17	Glagah	2.240,60	2.665,16	95,78	0	5.001,54
18	Karangbinangun	33,95	4.544,36	147,9	0	4.726,21
19	Turi	0	4.603,99	646,1	0	5.250,09
20	Kalitengah	0	3.694,60	0	0	3.694,60
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0	0	4.073,99

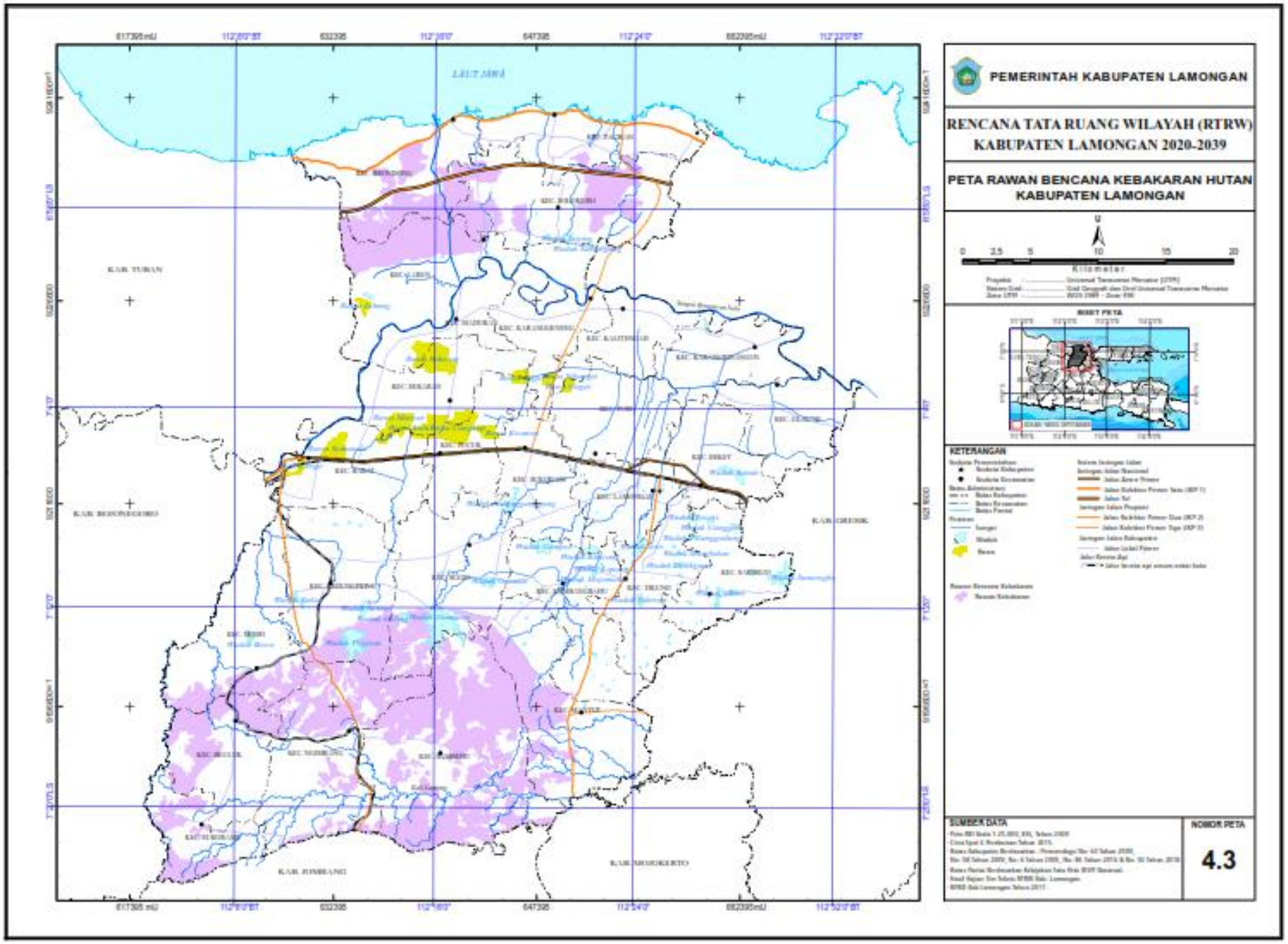
No	Kecamatan	Gempa Bumi				Jumlah
		IV MMI (sangat Rendah)	V-VI MMI (Rendah)	VII-VIII (menengah)	>VIII (tinggi)	
22	Sekaran	0	3.047,38	2.357,58	0	5.404,96
23	Maduran	0	2.879,34	398,34	0	3.277,68
24	Laren	92,23	6.938,51	2.380,55	0	9.411,29
25	Solokuro	5.303,07	4.183,82	0	0	9.486,89
26	Paciran	5.672,76	8,56	0	0	5.681,32
27	Brondong	1.738,90	6.294,07	38,54	0	8.071,51
	Jumlah	**21.560,52**	**135.522,47**	**18.137,74**	**0,00**	**175.220,73**
	Prosentase (%)	**12,31**	**77,36**	**10,33**	**0**	**100**

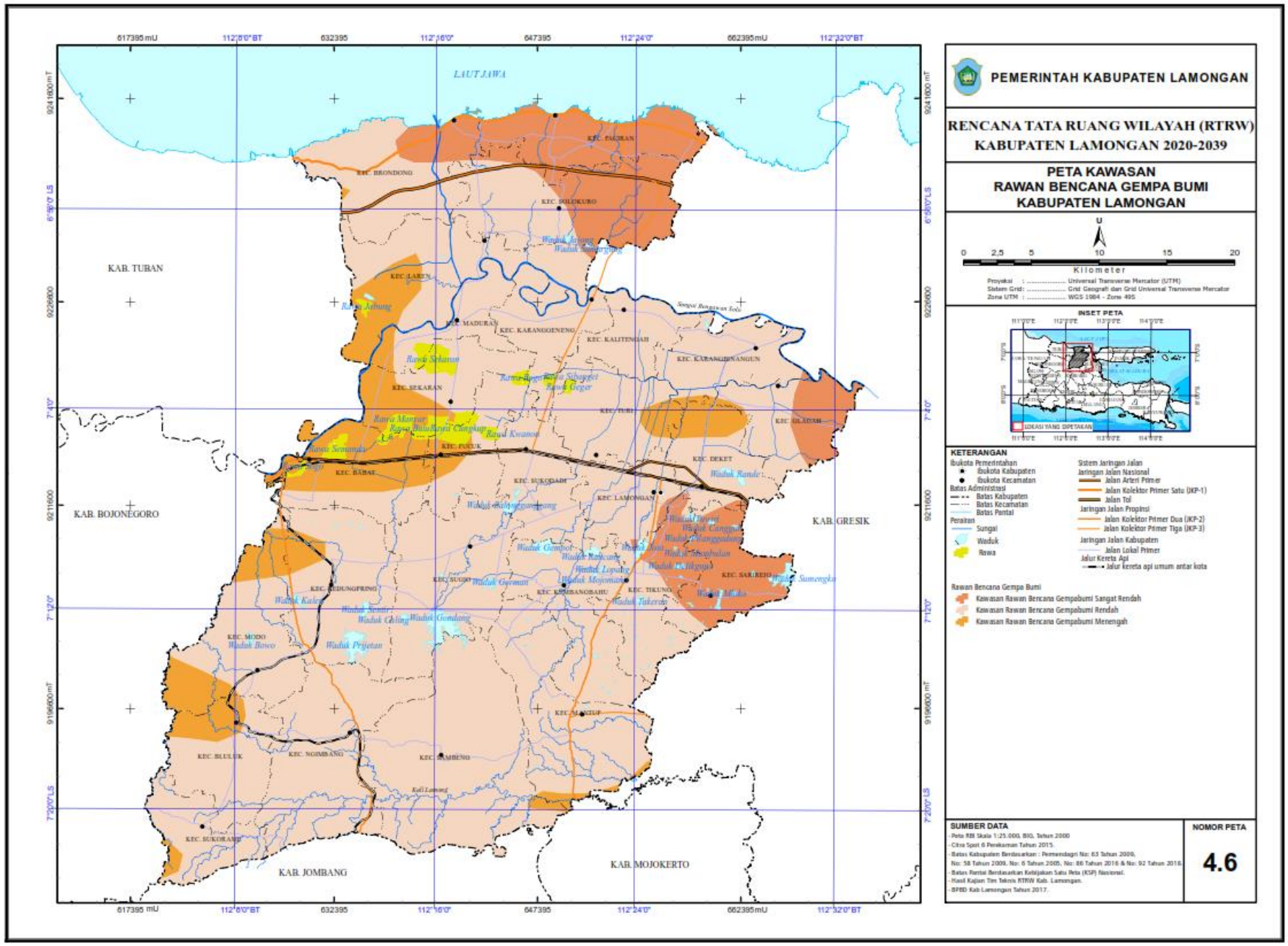
Sumber : Digitasi Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Arahan pengelolaan kawasan rawan gempa, meliputi:

a. Pelaksanaan pembangunan gedung dilakukan dengan konstruksi yang tahan getaran/gempa khususnya di daerah rawan gempa;
b. Pelaksanaan pembangunan gedung dilakukan dengan mengikuti standar kualitas bangunan;
c. Penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi.
d. Pengaturan penggunaan lahan; dan
e. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya gempa bumi dan cara - cara penyelamatan diri jika terjadi gempa bumi.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN RAWAN
BENCANA TANAH LONGSOR
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalur Kereta Api
Jalur kereta api umum antar kota
Kawasan Rawan Bencana
Rawan Tanah Longsor
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
- BPBD Kab Lamongan Tahun 2017.
NOMOR PETA
4.5
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KEMBANGBAHU
KEC. TIKUNG
KEC. SAKRIREJO
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKOREJO
Waduk Gondang
Waduk Prijetan
Waduk Bowo
Waduk Tikerian
Waduk Mloko
Waduk Sumengko
Kali Lamong


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RAWAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
INDEX PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
4.3
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA KAWASAN
RAWAN BENCANA GEMPA BUMI
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
4.6

4.1.5. KAWASAN CAGAR BUDAYA

Kawasan cagar budaya yeng terdapat di Kabupaten Lamongan adalah kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi

Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran;

1. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran;
2. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran;
3. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan;
4. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran;
5. Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang;
6. Desa Balun di Kecamatan Turi;
7. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan;
8. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong;
9. Situs Candi Pataan di Kecamatan Sambeng; dan
10. Kawasan cagar budaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya, meliputi :

a. Pelestarian dan pengendalian pembangunan di kawasan yang terdapat lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya; dan
b. Pengembangan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pariwisata dan ilmu pengetahuan.
c. Penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.

4.1.6. KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE

Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Lamongan seluas kurang lebih 84 ha, meliputi:

a. Kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Paciran seluas kurang lebih 15 ha; dan
b. Kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Brondong seluas kurang lebih 70 ha

Pengelolaan ekosistem mangrove, meliputi:

a. Pengelolaan dan Pelestarian ekosistem Mangrove dengan melibatkan masyarakat;
b. Rehabilitasi Hutan Mangrove berupa penanaman kembali tanaman mangrove pada kawasan sempadan pantai berhutan mangrove; dan
c. Penetapan kawasan pantai berhutan mangrove dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata dan ilmu pengetahuan

4.1.7. KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU

RTH perkotaan, meliputi :

a. proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota;

b. proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota; dan

c. proporsi ruang terbuka hijau privat pada wilayah perkotaan paling sedikit 10 % dari luas wilayah kota;

Pengelolaan RTH perkotaan, meliputi :

a. sosialisasi tentang peran dan fungsi ruang terbuka hijau bagi kawasan perkotaan;

b. Pendampingan kepada masyarakat agar mau terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

c. Mendorong partisipasi semua pihak untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan melalui keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;

d. Membina dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau privat di pekarangan atau tanah milik warga;

e. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam hal penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;dan

f. Menetapkan penyusunan dan program kerja pengelolaan holtikultura yang bernilai ekonomis, ekologis dan estetik

4.2. RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA

Kawasan Peruntukan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pesisir.

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).

c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:

- memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau
- merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan

daya dukung dan daya tamping lingkungan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria :

a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;

b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;

c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau

d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

(3) Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau

b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah. Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:

a. Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;

b. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau

c. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

(5) Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria :

a. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;

b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c. Tidak mengubah lahan produktif.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria :

a. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau

b. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

(7) Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria :

a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;

b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau

c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

(8) Kawasan peruntukan petahanan dan keamanan

(9) Kawasan transportasi

4.2.1. KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 3 (tiga) KPH, yaitu KPH Mojokerto, KPH Tuban dan KPH Jombang. Total luas hutan produksi di Kabupaten Lamongan adalah seluas 31.437,57 (tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh tujuh) ha, tersebar di :

1. Kecamatan Sukorame;
2. Kecamatan Bluluk;
3. Kecamatan Ngimbang;
4. Kecamatan Sambeng;
5. Kecamatan Mantup;
6. Kecamatan Kembangbahu;
7. Kecamatan Sugio;
8. Kecamatan Kedungpring;
9. Kecamatan Modo;
10. Kecamatan Laren;
11. Kecamatan Solokuro;
12. Kecamatan Paciran;
13. Kecamatan Brondong;

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

1. pengusahaan hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB);
2. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan maupun kawasan yang mengalami perambahan;
3. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya; dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa hutan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 maka secara umum Pemanfaatan hutan, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2007 merinci lebih detail lagi bahwa, pemanfaatan hutan secara lestari wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup kriteria dan indikator aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Selanjutnya kriteria dan indikator tersebut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 4795/Kpts-II/2002 tanggal 3 Juni 2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan, yang berupa

- *Kelestarian fungsi produksi* : Pengelolaan hutan yang mampu menjamin kelestarian usaha melalui pengaturan hasil dari sumber daya yang berkelanjutan *(sustainable forest management).*

- *Kelestarian fungsi ekologi/lingkungan* diartikan sebagai terpeliharanya viabilitas dan fungsi ekosistem hutan dan ekosistem-ekosistem di sekitarnya pada level yang sama atau lebih tinggi. Ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap mempertahankan produktivitas, dan kemampuannya untuk pulih kembali. Fungsi ini menghendaki pelaksanaan pengelolaan hutan yang menghargai atau didasarkan pada proses-proses alami.
- *Kelestarian fungsi sosial* mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari secara sosial apabila sesuai dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui ambang batas toleransi komunitas setempat terhadap perubahan akibat pengelolaan hutan.

4.2.2. KAWASAN PERTANIAN

Kawasan pertanian, meliputi:

1. Kawasan Tanaman Pangan;
2. Kawasan Hortikultura;
3. Kawasan Perkebunan; dan
4. Peternakan.

4.2.2.1. KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Kawasan pertanian tanaman pangan berupa kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 53.384 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) ha, meliputi:

a. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 45.841 (empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) ha tersebar di :
    1. Kecamatan Kembangbahu;
    2. Kecamatan Sugio;
    3. Kecamatan Kedungpring;
    4. Kecamatan Modo;
    5. Kecamatan Babat;
    6. Kecamatan Pucuk;
    7. Kecamatan Sukodadi;
    8. Kecamatan Lamongan;
    9. Kecamatan Tikung;
    10. Kecamatan Sarirejo;
    11. Kecamatan Deket;
    12. Kecamatan Glagah;
    13. Kecamatan Karangbinangun;

14. Kecamatan Turi;
15. Kecamatan Kalitengah;
16. Kecamatan Karanggeneng;
17. Kecamatan Sekaran;
18. Kecamatan Maduran;
19. Kecamatan Laren; dan
20. Kecamatan Solokuro.

b. Kawasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 7.543 (tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga) ha, meliputi:
    1. Kecamatan Sukorame;
    2. Kecamatan Bluluk;
    3. Kecamatan Ngimbang;
    4. Kecamatan Sambeng;
    5. Kecamatan Mantup;
    6. Kecamatan Kembangbahu;
    7. Kecamatan Kedungpring;
    8. Kecamatan Modo;
    9. Kecamatan Lamongan;
    10. Kecamatan Tikung;
    11. Kecamatan Sarirejo;
    12. Kecamatan Deket;
    13. Kecamatan Glagah;
    14. Kecamatan Turi;
    15. Kecamatan Laren;
    16. Kecamatan Solokuro;
    17. Kecamatan Paciran; dan
    18. Kecamatan Brondong.

Daerah Unggulan Pertanian Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- Padi : Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Tikung, Turi, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren
- Jagung : Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Sugio, Kedungpring, Modo, Pucuk, Sukodadi, Tikung, Laren, Solokuro, Paciran, Brondong

- Kedalai : Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Tikung, Sarirejo
- Kacang Hijau : Kembangbahu, Sugio, Maduran
- Ubi Kayu : Solokuro, Paciran

Tabel 4.7. Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

No	Kecamatan	LP2B	LCP2B	KP2B
1	Sukorame	-	218,59	218,59
2	Bluluk	-	201,01	201,01
3	Ngimbang	-	739,14	739,14
4	Sambeng	-	868,55	868,55
5	Mantup	237,23	996,84	1.234,07
6	Kembangbahu	1.769,27	202,69	1.971,97
7	Sugio	4.520,27	-	4.520,27
8	Kedungpring	3.863,53	2,51	3.866,03
9	Modo	1.500,61	709,97	2.210,57
10	Babat	2.846,70	-	2.846,70
11	Pucuk	2.109,33	-	2.109,33
12	Sukodadi	2.613,87	-	2.613,87
13	Lamongan	222,11	55,91	278,02
14	Tikung	624,42	342,41	966,83
15	Sarirejo	342,55	596,45	939,00
16	Deket	302,86	1.258,12	1.560,98
17	Glagah	2.534,96	380,95	2.915,91
18	Karangbinangun	3.104,61	-	3.104,61
19	Turi	2.339,33	220,95	2.560,28
20	Kalitengah	2.941,97	-	2.941,97
21	Karanggeneng	2.448,55	-	2.448,55
22	Sekaran	3.378,70	-	3.378,70
23	Maduran	2.112,35	-	2.112,35
24	Laren	5.379,56	1,10	5.380,66
25	Selokuro	648,51	350,27	998,78
26	Paciran	-	71,48	71,48
27	Brondong	-	326,20	326,20
	Jumlah	**45.841**	**7.543**	**53.384**

Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan

4.2.2.2. KAWASAN PERTANIAN HORTIKULTURA

Kawasan hortikultura seluas 10.509 (sepuluh ribu lima ratus sembilan) hektar tersebar di suluruh kecamatan. Adapun tanaman unggulan beserta lokasinya sebagai berikut:

1. Buah Buahan (Hortikultura)
   - Semangka : Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Karanggeneng dan Sekaran.

- Blimbing : Ngimbang, Mantup, Sugio, Sukodadi, Lamongan, Deket, Maduran, Laren dan Solokuro.
- Jambu Biji : Sugio, Pucuk, Sukodadi, Tikung, Deket, Glagah, Sekaran dan Paciran.
- Alpukat : Ngimbang.
- Jeruk siam : Solokuro dan Paciran.
- Nangka : Mantup, Sugio, Deket, Solokuro dan Paciran.
- Pepaya : Bluluk, Sambeng, Kembangbahu, Tikung dan Solokuro.
- Mangga : Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Babat, Sukodadi, Lamongan, Tikung, Sarirejo, Karangbinangun, Maduran dan Solokuro.
- Pisang : Kembangbahu, Kedungpring, Modo, Pucuk, Lamongan, Sarirejo, Deket, Glagah, Turi, Maduran, Laren dan Brondong.
- Salak : Sambeng, Solokuro dan Paciran.
- Sawo : Sukorame, Sambeng, Mantup, Solokuro dan Brondong.
- Rambutan : Solokuro.
- Sirsak : Ngimbang, Sugio, Babat, Tikung dan Solokuro.
- Jambu air : Sugio, Pucuk, Tikung, Glagah, Karangbinangun, Sekaran dan Laren.
- Nanas : Ngimbang
- Sukun : Sambeng, Kembangbahu dan Solokuro.
- Markisa : Sukodadi
- Jeruk besar : Ngimbang
- Blewah : Sukorame, Kembangbahu, Modo dan Karangbinangun.

2. Sayuran
   - Bawang Merah : Sukorame, Bluluk, Ngimbang dan Sugio.
   - Sawi : Sugio
   - Tomat : Sukodadi, Glagah dan Maduran.
   - Kangkung : Mantup, Kembangbahu dan Tikung.
   - Cabe rawit : Ngimbang, Sambeng, Babat, Sukodadi, Tikung, Deket dan Solokuro

4.2.2.3. KAWASAN PERKEBUNAN

Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 29.618 (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas) hektar tersebar di:

1. Kecamatan Babat;
2. Kecamatan Bluluk;
3. Kecamatan Kedungpring;
4. Kecamatan Kembangbahu;
5. Kecamatan Mantup;
6. Kecamatan Modo;
7. Kecamatan Ngimbang;
8. Kecamatan Sambeng;
9. Kecamatan Sarirejo;
10. Kecamatan Sugio;
11. Kecamatan Sukorame; dan
12. Kecamatan Tikung.

Adapun tanaman unggulan dan lokasinya sebagai berikut:

- Tembakau (Tembakau Virginia dan Tembakau Jawa) tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Modo, Kedungpring, Sugio dan Babat;
- Kenaf potensi di Kecamatan Laren pada lahan Bonorowo;
- Tebu tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan meliputi Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio,Kedngpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Tikung, Sarirejo, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong;
- Cabe jamu tersebar di 2 (dua) Kecamatan meliputi Kecamatan Mantup dan Sugio;
- Wijen tersebar di 4 (empat) Kecamatan meliputi Kecamatan Pucuk, Babat, Sukodadi dan Modo;
- Jarak pagar, kelapa, dan siwalan tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan.

4.2.2.4. KAWASAN PETERNAKAN

Kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan dengan pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan bibit ternak besar dan kecil ruminansia : Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Laren, Kecamatan Babat, Kecamatan Modo, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Tikung, Kecamatan Kembangbahu, dan Kecamatan Sarirejo;
- Pengembangan penggemukan (fattening) wilayah lokasi pengembangan Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Sugio, Kecamatan Lamongan, Kecamatan

Sukodadi, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Deket, dan Kecamatan glagah;

- Pengembangan ayam buras tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan;
- Pengembangan itik di daerah bonorowo;
- Pengembangan kambing/domba prioritas di daerah kering;
- Pengembangan ayam ras diseluruh kecamatan kecuali di daerah bonorowo.

Pengelolaan kawasan pertanian, meliputi:

a. Area lahan sawah beririgasi harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain;
b. Pengalihan fungsi areal sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disediakan lahan pengganti;
c. Pengembangan dan perluasan jaringan irigasi, pembukaan areal baru pembangunan irigasi, dan pengembangan waduk/embung;
d. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian terpadu, dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan budi daya pertanian ramah lingkungan;
e. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk perkebunan;
f. Pewilayahan komoditi tenaman perkebunan sesuai dengan potensinya;
g. Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak dan sektor industri pendukung lainnya;
h. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada pengembangan komoditas ternak unggulan; dan
i. Pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.

4.2.3. KAWASAN PERIKANAN

Kawasan Perikanan, meliputi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
b. Kawasan Perikanan Budidaya.

Kawasan Perikanan Tangkap seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) ha, meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong; dan
b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran.

Kawasan Perikanan Budidaya seluas kurang lebih 6.407 (enam ribu empat ratus tujuh) hektar, meliputi:

1. Perikanan Budidaya Air Payau dan/atau Tambak, meliputi : Kecamatan Kedungpring; Kecamatan Pucuk; Kecamatan Deket; Kecamatan Glagah;

Kecamatan Karangbinangun; Kecamatan Turi; Kecamatan Kalitengah; Kecamatan Karanggeneng; Kecamatan Paciran; dan Kecamatan Brondong.

2. Perikanan Budidaya Air Tawar, tersebar di seluruh kecamatan.

Pengelolaan kawasan perikanan, meliputi:

a. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
b. penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri
c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;
d. peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
e. pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.
f. pemertahanan luasan dan sebaran kawasan tambak garam agar tidak berubah fungsi;
g. pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam;
h. pengembangan kawasan tambak garam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang keberlanjutan.

4.2.4. KAWASAN PERTAMBANGAN

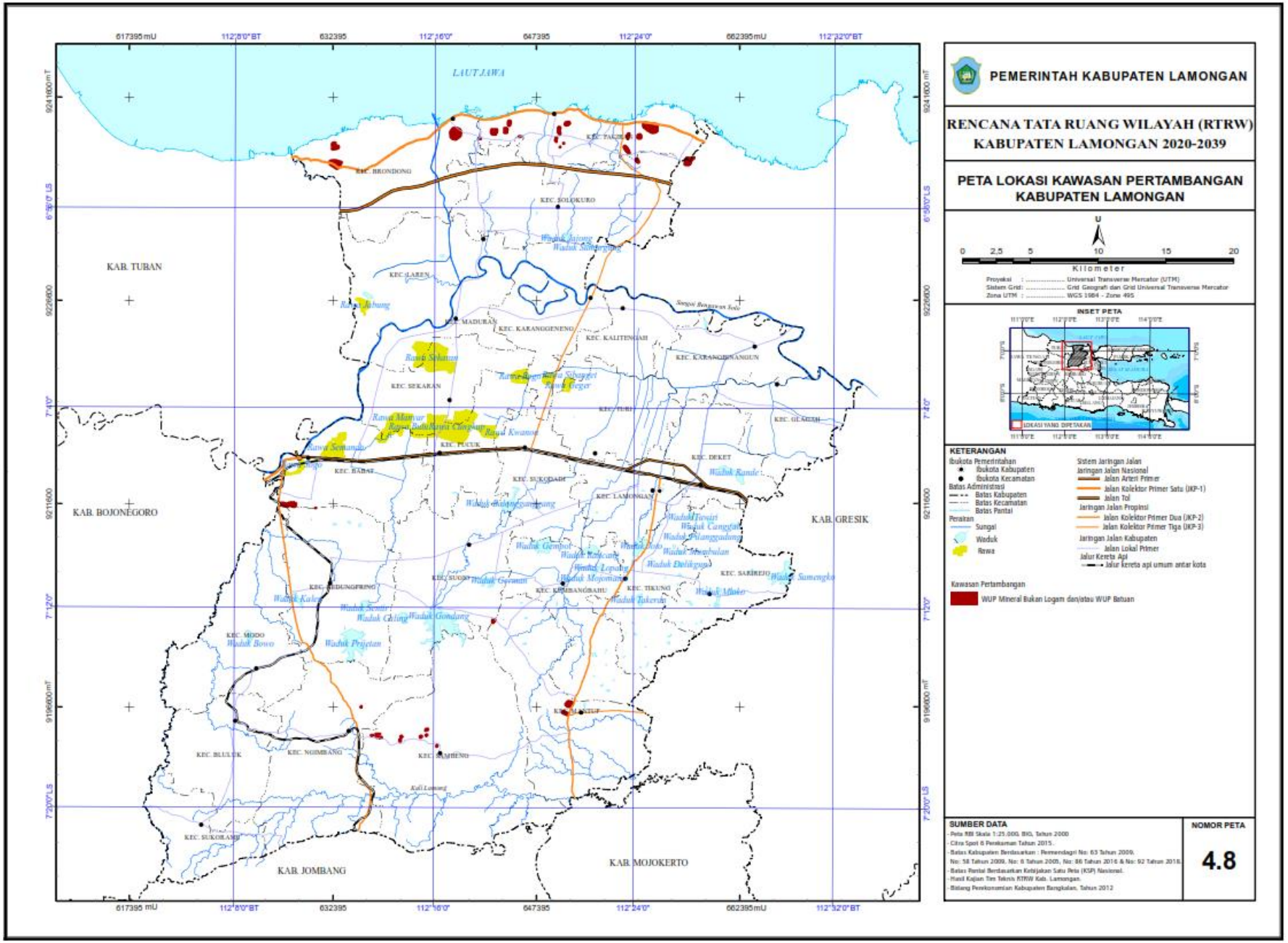
Kawasan pertambangan dan energi, meliputi :

1. Kawasan pertambangan mineral; dan
2. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;

Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam berada di Kecamatan Brondong; Kecamatan Solokuro; Kecamatan Babat; Kecamatan Ngimbang; Kecamatan Sugio; Kecamatan Mantup; Kecamatan Modo; Kecamatan Bluluk; Kecamatan Sukorame; Kecamatan Kembangbahu; dan Kecamatan Sambeng.

Kawasan Pertambangan Mineral Batuan, meliputi: Kecamatan Paciran; Kecamatan Brondong; Kecamatan Solokuro; Kecamatan Babat; Kecamatan Ngimbang; Kecamatan Sugio; Kecamatan Mantup; Kecamatan Modo; Kecamatan Bluluk; Kecamatan Sukorame; Kecamatan Kembangbahu; dan Kecamatan Sambeng.

Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berada di seluruh wilayah kecamatan.


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA LOKASI KAWASAN PERTAMBANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
4.8

4.2.5. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 7.419 (tujuh ribu empat ratus sembilan belas) hektar berada di:

1. Kecamatan Paciran;
2. Kecamatan Brondong;
3. Kecamatan Solokuro;
4. Koridor Jalan Arteri Primer, meliputi:
    a. Kecamatan Deket;
    b. Kecamatan Lamongan;
    c. Kecamatan Sukodadi;
    d. Kecamatan Pucuk; dan
    e. Kecamatan Babat.
5. Koridor Jalan Kolektor Primer, meliputi:
    a. Kecamatan Tikung;
    b. Kecamatan Kembangbahu;
    c. Kecamatan Ngimbang;
    d. Kecamatan Sambeng;
    e. Kecamatan Kedungpring;
    f. Kecamatan Mantup; dan
    g. Kecamatan Modo.

Kawasan Sentra Industri, berupa industri rumah tangga, diarahkan di:

1. Industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran dapat berlokasi di kawasan permukiman diseluruh kecamatan; dan
2. Industri rumah tangga yang menimbulkan pencemaran diarahkan di kawasan peruntukan industri.

Di dalam kawasan peruntukan industri dapat ditetapkan kawasan industri yang diarahkan pada kawasan utara tepatnya di Kecamatan Paciran, Brondong dan Selokuro. Adapun Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi:

a. pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis kawasan
b. Di dalam peruntukan kawasan industri dapat dikembangkan kawasan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. pengembangan kawasan peruntukan industri perlu didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
d. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor perlu dilengkapi dengan jalan pengantar untuk kelancaran

aksesibilitas atau penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan kelas jalannya;

e. mewajibkan penyediaan fasilitas IPAL bagi pengembang dan pelaksana industri baik untuk kawasan industri besar dan menengah maupun industri kecil dan/atau rumah tangga;

f. Penyediaan bangunan perumahan untuk pekerja dan fasilitas sosial pada kawasan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

g. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada kawasan peruntukan industri yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan

h. Peningkatan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.

4.2.6. KAWASAN PARIWISATA

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lamongan dikembangkan sesuai daya tarik wisata yang ada, meliputi:

Daya tarik wisata di Kabupaten Lamongan dibagi menjadi

a. daya tarik wisata alam;

b. daya tarik wisata budaya; dan

c. daya tarik wisata buatan.

Daya tarik wisata alam meliputi:

a. Sumber Air Panas Brumbun di Kecamatan Paciran;

b. Pantai Klayar di Kecamatan Paciran;

c. Pantai Kutang di Kecamatan Brondong;

d. Wisata Akar Langit Trinil di Kecamatan Brondong;

e. Wisata Gunung Suru di Kecamatan Brondong;

f. Wisata Gunung Pegat di Kecamatan Babat;

g. Wisata Puncak Wangi di Kecamatan Babat; dan

h. Wisata Waduk Gondang di Kecamatan Sugio.

i. Istana Gunung Mas 27 di Kecamatan Mantup;

j. Dan wisata alam lainnya

Daya tarik wisata budaya meliputi:

a. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran;

b. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran;

c. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran;

d. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan;

e. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran;

f. Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang;

g. Desa Balun di Kecamatan Turi;

h. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan;

i. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong;

j. Situs Candi Pataan di Kecamatan Sambeng;

k. Masjid Namira di Kecamatan Tikung; dan

l. Wisata budaya lainnya

Daya tarik wisata buatan, meliputi:

a. Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran;

b. Wisata Gua Maharani dan Zoo di Kecamatan Paciran;

c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Monumen Van Der Wijk di Kecamatan Brondong;

d. Bendungan Babat di Kecamatan Sekaran;

e. Taman Wisata Besur Agro Edukasi di Kecamatan Sekaran;

f. Stadion Suralaya di Kecamatan Deket;

g. Alun Alun Lamongan di Kecamatan Lamongan;

h. Waduk Gondang di Kecamatan Sugio;

i. Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring;

j. Wisata Wego di Kecamatan Sugio, dan

k. Wisata buatan lainnya

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pariwisata di Kabupaten Lamongan, meliputi :

1. mengembangkan pariwisata secara terintegrasi antara obyek wisata, event-event wisata, akomodasi wisata dan kemasan wisata sebagai satu kesatuan wisata kabupaten;
2. menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu tujuan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui penyelenggaraan event wisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pariwisata skala internasional;
3. melindungi wisata budaya, heritage dan religi baik obyek maupun kegiatannya sebagai salah satu tujuan utama wisata kabupaten;
4. melestarikan lingkungan alam pantai dan satwa sebagai aset wisata dan pengembangan pertanian sebagai penarik wisata;

5. meningkatkan dan mengembangkan kualitas lingkungan obyek wisata yang nyaman, aman dan terintegrasi dengan jaringan transportasi dan infrastruktur perkotaan;
6. menyediakan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada kawasan pariwisata yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
7. meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.

4.2.7. KAWASAN PERMUKIMAN

A. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya dengan luas mencapai 13.898 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan) ha. Permukiman perkotaan di Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

a. permukiman perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional berada di perkotaan Lamongan
b. Permukiman perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat kegiatan Wilayah berada di Perkotaan Babat, Sukodadi, Paciran-Brondong dan Perkotaan Ngimbang.
c. Pemukiman perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan berada di masing masing ibukota kecamatan.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan permukiman perkotaan, meliputi :

a. peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada;
b. pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan;
c. permukiman perkotaan yang padat dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan dan perbaikan kawasan perumahan dan permukiman
d. pengembangan perumahan dan permukiman baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan;
e. permukiman perkotaan yang berada di bantaran sungai perlu dilakukan relokasi

B. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Lamongan seluas kurang lebih 16.365 (enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima) ha

Arahan pengelolaan kawasan permukiman perdesaan meliputi:

1. Peningkatan kualitas permukiman perdesaan yang sudah ada;
2. Penanganan kawasan permukiman kumuh di perdesaan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan dan perbaikan kawasan perumahan dan permukiman
3. permukiman perdesaan yang berada di bantaran sungai perlu dilakukan relokasi

4.2.8. KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Kawasan pertahanan keamanan, tersebar di seluruh kecamatan berupa:

1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0812 Lamongan di Kecamatan Lamongan;
2. Compi A Yon Zipur 5 di Kecamatan Babat; dan
3. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan.
4. Polres di Kecamatan Lamongan
5. Polsek di seluruh kecamatan

Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. Pengendalian pembangunan fasilitas dan kegiatan di kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
2. memberikan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan negara terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan disekitarnya

4.2.9. KAWASAN TRANSPORTASI

Kawasan Transportasi, meliputi : Pelabuhan; Stasiun dan terminal. Kawasan Pelabuhan berada di Kecamatan Paciran; dan Kecamatan Brondong. Kawasan Terminal, berada di: Kecamatan Babat; Kecamatan Sukodadi; Kecamatan Paciran; Kecamatan Brondong; Kecamatan Ngimbang; Kecamatan Sugio; Kecamatan Mantup; dan Kecamatan Sukorame. Kawasan stasiun berada di: Kecamatan Lamongan; Kecamatan Babat; Kecamatan Pucuk; dan Kecamatan Sukodadi

Tabel 4.8. Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamongan

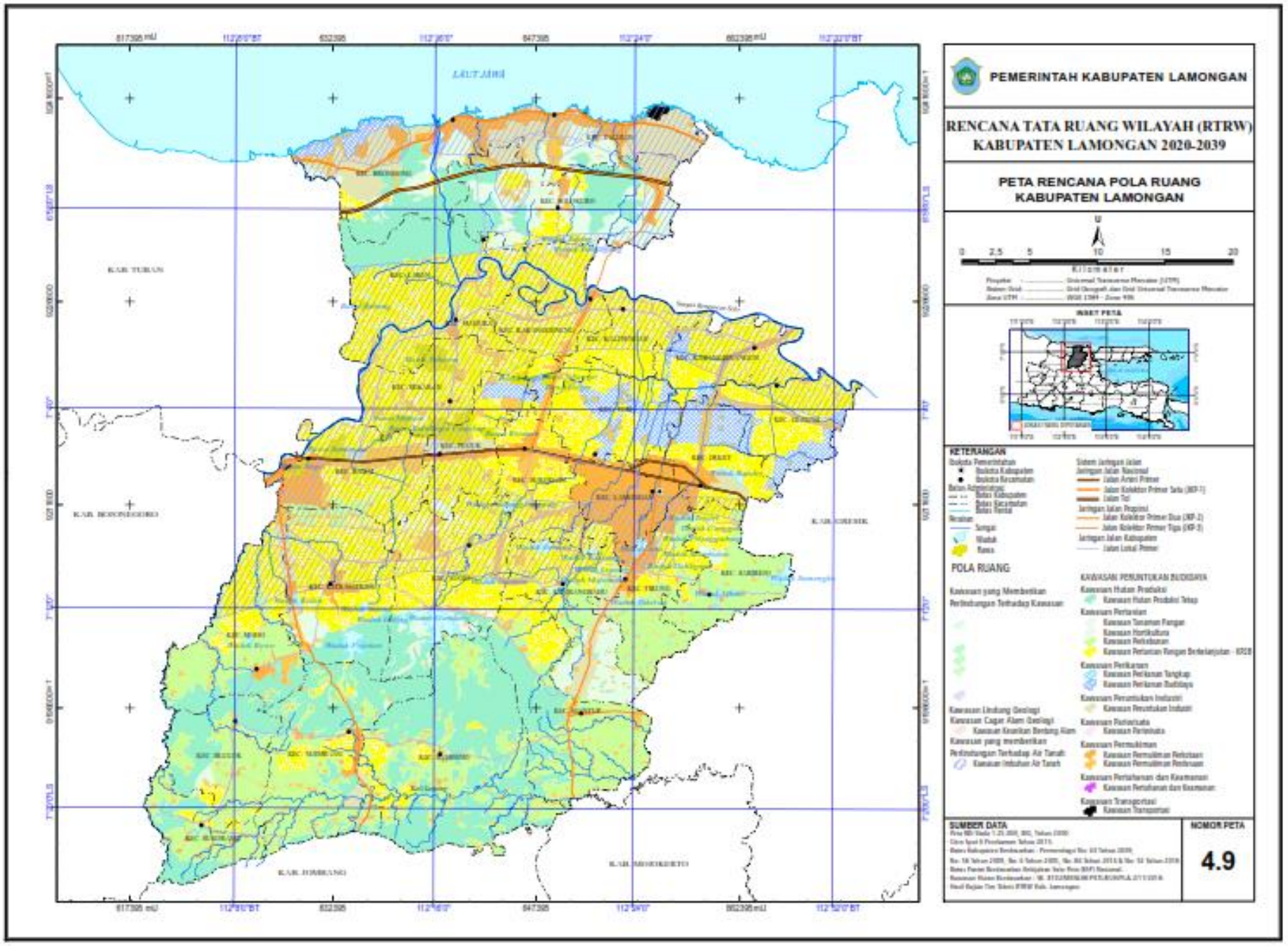
No	Pola Ruang	Luas (ha)	Prosentase (%)
A	**Kawasan Peruntukan Lindung**		
1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
	- Hutan Lindung	255,28	0,15
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	- Sempadan Pantai	43	0,02
	- Sempadan Sungai	570	0,33
	- Kawasan Sekitar Waduk/Rawa	83	0,05
3	Kawasan Lindung Geologi		
	Kawasan Cagar Alam Geologi		
	- Kawasan Keunikan Bentang Alam	6	0,00
4	Kawasan Ekosistem Mangrove		
	- Kawasan Hutan Mangrove	84	0,05
B	**Kawasan Peruntukan Budidaya**		
1	Kawasan Hutan Produksi		
	- Kawasan Hutan Produksi Tetap	31.437,57	17,94
2	Kawasan Pertanian		
	- Kawasan Tanaman Pangan	53.384	30,47
	- Kawasan Hortikultura	10.509	6,00
	- Kawasan Perkebunan	29.618	16,90
3	Kawasan Perikanan		
	- Kawasan Perikanan Budidaya	6.407	3,66
	- Kawasan Perikanan Tangkap	43	0,02
4	Kawasan Peruntukan Industri		
	- Kawasan Peruntukan Industri	7.419	4,23
5	Kawasan Pariwisata		
	- Kawasan Pariwisata	63	0,04
6	Kawasan Permukiman		
	- Kawasan Permukiman Perkotaan	13.898	7,93
	- Kawasan Permukiman Perdesaan	16.365	9,34
7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		
	- kawasan Pertahanan dan Keamanan	5	0,00
8	Kawasan Transportasi	153	0,09
C	**Lain-Lain**		
1	Sungai	913	0,52
2	Waduk	1.730	0,99
3	Rawa	2.234	1,27
	Jumlah	**175.221**	**100,00**

Sumber : Hasil Rencana

Tabel 4.9. Rencana Pola Ruang Per Kecamatan Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Rencana Pola Ruang																			
		Kawasan Peruntukan Lindung						Kawasan Peruntukan Budidaya													
		Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Perlindungan Stempat			Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Pertanian			Kawasan Perikanan		Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata	Kawasan Permukiman		Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Sungai	Waduk	Rawa	Jumlah
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Sempadan Waduk	Kawasan Cagar Alam Geologi Keunikan Bentang Alam	Hutan Mangrove	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Permukiman Perkotaan	Permukiman Perdesaan						
1	Sukorame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,91	218,59	27,69	2.043,65	0,00	0,00	1,13	0,00	148,28	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,63
2	Bluluk	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,09	201,01	139,72	2.832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,93
3	Ngimbang	26,29	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	3.947,73	739,14	0,72	4.284,63	0,00	0,00	204,90	0,00	490,13	311,23	0,00	0,35	0,00	0,73	0,00	10.006,01
4	Sambeng	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	9.040,05	868,55	24,98	4.498,92	0,00	0,00	60,52	0,00	171,24	385,62	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	15.078,35
5	Mantup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,63	1.234,07	3,80	4.710,50	0,00	0,00	20,99	0,00	185,86	529,95	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	9.123,19
6	Kembangbahu	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	10,94	1.971,97	1.868,21	1.165,80	0,00	0,00	691,22	0,00	85,98	855,35	0,00	0,00	0,00	168,58	0,00	6.825,07
7	Sugio	226,69	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	1.196,67	4.520,27	738,80	5,49	0,00	0,00	3,24	28,75	177,87	1.594,67	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	8.974,19
8	Kedungpring	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	1.481,37	3.866,03	475,11	564,79	2,71	0,00	254,97	0,00	638,46	957,60	0,00	0,00	0,00	323,80	0,00	8.572,74
9	Modo	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	1.504,39	2.210,57	0,01	3.199,87	0,00	0,00	219,28	0,00	242,69	759,86	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	8.169,76
10	Babat	0,00	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,70	68,60	306,64	0,00	0,00	131,14	0,00	1.156,01	1.435,80	5,16	7,41	72,92	0,44	363,55	6.459,43
11	Pucuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,33	187,71	0,00	415,72	0,00	447,59	0,00	324,25	539,76	0,00	0,40	0,00	1,92	511,83	4.538,49
12	Sukodadi	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	2.613,87	8,65	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	620,73	1.412,37	0,00	1,07	0,00	62,34	0,03	4.747,56
13	Lamongan	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	278,02	4,58	0,00	21,70	0,00	15,54	0,00	3.713,07	0,00	0,00	1,34	0,00	57,71	0,00	4.093,53
14	Tikung	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	966,83	0,65	2.778,44	0,00	0,00	199,83	0,00	1.276,69	122,74	0,00	0,00	0,00	186,78	0,00	5.541,58
15	Sarirejo	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	939,00	181,74	3.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	187,98	0,00	0,00	0,00	246,33	0,00	4.886,96
16	Deket	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	1.560,98	5,50	0,00	1.330,81	0,00	283,83	0,00	693,69	440,19	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00	4.395,15
17	Glagah	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,91	1,71	0,00	1.207,76	0,00	0,00	0,00	90,00	692,06	0,00	0,00	61,61	0,29	0,00	5.001,53
18	Karangbinang	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,61	97,70	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	266,57	597,22	0,00	0,00	94,59	11,33	0,00	4.726,21
19	Turi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,28	0,55	0,00	1.885,16	0,00	0,00	0,00	146,33	586,00	0,00	0,00	7,42	1,87	62,47	5.250,09
20	Kalitengah	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,97	13,49	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	90,33	462,84	0,00	0,00	52,86	0,00	18,41	3.694,60
21	Karanggeneng	0,00	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,55	24,14	0,00	158,83	0,00	0,00	0,00	221,01	986,51	0,00	0,00	117,49	0,54	57,37	4.073,99
22	Sekaran	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,70	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	143,29	777,34	0,00	0,00	39,53	0,52	1.009,55	5.404,96
23	Maduran	0,00	0,00	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,35	28,06	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	162,17	553,31	0,00	0,00	128,43	0,00	144,58	3.277,68
24	Laren	0,00	0,00	149,73	0,61	0,00	0,00	2.603,59	5.380,66	417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	419,43	0,00	0,00	282,14	30,07	66,03	9.411,28
25	Solokuro	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	2.983,47	998,78	3.820,95	0,00	0,00	0,00	790,27	0,00	452,65	402,38	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	9.486,89
26	Paciran	0,00	6,69	0,00	0,00	6,36	13,94	108,72	71,48	1.106,18	0,00	12,24	13,86	2.386,05	27,63	1.320,86	471,27	0,00	136,04	0,00	0,00	0,00	5.681,33
27	Brondong	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	69,56	2.456,00	326,20	1.237,70	0,00	793,35	29,58	1.682,11	0,25	801,90	574,35	0,00	6,62	55,79	1,74	0,00	8.071,51
	Jumlah	**255,28**	**43,05**	**569,64**	**82,84**	**6,36**	**83,50**	**31.437,57**	**53.384,41**	**10.509,26**	**29.618**	**6.406,50**	**43,44**	**7.419,45**	**62,68**	**13.898,36**	**16.365,47**	**5,16**	**153,24**	**912,78**	**1.729,91**	**2.233,81**	**175.220,66**
	Prosentase (%	**0,15**	**0,02**	**0,33**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**17,94**	**30,47**	**6,00**	**16,90**	**3,66**	**0,02**	**4,23**	**0,04**	**7,93**	**9,34**	**0,00**	**0,09**	**0,52**	**0,99**	**1,27**	**100,00**

Sumber : Hasil Rencana


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (KP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (KP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (KP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
POLA RUANG
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Kawasan Lindung Geologi
Kawasan Cagar Alam Geologi
Kawasan Kawasan Bentang Alam
Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah
Kawasan Imbuhan Air Tanah
KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perkebunan
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Transportasi
Kawasan Transportasi
SUMBER DATA
NOMOR PETA
4.9



BAB-5 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria:

a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat
j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten; dan
k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
    1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
    2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
    3. memiliki potensi ekspor;
    4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
    5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
    6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
    7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
    8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
    9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
    10. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produkai pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
    11. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
    12. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
    13. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

5.1. KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekono**mi** di Kabupaten Lamongan, meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Industri dan Maritim di Wilayah Utara yang menjadi kawasan peruntukan industri strategis didukung pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan;
2. Kawasan Agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Wilayah Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Ngimbang dengan kawasan pendukung meliputi :
    a. Kecamatan Mantup,
    b. Kecamatan Kembangbahu,
    c. Kecamatan Sukorame,
    d. Kecamatan Blubuk,
    e. Kecamatan Sambeng,

f. Kecamatan Modo,

g. Kecamatan Sugio; dan

h. Kecamatan Kedungpring.

Kawasan agropolitan di Kabupaten Lamongan diperkirakan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Kabupaten Lamongan bagian selatan dengan melakukan kerjasama dengan industri industri yang mengolah hasil dari kawasan agropolitan. Kabupaten lamongan bagian selatan memiliki potensi unggulan di sektor perkebunan dan peternakan

3. Kawasan Minapolitan, meliputi:

   a. Minapolitan Tangkap dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Brondong dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Paciran; dan

   b. Minapolitan Budidaya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Glagah dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Sekitarnya

4. Kawasan Perdagangan dan jasa dengan pusat pengembangan di Kecamatan Babat

Pengembangan fungsi kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi, dilakukan dengan:

a. mengembangkan dan mengendalikan kawasan peruntukan industri dengan memberikan prioritas perijinan bagi kegiatan industri yang menggunakan teknologi tinggi (hi-tech) ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran serta menyerap tenaga kerja;

b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, Instalasi pengolahan air limbah dan sarana serta prasarana lainnya;

c. Mengembangan kawasan agropolitan dengan Pengelolaan Agrikultura dan Industri yang Berkesinambungan;dan

d. Mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat, mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan, mengembang industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan.

5.2. KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
2. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

5. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
6. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

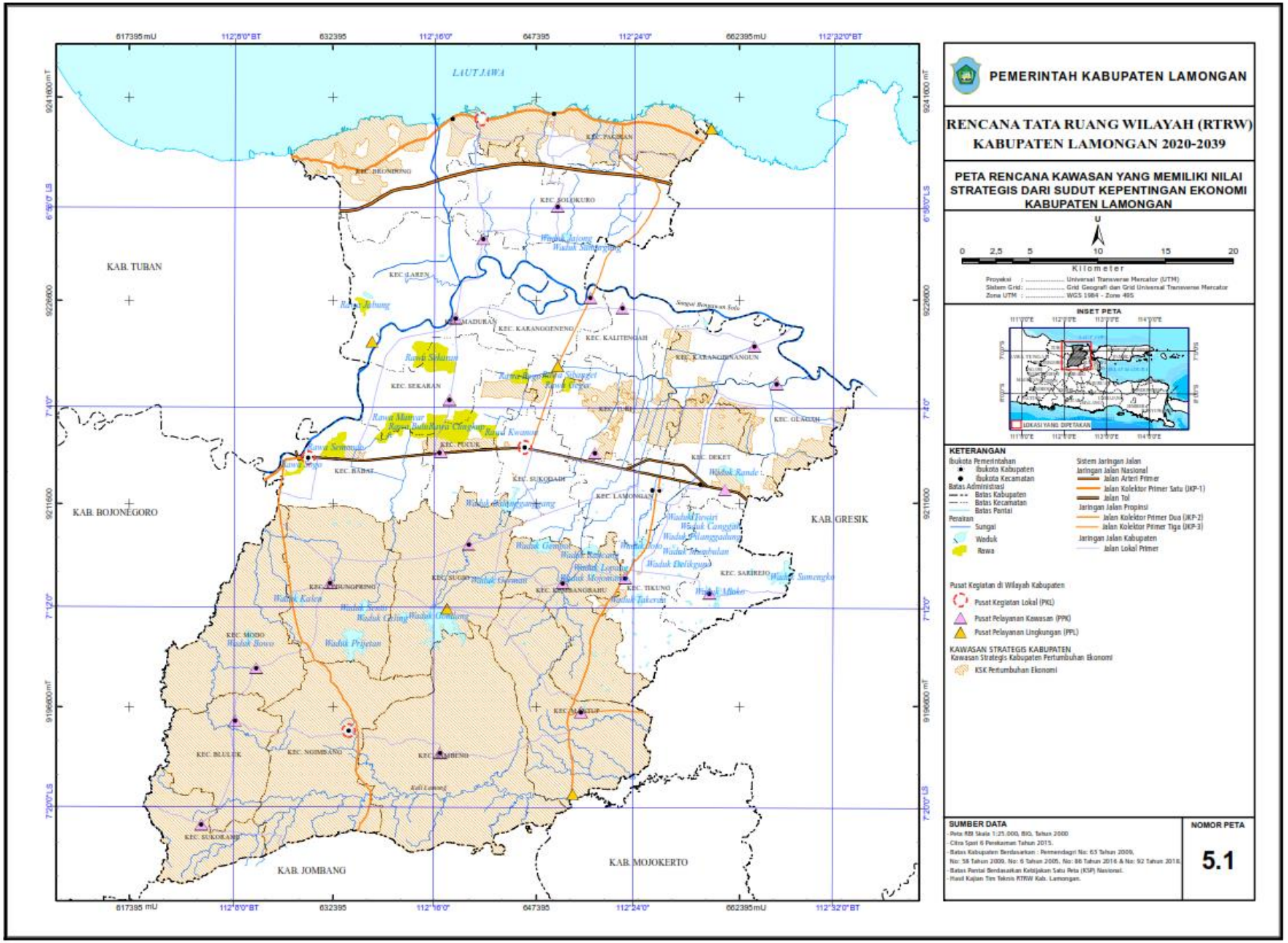
Rencana penentapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi : Kawasan Makam Sunan Drajat di Kecamatan Paciran dan dan Kawasan Cagar Budaya Lainnya.

Pengembangan fungsi kawasan strategis berdasarkan aspek sosial budaya, dilakukan dengan :

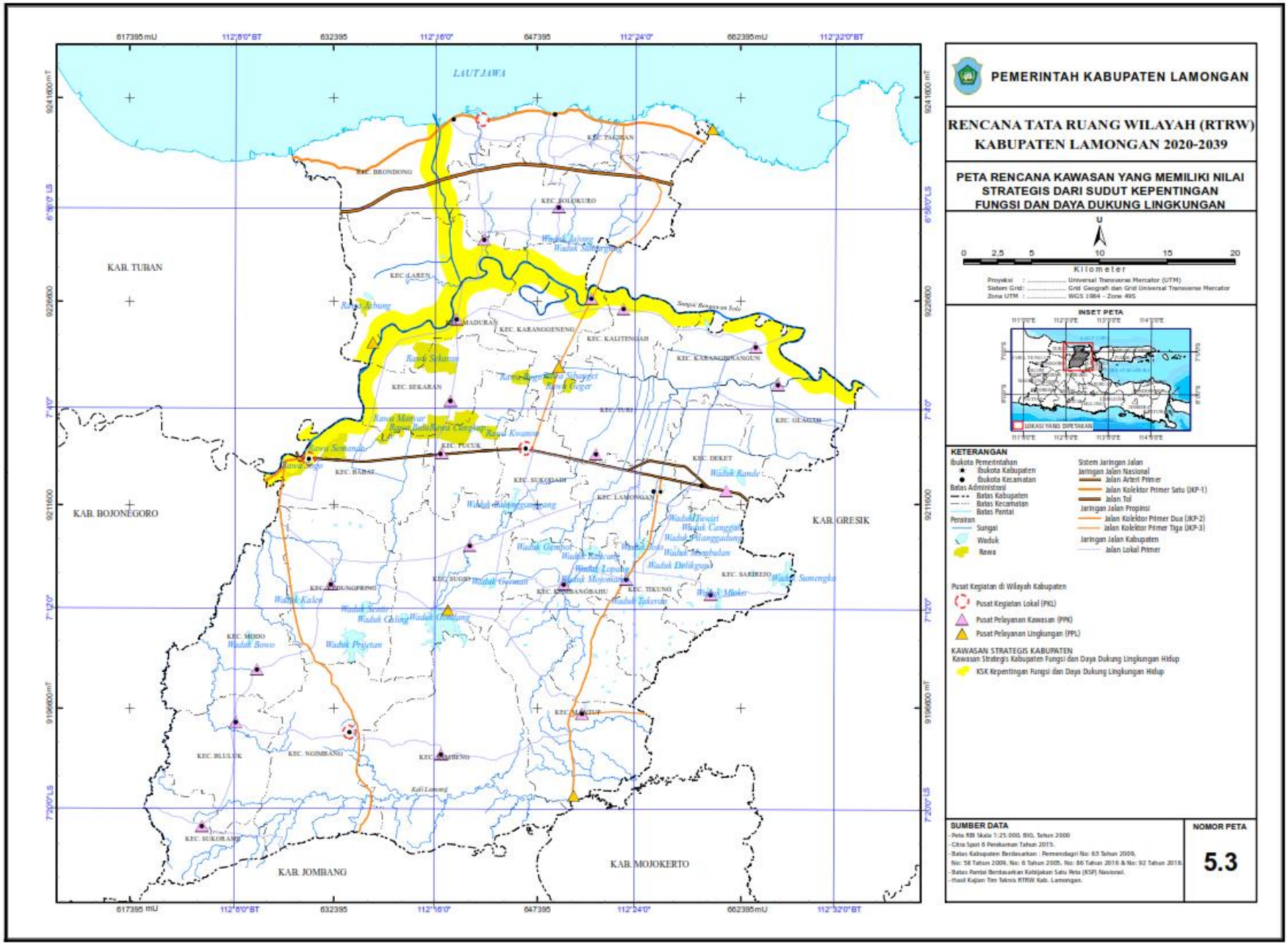
a. Melestarikan bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai wisata budaya yang dilengkapi dengan area untuk kegiatan sektor usaha informal dan ruang terbuka hijau;
b. Melestarikan dan menata serta mendorong pertumbuhan; dan
c. Mendorong tumbuhnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pelestarian cagar budaya untuk mendukung kegiatan wisata budaya serta kegiatan perdagangan dan jasa.

5.2.3. KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

Rencana penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan hidup, meliputi kawasan DAS Sungai Bengawan Solo


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN EKONOMI KABUPATEN LAMONGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Kawasan Strategis Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi
KSK Pertumbuhan Ekonomi
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No. 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 66 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2016.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
5.1
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PACIRAN
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. GUNUNG
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. DEKET
KEC. GLAGAH
KEC. SARIREJO
KEC. TIKUNG
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SAMBENG
KEC. MANTUP
KEC. SUKODADI
Waduk Tajung
Waduk Sumbergirang
Rawa Jabung
Rawa Selatan
Rawa Mumar
Rawa Kwanyar
Rawa Semanding
Waduk Rande
Waduk Tawiri
Waduk Cangkir
Waduk Gempol
Waduk Logawe
Waduk Mojomati
Waduk Delikgowa
Waduk Sumengko
Waduk Kalen
Waduk Sesek
Waduk Gedang
Waduk Gemuruh
Waduk Bowo
Waduk Prijetan
Kali Lamong

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA KAWASAN YANG
MEMILIKI NILAI STRATEGIS DARI SUDUT
KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA
Kilometer
INSET PETA
KETERANGAN
SUMBER DATA
NOMOR PETA
5.2
KAB. GRESIK
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. BOJONEGORO
KAB. TUBAN
LAUT JAWA


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMONGAN 2020-2039
PETA RENCANA KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
U
0 2,5 5 10 15 20
Kilometer
Proyeksi : Universal Transversa Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS 1984 - Zone 49S
INSET PETA
LOKASI YANG DIPETAKAN
KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Pantai
Perairan
Sungai
Waduk
Rawa
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jalan Tol
Jaringan Jalan Propinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
KSK Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
SUMBER DATA
- Peta RBI Skala 1:25.000, BIG, Tahun 2000
- Citra Spot 6 Perekaman Tahun 2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, No: 58 Tahun 2009, No: 6 Tahun 2005, No: 86 Tahun 2016 & No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.
NOMOR PETA
5.3
LAUT JAWA
KAB. TUBAN
KAB. BOJONEGORO
KAB. GRESIK
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KEC. PALANG
KEC. BRONDONG
KEC. SOLOKURO
KEC. LAREN
KEC. MADURAN
KEC. KARANGGENENG
KEC. KALITENGAH
KEC. KARANGBINANGUN
KEC. SEKARAN
KEC. TURI
KEC. GLAGAH
KEC. PUCUK
KEC. BABAT
KEC. DEKET
KEC. SUKODADI
KEC. LAMONGAN
KEC. SUGIO
KEC. KEDUNGPRING
KEC. SARIREJO
KEC. TIKUNG
KEC. MODO
KEC. BLULUK
KEC. NGIMBANG
KEC. SUKORAME
KEC. MANTUP
Waduk Jatigede
Waduk Sidorejo
Rawa Sekaran
Rawa Bentoh
Rawa Sidorejo
Rawa Gegor
Rawa Mlirip
Rawa Kwanon
Rawa Semanding
Rawa Sugo
Waduk Kalen
Waduk Bowo
Waduk Prijetan
Waduk Gemol
Waduk Kedung Cangkring
Waduk Lopaloh
Waduk Mojomati
Waduk Gayam
Waduk Tewiri
Waduk Canggah
Waduk Plalangduwur
Waduk Sembalun
Waduk Deliksugih
Waduk Sumengko
Waduk Mloker
Waduk Tekeridi
Waduk Kande
Kali Lamong



BAB-6 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

6.1. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten, yang pelaksanaannya meliputi rencana pemanfaatan ruang secara vertikal maupun rencana pemanfaatan ruang di dalam bumi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pembiayaannya. rahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten beserta pembiayaannya termasuk penjabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam RTRW yang disusun dan diselenggarakan secara bertahap sesuai jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang per lima tahunan

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW dilakukan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lain.

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah.

Dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak apabila yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

Dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan :

1. perumusan kebijakan strategis operasional RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis;
2. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
3. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasional RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan budidaya yang dikendalikan dan kawasan budidaya yang didorong pengembangannya, sedangkan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan :

1. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
2. standar kualitas lingkungan; dan
3. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

6.2. PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku RTRW.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

RTRW terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:

a. tahap I (Tahun 2020-2024), yang terbagi atas program tahunan;
b. tahap II (Tahun 2025-2029);
c. tahap III (Tahun 2030-2034); dan
d. tahap IV (Tahun 2035-2039).

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG

Perwujudan rencana struktur ruang meliputi :

a. sistem perkotaan; dan
b. sistem jaringan prasarana.

Perwujudan rencana sistem perkotaan meliputi :

1. mengembangkan Perkotaan Lamongan sebagai PKN yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, pusat fasilitas umum skala kabupaten sekaligus menjadi bagian dari Perkotaan Gerbangkertosusila;
2. mengembangkan Perkotaan Paciran – Brondong sebagai PKL yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri besar dan

strategis nasional, pusat transportasi, pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan perikanan;

3. mengembangkan Perkotaan Babat sebagai PKL yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pengembangan industri kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian, pusat perlindungan sumberdaya air di aliran sungai bengawan solo;
4. mengembangkan Perkotaan Sukodadi sebagai PKL yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, pusat pelayanan umum, pusat pengembangan kegiatan industri, pusat pengolahan hasil pertanian;
5. mengembangkan Perkotaan Ngimbang sebagai PKL yang berfungsi sebagai kegiatan pertanian, pusat pengembangan agropolitan, pengembangan kegiatan industri kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian.
6. mengembangkan perkotaan yang menjadi PPK di seluruh kecamatan;
7. mengembangkan PPL;

Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana meliputi :

1. perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara, meliputi:
   a. mengembangkan sistem jaringan jalan yang meliputi:
      1) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer;
      2) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer satu (JKP-1);
      3) Jalan nasional sebagai jalan tol;
      4) Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer dua (JKP-2);
      5) Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer tiga (JKP-3);
      6) Jalan kabupaten sebagai jalan lokal primer;
      7) Terminal penumpang;
      8) Terminal barang; dan
      9) Jembatan timbang.
   b. mengembangkan sistem jaringan kereta api;
   c. mengembangkan sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan;
   d. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut; dan
   e. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara.
2. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi
   a. mengembangkan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
   b. memantapkan dan mengembangkan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
   c. mengembangkan jaringan energi lainnya.

3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
    a. mengembangkan jaringan tetap; dan
    b. mengembangkan jaringan bergerak.
4. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
    a. melindungi sumber sumber air; dan
    b. memelihara sistem jaringan sumberdaya air.
5. merwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
    a. mengembangkan SPAM;
    b. mengembangkan pengelolaan air limbah;
    c. mengembangkan sistem pengolahan limbah yang mengandung B3;
    d. mengembangkan sistem persampahan;
    e. mengembangkan sistem drainase; dan
    f. membangun sistem jaringan evakuasi bencana.

6.4. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

Perwujudan rencana pola ruang meliputi :

a. kawasan peruntukan lindung; dan
b. kawasan peruntukan budidaya.

Perwujudan kawasan peruntukan lindung meliputi :

a. melindungi dan memantapkan kawasan hutan lindung;
b. melindungi dan memantapkan kawasan perlindungan setempat;
c. melindungi dan memantapkan kawasan lindung geologi;
d. melindungi, melestarikan dan melakukan pencarian cagar budaya; dan
e. melakukan pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi dan penetapan kawasan hutan mangrove

Perwujudan kawasan peruntukan budidaya meliputi :

a. memantapkan kawasan hutan produksi;
b. mengembangkan kawasan pertanian sekaligus menetapkan KP2B;
c. mengembangkan kawasan perikanan,
d. menetapkan dan memetakan kawasan pertambangan;
e. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
f. mengembangkan kawasan pariwisata;
g. mengembangkan kawasan permukiman;
h. memantapkan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
i. mengembangkan kawasan transportasi.

Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah harus menyediakan cadangan lahan guna mempermudah implementasi pengembangan wilayah.

6.4. PERWUJUDAN KAWASAN RAWAN BENCANA

Perwujudan kawasan rawan bencana dilakukan melalui pengelolaan dan pengendalian kawasan rawan bencana

6.5. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

Perwujudan kawasan strategis dilakukan melalui:

a. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial – budaya; dan
c. memantapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Tabel 6.1. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lamongan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
A	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN												
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan												
	Membentuk Pusat Kegiatan Perkotaan Secara Terintegrasi Dan Berhirarki												
a.	Pengembangan Perkotaan sebagai PKN	Perkotaan Lamongan	1 PKN									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
b.	Pengembangan Perkotaan sebagai PKL	1. Perkotaan Paciran-Brondong 2. Perkotaan Babat 3. Perkotaan Sukodadi dan 4. Perkotaan Ngimbang	4 PKL									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Bappeda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
c.	Pengembangan Perkotaan sebagai PPK	1. Perkotaan Sukorame 2. Perkotaan Bluluk 3. Perkotaan Sambeng 4. Perkotaan Mantup 5. Perkotaan Kembangbahu 6. Perkotaan Sugio 7. Perkotaan Kedungpring 8. Perkotaan Modo 9. Perkotaan Pucuk 10. Perkotaan Tikung 11. Perkotaan Sarirejo 12. Perkotaan Deket 13. Perkotaan Glagah 14. Perkotaan Karangbinangun 15. Perkotaan Turi 16. Perkotaan Kalitengah 17. Perkotaan Karanggeneng 18. Perkotaan Sekaran 19. Perkotaan Maduran	21 PPK									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Bappeda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		20. Perkotaan Laren dan 21. Perkotaan Solokuro											
d.	Pengembangan PPL	1. Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup; 2. Desa Deketagung Kecamatan Sugio; 3. Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng; 4. Desa Centini Kecamatan Laren; dan 5. Desa Weru Kecamatan Paciran.	5 PPL									APBD Kab	Bappeda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan												
a.	Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan PKN	Perkotaan Lamongan	1 perkotaan									APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
b.	Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan menjadi PKL	1. Perkotaan Paciran-Brondong 2. Perkotaan Babat 3. Perkotaan Sukodadi 4. Perkotaan Ngimbang	4 perkotaan									APBN, APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten DPRKPCK Prov Jatim Kementerian ATR
c.	Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan menjadi PPK	1. Perkotaan Sukorame 2. Perkotaan Bluluk 3. Perkotaan Sambeng 4. Perkotaan Mantup 5. Perkotaan Kembangbahu 6. Perkotaan Sugio 7. Perkotaan Kedungpring 8. Perkotaan Modo	21 perkotaan									APBN, APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten DPRKPCK Prov Jatim Kementerian ATR

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		9. Perkotaan Pucuk 10. Perkotaan Tikung 11. Perkotaan Sarirejo 12. Perkotaan Deket 13. Perkotaan Glagah 14. Perkotaan Karangbinangun 15. Perkotaan Turi 16. Perkotaan Kalitengah 17. Perkotaan Karanggeneng 18. Perkotaan Sekaran 19. Perkotaan Maduran 20. Perkotaan Laren dan 21. Perkotaan Solokuro											
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
	Sistem Jaringan Transportasi												
	Sistem Jaringan Transportasi Darat												
a.	Rencana Pemantapan Jalan Nasional sebagai jalan arteri primer	1. Batas Kabupaten. Tuban – Widang; 2. Widang/Bedahan – Batas Kabupaten Lamongan; 3. Jln. Jagung Suprapto; 4. Batas Kota Lamongan – Batas Kabupaten. Gresik; dan 5. Jln. P.B. Sudirman (Lamongan)	36,57 km									APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b.	Rencana Pemantapan jalan nasional sebagai jalan kolektor primer JKP – 1	1. Lohgung (km.93.175 – Sadang) – Batas Kabupaten. Lamongan dan 2. Widang/Bedahan – Babat	34,53 km									APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
c.	Rencana pengembangan jalan nasional sebagai jalan tol	1. Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro- Tuban – Lamongan – Gresik (Manyar – Bunder)	25,21 km									KPBU	Badan Pengatur Jalan Toll (BPJT) Kementerianterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Utara Lamongan	Menghubungkan Deket-Lamongan-Turi	6,74 km									KPBU	DPU Bina Marga DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur BPN Bappeda Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
e.	Rencana Pemantapan Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor Primer Dua (JKP2)	1. Babat – batas Kabupaten Jombang; 2. Jalan Lamongrejo; 3. Jalan Achmad Dahlan; 4. Jalan Sunan Drajad; 5. Jalan Raya Mantup; 6. Lamongan – batas Kabupaten Mojokerto.	56,35 km									APBD Provinsi Jawa Timur	DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
f.	Rencana Peningkatan Fungsi Menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	1. Sukodadi – Karanggeneng; 2. Karanggeneng - Peti'in; 3. Peti'in – Banjarwati; 4. Mantup – Balongpanggang (Gresik)	28,26 5,72									APBD Provinsi Jawa Timur APBD kab	DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur DPU Bina Marga Kabupaten
g.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Lamongan	Menghubungkan Jalan Pahlawan – Jalan Sumargo	6,60 km									KPBU	DPU Bina Marga Kab DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur BPN Kab Bappeda Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Dinas Perhubungan Kab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
h.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Babat	Menghubungkan Kecamatan Babat – Kabupaten Bojonegoro	5,46 km									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	DPU Bina Marga Kab DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
i.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Pantura	Menghubungkan Kecamatan Paciran – Kecamatan Solokuro – Kecamatan Brondong	20,04 km									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	DPU Bina Marga DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur BPN Bappeda Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
j.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Timur Lamongan	Menghubungkan Desa Bakalanpule-Desa Tambakrigadung	5,61 km									KPBU BUMN	DPU Bina Marga Kab DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
k.	Rencana Pengembangan Frontage Road	Menghubungkan Deket-Lamongan-Sukodadi-Pucuk-Babat	28,71 km									APBN APBD Kab BUMN	DPU Bina Marga Kab DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
l.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Babat – Sekaran – Maduran –	37,93 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		Karanggeneng – Kalitengah – Karangbinangun											Dinas Perhubungan Kab
m.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Pucuk – Sekaran – Maduran – Laren – Solokuro – Brondong – Paciran	26,51 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
n.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Deket-Karangbinangun - Dukun (Gresik)	15,26									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
o.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Solokuro – Laren – Dukun (Gresik)	9,87 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
p.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Glagah – Manyar (Gresik)	9,59 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
q.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung – Sarirejo – Kabupaten Gresik	12,70 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
r.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Solokuro – Paciran;	10,78 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
s.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung – Sarirejo – Benjeng (Gresik)	12,57 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
t	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghungkan Lamongan – Sukodadi	5,36 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Dinas Perhubungan Kab
u	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Lamongan – Sukodadi – Sugio – Kedungpring;	24,24 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
v	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung -Kembangbahu – Mantup	4,53 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
w	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung – Kembangbahu – Sugio	14,36 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
x	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung – Mantup – Sugio – Kedungpring;	24,37 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
y	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Modo – Kedungpring – Modo – Bluluk – Sukorame	20,41 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
z	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Sukorame – Jombang	7,07 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
aa	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Bluluk – Sukorame - Bojonegoro	13,80 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
bb	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Ngimbang – Bluluk	9,76 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
cc	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	18,01 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
dd.	Rencana Pemantapan Dan Pengembangan Jalan Desa	Seluruh desa di Kabupaten Lamongan	3.227,03 km									APBD Kab	DPU Bina Marga Kab BPN Kab Bappeda Kab Dinas Perhubungan Kab
ee.	Rencana Pemantapan Terminal Tipe B	Kecamatan Lamongan	1 terminal									APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
ff.	Rencana Pengembangan Terminal Tipe C	1. Kecamatan Babat; 2. Kecamatan Sukodadi; 3. Kecamatan Paciran; 4. Kecamatan Brondong; 5. Kecamatan Ngimbang; 6. Kecamatan Sugio; 7. Kecamatan Mantup; dan 8. Kecamatan Sukorame.	8 terminal									APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab BPN Kab Bappeda Kab
gg.	Rencana Pemantapan Fungsi area parkir angkutan barang	Kecamatan Lamongan	1 terminal									APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
hh.	Rencana Pengembangan Jembatan Timbang	Kecamatan Deket	1 jembatan timbang									APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
ii	Rencana Pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api Jalur Ganda	jaringan jalur utara Surabaya (Pasar Turi)–Lamongan–Babat–Bojonegoro–Cepu	35,57 km									APBN BUMN APBD Kab	PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
jj	Rencana Pengembangan	Jakarta - Surabaya	35,57 km									APBN BUMN	PT KAI

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Jalur Kereta Api Cepat Jakarta - Surabaya												Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
kk	Rencana Pemantapan Jalur Perkerataapian Komuter	Surabaya - Lamongan - Babat	35,57 km									APBN BUMN KPBU	PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
ll	Rencana Aktivasi Jaringan Jalur Perkeretaapian	Babat – Jombang Babat Tuban	44,43 km									APBN BUMN	PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
mm	Rencana jaringan jalur Kereta Api (KA) Regional Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan)	Kab Lamongan	35,57 km									APBN BUMN	PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
nn	Rencana Pengembangan Stasiun Operasi	Stasiun Lamongan Stasiun Babat	2 stasiun									APBN BUMN	PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
oo	Rencana Pengembangan Stasiun Penumpang	1. Stasiun Gembong di Kecamatan Babat 2. Stasiun Sumlaran di Kecamatan Sukodadi 3. Stasiun Pucuk di Kecamatan Pucuk dan 4. Stasiun Surabayan di Kecamatan Sukodadi.	4 stasiun									APBN BUMN	PT KAI Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
pp	Rencana Pengembangan	Kecamatan Paciran	1 pelabuhan									APBN BUMN	Kementerian Perhubungan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I												Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dinas Perhubungan Kab Swasta
	Sistem Jaringan Transportasi Laut												
	Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Tanjung Pakis (LIS)	Kecamatan Paciran	1 pelabuhan									APBN BUMN	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dinas Perhubungan Kab Swasta
	Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Brondong	Kecamatan Brondong	1 pelabuhan									APBN BUMN	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dinas Perhubungan Kab Swasta
	Rencana Pengembangan Terminal Khusus	Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong	2 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dinas Perhubungan Kab Swasta
	Sistem jaringan Transportasi Udara												
	Rencana Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Kecamatan Sugio	1 Bandar Udara									APBN KPBU	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dinas Perhubungan Swasta
	Sistem Jaringan Energi												
	Rencana Pengembangan Sistem Interconected Jawa – Bali	Pulau Jawa-Bali										BUMN	PT. PLN
	Rencana Pengembangan Jaringan	Lamongan – Babat Paciran – Brondong Lamongan – Mantup	127,21 km									APBN, APBD Provinsi Jawa Timur	Kementerian ESDM Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi (Kilang Ke Konsumen)	Babat - Ngimbang										APBD Kab Swata	Bappeda Bagian Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rencana Pemantapan dan Pengembangan SUTET dari GITET Ngimbang	Ngimbang – Babat – Tanjung Awar Awar; Gresik – Ngimbang.	50,47 km									BUMN	PT. PLN
	Rencana Pemantapan dan Pengembangan SUTT	1. Lamongan – Babat; 2. Lamongan – Paciran; dan 3. Lamongan – Mantup.	82,48 km									BUMN	PT. PLN
	Rencana Pemantapan dan Pengembangan SUTM	Seluruh kecamatan	532,86 km									BUMN	PT. PLN
	Rencana Pemantapan dan Pengembangan GITET PLN	Kecamatan Ngimbang	1 GITET									BUMN	PT. PLN
	Rencana Pemantapan Gardu Induk PLN	Kecamatan Paciran dan Lamongan	2 GI									BUMN	PT. PLN
	Rencana Pengembangan energi lainnya (energi biogas dan biomassa)	Seluruh kecamatan	27 kec									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Swata	Kementerian ESDM Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Bappeda Bagian Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sistem Jaringan Telekomunikasi												
	Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak Terestrial	Kabupaten Lamongan	122,28 km									BUMN APBD Swasta	PT. Telkom Dinas Kominfo Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Kabupaten Lamongan	209,22 km									BUMN APBD Swasta	PT. Telkom Dinas Kominfo Swasta
	Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit Rencana Pengembangan Menara Telokumunikasi (BTS)	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									BUMN APBD Swasta	PT. Telkom Dinas Kominfo Swasta
	Sistem Jaringan Sumberdaya Air												
	Rencana Pemantapan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Provinsi Jawa Timur	Sungai Bengawan Solo	1 sungai									APBN	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air
	Rencana Pemantapan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten	1. Kali Lamong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik; 2. Kali Corong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik; 3. Kali Wangen di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik; 4. Kali Serning di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro; 5. Kali Semarmendem di Kabupaten Lamongan –	6 Kali										APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		Kabupaten Bojonegoro; 6. Kali Lohgung di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Tuban.											
	Pemeliharaan DAS	1. DAS Bengawan Solo, 2. DAS Suwuk, 3. DAS Karangklumpuk, 4. DAS Gayaran, 5. DAS Asinan, 6. DAS Lohgung, 7. DAS Tunggul, 8. DAS Lamong, 9. DAS Sidokelar, 10. DAS Labuhan	10 DAS									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero	Kabupaten Lamongan	13,19 km									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Normalisasi Sungai/Kali	Kabupaten Lamongan	911 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Normalisasi dan pengembangan waduk dan rawa	Kabupaten Lamongan	3.964 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Pelestarian dan Pengendalian Cekungan Air Tanah	1. Cekungan Air Tanah (CAT) Surabaya – Lamongan	3 CAT									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		(Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Surabaya); 2. Cekungan Air Tanah (CAT) Tuban (Kab. Tuban, Kab. Lamongan); dan 3. Cekungan Air Tanah (CAT) Panceng (Kab.Lamongan, Kab.Gresik)											Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Pelestarian dan Pengendalian Imbuhan Air Tanah	1. Kecamatan Kembangbahu 2. Kecamatan Sugio 3. Kecamatan Kedungpring 4. Kecamatan Modo 5. Kecamatan Babat 6. Kecamatan Pucuk 7. Kecamatan Sukodadi 8. Kecamatan Lamongan 9. Kecamatan Tikung 10. Kecamatan Sarirejo 11. Kecamatan Deket 12. Kecamatan Glagah 13. Kecamatan Karangbinangun 14. Kecamatan Kalitengah 15. Kecamatan Karanggeneng 16. Kecamatan Sekaran 17. Kecamatan Maduran	21 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		18. Kecamatan Laren 19. Kecamatan Solokuro 20. Kecamatan Paciran dan 21. Kecamatan Brondong											
	Rencana Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pusat,	DI Kewenangan Pusat: 1. DI Bengawan Jero; 2. DI Waduk Prijetan; dan 3. DI Waduk Gondang.	23.331 ha									APBN	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Rencana Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi Jawa Timur	DI dalam wilayah Kabupaten terdiri dari 1. DI Waduk Rande; 2. DI PA Kaligerman; 3. DI PA Butungan; 4. DI Rawa Cungkup; 5. DI Rawa Semando; dan 6. DI Rawa Sekaran. 7. DI lintas Kabupaten terdiri dari : 8. DI Kali Corong; 9. DI Rawa Jabung; dan 10. DI Waduk Sumengko.	12.001 ha									APBD Provinsi	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Rencana Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	1. DI Bengawan Solo; 2. DI PA Karanggeneng; 3. DI Rawa Bogo; 4. DI Rawa Bulu; 5. DI Rawa Geger; 6. DI Rawa Kwanon; 7. DI Rawa Manyar; 8. DI Rawa Sibanget; 9. DI Rawa Sogo; 10. DI Sluis Keyongan;	30 DI									APBD Kab	Dinas PU Sumber Daya Air Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		11. DI Waduk Bowo; 12. DI Waduk Caling; 13. DI Waduk Dermo; 14. DI Waduk Dukuh; 15. DI Waduk Jajong; 16. DI Waduk Kuripan; 17. DI Waduk Lego; 18. DI Waduk Makamsantri; 19. DI Waduk Maduran; 20. DI Waduk Pading; 21. DI Waduk Palangan; 22. DI Waduk Paprit; 23. DI Waduk Sepanji; 24. DI Waduk Sumurgung; 25. DI Waduk Takeran; 26. DI Waduk Canggah; 27. DI Waduk Delikguno; 28. DI Waduk Kedungdowo; 29. DI Waduk Lembeyan; dan 30. DI Waduk Tuwiri.											
	Rencana Pengembangan Pengendali Banjir	1. Babat Barrage; 2. Kuro Barrage 3. Pintu Darurat Banjir Floodway Pelangwot – Sedayu ; 4. Perkuatan Tanggul Dan Jabung Retarding Basin; dan 5. Revitalisasi Sungai Lintas Provinsi, Lintas Kabupaten dan Sungai di	5 lokasi										APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		Dalam Wilayah Kabupaten											
	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya												
	Sistem Penyediaan Air Minum												
	Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan yang dikelola PDAM	1. Kecamatan Lamongan; 2. Kecamatan Kembangbahu; 3. Kecamatan Deket; 4. Kecamatan Sukodadi; 5. Kecamatan Brondong; 6. Kecamatan Paciran; 7. Kecamatan Sekaran; 8. Kecamatan Babat; 9. Kecamatan Kedungpring; 10. Kecamatan Ngimbang; 11. Kecamatan Pucuk; 12. Kecamatan Turi; 13. Kecamatan Sarirejo; 14. Kecamatan Tikung; 15. Kecamatan Sambeng; 16. Kecamatan Mantup 17. Kecamatan Sugio.	~~17~~ kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	PDAM Kab
	Rencana Pengembangan,	1. Kecamatan Babat;	13 kecamatan									APBN	Perum Jasa Tirta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan yang dikelola Perum Jasa Tirta	2. Kecamatan Sekaran; 3. Kecamatan Brondong; 4. Kecamatan Paciran; 5. Kecamatan Solokuro; 6. Kecamatan Laren; 7. Kecamatan Maduran; 8. Kecamatan Karanggeneng; 9. Kecamatan Kalitengah; 10. Kecamatan Karangbinangun; 11. Kecamatan Glagah; 12. Kecamatan Deket; 13. Kecamatan Turi.										APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	
	Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan yang Dikelola Hippam	Seluruh Kecamatan	27 kecamatan									APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab PDAM Kab
	Rencana Pengembangan SPAM Regional	1. SPAM Klaster Kecil (Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik) 2. SPAM Klaster Besar (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik,)	2 SPAM									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	PDAM Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Rencana Pengembangan Bukan jaringan perpipaan	Seluruh Kecamatan	27 kecamatan									APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab PDAM Kab
	Sistem Pengelolaan Air Limbah												
	Rencana Pengembangan Intalasi Pengolahan Air Limbah	1. kawasan perikanan; 2. kawasan peternakan; 3. kawasan peruntukan industri; 4. kawasan pariwisata; 5. kawasan transportasi; dan 6. kawasan lainnya yang menghasilkan limbah.	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab Swasta
	Rencana pengembangan sistem sanitasi setempat	Seluruh Kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab
	Rencana pengembangan sanitasi Komunal	Kawasan Padat Penduduk	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab
	Rencana Pengembangan IPLT	Kecamatan Lamongan	1 lokasi									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
	Rencana Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab Dinas Kesehatan Kab Dinas Perhubungan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Swasta
	Rencana Tempat Pengelolaan dan Penimbusan Akhir Limbah B3	Kecamatan Brondong	1 lokasi									Swasta	Swasta
	Sistem Jaringan Persampahan												
	Rencana Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sampah Sementara	Seluruh Kecamatan	27 kecamatan									APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab
	Rencana Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah 3R	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab
	Rencana pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	Seluruh Kecamatan	27 kecamatan									APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab
	Rencana Pemantapan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	1. Wilayah Utara Kabupaten Lamongan; 2. Wilayah Tengah Kabupaten Lamongan; dan 3. Wilayah selatan Kabupaten Lamongan.	3 lokasi									APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab
	Sistem Jaringan evakuasi Bencana												
	Rencana Pengembangan jalur evakuasi bencana	1. Jalan Arteri Primer; 2. Jalan Kolektor Primer Satu 3. Jalan Kolektor Primer Dua; 4. Jalan Kolektor Primer Tiga; dan	107,64 km									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Kab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		5. Jalan Lokal Primer.											
	Rencana Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana	1. Kantor Desa 2. Kantor Kecamatan; 3. Alun Alun; 4. Stadion/Lapangan olah raga	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Kab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab
	Sistem Jaringan Drainase												
	Rencana Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan primer	1. Kali Merukung; 2. Kali Cawak; 3. Kali Dadapan; 4. Kali Kaputren; 5. Kali Malang; 6. Kali Polaman; 7. Sungai Bengawan Solo; 8. Kali Garung; 9. Saluran Irigasi Jabung; 10. Kali Lamong; 11. Floodway; 12. Kali Cendoro; 13. Kali Semarmendem; 14. Kali Corong; 15. Kali Wangen; 16. Kali Blawi; 17. Kali Bajul; 18. Kali Keyongan; 19. Kali Patih; 20. Kali Lanang; 21. Kali Wotan; 22. Kali Pulekidul; 23. Kali Ampel; 24. Kali Puter; 25. Kali Dukun; 26. Kali Jero; 27. Kali Corong; 28. Kali Dunguni; 29. Kali Peresan; 30. Kali Jabung; 31. Kali Keber;	82Kali/Saluran									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		32. Kali Tunggul; 33. Kali Asemcino; 34. Kali Gladakkapal; 35. Kali Sendang; 36. Kali Wungu; 37. Kali Wangun; 38. Kali Lohgung; 39. Kali Gondang; 40. Kali Sumput; 41. Kali Kebet; 42. Kali Palangan; 43. Kali Balun; 44. Kali Ngujung; 45. Kali Lom; 46. Kali Suwuk; 47. Kali Ganjaran; 48. Kali Gundeng; 49. Kali Etan; 50. Kali Tanjung; 51. Kali Gondang; 52. Kali Gayaran; 53. Kali Gesing; 54. Kali Kesongo; 55. Kali Besur; 56. Kali Tlebung; 57. Kali Kare; 58. Kali Pateguhan 59. Kali Garung 60. Kali Pelang 61. Kali Mengkuli 62. Kali Pengaron 63. Kali Dapur 64. Kali Cawak 65. Kali Balong 66. Kali Rapah 67. Kali Sambong 68. Kali Mantup 69. Kali Bogo 70. Kali Maor 71. Kali Cendri 72. Kali Randubener 73. Kali Wolu 74. Kali Wiyu										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		75. Kali Bucu 76. Kali Gauman 77. Kali Asinan 78. Kali Gempol 79. Kali Ngrayong 80. Kali Blungkan 81. Kali Gesing; dan 82. Kali Pengaron.											
	Rencana Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan sekunder	Seluruh kecamatan	451,76 km									APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumber Daya Air Kab
B	PERWUJUDAN POLA RUANG												
1.	Perwujudan Kawasan Lindung												
	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya												
	Pemantapan dan Perlindungan Hutan Lindung	1. Kecamatan Sugio, 2. Kecamatan Ngimbang 3. Kecamatan Bluluk	255,28 ha									APBN	Perhutani, KPH
	Kawasan Perlindungan setempat												
	Perlindungan sempadan pantai	1. Kecamatan Paciran 2. Kecamatan Brondong	43 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perikanan Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Perlindungan sempadan sungai	Sepanjang aliran sungai	570 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perikanan Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab Dinas PU Sumber Daya Air Kab Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur
	Perlindungan Waduk	Kabupaten Lamongan	83 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perikanan Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab Dinas PU Sumber Daya Air Kab Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Kawasan Lindung Geologi												
	Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi	Kecamatan Paciran	6 ha									Swasta	Swasta
	Perlindungan Kawasan Imbuhan Air Tanah	a. Kecamatan Kembangbahu b. Kecamatan Sugio c. Kecamatan Kedungpring d. Kecamatan Modo e. Kecamatan Babat f. Kecamatan Pucuk g. Kecamatan Sukodadi h. Kecamatan Lamongan i. Kecamatan Tikung j. Kecamatan Sarirejo k. Kecamata Deket l. Kecamatan Glagah m. Kecamatan Karangbinangun n. Kecamatan Kalitengah o. Kecamatan Karanggeneng p. Kecamatan Sekaran q. Kecamatan Maduran r. Kecamatan Laren s. Kecamatan Selokuro t. Kecamatan Paciran	21 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kab Dinas PU Sumber Daya Air Kab Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas ESDM Provinsi

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		u. Kecamatan Brondong											
	Kawasan Cagar Budaya												
	melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;	1. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran; 2. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran; 3. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran; 4. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan: 5. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran; 6. Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang; 7. Desa Balun di Kecamatan Turi; 8. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan; 9. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong; 10. Situs Candi Pataan di kecamatan Sambeng; dan 11. Kawasan cagar budaya lainnya	11 lokasi								APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab BUMN Swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	melakukan pencarian cagar budaya	Seluruh Kecamatan	27 Kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab BUMN Swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab
	Kawasan ekosistem mangrove												
	Pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi dan penetapan kawasan hutan mangrove	1. Kecamatan Paciran 2. Kecamatan Brondong	84 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perikanan Kab Dinas Lingkungan Hidup Kab Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	Pengusahaan Hutan produksi	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Sugio 8. Kecamatan Kedungpring 9. Kecamatan Modo 10. Kecamatan Laren 11. Kecamatan Solokuro 12. Kecamatan Paciran 13. Kecamatan Brondong	31.437,57 ha									APBN	Kementerian Kehutanan Perhutani
	Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang	13 kec									APBN	Kementerian Kehutanan Perhutani

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Sugio 8. Kecamatan Kedungpring 9. Kecamatan Modo 10. Kecamatan Laren 11. Kecamatan Solokuro 12. Kecamatan Paciran 13. Kecamatan Brondong											
	Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan dan gangguan keamanan hutan lainnya	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Sugio 8. Kecamatan Kedungpring 9. Kecamatan Modo 10. Kecamatan Laren 11. Kecamatan Solokuro 12. Kecamatan Paciran 13. Kecamatan Brondong	13 kec									APBN	Kementerian Kehutanan Perhutani
	Pemberdayaan masyarakat desa hutan	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk	13 kec									APBN	Kementerian Kehutanan Perhutani

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Sugio 8. Kecamatan Kedungpring 9. Kecamatan Modo 10. Kecamatan Laren 11. Kecamatan Solokuro 12. Kecamatan Paciran 13. Kecamatan Brondong											
	Kawasan Pertanian												
	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kabupaten Lamongan	53.384 ha									APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Penetapan dan Pengendalian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1. Kecamatan Kembangbahu 2. Kecamatan Sugio 3. Kecamatan Kedungpring 4. Kecamatan Modo 5. Kecamatan Babat 6. Kecamatan Pucuk 7. Kecamatan Sukodadi 8. Kecamatan Lamongan 9. Kecamatan Tikung 10. Kecamatan Sarirejo 11. Kecamatan Deket	45.841 ha									APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		12. Kecamatan Glagah 13. Kecamatan Karangbinangun 14. Kecamatan Turi 15. Kecamatan Kalitengah 16. Kecamatan Karanggeneng 17. Kecamatan Sekaran 18. Kecamatan Maduran 19. Kecamatan Laren 20. Kecamatan Solokuro											
	Penetapan dan Pengendalian Kawasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Kedungpring 8. Kecamatan Modo 9. Kecamatan Lamongan 10. Kecamatan Tikung 11. Kecamatan Sarirejo 12. Kecamatan Deket 13. Kecamatan Glagah 14. Kecamatan Turi 15. Kecamatan Laren 16. Kecamatan Solokuro 17. Kecamatan Paciran	7.543 ha									APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		18. Kecamatan Brondong											
	Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing sub sektor tanaman pangan	Kabupaten Lamongan	53.384 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing sub sektor tanaman perkebunan	Kabupaten Lamongan	29.618 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing sub sektor tanaman hortikultura	Kabupaten Lamongan	10.509 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Penyediaan infrasrtruktur pertanian	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Perwilayahan Komoditi	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Pengembangan Produksi ternak unggulan untuk ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Swasta	Dinas Peternakan Kab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan produk hasil olahan peternakan	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD	Dinas Peternakan Kab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
												Swasta	
	Peningkatan Kualitas Rumah Potong Hewan	Tersebar pada 27 Kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Peternakan Kab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
	Kawasan perikanan												
	Pengembangan kawasan Perikanan tangkap	1. Kecamatan Paciran dan 2. Kecamatan Brondong	43 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan Perikanan budidaya air payau dan/atau tambak	1. Kecamatan Pucuk; 2. Kecamatan Deket; 3. Kecamatan Glagah; 4. Kecamatan Karangbinangun; 5. Kecamatan Turi; 6. Kecamatan Lamongan; 7. Kecamatan Kalitengah; 8. Kecamatan Karanggeneng; 9. Kecamatan Paciran; dan 10. Kecamatan Brondong.	6.407 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan Perikanan budidaya air tawar	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Peningkatan pengolahan dan	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Perikanan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	pemasaran hasil perikanan											APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan Kawasan Minapolitan Tangkap	1. Kecamatan Brondong 2. Kecamatan Paciran	2 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan Minapolitan Budidaya	1. Kecamatan Pucuk; 2. Kecamatan Deket; 3. Kecamatan Glagah; 4. Kecamatan Karangbinangun; 5. Kecamatan Turi; 6. Kecamatan Lamongan; 7. Kecamatan Kalitengah; 8. Kecamatan Karanggeneng; 9. Kecamatan Paciran; 10. Kecamatan Brondong.	10 Kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	Kecamatan Brondong	1 lokasi									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan TPI	Kecamatan Brondong, Kecamatan Paciran, dan	2 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Kawasan Pertambangan												
	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian kawasan pertambangan Mineral	a. Kecamatan Brondong; b. Kecamatan Solokuro; c. Kecamatan Babat;	11 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Bappeda Kab Bagian Perekonomian Kab Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		d. Kecamatan Ngimbang; e. Kecamatan Sugio; f. Kecamatan Mantup; g. Kecamatan Modo; h. Kecamatan Bluluk; i. Kecamatan Sukorame; j. Kecamatan Kembangbahu; dan k. Kecamatan Sambeng.											
	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Bappeda Kab Bagian Perekonomian Kab Swasta
	Kawasan Peruntukan Industri												
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	a. Kecamatan Paciran; b. Kecamatan Brondong; c. Kecamatan Solokuro; d. Koridor jalan arteri primer, meliputi: - Kecamatan Deket - Kecamatan Lamongan - Kecamatan Sukodadi - Kecamatan Pucuk - Kecamatan Babat e. Koridor jalan kolektor primer, meliputi:	7.419 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		- Kecamatan Tikung - Kecamatan Kembangbahu - Kecamatan Ngimbang - Kecamatan Sambeng - Kecamatan Kedungpring - Kecamatan Mantup - Kecamatan Modo											
	Pengembangan kawasan sentra industri	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Swasta
	Kawasan Pariwisata												
	Pengembangan kawasan pariwisata : Pengembangan obyek wisata, event-event wista, akomodasi wisata dan kemasan wisata Perlindungan terhadap wisata budaya, heritage dan religi Pelestarian lingkungan alam pantai dan mengembangkan pertanian sebagai penarik wisata. Peningkatan dan Pengembangan kualitas	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Bappeda Kab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	lingkungan objek wisata Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata pada kawasan pariwisata Peningkatan peran masyarakat/pengembang												
	Kawasan Permukiman												
	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Lamongan	13.898 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Swasta
	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Lamongan	16.365 ha									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Swasta
	Penyediaan Perumahan berimbang yang terjangkau semua lapisan masyarakat	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Swasta
	Perbaikan lingkungan bagi kawasan kumuh baik di perkotaan maupun pedesaan	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Swasta
	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Swasta
	Relokasi kawasan permukiman di Bantaran Sungai	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
												Swasta	
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan												
	Pemantapan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1. Komando Distrik Militer 0812 Lamongan di Kecamatan Lamongan; 2. Compi A Yon Zipur 5 di Kecamatan Babat; dan 3. Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan. 4. Polres dan Polsek di seluruh kecamatan	27 kecamatan										APBN	Kepolisian TNI
C	KAWASAN RAWAN BENCANA												
	Pengelolaan dan Pengendalian kawasan rawan bencana banjir	1. Kecamatan Sukorame; 2. Kecamatan Sugio; 3. Kecamatan Babat; 4. Kecamatan Pucuk; 5. Kecamatan Sukodadi; 6. Kecamatan Lamongan; 7. Kecamatan Tikung; 8. Kecamatan Sarirejo; 9. Kecamatan Deket; 10. Kecamatan Glagah; 11. Kecamatan Karangbinangun; 12. Kecamatan Turi; 13. Kecamatan Kalitengah;	26 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		14. Kecamatan Karanggeneng; 15. Kecamatan Sekaran; 16. Kecamatan Maduran; 17. Kecamatan Laren; 18. Kecamatan Solokuro; 19. Kecamatan Ngimbang; 20. Kecamatan Kedungpring; 21. Kecamatan Kembangbahu; 22. Kecamatan Modo; 23. Kecamatan Mantup; 24. Kecamatan Sambeng; 25. Kecamatan Paciran; dan 26. Kecamatan Brondong											
	Pengelolaan dan pengendalian kawasan rawan bencana gelombang pasang	Kecamatan Paciran dan Brondong	2 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Kab
	Pengelolaan dan Pengendalian kawasan rawan bencana kebakaran hutan	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu	13 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		7. Kecamatan Kedungpring 8. Kecamatan Modo 9. Kecamatan Laren 10. Kecamatan Solokuro 11. Kecamatan Paciran 12. Kecamatan Brondong											
	Pengelolaan dan Pengendalian kawasan rawan bencana kekeringan	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Kab
	Rencana pengelolaan dan pengendalian kawasan rawan bencana tanah longsor	1. Kecamatan Babat; 2. Kecamatan Sekaran; 3. Kecamatan Laren; 4. Kecamatan Maduran; 5. Kecamatan Karanggeneng 6. Kecamatan Kalitengah; 7. Kecamatan Karangbinangun; dan 8. Kecamatan Glagah	8 kecamatan										APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Kab
	Rencana pengelolaan dan pengendalian kawasan rawan gempa	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Kab
E.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)												
	Penetapan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi												
	Pengembangan kawasan peruntukan industri dan maritim	Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong	2 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab
	Pengembangan Kawasan Agropolitan	1. Kecamatan Mantup 2. Kecamatan Kembangbahu 3. Kecamatan Sukorame 4. Kecamatan Bluluk 5. Kecamatan Sambeng 6. Kecamatan Modo 7. Kecamatan Sugio 8. Kecamatan Kedungpring	8 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab Swasta
	Pengembangan Kawasan Minapolitan Tangkap	Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong	2 kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Dinas Perikanan Kab
	Pengembangan Minapolitan Budidaya	1. Kecamatan Pucuk; 2. Kecamatan Deket; 3. Kecamatan Glagah; 4. Kecamatan Karangbinangun; 5. Kecamatan Turi; 6. Kecamatan Lamongan; 7. Kecamatan Kalitengah; 8. Kecamatan Karanggeneng; 9. Kecamatan Paciran; 10. Kecamatan Brondong.	10 Kecamatan									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab Swasta	Dinas Perikanan Kab
	Penetapan Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan sosial - budaya												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Pemeliharaan Makam Sunan Drajat dan kawasan cagar budaya lainnya	Kabupaten Lamongan	1 lokasi									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bappeda Kab
	Pemantapan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategi Sumber Daya Air dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup												
	Pemeliharaan Sungai Lintai Provinsi	DAS bengawan Solo	1 lokasi									APBN APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur Dinas PU Sumberdaya Air Kab

Sumber : Hasil rencana



BAB-7 KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

7.1. KETENTUAN PENGENDALIAN

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
b. Ketentuan perizinan;
c. Ketentuan insentif dan disintensif; dan
d. Arahan sanksi.

7.2. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Ketentuan umum peraturan zonasi RTRW Kabupaten Lamongan meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis

Ketentuan umum peraturan zonasi tersebut dijabarkan dan dimuat pada Rencana Rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang.

7.2.1. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI STUKTUR RUANG

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang, meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

7.2.1.1. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI SISTEM PERKOTAAN

Ketentuan umum sistem perkotaan, meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Nasional;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal; dan
c. Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Nasional, meliputi:

a. diizinkan pengembangan permukiman, peruntukan industri, pertahanan dan keamanan serta pariwisata;
b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga tinggi;
c. diizinkan terbatas kegiatan kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
d. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
e. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pusat kegiatan nasional dan kegiatan yang kegiatan yang merusak lingkungan

Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal, meliputi :

a. diizinkan pengembangan permukiman, peruntukan industri, pertahanan dan keamanan serta pariwisata;
b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga tinggi;
c. diizinkan terbatas kegiatan kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
d. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
e. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pusat kegiatan lokal dan kegiatan yang kegiatan yang merusak lingkungan.

Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:

a. diizinkan pengembangan permukiman, peruntukan industri, pertahanan dan keamanan serta pariwisata;
b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang;
c. diizinkan terbatas kegiatan kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
d. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
e. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pusat kegiatan lokal dan kegiatan yang kegiatan yang merusak lingkungan

Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:

a. diizinkan pengembangan permukiman, pertahanan dan keamanan serta pariwisata;
b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang;

c. pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan

d. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan lingkungan dan kegiatan yang merusak lingkungan.

7.2.1.2. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI SISTEM SISTEM JARINGAN PRASARANA

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

A. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi,

Jetentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi di Kabupaten Lamongan, meliputi:

A.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Transportasi Darat,

A.1.1 Ketentuan Umum Sistem Jaringan Jalan,

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Jalan, Meliputi:

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan arteri primer, meliputi:

   a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan skala kabupaten dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan berskala kecamatan, desa dan lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

   e. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan kolektor primer, meliputi:

a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan, kabupaten dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor primer untuk kegiatan berskala kecamatan, desa dan lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

e. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan bebas hambatan, meliputi:

a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. diizinkan terbatas pengembangan fasilitas dan pelayanan penunjang operasional jalan bebas hambatan, namun dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan bebas hambatan;

c. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

d. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan lokal primer, meliputi:

a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan lokal primer untuk kegiatan skala kecamatan dan desa dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor sekunder untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik

jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

e. dilarang untuk kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang, meliputi:

a. diizinkan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;

b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan

c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang, meliputi:

a. diizinkan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan fasilitas parkir angkutan barang;

b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang; dan

c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang.

A.1.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Kereta Api

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api, meliputi:

a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan

c. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api, meliputi:

a. diizinkan kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;

b. diizinkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan

c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api.

A.1.3. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:

a. diizinkan untuk fasilitas pokok pelabuhan meliputi kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal, dermaga, tempat labuh, tempat alih muat kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, zona percobaan berlayar, tempat pemeliharaan kapal, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3) dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP);

b. diizinkan terbatas fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, tempat tunggu kendaraan bermotor, fasilitas parkir, taman, kawasan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya;

c. diizinkan bersyarat fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, sampah, perhotelan, kawasan peruntukan industri dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;

d. diizinkan bersyarat kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. dilarang kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

A.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Transportasi Laut

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut, meliputi:

a. diizinkan untuk fasilitas pokok pelabuhan meliputi kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal, dermaga, tempat labuh, tempat alih muat kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan

darurat, penempatan kapal mati, zona percobaan berlayar, tempat pemeliharaan kapal, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3) dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP);

b. diizinkan terbatas fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, tempat tunggu kendaraan bermotor, fasilitas parkir, taman, kawasan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya;

c. diizinkan bersyarat fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, sampah, perhotelan, areal pengembangan pelabuhan, kawasan peruntukan industri dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;

d. diizinkan bersyarat kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. dilarang kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;

f. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut; dan

g. dilarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.

A.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Transportasi Udara

Ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara, meliputi:

a. diizinkan kegiatan pembangunan fasilitas bandar udara, penghijauan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, penunjang bandar udara umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;

b. diizinkan bersyarat kegiatan pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum; dan

c. dilarang kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan, dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum.

B. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi energi lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

a. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas, kegiatan penunjang sistem jaringan gas, dan kegiatan penghijauan;

b. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan

c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsin utama jaringan gas.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

b. diizinkan penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;

c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTET hanya sebagai ruang terbuka hijau;

d. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan

e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi energi lainnya, meliputi:

a. diizinkan kegiatan yang dapat mendukung pengembangan energi lainnya; dan

b. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak energi lainnya

C. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi;

b. diizinkan pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu;

c. diizinkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa provider sesuai peraturan perundang-undangan;

d. diizinkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan; dan

e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius.

D. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air, meliputi:

a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem sungai, mata air termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);

b. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;

c. diizinkan untuk pembangunan tanggul sungai;

d. diizinkan bersyarat bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang; dan

e. dilarang kegiatan yang dapat menggangu fungsi sungai, mata air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

E. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

   a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);

   b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

   c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

   d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;

   e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan

   f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase.

(2) ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM), , meliputi:

   a. diizinkan bangunan pengambilan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan; dan areal parkir;

   b. diizinkan bersyarat bangunan penunjang sistem penyediaan air minum dan kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum; dan

c. dilarang kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

(3) ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:

a. diizinkan pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah, dan ruang terbuka hijau;

b. diizinkan bersyarat pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;

c. diizinkan terbatas kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah; dan

d. dilarang kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(4) ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi;

a. diizinkan penyediaan prasarana dan sarana penyimpanan sementara, pengelolaan dan penimbusan limbah B3 sesuai dengan kentuan yang berlaku;

b. diizinkan bersyarat kegiatan pendukung pengelolaan dan penimbusan limbah B3; dan

c. dilarang kegiatan pembuangan limbah B3 pada perairan maupun daratan yang tidak memenuhi ketentuaan perundang undangan

(5) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan, meliputi:

a. diizinkan kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih *(sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, dan peruntukan khusus seperti pembangkit listrik tenaga sampah;

b. diizinkan bersyarat kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; dan

c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah.

(6) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;

b. diizinkan bersyarat kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan

c. dilarang kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.

(7) ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase, meliputi:

a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;

b. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;

c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase yang menganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase; dan

d. dilarang pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

7.2.2. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI POLA RUANG

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.

7.2.2.1. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung, meliputi:

A. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi ketentuan umum kawasan hutan lindung. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tanpa mengurangi fungsi lindung;

b. diizinkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya bagi penduduk sekitar dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

c. diizinkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

d. diizinkan pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan

e. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung, luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

B. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;

b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan waduk.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai, meliputi:

a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);

b. diizinkan penanaman tanaman hutan bakau di pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras serta aktivitas konservasi lainnya;

c. diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;

d. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;

e. diizinkan terbatas untuk pembangunan jalan umum;

f. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

g. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata, pendidikan dan penenelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung sempadan pantai;

h. dilarang kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; dan

i. dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai, meliputi:

a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem sungai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);

b. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;

c. diizinkan untuk pembangunan tanggul sungai;

d. diizinkan untuk pembangunan jalan umum;

e. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

f. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai;

g. dilarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan

h. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunan kualitas sungai.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan waduk, meliputi:

a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem waduk, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);

b. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;

c. diizinkan untuk pembangunan tanggul waduk;

d. diizinkan untuk pembangunan jalan umum;

e. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

f. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi waduk;

g. dilarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan

h. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunan kualitas waduk.

C. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Geologi

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan bentang alam geologi; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan bentang alam geologi, meliputi:

a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem bentang alam geologi, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);

b. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;

c. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi bentang alam geologi; dan

d. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunan kualitas mata air.

(3) Ketentuan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

b. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan

c. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan kawasan imbuhan air tanah.

D. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana, meliputi:

a. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

b. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

c. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;

d. diizinkan bersyarat pembangunan infrastruktur dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karasteristik bencana; dan

e. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana.

E. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya, meliputi:

a. diizinkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata;

b. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan cagar budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; dan

d. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.

F. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove, meliputi:

a. diizinkan kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;

b. diizinkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan

c. dilarang kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove, perusakan mangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan mangrove.

G. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau, meliputi:

a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan papan informasi;

b. diizinkan bersyarat kegiatan ruang evakuasi bencana; dan

c. dilarang semua kegiatan yang merusak fungsi ruang terbuka hijau.

7.2.2.2. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budiday, meliputi:

A. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi, meliputi:

a. diizinkan bersyarat aktivitas yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti pertanian tumpang sari;

b. diizinkan beryarat kegiatan pertambangan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;

c. diizinkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

d. diizinkan dengan syarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;

e. diizinkan terbatas kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;

f. diizinkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

g. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan;

h. dilarang pemanfaatan selain peruntukan hutan produksi/hutan rakyat yang berpotensi mengganggu produtivitas hasil hutan; dan

i. dilarang kegiatan eksploitasi hutan produksi/hutan rakyat yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana.

B. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan, meliputi:

a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan budidaya tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
b. diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
c. diizinkan bersyarat jaringan utilitas dan kegiatan pengolahan hasil pertanian;
d. dilarang adanya aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
e. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi atau merusak fungsi kawasan dan kualitas tanah untuk pertanian; dan
f. dilarang mengalihfungsikan KP2B untuk kegiatan di luar pertanian.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura meliputi:

a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
b. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
c. diizinkan bersyarat pembangunan jaringan prasarana utama, bangunan untuk kepentingan umum, jaringan utilitas, kegiatan pengolahan hasil hotikultura, permukiman kepadatan rendah;
d. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan meliputi:

a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan tanaman pangan, hotikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;

b. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;

c. diizinkan bersyarat pembangunan jaringan prasarana utama, bangunan untuk kepentingan umum, jaringan utilitas, kegiatan pengolahan hasil perkebunan, permukiman kepadatan rendah;

d. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan meliputi:

a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan peternakan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas;

b. diizinkan bersyarat komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan yang terpadu dengan kawasan peternakan dan berorientasi ekonomi;

c. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;

d. diizinkan bersyarat pembangunan jaringan prasarana utama, bangunan untuk kepentingan umum, jaringan utilitas, kegiatan pengolahan hasil peternakan, permukiman kepadatan rendah;

e. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi kawasan.

C. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perikanan

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan, meliputi:

a. diizinkan kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

b. diizinkan terbatas kegiatan non perikanan pada areal budidaya perikanan darat berupa pertanian dalam kondisi kering;

c. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk permukiman, peruntukan industri yang mengolah hasil perikanan, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, peternakan dan prasarana penunjang tanpa mengganggu produktivitas perikanan;

d. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan; dan

e. dilarang adanya kawasan budidaya yang mengganggu produktivitas perikanan seperti tempat pembuangan akhir, pengelolaan limbah B3.

D. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan, meliputi:

a. diizinkan kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan;

b. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk permukiman di dekat lokasi pertambangan (khusus untuk mendukung kegiatan pertambangan);

c. diizinkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertambangan dan peningkatan nilai tambah komoditas tambang;

d. dilarang kegiatan pertambangan pada kawasan kegiatan pertambangan ilegal, eksploitasi potensi alam tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perusakan lingkungan;

e. dilarang penambangan di dalam kawasan lindung;

f. dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan

g. dilarang penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman.

E. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri, meliputi:

a. diizinkan kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. diizinkan dalam kawasan peruntukan industri untuk kawasan industri, industri kecil, industri menengah dan industri besar;

c. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri berupa permukiman;

d. diizinkan bersyarat penggunaan air tanah; dan

e. dilarang membuang limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu.

F. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pariwisata

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata, meliputi:

a. diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjangnya;

b. diizinkan secara terbatas pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;

c. diizinkan bersyarat pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

d. diizinkan bersyarat pengembangan permukiman dengan syarat di luar kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

e. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata;

f. dilarang mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata; dan

g. dilarang pengembangan industri yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.

G. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman, meliputi:

a. diizinkan untuk kegiatan permukiman dan sarana dan prasarana penunjangnya, ruang terbuka hijau, jaringan utilitas, perdagangan dan jasa skala lingkungan dan pertanian;

b. diizinkan bersyarat kegiatan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, industri rumah tangga dan industri kreatif yang tidak menghasilkan limbah, gudang penyimpanan yang tidak berpolutan, fasilitas pondok wisata, akomodasi wisata non bintang, dan fasilitas pemondokan; dan

c. dilarang kegiatan industri serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan.

H. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:

a. diizinkan kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;

b. diizinkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

7.2.3. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KAWASAN STRATEGIS

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

a. diizinkan kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukungnya pada kawasan strategis ekonomi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing masing fungsi peruntukan;

b. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis ekonomi; dan

c. dilarang kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis ekonomi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing masing fungsi peruntukan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:

a. diizinkan kegiatan kegiatan yang mendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing masing fungsi peruntukan;

b. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan

c. dilarang kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing masing fungsi peruntukan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:

a. diizinkan kegiatan kegiatan yang mendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing masing fungsi peruntukan;

b. diizinkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

c. dilarang kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing masing fungsi peruntukan.

d. masing masing fungsi peruntukan.

7.3. KETENTUAN PERIZINAN

7.3.1. IZIN PEMANFAATAN RUANG

Dalam pemanfaatan ruang Bupati berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang, disertai dengan kewajiban untuk melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

setiap orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang. Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan biaya. Pengenaan biaya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan

Izin pemanfaatan ruang berupa:

a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undanganserta berdasarkan pada tata ruang.

Selain izin tersebut di ata kegiatan yang berada di kawasan pengendalian ketat provinsi wajib mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dari Gubernur. Apabila Izin Pemanfaatan Ruang telah diberikan oleh Gubernur maka Bupati tidak perlu menerbitkan izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang sama; Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pemanfaatan Ruang pada kawasan pengendalian ketat provinsi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

7.3.2. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Bupati. Pemberian izin diberikan dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian izin terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi dan/atau peraturan zonasi didasarkan pada rekomendasi TKPRD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

7.4. KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam rangka mendorong perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu diizinkan, tidak diizinkan, diizinkan bersyarat, keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Insentif yang diberikan kepada masyarakat terdiri:

1. insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
2. pemberian kompensasi;
3. imbalan;
4. penyediaan infrastruktur; dan
5. penghargaan.

insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:

1. sewa ruang;
2. penyediaan infrastruktur;
3. kemudahan prosedur perizinan; dan
4. penghargaan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat terdiri:

1. disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
   a. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
   b. pengenaan kompensasi.
2. disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
   a. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
   b. pengenaan kompensasi.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

7.5. ARAHAN SANKSI

Arahan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi:

1. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan;
2. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenai sanksi pidana dan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;
4. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan
5. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Pemberian sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.



BAB-8 HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

8.1. HAK MASYARAKAT

Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:

1. Mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
2. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
3. Memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
5. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
6. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
7. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.

Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat kabupaten dan komunitas masyarakat di kabupaten. Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak memperoleh penggantian diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.2. KEWAJIBAN MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib:

1. Mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;

3. Memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten; dan
4. Menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang. Pelaksanaan kewajiban masyarakat dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8.3. PERAN MASYARAKAT

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dengan pelibatan masyarakat, pada tahap :

1. Perencanaan tata ruang;
2. Pemanfaatan ruang; dan
3. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi :

a. Masukan mengenai:
    1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. Penetapan rencana tata ruang.
b. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi :

1. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
6. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

1. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.